

**KONSTRUKSI NILAI KEPEMIMPINAN
HASTA BRATA DALAM RUBRIK ‘SANG PAMOMONG’
PADA SURAT KABAR ‘SUARA MERDEKA’ SEMARANG**
(Studi Kasus Rubrik ‘Sang Pamomong’ pada Media Lokal
‘Suara Merdeka’ Semarang Berbasis Teori Pierre Bourdieu)

**THE CONSTRUCTION OF HASTA BRATA LEADERSHIP
VALUES IN THE RUBRIC ‘SANG PAMOMONG’
OF THE ‘SUARA MERDEKA’ NEWSPAPER, SEMARANG**
(A Case Study of the Rubric ‘Sang Pamomong’ in the Local Media
‘Suara Merdeka’, Semarang, Based on Pierre Bourdieu’s Theory)

Oleh:
Rachmi Kurnia Siregar
210130180016

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Komunikasi
Pada Universitas Padjadjaran
Dengan Wibawa Rektor Universitas Padjadjaran
Prof. dr. Arief Sjamsulaksan Kartasmita, Sp.M(K)., M.M., M.Kes., Ph.D.,
Dipertahankan pada tanggal 11 Februari 2026
Di Universitas Padjadjaran



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

**KONSTRUKSI NILAI KEPEMIMPINAN
HASTA BRATA DALAM RUBRIK 'SANG PAMOMONG'
PADA SURAT KABAR 'SUARA MERDEKA' SEMARANG**

**(Studi Kasus Rubrik 'Sang Pamomong' pada Media Lokal
'Suara Merdeka' Semarang Berbasis Teori Pierre Bourdieu)**

Oleh:

Rachmi Kurnia Siregar
210130180016

DISERTASI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Komunikasi ini,
Telah Disetujui oleh Tim Promotor
Pada Tanggal Seperti yang Tertera di Bawah Ini**

Bandung, Februari 2026

Tim Promotor



Dr. Siti Karlinah, M.Si
Ketua Tim Promotor



Prof. Dr. Dian Wardiana Sjuchro, M.Si
Anggota Promotor



Prof. Dr. Eni Marvani, M.Si
Anggota Promotor

SURAT PERNYATAAN (PROGRAM DOKTOR)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor, baik di Universitas Padjadjaran maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandung,
Yang membuat pernyataan,



Rachmi Kusuma Siregar
NPM 26130180016.

ABSTRAK

Dalam kajian media, fungsi sosial pers lazimnya dipahami secara normatif. Namun, praktik jurnalisme budaya berbasis kearifan lokal seperti halnya Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) di surat kabar ‘Suara Merdeka’ belum ada yang meneliti sebagai proses konstruksi nilai-nilai kepemimpinan tradisional. Dalam konteks tersebut, penelitian ini mengkaji konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam RSP periode 1996–2020. Penelitian ini berpijak pada paradigma konstruktivis dengan pengumpulan data melalui observasi terhadap 48 artikel, wawancara mendalam dengan 18 informan, serta analisis dokumen. Penelitian ini menggunakan analisis tematik Braun dan Clarke untuk menelusuri bagaimana konstruksi kepemimpinan ideal dibangun dan dimaknai dalam dinamika realitas sosial. Kerangka teoritis penelitian menggabungkan teori Pierre Bourdieu dengan tiga elemen kunci: habitus, modal, dan ranah dengan teori tanggung jawab sosial pers, serta teori konstruksi realitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan enam tematik RSP mencakup krisis kepemimpinan, filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*, harapan terhadap pemimpin ideal, kemenangan beretika, kaderisasi kepemimpinan, dan persepsi publik terhadap pemimpin. Tiga tematik yang berulang di setiap periodisasi yaitu krisis kepemimpinan, filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*, dan harapan terhadap pemimpin ideal. Ketiga tema ini membentuk fondasi refleksi rubrik dalam memaknai kepemimpinan sebagai persoalan nilai, harapan moral, dan krisis yang berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan adanya *gap* antara nilai luhur kepemimpinan *Hasta Brata* dan praktik kepemimpinan yang tidak menampilkan refleksi kepemimpinan ideal sejak era Presiden Soeharto hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo. RSP merupakan arena jurnalisme reflektif yang dikonstruksikan melalui relasi pengasuh, penulis internal-eksternal, dan khalayak. Dalam perspektif Bourdieu, keberlanjutan rubrik ditopang modal sosial dan ekonomi, sementara modal budaya *Hasta Brata* menjadi basis refleksi menyikapi praktik kepemimpinan kontemporer. RSP konsisten mengkonstruksi pesan moral dan kritik sosial. Kritik berbasis refleksi ini disampaikan secara halus melalui *pasemon* sebagai pola komunikasi budaya konteks tinggi. Temuan penelitian menegaskan, RSP sebagai media berbasis budaya yang berfungsi sebagai penjaga moral, ruang representasi sosial, dan pengawas sosial yang etis dan reflektif berbasis jurnalisme budaya.

Kata kunci: Rubrik ‘Sang Pamomong’, *Hasta Brata*, analisis Bourdieu, konstruksi realitas media, nilai kepemimpinan

ABSTRACT

In media studies, the social function of the press is commonly understood in normative terms. However, the practice of cultural journalism based on local wisdom, such as the Rubric 'Sang Pamomong' (RSP) in the 'Suara Merdeka' newspaper, has not been researched as a process of constructing traditional leadership values. Within this context, this study examines the construction of Hasta Brata leadership values in RSP during the period 1996–2020. This research is grounded in a constructivist paradigm, with data collected through observation of 48 articles, in-depth interviews with 18 informants, and document analysis. This study uses Braun and Clarke's thematic analysis to explore how the construction of ideal leadership is built and interpreted in socio-political dynamics. The theoretical framework integrates Pierre Bourdieu's theory- specifically the concepts of habitus, capital, and field- with social responsibility theory of the press and social construction of reality theory. The findings reveal thematic patterns in RSP that include the philosophy of Hasta Brata leadership, leadership crisis, leadership regeneration, expectations of ideal leaders, expectations of Sultan Hamengku Buwono X, ethical victory, and public perceptions of leaders. Three thematic patterns recur across all periods: the philosophy of Hasta Brata leadership, expectations of ideal leaders, and leadership crisis. These three themes constitute the reflective foundation through which the column interprets leadership as a matter of values, moral expectations, and enduring crisis. The findings indicate a gap between the noble values of Hasta Brata leadership and leadership practices that do not reflect ideal leadership from the era of President Soeharto to the administration of President Joko Widodo. RSP functions as an arena of reflective journalism constructed through the relations among column caretakers, internal and external writers, and audiences. From a Bourdieusian perspective, the sustainability of the column is supported by social and economic capital, while the cultural capital of Hasta Brata serves as the basis for reflecting on contemporary leadership practices. RSP consistently constructs moral messages and social criticism. This reflective critique is conveyed subtly through pasemon as a high-context cultural communication pattern. The findings affirm that RSP, as a culture-based medium, functions as a moral guardian, a space of social representation, and an ethical and reflective social watchdog grounded in cultural journalism.

Keywords: Rubric 'Sang Pamomong', Hasta Brata, Bourdieu's analysis, media reality construction, leadership value

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis menyampaikan terima kasih
teruntuk para leluhurku tersayang serta kedua orang tuaku tercinta:
almh. **Mama Hj. Nurhaida Pulungan** dan alm. **Ayahanda H. Mara Laut
Amin Siregar**

serta almh. **Ibunda Hj. Rochmani** dan alm. **Ayahanda H. Mudjitaba**
Doa dan keteladanan orang tua menjadi fondasi yang menguatkan langkah penulis
dalam perjalanan kehidupan.

Dengan penuh cinta dan penghargaan, penulis menyampaikan terima kasih
kepada suamiku tercinta: **Rachmansyah Mudjitaba**,

serta kedua putraku tersayang,

Ananda **Rafli Akram Kurniansyah, S.I.Kom., M.I.Kom.**,

dan Ananda **Hanif Fadhlurahman, S.Sos.**

Doa, dukungan, dan kehangatan yang senantiasa mengiringi dan mendukung
penulis selama menempuh pendidikan Doktoral
di Universitas Padjadjaran.

HORAS

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim....

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat *Allah Subhanahu Wata'ala* atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, yang keteladanannya senantiasa menjadi panutan. Rasa syukur ini menjadi landasan bagi penulis dalam memaknai seluruh proses akademik.

Berpijak dari rasa syukur tersebut, seluruh proses selama masa studi doktoral mulai dari perkuliahan, pengumpulan data, penyusunan naskah, hingga bimbingan akademik merupakan sebuah perjalanan panjang yang sarat dengan dinamika dan pembelajaran.

Perjalanan penyelesaian disertasi ini banyak dibantu dari berbagai pihak dalam lingkungan akademik dan profesional. Sehubungan hal tersebut, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

- Dr. Siti Karlinah, M.Si., selaku Ketua Promotor, yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hingga disertasi ini dapat diselesaikan. Terima kasih Ibu atas kebaikannya kepada penulis.
- Prof. Dr. Eni Maryani, M.Si., selaku Anggota Tim Promotor, atas limpahan ilmu, dorongan intelektual, serta ketersediaan waktu yang diberikan hingga

disertasi ini dapat diselesaikan. Ibu Eni sebagai dosen wali, banyak memberikan motivasi serta ruang diskusi selama masa studi di Universitas Padjadjaran. Terima kasih Ibu atas kebaikannya kepada penulis.

- Prof. Dr. Dian Wardiana Sjuchro, M.Si., selaku Anggota Tim Promotor, atas limpahan ilmu, dorongan motivatif, serta ketersediaan waktu yang diberikan dalam proses bimbingan. Terima kasih Bapak atas kebaikannya kepada penulis.
- Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D., selaku Oponen Ahli, atas keluasan ilmu, kedalaman perspektif, serta berbagai masukan yang diberikan selama proses akademik. Pengalaman perkuliahan dan diskusi yang berlangsung dalam suasana cair dan menyenangkan- dengan sentuhan humor yang reflektif. Terima kasih Bapak atas kebaikannya kepada penulis.
- Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H, M.Si., selaku Oponen Ahli, atas berbagai masukan dan pandangan konstruktif untuk menyempurnakan disertasi ini. Terima kasih Bapak atas kebaikannya kepada penulis.
- Dr. Aceng Abdullah, M.Si., selaku Oponen Ahli, atas berbagai masukan dan pandangan akademik yang konstruktif untuk menyempurnakan disertasi ini. Terima kasih Bapak atas kebaikannya kepada penulis.
- Dr. Nindi Aristi, S.Sos., M.Comn, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang memfasilitasi penulis menempuh pendidikan Doktorat di Universitas Padjadjaran. Terima kasih atas kebaikannya kepada penulis.

- Prof. dr. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, Sp.M(K)., M.M., M.Kes., Ph.D., selaku Rektor Universitas Padjadjaran
- S. Kunto Adi Wibowo, M.Comn, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang memfasilitasi penulis menempuh pendidikan Doktoral di Universitas Padjadjaran. Sebelumnya Dr. Dadang Sugiana, M.Si selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang memfasilitasi penulis menempuh pendidikan Doktoral di Universitas Padjadjaran. Terima kasih atas kebaikannya kepada penulis.
- Dosen-dosen yang mengajar selama penulis menempuh kuliah di Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yaitu: Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D., Dr. Aceng Abdullah, M.Si, Prof Dr. Mien Hidayat, M.Si, Dr. Agus Rahmat, M.Pd, Prof. Dr. Jenny Ratna Suminar, M.Si., Dr. Hanny Hafiar, M.Si., dan Dr. Henny Sri Mulyani, M.Si. Terima kasih atas kebaikannya kepada penulis.
- Staf Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bapak Edi Sumardi, Bapak Kurnia Hartono, dan Ibu Neni Sri Mulyani. Sebelumnya Bapak Yudi, Ibu Rini, dan Bapak Herman atas dukungan dan bantuan, yang diberikan hingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih atas kebaikannya kepada penulis.
- Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh guru dan pendidik yang membimbing penulis sejak masa taman kanak-kanak hingga

program Doktorat. Perhatian, kesabaran, dan keteladanan yang diberikan di setiap tahap pendidikan menjadi bekal berharga yang mengantarkan penulis hingga pada titik ini.

- Keluarga besar penulis: Alm. Ir. H. Ardi Marantjar Siregar dan keluarga, Amir Pardamean Siregar dan keluarga, Hj. Sri Fachrida Siregar, S.E., dan keluarga, Hj. Sofia Mora Aryani Siregar, M.M., dan keluarga, Almh Dra. Fitri Ratnawaty Siregar dan keluarga, Bakkit Martua Siregar, S.H., dan keluarga, Alm. Ir. H. Surya Parlindungan Siregar, MBA dan keluarga, H. Awaluddin Djalil Siregar, S.E., dan keluarga. Serta keluarga besar suami: Almh. Hj Nani Mulyani Mudjitaba dan keluarga, Alm. H. Ramli Mudjitaba dan keluarga, Alm. H. Ramlan Mudjitaba dan keluarga, Rahmat Mudjitaba, S.Sos., dan keluarga, Alm. Rosyid Mudjitaba dan keluarga, Hj. Tati Mulyati Mudjitaba dan keluarga, Rustam Effendi Mudjitaba dan keluarga, serta Ir. H. Hidayat Mudjitaba dan keluarga. Serta kaum kerabat lainnya atas doa, semangat, dan cinta kasih yang senantiasa mengiringi dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan Doktorat di Universitas Padjadjaran. Terima kasih atas kebaikannya kepada penulis.
- Ketua Yayasan Budi Luhur Cakti, Drs. Djaetun HS, dan Ketua Harian Yayasan Budi Luhur Cakti, Kasih Hanggoro, MBA, serta Direktur Keuangan Budi Luhur, Widodo, MS, S.Kom. Terima kasih atas kebaikannya kepada penulis.

- Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc. selaku Rektor Universitas Budi Luhur yang selalu mendukung penulis dalam menempuh pendidikan Doktorat di Universitas Padjadjaran. Terima kasih atas kebaikannya kepada penulis.
- Prof. Dr. Prudensius Maring, M.A., selaku Direktur DRPM Universitas Budi Luhur yang terus memotivasi penulis selama menempuh pendidikan Doktorat di Universitas Padjadjaran. Terima kasih atas kebaikannya kepada penulis.
- Dr. Rocky Prasetyo Jati, M.Si., selaku Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif (FKDK) Universitas Budi Luhur yang mendukung dan memotivasi penulis dalam menempuh pendidikan Doktorat di Universitas Padjadjaran. Terima kasih atas kebaikannya kepada penulis.
- Artyasto Jatisidi, M.I.Kom selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif (FKDK) Universitas Budi Luhur yang mendukung dan memotivasi penulis dalam menempuh pendidikan Doktorat di Universitas Padjadjaran. Terima kasih atas kebaikannya kepada penulis.
- Dr. Nawiroh Vera, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur pada periode sebelumnya, atas motivasi, arahan, serta berbagai saran dan masukan bermakna yang senantiasa diberikan hingga disertasi ini dapat diselesaikan. Terima kasih atas kebaikannya kepada penulis.
- Rekan dan teman-teman dosen FKDK Universitas Budi Luhur di antaranya Prof. Dr. Umaimah Wahid, M.Si., Prof. Dr. Dudi Iskandar, M.I.Kom., Dr.

Hj. Indah Suryawati, M.Si, Harningsih, M.I.Kom., Dr. Riyodina G. Pratikno, Anggun Putri Dewangi, M.I.Kom, Made Doddy Wihardi, M.I.Kom, Laksmi Rachmaria, M.I.Kom, Dr. Bambang Pujiyono, Dr. Ahmad Thoni, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan dan diskusi yang membangun dalam menyelesaikan disertasi ini.

- Jajaran redaksi surat kabar ‘Suara Merdeka’ dan pihak manajemen atas kesediaan waktunya bagi penulis untuk melakukan wawancara. Khususnya Bapak Gunawan Permadi, Bapak Triyanto Triwikromo, Bapak Hendro Basuki, Bapak Dr. Bambang Sadono, Bapak Saroni Asikin, Bapak Gunawan Budi Susanto, Ibu Dr. Syamsiah Lestari, Bapak Setiawan Hendra Kelana, Bapak Muh. Eko Fitrianto, Bapak Yolanda, Bapak Agus Sutoto, alm Bapak Prio Santoso. Bapak Dadang Wibowo selaku Kepala Pusat Dokumentasi ‘Suara Merdeka’ dan tim Ibu Lestari Utami. Terima kasih atas kebaikannya kepada penulis.
- Sahabatku Sulistiani dan keluarga. Terima kasih atas kebaikannya kepada penulis.
- Rekan- rekan di ‘*Gank B is the best*’ program Doktoral angkatan 2018. Terima kasih atas dukungan, atensi dan kebaikannya kepada penulis.
- Prof. Dr. Mudjahirin Tohir-Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Dr Widodo Wikandana-Dosen dari Universitas Negeri Semarang, serta Aris Mulyawan-Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) cabang Semarang-Jawa Tengah- yang meluangkan waktunya untuk

memberikan informasi terkait disertasi penulis. Terima kasih atas kebaikannya kepada penulis.

- Bapak Dr. Udi Rusadi, M.Si., Dr. Basuki Agus Suparno, M.Si., Prof. Dr. Irwan Abdullah, Assoc. Prof. Dr. Drs. Soehardjoepri, M.Si, Dr. Muhammad Anshar Akil, S.T., M.Si. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebaikannya kepada penulis.
- Bapak Ari dan Tim di Perpustakaan Medan Merdeka Selatan, serta Ibu Atika dan Tim di Perpustakaan Salemba, Jakarta yang banyak membantu penulis untuk mendapatkan artikel-artikel Rubrik ‘Sang Pamomong’. Terima kasih atas kebaikannya kepada penulis.
- Seluruh pihak yang turut berkontribusi dan mendukung proses perkuliahan hingga tahap penyelesaian disertasi ini, yang belum dapat disebutkan satu per satu dalam kata pengantar ini, penulis menyampaikan permohonan maaf.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan limpahan pahala dan dicatat sebagai amal ibadah oleh *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*. *Aamiin Allahumma Aamiin*.

Dengan demikian, penulis menyadari disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*. Untuk itu, penulis berharap saran dan kritik dari berbagai pihak untuk menyempurnakan disertasi ini. Penulis berharap kiranya disertasi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan. *Aamiin Allahumma Aamiin. Barakallah.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	15
1.2.1 Pertanyaan Penelitian.....	15
1.2.2 Tujuan Penelitian.....	15
1.3 Manfaat Penelitian.....	16
1.3.1 Manfaat Teoritis.....	16
1.3.2 Manfaat Praktis.....	16
1.4 Kajian Literatur	17
1.4.1 Review Penelitian Terdahulu yang Sejenis.....	17
1.4.2 Landasan Teoritis.....	46
1.4.2.1 Teori Pierre Bourdieu	46
1.4.2.2 Teori Tanggung Jawab Sosial.....	58
1.4.2.3 Teori Konstruksi Realitas Sosial	61
1.4.3 Landasan Konseptual.....	63
1.4.3.1 Konstruksi Nilai	63
1.4.3.2 Kepemimpinan <i>Hasta Brata</i>	65
1.4.3.3 Rubrik dan Artikel	67
1.4.3.4 Ideologi Media	68
1.4.3.5 Jurnalisme Budaya	70
1.4.3.6 Pesan dalam Media	72
1.5 Kerangka Pemikiran	74
1.6 Metodologi Penelitian	76
1.6.1 Paradigma Penelitian	76
1.6.2 Metode Penelitian.....	79

1.6.3 Unit Observasi dan Unit Analisis.....	80
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data.....	80
1.6.5 Teknik Analisis Data.....	82
1.6.6 Teknik Validasi Data.....	85
1.6.7 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	85
BAB II PROFIL SURAT KABAR ‘SUARA MERDEKA’	
DAN RUBRIK ‘SANG PAMOMONG’ (RSP)	87
2.1 Profil Harian ‘Suara Merdeka’	87
2.1.1 Ideologi ‘Suara Merdeka’	90
2.1.2 ‘Suara Merdeka’ sebagai Institusi Sosial-Budaya.....	91
2.2 Profil Rubrik ‘Sang Pamomong’	92
2.2.1 Ideologi Rubrik	93
2.2.2 Penulis dan Kontributor	94
2.2.3 Periodisasi Rubrik	95
BAB III ANALISIS TEMATIK RUBRIK ‘SANG PAMOMONG’	97
3.1 Analisis Tematik Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) Berbasis Periodisasi ...	97
3.1.1 Analisis Tematik RSP Periodisasi 1996-1998	98
3.1.2 Analisis Tematik RSP Periodisasi 1999-Februari 2000	109
3.1.3 Analisis Tematik RSP Periodisasi Maret 2000-2010	112
3.1.4 Analisis Tematik RSP Periodisasi 2011-2020	125
3.1.5 Analisis Tematik RSP Periodisasi 1996-2020	141
3.2 Konstruksi RSP: Diabaikannya Nilai <i>Hasta Brata</i> dalam Budaya Jawa	153
BAB IV PRODUKSI RUBRIK ‘SANG PAMOMONG’	162
4.1 Produksi Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) Berbasis Periodisasi	162
4.1.1 Produksi RSP Periodisasi 1996-1998	162
4.1.2 Produksi RSP Periodisasi 1999-Februari 2000	183
4.1.3 Produksi RSP Periodisasi Maret 2000-2010	186
4.1.4 Produksi RSP Periodisasi 2011-2020	206
4.1.5 Produksi RSP Periodisasi 1996-2020	227
4.2 Habitus Aktor dalam Produksi RSP	232
BAB V FUNGSI SOSIAL RUBRIK ‘SANG PAMOMONG’ (RSP)	240
5.1 Fungsi Sosial RSP Berbasis Periodisasi	240
5.1.1 Fungsi Sosial RSP Periodisasi 1996-1998	240
5.1.2 Fungsi Sosial RSP Periodisasi 1999-Februari 2000	243
5.1.3 Fungsi Sosial RSP Periodisasi Maret 2000-2010	245
5.1.4 Fungsi Sosial RSP Periodisasi 2011-2020	249
5.1.5 Fungsi Sosial RSP Periodisasi 1996-2020	253

5.2 Fungsi Sosial RSP sebagai Kesadaran Refleksi Kolektif Jurnalis	260
5.3 Fungsi Sosial Jurnalisme <i>Pamomong</i> sebagai Bentuk Konstruksi Nilai- Nilai Kultural dan Praktik Sosial Terkait Kepemimpinan	268
5.4 <i>Quo Vadis</i> RSP: Tantangan dan Peluang di Era Kontemporer	281

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN.....297

6.1 Simpulan	297
6.2 Saran.....	300
6.2.1 Saran Teoritis.....	300
6.2.2 Saran Praktis.....	301

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	<i>Review Penelitian Terdahulu yang Sejenis.....</i>	33
Tabel 1.2	Karakteristik Informan dari Redaksi	81
Tabel 1.3	Karakteristik Informan dari non-Redaksi	81
Tabel 1.4	Karakteristik Informan dari Pihak Eksternal	82
Tabel 1.5	Jadwal Penelitian Disertasi	86
Tabel 3.1	Artikel RSP Periodisasi 1996-1998	107
Tabel 3.2	Artikel RSP Periodisasi 2000-2010.....	122
Tabel 3.3	Artikel RSP Periodisasi 2011-2020	138
Tabel 3.4	Metafora <i>Hasta Brata</i> dalam RSP 1996-2020	156
Tabel 4.1	Produksi RSP (1996-2020)	231

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran	75
Gambar 3.1 Tematik RSP Periodisasi 1996-1998	108
Gambar 3.2 Tematik RSP Periodisasi 2000-2010	123
Gambar 3.3 Tematik RSP Periodisasi 2011-2020	140
Gambar 3.4 Tematik RSP Periodisasi 1996-202.....	151
Gambar 3.5 Simbolisasi Metafora <i>Hasta Brata</i> dalam RSP 1996-2020.....	157
Gambar 4.1 Habitus, Modal, dan Ranah dalam Produksi RSP 1996-2020 ...	238
Gambar 5.1 Implementasi Fungsi Sosial RSP 1996-2020	253
Gambar 5.2 Model Konstruksi Kepemimpinan dalam RSP	275
Gambar 5.3 Implementasi Konstruksi Kepemimpinan <i>Hasta Brata</i> dalam RSP 1996-2020	280

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pers tidak semata-mata sebagai institusi penyampai informasi faktual, melainkan sebagai ruang sosial tempat nilai, norma, dan orientasi etik diproduksi dan disebarluaskan (McQuail, 2010; Schudson, 2003). Dalam praktik jurnalistik, media berperan membentuk cara pandang publik terhadap realitas sosial melalui seleksi isu, sudut pandang, serta kerangka nilai yang dihadirkan dalam teks. Oleh karena itu, media tidak hanya menyajikan informasi seputar peristiwa, tetapi juga menyampaikan pesan maupun refleksi normatif yang berkaitan dengan kehidupan bersama (Carey, 2009). Dalam konteks ini, media sebagai ruang simbolik yang mengartikulasikan nilai, meneguhkan norma sosial, serta membentuk orientasi etis publik melalui praktik komunikasi yang berulang dan kontekstual.

Sejalan dengan perspektif tersebut, rubrik dalam konteks jurnalistik menjadi medium penting bagi media untuk menyampaikan pesan-pesan yang bersifat reflektif dan evaluatif melalui wadah opini ataupun editorial (Soysal, 2025). Sejumlah rubrik dirancang untuk mengartikulasikan nilai, menafsirkan realitas sosial, serta menawarkan orientasi etik kepada pembaca. Rubrik semacam ini berperan dalam membentuk pemahaman publik mengenai persoalan-persoalan mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat maupun dinamika sosial-politik bangsa.

Surat kabar ‘Suara Merdeka’ misalnya, melalui Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) sejak terbit perdana pada 21 November 1996 menghadirkan refleksi dari beragam persoalan kehidupan masyarakat dan bangsa. Refleksi tersebut mencakup aspek sosial, politik, budaya, ritual keagamaan, ekonomi, pendidikan, lingkungan, hingga seni tradisi. Dalam kerangka ini, RSP tidak sekadar menyajikan informasi budaya. Rubrik ini sebagai wahana artikulasi nilai, pengetahuan kolektif, dan pandangan hidup dalam konteks sosial tertentu. Sejak awal kehadirannya, rubrik ini tidak diposisikan sebagai ruang pelaporan peristiwa aktual, melainkan sebagai ruang reflektif yang menafsirkan realitas sosial secara kultural.

Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) secara historis terbit dalam rentang waktu yang panjang, yakni sejak 1996 hingga 2020. Periode ini mencakup perubahan sosial-politik yang signifikan di Indonesia, mulai dari akhir Orde Baru, masa transisi reformasi, hingga fase konsolidasi demokrasi.

Menariknya, RSP juga intens menghadirkan refleksi yang mengandung artikulasi nilai dan pandangan normatif mengenai kepemimpinan dengan merujuk pada nilai-nilai budaya Jawa, di antaranya prinsip *Hasta Brata*. Kepemimpinan dalam konteks ini diposisikan sebagai persoalan etika, keteladanan, tanggung jawab sosial, serta relasi antara pemimpin dan masyarakat. Itu sebabnya dalam RSP, kepemimpinan tidak direduksi menjadi persoalan teknis-administratif, melainkan dipahami sebagai praktik sosial yang sarat nilai dan konsekuensi moral.

Prinsip *Hasta Brata* merupakan ajaran kepemimpinan dalam tradisi Jawa yang menekankan sifat-sifat ideal pemimpin melalui metafora unsur alam seperti matahari, bulan, bintang, langit, angin, bumi, api, dan air (Bratawijaya, 1997).

Nilai-nilai tersebut mengajarkan kebijaksanaan, kasih sayang, keadilan, kesabaran, serta pengabdian yang tulus berlandaskan *welas asih* sebagai fondasi kepemimpinan ideal. RSP menerapkan ajaran leluhur *Hasta Brata* sebagai kerangka normatif untuk memahami dan menyikapi praktik kepemimpinan dalam konteks realitas sosial kontemporer.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menekankan fokus pada tema yang berelasi dengan kepemimpinan. Hal ini mengingat spektrum tema yang diangkat RSP sangat luas sehingga kajian terhadap seluruh topik hanya menghasilkan pemetaan deskriptif yang kurang mendalam. Fokus tersebut menjadi landasan untuk mengidentifikasi tema-tema dan konstruksi nilai kepemimpinan secara lebih sistematis dan terarah melalui analisis tematik. Dalam kerangka ini, penelitian menelusuri konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam praktik sosial yang terus berubah.

Dalam praktik jurnalistik RSP, nilai-nilai *Hasta Brata* diartikulasikan melalui narasi yang mengandung pesan moral dan kritik sosial. Pesan tersebut tidak selalu disampaikan secara eksplisit melainkan melalui refleksi, perbandingan, dan evaluasi terhadap perilaku pemimpin serta dinamika sosial yang melingkupinya. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa RSP berfungsi sebagai wahana jurnalistik yang mengedepankan refleksi etik dan kritik sosial yang bersifat kultural.

Sementara itu, perubahan sosial dan politik Indonesia sepanjang periode 1996–2020 memberikan konteks penting bagi rubrik ini. Pada masa akhir Orde Baru, kritik terhadap kekuasaan disampaikan secara hati-hati melalui simbol, metafora, *pasemon*, dan rujukan budaya. Memasuki era reformasi, ruang publik

mengalami keterbukaan yang lebih luas, namun persoalan kepemimpinan tetap menjadi isu sentral berbasis refleksi moral. Dalam konteks ini, RSP tampil sebagai ruang jurnalistik yang menjaga kontinuitas pesan etik di tengah perubahan struktur kekuasaan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, RSP dipilih sebagai fokus penelitian dengan batasan periode terbit 1996–2020 yang dibagi ke dalam empat periodisasi sebagai berikut: (1) periodisasi 1996-1998 yang merupakan Era Represif Orde Baru-Awal Reformasi; (2) periode jeda yaitu 1999-2000; (3) periodisasi 2000-2010 yang merupakan Era Pascareformasi dan Transisi kepemimpinan nasional (tiga presiden); serta (4) periodisasi 2011-2020 sebagai periode kontemporer yang merupakan Era Disrupsi Digital-Dinasti Politik-Awal Pandemi Covid-19. Pembatasan periodisasi ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan keberlanjutan RSP setelah 2020, melainkan sebagai strategi analitis untuk memetakan perjalanan rubrik secara utuh, mulai dari periode awal, penguatan posisi, hingga proses adaptasi terhadap perubahan konteks sosial dan struktural media.

Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) pada periodisasi awal 1996–1998, hadir sebagai suplemen yang terbit setiap Kamis. Rubrik ini sempat disajikan dalam empat halaman, dua di antaranya *full colour*, sebelum menyusut menjadi dua halaman pada edisi 1998. Sejak periode awal, setiap edisi RSP menampilkan satu tulisan utama atau *headline*. Dor (2003) menjelaskan bahwa *headline* merupakan tulisan utama yang menonjolkan isu paling penting pada suatu waktu, membantu pembaca memahami makna peristiwa, serta mencerminkan keputusan redaksi dalam menyusun prioritas dan arah pemahaman publik.

Rubrik ini pada periode perdana, terbit dalam masa transisi dari era Orde Baru menuju era Reformasi, ketika kebebasan pers dikekang. Rezim Soeharto memberlakukan kebijakan yang bersifat preventif dan represif, termasuk praktik pembredelan media (Imron et al., 2016; Suwirta, 2018). Kondisi ini mendorong RSP mengembangkan artikulasi kritik yang tidak konfrontatif, melainkan berlapis simbol budaya Jawa sebagai bentuk negosiasi terhadap rezim kekuasaan.

Kehadiran RSP di tengah pembaca diawali melalui liputan utama edisi Kamis (21/11/1996) yang ditempatkan sebagai *headline* berisi lima kolom di bagian kanan atas halaman. Tulisan ini memuat wawancara pengasuh rubrik, Bambang Sadono dan Hendro Basuki dengan Harmoko, Menteri Penerangan sekaligus Ketua DPR/MPR saat itu, dengan judul “Jangan Seperti Katak dalam Tempurung!”. Di halaman yang sama, dua tulisan pendukung turut disajikan. Identitas rubrik ditandai dengan nama *Sang Pamomong* disertai ilustrasi tokoh Semar, figur punakawan dalam pewayangan Jawa yang dikenal bijak, humoris, dekat dengan rakyat, dan kerap menjadi suara nurani masyarakat.

Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) tidak terbit pada periode 1999–2000 seiring dampak krisis moneter dan pascareformasi yang memengaruhi operasional ‘Suara Merdeka’. Kendati demikian, periode ini tetap diperhitungkan dalam analisis untuk menjaga kesinambungan konteks historis dan sosial rubrik, serta memahami dinamika transisi nilai kepemimpinan *Hasta Brata*.

Rubrik memasuki periodisasi 2000-2010 mengalami sejumlah perubahan penting. Sejak Maret 2002, RSP hadir dalam format bilingual, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Penelitian ini memusatkan analisis pada versi bahasa

Indonesia untuk kepentingan analisis tematik. Pada periode ini pula, RSP tidak lagi menjadi suplemen, melainkan menyatu dengan edisi Minggu dan terbit rutin setiap akhir pekan. Rubrik disajikan dalam satu halaman yang memuat tiga tulisan, yakni *headline*, kolom *Pringgitan*, dan tulisan lepas di kolom *Blencong*.

Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) di periode ketiga berlangsung dalam atmosfer pascareformasi yang ditandai oleh euforia kebebasan pers. Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan (Arnus, 2015), sementara sebelumnya Presiden B.J. Habibie menghapus SIUPP dan menerbitkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (Anom & Waluyo, 2011). Periode ini paralel dengan masa transisi kepemimpinan nasional dari Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang turut membentuk dinamika relasi antara pers dan kekuasaan (Andani & Birsyada, 2024). Konteks politik dan regulasi tersebut menjadi latar struktural yang memengaruhi arah dan karakter praktik jurnalistik pada periode ini.

Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) periodisasi 2011-2020, ditandai oleh konsistensi terbit mingguan, format satu halaman hitam-putih dengan tiga tulisan, serta berlangsung di tengah disrupsi media dan awal pandemi Covid-19. Periode ini merupakan akhir pemerintahan SBY dan memasuki periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Saat Jokowi berkuasa inilah, demokrasi dan independensi pers kembali terhambat, media mengalami tekanan hukum dan intervensi politik, pers kesulitan menjaga kredibilitas informasi (Restendy et al., 2025). Tekanan tersebut menempatkan RSP dalam arena jurnalistik yang semakin kompetitif dan

terpolarisasi, sehingga praktik produksi menuntut peneguhan nilai simbolik dan legitimasi moral.

Rubrik ini mengalami dinamika perubahan konteks dalam rentang 1996–2020 yang tercermin dalam pergeseran tema dan gaya *headline*. Merujuk pada Dor (2003), *headline* dalam RSP sebagai ruang strategis redaksi dalam menata prioritas makna, menyampaikan nilai, serta membentuk arah pemahaman pembaca terhadap isu-isu sosial yang berkembang. Pengasuh rubrik memprioritaskan isu ataupun tema-tema yang dianggap paling penting dan paling menarik dalam sepekan terakhir. Isu atau tema yang dipilih selanjutnya dikonstruksi melalui ajaran *Hasta Brata* dengan memanfaatkan simbol, bahasa, dan narasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat Jawa. Nilai kepemimpinan *Hasta Brata* oleh redaksi ‘Suara Merdeka’ tidak dihadirkan sebagai doktrin normatif yang kaku, melainkan sebagai refleksi kontekstual yang terhubung dengan isu-isu aktual dan dinamika sosial.

Hal ini sejalan dengan penelitian Haryono et al., (2025) bahwa media lokal tidak sekadar dipahami sebagai saluran distribusi informasi. Lebih dari itu, media lokal sebagai ruang kultural yang berperan dalam membangun makna, menyampaikan nilai-nilai lokal secara kontekstual, serta merefleksikan pengalaman sosial masyarakat.

Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) menempatkan nilai *Hasta Brata* sebagai rujukan etis untuk mengingatkan praktik kepemimpinan modern yang kerap mengalami distorsi arah. Sejumlah penelitian menunjukkan kepemimpinan kontemporer semakin menjauh dari prinsip moral dan etika, ditandai oleh lemahnya integritas, maraknya pengingkaran janji politik, serta menguatnya praktik korupsi

yang merusak kepercayaan publik (Setiawan & Taufik, 2022; Manara et al., 2020; Ilham, 2022). Ronnie (2024) menegaskan kecenderungan munculnya pemimpin berkarakter otoriter, manipulatif, populis, dan egoistis (*toxic leader*) yang berdampak negatif terhadap kelangsungan pembangunan.

Uniknya, meskipun *Hasta Brata* merupakan warisan nilai leluhur, sejumlah kajian menunjukkan ajaran ini tetap relevan dalam konteks kepemimpinan kontemporer. Studi kuantitatif oleh Suyono (2023) serta penelitian Selvarajah & Meyer (2017) membuktikan nilai kepemimpinan *Hasta Brata* bersifat adaptif dan mampu menjawab tantangan kepemimpinan modern. Temuan ini menguatkan posisi *Hasta Brata* bukan sekadar sebagai artefak budaya, melainkan sebagai sumber nilai yang terus hidup dan dapat dimaknai ulang sesuai dengan konteks zaman.

Untuk mengeksplorasi konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam RSP, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Mulyana, 2018) sehingga dapat mengeksplorasi fenomena ini secara komprehensif dan holistik. Penelitian ini didukung dengan paradigma konstruktivis yang menekankan bahwa makna dibangun melalui interaksi antara peneliti, subjek, dan konteks sosial (Denzin & Lincoln, 2009). Dalam kerangka ini, data tidak diperlakukan sebagai entitas yang netral, melainkan sebagai sumber makna yang ditafsirkan secara reflektif. Dengan kata lain, pesan jurnalistik dipandang sebagai hasil konstruksi media terhadap realitas kepemimpinan, bukan sebagai refleksi objektif yang netral. ‘Suara Merdeka’ melalui RSP mengkonstruksi praktik kepemimpinan melalui rujukan nilai budaya dan etik.

Penelitian ini secara metodologis menggunakan analisis tematik sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006, 2012) untuk mengidentifikasi tema dalam 48 artikel RSP yang dipilih secara purposif. Analisis tematik digunakan untuk menelusuri bagaimana pesan moral dan kritik sosial tentang kepemimpinan diorganisasikan dalam bentuk tematik yang berulang. Analisis tematik tersebut dipahami sebagai cara jurnalistik dalam menyusun dan menyampaikan pesan kepada publik.

Pemilihan 48 artikel dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi isi artikel terhadap tema kepemimpinan dan nilai *Hasta Brata*. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konstruksi pesan jurnalistik dalam RSP. Prinsipnya, kekuatan riset ini terletak pada kedalaman analisis, bukan pada keluasan jumlah data.

Disertasi ini dilengkapi dengan wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap internal redaksi, pengasuh rubrik, dan pihak-pihak yang berkompeten, serta analisis dokumentasi. Data tersebut digunakan untuk menelaah nilai *Hasta Brata*, menelusuri bagaimana dan mengapa nilai tersebut diwujudkan melalui praktik jurnalistik dalam nuansa etos jurnalistik RSP di ‘Suara Merdeka’.

Penelitian ini tidak hanya menganalisis tematik isi rubrik, tetapi juga mengkaji proses produksi RSP dengan menggunakan teori Bourdieu (1998) dalam kerangka konstruktivis. Teori tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana rubrik diproduksi melalui relasi antara habitus jurnalis, modal yang dimiliki, serta struktur ranah jurnalistik pada ‘Suara Merdeka’ beroperasi. Pendekatan ini menjadi

pijakan penelitian untuk mengungkap produksi pesan jurnalistik sebagai hasil interaksi antara agen dan struktur.

Riset ini juga mengaitkan pesan dan produksi rubrik dengan fungsi sosial pers melalui teori tanggung jawab sosial pers sebagaimana dirumuskan oleh Siebert dkk. dan dikembangkan oleh McQuail (2010). Dalam kerangka tersebut, RSP menjalankan kebebasan pers secara etis melalui beragam fungsi sosial yang saling berkelindan dalam praktik jurnalistiknya (Walden, 2016; Sen, 2021; Coe, 2023).

Kebebasan pers menuntut pelaksanaan tanggung jawab kepada publik (Dunne, 2017). Dalam praktiknya, fungsi sosial ‘Suara Merdeka’ melalui RSP sejalan dengan pandangan Dominick sebagaimana dikutip Karlinah et al. (2007). Dominick menekankan fungsi media massa sebagai pengawas, penafsir peristiwa penting, pembangun keterkaitan sosial, dan penyedia hiburan. RSP menjalankan fungsi-fungsi tersebut melalui pendekatan kultural yang reflektif dan simbolik.

Dalam menjalankan fungsi sosial tersebut, RSP menunjukkan praktik yang “melawan arus” di tengah dominasi *market-driven journalism* dalam ekosistem media yang semakin berorientasi pada profit (Rianto, 2005; McManus dalam Kurpius, 2003). Kondisi ini menjadi semakin kompleks seiring dampak disrupsi media digital yang memengaruhi kebiasaan konsumsi media, penurunan oplah, dan pendapatan iklan (Leurdijk et al., 2014; Franklin, 1988; Wahl-Jorgensen et al., 2016). Dalam konteks tersebut, keberlanjutan RSP sebagai pilihan kultural dan ideologis terkait komitmen terhadap fungsi pers sebagai ruang refleksi sosial dan kritik moral.

Keberlanjutan RSP ini berlangsung dalam suasana krisis media cetak. Data Serikat Perusahaan Pers (SPS) tahun 2022 menunjukkan krisis media cetak menyebabkan ratusan media bangkrut, sementara media lokal yang bertahan harus melakukan efisiensi, pengurangan karyawan, dan migrasi ke ranah digital (Nielsen, 2015; Simons & Dickson, 2017). Padahal, media lokal tetap memiliki peran strategis dalam mengangkat isu kewilayahan yang kerap terabaikan media nasional (Maryani et al., 2018). Dalam konteks ini, keberlangsungan media lokal tidak hanya ditentukan oleh kemampuan beradaptasi secara teknologi, tetapi juga oleh kapasitasnya mempertahankan kedekatan kultural dan relevansi sosial dengan komunitas pembacanya.

‘Suara Merdeka’ mempertahankan RSP di tengah tekanan struktural industri media, sehingga praktik tersebut menjadi fenomena yang signifikan. Ketika banyak media lokal menghapus rubrik budaya, rubrik ini tetap hadir sebagai ruang refleksi kultural. Fenomena ini menunjukkan bahwa rubrik budaya masih memiliki posisi penting dalam menjaga keberlanjutan nilai dan identitas lokal.

Penulis menelusuri hanya sedikit surat kabar lokal yang masih menyediakan ruang khusus bagi konten budaya Jawa, itupun dengan berbagai keterbatasan. Harian Solo Pos, misalnya, masih memuat rubrik komedi berbahasa Jawa ‘Ah-Tenane’, sementara Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta) mempertahankan rubrik pewayangan ‘Mekar Sari’. Namun, seiring penurunan oplah dan pendapatan iklan, halaman rubrik ‘Mekar Sari’ mengalami pengurangan signifikan, dari dua halaman menjadi satu halaman.

Kondisi serupa terjadi pada harian ‘Jawa Pos’ di Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, koran ini memiliki rubrik khusus budaya lokal bertajuk ‘Jawa Timur’. Akan tetapi, rubrik tersebut kemudian dihapus dan digantikan dengan rubrik ‘Saujana’ yang memuat artikel sastra dan resensi buku dalam satu halaman. Perubahan ini menunjukkan bahwa ruang bagi konten budaya lokal di media cetak kian menyempit dan rentan tergerus oleh pertimbangan efisiensi redaksional serta orientasi pasar.

Fenomena pada ‘Jawa Pos’ tersebut mencerminkan kecenderungan yang lebih luas dalam praktik pers di Indonesia, yakni semakin terbatasnya ruang ekspresi budaya lokal pada lingkup media cetak. Sen dan Hill (2001) dalam risetnya menyimpulkan bahwa semakin berkurangnya rubrik budaya di media lokal menegaskan konten budaya daerah belum menjadi prioritas dalam kebijakan redaksional. Keduanya berargumen bahwa dominasi budaya Jawa dalam industri kebudayaan Indonesia tidak sepenuhnya tercermin dalam praktik media. Meskipun banyak pekerja media berasal dari latar budaya Jawa, ekspresi bahasa dan kesenian Jawa justru jarang dihadirkan dalam pemberitaan. Akibatnya, budaya Jawa seperti halnya budaya daerah lain, minim diakomodasi oleh pers, kecuali pada media tertentu seperti radio yang relatif masih menyediakan ruang bagi bahasa daerah dan kesenian tradisional.

Dikaitkan peran media lokal menurut Muktiyo (2011) bahwa media lokal sejatinya memiliki peran penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya, termasuk budaya Jawa, dengan menyediakan konten yang dekat dengan kehidupan masyarakat setempat. Namun, dalam praktiknya, media yang mempublikasikan

konten budaya lokal sering kali terjebak pada orientasi komersial atau komodifikasi budaya (Muktiyo, 2011; Hidayat, 2012). Budaya justru diposisikan sebagai daya tarik pasar, bukan sebagai ruang refleksi nilai yang berkelanjutan.

Bertolak dari kondisi tersebut, ruang redaksi merupakan arena produksi konten budaya yang sarat dengan tarik-menarik kepentingan. Dalam ruang ini, produksi rubrik budaya berlangsung di bawah tekanan beragam kepentingan, mulai dari kepentingan publik, kepentingan lokal, hingga kepentingan bisnis media agar tetap bertahan (Sudibyo, 2009; Shoemaker & Reese, 1996, 2014). Oleh karena itu, ruang redaksi merupakan ‘ruang panas’ tempat negosiasi makna dan kebijakan berlangsung secara terus-menerus.

Tekanan terhadap ruang redaksi tersebut semakin menguat seiring dengan perubahan lanskap media ke arah digital. Media massa dalam lanskap digital cenderung memprioritaskan isu-isu yang sensasional, cepat, dan kontroversial, seperti politik, ekonomi, hukum, dan kriminalitas (Sen, 2021). Dalam ekosistem digital sebagaimana dijelaskan Anderson (2012), praktik jurnalistik semakin bergantung pada indikator kuantitatif seperti klik, *page views*, dan *traffic report*. Kondisi ini tentu saja memengaruhi preferensi redaksi dalam menentukan isu yang dianggap layak diberitakan dan bernilai ekonomis bagi pengiklan.

Preferensi redaksional yang berorientasi pada capaian kuantitatif tersebut berimplikasi langsung pada menyempitnya ruang pemberitaan budaya. Kondisi tersebut berdampak pada semakin terbatasnya ruang yang menampung isu budaya dibandingkan isu politik, ekonomi, atau hukum (Heikkilä & Lauronen, 2018; Kersten & Janssen, 2017; Biernacka-Ligieza, 2013; Nahak, 2018). Keterbatasan ini

juga dipicu oleh rendahnya minat wartawan terhadap liputan budaya (Hanusch, 2013). Chika & Ugochi (2016) prihatin lantaran media cenderung menempatkan isu budaya hanya dalam konteks peristiwa tertentu, bukan sebagai liputan yang bersifat rutin dan berkelanjutan.

Dalam konteks menyempitnya ruang pemberitaan budaya tersebut, keberlanjutan RSP menjadi fenomena yang menarik sekaligus penting untuk dikaji secara akademik. Di tengah tekanan pasar, disrupsi digital, dan menyempitnya ruang budaya di media cetak, RSP tetap hadir sebagai ruang refleksi kultural yang konsisten mengartikulasikan nilai-nilai kearifan lokal Jawa, khususnya nilai kepemimpinan *Hasta Brata*. Keberlanjutan ini tidak hanya mencerminkan kebijakan redaksional ‘Suara Merdeka’, tetapi juga menunjukkan adanya komitmen kultural dalam praktik jurnalistik lokal.

Penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dikonstruksi, dimaknai, dan direproduksi melalui praktik jurnalistik RSP dalam rentang waktu 1996–2020. Dengan mengintegrasikan tema-tema yang muncul dalam artikel (konten), produksi RSP (‘Suara Merdeka’), dan fungsi sosial pers (RSP), riset ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai peran RSP dalam mengonstruksi pesan jurnalistik tentang nilai-nilai kepemimpinan lokal *Hasta Brata* dalam konteks kepemimpinan kontemporer. Riset ini tidak dimaksudkan untuk menilai efektivitas atau dampak rubrik terhadap pembaca, melainkan untuk memahami bagaimana pesan ataupun nilai kepemimpinan dikonstruksi dan dijalankan dalam praktik jurnalistik.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam RSP pada Harian ‘Suara Merdeka’ (1996-2020) melalui praktik simbolik jurnalistik, seperti pemilihan tema, metafora, dan simbolisasi kepemimpinan yang digunakan secara konsisten.

1.2.1 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tematik dari nilai-nilai kepemimpinan *Hasta Brata* yang dikonstruksi dalam RSP pada Harian ‘Suara Merdeka’ periode 1996–2020?
2. Bagaimana produksi RSP pada ranah jurnalistik Harian ‘Suara Merdeka’ periode 1996–2020 terkait konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata*?
3. Bagaimana fungsi sosial RSP pada Harian ‘Suara Merdeka’ periode 1996–2020 dalam mengonstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata*?

1.2.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengungkap tematik dari nilai-nilai kepemimpinan *Hasta Brata* yang dikonstruksi dalam RSP pada Harian ‘Suara Merdeka’ periode 1996–2020.
2. Mengungkap produksi RSP pada ranah jurnalistik Harian ‘Suara Merdeka’ periode 1996–2020 terkait konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata*.

3. Mengungkap fungsi sosial RSP pada Harian ‘Suara Merdeka’ periode 1996–2020 dalam mengonstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata*.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dalam perspektif teoritis dan praktis.

1.3.1 Manfaat Teoritis

- Penelitian ini memperkaya kajian media di bidang jurnalistik dengan mengembangkan perspektif jurnalisme budaya berbasis nilai-nilai lokal.
- Penelitian ini mengembangkan kajian jurnalistik/media dengan mengintegrasikan teori Pierre Bourdieu, tanggung jawab sosial pers, serta konstruksi realitas sosial yang diaplikasikan ke media.
- Penelitian ini mengembangkan kajian terhadap jurnalisme alternatif yang mengintegrasikan fungsi sosial media dengan etika moral masyarakat dalam konteks kultural.

1.3.2 Manfaat Praktis

- Penelitian ini menjadi bahan refleksi bagi praktisi media, khususnya pengelola media lokal, untuk menguatkan kembali jurnalisme sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi edukatif, pemelihara moral publik, serta ruang refleksi budaya.
- Penelitian ini menjadi rujukan reflektif bagi redaksi dan pengelola rubrik budaya dalam pengelolaan konten berbasis nilai lokal. Kajian terhadap RSP menunjukkan bagaimana nilai kepemimpinan *Hasta*

Brata dihadirkan dalam praktik jurnalistik, sekaligus memperlihatkan dinamika pengelolaan rubrik budaya di tengah tuntutan efisiensi dan orientasi pasar media.

- Penelitian ini sebagai sumber penguatan pemahaman nilai kepemimpinan berbasis kearifan lokal bagi komunitas pembaca, pegiat budaya, dan pendidik nonformal. Hasil penelitian ini menjadi bahan pendukung kegiatan literasi budaya dan pendidikan karakter dengan menghadirkan contoh konkret praktik media lokal dalam mengulas kepemimpinan, yang berakar pada nilai budaya Jawa.

1.4 Kajian Literatur

1.4.1 Review Penelitian Terdahulu yang Sejenis

Dalam kajian komunikasi dan media, isu budaya cenderung memperoleh perhatian yang lebih terbatas dibandingkan isu politik, ekonomi, atau hukum. Padahal, konten budaya memuat nilai-nilai, pandangan hidup, serta kearifan yang berperan penting dalam pembentukan karakter masyarakat (Kristensen & Riegert, 2017). Dengan demikian, jurnalisme budaya diposisikan sebagai arena reflektif tempat nilai-nilai kultural dikonstruksikan dan dinegosiasikan secara simbolik antara media dan publik.

Fenomena ini menunjukkan dinamika dalam konstruksi realitas media bahwa penentuan nilai berita dan produksi konten- terbentuk dari interaksi antara idealisme jurnalistik dan tuntutan industri media. Relasi antara fungsi sosial pers dan praktik jurnalistik dipahami sebagai proses negosiasi makna yang terus berlangsung. Meskipun hal ini menyebabkan terjadi ‘*gap*’ antara idealisme fungsi

sosial pers dan praktik jurnalistik yang lebih menonjolkan aspek komersial, aktualitas, ataupun kontroversial.

Kondisi ini tampak di media lokal, terutama sejak pergeseran ke platform digital sehingga memaksa rubrik budaya terhenti seiring banyaknya koran lokal bangkrut. Dalam konteks itu, RSP di ‘Suara Merdeka’ menjadi contoh menarik. Sejak 1996, RSP konsisten mengangkat nilai-nilai kearifan lokal Jawa melalui *pasemon* dan narasi reflektif yang memuat kritik sosial maupun pesan moral. Keberlanjutan RSP menunjukkan media lokal masih berperan sebagai penjaga nilai dan penuntun moral masyarakat.

Meskipun banyak penelitian yang membahas hubungan antara media dan budaya, sebagian besar masih berfokus pada aspek representasi, ekonomi politik media, atau relasi kuasa di *newsroom*.

Dari enam disertasi dan 10 artikel yang digunakan sebagai perbandingan dalam disertasi ini, menunjukkan fokus dan kajian yang berbeda. Persamaannya adalah fokus tentang praktik jurnalistik sebagai arena sosial yang kompleks. Perbedaannya pada lokasi, metode, implementasi, dan kerangka teoritis yang digunakan. Beberapa bidang yang diteliti bersinggungan dengan ekonomi politik media, perubahan struktur kekuasaan dalam ranah jurnalistik, identitas budaya, nilai kepemimpinan Jawa dalam konteks organisasi dan perilaku sosial masyarakat kontemporer. Belum ada yang mengkaji jurnalisme budaya dikaitkan dengan kepemimpinan tradisional *Hasta Brata* berbasis habitus dari teori Pierre Bourdieu, teori tanggungjawab sosial pers dalam konteks budaya lokal, dan teori konstruksi realitas sosial- seperti halnya disertasi ini.

Berikut ini penjelasan 16 penelitian terdahulu berdasarkan klasifikasi paradigma penelitiannya:

1. **Dlamini (2023)**. Disertasi berjudul *Newsroom Culture and Journalistic Practice at The South African Broadcasting Corporation (SABC): An Ethnographic Study* dari **University of Witwatersrand, Johannesburg, Afrika Selatan**. Dlamini mengkaji bagaimana budaya ruang redaksi lembaga penyiaran publik Afrika Selatan membentuk praktik jurnalistik dan identitas profesional wartawan dalam konteks pasca-apartheid. Ia menggunakan pendekatan etnografi dalam **paradigma konstruktivis**. Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Dlamini mengaplikasikan teori Bourdieu tentang habitus, modal, dan ranah, perspektif jurnalisme global dan hibridisasi budaya. Ia menyimpulkan habitus jurnalis SABC terbentuk melalui negosiasi antara idealisme pelayanan publik dan tekanan kekuasaan politik. Independensi dimaknai secara simbolik dan strategis, sementara praktik redaksi merefleksikan *strategic hybridity* antara nilai jurnalisme Barat dan nilai kultural Afrika. Disertasi ini relevan dengan penelitian penulis karena kesamaan kerangka teoretis dan paradigma, khususnya dalam menelusuri peran habitus dan nilai budaya dalam praktik jurnalistik pada konteks kultural yang berbeda.
2. **Boughen (2023)**. Disertasi berjudul *Sino-African Journalism and Journalistic Fields: CGTN Africa's Workers Between Worlds* dari **University of Westminster, Inggris**. Ia meneliti praktik jurnalisme lintas budaya di CGTN Africa, media milik Tiongkok yang beroperasi di Nairobi, Kenya. Penelitiannya

bertujuan mengeksplorasi bagaimana jurnalis Afrika dan Tiongkok menegosiasikan identitas profesional serta nilai jurnalisme dalam konteks budaya yang berbeda. Boughen menggunakan **paradigma konstruktivis** dan pendekatan etnografi ruang redaksi global. Termasuk memadukan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Ia menggunakan teori ranah jurnalistik Pierre Bourdieu, jurnalisme transnasional, dan hibridisasi budaya. Temuan Boughen menunjukkan bahwa jurnalis CGTN Africa membangun identitas profesional hibrid melalui penyeimbangan nilai harmoni dan konsensus dengan prinsip kemandirian dan keterbukaan. Praktik redaksional mencerminkan *strategic hybridity* yang bersifat dialogis. Disertasi ini relevan dengan penelitian penulis dalam penggunaan kerangka Bourdieu dan paradigma konstruktivis, meskipun berangkat dari konteks kultural yang berbeda.

3. **Jaakkola (2015)**. Disertasi berjudul *The Contested Autonomy of Arts and Journalism Change and Continuity in The Dual Professionalism of Cultural Journalism* dari **University of Tampere, Finlandia**. Jaakkola mengkaji dinamika jurnalisme budaya di Finlandia selama tiga dekade (1978–2008) dengan menelusuri bagaimana otonomi jurnalisme seni dipertahankan di tengah tekanan komersialisasi media dan perubahan nilai profesional di ruang redaksi. Jaakkola menggunakan **paradigma konstruktivis** dengan pendekatan sosiologis dan multidisipliner. Serta didukung metode campuran melalui analisis isi rubrik budaya, wawancara mendalam dengan wartawan dan redaktur, serta observasi etnografis. Ia menerapkan kerangka teori Pierre Bourdieu dan sosiologi seni. Jaakkola menyimpulkan adanya ketegangan berkelanjutan antara orientasi

estetika seni dan praktik jurnalistik, yang mencerminkan dualitas profesionalisme wartawan budaya. Temuan penelitian mengungkap pergeseran dari jurnalisme budaya yang relatif otonom menuju praktik yang lebih heteronom akibat tekanan pasar dan kebijakan redaksi. Meski demikian, wartawan budaya tetap berupaya menjaga keseimbangan antara nilai estetis dan tanggung jawab sosial jurnalistik. Studi ini relevan dengan disertasi penulis dalam penggunaan teori Bourdieu, meskipun berada dalam konteks kultural yang berbeda.

4. **Roza (2022)**. Disertasi berjudul *Data Journalism in Indonesia in the Time of Hoaxes*, dari **University of Technology Sydney, Australia**. Roza menelaah praktik jurnalisme data di Indonesia dalam menghadapi arus hoaks dan disinformasi digital. Fokus penelitiannya pada bagaimana media membangun kapasitas profesional dan etika di era data. Roza menggunakan **paradigma konstruktivis** dan pendekatan studi kasus kualitatif untuk mengkaji sejumlah media daring melalui wawancara mendalam, analisis isi, dan observasi *newsroom*. Ia mengadopsi kerangka teori Bourdieu, ekonomi politik media, serta model propaganda dalam penelitian tersebut. Roza menyimpulkan muncul ketegangan antara idealisme jurnalistik, tekanan pasar, dan pengaruh politik. Temuan penelitian mengungkap bahwa jurnalisme data masih berkembang dan bergantung pada modal teknologi serta sumber daya manusia, sekaligus berfungsi sebagai strategi simbolik untuk membangun kredibilitas publik. Transformasi digital dipahami bukan hanya perubahan teknis, tetapi juga kultural, yakni terbentuknya habitus baru berbasis literasi data dan refleksi

sosial. Studi ini relevan dengan disertasi penulis dalam penggunaan paradigma konstruktivis dan konsep habitus, meski berbeda fokus antara jurnalisme data modern dan jurnalisme budaya Jawa dalam RSP.

5. **Olsen (2019).** Disertasi berjudul *The Value of Local News Unpacking Dynamics of Local Newspapers' Value Creation for Audiences and Society* dari **University of Oslo, Norwegia**. Ia menelaah bagaimana surat kabar lokal menciptakan nilai sosial, kultural, dan demokratis bagi komunitasnya di tengah tekanan digitalisasi. Olsen menggunakan pendekatan kualitatif dalam **paradigma konstruktivis** melalui studi kasus media lokal di Norwegia. Ia berargumen bahwa keberlanjutan media lokal tidak semata ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh relasi sosial dan kepercayaan publik. Temuan penelitian Olsen menunjukkan tiga dimensi utama penciptaan nilai media lokal, yakni penguatan identitas lokal, pelestarian budaya, dan fungsi pengawasan sosial. Studi ini relevan dengan disertasi penulis karena sama-sama memosisikan media sebagai entitas kultural yang membangun makna dan nilai sosial. Perbedaannya terletak pada konteks budaya dan fokus analisis, di mana disertasi penulis menelaah habitus budaya Jawa dan nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam praktik jurnalistik RSP.
6. **Dune (2017).** Disertasi berjudul *Policing the Press: The Institutionalisation of Independent Press Regulation in a Liberal/North Atlantic Media System* dari **School of Communications Dublin City University, Irlandia**. Dune meneliti proses institusionalisasi regulasi pers independen di negara dengan sistem media liberal melalui studi kasus komparatif di Inggris, Irlandia, dan Norwegia.

Berpijak pada **paradigma konstruktivis**, penelitian Dune menelaah bagaimana kebebasan pers dan tanggung jawab sosial dinegosiasikan antara negara, media, dan publik. Ia memadukan teori normatif media, tanggung jawab sosial, teori institusional, serta kerangka Pierre Bourdieu. Temuan penelitian Dune menunjukkan bahwa regulasi independen tidak melemahkan kebebasan pers, melainkan memperkuat legitimasi profesional dan kepercayaan publik. Regulasi yang terinstitusionalisasi membantu media menjalankan fungsi sosialnya secara akuntabel. Studi ini relevan dengan disertasi penulis dalam penekanan pada dimensi etis dan sosial jurnalisme melalui paradigma konstruktivis dan teori Bourdieu. Kendati berbeda konteks kultural antara praktik regulasi Barat dan jurnalisme budaya Jawa yang berlandaskan nilai *Hasta Brata*.

7. **Yoedtadi & Salman (2023).** Artikel berjudul **Habitus Jurnalisme Keberagaman dan Kearifan Lokal Masyarakat Kupang** terbit di *Jurnal Serina Sosial Humaniora*. Vol. 1, No. 3, Oktober 2023. Yoedtadi dan Salman mengkaji bagaimana wartawan di Kota Kupang menginternalisasi nilai kearifan lokal dalam praktik jurnalisme keberagaman untuk mengembangkan toleransi pada masyarakat multikultural. Keduanya menggunakan teori Pierre Bourdieu tentang habitus, modal, dan ranah dalam lingkup penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Yoedtadi menelusuri peran nilai-nilai lokal seperti *Nusi*, *Butukila*, *Suki Toka Apa*, dan *Muki Nena* dalam membentuk disposisi etis wartawan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap wartawan lokal. Temuan menunjukkan bahwa habitus kultural yang terinternalisasi sejak awal kehidupan mendorong praktik

jurnalistik yang mengutamakan harmoni sosial dan menghindari narasi konflik. Meski menghadapi tekanan ekonomi dan logika media daring, jurnalisme keberagaman di Kupang tetap berfungsi sebagai ruang pemaknaan nilai solidaritas. Studi ini relevan dengan disertasi penulis dalam penekanan pada habitus kultural sebagai dasar praksis jurnalistik berbasis nilai lokal.

8. **Wijayanto (2019).** Artikel berjudul *Bourdieu and Media Theory: Explaining Medias Changes and Continuities in The Post Authoritarian Countries*- terbit di *Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 4 (2), 2019.

Wijayanto menelaah paradoks demokratisasi media di negara pasca-otoritarian seperti Indonesia, sehingga kebebasan pers secara formal masih berhadapan dengan warisan struktur kekuasaan dan relasi ekonomi-politik lama. Ia menggunakan pendekatan kualitatif dalam **paradigma konstruktivis** serta diperkuat kerangka teoritis Pierre Bourdieu. Penelitiannya bertujuan mengkaji habitus jurnalis, distribusi kapital, dan dinamika ranah media. Temuan menunjukkan adanya ketegangan berkelanjutan antara idealisme profesional dan tekanan ekonomi yang membatasi otonomi media. Perubahan media dipahami bukan sebagai proses linier menuju kebebasan, melainkan sebagai hasil interaksi antara struktur dan agensi. Studi ini relevan dengan disertasi penulis dalam penggunaan teori Bourdieu untuk memahami praktik jurnalistik sebagai konstruksi sosial, meskipun fokus penulis diarahkan pada jurnalisme budaya lokal dan nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam konteks Jawa.

9. **Maares & Hanusch (2022).** Artikel berjudul *Interpretations of the Journalistic Field: A Systematic Analysis of How Journalism Scholarship Appropriates*

Bourdiesian Thought. Artikel ini terbit di Jurnal: **Journalism**. Maares dan Hanusch memetakan penggunaan teori medan Pierre Bourdieu dalam penelitian jurnalisme lintas negara dengan menelaah bagaimana konsep-konsep kunci teori dimanfaatkan dan siapa yang memiliki otoritas akademik dalam membentuk pemahamannya. Menggunakan pendekatan *mixed systematic review* dalam **paradigma konstruktivis**, studi ini menganalisis 249 artikel jurnal internasional terbitan 1998–2018 melalui analisis isi, teks, dan bibliometrik. Hasil penelitian menunjukkan meningkatnya popularitas pemikiran Bourdieu sejak 2009, namun penerapannya cenderung parsial, dengan dominasi konsep ranah dan modal, sementara habitus dan *doxa* relatif jarang dieksplorasi. Temuan juga mengungkap dominasi perspektif Barat dalam kajian Bourdieusian. Studi ini sejalan dengan kerangka disertasi penulis yang menggunakan teori Bourdieu untuk memahami praktik jurnalistik sebagai konstruksi sosial. Perbedaannya terletak pada fokus kajian yang diarahkan pada jurnalisme budaya lokal serta artikulasi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam konteks budaya Jawa.

10. **Lindell et al., (2019)**. Artikel berjudul ***The Field of Television Production: Genesis, Structure and Position-Takings***. Artikel ini terbit di **Jurnal Poetics**, volume 80 (2020). Lindell dkk mengkaji bagaimana struktur dan praktik produksi televisi di Swedia dibentuk oleh interaksi antara modal ekonomi, modal kultural, dan habitus para aktor media. Dengan pendekatan kualitatif dalam **paradigma konstruktivis**, Lindell memetakan ranah televisi sebagai arena sosial yang mempertemukan kepentingan, strategi, dan nilai profesional. Data diperoleh melalui wawancara, survei, serta analisis historis terhadap televisi

publik dan komersial. Temuan penelitian menegaskan relevansi teori medan Bourdieu untuk memahami dinamika industri media modern. Artikel ini relevan dengan disertasi penulis karena sama-sama menggunakan kerangka Bourdieu dalam ranah jurnalistik, meskipun konteksnya berbeda. Jika Lindell berfokus pada industri televisi Swedia, disertasi ini menelaah habitus wartawan Jawa dalam membangun konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam RSP.

11. **Munnik (2018).** Artikel berjudul **A Field Theory Perspective on Journalist–Source Relations** terbit di **Journal Sociology**, Vol. 52 (6). Penelitian Munnik mengkaji relasi antara jurnalis dan sumber berita Muslim di Glasgow melalui pendekatan kualitatif dalam **paradigma konstruktivis** dengan kerangka teori medan Pierre Bourdieu. Teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara mendalam, observasi etnografis, analisis dokumen, dan refleksi profesional. Studi ini menunjukkan bahwa representasi Muslim di media Inggris dibentuk oleh ideologi redaksi, relasi sosial, serta distribusi kapital simbolik dalam ranah jurnalistik. Studi kasus Aamer Anwar sebagai *authorised knower* dan Amina Muslim Women’s Resource Centre sebagai *new entrant* memperlihatkan bagaimana posisi sosial dan akumulasi kapital menentukan daya tawar aktor dalam memengaruhi pemberitaan. Relevansinya dengan disertasi penulis terkait produksi makna dan negosiasi otonomi dalam medan jurnalistik. Dalam konteks RSP, figur pengasuh rubrik dipahami sebagai aktor berotoritas yang menegosiasikan nilai budaya Jawa (*Hasta Brata*) di tengah tekanan struktural media.

12. **Danzon-Chambaud & Cornia (2023).** Artikel berjudul *Changing or Reinforcing the Rules of the Game: A Field Theory Perspective on the Impacts of Automated Journalism on Media Practitioners* terbit di **Journalism Practice**, Vol 17 (2). Danzon-Chambaud dan Cornia menggunakan pendekatan kualitatif-konseptual dalam **paradigma konstruktivis** untuk memahami otomatisasi jurnanisme melalui kerangka teori medan Pierre Bourdieu. Studi reflektif ini menekankan konsep habitus, ranah, modal, dan doxa sebagai nilai tak tertulis yang membentuk praktik jurnalistik. Kedua peneliti menerapkan riset berbasis kajian literatur dan sintesis konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa otomatisasi tidak menghilangkan peran manusia, melainkan menggeser konfigurasi habitus dan distribusi kapital di ruang redaksi. Kedua peneliti merujuk pada ideologi jurnanisme (Deuze) dan relasi struktur-agensi seraya menegaskan teknologi berfungsi sebagai mediator antara otonomi profesional dan tuntutan komersial. Relevansinya dengan disertasi penulis terletak pada penggunaan teori Bourdieu dalam kerangka konstruktivis untuk memahami praktik jurnalistik sebagai hasil negosiasi nilai moral, sosial, dan struktural, bukan semata logika pasar.
13. **Barnard (2018).** Studi berjudul *The Journalistic Field in a Time of Mediatization* merupakan judul bab dari buku berjudul *Citizens at the Gates* yang diterbitkan Springer International Publishing. Barnard mengkaji perubahan medan jurnalistik di era mediatization dan media digital dengan memandang jurnanisme sebagai konstruksi sosial yang terus berkembang. Ia menggunakan pendekatan kualitatif-konseptual dalam **paradigma konstruktivis**, serta

menggabungkan teori medan Pierre Bourdieu dan teori mediatization. Tujuan penelitian untuk menjelaskan dinamika habitus, modal, doksa, serta relasi otonomi–heteronomi jurnalis. Tanpa riset lapangan, kajian ini menunjukkan bahwa digitalisasi melahirkan media *meta-capital* yang membentuk praktik profesional dalam ruang jurnalistik yang semakin hibrid. Otonomi jurnalis tetap ada, tetapi dinegosiasikan melalui logika jejaring dan partisipasi publik. Relevansinya dengan disertasi penulis terletak pada pandangan jurnalis sebagai aktor reflektif dalam menegosiasikan nilai dan makna sosial, meski fokus disertasi penulis berakar pada habitus budaya Jawa dan orientasi moral.

14. **Suyono (2023).** Artikel berjudul *Empirical Study of Javanese Leadership Style in Surakarta, Indonesia* terbit di **JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)** Vol. 9, No. 4, 2023. Suyono menguji secara empiris konsep kepemimpinan *Hasta Brata* sebagai model kepemimpinan berbasis kearifan lokal Jawa dalam konteks pemerintahan desa di wilayah Surakarta. Ia menggunakan metode survei kuantitatif terhadap 138 kepala desa di Sukoharjo dan Sragen, untuk menganalisis dimensi dominan kepemimpinan *Hasta Brata*. Temuan menunjukkan adanya perbedaan penekanan nilai *Hasta Brata* yang dipengaruhi latar historis Mataram, di mana kebijaksanaan dan moralitas lebih menonjol di Sukoharjo, sementara ketegasan dan harmoni sosial lebih ditekankan di Sragen. Studi ini menegaskan relevansi *Hasta Brata* sebagai model kepemimpinan moral dalam konteks kontemporer. Penelitian Suyono relevan secara konseptual dengan disertasi penulis dalam pembahasan nilai *Hasta Brata*, meskipun

berbeda pendekatan dan ranah analisis, yakni pemerintahan lokal dan jurnalisme budaya Jawa dalam RSP.

15. **Selvarajah & Meyer (2017)**. Artikel berjudul *Human Capacity Development in Indonesia: Leadership and Managerial Ideology in Javanese Organizations* terbit di Jurnal **Asia Pacific Business Review**. Penelitian ini mengkaji bagaimana nilai budaya Jawa membentuk ideologi kepemimpinan dan praktik manajerial dalam organisasi modern. Dengan pendekatan kuantitatif berparadigma positivistik, Selvarajah dan Meyer melakukan survei terhadap para pemimpin dan manajer di Jawa untuk memetakan dimensi kepemimpinan yang dianggap efektif melalui analisis faktor dan model struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan ideal dalam konteks Jawa berakar pada etika, spiritualitas, dan harmoni sosial, serta menekankan prinsip rukun, keselarasan, dan tanggung jawab moral kolektif. Studi ini relevan dengan disertasi penulis karena sama-sama mengulas nilai kepemimpinan *Hasta Brata*. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan ranah kajian: penelitian ini berfokus pada praktik manajerial organisasi modern, sedangkan disertasi penulis mengkaji konstruksi makna kepemimpinan *Hasta Brata* dalam ranah jurnalistik RSP.
16. **Suwirta (2018)**. Artikel berjudul **Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru** terbit di *Jurnal Mimbar Pendidikan* Vol 3(2). Ia menelaah dinamika politik awal Orde Baru melalui studi kasus *Mingguan Mahasiswa Indonesia* (MMI) di Bandung (1966–1974). Suwirta melalui pendekatan kualitatif dan metode historis, menelusuri peran pers mahasiswa sebagai agen pengawasan

sosial terhadap kekuasaan pada masa Orde Baru. Penelitian ini menunjukkan bagaimana Mahasiswa Muslim Indonesia (MMI) mengalami pergeseran dari media pendukung rezim menjadi saluran kritik terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di sekitar pemerintahan Soeharto. Sikap kritis tersebut berujung pada pembungkaman pada tahun 1974, yang mencerminkan strategi negara dalam membatasi kebebasan berekspresi atas nama stabilitas dan pembangunan. Temuan ini menegaskan peran pers mahasiswa sebagai ekspresi idealisme sosial dan tanggung jawab moral terhadap publik, meski berhadapan dengan represi politik. Studi ini relevan dengan disertasi penulis dalam menempatkan pers sebagai ruang refleksi moral, meskipun penulis mengkaji kritik sosial melalui konstruksi simbolik budaya Jawa dalam RSP, bukan melalui perlawanan politik langsung.

Telaah terhadap enam belas penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian jurnalisme berkembang luas, terutama dalam memahami praktik jurnalistik sebagai hasil interaksi antara aktor, struktur, dan konteks sosial. Sejumlah penelitian menggunakan teori Pierre Bourdieu untuk menjelaskan peran habitus jurnalis, distribusi modal, serta posisi media dalam ranah jurnalistik. Kajian-kajian tersebut berkontribusi penting dalam menjelaskan dinamika profesionalisme, otonomi redaksi, tekanan ekonomi dan teknologi dalam industri media.

Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan jurnalisme dalam kerangka struktural dan institusional. Fokus kajian lebih banyak diarahkan pada perubahan medan jurnalistik, relasi kuasa di ruang redaksi, serta dampak digitalisasi dan komersialisasi. Kajian yang secara khusus menempatkan

jurnalisme budaya sebagai arena konstruksi nilai normatif masih relatif terbatas. Nilai budaya umumnya hadir sebagai konteks pendukung, bukan sebagai objek kajian utama.

Penelitian tentang kepemimpinan *Hasta Brata* berkembang dalam ranah studi kepemimpinan dan organisasi. Penelitian-penelitian tersebut memposisikan *Hasta Brata* sebagai konsep normatif atau model kepemimpinan ideal, dengan pendekatan yang cenderung deskriptif. Relasi antara nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dan praktik jurnalistik, khususnya dalam media cetak lokal, belum banyak dikaji.

Penerapan teori Bourdieu dalam studi jurnalisme masih didominasi oleh konteks Barat dan jurnalisme arus utama. Pemanfaatan konsep habitus, ranah, dan modal untuk menelaah jurnalisme budaya lokal yang berakar pada tradisi Jawa masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan kajian (*research gap*) dengan menempatkan RSP sebagai arena konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam praktik jurnalistik lokal berbasis kultural.

Sebagai respons atas kekosongan kajian tersebut, disertasi ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri habitus budaya Jawa yang dimiliki para aktor media dalam membentuk konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* melalui RSP di harian Suara Merdeka. Penelitian ini mengaitkan teori Pierre Bourdieu (1984, 1998), teori tanggung jawab sosial pers (Siebert et al., 1984), dan teori konstruksi realitas sosial sebagai kerangka analitis. Keterjalinan ketiga perspektif tersebut menghasilkan

refleksi jurnalistik yang mengandung kritik sosial berbasis etis dan kultural dalam konteks jurnalisme budaya.

Tabel 1.1 Review Penelitian Terdahulu yang Sejenis

No	Nama Peneliti (Lembaga dan Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	Tula Dlamini (2023) Disertasi. University of Witwatersrand, Johannesburg, Afrika Selatan.	<i>Newsroom Culture and Journalistic Practice at The South African Broadcasting Corporation (SABC): An Ethnographic Study</i>	Mengungkap budaya ruang redaksi di SABC dalam membentuk praktik jurnalistik dan identitas profesional wartawan di tengah tekanan politik dan transformasi pasca-apartheid.	Pendekatan etnografi dalam paradigma konstruktivis–interpretatif. Teknik pengumpulan data: observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Teori Pierre Bourdieu tentang ranah, habitus, dan modal, teori global <i>journalism</i> dan <i>cultural hybridization</i> .	Habitus jurnalis Afrika di SABC terbentuk melalui negosiasi antara idealisme publik dan struktur kekuasaan politik yang masih kuat. Jurnalis memaknai independensi sebagai strategi simbolik, bukan sekadar prinsip normatif. Praktik redaksi mencerminkan <i>strategic hybridity</i> , perpaduan antara nilai jurnalisme Barat (objektivitas, aktualitas) dan nilai Afrika (komunitas, harmoni sosial).	Persamaan: fokus pada budaya <i>newsroom</i> . Perbedaan: konteks Afrika Selatan. Penulis mengulas budaya Jawa dan jurnalisme budaya.
2	Robert Boughen (2023) Disertasi.	<i>Sino-African journalism and journalistic fields:</i>	Mengungkap jurnalis Afrika dan Tiongkok dalam menegosiasikan identitas profesional serta nilai-nilai jurnalisme di	Pendekatan etnografi <i>newsroom</i> global,	Jurnalis CGTN Africa ‘hidup di antara dua dunia’. Mereka membangun identitas profesional	Persamaan: menggunakan <i>field theory</i> Bourdieu. Perbedaan: -Boughen fokus pada global <i>newsroom</i> .

	University of Westminster, Inggris	<i>CGTN Africa's workers between worlds</i>	tengah pertemuan dua sistem budaya yang berbeda	paradigma konstruktivis. Teknik pengumpulan data: observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen redaksional serta liputan berita. Teori ranah jurnalistik Bourdieu, teori jurnalisme transnasional (Hanusch, Waisbord) dan teori hibridisasi budaya (Kraidy).	hibrid yang berupaya menyeimbangkan nilai jurnalisme Tiongkok (harmoni, konsensus) dan nilai Afrika (kemandirian, keterbukaan). Praktik redaksional CGTN memperlihatkan <i>strategic hybridity</i> yaitu perpaduan strategi diplomasi dan kredibilitas lokal.	-Penulis fokus pada media lokal budaya Jawa.
3	Maarit Jaakkola (2015) Disertasi. University of Tampere, Finlandia.	<i>The Contested Autonomy of Arts and Journalism Change and Continuity in The Dual Professionalism of Cultural Journalism</i>	Mengungkap otonomi jurnalisme seni yang dipertahankan di tengah tekanan komersialisasi media dan perubahan nilai profesional di ruang redaksi.	Paradigma konstruktivis dengan pendekatan sosiologis dan multidisipliner, <i>mixed-method approach</i> . Teknik pengumpulan data: analisis isi kuantitatif,	Terjadinya pergeseran orientasi jurnalisme budaya yang semula otonom dan berbasis nilai estetis menjadi jurnalisme yang lebih heteronom, akibat tekanan pasar, kebijakan redaksi, dan tuntutan publik yang lebih luas.	Persamaan: fokus jurnalisme budaya. Perbedaan: -Jaakkola konteks pada Eropa Utara. -Penulis fokus pada konteks budaya Jawa di koran lokal.

				wawancara mendalam, serta observasi etnografis. Teori kerangka Pierre Bourdieu tentang ranah, habitus, dan modal dengan sosiologi seni.		
4	Adek Roza (2022) Disertasi. University of Technology Sydney, Australia.	<i>Data Journalism in Indonesia in the Time of Hoaxes</i>	Mengungkap media arus utama dan platform digital dalam membangun kapasitas profesional dan etika untuk menghadapi tantangan era data.	Paradigma konstruktivis dan pendekatan studi kasus kualitatif. Teknik pengumpulan data: wawancara mendalam, analisis isi, dan observasi <i>newsroom</i> . Teori Bourdieu tentang field dan capital, model propaganda Herman dan Chomsky, serta teori ekonomi politik media.	Praktik jurnalisme data di Indonesia masih berkembang, namun sering kali terfragmentasi dan bergantung pada modal teknologi serta sumber daya manusia. Jurnalisme data berfungsi sebagai strategi simbolik untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan publik di tengah banjir hoaks.	Persamaan: meneliti media Indonesia. Perbedaan: -Roza fokus hoaks dan data. -Penulis fokus nilai budaya Jawa.
5	Ragnhild Kristine Olsen (2019)	<i>The Value of Local News Unpacking</i>	Menelaah surat kabar lokal dalam menciptakan	Pendekatan kualitatif,	Tiga dimensi utama penciptaan nilai:	Persamaan: fokus media lokal.

	Disertasi. University of Oslo, Norwegia.	<i>Dynamics of Local Newspapers' Value Creation for Audiences and Society</i>	nilai sosial, kultural, dan demokratis bagi komunitasnya di tengah tekanan digitalisasi.	paradigma konstruktivis dengan studi kasus. Teori ranah dan modal budaya Bourdieu.	memperkuat identitas lokal, menjaga budaya, dan menjalankan fungsi pengawasan sosial. Nilai sejati media lokal terletak pada kedekatannya dengan masyarakat dan kemampuannya menumbuhkan rasa kebersamaan.	Perbedaan: -Olsen di Norwegia. -Penulis fokus pada surat kabar di Semarang, Jawa Tengah.
6	Stephen Dune (2017) Disertasi School of Communications Dublin City University, Irlandia.	<i>Policing the Press: The Institutionalisation of Independent Press Regulation in a Liberal/North Atlantic Media System</i>	Menelaah kebebasan pers dan tanggung jawab sosial yang dinegosiasikan antara negara, media, dan publik.	Paradigma konstruktivis dan pendekatan studi kasus. Menggabungkan teori normatif media (McQuail), teori tanggung jawab sosial (Siebert et al.), teori institusional (DiMaggio & Powell), serta teori lapangan Pierre Bourdieu.	Regulasi independen tidak bertentangan dengan kebebasan pers, tetapi justru memperkuatnya dengan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Regulasi yang diinstitusionalisasi dengan baik membantu media menjalankan fungsi sosialnya sebagai pengawas kekuasaan.	Persamaan: menyoroti fungsi sosial pers dan tanggung jawab etis jurnalis melalui teori Bourdieu dan paradigma konstruktivis. Perbedaan: -Dune mengkaji konteks regulasi etika media di Barat. -Penulis menggali nilai-nilai kepimpinan <i>Hasta Brata</i> dalam ranah jurnalisme budaya.
7	Moeh. Gafar Yoedtadi & Doddy Salman (2023)	Habitus Jurnalisme Keberagaman dan Kearifan Lokal Masyarakat Kupang	Mengkaji wartawan di Kota Kupang dalam menginternalisasi nilai- nilai kearifan lokal dalam	Pendekatan kualitatif, metode studi kasus.	Habitus jurnalis Kupang terbentuk dari nilai-nilai budaya yang dihayati	Persamaan: menggunakan teori habitus Bourdieu dan <i>local wisdom</i> . Perbedaan:

	<i>Jurnal Serina Sosial Humaniora</i> . Vol. 1, No. 3.		praktik jurnalisme keberagaman untuk merawat toleransi di masyarakat multikultural.	Teknik pengumpulan data: wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori struktur konstruktif Pierre Bourdieu, khususnya konsep habitus, modal, dan ranah.	sejak kecil, sehingga mendorong praktik jurnalistik yang menjunjung toleransi dan keharmonisan sosial. Wartawan cenderung menghindari isu-isu yang berpotensi memecah kerukunan dan lebih memilih narasi yang meneguhkan perdamaian. Namun, muncul tantangan dari media daring yang sering mengabaikan prinsip jurnalisme keberagaman karena tekanan ekonomi dan orientasi pasar.	-Yoedtadi & Salman fokus pada konteks budaya Kupang. -Penulis fokus budaya Jawa Tengah.
8	Wijayanto (2019) <i>Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review</i> 4 (2).	<i>Bourdieu and Media Theory: Explaining Medias Changes and Continuities in The Post Authoritarian Countries</i>	Mengungkap kondisi paradoks demokratisasi media di negara-negara pasca-otoritarian seperti Indonesia.	Pendekatan kualitatif interpretatif dalam paradigma konstruktivis, serta teori medan sosial Pierre Bourdieu.	Media pasca-otoritarian masih dikuasai oleh elite lama yang beradaptasi dalam sistem demokrasi baru, menciptakan kontinuitas dalam praktik kekuasaan dan pola produksi berita. Habitus	Persamaan: menggunakan <i>field theory</i> jurnalistik Bourdieu untuk memahami praktik media sebagai konstruksi sosial. Perbedaan: -Wijayanto fokus pada dimensi politik-ekonomi media. -Penulis: berfokus pada jurnalisme budaya lokal

					jurnalis tetap terbelah antara idealisme profesional dan tekanan ekonomi, sehingga otonomi media tetap terbatas.	dengan nilai-nilai kepemimpinan <i>Hasta Brata</i> .
9	Phoebe Maares & Folker Hanusch (2022) Journalism, Vol. 23(4).	<i>Interpretations of the Journalistic Field: A Systematic Analysis of How Journalism Scholarship Appropriates Bourdieusian Thought</i>	1) Mengungkap para peneliti memanfaatkan konsep-konsep Bourdieu dalam studi jurnalisme 2) Mengungkap siapa yang memiliki otoritas akademik dalam membentuk cara teori medan.	Pendekatan <i>mixed systematic review</i> dalam paradigma konstruktivis. Teori lapangan Bourdieu	Penerapan <i>field theory</i> masih bersifat parsial dan belum mendalam. Dominasi penelitian dari Eropa dan Amerika Serikat yang membuat cara pandang terhadap teori Bourdieu cenderung berpusat pada perspektif Barat.	Persamaan: menggunakan teori Bourdieu. Perbedaan: -Maares & Hanusch fokus konseptual. -Penulis fokus empiris di media lokal.
10	Johan Lindell et.al., (2019) Artikel terbit di Journal Poetics.	<i>The Field of Television Production: Genesis, Structure and Position- Takings</i>	Mengungkapkan struktur dan praktik produksi televisi di Swedia dibentuk oleh relasi antara modal ekonomi, modal kultural, dan habitus para pelaku media.	Pendekatan kualitatif dan paradigma konstruktivis. Teknik pengumpulan data: wawancara, survei, dan analisis historis. Teori lapangan Bourdieu.	Ranah televisi terbagi ke dalam dua kutub utama: komersial dan publik. Kedua kutub ini tidak sepenuhnya terpisah, karena muncul aktor 'hibrid' yang menggabungkan idealisme profesional dengan strategi ekonomi.	Persamaan: menggunakan teori Bourdieu. Perbedaan: -Lindell fokus pada objek televisi Swedia. -Penulis fokus pada koran lokal di Semarang, Jawa Tengah.

11	Michael B. Munnik (2018) Journal Sociology, Vol. 52 (6).	<i>A Field Theory Perspective on Journalist-Source Relations</i>	Mengeksplorasi proses sosial yang membentuk produksi berita dan dinamika kekuasaan simbolik di dalam medan jurnalistik.	Pendekatan kualitatif Paradigma konstruktivis. Teknik pengumpulan data: wawancara mendalam, observasi etnografis, analisis dokumen, serta refleksi pribadi. Teori lapangan Pierre Bourdieu	Representasi kelompok Muslim di media Inggris ditentukan oleh ideologi redaksi, relasi sosial dan distribusi kapital simbolik antara jurnalis dan sumber berita.	Persamaan: menggunakan teori Bourdieu. Perbedaan: -Munnik fokus pada konteks minoritas Muslim Skotlandia. -Penulis fokus pada kearifan lokal budaya di Jawa Tengah.
12	Samuel Danzon-Chambaud & Alessio Cornia (2023) Journalism Practice, Vol 17 (2)	<i>Changing or Reinforcing the Rules of the Game: A Field Theory Perspective on the Impacts of Automated Journalism on Media Practitioners</i>	Mengungkapkan dinamika sosial dalam medan jurnalistik dengan basis teori lapangan Pierre Bourdieu.	Pendekatan kualitatif-konseptual. Paradigma konstruktivis Teori lapangan Pierre Bourdieu. Kajian literatur dan sintesis konseptual	Otomatisasi tidak menggantikan peran manusia, tetapi menggeser konfigurasi habitus dan kapital di ruang redaksi. Makna dan praktik jurnalistik dibangun melalui interaksi antara jurnalis, teknologi, dan struktur media.	Persamaan: menggunakan gunakan teori Bourdieu. Perbedaan: -Danzon dan Cornia mengkaji jurnalisme otomatis. -Penulis fokus pada konstruksi nilai budaya.
13	Stephen Barnard (2018)	<i>The Journalistic Field in a Time of Mediatization</i>	Mengkaji kondisi medan jurnalistik di era mediatization.	Konseptual-reflektif	Medan jurnalistik kini lebih hibrid dan fleksibel. Otonomi	Persamaan: menggunakan teori Bourdieu. Perbedaan:

	book chapter: <i>Citizens at the Gates</i> , Springer International Publishing.			Pendekatan kualitatif Paradigma konstruktivis. Gabungan teori lapangan Bourdieu dengan Teori Mediatization dari Hjarvard, Hepp, dan Couldry.	jurnalis tetap ada, tetapi menyesuaikan logika digital dan jaringan sosial.	-Barnard fokus transformasi digital global. -Penulis fokus pada koran lokal di Semarang, Jawa Tengah.
14	Joko Suyono (2023) JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 9, No. 4.	<i>Empirical Study of Javanese Leadership Style in Surakarta, Indonesia</i>	Menguji secara empiris konsep kepemimpinan Hasta Brata sebagai model kepemimpinan berbasis kearifan lokal masyarakat Jawa.	Metode survei dengan desain kuantitatif. Teknik pengumpulan data: kuesioner.	Perbedaan makna dan penerapan nilai-nilai <i>Hasta Brata</i> antara dua wilayah penelitian di Jawa Tengah terkait faktor historis.	Persamaan: fokus pada kepemimpinan berbasis nilai Jawa. Perbedaan: -Suyono fokus manajerial. -Penulis fokus pada konstruksi nilai-nilai kepemimpinan pada rubrik budaya di koran lokal.
15	Christopher Selvarajah & Denny Meyer (2017) Jurnal Asia Pacific Business Review	<i>Human Capacity Development in Indonesia: Leadership and Managerial Ideology in Javanese Organizations</i>	Mengungkapkan nilai-nilai <i>Hasta Brata</i> dalam budaya Jawa membentuk ideologi kepemimpinan dan praktik manajerial di organisasi modern.	Pendekatan kuantitatif (kuesioner) Paradigma positivistik	Kepemimpinan yang ideal dalam konteks organisasi Jawa berakar kuat pada nilai-nilai etika, spiritualitas, dan harmoni sosial. Pemimpin yang dihormati bukanlah sosok otoriter atau individualistik,	Persamaan: mengacu pada nilai etika Jawa (Kepemimpinan <i>Hasta Brata</i>) Perbedaan: -Selvarajah & Meyer fokus pada organisasi manajerial. -Penulis fokus pada jurnalisme budaya dan fungsi sosial pers.

					melainkan figur yang mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan dan kebijaksanaan: tegas, adil, sabar, <i>wicaksana</i> , serta <i>andhap asor</i> .	
16	Andi Suwirta (2018) <i>Jurnal Mimbar Pendidikan</i> Vol 3(2).	Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung, 1966-1974	1) Mengkaji tentang kelahiran mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung. 2) Mengetahui sikap dan pandangan mingguan Mahasiswa Indonesia dalam menyoroti masalah KKN pada masa-masa awal Orde Baru. 3) Mengetahui reaksi dan tindakan Orde Baru terhadap sikap dan pandangan pers yang bersifat kritis kepada pemerintah.	Pendekatan kualitatif dan metode historis.	Orde Baru menggunakan strategi pembangunan dan stabilitas untuk menekan kebebasan berekspresi, sehingga pers kehilangan fungsinya sebagai ruang dialog sosial.	Persamaan: sama-sama pers sebagai agen kontrol sosial terhadap kekuasaan Perbedaan: -Suwirta fokus Orde Baru. -Penulis: fokus periode 1996–2020.

1.4.2 Landasan Teoritis

1.4.2.1 Kerangka Teoritis Pierre Bourdieu

Pierre Felix Bourdieu (1930-2002) asal Perancis merupakan sosiolog dan filsuf terkenal di abad ke-20. Ia menggunakan praktik sosial yang merupakan hasil kolaborasi pemikirannya yang bersumber dari kajian sosiologi, antropologi, dan filsafat. Gagasan Bourdieu tentang habitus secara umum dalam praktik sosial, yang kemudian diadaptasi di antaranya pada kajian jurnalistik dan media massa.

Bourdieu menempatkan gagasan dan temuan studi tentang realitas sosial Durkheim, strukturalisme Saussure, Levi-Staruss, dan strukturalisme Marxis dalam aliran objektivisme. Ia menentang perspektif objektivisme karena struktur objektif terlalu berfokus pada faktor ekonomi sehingga mengabaikan subjektivitas manusia sebagai agen. Sosiolog ini dikenal dengan kata-katanya sendiri ‘pertentangan yang absurd antara individu dan masyarakat’ (Bourdieu, 1990) dalam Ritzer & Goodman (2003). Itu sebabnya Bourdieu tertarik pada pemikiran subjektivisme yang dipengaruhi oleh eksistensialisme Sartre, fenomenologi Schultz, interaksionisme simbolik Blumer, dan etnometodologi Garfinkel, yang menekankan kreativitas agensi dan inovasi dalam menyikapi realitas dan dunia sosial.

Karya Bourdieu difokuskan untuk ‘menjembatani’ subjektivisme dan objektivisme melalui konsep habitus dan ranah dalam masyarakat kontemporer dan menyorot hubungan dialektis antara keduanya. Menurutnya, habitus aktor berakar dalam pikiran, sementara ranah berada di luar kesadaran aktor.

Konsep habitus merupakan konsep kunci dalam sintesa teoritis Bourdieu. Saifuddin (2016) mengungkapkan, habitus merupakan produk dari struktur sosial

yang merupakan struktur generatif dari praktik sosial serta mereproduksi struktur sosial. Habitus bersifat mikro (berfungsi pada tingkat individu dan antarpribadi) dan makro (merupakan produk dan kontribusi terhadap sistem masyarakat). Dalam implementasinya, habitus selalu terkait dengan ranah dan modal.

Habitus aktor melalui dinamika kreatif dan dinamika dialektika struktur sosial objektif melahirkan praktik-praktik sosial yang dirumuskan Bourdieu yaitu:

$$(\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Ranah} = \text{Praktik}$$

Secara prinsip, Bourdieu ingin terbebas dari dikotomi objektivisme dan subjektivisme sehingga menekankan ‘hubungan antara struktur sosial dan struktur mental’. Habitus oleh Wacquant (1989) disebut sebagai kebiasaan. Namun, Bourdieu mendefinisikan habitus adalah ‘struktur mental atau kognitif’ yang digunakan aktor untuk menyikapi kehidupan atau realitas sosial melalui proses internalisasi (Ritzer & Goodman, 2003). Kondisi ini mendorong aktor untuk berkreasi dan mengevaluasi tindakan mereka. Diketahui, habitus adalah ‘produk internalisasi struktur dunia sosial’ atau habitus merupakan ‘realisasi dari hasil internalisasi terhadap struktur sosial’ (Bourdieu, 1998). Habitus merupakan sebuah konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, kelompok, dan kelas sosial, diperoleh dari waktu ke waktu dan dapat menjadi fenomena kolektif. Melalui habitus melandasi aktor untuk memahami dunia sosial, namun keberadaan habitus menyiratkan bahwa kehidupan sosial tidak dapat diberlakukan secara seragam pada semua aktor.

Habitus terbentuk dalam jangka waktu yang panjang, diperoleh melalui pengalaman hidup, pola pengasuhan sejak kecil, dan berperan penting dalam

sejarah dunia sosial oleh aktor sosial. Habitus dapat bertahan dan berubah serta berpindah dari satu bidang ke bidang lain. Bourdieu (1993) menyebutkan habitus kerap kali dimetaforakan sebagai ‘logika permainan’. Ia memandang habitus sebagai pengertian praktis yang mendorong aktor untuk bertindak dan bereaksi dalam situasi di luar aturan yang ditentukan sebelumnya, daripada sekadar mengikuti aturan.

Bourdieu mengasumsikan habitus sebagai sesuatu yang ‘menghasilkan dan dihasilkan’ oleh aktivitas sosial. Habitus merupakan ‘struktur yang menstruktur’ yang berarti struktur tersebut membentuk kehidupan sosial. Sebaliknya, habitus adalah ‘struktur yang terstruktur’ yang menunjukkan bahwa struktur tersebut terstruktur oleh dunia sosial. Artinya, habitus adalah dialektika antara internalisasi dan eksternalitas serta eksternalisasi dari internalitas (Bourdieu, 1977) dikutip Ritzer & Goodman (2003).

Habitus bersinggungan dengan modal, karena beberapa habitus bertindak sebagai pengganda untuk berbagai jenis modal dan menciptakan modal simbolik baik di dalam maupun untuk aktor (Harker et al., 1990). Modal dalam perspektif tradisi Marxian yaitu mengacu pada penguasaan ekonomi atau modal ekonomi. Sebaliknya, merujuk konsepsi Bourdieu (1994) dalam Ritzer & Goodman (2003) menggolongkan modal yang lebih luas (selain modal ekonomi) yaitu modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik.

Modal sosial menurut Bourdieu (1993) sebagai hubungan dan jaringan yang dimiliki aktor dengan pihak lain dalam posisi kekuasaan. Modal kultural menekankan pengetahuan, kompetensi, atau disposisi tertentu. Komponen dalam

modal kultural di antaranya kemampuan intelektual yang diperoleh secara formal, seperti sertifikat dan ijazah, pengetahuan yang dimiliki, warisan keluarga, dan sebagainya. Modal simbolik merujuk pada derajat akumulasi prestise, kesohoran, dan kehormatan. Bourdieu percaya bahwa modal ekonomi dan modal kultural sebagai modal krusial dari praktik sosial. Dengan kata lain, modal merupakan kekuatan krusial yang harus dimiliki oleh setiap aktor untuk mencapai kepentingannya dan untuk bertahan hidup dalam lingkungan sosial atau ranah tertentu.

Bourdieu (1993) mengemukakan bahwa aktor sosial beroperasi dalam situasi sosial tertentu (ranah) yang diatur oleh interaksi sosial sehingga bukan bertindak dalam ‘ruang hampa’. Ranah dalam konsepsi Bourdieu adalah ruang sosial terstruktur tempat aktor sosial untuk mendapatkan modal dan posisi yang diatur oleh aturan dan hukum mereka sendiri (Bourdieu, 1993; Bourdieu & Wacquant, 1992; Harker et al., 1990). Ranah dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis seperti ranah politik, ranah ekonomi, ranah pendidikan, dan ranah jurnalistik dalam konteks analisis.

Dalam ranah, harus ada modal yang dimiliki oleh habitus selaku motor penggerak untuk berlangsungnya praktik sosial. Semakin banyak modal yang dimiliki oleh habitus (aktor), maka semakin kuat pengaruhnya dalam suatu ranah dan kelangsungan praktik sosial atau kepentingan tertentu. Kendati habitus merupakan kunci utama dalam praktik sosial, namun secara keseluruhan antara habitus, modal, dan ranah saling bersinergi dan merupakan satu kesatuan utuh.

Hubungan antara habitus, modal, dan ranah dalam praktik sosial dibentuk oleh kemampuan antara aktor yang masing-masing memiliki habitus dan modal yang terakumulasi dan dikonfigurasi dalam ranah sosial tertentu. Bourdieu berpendapat, praktik sosial terjalin dengan struktur objektif di sekitar aktor sosial dan aspek kreatif atau kesadaran aktor. Konsep ‘praktik’ terbentuk dari hubungan dialektika antara struktur objektif dan fenomena subjektif sebagai cara aktor dalam menyikapi realitas sosial.

Bourdieu mengklaim perspektif teoritisnya sebagai strukturalisme konstruktivis, konstruktivisme strukturalis, atau strukturalisme genetis (Ritzer & Goodman, 2003). Penamaan ini mencerminkan posisinya yang berangkat dari tradisi strukturalisme Saussure, Lévi-Strauss, dan Marxisme, terutama dalam penekanan pada bahasa dan kultur sebagai sistem relasi yang bersifat objektif. Dalam kerangka ini, Bourdieu menegaskan bahwa struktur objektif bekerja relatif independen dari kesadaran dan kehendak agen, serta membentuk kondisi bagi praktik dan representasi sosial. Namun, berbeda dari strukturalisme klasik, Bourdieu mengadopsi perspektif konstruktivis untuk menjelaskan bagaimana struktur tersebut dihayati, direproduksi, dan dimaknai melalui pemikiran serta tindakan sosial aktor.

Pierre Bourdieu merumuskan konsep habitus, modal, dan ranah sebagai perangkat analitis untuk mengungkap praktik sosial secara menyeluruh. Konsepsi ini sekaligus ditujukan untuk mengatasi oposisi biner dalam ilmu sosial, khususnya dikotomi antara agen dan struktur, makro dan mikro, serta objektif dan subjektif. Dalam konteks ini, Willig (2012) menjelaskan bahwa konsep habitus sebagai

disposisi individual dengan struktur sosial yang lebih luas, sehingga praktik dapat dipahami sebagai hasil relasi dialektis antara agensi dan struktur, baik pada level mikro maupun makro.

Dalam perjalanan kariernya sebagai sosiolog, filsuf, serta menekuni antropologi, Bourdieu tertantang untuk mengkaji dunia pertelevisian di Perancis yang menurut pandangannya terjadi kekerasan simbolik, sehingga membungkam kreativitas jurnalis selaku aktor sosial yang berada dalam tekanan atau kekuasaan kapitalis/pemilik media. Hal ini disebabkan ranah jurnalistik di televisi dikuasai arena ekonomi dan arena politik (Bourdieu, 1998). Kondisi ini menegaskan subordinasi ranah jurnalistik terhadap logika heteronom yang menggerus otonomi dan kreativitas praktik jurnalistik.

Bourdieu (1998) menegaskan ranah jurnalistik di layar kaca dinilai ‘lumpuh’ dalam menaklukkan ranah ekonomi yang disebabkan kekuatan komersial maupun kekuatan simbolik televisi. Pemikiran Bourdieu ini dituliskan dalam karyanya berjudul: *On Television* (1998) yang menjadi *best seller* di Perancis walaupun banyak dikecam para kritikus karena dinilai sangat kontroversial. Isu krusial dalam *On Television* oleh Bourdieu adalah menyorot budaya media Perancis, jurnalisme berita, dan kekuatan simbolik televisi. Marlierre (1998) maupun Harker et al., (1990) mengemukakan Bourdieu mengkritisi televisi sebagai ancaman karena mendegradasi jurnalistik akibat pengaruh intervensi dari ranah ekonomi dan politik.

Hanya saja, Bourdieu juga kerap dikritik. Salah satunya oleh Marlierre (1998) yang menyatakan bahwa Bourdieu belum memberikan penjelasan normatif

mengenai bagaimana jurnalis dapat sepenuhnya terbebas dari kekerasan simbolik yang dijalankan oleh aktor dominan, khususnya kapitalis atau pemilik media yang berada pada kutub heteronom dan memiliki keunggulan modal ekonomi. Kritik ini menyorot keterbatasan teori Bourdieu dalam merumuskan strategi emansipatoris bagi aktor yang berada dalam posisi subordinat.

Pemikiran Bourdieu tentang praktik sosial yang dikembangkan Bourdieu tetap menawarkan kerangka analitis yang kuat untuk memahami dinamika realitas sosial dalam berbagai konteks, termasuk televisi serta studi jurnalistik dan media massa, seperti surat kabar. Menurut Bourdieu, kajian jurnalistik masih cenderung didominasi oleh perspektif politik-ekonomi, perspektif organisasi, dan kajian budaya yang sering kali berdiri secara terpisah dan saling berseberangan.

Dalam konteks inilah, perspektif teoritis jurnalistik oleh Bourdieu dipandang mampu menjadi solusi atau alternatif dalam kajian-kajian jurnalistik. Bourdieu menawarkan gagasan dan pemikirannya melalui konsep kunci habitus, ranah, dan modal, tanpa terjebak dalam dikotomi objektivisme-subjektivisme atau kesadaran palsu oleh agen dalam ranah jurnalistik yang melingkupinya. Bourdieu berpendapat bahwa jurnalistik sebagai sub-ranah dalam bidang produksi budaya yang lebih besar (sastra, seni, dan lainnya) yang sebagian ditentukan oleh hubungannya dengan ranah ekonomi dan arena politik (Willig, 2012).

Gagasan Bourdieu tentang habitus, modal, ranah, dan praktik sosial yang dikemukakan dalam *On Television* sesungguhnya dapat diadaptasi ke dalam konsep habitus jurnalistik, modal jurnalistik, dan ranah jurnalistik untuk menjelaskan pembentukan skema praktik jurnalistik. Schultz (2006) dalam Willig (2012)

menilai *On Television* menyediakan kerangka kerja penting bagi sosiologi media kontemporer, meskipun karya tersebut juga menuai kritik karena dianggap kurang memenuhi standar ilmiah tertentu.

Berlandaskan model rumusan praktik sosial Bourdieu, model teoritik untuk praktik jurnalistik yaitu:

$$(\text{Habitus Jurnalistik} \times \text{Modal Jurnalistik}) + \text{Ranah Jurnalistik} = \text{Praktik Jurnalistik}$$

Model teoritik tersebut mengelaborasi pemikiran Bourdieu dengan memposisikan praktik jurnalistik sebagai hasil relasional antara habitus jurnalistik dan modal jurnalistik, yang senantiasa berada di bawah tekanan ranah sosial lain.

Berpijak dari sudut pandang Bourdieusian dalam paradigma konstruktivis, model rumusan ini memandang praktik jurnalistik sebagai proses sosial yang secara aktif mengonstruksi realitas melalui interaksi antara agen, struktur, dan makna. Perspektif ini berbeda dari pendekatan ekonomi-politik maupun kajian budaya karena tidak semata menekankan determinasi struktur (praktik jurnalistik yang dikendalikan oleh struktur sosial dan kekuasaan) atau representasi kultural, melainkan menelusuri bagaimana makna jurnalistik diproduksi, dinegosiasikan, dan dilegitimasi dalam ranah jurnalistik. Praktik tersebut dipahami sebagai hasil relasional antara habitus jurnalistik dan kepemilikan modal jurnalistik yang bekerja secara simbolik dalam membentuk sudut pandang, kategori penilaian, serta klaim kebenaran yang dihadirkan dalam produk jurnalistik.

Habitus jurnalistik menjadi konsep kunci untuk menjelaskan bagaimana disposisi internal agen bekerja dalam praktik jurnalistik sehari-hari. Habitus

berfungsi sebagai mekanisme mediasi antara struktur objektif ranah jurnalistik dan tindakan konkret para jurnalis dalam memproduksi makna dan klaim kebenaran. Habitus jurnalistik dalam konteks jurnalistik adalah struktur mental atau kognitif yang digunakan oleh jurnalis, organisasi media, atau profesional untuk memahami, menanggapi, memediasi masalah atau mengelola isu-isu terkait praktik jurnalistik. Struktur mental atau struktur kognitif Bourdieu mencerminkan struktur objektif agen, termasuk kode etik, aturan, dan kebiasaan dalam organisasi media atau forum profesional bagi jurnalis. Habitus merujuk pada pola pikir, persepsi, dan disposisi yang terbentuk melalui pengalaman profesional jurnalis dalam dunia media (Schultz, 2007). Disposisi ini membimbing cara jurnalis memaknai peristiwa, menilai kelayakan konten, serta menafsirkan nilai-nilai budaya masyarakat.

Berpijak dari penjelasan Bourdieu tersebut, penulis memandang habitus jurnalistik sebagai struktur mental dan kognitif yang membimbing jurnalis sebagai aktor sosial dalam memahami, menanggapi, serta mengelola isu-isu yang muncul dalam praktik jurnalistik di dalam ranah jurnalistik. Habitus ini tidak bersifat tunggal atau seragam, melainkan terbentuk secara historis melalui pengalaman profesional, posisi dalam struktur organisasi media, serta relasi kekuasaan yang melingkupinya. Oleh karena itu, habitus jurnalistik selalu kontekstual dan beragam, bergantung pada lokasi aktor dalam arena jurnalistik serta jenis praktik yang dijalankannya.

Atas dasar keragaman itulah, Schultz (2007) mengembangkan tipologi habitus jurnalistik yang lebih spesifik dalam arena jurnalistik, seperti habitus editorial, habitus reporter, dan habitus magang. Selain itu, habitus jurnalistik dapat

dibedakan berdasarkan genre dan spesialisasi jurnalistik, misalnya habitus koresponden asing dan habitus reporter investigasi. Variasi habitus juga tampak berdasarkan jenis media, antara lain habitus surat kabar, habitus majalah, habitus televisi, habitus radio, hingga habitus media daring. Klasifikasi ini menegaskan bahwa praktik jurnalistik dibentuk oleh disposisi yang berbeda-beda sesuai dengan posisi, pengalaman, dan konteks kerja jurnalis dalam ranah jurnalistik.

Keragaman habitus sebagaimana dipetakan oleh Schultz tersebut menjadi kerangka konseptual untuk memahami praktik jurnalistik dalam RSP. Dalam konteks RSP, habitus penulis, baik yang berasal dari internal redaksi maupun aktor eksternal seperti sastrawan dan budayawan dibentuk oleh perpaduan pendidikan kultural Jawa, etika profesi jurnalistik, dan pengalaman panjang di ranah media lokal. Habitus tersebut mendorong lahirnya gaya penulisan reflektif dan naratif yang sarat kearifan lokal, sekaligus tetap selaras dengan prinsip jurnalistik modern.

Selain habitus, posisi aktor dalam ranah jurnalistik juga ditentukan oleh penguasaan modal. Modal jurnalistik mencakup modal kultural, modal sosial, dan modal simbolik yang memberikan pengakuan serta legitimasi dalam dunia media (Bourdieu, 1998; Schultz, 2007; Örnebring et al., 2018; Willig, 2012). Dalam perspektif konstruktivis, akumulasi modal terbentuk melalui rutinitas praktik jurnalistik dan relasi profesional yang berulang. Proses ini melahirkan kepercayaan, reputasi, dan otoritas moral wartawan sebagai hasil pengakuan sosial, bukan sekadar klaim individual atau struktur formal media.

Modal jurnalistik bersumber dari reputasi, kredibilitas, dan praktik profesional yang dalam konteks tertentu dapat dikonversi menjadi modal ekonomi

melalui mekanisme promosi maupun rutinitas kerja redaksional sehari-hari. Modal jurnalistik selain sebagai sumber daya simbolik, juga menjadi pedoman bagi jurnalis dalam memaknai posisi sosial mereka serta dalam membentuk dan menggerakkan dinamika ranah jurnalistik. Dalam kerangka Bourdieusian, modal jurnalistik dipandang sebagai modal yang bersifat khas karena menopang tingkat otonomi jurnalisme dari intervensi eksternal, meskipun otonomi tersebut senantiasa berada dalam kondisi dipertaruhkan oleh kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan lainnya (Bourdieu, 1998).

Sejalan dengan pandangan tersebut, kajian jurnalisme kontemporer menekankan bahwa modal jurnalistik juga berakar pada dimensi normatif dan etis yang menjadi dasar legitimasi sosial jurnalisme. Vos et al., (2018) menegaskan bahwa dedikasi jurnalisme terhadap pelayanan publik dan pengambilan keputusan etis berfungsi sebagai sumber utama legitimasi profesional, yang sekaligus memperkuat posisi dan otonomi jurnalisme dalam ranah sosial yang lebih luas. Dengan demikian, etika dan orientasi pelayanan publik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral internal, tetapi juga sebagai sumber legitimasi simbolik yang menjadi dasar bagi jurnalisme dalam mempertahankan otonomi dan otoritas profesionalnya dalam ranah sosial yang lebih luas.

Dalam kerangka Bourdieusian, legitimasi simbolik tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan beroperasi dalam relasi kekuasaan antarberbagai bentuk modal yang saling berkompetisi dalam ranah jurnalistik. Benson (2006) mengutip Bourdieu bahwa dunia sosial (termasuk jurnalistik) dikendalikan oleh dua jenis 'kekuasaan' yaitu modal ekonomi dan budaya. Dalam paradigma konstruktivis,

kekuasaan ini tidak bekerja secara langsung atau mekanistik, melainkan melalui proses sosial yang mengonstruksi makna, nilai, dan kriteria legitimasi yang diakui sebagai sah dalam ranah jurnalistik. Dengan demikian, dominasi modal tertentu berlangsung melalui pengakuan simbolik yang diterima sebagai wajar, objektif, dan profesional oleh para agen jurnalistik.

Untuk memahami bagaimana legitimasi simbolik tersebut terbentuk dalam praktik, perlu diperjelas karakter masing-masing bentuk modal yang beroperasi dalam ranah jurnalistik. Bourdieu (1998) menjelaskan bahwa modal ekonomi merujuk pada uang atau aset yang dapat dipertukarkan dengan uang, sedangkan ijazah pendidikan, pengalaman teknis, pengetahuan umum, kecakapan verbal, dan kepekaan artistik merupakan bentuk-bentuk modal budaya. Dalam konteks jurnalistik, modal ekonomi biasanya dikenali melalui indikator seperti sirkulasi media, pendapatan iklan, dan jangkauan audiens. Sementara itu, modal budaya tampak dalam bentuk prestise profesional, pengakuan sejawat, serta reputasi yang dibangun melalui karya dan partisipasi dalam forum jurnalistik maupun akademik.

Selain habitus dan modal, posisi aktor juga ditentukan oleh kiprahnya dalam ranah jurnalistik. Secara empiris, ranah jurnalistik berada dalam relasi ketergantungan yang kuat dengan arena ekonomi dan arena politik (Benson & Neveu, 2010). Seperti ranah sosial lainnya, ranah jurnalistik terstruktur oleh pergulatan antara kutub heteronom, yang merepresentasikan tekanan dan kepentingan eksternal, dan kutub otonom, yang merepresentasikan modal spesifik jurnalistik, seperti kompetensi profesional, etika, dan kapasitas simbolik lainnya. Dalam paradigma konstruktivis, struktur ini tidak dipahami sebagai tatanan yang

bersifat tetap atau bekerja secara deterministik, melainkan sebagai hasil dari proses sosial yang terus direproduksi melalui praktik jurnalistik sehari-hari. Melalui praktik tersebut, aktor-aktor jurnalistik membangun dan menegaskan batas-batas tentang apa yang dianggap sah, profesional, dan bernilai, sekaligus menentukan posisi-posisi yang dapat mereka tempati dalam ranah jurnalistik.

Dalam ranah inilah, RSP berkembang sebagai praktik jurnalistik khas yang tidak hanya informatif, tetapi juga edukatif dan reflektif. Dengan menggabungkan konsep habitus, modal, dan ranah, perspektif Bourdieu digunakan untuk memahami RSP sebagai praktik simbolik dalam jurnalisme budaya. Perspektif ini menempatkan RSP sebagai arena konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam praktik jurnalistik yang berakar pada tradisi Jawa.

1.4.2.2 Teori Tanggung jawab Sosial Pers

Teori tanggung jawab sosial pers berkembang pada dekade 1950-an sebagai respons atas keterbatasan teori kebebasan pers yang menempatkan kebebasan pers sebagai prinsip utama tanpa diimbangi dengan tanggung jawab moral dan sosial. Dalam konteks tersebut, kebebasan pers dipandang berpotensi melahirkan praktik jurnalistik yang abai terhadap kepentingan publik apabila tidak disertai kerangka etis yang jelas. Melalui *Four Theories of the Press*, Siebert, Peterson, dan Schramm (1984), sebagaimana dikutip oleh McQuail (2010), merumuskan pandangan bahwa pers, selain memiliki kebebasan dalam menyampaikan informasi dan opini, juga mengemban kewajiban etis untuk melayani masyarakat. Pers tidak diposisikan semata-mata sebagai saluran ekspresi bebas atau instrumen kepentingan politik dan

ekonomi, melainkan sebagai institusi sosial yang menjalankan fungsi normatif dalam kehidupan publik.

Inti dari teori tanggung jawab sosial pers terletak pada pemahaman bahwa kebebasan pers tidak bersifat absolut, tetapi harus disertai komitmen terhadap nilai kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan sosial (McQuail, 2010). Media yang bertanggung jawab secara sosial dituntut untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan kontekstual, serta menjaga relevansi isi dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, media juga diharapkan menjalankan peran edukatif melalui penyajian narasi yang mendorong refleksi sosial dan etika publik. Dalam kerangka ini, aktivitas jurnalistik tidak berhenti pada penyampaian fakta, tetapi berkelindan dengan upaya pembentukan kesadaran sosial dan pemeliharaan moral publik.

Siebert et al. (1984) dalam McQuail (2010) merumuskan lima fungsi utama media sebagai fondasi teori tanggung jawab sosial pers. Kelima fungsi tersebut meliputi penyajian informasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, penyediaan ruang publik sebagai arena diskursus sosial, pewarisan nilai dan budaya yang menopang identitas kolektif, representasi realitas sosial secara proporsional, serta pelaksanaan fungsi pengawasan sosial terhadap kekuasaan. Kelima fungsi ini menegaskan bahwa media beroperasi tidak hanya dalam ranah teknis penyampaian informasi, tetapi juga dalam ranah etis dan kultural.

Dalam konteks Indonesia, teori tanggung jawab sosial pers memiliki relevansi yang kuat karena sistem pers nasional berlandaskan Pancasila dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pers nasional menjalankan fungsi informatif, edukatif, dan

pengawasan sosial. Dengan demikian, praktik jurnalistik di Indonesia secara normatif diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik, nilai sosial, serta keutuhan masyarakat.

Dalam praktik RSP, teori tanggung jawab sosial pers menjadi kerangka konseptual untuk memahami peran media sebagai pengawal moral dan etika publik. RSP tidak hanya menyajikan informasi atau opini, tetapi berfungsi sebagai ruang refleksi etis-kultural yang mengaitkan isu sosial-politik dengan nilai-nilai kepemimpinan Jawa, khususnya *Hasta Brata*. Berdasarkan lima fungsi media yang dirumuskan Siebert et al., penelitian ini memusatkan perhatian pada tiga dimensi utama, yakni penyajian informasi yang bernilai etis dan kultural, peran rubrik sebagai ruang publik dan cermin representasi sosial, serta fungsi pengawasan sosial yang dijalankan melalui etika jurnalistik.

Melalui kerangka tersebut, RSP memperlihatkan praktik tanggung jawab sosial pers dalam konteks media lokal yang menghadapi tekanan digitalisasi, krisis media cetak, dan perubahan pola konsumsi informasi. Rubrik ini menegaskan bahwa media lokal tetap dapat menjalankan peran sosialnya sebagai institusi yang membimbing dan menata kesadaran publik dengan berpijak pada nilai budaya dan etika sosial masyarakatnya. Dengan demikian, teori tanggung jawab sosial pers tetap relevan sebagai landasan teoritis untuk memahami dan mengeksplorasi praktik jurnalistik yang berorientasi pada kepentingan publik dan nilai kultural di tengah dinamika media kontemporer.

1.4.2.3 Teori Konstruksi Realitas Sosial

Teori konstruksi realitas sosial dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam karya klasik *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (Berger & Luckmann, 1990). Teori ini berpijak pada asumsi bahwa realitas sosial tidak hadir secara alamiah dan objektif, melainkan dibentuk dan dipelihara melalui proses sosial yang berlangsung terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Realitas sosial dipahami sebagai hasil dari interaksi manusia yang bermakna dan terinstitusionalisasi dalam struktur sosial tertentu.

Berger dan Luckmann menempatkan pengetahuan sebagai elemen sentral dalam pembentukan realitas sosial. Pengetahuan tidak semata sebagai pengetahuan ilmiah atau formal, melainkan terutama sebagai *common-sense knowledge*, yaitu pengetahuan keseharian yang dianggap wajar dan *taken for granted* oleh anggota masyarakat. Pengetahuan inilah yang melandasi individu memahami dunia sosialnya, bertindak secara teratur, serta menjalin interaksi sosial yang relatif stabil dan terprediksi.

Pembentukan realitas sosial menurut Berger dan Luckman (1990) terjadi melalui dialektika tiga momen: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi muncul ketika manusia mengekspresikan diri lewat tindakan, bahasa, dan praktik simbolik, menciptakan dunia sosial sebagai produk aktivitas mereka. Produk sosial ini kemudian diobjektivasi melalui institusionalisasi dan mekanisme legitimasi berupa nilai, norma, serta sistem makna yang mapan. Melalui

internalisasi, individu menyerap realitas sosial yang terobjektifikasi ke dalam kesadaran subjektif, menjadikannya alami dan diyakini kebenarannya. Dengan demikian, masyarakat sekaligus menjadi kekuatan yang membentuk manusia. Proses ini menegaskan interaksi dinamis antara individu dan masyarakat, di mana pengalaman sosial dan habitus membimbing persepsi, pilihan, dan praktik sehari-hari, menjaga kontinuitas dan adaptasi realitas sosial (Berger & Luckmann, 1990). Proses ini menekankan makna sosial terus dibentuk dan dinegosiasikan secara kolektif, di mana norma, tradisi, dan pengalaman bersama membimbing tindakan individu serta membangun kesadaran budaya yang berkelanjutan.

Kerangka konstruksi sosial Berger dan Luckmann diadopsi oleh Hamad (2004) yang menekankan bahwa media massa berperan aktif dalam membangun realitas sosial melalui penggunaan simbol dan bahasa, pengemasan isu-isu aktual, serta penempatan agenda media. Media tidak sekadar merefleksikan realitas, melainkan terlibat dalam proses eksternalisasi dan objektivasi makna melalui pilihan diksi, narasi, dan struktur pemberitaan. Melalui proses tersebut, realitas yang dikonstruksi media diinternalisasi oleh khalayak sebagai pengetahuan keseharian yang dianggap wajar dan sah.

Kerangka teoritis ini menjadi relevan dalam RSP di Harian ‘Suara Merdeka’ (1996–2020). RSP sebagai ruang simbolik tempat nilai-nilai kepemimpinan dikonstruksi melalui bahasa, metafora budaya, serta pengemasan isu-isu sosial dan politik yang kontekstual. Praktik jurnalistik dalam rubrik ini merepresentasikan proses eksternalisasi nilai-nilai kepemimpinan oleh wartawan dan institusi media, yang kemudian mengalami objektivasi melalui pengulangan tema, konsistensi

narasi, dan legitimasi kultural yang berakar pada kearifan lokal Jawa. Nilai-nilai tersebut diinternalisasi oleh pembaca sebagai pengetahuan keseharian tentang kepemimpinan yang ideal dalam konteks sosial dan budaya tertentu.

Teori konstruksi sosial realitas memberikan landasan konseptual untuk memahami RSP bukan sekadar sebagai produk jurnalistik, melainkan sebagai praktik sosial yang berperan dalam membentuk, memelihara, dan mereproduksi nilai-nilai kepemimpinan tradisional dalam ruang publik sepanjang periode 1996–2020.

1.4.3 Landasan Konseptual

1.4.3.1 Konstruksi Nilai

Nilai sebagai ukuran tentang apa yang dianggap baik dan buruk dalam kehidupan sosial. Djajasudarma dkk. (1997) dalam Sartini (2009) menyatakan bahwa sistem nilai yang mengakar kuat cenderung bersifat menetap karena menjadi dasar orientasi hidup dan perilaku sosial. Dalam pengertian ini, nilai berfungsi sebagai pedoman normatif yang membimbing tindakan, memengaruhi pilihan, serta memberi arah bagi tujuan hidup bersama dalam suatu masyarakat.

Nilai tidak hadir sebagai entitas yang sepenuhnya statis. Nilai dibentuk, dipelihara, dan diwariskan melalui proses sosial yang melibatkan pengalaman historis, praktik budaya, dan interaksi antargenerasi. Oleh karena itu, nilai sebagai hasil konstruksi sosial yang berlangsung secara berkelanjutan, di mana makna tentang apa yang dianggap baik dan buruk terus diproduksi dan direproduksi dalam konteks sosial tertentu.

Dalam perspektif sosiologi, Berger dan Luckmann (1966) menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam kerangka ini, nilai muncul dari tindakan dan pengalaman manusia, dilembagakan dalam norma dan institusi sosial, lalu diinternalisasi sebagai pedoman yang dianggap wajar dan sah dalam kehidupan sehari-hari. Proses tersebut menjelaskan bagaimana nilai dapat tampak alamiah meskipun merupakan hasil konstruksi sosial.

Koentjaraningrat (1984) memaknai nilai budaya sebagai kepercayaan mendasar mengenai hal-hal yang dipandang luhur dan bermartabat, yang menjadi acuan dalam menentukan sikap dan tujuan bertindak. Nilai budaya tidak hanya bersifat abstrak, tetapi termanifestasi dalam praktik sosial dan kebiasaan hidup masyarakat. Dalam kebudayaan Jawa, Suseno (2001) menegaskan bahwa nilai moral dihayati melalui teladan dan pembiasaan, bukan diajarkan sebagai aturan formal, sehingga tertanam kuat sebagai orientasi etis kolektif.

Konstruksi nilai juga berkaitan dengan struktur sosial. Bourdieu (1993) melalui konsep habitus menjelaskan bahwa nilai terinternalisasi sebagai disposisi yang membentuk cara berpikir dan bertindak individu. Selain itu, nilai memperoleh legitimasi melalui relasi kuasa dan modal simbolik dalam suatu ranah sosial.

Dengan demikian, konstruksi nilai sebagai proses sosial-kultural yang menempatkan nilai sebagai pedoman normatif yang berakar kuat, sekaligus bersifat dinamis dan kontekstual dalam menghadapi perubahan sosial. Kerangka ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana nilai-nilai kepemimpinan dikonstruksi dan direproduksi dalam ruang simbolik media.

Dalam konteks penelitian ini, RSP berfungsi sebagai wahana kultural yang merepresentasikan dan melegitimasi nilai kepemimpinan Jawa melalui konsep *Hasta Brata*. Melalui narasi, simbol, dan rujukan moral yang dihadirkan secara berulang sepanjang periode 1996–2020, nilai-nilai kepemimpinan tersebut tidak hanya disampaikan sebagai ajaran normatif, tetapi dikonstruksi sebagai orientasi etis yang dianggap wajar, sah, dan relevan bagi pembaca. Dengan demikian, studi ini memposisikan konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* sebagai hasil dari proses sosial yang berlangsung dalam ranah jurnalistik, yang dipengaruhi oleh habitus kultural, relasi simbolik, serta dinamika sosial-historis yang melingkupinya.

1.4.3.2 Kepemimpinan *Hasta Brata*

Dalam khazanah kebudayaan Jawa, ajaran *Hasta Brata* menempati posisi sentral dalam pemikiran tentang etika kepemimpinan. Istilah *hasta* berarti delapan dan *brata* bermakna *laku* atau pedoman hidup, sehingga *Hasta Brata* dipahami sebagai delapan *laku* utama yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin ideal. Ajaran ini merefleksikan sifat-sifat alam semesta sebagai sumber kebijaksanaan moral dan etika sosial.

Secara historis, *Hasta Brata* dikaitkan dengan figur Sri Rama sebagai raja Pancawati (Bratawijaya, 1997). Awalnya, ajaran ini bersumber dari tradisi Hindu yang memuat delapan watak dewa- Indra, Surya, Bayu, Kuwera, Baruna, Yama, Candra, dan Brama. Seiring proses Islamisasi di Jawa yang dipelopori Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, *Hasta Brata* kemudian dinarasikan ulang melalui delapan unsur kosmos alam semesta, yakni ‘matahari’, ‘bulan’, ‘bintang’, ‘langit’,

‘angin’, ‘api’, ‘laut’, dan ‘bumi’ (Sutardjo, 2014). Transformasi ini menunjukkan kelenturan budaya Jawa dalam menyerap dan memaknai ulang ajaran leluhur.

Bratawijaya (1997) menjelaskan delapan unsur alam tersebut tidak dimaknai secara fisik, melainkan sebagai metafora kultural yang menggambarkan laku batin dan moral seorang pemimpin. ‘Matahari’ melambangkan kemampuan memberi energi dan semangat; ‘bulan’ mencerminkan kebijaksanaan dan ketenangan; ‘bintang’ menjadi simbol penunjuk arah; ‘angin’ merepresentasikan kepekaan dan kedekatan dengan rakyat; ‘api’ menandai ketegasan dan keadilan; ‘langit’ melambangkan kewibawaan dan kejujuran; ‘laut’ mencerminkan kelapangan dan pandangan luas; sementara ‘bumi’ menegaskan keteguhan, keteladanan, dan kemanfaatan bagi banyak orang.

Makna kepemimpinan *Hasta Brata* tidak bersifat tetap, melainkan terus dibangun melalui interpretasi budaya yang berkembang dan direpresentasikan ulang dalam berbagai teks. *Hasta Brata* bersifat universal dan relevan lintas zaman karena berakar pada realitas kehidupan manusia (Mibtadin, 2022). Nilai-nilai *Hasta Brata* diinternalisasi melalui praktik sosial, pendidikan, dan tradisi lisan, sehingga membimbing perilaku, pengambilan keputusan, dan interaksi sosial, sekaligus menjaga keseimbangan moral dan harmoni dalam masyarakat. Internalisasi nilai ini juga membentuk pemahaman khas tentang kepemimpinan dalam budaya Jawa, bahwa kekuasaan diartikulasikan sebagai tanggung jawab moral dan pengasuhan sosial, bukan semata dominasi formal.

Dalam konteks kepemimpinan, Magnis-Suseno (2001) mengungkapkan kepemimpinan dalam pandangan Jawa tidak hanya sebagai kekuasaan politik,

melainkan sebagai tanggung jawab moral seorang *pamomong*- pengasuh dan penuntun harmoni sosial. Nilai ini selaras dengan pandangan Koentjaraningrat (1984) tentang budaya Jawa yang menekankan prinsip rukun, selaras, dan *tepa selira*.

Dalam disertasi ini, *Hasta Brata* diposisikan sebagai modal simbolik dalam kerangka teori Bourdieu (1984, 1998). Modal simbolik sebagai nilai yang memperoleh legitimasi melalui pengakuan sosial. Melalui RSP, redaksi memanfaatkan nilai kepemimpinan Jawa tersebut untuk membangun posisi sosial dan moralnya dalam ranah jurnalistik.

1.4.3.3 Rubrik dan Artikel

Dalam ekosistem media, surat kabar berperan strategis sebagai sarana penyebaran informasi, pendidikan publik, dan pembentukan opini masyarakat. Salah satu bentuk karya jurnalistik yang penting ialah artikel, yakni tulisan yang menghadirkan sudut pandang penulis terhadap persoalan sosial dengan tujuan memberi pencerahan dan mendorong refleksi pembaca. Artikel bersifat interpretatif dan reflektif, memberi ruang bagi nilai kemanusiaan, namun tetap berpijak pada prinsip akurasi, etika, dan tanggung jawab sosial pers (Sumadiria, 2008; Djuroto, 2022; Yunus, 2010). Kehadiran artikel dalam surat kabar tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi medium konstruksi makna sosial, membentuk pemahaman kolektif, dan meneguhkan nilai-nilai moral serta budaya dalam interaksi publik sehari-hari.

Artikel umumnya disajikan dalam rubrik, yaitu bagian tetap surat kabar yang mengusung tema tertentu dan mencerminkan identitas redaksional media serta

kedekatannya dengan pembaca (Effendy, 1989). Rubrik berfungsi sebagai ruang yang relatif konsisten dalam membangun relasi makna antara media dan komunitas sosial yang dilayaninya.

Salah satu rubrik yang mencerminkan karakter tersebut yaitu RSP. Sejak terbit pada 1996, rubrik ini menghadirkan nilai kearifan lokal Jawa yang mencakup spiritualitas, etika sosial, pendidikan karakter, serta kepemimpinan dalam bingkai ajaran *Hasta Brata*. Nama ‘Sang Pamomong’, yang bermakna penuntun atau pengasuh, menegaskan orientasi rubrik ini sebagai ruang pembimbing moral dan refleksi batin masyarakat. Sejak 2002, penggunaan bahasa Indonesia dan Jawa secara bergantian setiap pekan, menunjukkan komitmen rubrik ini untuk tetap berakar pada budaya lokal sekaligus menjangkau pembaca lintas generasi.

Dengan merujuk pada filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*, RSP berfungsi bukan sekadar sebagai rubrik informasi, tetapi sebagai ruang refleksi kultural yang meneguhkan identitas lokal dan membimbing kesadaran moral masyarakat (Sumadiria, 2008; Djuroto, 2022). Peran ini sejalan dengan temuan bahwa media lokal di Indonesia berkontribusi dalam memperkuat budaya lokal di tengah arus globalisasi (Sormin, 2022). Dalam konteks RSP, rubrik ini membangun ruang interaksi antara pengasuh, penulis, dan pembaca, sehingga nilai kepemimpinan dan kearifan lokal Jawa terinternalisasi, membimbing praktik etis serta pemahaman sosial yang reflektif.

1.4.3.4 Ideologi Media

Ideologi media dalam kajian komunikasi sebagai orientasi makna yang bekerja melalui isi dan praktik jurnalistik, bukan sebagai doktrin yang dinyatakan

secara terbuka. Pawito (2014) menempatkan kajian ideologi media dengan menjadikan isi media sebagai fokus utama, dengan tujuan memahami cara media menawarkan pandangan tertentu tentang realitas sosial melalui teks, bukan untuk mengukur efek media terhadap khalayak. Dalam kerangka ini, teks media sebagai ruang artikulasi gagasan, nilai, dan norma yang hidup serta beredar dalam masyarakat (Pawito, 2014). Dengan demikian, ideologi media menekankan bagaimana nilai, budaya, dan praktik jurnalistik membentuk pemahaman sosial secara reflektif dan kontekstual.

Ideologi media hadir secara implisit melalui pola penyajian yang relatif konsisten, bukan melalui pernyataan normatif yang eksplisit. Melalui kebiasaan penulisan, pemilihan isu, dan penekanan aspek tertentu, media menawarkan cara pandang tertentu terhadap peristiwa, aktor sosial, dan praktik kehidupan sehari-hari. (Pawito, 2014). Dengan demikian, media berfungsi sebagai arena artikulasi sekaligus dialog nilai-nilai yang beragam dalam kehidupan sosial.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, Hall (1997) menegaskan bahwa media bekerja melalui proses produksi makna yang diorganisasikan lewat bahasa dan simbol dalam konteks sosial dan kultural tertentu. Media tidak sekadar memantulkan realitas, melainkan menyusunnya ke dalam kategori-kategori makna yang dapat dipahami bersama, sehingga nilai dan sudut pandang tertentu tampil wajar dan alamiah bagi khalayak.

Proses ini tidak terlepas dari praktik produksi simbolik dalam ranah jurnalistik. Bourdieu (1991) menjelaskan bahwa praktik simbolik dibentuk oleh habitus, yakni disposisi yang terinternalisasi melalui pengalaman profesional dan

tradisi institusional. Dalam konteks media, habitus jurnalistik membentuk kecenderungan berpikir dan menulis yang membuat pilihan-pilihan tertentu terasa sah dan pantas, sehingga ideologi media bekerja secara laten melalui kebiasaan redaksional.

Sebagai orientasi makna yang bekerja dalam praktik jurnalistik, ideologi media tampak secara konkret dalam bentuk teks, salah satunya melalui penulisan *headline*. Dor (2003) menyebut *headline* sebagai penanda utama yang membantu pembaca menangkap arah dan makna penting suatu peristiwa secara cepat. Melalui pilihan kata dan penekanan tertentu, *headline* menjadi medium simbolik tempat ideologi media membingkai makna dan menegaskan hierarki kepentingan informasi.

Dalam konteks RSP, penulisan *headline* (tulisan utama) mencerminkan orientasi makna yang sejalan dengan ideologi media ‘Suara Merdeka’ yang menempatkan nilai-nilai kultural dan etika sosial sebagai rujukan utama. Isu-isu sosial-politik yang dianggap krusial tidak disajikan secara konfrontatif, melainkan ditafsirkan melalui koridor budaya Jawa, khususnya nilai-nilai kepemimpinan *Hasta Brata*. Konsistensi ini menunjukkan bagaimana ideologi media ‘Suara Merdeka’ bekerja melalui pilihan simbolik yang berulang, menjadikan *headline* sebagai pengantar refleksi etis sekaligus cermin identitas kultural media.

1.4.3.5 Jurnalisme Budaya

Dalam lanskap jurnalisme konvensional yang semakin dipengaruhi logika pasar, algoritme digital, dan kecepatan informasi, jurnalisme budaya muncul sebagai ruang alternatif yang meneguhkan dimensi reflektif dan humanistik media.

Praktik ini selain menyampaikan fakta, juga menafsirkan kehidupan sosial, membangun makna, dan menegosiasikan nilai budaya. Media, dalam konteks ini, berfungsi sebagai agen kebudayaan yang membentuk pemahaman publik terhadap identitas, norma, dan relasi sosial.

Kristensen & Riegert (2017) mengungkapkan jurnalisme budaya memberi ruang bagi masyarakat untuk merenungkan kembali jati diri, nilai, dan relasi sosialnya melalui rubrik, esai, dan liputan budaya. Hall (1997) menekankan media sebagai arena representasi tempat ideologi dan identitas budaya diproduksi.

Bertolak dari penjelasan Kristensen & Riegert (2017) dan Hall (1997), jurnalisme budaya dalam disertasi ini adalah praktik jurnalistik yang menafsirkan kehidupan sosial dan menegosiasikan nilai budaya dalam arena publik berbasis refleksi budaya.

Secara empiris, jurnalisme budaya menghadapi berbagai tantangan serius. Dominasi logika pasar dan fenomena *click-bait* membuat konten budaya sering dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi (Anderson, 2012). Arus digitalisasi menuntut format cepat dan visual, yang tidak selalu sejalan dengan karakter jurnalisme budaya yang membutuhkan perenungan dan kedalaman. Selain itu, regenerasi jurnalis yang berminat pada jurnalisme budaya masih minim, karena banyak wartawan muda lebih tertarik pada liputan politik, kriminal, atau hiburan yang dianggap lebih ‘menjual’. Padahal, jurnalisme budaya memiliki peran strategis dalam menjaga keberagaman simbolik dan memperkuat identitas lokal di tengah globalisasi (Heikkilä & Lauronen, 2018; Kersten & Janssen, 2017; Biernacka-Ligieza, 2013; Nahak, 2018). Oleh karena itu, pengembangan jurnalisme

budaya memerlukan strategi kreatif yang mempertahankan kedalaman narasi sekaligus relevansi sosial dan kultural bagi publik.

Dalam disertasi ini, jurnalisme budaya menjadi fondasi penting. RSP menampilkan praktik jurnalisme budaya yang tidak hanya menginformasikan, tetapi juga menafsirkan dan menyebarkan nilai kepemimpinan Jawa secara simbolik.

1.4.3.6 Pesan dalam Media

Dalam kajian komunikasi, pesan selain sebagai rangkaian fakta yang disampaikan kepada publik, juga sebagai hasil dari proses sosial yang berlangsung dalam praktik media. Pesan media terbentuk melalui tindakan jurnalis yang berulang, terstruktur, dan dilembagakan dalam rutinitas jurnalistik. Oleh karena itu, pesan selalu terkait dengan cara tertentu dalam memaknai realitas sosial, sesuai dengan konteks budaya, institusional, dan profesional tempat media beroperasi.

Sejalan dengan pandangan Berger & Luckmann (1990), realitas sosial sebagai kenyataan yang dibangun melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Media massa sebagai salah satu institusi sosial yang berperan dalam proses tersebut, khususnya melalui produksi pesan. Pesan media berfungsi sebagai wahana penyebaran pengetahuan sosial, yakni pengetahuan yang dipahami, dibagikan, dan diakui bersama sebagai kenyataan oleh anggota masyarakat.

Dalam praktik jurnalistik, proses pembentukan pesan melibatkan serangkaian keputusan profesional. Pemilihan peristiwa, penentuan sudut pandang, penggunaan bahasa, serta penyusunan alur narasi. Pesan tidak hanya

menyampaikan informasi, tetapi juga membingkai cara tertentu dalam memahami peristiwa sosial.

Shoemaker dan Reese (2014) menjelaskan bahwa pesan oleh media dibentuk melalui pengaruh berlapis yang mencakup individu jurnalis, rutinitas media, organisasi, serta lingkungan sosial yang lebih luas. Kerangka ini menunjukkan bahwa pesan media merupakan hasil dari praktik sosial yang berlangsung secara sistematis dan berulang, bukan semata-mata cerminan preferensi personal penulis. Pesan dalam pengertian ini, merupakan produk dari proses institusional yang memiliki keteraturan.

Dengan memahami pesan media sebagai konstruksi sosial, penelitian ini menempatkan pesan RSP bukan sekadar sebagai produk teks, melainkan sebagai bagian dari praktik jurnalistik yang turut menghadirkan makna kepemimpinan. Pesan-pesan dalam rubrik ini menampilkan nilai-nilai *Hasta Brata* melalui pilihan tema, gaya naratif, serta simbol budaya Jawa yang digunakan dalam konteks media lokal.

Pesan RSP diposisikan sebagai medium penyampaian nilai kepemimpinan yang berakar pada tradisi kultural Jawa. Nilai-nilai tersebut tidak disajikan secara instruktif. Sebaliknya, nilai tersebut dihadirkan melalui narasi reflektif yang memosisikan kepemimpinan sebagai laku etis dan pandangan hidup. Dengan cara ini, pesan RSP sebagai ruang reflektif budaya yang berkembang seiring dinamika masyarakat Jawa dan praktik jurnalistik media lokal.

1.5 Kerangka Pemikiran

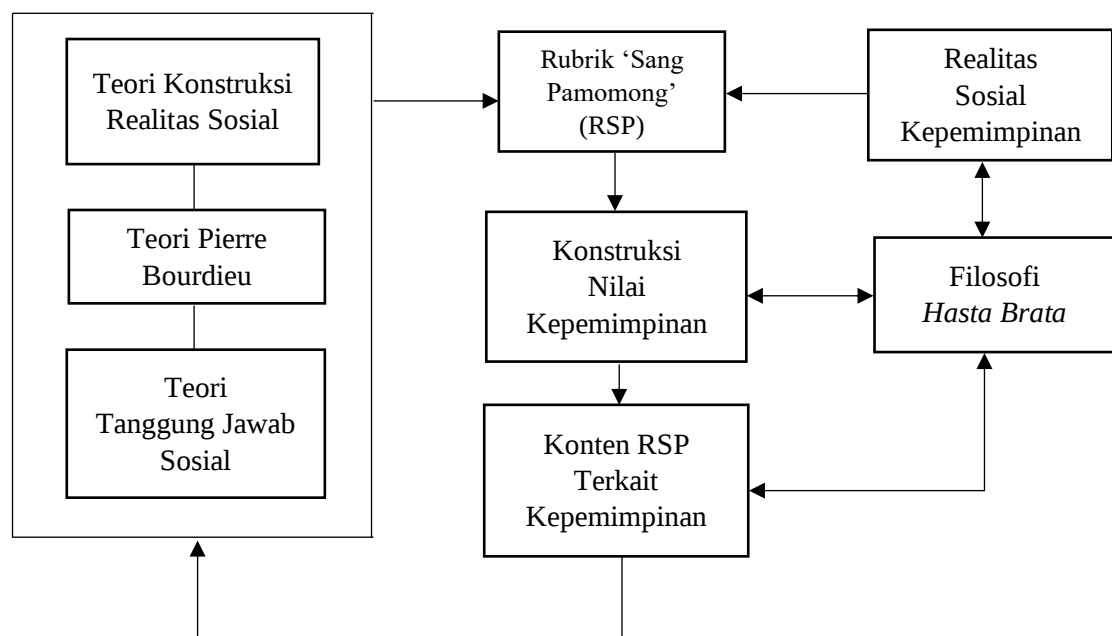
Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun dari pemahaman historis dan ideologis ‘Suara Merdeka’ yang sejak awal pendiriannya pada 15 Februari 1950 menempatkan nilai-nilai budaya sebagai bagian dari misi jurnalistiknya. Orientasi kultural tersebut tidak hadir sebagai latar simbolik, melainkan terartikulasikan secara konkret melalui RSP yang terbit sejak 21 November 1996. RSP diposisikan sebagai ruang reflektif dan etis yang mereproduksi nilai-nilai kearifan lokal Jawa, khususnya ajaran kepemimpinan *Hasta Brata*, dalam merespons dinamika sosial, politik, dan moral masyarakat kontemporer.

Rubrik ini sebagai praktik jurnalistik yang mengolah isu-isu publik lintas bidang melalui kerangka etika Jawa berbasis nilai *adiluhung*. Penafsiran terhadap realitas sosial dilakukan melalui pendekatan reflektif-kultural. Kritik sosial disampaikan tidak secara konfrontatif, melainkan melalui simbol, *pasemon*, dan narasi yang berakar pada tradisi lokal.

Penelitian ini mengadaptasi teori tanggung jawab sosial pers dari Siebert dkk. untuk menjelaskan peran RSP dalam menjalankan fungsi informatif, representatif, dan pengawasan sosial dalam konteks media lokal. Proses produksi dan artikulasi RSP dianalisis menggunakan kerangka Pierre Bourdieu meliputi konsep habitus, modal, dan ranah dalam kerangka konstruktivis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami praktik jurnalistik RSP sebagai hasil interaksi antara disposisi kultural para aktor, dinamika dalam ranah jurnalistik, dan struktur media sebagai entitas sosial dan ekonomi.

Teori konstruksi realitas sosial digunakan untuk menegaskan bahwa konten RSP merupakan hasil dari proses produksi makna yang melibatkan bahasa simbolik, pemingkaian isu, dan strategi agenda media. Integrasi ketiga perspektif teoretis tersebut menempatkan RSP sebagai bentuk jurnalisme budaya dan merupakan *novelty* penelitian ini. Melalui kerangka inilah, realitas sosial kepemimpinan kontemporer dimaknai sebagai ruang kritik sosial-kultural, khususnya dalam merespons krisis kepemimpinan yang berkelanjutan dalam kehidupan publik.

Berikut ini kerangka pemikiran tertera dalam gambar 1.1:



Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran
(Sumber: Olahan Peneliti, 2026)

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Paradigma Penelitian

Penelitian ini berpijak pada paradigma konstruktivis sebagaimana dikemukakan oleh Denzin dan Lincoln (2009), yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi dan tafsir aktor dalam konteks sosial-budaya tertentu.

Konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang memandang pengetahuan sebagai hasil konstruksi aktif yang dibangun oleh individu. Dalam perspektif ini, pengetahuan bukanlah sebagai sesuatu yang sudah tersedia dan diterima begitu saja. Pengetahuan dipandang sebagai hasil pemaknaan subjek terhadap realitas berdasarkan pengalaman dan interaksinya dengan lingkungan (Ardianto & Q-Anees, 2011). Dengan demikian, pengetahuan berada dalam ranah kesadaran subjek yang terus berkembang.

Lebih lanjut, konstruktivisme memandang pengetahuan sebagai proses yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, bukan sebagai produk yang selesai dalam satu tahap. Berbagai pengalaman, situasi, dan konteks sosial mendorong individu untuk meninjau ulang, menyesuaikan, bahkan mengubah pemahaman yang dimilikinya. Proses perubahan inilah yang berperan dalam memperkaya dan mengembangkan pengetahuan seseorang dari waktu ke waktu (Ardianto & Q-Anees, 2011). Dalam pandangan ini, pengetahuan dipahami sebagai sesuatu yang terus dibangun melalui keterlibatan individu dalam pengalaman dan interaksi sosial yang berlangsung secara berkelanjutan.

Pemahaman tersebut menjadi landasan dalam melihat praktik jurnalistik sebagai ruang pembentukan makna melalui konstruksi pesan dalam konten tertentu.

Pesan melalui konten tidak diposisikan sebagai pantulan realitas yang bersifat tetap, melainkan sebagai hasil praktik sosial yang melibatkan pengalaman, latar kultural, dan konteks institusional para aktor media. Atas dasar itu, nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam RSP sebagai hasil proses produksi makna dalam praktik jurnalistik. Relasi antara teks, aktor, dan struktur media dilihat sebagai proses interpretatif yang saling terkait. Nilai-nilai budaya yang dihadirkan bukanlah sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai makna yang terus dimaknai dalam rentang periode 1996–2020.

Pemahaman tentang praktik sosial dan konstruksi makna tersebut selaras dengan perspektif filsafat ilmu, yang menekankan perlunya refleksi terhadap hakikat realitas dan cara pengetahuan dibangun. Dalam tradisi filsafat ilmu, ontologi menjadi dasar untuk memahami hakikat realitas dan objek penelitian. Menurut Denzin dan Lincoln (2009), dalam kerangka penelitian kualitatif, realitas bukanlah satu entitas tunggal yang stabil, melainkan terdiri atas berbagai realitas yang dibentuk oleh pengalaman sosial dan interpretasi manusia. Realitas tersebut muncul melalui makna yang dibangun dalam interaksi sosial dan konteks budaya yang beragam, sehingga peneliti perlu mengakui keberadaan perspektif yang berbeda sebagai bagian dari dunia yang kompleks.

Sejalan dengan itu, epistemologi menekankan bahwa pengetahuan tidak semata-mata ditemukan secara objektif, tetapi dibangun melalui interaksi antara peneliti dan partisipan. Hubungan antara yang mengetahui dan yang diketahui bersifat interaktif dan saling memengaruhi, sehingga peneliti perlu melakukan refleksi terus-menerus terhadap posisi, pengalaman, dan kemungkinan biasanya

dalam proses penelitian (Denzin & Lincoln, 2011). Hal ini membantu peneliti memahami lingkungan sosial dan pengalaman hidup partisipan secara lebih mendalam.

Sementara itu, aksiologi menekankan peran nilai, etika, dan komitmen moral dalam praktik ilmiah. Penelitian kualitatif yang baik menghargai konteks sosial, keadilan, dan tanggung jawab manusiawi, serta memperhatikan bagaimana pertimbangan etis memengaruhi pengambilan keputusan metodologis dan interpretasi data.

Dengan demikian, ketiga ranah: ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling berkaitan dan membentuk fondasi bagi ilmu pengetahuan untuk berkembang secara ilmiah sekaligus bermakna secara manusiawi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, secara ontologis, penelitian ini memandang realitas sebagai realitas sosial-kultural yang majemuk yaitu realitas yang dibentuk oleh konteks budaya Jawa, sejarah, dan dinamika praktik sosial. Realitas kepemimpinan *Hasta Brata* dalam penelitian ini bukan sebagai ajaran tunggal yang tetap, melainkan sebagai nilai budaya Jawa yang ditafsirkan dan dirumuskan ulang dalam praktik jurnalistik RSP. Secara epistemologis, pengetahuan dalam riset ini diperoleh melalui proses tafsir reflektif terhadap data dengan menggunakan analisis tematik. Secara aksiologis, penelitian ini menekankan proses analisis tidak terlepas dari nilai budaya Jawa, etika dan nilai kepemimpinan *Hasta Brata* sebagai dasar penafsiran terhadap RSP.

Di sisi lain, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pendekatan kualitatif dipilih untuk

mengeksplorasi fenomena ini secara komprehensif dan holistik (Mulyana, 2018). Penelitian kualitatif, atau pendekatan naturalistik, berfokus pada pemahaman kondisi alamiah di lapangan. Peneliti menangkap situasi sosial secara mendalam dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara bersamaan (triangulasi). Analisis data bersifat induktif, sehingga fakta lapangan dikaji dan disintesis menjadi hipotesis atau teori. Metode ini menekankan penggalian data yang kaya makna, karena makna mencerminkan inti fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif menekankan *transferability*, yaitu kemampuan hasil penelitian diterapkan di konteks lain dengan karakteristik serupa (Sugiyono, 2009). Hal ini menuntut peneliti menafsirkan data secara kontekstual dan sistematis agar temuan tetap relevan di situasi serupa.

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan mengeksplorasi secara mendalam konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* yang diwujudkan dalam RSP di surat kabar ‘Suara Merdeka’ periode 1996–2020.

1.6.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dari Yin (2015) dengan desain *single case intrinsic*. Pendekatan ini dipilih karena RSP merupakan fenomena yang unik secara kultural dan historis serta sebagai satu kesatuan kasus.

Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) sebagai ruang makna yang memadukan praktik jurnalistik, ekspresi budaya Jawa, dan nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam rentang waktu yang panjang. Studi kasus intrinsik digunakan untuk memahami RSP secara holistik dengan menempatkan rubrik sebagai dunia makna

yang dibentuk oleh para aktor yang terlibat, dinamika institusi media, dan konteks sosial-politik yang melingkupinya.

Penelitian ini menggunakan beragam sumber data meliputi analisis 48 artikel, kerangka teoritik yang relevan, serta pemaknaan konteks historis dalam empat periodisasi rubrik. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menafsirkan makna secara reflektif, sehingga keunikan RSP dipahami sebagai praktik budaya yang tercermin dalam teks rubrik, cara penulisan, serta konteks produksi jurnalistiknya.

1.6.3 Unit Observasi dan Unit Analisis

Penelitian ini menetapkan RSP di Harian ‘Suara Merdeka’ sebagai kasus. Unit observasinya adalah RSP periode 1996-2020 dengan pertimbangan perannya sebagai institusi kultural yang berpengaruh dalam pembentukan narasi publik. Dalam konteks institusional inilah, RSP tumbuh sebagai ruang reflektif yang mengartikulasikan nilai kepemimpinan Jawa berbasis ajaran *Hasta Brata* melalui praktik jurnalistik.

Sementara itu, unit analisis penelitian ini adalah konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam 48 artikel. Fokus analisis diarahkan pada cara nilai tersebut ditafsirkan dan diposisikan dalam konteks sosial-politik setiap periode sejarah. Perbedaan yang jelas antara unit observasi dan unit analisis menjaga ketelitian metodologis dalam ruang jurnalisme budaya pada RSP.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini selaras dengan paradigma konstruktivis dan pendekatan kualitatif, dengan berpijak dari kedekatan pada

realitas sosial yang diteliti. Data diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap 18 informan yang meliputi unsur redaksi, pengelola rubrik, manajemen ‘Suara Merdeka’, serta pengamat budaya, pakar jurnalistik, pelanggan, dan pembaca RSP. Wawancara dilakukan secara langsung, melalui telepon, dan daring, dengan dominasi tatap muka di redaksi ‘Suara Merdeka’ Semarang.

Berikut tabel karakteristik informan dari jajaran redaksi dan pengasuh RSP:

Tabel 1.2
Karakteristik Informan dari Redaksi

No	Inisial	Keterangan
1	GP	Pemimpin Redaksi (2018-2023)
2	TRT	Wakil Pemimpin Redaksi (2015-2023) Pemimpin Redaksi (2023-2024)
3	SSL	Pengampu Halaman Minggu
4	SA	Redaktur Pelaksana, Pengasuh RSP dan Penulis Tetap Kolom Blencong dalam RSP
5	BS	Penggagas RSP, Wakil Pemimpin Redaksi 1996
6	HB	Tim Peggagas RSP, Kordinator Liputan
7	GBS	Pengampu Halaman RSP, Pengasuh RSP, Penulis internal RSP
8	SHK	Sekretaris Redaksi

Tabel karakteristik informan dari jajaran non-redaksi:

Tabel 1.3
Karakteristik Informan dari non-Redaksi

No	Inisial	Keterangan
1	AGS	Pemimpin Redaksi Suara Merdeka.com (2000-2024)
2	Yol	Kepala Divisi Sosial Media
3	MEF	Manajer Sirkulasi

Tabel karakteristik informan dari pihak eksternal:

Tabel 1.4
Karakteristik Informan dari Pihak Eksternal

No	Inisial	Keterangan
1	MT	Guru Besar FIB Undip
2	WID	Filolog dari Unnes
3	AM	Pakar Jurnalistik (Ketua AJI Semarang)
4	Kas	Pelanggan 'Suara Merdeka' Pembaca RSP
5	Soe	Pelanggan 'Suara Merdeka' Pembaca RSP

Untuk mendapatkan 48 artikel RSP yang dipilih secara *purposive*, penulis mendapatkan delapan artikel periodisasi 1996-1998 secara berbayar dari Pusat Dokumentasi (Pusdok) 'Suara Merdeka' dengan datang langsung ke Semarang, Jawa Tengah. Begitu pula untuk periodisasi 2000-2020, sebagian penulis mendapatkannya secara berbayar dari Pusdok Suara Merdeka. Selebihnya, penulis menyambangi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di Salemba dan Perpusnas di Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Untuk di sejumlah periode, kerap ada artikel yang tidak tersedia di Pusdok Suara Merdeka maupun di Perpusnas Salemba dan di Medan Merdeka Selatan.

Selain wawancara mendalam dan observasi artikel, dalam pengumpulan data riset ini, penulis didukung dengan analisis dokumentasi berupa arsip organisasi, pedoman redaksi, dan catatan historis rubrik.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini berpijak pada paradigma konstruktivis yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui praktik

simbolik, bahasa, dan representasi diskursif. Dalam kerangka ini, nilai-nilai kepemimpinan *Hasta Brata* bukanlah sebagai entitas normatif yang bersifat objektif dan universal, melainkan sebagai konstruksi nilai yang diartikulasikan, ditegaskan, dan direproduksi melalui praktik jurnalistik. Tematik dalam artikel RSP sebagai ruang sosial tempat nilai-nilai kepemimpinan dibingkai, dinegosiasikan, dan dilegitimasi secara simbolik.

Sejalan dengan paradigma tersebut, penelitian ini menggunakan analisis tematik secara interpretif sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2012) untuk mengidentifikasi beragam tematik dalam konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata*. Analisis tematik bukan sebagai prosedur teknis yang bersifat netral, melainkan sebagai proses analitis yang melibatkan interpretasi peneliti dalam mengorganisasi data ke dalam tema-tema yang bermakna secara teoretis. Tema dalam penelitian ini tidak diperlakukan sebagai kategori yang muncul secara alamiah dari data, tetapi sebagai konstruksi analitis yang merepresentasikan penekanan, pengulangan, dan hubungan antar-ide dalam artikel.

Dalam konteks konstruktivis, kerangka tematik sebagai bentuk representasi sosial yang mencerminkan cara nilai kepemimpinan dikonstruksikan dalam ranah jurnalistik. Tema-tema tersebut menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip *Hasta Brata* dihadirkan, diprioritaskan, dan diposisikan dalam narasi jurnalistik, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dikaitkan dengan persoalan kepemimpinan, etika, dan krisis sosial-politik. Dengan demikian, analisis tematik tidak diarahkan untuk menemukan kebenaran tunggal di balik teks, melainkan untuk menelusuri

rangkaian tematik yang membentuk cara tertentu dalam memaknai nilai-nilai kepemimpinan.

Melalui pendekatan ini, konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* sebagai hasil relasional antara teks, konteks sosial, dan praktik jurnalistik yang melingkupinya. Analisis terhadap tematik ini memberikan dasar analitis untuk memahami bagaimana jurnalisme berperan dalam memproduksi dan mereproduksi nilai-nilai kepemimpinan sebagai bagian dari dinamika kekuasaan simbolik dalam ranah jurnalistik.

Dalam penelitian ini, analisis pada 48 artikel dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansinya dengan konteks sosial-politik, nilai, norma, etika, dan nilai kepemimpinan *Hasta Brata* melalui narasi dan simbolik rubrik. Pemilihan sampel menekankan keseimbangan antara variasi tema dan kedalaman analisis, serta disusun berdasarkan kontinuitas penerbitan agar perkembangan rubrik dapat ditelusuri secara longitudinal.

Proses analisis diawali dengan tahap familiarisasi data melalui penafsiran berulang terhadap seluruh artikel untuk membangun pemahaman menyeluruh atas isi teks, konteks sosial-historis, dan corak budaya Jawa yang melandasinya.

Tahap berikutnya adalah pengodean awal terhadap 48 artikel dalam relasi nilai kepemimpinan, etika sosial, metafora alam, *pasemon*. Koding awal ini kemudian dikategorisasikan menjadi beberapa kategori tema yang relevan di setiap periodisasi sebagai tematik tertentu. Selanjutnya tematik tersebut dari setiap periode dianalisis secara keseluruhan untuk menghasilkan ‘benang merah’ dari analisis bab 3.

1.6.6 Teknik Validasi Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas dipahami sebagai komitmen etis untuk menjaga kepercayaan terhadap proses dan temuan penelitian. Komitmen ini menuntut peneliti untuk secara sistematis memeriksa dan menegaskan kebenaran data melalui prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu, penelitian ini merujuk pada empat kriteria sebagaimana dikemukakan Moleong (2014) yaitu kredibilitas, keteralihan, keandalan, dan konfirmabilitas. Kredibilitas memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan realitas yang diamati. Strategi yang digunakan meliputi triangulasi, pemanfaatan referensi, dan konfirmasi partisipan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen terkait. Referensi berupa literatur tentang budaya Jawa dan filosofi *Hasta Brata* memperkuat landasan teoretis. Konfirmasi partisipan melibatkan subjek dan informan representatif untuk meninjau kembali interpretasi penulis, menjamin akurasi dan pemahaman informasi.

1.6.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian di kantor ‘Suara Merdeka’ di Semarang, Jawa Tengah. Penulis mewawancarai sejumlah informan sesuai relevansi penelitian, melakukan observasi serta analisa dokumen untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam keperluan penelitian.

Berikut panduan penelitian dalam bentuk tabel:

Tabel 1.5 Jadwal Penelitian Disertasi

No	Uraian Kegiatan	Waktu
1	Persiapan dan penyusunan laporan	Januari s/d Mei 2019
2	Pra survei	November 2018
3	Bimbingan proposal	Januari 2019 s/d Januari 2021
4	Bimbingan bersama	Juni-Juli 2019
5	Sidang Usulan Riset (SUR)	Agustus 2019
6	Perbaikan Usulan Penelitian Disertasi	November 2019
7	Pengumpulan Data	Oktober s/d Desember 2019
8	Pengolahan dan analisis data	Januari 2020 - 2024
9	Penulisan Laporan dan Jurnal Internasional	Juni – November 2022
10	Penelaahan Laporan	
11	Revisi Hasil Penelaahan	
12	Sidang Hasil Riset (SHR)	Januari 2026
13	Penelaahan Naskah Disertasi	
14	Sidang Promosi Doktor (SPD)	Februari 2026

BAB II

PROFIL SURAT KABAR ‘SUARA MERDEKA’ DAN RUBRIK ‘SANG PAMOMONG’

2.1 Profil Surat Kabar ‘Suara Merdeka’

Surat kabar ‘Suara Merdeka’ merupakan salah satu surat kabar daerah terbesar dan paling berpengaruh di Jawa Tengah. Sejak terbit pertama kali pada 11 Februari 1950 di Semarang oleh Hetami-selaku pendiri, ‘Suara Merdeka’ memposisikan diri sebagai media lokal yang menjadi sumber informasi masyarakat Jawa Tengah serta mempertahankan nilai lokal di tengah dinamika perubahan sosial (Machmud, 2010). Seiring waktu, ‘Suara Merdeka’ juga berperan sebagai ruang refleksi budaya, memelihara identitas lokal, dan membimbing kesadaran sosial masyarakat Jawa Tengah.

Hetami mendirikan ‘Suara Merdeka’ dengan oplah awal sekitar 5.000 eksemplar dengan sasaran pembaca dari wilayah Semarang, Solo, Kudus dan kawasan lainnya. Dari 5.000 eksemplar, sekitar 1.000 eksemplar dikirim ke Seksi Kesejahteraan Sosial Kodam VII/Diponegoro dan sisanya imigrasi pembaca dari Soeloeh Rakjat ke ‘Suara Merdeka’.

Koran ‘Suara Merdeka’ tumbuh menjadi koran lokal terkemuka, namun harus bersaing ketat dengan sejumlah kompetitor ternama yang juga membidik pangsa pasar Jawa Tengah, antara lain Harian ‘Solopos’ dari Grup ‘Bisnis Indonesia’ dan grup ‘Jawa Pos’ meliputi ‘Radar Semarang’, ‘Radar Kudus’, ‘Radar Solo’, ‘Radar Kedu’, ‘Radar Banyumas’, ‘Radar Tegal-Pekalongan’, dan ‘Radar

Bojonegoro'. Sementara beberapa koran lainnya terpaksa 'gulung tikar' antara lain 'Semarang Post', 'Radar Kedu', 'Harian Satria', 'Koran Rakyat', 'Bengawan Pos', dan Harian 'Nirmala' karena jumlah pembacanya berkurang terus, sehingga oplah dan sumber pendapatan iklan juga berkurang drastis.

Di level nasional, 'Suara Merdeka' menghadapi ekspansi sejumlah media nasional yang berpusat di Jakarta seperti 'Kompas', 'Seputar Indonesia', dan 'Bisnis Indonesia' yang menyajikan suplemen lokal Jawa Tengah.

Menyikapi kondisi yang mulai genting akibat persaingan dalam entitas bisnis media, manajemen 'Suara Merdeka' menerbitkan 28 halaman pada kisaran tahun 2001 hingga tahun 2008. Strategi ini bertujuan memenuhi kebutuhan pembaca yang menginginkan diperbanyaknya edisi lokal yang isinya mencakup berbagai bidang. Pemilihan target demografi ini sekaligus untuk memperkuat relasi sosial antara 'Suara Merdeka' dengan pembaca.

Berdasarkan kebijakan tersebut, 'Suara Merdeka' tampil 'lebih gemuk' berupa enam edisi lokal setiap hari untuk masing-masing pembaca berdasarkan wilayahnya, selain halaman regular. Halaman khusus yang menampung konten lokal ini antara lain edisi lokal 'Metro Solo' (sebelumnya 'Suara Solo'), 'Metro Semarang', dan 'Suara Kedu'. 'Suara Muria' melayani pembaca di Jepara, Kudus, Blora, Pati, dan Rembang; 'Suara Pantura' fokus untuk pembaca di Kawasan Tegal, Pekalongan, Brebes, Pemalang, dan Batang. Edisi 'Metro Solo' memprioritaskan pada pembaca di wilayah Karanganyar, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, dan Surakarta.

Terkait *oplah* ‘Suara Merdeka’ dalam pusaran bisnisnya, koran lokal ini sempat mencapai tiras di atas 300.000 ribu eksemplar per harinya. Berikut petikan wawancara dengan Gunawan Permadi selaku Pemimpin Redaksi ‘Suara Merdeka’ (2015-2023).

“Hingga di bawah tahun 2010, media cetak (koran) masih sangat menjanjikan karena belum masifnya era digitalisasi. Di era inilah *oplah* ‘Suara Merdeka’ berkisar 300 ribu-500 ribu eksemplar per harinya. Adapun untuk saat ini, tiras di kisaran 60an ribu eksemplar per hari, itu pun masih tergolong bagus dengan kondisi terkini.” (Wawancara dengan Pemimpin Redaksi ‘Suara Merdeka’ Gunawan Permadi, Januari 2020).

Secara kelembagaan, ‘Suara Merdeka’ berada di bawah manajemen ‘Suara Merdeka’ Network (*SM Network*), sebuah konglomerasi media lokal yang meliputi surat kabar, media daring, televisi lokal, dan unit bisnis komunikasi lainnya. Struktur ini menjadikan ‘Suara Merdeka’ bukan hanya sebagai institusi pers, tetapi juga sebagai aktor industri yang beroperasi dalam ekosistem ekonomi-politik media modern. Meskipun mengalami transformasi sejak awal 2000-an, koran lokal ini tetap mempertahankan citra sebagai *korane wong Jawa Tengah*, sebuah posisi yang memiliki konsekuensi ideologis dalam produksi kontennya.

Dalam perspektif kelembagaan, ‘Suara Merdeka’ memiliki struktur redaksi yang cukup stabil. Pada periode 1996–2020, sebagian besar kebijakan editorial diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara nilai profesional jurnalisme (akurasi, keberimbangan, relevansi publik) dan nilai budaya lokal. Ruang budaya- termasuk RSP- mendapat tempat istimewa dalam struktur redaksi, bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi sebagai pilar internal dalam mencerminkan karakter institusi. Kebijakan ini merefleksikan strategi ganda: di satu sisi memenuhi

kebutuhan informasi modern yang objektif, di sisi lain tetap menghidupkan tradisi lokal sebagai diferensiasi identitas media.

2.1.1 Ideologi ‘Suara Merdeka’

Secara ideologis, ‘Suara Merdeka’ sebagai media yang mengusung corak jurnalisme kultural. Ideologi ini menempatkan budaya lokal dalam hal ini budaya Jawa sebagai sumber nilai, standar moral, dan kerangka interpretasi dalam melihat isu-isu sosial, politik, dan kemasyarakatan. Identitas ini merupakan hasil proses sejarah panjang, termasuk pengaruh pendirinya, H. Hetami, yang menekankan pentingnya nilai integritas, kemandirian, dan pengabdian kepada masyarakat Jawa Tengah.

Dalam konteks budaya Jawa, ‘Suara Merdeka’ cenderung menonjolkan nilai seperti keluhuran budi, keseimbangan, harmoni sosial, etika kepemimpinan, dan konsep pengasuhan (*momong*) sebagai narasi moral publik. Ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan redaksional: keberadaan rubrik budaya tetap (seperti RSP), gaya penulisan yang tidak konfrontatif namun ‘tajam dan mengena’, dan penggunaan metafora atau *pasemon* dalam mengkritik kondisi sosial-politik. Ideologi ini merupakan cara media menanamkan nilai etika melalui simbol budaya, tanpa menggunakan bahasa yang terlalu politis atau ideologis secara eksplisit.

Pada tataran operasional, ideologi jurnalisme kultural ini menghasilkan corak pemberitaan yang lebih menekankan moderasi, kehati-hatian, dan keharmonisan. Hal ini penting dipahami dalam konteks Jawa Tengah yang secara historis dikenal sebagai wilayah dengan tradisi sosial yang menjunjung tinggi kerukunan (*rukun*), saling menghormati, dan saling menjaga ketertiban (*tata*

krama). Dengan demikian, orientasi editorial ‘Suara Merdeka’ mencerminkan nilai jurnalistik universal, serta mencerminkan filosofi sosial Jawa yang terbentuk secara historis. Keberadaan RSP sebagai rubrik unggulan mencerminkan bagaimana ideologi ini diformalkan ke dalam struktur redaksi.

2.1.2 Peran ‘Suara Merdeka’ sebagai Institusi Sosial-Budaya

Sebagai institusi media lokal, ‘Suara Merdeka’ berperan penting sebagai penjaga norma dan ruang produksi makna budaya Jawa. ‘Suara Merdeka’ secara konsisten mengartikulasikan nilai lokal dalam konten beritanya. Hal ini menegaskan fungsi media sebagai *cultural guardian*.

Dalam sistem industri media yang semakin kompetitif dan terdigitalisasi, ideologi ini pula yang menjadi modal kultural utama ‘Suara Merdeka’. Ketika banyak media arus utama mengalami homogenisasi konten, ‘Suara Merdeka’ mempertahankan diferensiasi melalui penekanan pada kearifan lokal. Bagi masyarakat pembaca, ciri khas ini menjadi daya tarik utama: mereka menemukan ruang reflektif, kritik sosial, dan nilai moral yang relevan dengan identitas Jawa.

Profil kelembagaan dan ideologi ‘Suara Merdeka’ menunjukkan bahwa media ini bukan hanya entitas bisnis, tetapi juga aktor budaya yang membentuk dan membingkai kesadaran publik Jawa Tengah. Posisi inilah yang melandasi RSP menjadi bagian integral dari konstruksi nilai, narasi kepemimpinan, dan kritik sosial yang khas Jawa yang selanjutnya menjadi fokus pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

Berikut ini logo surat kabar ‘Suara Merdeka’:



2.2 Profil Rubrik ‘Sang Pamomong’

Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) terbit perdana pada akhir 1996 sebagai kolom opini budaya dan berkembang menjadi ruang moral Jawa yang khas. RSP menjadi arena simbolik tempat nilai, pesan moral, kritik sosial, identitas, dan etika Jawa dirumuskan, dinegosiasikan, dan disampaikan kepada publik. RSP selama 24 tahun perjalanan (1996–2020) bertransformasi mengikuti dinamika sosial-politik Indonesia, namun tetap mempertahankan karakter dasar sebagai penjaga kebijaksanaan lokal dan pengarah moral publik.

Bambang Sadono (2024) selaku Wakil Pemimpin Redaksi ‘Suara Merdeka’ (1989-1998) yang juga penggagas RSP menjelaskan RSP merupakan hasil perpaduan antara kebijakan budaya, nilai-nilai Jawa, dan idealisme jurnalistik. Rubrik ini sebagai wujud komitmen kultural ‘Suara Merdeka’ dalam menjaga jati diri masyarakat Jawa Tengah di tengah arus modernisasi. Simbol Semar dijadikan ikon utama RSP karena merepresentasikan pemimpin pamomong: tokoh yang menuntun dengan kearifan, melindungi tanpa pamrih, dan mengingatkan dengan kasih.

Berikut penjelasan Bambang Sadono dalam wawancara pada 2024 sebagai berikut:

“Rubrik ‘Sang Pamomong dijalankan dengan semangat pelestarian budaya dan pendidikan moral publik yang berbasis etis, spiritual, dan kultural.”

2.2.1 Ideologi Rubrik: Tradisi *Pasemon* dan Etika Jawa

Secara ideologis, RSP berakar pada tradisi *pasemon* dan *ngemong* yakni gaya penyampaian pesan melalui metafora, simbol, atau kisah-kisah yang mengandung kritik namun tidak bersifat konfrontatif. Pendekatan ini sangat dekat dengan tradisi *tutur* Jawa, di mana kritik sosial disampaikan secara *alus*, tidak frontal, namun tetap tajam dan menyentuh kesadaran moral pembaca.

Ideologi utama RSP mencakup tiga prinsip:

- (1) Pengasuhan moral (*Pamomong*): Sesuai namanya, rubrik ini memposisikan diri sebagai ‘pengasuh,’ bukan mendoktrin. Pesan-pesan budaya, etika, dan kepemimpinan disampaikan bukan sekadar narasi biasa, tetapi sebagai tuntunan moral. Istilah *momong* merujuk pada praktik mengasuh dengan empati, kebijaksanaan, dan rasa tanggung jawab terhadap perkembangan karakter seseorang. RSP menyerap ideologi ini ke dalam gaya penulisannya: menuntun melalui *pitutur*, bukan menggurui.
- (2) Kritik sosial berbasis nilai lokal: RSP merupakan contoh kritik sosial Jawa yang khas- kritik yang menggunakan bahasa simbolik, perbandingan historis, atau kisah mitologis untuk mengungkap ketimpangan sosial, penyimpangan moral, dan problem struktural politik. Kritik ini tidak berdiri

lepas, melainkan dikaitkan dengan nilai budaya Jawa antara lain: tata krama, *andhap asor*, *prasojo*, *tepa selira*, dan *sangkan paraning dumadi*.

(3) Etika kepemimpinan Jawa ala *Hasta Brata*: Meski tidak tertulis sebagai misi formal, narasi dalam RSP kerap kali menampilkan nilai kepemimpinan Jawa yang bersumber pada filosofi *Hasta Brata* delapan *laku* kepemimpinan yang meneladani karakter alam ('bumi', 'api', 'angin', 'air', 'matahari', 'bulan', 'bintang', dan 'laut'). Nilai ini hadir sebagai fondasi ideologis dalam menilai moralitas pemimpin, birokrasi, maupun masyarakat.

Dengan dasar ideologi tersebut, RSP menjadi wadah pembentukan makna sosial-budaya tentang bagaimana seorang manusia Jawa seharusnya hidup, berperilaku, dan memimpin.

2.2.2 Penulis dan Kontributor

RSP awalnya ditulis oleh sejumlah penulis budaya dan jurnalis internal 'Suara Merdeka'. Dua nama paling sentral adalah:

(1) Triyanto Triwikromo: Sastrawan, jurnalis budaya, redaktur senior dan Wakil Pemimpin Harian 'Suara Merdeka'. Triyanto adalah sosok kunci RSP. Gaya penulisannya memadukan metafora, kritik halus, dan pengetahuan mendalam tentang budaya Jawa. Ia menghidupkan rubrik ini sebagai ruang dialog antara tradisi lokal dan problem kontemporer dengan sensitivitas moral yang kuat.

(2) Hendro Basuki: Penulis yang tampil pada beberapa fase awal rubrik. Hendro tampil dengan gaya narasi lebih historis dan normatif, menekankan akar budaya Jawa serta tokoh-tokoh moral sebagai teladan.

Selain dua figur utama tersebut, terdapat beberapa kontributor lain (internal), maupun penulis eksternal yang antara lain berasal dari kalangan sastrawan, budayawan, akademisi. Namun intensitas dan karakter tulisannya tidak sekuat Triyanto. Ini menegaskan RSP memiliki ‘suara khas’ yakni narasi moral Jawa yang diinterpretasikan oleh penulis-penulis dengan latar budaya kuat.

Karakter personal penulis inilah yang membentuk habitus rubrik: kritis, lembut, simbolik, dan reflektif. Berdasarkan perspektif Bourdieu dalam ranah jurnalistik, penulis RSP adalah agen budaya berbasis modal kultural (nilai Jawa), modal simbolik (otoritas moral), dan modal sosial (kedekatan dengan pembaca Jawa Tengah) untuk memproduksi narasi yang berpengaruh.

2.2.3 Periodisasi Rubrik

Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) dipilih sebagai fokus penelitian dengan batasan periode terbit 1996–2020 yang dikelompokkan ke dalam empat periodisasi: (1) periode awal (1996–1998); (2) periode jeda (1999–2000); (3) periode pascareformasi dan transisi kepemimpinan nasional (2000–2010); dan (4) periode kontemporer (2011–2020). Pembatasan ini merupakan strategi analitis untuk memetakan perkembangan rubrik secara utuh, mulai dari periode awal terbit, penguatan posisi, hingga adaptasi terhadap perubahan konteks sosial dan struktural media.

Pada periodisasi 1996-1998, RSP hadir sebagai suplemen mingguan yang terbit setiap Kamis dan memuat satu tulisan utama (*headline*). Rubrik ini beroperasi dalam konteks transisi Orde Baru menuju Reformasi, sehingga pesan-pesan kepemimpinan disampaikan secara simbolik dan tersirat sebagai strategi kultural di

tengah keterbatasan kebebasan pers. Periodisasi 1999–2000 merupakan masa jeda, karena RSP tidak terbit akibat krisis moneter dan dinamika pascareformasi, namun tetap diperhitungkan untuk menjaga kesinambungan konteks historis analisis.

Memasuki periodisasi 2000-2010, RSP mengalami perubahan format dan posisi redaksional. Sejak 2002, rubrik ini disajikan secara bilingual (bahasa Indonesia dan Jawa) dan menyatu dengan edisi Minggu sebagai rubrik reguler. Dalam atmosfer pasca-Reformasi yang lebih kondusif, RSP mulai mengartikulasikan nilai kepemimpinan *Hasta Brata* secara lebih eksplisit melalui konten reflektif, kritis, dan etis. Periode ini beririsan dengan transisi kepemimpinan nasional dari Abdurrahman Wahid hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada periodisasi 2011–2020 ditandai oleh konsistensi terbit mingguan dalam format satu halaman, berlangsung di tengah disrupsi media dan mencakup akhir pemerintahan SBY hingga periode kedua Joko Widodo. Pada fase ini, RSP tetap mempertahankan karakter reflektifnya dalam menyampaikan pesan moral dan kritik sosial melalui bingkai budaya Jawa, meskipun berada dalam konteks meningkatnya tantangan terhadap demokrasi dan independensi pers.

BAB III

ANALISIS TEMATIK RUBRIK ‘SANG PAMOMONG’ (RSP)

3.1 Analisis Tematik RSP Berbasis Periodisasi

Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) dalam harian ‘Suara Merdeka’ periodisasi 1996–2020 terdapat 48 artikel yang dianalisis dalam kerangka konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata*. Untuk memudahkan analisis, periode penelitian dikelompokkan dalam empat periodisasi sesuai kebijakan redaksi dan dinamika sosial-politik nasional sebagai berikut:

1. Periodisasi 1996–1998 (periode awal): terdapat 8 artikel *headline* yang diteliti.
2. Periodisasi 1999–2000 (periode transisi) – RSP tidak terbit, namun fase historis tetap dianalisis.
3. Periodisasi 2000–2010 (periode konsolidasi): terdapat 18 artikel *headline* yang diteliti.
4. Periodisasi 2011–2020 (periode kontemporer): terdapat 22 artikel *headline* yang diteliti.

Pembagian periodisasi ini dimaksudkan untuk memahami dinamika refleksi kepemimpinan dari masa ke masa. Termasuk juga untuk menelusuri bagaimana nilai-nilai *Hasta Brata* hadir dan berfungsi sebagai rujukan normatif. Periodisasi tersebut digunakan sebagai konteks waktu yang menyertai pembahasan setiap kategori tema. Dengan menggunakan analisis tematik Braun dan Clarke (2012), pembahasan penelitian ini disusun berdasarkan kategori tema sebagai unit analisis,

yang dihasilkan melalui proses koding awal terhadap seluruh artikel RSP yang dianalisis. Dalam konteks ini, penerapan metode analisis tematik menuntut keterlibatan penuh peneliti, ketelitian, transparansi, serta konsistensi selama proses analisis (Ahmed et al., 2025; Christou, 2023; Naeem et al., 2023; Byrne, 2022; Pearson et al., 2025). Selanjutnya, kategori tema yang dihasilkan melalui analisis tematik di setiap periodisasi digunakan sebagai bahan pembahasan.

3.1.1 Analisis Tematik RSP Periodisasi 1996-1998

Periode awal RSP pada rentang 1996–1998 berlangsung dalam konteks sosial-politik yang ditandai oleh menguatnya krisis legitimasi kepemimpinan Orde Baru. Delapan artikel yang terbit pada periode ini dianalisis sebagai satu kesatuan dengan menggunakan analisis tematik sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2012). Pendekatan ini mendorong penulis untuk memahami tematik yang berulang dalam rubrik.

Hasil pengkodean menunjukkan tiga kategori tema yaitu: 1) krisis kepemimpinan (4 artikel); 2) filosofi kepemimpinan *Hasta Brata* (2 artikel); 3) harapan terhadap pemimpin ideal (2 artikel).

Dominasi kategori tema ‘krisis kepemimpinan’ dalam empat artikel mengindikasikan RSP pada periode ini berfungsi sebagai ruang refleksi moral atas realitas kekuasaan. Krisis kepemimpinan muncul sebagai refleksi terhadap situasi sosial-politik yang dinilai melemahkan keteladanan, tanggung jawab dan kepekaan seorang pemimpin. Dalam konteks ini, krisis kepemimpinan sebagai kondisi *genting* ketika pemimpin tidak lagi mampu menjalankan peran *pengayom* bagi masyarakat.

Empat artikel dalam periode 1996-1998 mengonstruksi krisis kepemimpinan bukan sebagai kegagalan teknokratis semata, melainkan sebagai krisis nilai, martabat, dan makna etis kepemimpinan Jawa. Dalam konteks historis menjelang runtuhnya Orde Baru ditandai oleh menguatnya otoritarianisme, krisis moneter 1997, dan krisis multidimensi, kepemimpinan direpresentasikan kehilangan fondasi moral yang sebelumnya berakar pada *laku* batiniah dan prinsip *ngemong*.

Periode ini diawali dari artikel berjudul ‘Martabat dalam Krisis Besar’ (6 November 1997) yang menempatkan krisis kepemimpinan sebagai kemerosotan martabat pada praktik kekuasaan. Kepemimpinan tidak lagi sebagai pengabdian dan *laku* etis, melainkan direduksi menjadi sarana akumulasi kekuasaan dan kekayaan. Kritik Rendra terhadap elite Jawa yang “hanya mampu menciptakan budaya koruptif, mental merampok, ekspansif, dan logika satpam dalam mengatur negara” memperlihatkan kegagalan elite menjaga fungsi teladan. Konsep martabat mengalami distorsi ketika diukur semata melalui “pangkat (kekuasaan), *semat* (kekayaan), dan *kramat* (kepandaian).” Darmanto Jatman mengungkapkan korupsi dimaknai sebagai strategi menaikkan martabat keluarga. Pergeseran orientasi dari batin ke material menandai putusnya rujukan normatif kepemimpinan Jawa, sehingga “kerohanian tidak lagi dipandang sebagai variabel penentu martabat”.

Krisis tersebut diperluas dalam artikel berjudul ‘Birokrasi Dibuat untuk Keselarasan’ (22 Januari 1998), yang menempatkan kepemimpinan dengan tata kelola birokrasi. Kepemimpinan bukan sekadar wibawa personal, melainkan kemampuan menjaga keselarasan sosial melalui sistem birokrasi yang berorientasi

etis. Dalam tradisi Jawa, birokrasi dibentuk untuk *njaga tata tentreming praja*. Namun, krisis muncul ketika birokrasi kehilangan orientasi moral, sebagaimana pengalaman kolonial ketika aparat “menggunakan birokrasi untuk mempersulit dan mengeksploitasi kehidupan rakyat”, hingga mempercepat keruntuhan VOC akibat korupsi dan jual beli jabatan. Narasi ini menegaskan bahwa kecanggihan sistem tidak bermakna tanpa kepemimpinan bermartabat. Figur Raden Patah di Demak dihadirkan sebagai contoh raja berkredibilitas tinggi. Dengan demikian, krisis kepemimpinan direfleksikan sebagai kegagalan menjaga harmoni antara kekuasaan moral dan tata kelola birokrasi.

Sementara itu, artikel berjudul ‘Gaya Hidup Boros Akibatkan Elite Jawa Runtuh’ (12 Februari 1998) memfokuskan krisis kepemimpinan pada *laku* hidup elite. Kepemimpinan sebagai praktik keseharian yang seharusnya mencerminkan pengendalian diri dan tanggung jawab sosial. Namun, elite justru terjebak dalam ideologi kepriyayan, sehingga “kepriyayan menjadi semacam ideologi” yang dikejar demi prestise. Gaya hidup boros, “berpoligami, berjudi main *ceki*, dan menenggak minuman keras” *menyeret* elite pada utang, ketergantungan ekonomi, dan akhirnya penjualan simbol status, hingga “kepriyayan dan keelitan ternyata dapat dibeli”. Runtuhnya elite dikonstruksi bukan akibat tekanan eksternal semata, melainkan akibat kegagalan menjaga keselarasan antara status, etika, dan tanggung jawab sosial. Nilai kepemimpinan ideal berbasis pengendalian diri hadir sebagai rujukan implisit.

Krisis ini semakin memuncak melalui artikel berjudul ‘Idiom Kepemimpinan Jawa Runtuh Akibat Dimanipulasi’ (3 September 1998) yang

menunjukkan dimensi simbolik dari krisis kepemimpinan. Idiom dan mitos kepemimpinan Jawa tidak lagi berfungsi sebagai pedoman moral, melainkan dimanipulasi sebagai alat legitimasi politik. Narasi *ksatria piningit* diproduksi spekulatif dan memicu euforia simbolik tanpa pijakan etika. Rama Sudi Yarmana menegaskan bahwa “idiom-idiom kepemimpinan Jawa sebenarnya tetap bagus, namun lantaran banyak petinggi Jawa melakukan manipulasi terhadapnya, kepercayaan bangsa ini pada pemimpin yang berasal dari Jawa mengurang”. Bahkan terdapat peringatan bahwa “kalau tak segera direhabilitasi, ajaran-ajaran Jawa akan punah” (Damardjati Supadjar). Krisis kepercayaan publik pun menguat ketika pemimpin terjebak feodalisme dan “menyangka diri telah menjelma sebagai raja-raja Mataram baru” (Rendra).

Secara tematik, keempat artikel tersebut membentuk tematik argumentatif: krisis kepemimpinan pada periode 1996–1998 merupakan krisis multidimensi yang mencakup kemerosotan martabat, kegagalan birokrasi etis, dekadensi *laku* (cara bertindak) elite, dan manipulasi simbol kepemimpinan. Dalam lanskap akhir Orde Baru yang otoriter dan represif, RSP memposisikan sebagai arena refleksi kultural yang mengulas keterputusan antara praktik kekuasaan dan nilai ideal kepemimpinan Jawa. Nilai-nilai *Hasta Brata* hadir bukan sebagai doktrin yang disampaikan secara eksplisit, melainkan sebagai landasan normatif yang absen. Nilai-nilai ini sekaligus menjadi tolok ukur kritik terhadap kepemimpinan yang kehilangan fungsi *ngemong* di tengah krisis moneter dan krisis multidimensi menjelang Reformasi.

Sejalan dengan itu, kategorisasi tema ‘harapan terhadap pemimpin ideal’ hadir sebagai respons simbolik atas situasi krisis tersebut. Harapan tersebut muncul sebagai gambaran normatif mengenai kualitas dan sikap pemimpin yang diinginkan. Hal ini terutama relevan dalam situasi sosial-politik yang dinilai membutuhkan pemimpin dengan keteladanan dan kepekaan sosial. Dengan demikian, kategori tematik ‘harapan terhadap pemimpin ideal’ ini menonjolkan gambaran normatif tentang figur pemimpin yang berwatak bijaksana, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Tematik ‘harapan terhadap pemimpin ideal’ tampak jelas pada artikel berjudul ‘Ketika Orang Jawa Menantikan *Ratu Adil*’ (15 Mei 1997) yang mengonstruksi harapan terhadap pemimpin ideal sebagai respons simbolik-kultural atas krisis legitimasi kepemimpinan menjelang runtuhnya Orde Baru. Artikel yang terbit satu tahun sebelum lengsernya Soeharto, merefleksikan situasi sosial yang ditandai ketimpangan, represi, dan akumulasi ketidakadilan struktural. Dalam konteks tersebut, konsep *Ratu Adil* berfungsi sebagai bahasa kultural untuk mengekspresikan kekecewaan terhadap kepemimpinan aktual tanpa menyebut kekuasaan secara langsung.

Penekanan Damardjati Supadjar bahwa “selama ketidakadilan merajalela, kerinduan itu akan muncul dengan sendirinya” menunjukkan bahwa harapan kepemimpinan ideal tidak lahir dari nostalgia mitologis, melainkan dari pengalaman sosial konkret. Sindhunata memperkuatnya dengan menyebut kerinduan itu sebagai “kerinduan yang kontekstual”, yang muncul ketika penguasa “menebarkan bencana dan ketidakadilan kepada *wong cilik*”.

Mitos *Ratu Adil* dikonstruksi sebagai kritik terselubung terhadap kekuasaan yang gagal menjalankan fungsi *ngemong*. Tulisan ini memperlihatkan pergeseran penting: kepemimpinan ideal tidak lagi dipersonifikasikan sebagai figur heroik, melainkan sebagai situasi etis dan sistemik. Pernyataan Andrik Purwasito bahwa “*Ratu Adil* itu sebuah situasi. Bukan figur” menandai delegitimasi kepemimpinan personalistik Orde Baru dan sekaligus membangun imajinasi kepemimpinan baru yang berorientasi pada keadilan, hukum, dan keteraturan sosial. Dalam kerangka ini, harapan terhadap pemimpin ideal menjadi medium refleksi kolektif atas krisis kekuasaan menjelang Reformasi. Artikel ini mencerminkan kerinduan kolektif terhadap figur pemimpin yang mampu memulihkan keseimbangan sosial dan keadilan.

Di sisi lain, RSP periode ini menghadirkan pula ‘harapan terhadap Sultan Hamengku Buwono (HB) X’ yang mengartikulasikan pemaknaan kolektif masyarakat terhadap Sultan sebagai figur kepemimpinan ideal yang *ngemong*, melayani rakyat, menghadirkan rasa aman, dan menjunjung nilai etis pada masa transisi pasca-Orde Baru. Dengan demikian, kategori tema ini menampilkan figur Sultan sebagai simbol kepemimpinan ideal yang diharapkan mampu menjembatani nilai-nilai tradisi dan tuntutan kepemimpinan modern.

Artikel berjudul ‘Sultan HB X Dianggap Ratu Adil’ (10 September 1998) mengartikulasikan proses pemaknaan kepemimpinan yang tidak lagi bertumpu pada legitimasi struktural atau simbol feodal, melainkan pada pengalaman sosial sehari-hari masyarakat terhadap *laku* kepemimpinan Sultan. Penilaian bahwa Sultan HB X “*tansah paring ayem tentrem*” mengonstruksi kepemimpinan sebagai

praktik yang menghadirkan rasa aman, ketenteraman, dan kedekatan emosional dengan rakyat.

Harapan tersebut dipertegas melalui pandangan Moedjanto yang menyebut Sultan sebagai pemimpin yang “bukan sosok yang minta dilayani, tapi justru melayani rakyat”, bahkan menjalankan prinsip defeodalisasi. Pemaknaan ini menunjukkan pergeseran nilai kepemimpinan Jawa menuju orientasi pelayanan, keterbukaan, dan pengakuan terhadap partisipasi publik. Dalam konteks Reformasi, figur Sultan diposisikan sebagai simbol hadirnya kepemimpinan moral yang mampu menjembatani tradisi keraton dengan tuntutan demokrasi.

Dalam konteks ini, catatan khusus yang disampaikan Butet Kertaredjasa mengenai potensi “terkooptasi” tidak dibingkai sebagai penolakan, melainkan sebagai refleksi kesadaran publik terhadap keberlanjutan komitmen etis seorang pemimpin. Jadi, Sultan HB X dikonstruksikan sebagai representasi harapan kepemimpinan *ngemong* yang dinilai melalui konsistensi *laku*, bukan sekadar status simbolik.

Sejalan hal tersebut, RSP mengonstruksi ‘filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*’ sebagai rujukan etis dan kultural dalam memahami praktik kepemimpinan Jawa. Filosofi *Hasta Brata* digunakan sebagai kerangka pemaknaan kepemimpinan dalam rubrik budaya ini, dengan menekankan nilai keseimbangan, keteladanan, dan kebijaksanaan Jawa. Kategori tema filosofi kepemimpinan *Hasta Brata* menekankan aktualisasi nilai-nilai kepemimpinan Jawa klasik sebagai rujukan etis dalam praktik kepemimpinan modern.

Kategori tersebut muncul dalam artikel berjudul ‘Jangan Seperti Katak dalam Tempurung!’ (21 November 1996) menempatkan *Hasta Brata* sebagai pedoman *laku* kepemimpinan yang menekankan keterbukaan, kedekatan sosial, dan keteladanan moral. Kepemimpinan sebagai praktik kebudayaan yang harus menyatu dengan rakyat, sebagaimana ditegaskan Harmoko bahwa nilai Jawa “harus menyatu dengan khalayak, jangan eksklusif dan ‘jangan seperti katak dalam tempurung.’” Ajaran seperti “*aja kagetan, aja gumunan lan aja dumeh*” serta “*sabar, sareh lan saleh*” dikonstruksikan sebagai disiplin etik yang membentuk kejernihan nalar, stabilitas sikap, dan pengendalian diri pemimpin. Menjelang runtuhnya Orde Baru, *Hasta Brata* diposisikan sebagai landasan moral yang menekankan proses, keteguhan, dan keseimbangan demi terwujudnya “*tata tentrem, karta raharja, gemah ripah loh jinawi.*”

Konstruksi tersebut dipertegas dalam artikel berjudul ‘Raja Tak Sekadar Berbekal *Pulung*’ (6 November 1997) yang menggeser pemaknaan kepemimpinan Jawa dari legitimasi mitologis menuju kapasitas etik. *Hasta Brata* bukan sebagai simbol wahyu kekuasaan, melainkan *laku* kebajikan yang harus dihayati dan dijalankan secara konsisten. Penegasan bahwa pemimpin ideal ialah sosok yang “terus menerus mencari tuntunan ilahi, *wicaksana* dan paham delapan kebajikan negarawan (*Astabhrata*)” menunjukkan pemahaman kepemimpinan sebagai praktik reflektif dan relasional. Pandangan bahwa “*pulung* hanyalah alat atau mitos yang digunakan untuk melegitimasi kekuasaan” menempatkan keadilan, kebijaksanaan, dan kemampuan *memayu hayuning jagad* sebagai tolok ukur utama kepemimpinan. Pada periode akhir Orde Baru, RSP menghadirkan *Hasta Brata* sebagai acuan etik-

kultural dalam merumuskan kepemimpinan Jawa yang bermoral, membumi, dan berakar pada kosmologi Jawa.

Berpijak dari penjelasan yang dikemukakan, periodisasi 1996–1998 menunjukkan RSP mengonstruksi kepemimpinan sebagai persoalan etika dan kebijaksanaan, bukan semata-mata persoalan politik praktis. Konstruksi ini muncul karena RSP pada periodisasi awal berada pada fase akhir kekuasaan Orde Baru, di tengah krisis multidimensi yang mengguncang kehidupan bangsa.

Dalam situasi penuh tekanan ini, RSP sebagai ruang ‘aman’ bagi kegelisahan publik. Kritik sosial disampaikan dengan bahasa *pasemon* yang halus namun tajam, memanfaatkan simbol pewayangan, kisah kerajaan Jawa, dan metafora alam. Berbasis *pasemon* inilah, kasus-kasus korupsi, feodalisme birokrasi, dan pengultusan terhadap kekuasaan (Soeharto) jelas disindir meski tanpa menyebut aktor. Secara bersamaan, nilai *Hasta Brata* dihadirkan sebagai penuntun moral untuk menyikapi *laku* kepemimpinan di tengah tirani. Temuan ini menjadi fondasi penting untuk memahami nilai kepemimpinan *Hasta Brata* pada periode-periode berikutnya. RSP menjadi pengingat etis bahwa kekuasaan sejati bertumpu pada kebijaksanaan, bukan ketakutan.

Dengan demikian, kerangka tematik RSP periodisasi 1996–1998 ditandai oleh dominasi tema krisis kepemimpinan, yang tidak mencerminkan filosofi kepemimpinan *Hasta Brata* sehingga rakyat berharap pada pemimpin ideal.

Berikut ini delapan artikel dalam RSP periodisasi 1996-1998 seperti tertera dalam Tabel 3.1:

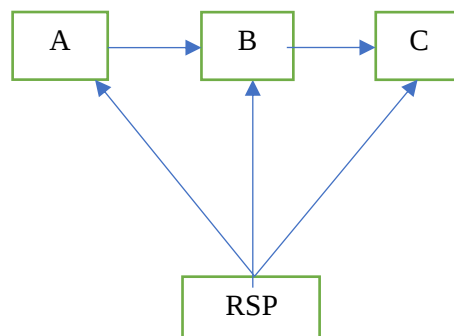
Tabel 3.1 Artikel RSP Periodisasi 1996-1998

No	Judul Artikel	Edisi	Penulis	Kode Awal	Kategori Tema
1	‘Jangan Seperti Katak dalam Tempurung!’	Kamis, 21/11/1996	Bambang Sadono (Wakil Pemimpin Redaksi Harian Suara Merdeka, salah satu Penggagas RsP) dan Hendro Basuki (Kordinator Liputan, Penulis internal, Sastrawan)	Pemimpin yang Tertutup	Filosofi Kepemimpinan <i>Hasta Brata</i>
2	‘Ketika Orang Jawa Menantikan Ratu Adil’	Kamis, 15 Mei 1997	Triyanto Triwikromo dan Hendro Basuki. Catatan: keduanya merupakan penulis internal dan sastrawan	Berharap Pada ‘Ratu Adil’	Harapan terhadap Pemimpin Ideal
3	‘Martabat dalam Krisis Besar’	Kamis, 6 November 1997	Triyanto Triwikromo dan Hendro Basuki	Krisis Martabat Ideal	Krisis Kepemimpinan
4	‘Raja Tak Sekedar Berbekal Pulung’	Kamis, 15 Januari 1998	Triyanto Triwikromo dan Hendro Basuki	<i>Pulung</i> sebagai Simbol Legitimasi	Filosofi Kepemimpinan <i>Hasta Brata</i>
5	‘Birokrasi Dibuat untuk Keselarasan’	Kamis, 22 Januari 1998	Triyanto Triwikromo dan Hendro Basuki	Disfungsi Birokrasi	Krisis Kepemimpinan
6	‘Gaya Hidup Boros Akibat Kaum Elite Jawa Runtuh’	Kamis, 12 Februari 1998	Triyanto Triwikromo dan Hendro Basuki	Gaya Hidup Boros	Krisis Kepemimpinan
7	‘Idiom Kepemimpinan Jawa Runtuh Akibat Dimanipulasi’	Kamis, 3 September 1998	Triyanto Triwikromo dan Hendro Basuki	Manipulasi Kepemimpinan Jawa	Krisis Kepemimpinan
8	‘Sultan HB X Dianggap Ratu Adil’	Kamis, 10 September 1998	Triyanto Triwikromo dan Hendro Basuki	Sultan HB X	Harapan terhadap Pemimpin Ideal

(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Berdasarkan Tabel 3.1, delapan artikel terbit pada akhir Orde Baru. Melalui *pasemon* khas budaya Jawa, rubrik ini menyuarakan kritik dan menempatkan *Hasta Brata* sebagai rujukan moral kepemimpinan. RSP periodisasi 1996-1998 terdapat tiga kategori tema: krisis kepemimpinan, filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*, dan harapan terhadap pemimpin ideal.

Berikut ini gambar 3.1 yang menampilkan tematik RSP periodisasi 1996-1998.



Gambar 3.1: Tematik RSP Periodisasi 1996 – 1998
(Sumber: Olahan Peneliti, 2026)

Keterangan:

- A. Krisis Kepemimpinan (4 artikel)
- B. Filosofi Kepemimpinan *Hasta Brata* (2 artikel)
- C. Harapan Terhadap Pemimpin Ideal (2 artikel)

Lebih jauh, RSP mengedepankan prinsip *Hasta Brata* sebagai kerangka moral tentang kepemimpinan nasional. Di tengah perubahan konteks sosial-politik, rubrik ini mempertahankan kesinambungan nilai yang berakar kuat dalam kebudayaan Jawa. Kepemimpinan dimaknai sebagai harmoni antara kebijaksanaan, integritas moral, kejernihan batin, ketegasan etis, dan kepekaan kemanusiaan.

Kritik disampaikan melalui bahasa simbolik yang halus namun tajam, dengan unsur-unsur alam sebagai cermin *laku* kekuasaan.

Dalam konteks *Hasta Brata*, menjelang runtuhnya Orde Baru metafora *Hasta Brata* merefleksikan krisis moral: ‘matahari’ meredup, ‘bumi’ rapuh, ‘laut’ keruh, dan ‘api’ berubah menjadi represif. Kritik tidak diarahkan secara frontal kepada rezim, melainkan diekspresikan lewat *pasemon* kultural agar tetap aman dari sensor. Di sini, kegagalan kepemimpinan bukan sebagai persoalan teknis, melainkan krisis nilai yang mengganggu keseimbangan sosial.

3.1.2 Analisis Tematik RSP Periodisasi 1999- Februari 2000

Periode 1999–Februari 2000 menempati posisi yang unik sekaligus krusial dalam periodisasi RSP. Pada periode ini, rubrik tidak terbit sehingga tidak tersedia data empiris langsung untuk dianalisis secara tematik. Namun, ketiadaan tersebut bukan sebagai kekosongan data atau jeda administratif dalam praktik redaksional. Sebaliknya, absennya RSP justru menghadirkan petunjuk penting mengenai dinamika struktural, sosial, dan historis yang memengaruhi produksi narasi kultural dalam media cetak. Fenomena ini terutama terlihat pada masa transisi besar bangsa Indonesia pascareformasi.

Tahun-tahun setelah 1998 merupakan periode penuh ketidakpastian. Krisis moneter yang melanda sejak 1997 tidak hanya mengguncang fondasi ekonomi nasional, tetapi juga berdampak langsung pada keberlangsungan industri pers. Banyak media cetak menghadapi tekanan finansial serius, mulai dari meningkatnya biaya produksi, menurunnya daya beli pembaca, hingga perubahan drastis dalam strategi bisnis media. Dalam situasi semacam ini, redaksi dipaksa melakukan

penyesuaian cepat dan sering kali pragmatis. Mereka memprioritaskan rubrik-rubrik yang dianggap lebih aktual, memiliki nilai jual tinggi, dan relevan secara langsung dengan gejolak politik yang berlangsung.

Dalam konteks tersebut, rubrik reflektif-kultural seperti RSP berada pada posisi yang rentan. RSP tidak dirancang sebagai ruang pemberitaan keras (*hard news*), melainkan sebagai wahana perenungan, kritik moral, dan artikulasi nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa. Karakter ini menjadikan RSP sangat bergantung pada stabilitas struktural media dan konsistensi visi redaksional. Ketika ruang redaksi dihadapkan pada tuntutan untuk merespons perubahan politik yang cepat, seperti pergantian rezim, euforia kebebasan pers, konflik dan tarik-menarik kepentingan, ruang untuk narasi etis dan kultural menjadi semakin menyempit. Hal ini menunjukkan bagaimana dinamika politik langsung memengaruhi prioritas dan strategi produksi konten di media cetak.

Ketiadaan RSP pada periode 1999–2000 mencerminkan pergeseran orientasi jurnalistik yang lebih luas. Pasca-reformasi, pers Indonesia mengalami transformasi besar dari media yang sebelumnya dikontrol ketat oleh negara menjadi arena ekspresi yang relatif bebas. Namun, kebebasan ini diiringi dengan kecenderungan meningkatnya jurnalisme politik, opini konfrontatif, dan liputan konflik. Dalam atmosfer tersebut, pendekatan jurnalistik yang halus, simbolik, dan bersifat *pasemon*- seperti yang menjadi ciri khas RSP- kurang memperoleh ruang prioritas. Nilai-nilai kebijaksanaan, pengasuhan (*pamomong*), dan refleksi moral kalah oleh kebutuhan untuk menghadirkan informasi yang cepat, keras, dan sensasional.

Meskipun demikian, periode ini memperlihatkan batasan-batasan struktural yang selama ini membingkai eksistensi RSP. Absennya rubrik menegaskan bahwa produksi narasi kultural dalam media bukanlah praktik yang berdiri di ruang hampa. Rubrik ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi media, konfigurasi kekuasaan dalam redaksi, serta konteks sosial-politik yang lebih luas. Dengan kata lain, keberadaan atau ketiadaan RSP merupakan hasil dari relasi kompleks antara idealisme jurnalistik dan realitas struktural yang menekan.

Periode 1999–2000 berfungsi sebagai periode transisi yang penting untuk memahami kontinuitas dan diskontinuitas dalam perjalanan RSP. Ketika RSP kembali hadir pada periode berikutnya, rubrik ini tidak muncul dari ruang kosong, melainkan dari pengalaman historis tentang keterbatasan, jeda, dan negosiasi makna. Ketiadaan RSP memperlihatkan betapa rapuhnya ruang refleksi etis ketika media berada dalam tekanan eksternal yang intens. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang sebelumnya diusung RSP seperti kepemimpinan moral, kearifan lokal, dan kritik sosial yang berakar pada budaya Jawa menjadi rentan dihilangkan.

Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) pada periode ini menegaskan bahwa peran moral media tidak selalu dapat dijalankan secara konsisten di setiap situasi. Ketika kondisi ekonomi tidak stabil dan orientasi redaksional bergeser, fungsi media sebagai penjaga nilai/ pengawal moral, sering kali harus berkompromi. Ketiadaan RSP sebagai refleksi dari dilema mendasar media: antara bertahan secara ekonomi dan menjaga idealisme kultural. Dilema ini tidak bersifat abstrak, melainkan dialami secara nyata oleh para pengelola media, jurnalis, dan penulis yang bekerja di bawah tekanan situasi yang serba tidak pasti.

Periode 1999–2000 sebagai bagian integral dari periodisasi RSP secara utuh dan kontekstual. Periode jeda ini bukan sekadar kekosongan, tetapi menjadi penanda historis tentang kondisi yang membatasi hadirnya ruang refleksi etis dan budaya dalam media arus utama. Ketidadaan RSP pada periode ini, menunjukkan bahwa eksistensi rubrik bergantung pada konfigurasi sosial-politik dan ekonomi yang melingkupinya. Di tengah tekanan eksternal yang kuat, menjaga ruang moral dalam media bukanlah tugas yang mudah, melainkan sebuah perjuangan yang menuntut keteguhan, negosiasi, dan kesabaran.

3.1.3 Analisis Tematik RSP Periodisasi Maret 2000-2010

Periodisasi Maret 2000–2010 menandai fase penting dalam perkembangan tematik RSP. Setelah mengalami jeda penerbitan pada periode transisi 1999–2000, rubrik ini kembali hadir dalam konteks sosial-politik yang berbeda, yakni era pasca-Reformasi dengan dinamika kepemimpinan nasional yang lebih terbuka, plural, dan fluktuatif. Pada periode ini, terdapat 18 artikel yang dianalisis menggunakan analisis tematik Braun dan Clarke (2012), dengan fokus pada pengelompokan kategori tema dan kecenderungan tematik yang berkembang dalam keseluruhan artikel periode 2000–2010.

Hasil pengkodean menunjukkan lima kategori tema yaitu: 1) krisis kepemimpinan (9 artikel); 2) harapan terhadap pemimpin ideal (3 artikel); 3) kemenangan beretika (3 artikel); 4) filosofi kepemimpinan *Hasta Brata* (2 artikel); 5) persepsi publik terhadap pemimpin (1 artikel).

Dibandingkan periode awal, periode ini memperlihatkan peningkatan jumlah kategori tema serta diversifikasi isu kepemimpinan yang dibahas dalam

RSP. Hal ini menunjukkan bahwa pasca-Reformasi, rubrik ini mulai mengembangkan cakupan tematik yang lebih luas dalam merespons realitas kepemimpinan nasional.

Berdasarkan 18 artikel yang diteliti menunjukkan bahwa krisis kepemimpinan merupakan kecenderungan tematik paling dominan dan menentukan, sebagaimana tercermin dari sembilan artikel yang secara langsung mengulas runtuhnya etika, keteladanan, dan kepekaan moral pemimpin. Dominasi tema ini menandakan bahwa kepemimpinan pada periode pascareformasi sebagai situasi berulang yang problematik dan belum menemukan pijakan etis yang kokoh.

Penerapan kategori tema ‘krisis kepemimpinan’ misalnya tampak jelas muncul dalam artikel berjudul ‘*Nglali ya Nglali Aja Ning Banget-banget*’ (2 Desember 2001). Artikel ini mengulas praktik *nglali* dan *ngapusi* digambarkan bukan lagi sebagai penyimpangan luar biasa, melainkan sebagai perilaku yang kian ditoleransi melalui pembenaran kultural. Ketika peringatan *kalabendu* kembali dihadirkan sebagai ajakan *eling*, krisis kepemimpinan diposisikan sebagai kegagalan moral kolektif, bukan semata kesalahan individu. Tematik ini diperkuat dalam artikel berjudul ‘*Ngedan, Edan-edanan pada Zaman Edan*’ (25 Agustus 2002), ketika kondisi negara digambarkan *edan-edanan* dan penguasa menjadi *micel lan mbudheg*, yakni kehilangan kemampuan melihat dan mendengar penderitaan rakyat. Dalam konteks ini, krisis kepemimpinan tidak lagi bersifat insidental, tetapi menjadi situasi yang terus direproduksi.

Narasi kosmologis dalam artikel berjudul ‘*Bila Jagad Gedhe Melongsorkan Penguasa*’ (16 Maret 2003) memperlihatkan bahwa krisis kepemimpinan sebagai

pelanggaran tatanan moral yang lebih luas. Ungkapan “raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah” menegaskan bahwa kekuasaan yang kehilangan *laku* etis pada akhirnya kehilangan legitimasi sosial. Namun, artikel-artikel berikutnya justru menunjukkan pergeseran menjadi praktik-praktik pragmatis.

Hal tersebut tampak dalam artikel berjudul ‘*Sowan Asuh Muka Soroh Banda*’ (2 Mei 2004), ketika praktik budaya *sowan* yang semula bermakna etis dipertanyakan karena berpotensi berubah menjadi alat politik dan bahkan “benih untuk menyemaikan budaya korupsi”. Pertanyaan serupa muncul melalui artikel berjudul ‘*Dalam Pusaran Takhta untuk Brayat*’ (30 Mei 2004), yang secara eksplisit mempertanyakan orientasi kekuasaan: takhta untuk rakyat atau untuk *brayat*? Krisis kepemimpinan di sini tidak lagi berhenti pada soal etika personal, melainkan menyentuh orientasi dasar kekuasaan.

Akumulasi krisis tersebut berdampak langsung pada kondisi masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam artikel dengan judul ‘*Kehilangan Mimpi, Ketiadaan Harapan*’ (13 Juni 2004). Ketika muncul pertanyaan “apalagi yang bisa diharapkan dari para pemimpin negeri ini?”, kepemimpinan dipersepsikan gagal memberi arah dan harapan. Artikel berjudul ‘*Mosok Wong Jawa Tidak Bisa Korupsi*’ (19 Juni 2005) kemudian menunjukkan bahwa krisis ini semakin rumit karena nilai-nilai budaya dan ungkapan kearifan Jawa justru dapat berfungsi membiasakan perilaku menyimpang. Dengan demikian, krisis kepemimpinan tidak hanya bersumber dari elite, tetapi juga dari penyimpangan terhadap praktik tidak etis.

Selanjutnya, artikel berjudul ‘Ratu *Ngopeni Kawula* demi Kuasa yang *Langgeng*’ (31 Juli 2005) menyorot kecenderungan pemimpin yang “merasa tak cukup dengan karisma” lalu memilih “jalan cepat untuk kembali merebut takhta”. Upaya menangguk simpati sesaat dari *kawula* memperlihatkan krisis kepemimpinan sebagai praktik pragmatis yang semakin menjauh dari prinsip keteladanan.

Terakhir, artikel berjudul ‘Jurus Pemangku Penjinak Lawan’ (18 Oktober 2009) menampilkan strategi kekuasaan yang manipulatif. Prinsip bahwa “musuh jangan dimusuhi, tetapi *direngkuh* dan dipangku” diposisikan sebagai cara menjinakkan lawan, namun sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan etika strategi tersebut.

Secara umum, sembilan artikel dalam konteks kategori tema ‘krisis kepemimpinan’ merefleksikan realitas sosial terkait krisis kepemimpinan yang berkelanjutan. Artinya, kepemimpinan dipersepsikan kehilangan pijakan etis, menyimpang dari nilai budaya yang ideal, serta gagal menjaga relasi moral dengan masyarakat. RSP periode ini menunjukkan krisis kepemimpinan sebagai kondisi yang terus berulang dalam praktik kekuasaan.

Dalam situasi krisis yang berlarut inilah, tema filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*, harapan terhadap pemimpin ideal, dan kemenangan beretika muncul bukan sebagai gambaran realitas yang dominan, melainkan sebagai rujukan nilai yang terus dihadirkan justru karena realitas kepemimpinan dipersepsikan menyimpang. Artikel dengan judul ‘Menepis Kemelaratan dengan *Tan Amukti Palapa*’ (3 Juli 2005) mengonstruksi *Hasta Brata* sebagai landasan etis kepemimpinan yang

menautkan kekayaan pemimpin dengan tanggung jawab sosial. Hal ini tampak dalam pernyataan: “Dalam ajaran *Asthabrata* ditunjukkan bahwa seorang raja, gusti, atau pemimpin haruslah kaya sekaligus penderma kepada rakyatnya yang miskin.” Kekayaan dalam perspektif ini tidak dimaknai sebagai akumulasi pribadi, melainkan sebagai sarana distribusi kesejahteraan

Demikian pula figur Baladewa yang keluguannya “ibarat mencari jarum di dalam tumpukan jerami” (‘Mencari Baladewa di Panggung Kuasa’, 16 Juni 2010), menunjukkan betapa nilai-nilai kejujuran semakin sulit ditemukan dalam praktik kekuasaan. Bahkan ditegaskan bahwa keluguan tersebut “tidak akan pernah mendapatkan tempat, kecuali untuk segera disisihkan dan *dikibuli*.” Melalui perbandingan dengan kisah Yudistira dan Drona, RSP mengulas rapuhnya nilai kejujuran ketika berhadapan dengan strategi kekuasaan yang manipulatif. Namun, artikel ini kembali menegaskan kepemimpinan ideal Jawa dengan menyatakan bahwa “dalam konsep kekuasaan dan kepemimpinan Jawa, sebagaimana yang terkristalisasi dalam *Astabrata*, bahwa kepemimpinan itu juga bak ‘matahari’ yang senantiasa tidak hanya panas dan terangnya tapi juga memancarkan lurus sinarnya.” Metafora ‘matahari’ memperlihatkan bahwa pemimpin ideal bukan hanya kuat dan berwibawa, tetapi juga konsisten, jujur, dan memberi arah secara moral.

Dalam konteks ini, ‘harapan terhadap pemimpin ideal’ melalui figur *Ratu Adil*, *Satriya Piningit*, maupun teladan Sultan HB X- tampil sebagai upaya menjaga orientasi etis di tengah kekecewaan yang berulang. Pernyataan bahwa *Ratu Adil* “*anane mung winates*” (‘*Ratu Kuwi Anane Mung Winates*’, 3 Oktober 2004)

menandai kesadaran bahwa figur ideal tersebut lebih berfungsi sebagai rujukan moral daripada sosok nyata yang mudah diwujudkan.

Selain itu, artikel berjudul ‘Saat Orang Jawa Menantikan *Ratu Adil*’ (9 Juli 2000) menampilkan tematik ‘harapan terhadap pemimpin ideal’ yang berpijak pada pengalaman historis konflik politik. Kutipan yang menyebut bahwa “*geger* politik bukanlah situasi baru bagi orang Jawa” serta rangkaian konflik sejak Ken Arok hingga Sultan Agung menunjukkan bahwa keguncangan kekuasaan dipahami sebagai pola berulang dalam sejarah Jawa. Kritik bahwa “para elite politik kurang belajar dari cara para raja Jawa itu mengatasi politik” memperlihatkan bahwa harapan terhadap pemimpin ideal muncul sebagai respons terhadap praktik kepemimpinan modern yang dipersepsikan mengabaikan kearifan sejarah. Konflik yang terjadi akibat pengabaian tersebut digambarkan berujung pada “darah tercecceh dan nyawa-nyawa melayang untuk sesuatu yang hampa”.

Kondisi ini semakin diperkuat melalui artikel berjudul ‘Mengeja Makna di Balik Sabda Brahmana Raja’ (29 April 2007) yang menghadirkan figur Sultan Hamengku Buwono (HB) X sebagai rujukan konkret dalam narasi pemimpin ideal. Momentum *wiyosan* ke-61 HB X dipandang mengguncang *kawula* ketika *Ngarso Dalem* menyatakan “keinginan untuk tak bersedia lagi menjadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta setelah masa jabatannya berakhir pada 2008”. Pernyataan ini sebagai sikap yang menegaskan jarak antara *laku* kepemimpinan kultural dan jabatan politik formal, sehingga analisis tematik yang muncul menempatkan pemimpin ideal sebagai figur yang mampu membatasi hasrat kekuasaan.

Secara umum, ketiga artikel dalam kategori tema ‘harapan terhadap pemimpin ideal’ merefleksikan konsistensi atas harapan terhadap pemimpin ideal. Harapan itu berakar pada ingatan sejarah konflik, dibangun melalui imaji kultural tentang *Ratu Adil*, serta diarahkan pada figur pemimpin yang dipandang mampu menjaga etika dan jarak dari kekuasaan formal. RSP periode ini menampilkan harapan terhadap pemimpin ideal bukan sebagai romantisme semata, melainkan sebagai refleksi kultural atas kekecewaan sekaligus aspirasi masyarakat terhadap kepemimpinan.

Sementara itu, kategori tema ‘kemenangan beretika’ dalam RSP periode ini menekankan pentingnya perilaku pemimpin yang beradab, memiliki integritas moral, dan sikap ksatria dalam memaknai kemenangan (politik). Dalam artikel dengan judul ‘Menang Tanpa *Ngasorake*, Kenapa Tidak?’ (12 Maret 2000) kemenangan beretika ditampilkan sebagai strategi kepemimpinan yang menghindari perendahan martabat lawan.

Hal ini tercermin dalam kutipan: “Gus Dur barangkali sedang menjalankan strategi menang tanpa *ngasorake* ketika *sowan* ke rumah Wiranto, Habibie dan Soeharto.” Tindakan tersebut dimaknai sebagai praktik nilai, bukan sekadar manuver politik. Penegasan bahwa “*menang tanpa ngasorake* menurut Prof. Suwaji Bastomi merupakan *piwulang* sekaligus *piweling* tentang kepemimpinan” menunjukkan bahwa kemenangan dipahami sebagai ajaran etis yang bersumber dari tradisi budaya Jawa. Kemenangan beretika diposisikan sebagai upaya menjaga harmoni sosial pasca-kontestasi.

Dalam konteks yang sama, artikel berjudul ‘Diperlukan Bisma untuk *Wani Ngalah*’ (13 Mei 2001) memperkuat nuansa tematik yang menekankan penerimaan atas kekalahan sebagai bagian dari etika kepemimpinan. Pernyataan bahwa “kultur bangsa ini tak pernah mendidik untuk menerima kekalahan sebagai sesuatu hal yang wajar” mengungkap kecenderungan memaknai kemenangan secara konfrontatif. Kutipan “kekalahan selalu menjadi titik awal untuk membangun dendam dan pembalasan” menunjukkan implikasi sosial dari absennya etika dalam memahami menang dan kalah. Dalam artikel ini, figur Bisma dihadirkan sebagai teladan kepemimpinan yang mampu *wani ngalah*, yakni mengalah dengan kesadaran dan ketulusan. Kemenangan beretika mencakup kemampuan menahan ambisi pribadi demi kepentingan yang lebih luas.

Artikel berjudul ‘Menang Sejati *Tan Ngasorake*’ (12 Juli 2009) menampilkan kemenangan beretika pada ranah batin dan penguasaan diri. Ungkapan “menang sejati, *sejatining* menang’ semestinya *digandrungi* oleh setiap petarung sejati” mengarahkan pemahaman kemenangan pada dimensi internal kepemimpinan. Rujukan pada pemikiran R.M. Sosrokartono bahwa “menang tanpa *ngasorake* sebagai kemenangan yang paling luhur” mempertegas bahwa kemenangan tertinggi tidak diukur dari keberhasilan menundukkan pihak lain, melainkan dari kemampuan menjaga integritas moral. Penyebutan “ksatria, bahkan *ksatria pinandhita*” memperlihatkan standar etis yang menyertai klaim kemenangan dalam kepemimpinan.

Secara umum, ketiga artikel dari kategori tema ‘kemenangan beretika’ memperlihatkan kategori ini dibangun relatif konsisten, meskipun hadir dalam

konteks waktu yang berbeda. Kemenangan dimaknai sebagai *laku* kepemimpinan yang menuntut kebijaksanaan dalam bertindak, ketulusan dalam mengalah, serta komitmen menjaga martabat pihak lain. Dalam perspektif konstruktivis, analisis ini tidak bermaksud menilai aktor politik tertentu. Akan tetapi menelaah bagaimana nilai kemenangan beretika dimaknai dan disampaikan sebagai bagian dari refleksi kultural atas praktik kepemimpinan nasional pada periode tersebut.

Terakhir, kategori tema ‘persepsi publik terhadap pemimpin’. Persepsi publik ini menggambarkan cara pandang masyarakat terhadap figur pemimpin, khususnya dalam menilai kedekatan, keteladanan, dan tanggung jawab sosialnya. Persepsi tersebut tercermin dalam artikel berjudul ‘Kuasa yang (Dianggap) *Sarwa Ora Pener*’ (31 Oktober 2010) untuk menelaah bagaimana persepsi publik terhadap pemimpin dikonstruksi oleh aktor. Artikel ini menandai pergeseran signifikan dalam cara publik memandang pemimpin. Pada masa lalu, penguasa digambarkan sebagai sosok yang “selalu dianggap benar dan harus dibenarkan”, di mana “titahnya laksana sabda dewa, sehingga tidak ada kata lain bagi *kawula*, kecuali *mundhi dhawuh sang nata*.” Namun, dalam konteks demokrasi, pemimpin justru berada pada posisi yang “tidak selalu benar, bahkan *sarwa ora kepeneran*.” Pergeseran ini menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak lagi bersifat sakral, melainkan bergantung pada persepsi publik yang dinamis.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan, analisis tematik periode 2000–2010 menunjukkan bahwa RSP mengonstruksi kepemimpinan sebagai persoalan etika yang mengalami krisis berkepanjangan, dengan sembilan artikel krisis kepemimpinan sebagai penanda utama. Tema-tema lain tidak meniadakan krisis

tersebut, melainkan hadir untuk melengkapi rujukan nilai, harapan, dan *laku* kepemimpinan yang lebih bermartabat di tengah realitas kekuasaan yang terjadi.

Lebih lanjut, analisis terhadap 18 artikel RSP memperlihatkan bahwa persoalan yang paling menonjol adalah krisis kepemimpinan sebagai realitas sosial yang berulang dan dirasakan secara kolektif. Kepemimpinan tidak diposisikan sebagai sesuatu yang stabil atau mapan, melainkan sebagai praktik yang dikonstruksi karena kehilangan *laku* etis, keteladanan, dan daya *pamong*. Kritik yang muncul tidak diarahkan pada individu semata, tetapi pada cara kekuasaan dijalankan tanpa kepekaan moral dan tanggung jawab terhadap rakyat.

Dalam konteks inilah, nilai-nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dihadirkan sebagai rujukan makna kultural yang digunakan untuk menyikapi antara kepemimpinan yang dijalankan dan kepemimpinan yang diharapkan. Harapan terhadap pemimpin ideal dipahami sebagai penilaian normatif atas legitimasi etis kekuasaan. Kondisi ini sekaligus merefleksikan kekecewaan publik terhadap praktik kepemimpinan yang dianggap belum memenuhi tanggung jawab moral.

Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) pada periode ini tetap menempatkan kepemimpinan sebagai tema sosial-kultural yang berlandaskan pertimbangan etis. Nilai kepemimpinan bukan sebagai konsep yang mapan, melainkan sebagai pedoman (*laku*) sehari-hari yang berkelanjutan dalam tradisi kepemimpinan Jawa.

Atas dasar itu, rangkaian tematik pada RSP 2000–2010 tetap menunjukkan dominasi tema krisis kepemimpinan. Selain itu, terdapat tema-tema lain: etika kemenangan (kemenangan beretika), figur pemimpin ideal (harapan terhadap

pemimpin ideal), nilai kepemimpinan tradisional (filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*), dan persepsi publik terhadap pemimpin.

Berikut ini Tabel 3.2 berisi 18 artikel dalam RSP periodisasi 2000-2010.

Tabel 3.2 Artikel RSP Periodisasi 2000-2010

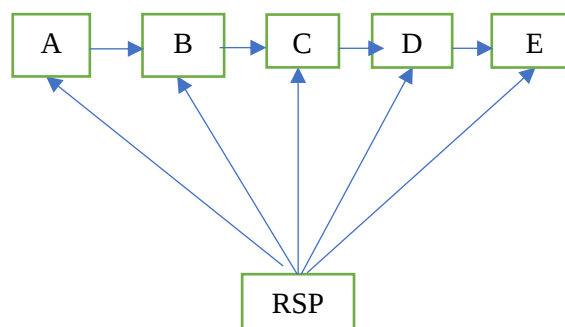
No	Judul Artikel	Edisi	Penulis	Kode Awal	Kategori Tema
1	'Menang Tanpa <i>Ngasorake</i> , Kenapa Tidak?'	Minggu, 12 Maret 2000	Sucipto Hadi Purnomo (Penulis eksternal, sastrawan, kolumnis, dosen)	Menang Tanpa <i>Ngasorake</i>	Kemenangan Beretika
2	'Saat Raja Jawa Mengatasi Geger Politik'	Minggu, 9 Juli 2000	Triyanto Triwikromo (Penulis internal, sastrawan)	Geger Politik	Harapan terhadap Pemimpin Ideal
3	'Diperlukan Bisma Untuk <i>Wani Ngalah</i> '	Minggu, 13 Mei 2001	Sucipto Hadi Purnomo	Figur Ideal Bisma	Kemenangan Beretika
4	' <i>Nglali Ya Nglali, Ning Aja Banget-Banget!</i> '	Minggu, 2 Desember 2001	Sucipto Hadi Purnomo	<i>Nglali</i>	Krisis Kepemimpinan
5	' <i>Ngedan, Edan-edanan</i> Pada Zaman <i>Edan</i> '	Minggu, 25 Agustus 2002	Gunawan Budi Susanto (Penulis internal, Pengasuh RsP, sastrawan)	Zaman <i>Edan</i>	Krisis Kepemimpinan
6	'Bila <i>Jagad Gedhe</i> Melongsorkan Penguasa'	Minggu, 16 Maret 2003	Sucipto Hadi Purnomo	<i>Jagad Gedhe</i>	Krisis Kepemimpinan
7	' <i>Sowan Asuh Muka Soroh Bandha</i> '	Minggu, 2 Mei 2004	Sucipto Hadi Purnomo	Tradisi <i>Sowan</i>	Krisis Kepemimpinan
8	'Dalam Pusaran Takhta untuk <i>Brayat</i> '	Minggu, 30 Mei 2004	Gunawan Budi Susanto	Takhta	Krisis Kepemimpinan
9	'Kehilangan Mimpi Ketiadaan Harapan'	Minggu, 13 Juni 2004	Gunawan Budi Susanto	Pupusnya Harapan	Krisis Kepemimpinan
10	' <i>Ratu Kuwi Anane Mung Winates</i> '	Minggu, 3 Oktober 2004	Sucipto Hadi Purnomo	Pemimpin/Ratu	Harapan pada Pemimpin Ideal
11	' <i>Mosok Wong Jawa</i> Tidak Bisa Korupsi?'	Minggu, 19 Juni 2004	Sucipto Hadi Purnomo	Budaya Korupsi	Krisis Kepemimpinan
12	'Menepis Kemelaratan dengan Tan Amukti Palapa'	Minggu, 3 Juli 2005	Sucipto Hadi Purnomo	'Amukti Palapa'	Filosofi Kepemimpinan <i>Hasta Brata</i>

13	'Ratu <i>Ngopeni Kawula</i> Demi Kuasa yang Langgeng'	Minggu, 31 Juli 2005	Sucipto Hadi Purnomo	Pemimpin/Ratu	Krisis Kepemimpinan
14	'Mengeja Makna di Balik Sabda Brahmana Raja'	Minggu, 29 April 2007	Sucipto Hadi Purnomo	Sabda Raja	Harapan terhadap Pemimpin Ideal
15	'Menang Sejati <i>Tan Ngasorake</i> '	Minggu, 12 Juli 2009	Sucipto Hadi Purnomo	Menang <i>Tan Ngasorake</i>	Kemenangan Beretika
16	'Jurus Pemangku Penjinak Lawan'	Minggu, 18 Oktober 2009	Sucipto Hadi Purnomo	Musuh Mengintai	Krisis Kepemimpinan
17	'Mencari Baladewa di Panggung Kuasa'	Minggu, 6 Juni 2010	Sucipto Hadi Purnomo	Sosok Baladewa	Filosofi Kepemimpinan <i>Hasta Brata</i>
18	'Kuasa yang (Dianggap) <i>Sarwa Ora Pener</i> '	Minggu, 31 Oktober 2010	Sucipto Hadi Purnomo	Eksistensi Penguasa	Persepsi Publik terhadap Pemimpin

(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 3.2, RSP periodisasi 2000-2010 menampilkan dinamika kepemimpinan yang semakin kompleks, menyingkap kontradiksi antara nilai luhur kepemimpinan *Hasta Brata* dan praktik kekuasaan sehari-hari.

Berdasarkan tabel 3.2, berikut gambar tematik RSP periodisasi 2000-2010 seperti tercantum dalam Gambar 3.2 di bawah ini:



Gambar 3.2: Tematik RSP Periodisasi 2000 – 2010
(Sumber: Olahan Peneliti, 2026)

Keterangan:

- A. Krisis Kepemimpinan (9 artikel)
- B. Kemenangan Beretika (3 artikel)
- C. Harapan Terhadap Pemimpin Ideal (3 artikel)
- D. Filosofi Kepemimpinan *Hasta Brata* (2 artikel)
- E. Persepsi Publik Terhadap Pemimpin (1 artikel)

Secara umum, RSP periode 2000–2010 memaknai nilai kepemimpinan *Hasta Brata* sebagai refleksi atas berlanjutnya krisis moral kepemimpinan dalam konteks Indonesia pada fase transisi dan konsolidasi demokrasi pasca-Reformasi. Periode ini ditandai oleh pergantian kepemimpinan nasional yang relatif cepat dari Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk situasi politik dan birokrasi yang belum sepenuhnya stabil. Dalam lanskap tersebut, metafora ‘matahari’ tetap hadir sebagai simbol meredupnya keteladanan pemimpin di tengah ketidakpastian arah dan konsistensi kepemimpinan nasional.

Metafora ‘bumi’ serta ‘samudra’ atau ‘laut’ merepresentasikan melemahnya tanggung jawab sosial dan kejernihan nurani pemimpin dalam mengelola relasi dengan rakyat, seiring dengan proses penataan ulang institusi negara dan birokrasi yang masih sarat tarik-menarik kepentingan politik. Sementara itu, unsur ‘api’-yang pada periode sebelumnya tampil dominan sebagai simbol keberanian moral-cenderung memudar, menandai surutnya keberanian etis dalam mengambil keputusan tegas di tengah dinamika kompromi dan negosiasi politik masa transisi. Menariknya, unsur ‘angin’ justru tampil lebih tegas dalam periode ini, melambangkan renggangnya relasi emosional antara pemimpin dan rakyat. Hal ini merefleksikan jarak komunikasi dan empati yang terbentuk selama proses

konsolidasi kekuasaan. Refleksi ini menggambarkan stabilitas politik dan tata kelola sering kali lebih diutamakan, daripada kedekatan sosial dan kepekaan terhadap pengalaman keseharian masyarakat.

Berpijak pada penjelasan tersebut, RSP mengonstruksi krisis kepemimpinan bukan semata sebagai persoalan moral personal pemimpin, melainkan sebagai persoalan relasional yang mencakup ‘kemiskinan empati’ dan rapuhnya ikatan sosial antara penguasa dalam fase transisi demokrasi Indonesia.

3.1.4 Analisis Tematik RSP Periodisasi 2011-2020

Penulis mengkaji 22 artikel RSP periodisasi 2011-2020. Rubrik di era ini berlangsung di tengah disrupsi digital sehingga menghantam bisnis pers cetak-khususnya surat kabar. Di periode ini, kritik moral justru menguat, menyinggung polarisasi, hoaks, dan degradasi etika. Nilai *Hasta Brata* berfungsi sebagai ‘jangkar’ kearifan lokal, menghadirkan keteduhan reflektif di tengah gaduhnya demokrasi di layar digital.

Seperti di periode sebelumnya, 22 artikel dalam periode ini dianalisis sebagai satu kesatuan dengan menggunakan analisis tematik sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2012).

Hasil pengkodean menunjukkan lima kategori tema yaitu: 1) krisis kepemimpinan (13 artikel); 2) filosofi kepemimpinan *Hasta Brata* (4 artikel); 3) harapan terhadap pemimpin ideal (2 artikel); 4) kaderisasi kepemimpinan (2 artikel); 5) kemenangan beretika (1 artikel).

Dalam rentang 2011–2020, RSP mengonstruksi krisis kepemimpinan bukan sebagai kegagalan teknokratis atau administratif, melainkan sebagai melemahnya

kendali diri dan pengabaian nilai etika kepemimpinan Jawa dalam praktik kekuasaan. Kepemimpinan dinilai bukan dari efektivitas kebijakan, melainkan dari keselarasan antara kuasa, kendali diri, dan etika hidup. Di titik inilah nilai-nilai *Hasta Brata* berfungsi sebagai prinsip evaluatif, bukan doktrin normatif.

Krisis kepemimpinan dikonstruksi sebagai proses pemaknaan atas relasi antara nilai-nilai budaya Jawa yang ideal dan praktik kekuasaan yang berlangsung. Artikel berjudul ‘Orientasi Politik Jawa Soeharto’ (29 Mei 2011) menjadi fondasi penting, karena RSP memperlihatkan bagaimana nilai-nilai budaya Jawa direduksi menjadi simbol legitimasi. Ketika Soeharto digambarkan “menampilkan diri dalam ambiguitas”- sebagai “raja dengan nalar kekuasaan tradisional” sekaligus “manusia politik modern”, RSP menunjukkan bahwa krisis muncul saat nilai budaya Jawa tidak sebagai *laku*. Nilai tersebut berubah menjadi “selimut” kekuasaan. Pernyataan bahwa “idealitas (kekuasaan) Jawa hampir tak terasakan” menandai kegagalan internalisasi nilai, bukan ketiadaannya.

Reduksi nilai menjadi instrumen politik itu berulang dalam artikel berjudul ‘Tradisi dan Kampanye Politikus’ (2 Maret 2014). RSP menegaskan bahwa perubahan sosial tidak mungkin lahir dari simbol kosong, sebab “alas perubahan kehidupan adalah perubahan kebudayaan”. Ketika kebudayaan diperlakukan sebagai “kuda tunggangan meraih kekuasaan”, kepemimpinan kehilangan basis etikanya. Di sini krisis tidak lahir dari perbedaan pandangan politik, tetapi dari pengkhianatan terhadap fungsi kebudayaan sebagai penuntun *laku*.

Dimensi berikutnya adalah krisis sabda dan konsistensi moral. Artikel berjudul ‘Reshuffle dan Jagat Wayang’ (27 Juli 2016) membingkai kepemimpinan

melalui prinsip *sabda pandhita ratu tan kena wola-wali*. Ketika publik “mencium aroma bagi-bagi kue kekuasaan” dan janji menuntaskan pelanggaran HAM tergeser oleh “kursi empuk”, krisis kepemimpinan dipahami sebagai retaknya ikatan etis antara ucapan dan tanggung jawab. Kepemimpinan hadir secara struktural, tetapi kehilangan bobot moralnya.

Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) kemudian memperdalam krisis sebagai pergeseran makna kekuasaan dari amanah menjadi kalkulasi dukungan. Dalam artikel dengan judul ‘Rekayasa dalam Pertarungan Kekuasaan’ (7 Oktober 2018) mengonstruksi kekuasaan dikelilingi figur *bidhung api rowang*- tampak menolong, tetapi menyimpan kepentingan. Demi suara, “mantan koruptor, maling, bergabung, silakan”. Di sini krisis tidak lagi personal, melainkan sistemik: legitimasi dibangun lewat simbol *wingka katon kencana*, bukan keselarasan nilai dan *pulung* kekuasaan. Kepemimpinan tetap ada, tetapi “terasa hambar” karena tercerabut dari dasar kulturalnya.

Krisis semakin nyata ketika nilai Jawa direduksi menjadi strategi elektoral. Artikel berjudul ‘Membangun Markas Batin Jawa’ (16 Desember 2018) mempertanyakan apakah Jawa dijalani sebagai *laku* atau sekadar basis persepsi politik. Ketika ruang publik dipenuhi “hujat-hujatan, *srekal-srekan*, *pongah-pongahan*”, RSP menegaskan bahwa fokus pada “markas lahir” dan pengabaian “markas batin” mengosongkan kepemimpinan dari nilai “*wedi, isin, sungkan, rukun, urmat, eling lan waspada*”.

Dimensi krisis batin tampak kuat dalam artikel berjudul ‘Kuasa, Bencana dan Budaya’ (27 Januari 2019). Pemimpin digambarkan *gobal-gabul*, “acap

cemas”, dan gemar “merekayasa citra”, sementara kepemimpinan sejati mensyaratkan “kekuatan batin tinggi” yang menyelaraskan masyarakat dan alam. Pencitraan ‘*blusukan* ke selokan’ dan gestur religius, ditampilkan sebagai tanda ketiadaan *laku* batin, bukan kehadiran kepemimpinan.

Kerakusan dan keakuan menjadi simpul krisis berikutnya. Artikel berjudul ‘Politik *Umuk* dan *Kemaruk*’ (10 Februari 2019) menyebut aktor politik sebagai “manusia *kemaruk* yang gila hormat”, yang “*ngregem* kekuasaan” dan mengandalkan *aji mumpung*. Dalam kondisi ini, demokrasi dan kemanusiaan disisihkan, bahkan kritik dibungkam. RSP menegaskan bahwa kehancuran kepemimpinan bersumber dari hilangnya kendali diri, bukan dari kurangnya kecakapan.

Tema kegagalan kendali diri itu mencapai metafora tajam dalam artikel berjudul ‘Gagal Memilih *Ugul-Ugul*’ (24 Maret 2019). *Paribasan* ‘*kekudhung walulang macan*’ digunakan untuk menunjukkan ketergantungan semu pada kekuasaan besar. Ketika “kerudung itu tersingkap”, pemimpin yang merasa kebal hukum jatuh sebagai “macan-macanan”. Penjara menjadi penutup pahit kegagalan batin, bukan sekadar sanksi hukum.

Dalam ranah elektoral, artikel berjudul ‘Memburu *Pulung* Kekuasaan’ (7 April 2019) menampilkan krisis sebagai runtuhnya *laku alus*. Ketika kepemimpinan tampil “kasar nan vulgar” dan “sikap hormat telah dibuang ke tengah laut”, RSP menegaskan bahwa kewibawaan lahir dari ketenangan batin, bukan hiruk-pikuk pencitraan dan serangan personal.

Bahasa menjadi medan krisis tersendiri. Artikel berjudul ‘Metafora yang Gegabah dan Sewiyah-Sewiyah’ (25 Agustus 2019) menegaskan bahwa pemimpin adalah “*titah yang kadunungan akal budi*”. Ketika metafora merendahkan: “coro, kera, monyet, babi, anjing” digunakan untuk menyebut “saudara-setanah air: Papua”, kekuasaan kehilangan kehalusan budi. Polarisasi “cebong dan kampret” diposisikan sebagai awal, tetapi krisis sejati lahir dari kegagalan menjaga etika tutur.

Relasi kosmis menjadi penanda krisis berikutnya. Dalam artikel berjudul ‘Memahami Jagat Banjir’ (5 Januari 2020) banjir tidak dimaknai netral, sebab ketika “banjir melanda, hujan-menghujat pun datang bergelombang” dan bencana “menjadi panggung politik”. Wejangan “*aja dume* punya uang... lantas *kemaruk* membangun dengan membabati alam” menunjukkan kepemimpinan yang memutus kesadaran bahwa manusia adalah “*jagad cilik, bawana alit*”.

Krisis mencapai bentuk reflektif dalam artikel berjudul ‘Wabah versus Power Budaya’ (5 April 2020). Ketika “kekuatan dan dampak imajinasi lebih besar ketimbang realitas”, kepemimpinan diuji pada kemampuan menenteramkan kecemasan kolektif. Namun, penguasa justru larut dalam kalkulasi kuasa. RSP mengajukan pemimpin “*wira, wegig, wiled, dan wicaksana*” sebagai antitesis terhadap dominasi nafsu “*raja amarah*”, “*raja aluamah*”, dan “*raja supiyah*”.

Akhirnya, artikel dengan judul ‘Harta atau Nyawa, Mukti atau Mati’ (2 Agustus 2020) menutup rangkaian krisis sebagai artikulasi nilai etis antara progresivitas dan keluhuran *laku*. Progresivitas diakui, tetapi harus berakar pada *eling lan waspada* dan *wani ngalah luhur wekasane*. Ketika semboyan “*mukti* atau

mati” berubah menjadi hasrat menang, kepemimpinan kehilangan kemuliaannya. Nilai *Hasta Brata* menyimpang, bukan karena ditolak, tetapi karena ditundukkan oleh ambisi.

Secara keseluruhan, RSP membangun krisis kepemimpinan sebagai kegagalan menjaga kendali batin dalam mengelola kuasa. Kekuasaan hadir, tetapi *laku* batin absen; simbol melimpah, tetapi ‘nilai mengering’. Dalam perspektif *Hasta Brata*, krisis ini bukan soal siapa berkuasa, melainkan bagaimana kuasa dijalani.

Rubrik pada periode ini memiliki kategori tema ‘filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*’ dengan tetap menempatkan ajaran *Hasta Brata* sebagai kerangka etis untuk memahami praktik kepemimpinan, bukan sekadar sebagai rujukan simbolik. Terdapat empat artikel yang menempatkan *Hasta Brata* sebagai filosofi *laku* kepemimpinan, bukan sekadar sistem simbol atau warisan konseptual. Kepemimpinan Jawa dalam hal ini sebagai praktik etis yang menuntut keselarasan antara kekuasaan, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka ini, kekuasaan bukan tujuan, melainkan sarana untuk pengayoman.

Artikel dengan fondasi etis kepemimpinan *Hasta Brata* muncul dalam artikel berjudul ‘Mengontrol *Gung Binathara*’ (26 Juni 2011). RSP menegaskan dalam posisi *agung binathara* dan *mbaudhendha anyakrawati*, kekuasaan tetap harus dikendalikan. Prinsip “*sabda brahmana-raja sepisan tan kena wola-wali* dan *bawa laksana*” menempatkan kata-kata pemimpin sebagai ikatan moral atas dirinya sendiri. Kepemimpinan *Hasta Brata* hanya bekerja ketika ada iktikad menjalankan

njaga tata tentreming kawula melalui relasi *jumbuhing kawula-gusti*. Tanpa itu, kekuasaan kehilangan arah dan berjalan *padha nggugu karepe dhewe*.

Artikel dengan judul ‘Mitos & Mazhab Kekuasaan Jawa’ (5 Maret 2017) menegaskan posisi *Hasta Brata* sebagai mazhab kepemimpinan Jawa, bukan etika situasional. Kekuasaan dimaknai sebagai amanah dan takdir yang keberlangsungannya ditentukan oleh kebijakan penguasa kepada *kawula alit*, bukan kecakapan teknis semata. Kehilangan *wahyu keprabon* sebagai konsekuensi etis, bukan kekalahan politik. Sindiran terhadap ritual tanpa *laku*- seperti ziarah ke Pringgondani- menegaskan bahwa *Hasta Brata* menolak simbol kosong yang tidak ditopang perilaku luhur.

Penegasan paling konkret muncul dalam artikel berjudul ‘Kuasa dan Pengendalian Kekuasaan’ (27 Agustus 2017). Sifat *mahambeg lakuning samudra* dan *ati kang nyamudra* menempatkan kritik sebagai ujian batin. Ketika penguasa “tak kuasa menahan kritik”, lalu menempuh jalan “membunuh, menindas, menculik”, RSP menunjukkan bahwa kegagalan kepemimpinan bukanlah kegagalan sistem, melainkan kegagalan pengendalian diri.

Secara keseluruhan, ketiga artikel ini membangun *Hasta Brata* sebagai filosofi kepemimpinan berbasis *laku*. Kepemimpinan terlihat dari kemampuan pemimpin menahan diri, menjalankan kekayaan secara etis, menepati sabda, dan menjaga hubungan adil dengan rakyat. Dalam perspektif RSP, kepemimpinan Jawa melemah ketika praktik nilai-nilai *Hasta Brata* sebagai pedoman etis dan pengendalian diri tidak diwujudkan dalam *laku* nyata, sehingga sekedar simbol atau retorika semata.

Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) periodisasi 2011–2020 mengonstruksi kaderisasi kepemimpinan sebagai proses sosial-kultural yang berlangsung melalui relasi, pembelajaran, dan pewarisan nilai. Kaderisasi kepemimpinan menekankan pentingnya proses persiapan calon-calon pemimpin secara berkelanjutan, beretika dan berbasis keteladanan. Dalam artikel berjudul ‘Ayo Siapa Berani Memimpin?’ (1 April 2012) memaknai kepemimpinan sebagai proses sosial yang terbentuk melalui relasi timbal balik antara pemimpin dan yang dipimpin. Hal ini tampak dalam pernyataan bahwa “jangan pernah melihat kepemimpinan hanya dari yang memimpin... antara yang *paring* pengayoman dan *konjuk kabekten* mesti membangun relasi saling mengerti”. Kepemimpinan dengan demikian bukan semata-mata sebagai atribut individual, melainkan sebagai hasil interaksi, proses pembelajaran, dan pengaruh situasional. Pandangan ini ditegaskan melalui penjelasan bahwa kepemimpinan melibatkan bagaimana “pemimpin dan pengikut saling memengaruhi, juga bagaimana situasi bisa memengaruhi kemampuan dan tingkah laku keduanya”.

Dalam perspektif budaya Jawa, artikel berjudul ‘Ayo Siapa Berani Memimpin?’ membangun kerangka kaderisasi kepemimpinan melalui internalisasi nilai kepekaan dan penentuan skala prioritas (*hambeg paramarta*). Artikel ini juga berisi *laku* memberi yang bersifat kontekstual, sebagaimana diungkapkan melalui metafora “*aweh payung marang wong kang kudanan... aweh banyu marang wong kasatan*”. Kutipan-kutipan tersebut mengonstruksi kepemimpinan sebagai praktik etis yang dipelajari melalui keteladanan dan pengelolaan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Penegasan bahwa pemimpin “*tak* boleh mempunyai keberpihakan”

serta harus mampu memberikan sanksi dan penghargaan secara proporsional menunjukkan pentingnya prinsip keadilan dalam kepemimpinan. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembentukan kepemimpinan sebagai mekanisme sosial yang terus direproduksi melalui praktik. Dengan demikian, artikel ini merepresentasikan kaderisasi kepemimpinan sebagai proses sosial-kultural yang dibangun, dipahami, dan diwariskan melalui pengalaman kepemimpinan yang konkret.

Selanjutnya, artikel berjudul ‘Tak Mau *Lengser* Sampai Hilang’ (8 Juli 2012) mengonstruksi kaderisasi kepemimpinan sebagai proses sosial yang sangat bergantung pada relasi antargenerasi. Narasi diawali dengan gambaran bahwa “kaum muda tak mudah mendapat kepercayaan” dan kerap diposisikan sebagai pihak yang belum tepat waktu (*aja nggege mangsa*), sehingga peluang untuk belajar dan memimpin menjadi terbatas. Dalam konstruksi ini, kaderisasi bukan semata-mata sebagai persoalan kesiapan generasi muda, melainkan juga sebagai persoalan keterbukaan generasi senior dalam berbagi pengetahuan dan peran. Hal tersebut ditegaskan melalui pertanyaan reflektif: “bagaimana pengaderan bisa berlangsung bila yang senior tak mau bertukar *kawruh*, apalagi *lengser*?”

Kepemimpinan Jawa dalam artikel dengan judul ‘Tak Mau *Lengser* Sampai Hilang’ direpresentasikan sebagai *laku* keteladanan aktif, bukan sekadar kewibawaan simbolik, selaras dengan prinsip *ing ngarsa sung tuladha*. Kesiadaan untuk *lengser keprabon* dimaknai sebagai bagian penting dari proses pembelajaran sosial bagi calon pemimpin. Sebaliknya, ketidaksiadaan untuk mundur dikonstruksikan melalui ungkapan *Krasa enak, diuntal sapiringe!* yang

merepresentasikan keterikatan pada kenikmatan posisi dan ketenaran. Melalui narasi tersebut, artikel ini membangun pemahaman bahwa dengan *leren* dan memberi ruang bagi kaderisasi, makna kepemimpinan justru dapat direproduksi secara lebih berkelanjutan. Kaderisasi, dalam konstruksi ini, hadir sebagai praktik sosial-kultural yang dijaga melalui kesadaran waktu, keteladanan, dan kesediaan berbagi peran.

Rubrik ini mengonstruksi ‘harapan terhadap pemimpin ideal’ sebagai proses sosial-kultural yang dibentuk melalui pemaknaan simbolik, ingatan kolektif, dan konteks sosial yang melingkupinya. Artikel berjudul ‘*Ratu Adil* dan Simbol Pemimpin’ (22 Juni 2014) mengonstruksi harapan tersebut melalui proses simbolisasi yang berakar pada memori kultural masyarakat. *Ratu Adil* diposisikan sebagai “simbol untuk menolong bangsa ini dari kegelapan menuju ke cahaya terang”. Figur ini membangun pemahaman tentang pemimpin ideal sebagai sosok transformasional yang memberi arah, inspirasi, dan energi moral bagi kehidupan kolektif. Dalam konstruksi ini, kepemimpinan tidak dimaknai semata-mata sebagai fungsi struktural, melainkan sebagai representasi nilai dan harapan bersama.

Artikel ini menunjukkan bahwa simbol ‘*Ratu Adil*’ berfungsi sebagai kerangka rujukan kultural yang “terus berulang di tengah bangsa yang membutuhkan komando kepemimpinan”. Pengulangan tersebut menandai bahwa harapan terhadap pemimpin ideal dibentuk dan dipelihara melalui proses simbolisasi yang berkelanjutan. Dalam konteks kekinian, makna ‘*Ratu Adil*’ mengalami pergeseran ketika ia “tidak lagi sebagai penanda sejarah”, melainkan “hadir sebagai pesan politik yang membawa makna dan tafsir yang beragam”.

Pergeseran ini mengindikasikan bahwa figur pemimpin ideal dikonstruksikan melalui adaptasi simbol budaya ke dalam praktik komunikasi yang kontekstual. Prinsipnya, artikel ini memperlihatkan bagaimana harapan terhadap pemimpin ideal dibangun dan dimaknai ulang melalui simbol '*Ratu Adil*' sesuai dengan kebutuhan sosial pada zamannya.

Sementara itu, artikel berjudul '*Yudhistira & Kejujuran Kita*' (10 April 2016) mengonstruksi harapan terhadap pemimpin ideal melalui oposisi simbolik antara praktik politik kontemporer dan nilai kejujuran yang hidup dalam kesadaran budaya Jawa. Politik dimaknai sebagai ruang ketika "politik menjadi panggung sandiwara", sedangkan kejujuran digambarkan sebagai sesuatu yang "langka, bahkan ajaib". Rubrik ini mengonstruksi jarak antara realitas empirik politik dan imajinasi normatif tentang kepemimpinan. Sebagai konsekuensinya, kejujuran bukan sekadar sebagai sikap personal, melainkan sebagai nilai yang semakin terpinggirkan dalam *laku* kepemimpinan publik.

Dalam kerangka budaya Jawa, kejujuran dikonstruksikan sebagai kesatuan antara batin dan tutur, yang diekspresikan melalui konsep *blakasuta*, *cablaka*, atau *blaka*, yakni "kesatuan hati dan ucapan". Artikel ini menempatkan nilai tersebut sebagai hasil pewarisan sosial yang "telah diajarkan sejak kecil" dan menjadi "nilai dasar konstruksi pendidikan serta pembentukan identitas". Harapan terhadap pemimpin ideal dibangun melalui memori kultural tentang kejujuran sebagai tolok ukur kualitas manusia dalam "kesadaran Jawa".

Figur Yudhistira kemudian berfungsi sebagai medium simbolik untuk mengonkretkan nilai tersebut. Narasi bahwa Yudhistira "selalu berkata jujur dan

tidak pernah menipu” serta memiliki “darah putih” mengonstruksi pemimpin ideal sebagai personifikasi kemurnian moral. Melalui figur wayang ini, artikel tidak menilai praktik politik secara langsung, melainkan membentuk makna tentang kepemimpinan yang jujur sebagai nilai yang diharapkan, dikenali, dan direproduksi dalam imajinasi kultural masyarakat.

Sementara itu, kategori tema ‘kemenangan beretika’ dikonstruksikan melalui pemaknaan kemenangan yang tidak berhenti pada capaian hasil, melainkan diletakkan dalam kerangka tanggung jawab moral. Artikel berjudul ‘Mengalah dan Kemenangan Sejati’ (9 Juni 2013) membangun makna kemenangan dengan menempatkan aspek etis sebagai pusat pembahasan. Sejak awal, narasi ini membedakan kemenangan sebagai hasil (menguasai medan) dari kemenangan sebagai proses yang bernilai, dengan menegaskan bahwa “kemenangan bukan segalanya”. Pernyataan ini berfungsi mengarahkan pembaca untuk memahami kemenangan tidak hanya sebagai pencapaian faktual, tetapi sebagai pengalaman yang sarat tuntutan moral.

Narasi tersebut mengonstruksi hubungan antara kemenangan dan amanah. Kalimat “dalam kemenangan ada amanah yang harus dipegang teguh” memposisikan kemenangan sebagai kondisi yang menuntut tanggung jawab. Kemenangan dapat “berubah menjadi kekalahan” apabila *laku* etis tidak dijalankan. Kemenangan tidak dipahami sebagai titik akhir, melainkan sebagai tahap sosial yang menuntut pembuktian moral secara berkelanjutan.

Dalam konteks kepemimpinan itulah, pemenang diposisikan sebagai subjek yang justru diuji setelah ‘duduk di singgasana’, bukan semata-mata pada saat

kompetisi berlangsung. Etika kemenangan dibangun melalui perbedaan antara pemenang yang hanya ‘mengalahkan musuh’ dan pemenang yang ‘menjadi pemenang bagi semua’. Perbedaan ini membatasi makna kemenangan yang dianggap layak secara kultural, sekaligus menegaskan tuntutan tanggung jawab sosial dari posisi menang.

Rujukan nilai Jawa seperti *sekti tanpa aji, sugih tanpa bandha* serta pernyataan bahwa “*ngalah* sesungguhnya menghasilkan kemenangan lebih gemilang” berfungsi sebagai rujukan budaya untuk memperkuat makna tersebut. Melalui rujukan ini, pengendalian diri dan kejujuran dipahami sebagai sumber kewibawaan kepemimpinan. Dengan cara ini, RSP tidak merayakan kemenangan sebagai pencapaian semata, melainkan mengajarkan cara memaknai kemenangan sebagai praktik etis yang sepatutnya dijaga dan diterapkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan, RSP periodisasi 2011–2020 tetap mengonstruksi makna kepemimpinan dalam kerangka etika Jawa, terutama melalui nilai-nilai *Hasta Brata*. Dari 22 artikel yang dianalisis, tema krisis kepemimpinan menempati porsi paling dominan, yang menunjukkan kuatnya perhatian RSP terhadap problem etika, keteladanan, dan tanggung jawab pemimpin dalam konteks sosial-politik kontemporer.

Di tengah dominasi kategori tema krisis kepemimpinan tersebut, RSP menghadirkan rujukan melalui filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*, yang berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menyikapi perilaku pemimpin. Nilai-nilai ini tidak dihadirkan sebagai ajaran abstrak, melainkan sebagai pedoman *laku* dalam tautan dengan keadilan, pengendalian diri, dan kepekaan sosial.

Selain itu, isu kaderisasi kepemimpinan dan ‘harapan terhadap pemimpin ideal’ menunjukkan bahwa konteks kepemimpinan melalui RSP merupakan proses yang berkelanjutan. Kepemimpinan tidak ditempatkan semata pada figur yang berkuasa, tetapi pada mekanisme pewarisan nilai, keteladanan antargenerasi, serta mentradisikan prinsip kejujuran sebagai dasar kualitas moral pemimpin.

Tema kemenangan beretika melengkapi konstruksi dalam RSP dengan menempatkan keberhasilan politik sebagai peristiwa yang menuntut tanggung jawab moral. Secara keseluruhan, RSP periode 2011–2020 membangun pemahaman kepemimpinan sebagai praktik bernilai yang dikonstruksi dan dipahami melalui relasi sosial, *laku etis*, dan kesadaran budaya.

Dengan demikian, tematik RSP 2011-2020 tetap menunjukkan dominasi tema krisis kepemimpinan. Selain itu, terdapat tema-tema lain meliputi etika kemenangan (kemenangan beretika), figur pemimpin ideal (harapan terhadap pemimpin ideal), nilai kepemimpinan tradisional (filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*), dan keberlanjutan kepemimpinan.

Berikut ini Tabel 3.3 berisi 22 artikel RSP periodisasi 2011-2020:

Tabel 3.3 Artikel RSP Periodisasi 2011-2020

No	Judul Artikel	Edisi	Penulis	Kode Awal	Kategori Tema
1	‘Saat Orang Jawa Kehilangan Rai’	Minggu, 3 April 2011	Munawir Azis (Penulis eksternal)	Hilangnya Rasa Malu	Krisis Kepemimpinan
2	‘Orientasi Politik Jawa Soeharto’	Minggu, 29 Mei 2012	Bandung Mawardi (Penulis eksternal)	Politik Kejawaan Soeharto	Krisis Kepemimpinan
3	‘Mengontrol Gung Binathara’	Minggu, 26 Juni 2012	Sucipto Hadi Purnomo	<i>Gung Binathara</i>	Filosofi Kepemimpinan <i>Hasta Brata</i>

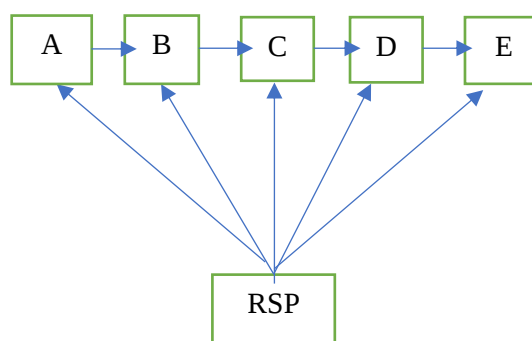
4	‘Ayo Siapa Berani Memimpin?’	Minggu, 1 April 2012	Dhoni Zustiyanoro (Penulis eksternal, mantan wartawan Harian Suara Merdeka, sastrawan, dosen)	Pemimpin	Kaderisasi Kepemimpinan
5	‘Tak Mau Lengser Sampai Hilang’	Minggu, 8 Juli 2012	Dhoni Zustiyanoro	<i>Lengser Keprabon</i>	Kaderisasi Kepemimpinan
6	‘Mengalah dan Kemenangan Sejati’	Minggu, 9 Juni 2013	Dhoni Zustiyanoro	Etika Kemenangan	Kemenangan Beretika
7	‘Tradisi dan Kampanye Politikus’	Minggu, 2 Maret 2014	Sendang Mulyana (Penulis eksternal, mantan wartawan Harian Suara Merdeka, sastrawan, dosen)	Tradisi Kampanye	Krisis Kepemimpinan
8	‘Ratu Adil dan Simbol Pemimpin’	Minggu, 22 Juni 2014	Sendang Mulyana	‘Ratu Adil’	Harapan terhadap Pemimpin Ideal
9	‘Yudistira dan Kejujuran Kita’	Minggu, 10 April 2016	Purnawan (Penulis eksternal)	Yudistira Simbol Kejujuran	Harapan terhadap Pemimpin Ideal
10	‘Reshuffle dan Jagat Wayang’	Minggu, 7 Agustus 2016	Heri Priyatmoko (Penulis eksternal)	Kepemimpinan	Krisis Kepemimpinan
11	‘Mitos dan Mazhab Kekuasaan Jawa’	Minggu, 5 Maret 2017	Ari K (Penulis eksternal)	<i>Wahyu Keprabon</i>	Filosofi Kepemimpinan <i>Hasta Brata</i>
12	‘Kuasa dan Pengendalian Kekuasaan’	Minggu, 27 Agustus 2017	Danang Firmansyah (Penulis eksternal, mantan wartawan Harian Suara Merdeka, sastrawan)	Kekuasaan Tak Terkendali	Filosofi Kepemimpinan <i>Hasta Brata</i>
13	‘Rekayasa dalam Pertarungan Kekuasaan’	Minggu, 7 Oktober 2018	Sendang Mulyana	Rekayasa Kekuasaan	Krisis Kepemimpinan
14	‘Membangun Markas Batin Jawa’	Minggu, 16 Desember 2018	Sendang Mulyana	‘Markas Batin’	Krisis Kepemimpinan
15	‘Kuasa, Bencana dan Budaya’	Minggu, 27 Januari 2019	Sendang Mulyana	Pemimpin <i>Gobal-Gabul</i>	Krisis Kepemimpinan
16	‘Politik Umuk dan Kemaruk’	Minggu, 10 Februari 2019	Sendang Mulyana	Pemimpin <i>Kemaruk</i>	Krisis Kepemimpinan

17	'Gagal Memilih Ugul-Ugul'	Minggu, 24 Maret 2019	Sendang Mulyana	Berkerudung Wawulang Macan	Krisis Kepemimpinan
18	'Memburu Pulung Kekuasaan'	Minggu, 7 April 2019	Sendang Mulyana	Pulung Kekuasaan	Krisis Kepemimpinan
19	'Metafora yang Gegabah dan Sewiyah-Wiyah'	Minggu, 25 Agustus 2019	Sendang Mulyana	Metafora Hewan	Krisis Kepemimpinan
20	'Memahami Jagat Banjir'	Minggu, 5 Januari 2020	Sendang Mulyana	Banjir Melanda	Krisis Kepemimpinan
21	'Wabah Versus Power Budaya'	Minggu, 5 April 2020	Sendang Mulyana	Wabah Korona	Krisis Kepemimpinan
22	'Harta Atau Nyawa, Mukti Atau Mati'	Minggu, 2 Agustus 2020	Sendang Mulyana	Nyawa Terancam	Krisis Kepemimpinan

(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Berdasarkan Tabel 3.3, RSP periodisasi 2011-2020 menunjukkan puluhan artikel ini memotret krisis moral dan etika kepemimpinan di ruang publik, termasuk praktik oportunistis dan anti-kritik. Pada saat yang sama, rubrik ini tetap merawat imaji kepemimpinan aspiratif yang berakar pada nilai budaya dan etika kemenangan bermartabat.

Berikut ini gambar tematik RSP periodisasi 2011-2020 seperti tercantum dalam Gambar 3.3:



Gambar 3.3: Tematik RSP Periodisasi 2011 – 2020
(Sumber: Olahan Peneliti, 2026)

Keterangan:

- A. Krisis Kepemimpinan (14 artikel)
- B. Filosofi Kepemimpinan *Hasta Brata* (3 artikel)
- C. Kaderisasi Kepemimpinan (2 artikel)
- D. Harapan Terhadap Pemimpin Ideal (2 artikel)
- E. Kemenangan Beretika (1 artikel)

Secara kontekstual, periode ini berlangsung dalam lanskap politik yang semakin kompleks mencakup fase akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga era kekuasaan Presiden Joko Widodo (2014-2024). Konsolidasi kekuasaan yang relatif stabil di satu sisi, justru diiringi oleh menguatnya polarisasi politik, praktik politik dinasti, serta kompetisi simbolik yang intens di ruang publik. Dalam konteks tersebut, kritik RSP mengonstruksikan krisis kepemimpinan sebagai persoalan yang semakin struktural dan meluas, menyentuh relasi kuasa, tata kelola institusi, serta buruknya dinamika komunikasi di era disrupsi digital.

Dalam konteks ini, metafora *Hasta Brata* dalam RSP menangkap perubahan ini dengan menunjukkan bahwa krisis nilai memasuki wilayah yang lebih struktural dan meluas. Pada periode ini, metafora ‘matahari’ dan ‘bumi’ kembali menjadi pusat refleksi atas merosotnya integritas publik dan tanggung jawab sosial di tengah kegaduhan informasi. ‘Laut’ semakin keruh oleh pragmatisme politik, sementara ‘api’ menyala berlebihan sebagai simbol ambisi kuasa dan konflik sosial. ‘Angin’ menandai menipisnya empati pemimpin, dan simbol kosmik ‘langit’, ‘bulan’, serta ‘bintang’ menegaskan hilangnya orientasi moral yang mendasar.

3.1.5 Analisis Tematik Rubrik ‘Sang Pamomong’ Periodisasi 1996-2020

Analisis tematik terhadap RSP periode 1996–2020 mengidentifikasi enam kategori tema utama yang membentuk tematik rubrik secara keseluruhan. Keenam

tema tersebut adalah: (1) krisis kepemimpinan; (2) filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*; (3) harapan terhadap pemimpin ideal; (4) kemenangan beretika; (5) kaderisasi kepemimpinan; (6) persepsi publik terhadap pemimpin. Dari keenam tema ini menunjukkan bahwa RSP menekankan kepemimpinan sebagai objek utama. Hanya saja, masing-masing tema muncul dengan frekuensi dan distribusi yang berbeda, tergantung periode dan konteks sosial-politik saat artikel ditulis.

Tema ‘krisis kepemimpinan’ menempati posisi paling dominan, muncul dalam 27 artikel dari total corpus yang dianalisis. Tema ini menandai kepedulian rubrik terhadap kondisi kepemimpinan dalam masyarakat, baik dalam konteks nasional maupun lokal. Setiap artikel yang menyinggung krisis kepemimpinan, menampilkan cara RSP menafsirkan situasi dan perilaku pemimpin melalui simbol, metafora, yang melekat pada nilai-nilai budaya Jawa. Rubrik membangun kepemimpinan yang tidak hanya melihat aspek administrasi atau politik, tetapi juga memperhatikan konteks moral, tanggung jawab sosial, dan kualitas karakter pemimpin. Tema ini muncul secara konsisten di semua periode penelitian, menegaskan bahwa isu kepemimpinan menjadi titik fokus yang terus dijaga oleh pengasuh rubrik.

Hasil wawancara dengan informan Triyanto Triwikromo (2020) selaku Wakil Pemimpin Redaksi ‘Suara Merdeka’ menjelaskan RSP secara berulang menempatkan isu kepemimpinan dalam bingkai persoalan sosial yang terus hadir di berbagai periode. Informan menjelaskan bahwa dinamika sosial-politik nasional kerap direspon melalui penggambaran nilai, simbol, dan *laku* kepemimpinan. Dengan cara ini, krisis kepemimpinan tampil sebagai tema yang mengemuka tanpa

harus dinyatakan secara eksplisit atau diarahkan pada sosok maupun peristiwa tertentu secara terbuka.

Bersandingan dengan kategori tema ‘krisis kepemimpinan’, filosofi kepemimpinan *Hasta Brata* tampil sebagai kategori tema yang menekankan landasan nilai dan etika dalam kepemimpinan. Delapan artikel mengartikulasikan bagaimana rubrik mengaitkan praktik kepemimpinan dengan prinsip-prinsip moral tradisi Jawa, seperti keteguhan, kesabaran, keadilan, dan keteladanan. Tema ini memperlihatkan bahwa RSP membentuk interpretasi kepemimpinan dengan mengacu pada standar nilai budaya *Hasta Brata* yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam tradisi budaya Jawa, ajaran *Hasta Brata* menempati posisi penting sebagai pedoman etis bagi seorang pemimpin. Ajaran ini merujuk pada delapan *laku* kepemimpinan yang bersumber dari sifat-sifat kosmis: bumi, matahari, bulan, api, angin, samudra, langit, dan bintang (Bratawijaya, 1997). Setiap elemen memuat makna simbolik mengenai bagaimana seorang pemimpin ideal harus bersikap, bertindak, dan mengelola kekuasaan. Menurut Herusatoto (1987), simbolisme kosmos dalam budaya Jawa tidak pernah berdiri sendiri. Simbolisme ini berfungsi sebagai sistem nilai yang mengarahkan tindakan manusia dalam struktur sosial yang hierarkis namun tetap menjunjung harmoni.

Ajaran *Hasta Brata* menjadi sangat relevan dalam RSP. Rubrik ini menampilkan narasi budaya, *pitutur*, metafora, wayang, kisah kerajaan Jawa kuno, serta refleksi moral yang secara langsung maupun tidak langsung mengacu pada prinsip *Hasta Brata*. Para penulis-sebagian besar berasal dari kalangan sastrawan,

budayawan, dan akademisi menggunakan prinsip leluhur tersebut sebagai perangkat konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik yang terjadi. Di sinilah RSP sebagai ruang artikulasi nilai kepemimpinan Jawa yang bekerja melalui bahasa simbolik.

Informan Hendro Basuki-Kordinator Liputan ‘Suara Merdeka’ (saat itu-1996) dan sebagai salah satu penggagas RSP sekaligus pengasuh RSP menjelaskan, nilai *Hasta Brata* melalui personifikasi delapan elemen alam antara lain ‘bumi’, ‘matahari’, ‘langit’, ‘bintang’, tercermin dalam cara pengasuh merancang dan mengelola RSP. Ia menegaskan bahwa kekuatan *pamomong* ada pada kemampuan mengingatkan dengan ‘bahasa yang lembut namun berisi’.

“Rubrik ini (Rubrik Sang Pamomong-red) bukanlah proyek redaksional semata, melainkan proyek kebudayaan- bentuk nyata dari peran media sebagai penjaga nurani publik dan pelestari jati diri Jawa di tengah modernitas. Rubrik ‘Sang Pamomong’ menerapkan jurnalisme sejati, yang bukan sekadar menyampaikan fakta, tetapi menuntun nurani- menjadi pamomong bagi nalar dan budaya masyarakat.” (Wawancara dengan Hendro Basuki, 2020).

Di sisi lain, Koentjaraningrat (1984) menjelaskan, budaya Jawa memiliki kecenderungan kuat dalam mengonstruksi kepemimpinan berbasis teladan (*ing ngarso sung tulodho*), kedekatan moral (*ing madyo mangun karso*), dan kemampuan mengayomi (*tut wuri handayani*). Ketiga prinsip tersebut selaras dengan struktur *Hasta Brata*. Dalam berbagai artikel RSP, nilai ini tidak diajarkan secara langsung sebagai dogma, tetapi hadir melalui narasi cerita, *pasemon*, atau refleksi terhadap peristiwa aktual.

Sebagaimana dikemukakan oleh Magnis-Suseno (2001), masyarakat Jawa memberi perhatian pada dimensi moral seorang pemimpin. Kekuasaan yang tidak

ditopang oleh budi pekerti dianggap tidak memiliki *kasekten* (wibawa batin). Ajaran *Hasta Brata* menjadi tolok ukur bagi masyarakat untuk memahami apakah seorang pemimpin selaras dengan etika kosmis tersebut. Para penulis RSP menggunakan sensibilitas budaya ini untuk menyorot fenomena seperti korupsi, ketidakadilan, keserakahan, konflik elite, hingga penyimpangan moral dalam arena politik lokal maupun nasional.

Lebih jauh, tradisi *Hasta Brata* bersinggungan dengan cara masyarakat Jawa memaknai kepemimpinan sebagai hubungan etis, bukan sekadar relasi kekuasaan. Dalam konteks itu, *Hasta Brata* menjadi pedoman moral tentang bagaimana seorang pemimpin membangun relasi komunikasi yang empatik, menjaga harga diri masyarakat, dan mengelola konflik dengan mempertimbangkan ‘rasa’. Nilai ini muncul berulang kali dalam artikel RSP terutama ketika membahas dinamika kepemimpinan, polemik politik, atau kegaduhan yang terjadi di tingkat nasional.

Sementara itu, salah satu kekuatan RSP adalah kemampuannya menghidupkan ajaran *Hasta Brata* melalui penokohan pewayangan. Informan Gunawan Budi Susanto (2020) yang juga penulis internal dan pengampu halaman RSP menjelaskan, tokoh Rama, Arjuna, Bima, Semar, dan para punakawan menjadi media naratif untuk menggambarkan *laku* moral seorang pemimpin. Mulyono (1982) menegaskan bahwa wayang bagi orang Jawa bukan sekadar hiburan, melainkan wahana pendidikan etis yang sarat nilai filosofis.

Di sinilah, para penulis RSP memanfaatkan hal ini: kasus-kasus kepemimpinan modern diartikulasikan melalui berbagai tokoh wayang. Cara ini

diharapkan dapat memudahkan pembaca bisa memahami antara perilaku elite masa kini dan *laku* para ksatria dalam cerita klasik. Informan Gunawan Budi Susanto (2020) menambahkan, RSP menghadirkan kritik sosial yang halus namun tajam, bersandar pada nilai yang telah hidup berabad-abad dalam budaya Jawa. Kritik sosial yang disampaikan dalam RSP tidak untuk penistaan ataupun pembunuhan karakter.

Sejalan dengan gagasan Gunawan, Geertz (1981) mengungkapkan, masyarakat Jawa memiliki kecenderungan untuk membaca realitas sosial melalui simbol dan makna batin. Hal ini menandakan penggunaan metafora *Hasta Brata* dalam RSP bukan sekadar upaya romantisasi budaya, melainkan cara efektif berkomunikasi dengan pembaca Jawa yang terbiasa menafsirkan pesan melalui metafora. Ini pula yang menjelaskan mengapa pembaca sepuh begitu mencintai rubrik tersebut: mereka menemukan kembali ‘suara batin’ budaya Jawa yang semakin jarang hadir dalam media modern. Hal ini seperti dituturkan informan Kasiyati (2020) pelanggan ‘Suara Merdeka’ yang berlangganan koran ini sekitar 1970an dan rutin membaca RSP. Ia mengaku rindu berbagai kisah yang sarat mengandung nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa.

Selain menjadi kerangka kepemimpinan, *Hasta Brata* dalam RSP berfungsi sebagai sarana refleksi moral bagi pembaca. Berbagai informan dalam penelitian ini mengakui tulisan-tulisan RSP sering digunakan sebagai bahan renungan. Hal ini sejalan dengan gagasan Endraswara (2016) tentang budaya Jawa sebagai ‘*laku* spiritual yang mendorong manusia menuju keteduhan batin.’ Ketika RSP mengartikulasikan nilai *Hasta Brata*, rubrik ini tidak hanya mengomentari

fenomena sosial tetapi juga memberikan ruang kontemplatif bagi pembaca untuk introspeksi dan menata diri.

Itu sebabnya, simbolisasi *Hasta Brata* bekerja sebagai kerangka moral normatif, misalnya dalam menyikapi penyimpangan kekuasaan dengan menyuarakan kritik sosial yang tetap dikemas melalui koridor budaya. Temuan wawancara berdasarkan informasi dari informan Gunawan Budi Susanto (2020) menunjukkan bahwa nilai *Hasta Brata* kerap dipakai untuk membandingkan kepemimpinan ideal dengan praktik politik yang berlangsung. Temuan ini paralel dengan penelitian Suyono (2022) yang mempertegas kepemimpinan *Hasta Brata* bersifat adaptif dan relevan secara historis maupun kontekstual. Sebelumnya, penelitian Selvarajah & Meyer (2017) membuktikan filosofi *Hasta Brata* dengan gaya kepemimpinan paternalistik berperan penting dalam membimbing dan menjaga. Temuan kedua peneliti ini mempertegas kebijaksanaan, kepedulian, dan tanggung jawab dalam bingkai *Hasta Brata* tetap relevan serta memperkuat kapasitas kepemimpinan dalam manajemen modern yang dinamis.

Dengan kata lain, RSP mengadopsi ajaran *Hasta Brata* sebagai kerangka kultural dalam membangun pemaknaan kepemimpinan dan kehidupan publik. Melalui bingkai kepemimpinan *Hasta Brata*, RSP mengingatkan bahwa kepemimpinan tidak hanya merujuk dari efektivitas, tetapi juga dari kedalaman budi pekerti dan kebijaksanaan (Magnis-Suseno, 2001). Nilai-nilai tersebut menjadi landasan yang menjelaskan bagaimana tradisi budaya Jawa memandang kepemimpinan sebagai kombinasi antara kebijaksanaan, etika, dan tanggung jawab sosial yang relevan bagi kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut, tema ketiga adalah harapan terhadap pemimpin ideal, meski melalui sosok imajiner misalnya *Ratu Adil* maupun *Satriya Piningit* tercermin dalam tujuh artikel. Tema ini menampilkan konstruksi figur kepemimpinan yang dianggap ideal oleh rubrik, baik dalam hal karakter, perilaku, maupun kapasitas menghadapi tantangan sosial-politik. Dalam hal ini, RSP membangun interpretasi kolektif mengenai kualitas pemimpin yang diharapkan masyarakat, namun tetap bersifat umum dan normatif, sehingga tidak selalu mengacu pada satu figur tertentu. Tema harapan terhadap pemimpin ideal sebagai pelengkap dari tema krisis kepemimpinan dan filosofi *Hasta Brata*. Tema tersebut memberikan perspektif aspiratif terhadap kepemimpinan, menegaskan nilai-nilai etis yang harus hadir, dan menghadirkan orientasi moral bagi pembaca tanpa menyodorkan kritik langsung terhadap figur nyata.

Menyikapi sosok imajiner pemimpin ideal melalui simbolisasi *Ratu Adil Satriya Piningit*, maupun Sultan HB X, informan Triyanto Triwikromo (2020) selaku Wakil Pemimpin Redaksi ‘Suara Merdeka’ menjelaskan bahwa figur tersebut muncul bukan sebagai rujukan personal. Sosok-sosok ini berfungsi sebagai simbol harapan kolektif terhadap hadirnya kepemimpinan yang adil, beretika, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat dalam konteks perubahan sosial yang berkelanjutan.

Harapan tersebut mengemuka karena, menurut informan, praktik kepemimpinan yang berlangsung belum mampu memenuhi kewajiban serta janji-janji yang disampaikan kepada publik. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan kebutuhan akan figur pemimpin yang lebih berintegritas.

Menanggapi tema Sultan HB X sebagai bagian dari tematik ‘harapan terhadap pemimpin ideal’, informan Triyanto Triwikromo (2020) selaku Wakil Pemimpin Redaksi ‘Suara Merdeka’ mengungkapkan RSP menghadirkan harapan terhadap figur Sultan HB X meskipun hanya muncul dalam satu artikel dari keseluruhan korpus yang dianalisis. Informan menjelaskan bahwa kemunculan tersebut bersifat kontekstual, sebagai respons atas dinamika sosial-politik nasional pada periode tertentu. Figur Sultan HB X tidak ditempatkan sebagai tokoh sentral, melainkan sebagai representasi simbolik dari harapan akan kepemimpinan yang mengedepankan kebijaksanaan, etika, dan kepekaan sosial.

Empat kategori tema lainnya muncul dengan frekuensi yang lebih terbatas, namun tetap memberikan kontribusi pada tematik rubrik. Tema kemenangan beretika, muncul dalam empat artikel, menekankan praktik kepemimpinan dan politik yang berlandaskan etika dan adab. Dalam hal ini, rubrik menyorot bagaimana integritas dan perilaku moral pemimpin menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kepemimpinan. Tema ini hadir untuk menyeimbangkan pembahasan krisis dan idealitas, sehingga interpretasi kepemimpinan yang dibangun rubrik mencakup dimensi etis yang nyata dalam praktik sosial-politik.

Terkait tema ‘kemenangan beretika’, hasil wawancara dengan informan Hendro Basuki (2020) salah satu penggagas RSP sekaligus pengasuh RSP dan Koordinator Liputan ‘Suara Merdeka’ (1990-1999) mengungkapkan, RSP turut memberi perhatian pada makna kemenangan dalam konteks etika dan keluhuran *laku*. Informan menjelaskan bahwa dinamika sosial-politik nasional kerap direspons melalui penekanan pada cara memperoleh kemenangan, bukan semata

hasil akhir. Dalam kerangka tersebut, kemenangan sebagai proses yang seharusnya dijalankan dengan adab, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat.

Sementara itu, tema kaderisasi kepemimpinan muncul dalam dua artikel, menunjukkan perhatian terhadap keberlanjutan kepemimpinan dan regenerasi figur pemimpin. Tema ini menyorot proses pembelajaran, pendampingan, dan transmisi nilai yang terjadi antara generasi pemimpin. Tema tersebut sekaligus memperlihatkan cara rubrik membangun pemahaman tentang pentingnya kesinambungan dan kapasitas kepemimpinan. Tema ini, meskipun muncul terbatas, menunjukkan bahwa RSP tidak hanya menyorot kepemimpinan yang berlangsung, tetapi juga bagaimana kepemimpinan dipersiapkan untuk masa depan, membangun konstruksi makna yang berkelanjutan.

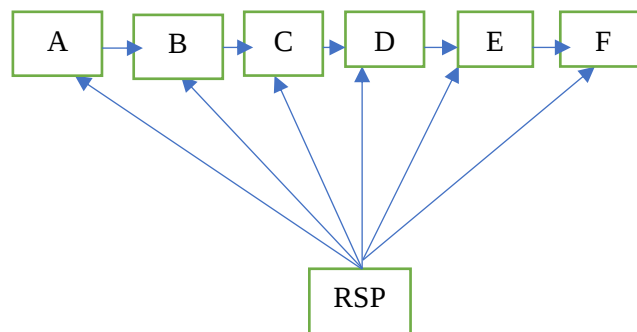
Dalam konteks kaderisasi kepemimpinan, hasil wawancara dengan informan Gunawan Permadi (2020) selaku Pemimpin Redaksi ‘Suara Merdeka’ mengungkapkan bahwa RSP juga menaruh perhatian pada keberlanjutan kepemimpinan melalui proses kaderisasi. Informan ini menjelaskan bahwa dinamika sosial-politik nasional kerap disikapi dengan refleksi mengenai kesiapan generasi penerus, nilai yang diwariskan, serta proses pembelajaran kepemimpinan yang berkesinambungan. Dalam konteks tersebut, kaderisasi untuk menjaga kesinambungan nilai dan etika kepemimpinan dalam kehidupan publik.

Tema terakhir, yaitu ‘persepsi publik terhadap pemimpin’, muncul secara kontekstual hanya satu artikel. Tema ini menunjukkan respons rubrik terhadap situasi dan figur tertentu yang memiliki relevansi sosial-budaya di periode tertentu.

Tema kontekstual ini menambah dimensi periodik dalam tematik rubrik, sehingga meskipun tidak selalu hadir, tema-tema tersebut memperkaya pemahaman tentang kepemimpinan dari perspektif nilai dan interpretasi lokal.

Secara terpisah, informan Saroni Asikin (2020) selaku Redaktur Pelaksana ‘Suara Merdeka’ menanggapi tema ‘persepsi publik terhadap pemimpin’ yang diulas dalam RSP. Ia mengungkapkan bahwa kemunculan tema tersebut bersifat kontekstual, merefleksikan cara pandang masyarakat terhadap praktik kepemimpinan pada situasi sosial-politik tertentu. Persepsi publik tersebut dihadirkan sebagai bagian dari refleksi sosial yang melengkapi pembahasan nilai dan etika kepemimpinan dalam rubrik. Temuan ini menegaskan bahwa variasi tema dalam RSP tidak hanya ditentukan oleh frekuensi kemunculan, tetapi juga oleh relevansi tematiknya dalam merespons konteks sosial yang berkembang.

Bertolak dari keseluruhan temuan tersebut, berikut ini disajikan gambar tematik RSP periode 1996-2020 yang menampilkan enam kategori tema sebagaimana tercantum dalam Gambar 3.4.



Gambar 3.4: Tematik RSP Periode 1996 – 2020
(Sumber: Olahan Peneliti, 2026)

Keterangan:

- A. Krisis Kepemimpinan (27 artikel)
- B. Filosofi Kepemimpinan *Hasta Brata* (7 artikel)
- C. Harapan Terhadap Pemimpin Ideal (7 artikel)
- D. Kemenangan Beretika (4 artikel)
- E. Kaderisasi Kepemimpinan (2 artikel)
- F. Persepsi Publik Terhadap Pemimpin (1 artikel)

Keenam kategori tema ini membentuk tematik yang menunjukkan fondasi inti dan periodik dalam RSP. Tiga tema inti yakni krisis kepemimpinan, filosofi *Hasta Brata*, dan harapan terhadap pemimpin ideal hadir di seluruh periode penelitian (1996–1998, 2000–2010, 2011–2020), membentuk rangkaian tematik yang relatif stabil.

Di sisi lain, kehadiran tema inti sebagai basis RSP menghadirkan tema-tema tambahan secara terstruktur. Misalnya, kemenangan beretika, kaderisasi kepemimpinan, dan tema kontekstual lainnya muncul tidak sebagai topik utama, tetapi sebagai pengayaan yang melengkapi pembahasan.

Tematik rubrik menampilkan keseimbangan antara kontinuitas dan variasi. Kontinuitas terlihat pada tema inti yang hadir lintas periode, sedangkan variasi muncul dari tema-tema kontekstual yang menyesuaikan dengan kondisi sosial-politik dan situasi kepemimpinan tertentu.

Melalui tematik ini, menunjukkan bagaimana RSP membangun konstruksi nilai kepemimpinan secara berlapis. Tema krisis kepemimpinan menekankan aspek kondisi dan tantangan yang dihadapi, filosofi *Hasta Brata* menekankan nilai dan norma yang menjadi acuan, dan harapan terhadap pemimpin ideal menghadirkan orientasi aspiratif. Tema tambahan menambah kedalaman dan nuansa pada

pembahasan, memberikan perspektif yang lebih kaya tentang kepemimpinan dari sudut pandang budaya, etika, dan sosial.

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa meskipun frekuensi munculnya tema berbeda-beda, keenam tema ini tidak berdiri sendiri. Setiap tema saling melengkapi dalam membentuk pemahaman kepemimpinan, baik sebagai isu, nilai, maupun aspirasi. Tematik rubrik merupakan konstruksi makna yang dibangun secara bertahap dan konsisten oleh pengasuh rubrik, sehingga setiap artikel hadir sebagai bagian dari jaringan tema yang saling terkait.

Dengan demikian, tematik RSP 1996-2020 memperlihatkan keseimbangan antara stabilitas tema inti dan fleksibilitas tema periodik. Tema inti menegaskan fokus rubrik pada kepemimpinan dan nilai budaya, sedangkan tema periodik menambah dimensi konteks yang lebih spesifik. Kondisi ini menunjukkan cara RSP membentuk interpretasi dan pemahaman tentang kepemimpinan, melalui penekanan nilai moral, etika, dan budaya Jawa, serta refleksi terhadap figur kepemimpinan ideal. Dalam konteks inilah, tematik RSP menampilkan proses konstruksi makna yang hangat, manusiawi, dan berakar pada pengalaman sosial serta nilai budaya yang relevan.

3.2 Konstruksi RSP: Diabaikannya Nilai *Hasta Brata* dalam Budaya Jawa

Berdasarkan data longitudinal periode 1996 hingga 2020, RSP menampilkan konstruksi kepemimpinan Indonesia melalui kerangka nilai budaya Jawa, khususnya filosofi *Hasta Brata*. Hasil konstruksi dari analisis tematik menunjukkan satu kesimpulan utama: krisis kepemimpinan yang diangkat rubrik ini merupakan krisis nilai yang berlangsung lintas dekade. Kritik yang dibangun

RSP tidak berbentuk tudingan langsung atau konfrontasi terhadap figur tertentu atau peristiwa politik spesifik. Sebaliknya, rubrik menggunakan simbol, *pasemon*, metafora, dan bahasa budaya yang akrab bagi pembaca. Pendekatan ini menandai cara rubrik membangun konstruksi nilai kepemimpinan, sehingga budaya berfungsi sebagai media etis sekaligus ‘ruang aman’ untuk menyampaikan kegelisahan sosial. Dengan strategi ini, pembaca diajak untuk memahami dan mengevaluasi praktik kepemimpinan serta kondisi sosial-politik secara reflektif, tanpa menghadirkan tekanan atau kesan menyalahkan individu tertentu.

Terkait hal tersebut, fokus rubrik pada krisis nilai yang muncul dari praktik kepemimpinan dan kehidupan publik. Krisis ini menjadi ‘benang merah’ yang menjelaskan mengapa persoalan sosial, seperti penyalahgunaan kekuasaan, degradasi etika publik, dan menurunnya kepercayaan masyarakat, terus berulang dalam konteks yang berbeda. Dalam hal ini, RSP membangun pemahaman bahwa krisis nilai merupakan fenomena yang muncul dari pergeseran nilai yang lebih luas, yang memerlukan perhatian dari masyarakat.

Dalam konteks ini, krisis nilai yang dimaksud rubrik tidak dipahami sebagai hilangnya nilai secara menyeluruh. Sebaliknya, krisis ini muncul sebagai *gap* antara nilai luhur yang diwariskan secara budaya dan praktik sosial yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Informan Triyanto Triwikromo (2020) mengakui, RSP kerap mengulas berbagai ketimpangan sosial yang melanda bangsa sebagai cerminan dari krisis nilai untuk dicarikan solusi atau jalan tengah agar tidak semakin menyusahkan rakyat. Kondisi ini pada akhirnya bermuara pada kepemimpinan bangsa itu sendiri.

Itu sebabnya dalam RSP, nilai kepemimpinan *Hasta Brata* tetap hadir sebagai referensi moral. Namun rubrik ini mengingatkan bahwa nilai tersebut tidak selalu terinternalisasi secara konsisten oleh pemimpin maupun masyarakat. Artinya, ada ‘celah’ antara prinsip etika dan praktik kepemimpinan aktual. *Gap* ini menjadi titik penting dalam konstruksi tematik rubrik, sehingga setiap artikel menekankan perlunya evaluasi terhadap praktik kepemimpinan dalam kerangka nilai budaya yang relevan.

Sejalan dengan hal tersebut, konstruksi nilai dalam RSP terbentuk melalui interaksi yang berkelanjutan dengan perubahan sosial, politik, dan budaya sepanjang periode penelitian. Rubrik menafsirkan krisis nilai sebagai hasil dari dinamika yang kompleks antara praktik kepemimpinan, struktur sosial, dan sikap publik. Dengan pendekatan ini, RSP membangun pemahaman bahwa nilai bukan hanya prinsip abstrak, tetapi bagian dari pengalaman sosial yang terus direfleksikan dan dimaknai melalui praktik kehidupan sehari-hari.

Atas dasar itu, kritik yang muncul melalui rubrik menjadi sarana kolektif untuk menegaskan pentingnya nilai sebagai penunjuk arah atau ‘kompas’ dalam menyikapi perubahan sosial-politik. Rubrik ini sekaligus mengajak pembaca untuk menumbuhkan kesadaran etis terhadap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemimpin. Sebagai ‘kompas moral’, rubrik ini merujuk pada nilai-nilai kepemimpinan *Hasta Brata* melalui metafora dari simbolisasi delapan elemen alam.

Terkait *Hasta Brata* sebagai rujukan kepemimpinan ideal ala Jawa dalam RSP, berikut penjelasan informan Triyanto Triwikromo selaku Wakil Pemimpin Redaksi surat kabar ‘Suara Merdeka’ (2020-2023):

“Melalui Rubrik ‘Sang Pamomong’, kami tergerak untuk menyikapi kondisi bangsa ini agar kembali pada nilai-nilai luhur budaya yang sudah teruji kehandalannya. Dalam budaya Jawa, di antaranya ada ajaran leluhur *Hasta Brata* yang menekankan pada kepemimpinan berbasis moral, sosial hingga spiritual sekalipun selain teknis administratif. Kepemimpinan *Hasta Brata* sejatinya bisa terwujud untuk membangun peradaban bangsa dan menyejahterakan rakyat seutuhnya.” (Wawancara dengan Triyanto Triwikromo, 2023)

Untuk memahami bagaimana konstruksi atas kritik etik tersebut dikonstruksikan secara simbolik dalam artikel, penting ditelusuri penggunaan metafora yang digunakan RSP lintas periode. Metafora *Hasta Brata* berfungsi sebagai perangkat kultural utama dalam mengartikulasikan nilai kepemimpinan sekaligus menandai krisis nilai yang dibahas. Oleh karena itu, adopsi metafora *Hasta Brata* dalam RSP lintas periode disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Simbolisasi Metafora *Hasta Brata* dalam RSP 1996-2020

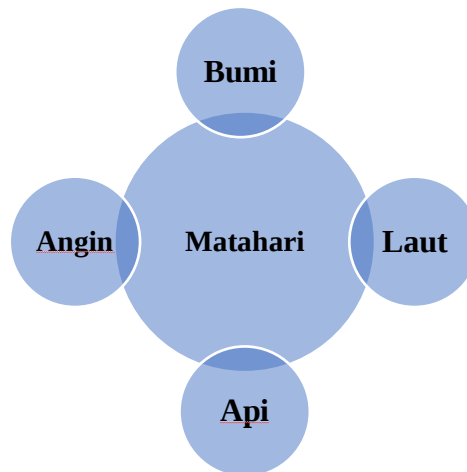
No	Periode	Metafora <i>Hasta Brata</i> (yang dilanggar)
1	1996-1998	‘Matahari’, ‘Bumi’, ‘Laut’, ‘Api’, dan ‘Angin’
2	1999-2000	Tidak terbit
3	2000-2010	‘Matahari’, ‘Bumi’, ‘Laut’, ‘Api’, dan ‘Angin’
4	2011-2020	‘Matahari’, ‘Bumi’, ‘Laut’, ‘Api’, ‘Angin’, ‘Langit’, ‘Bulan’, dan ‘Bintang’

(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Berdasarkan Tabel 3.4, metafora ‘matahari’, ‘bumi’, ‘laut’, ‘api’, dan ‘angin’ merupakan metafora yang paling banyak disorot pada setiap periode RSP.

Bahkan, pada periode keempat, muncul pula metafora ‘langit’, ‘bulan’, dan ‘bintang’, selain ‘matahari’, ‘bumi’, ‘laut’, ‘api’, dan ‘angin’.

Berikut gambar yang merupakan simbolisasi metafora *Hasta Brata* yang paling banyak diulas dalam RSP sepanjang periodisasi 1996-2020.



Gambar 3.5: Simbolisasi Metafora *Hasta Brata* dalam RSP 1996-2020
(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Berdasarkan gambar 3.5 konstruksi nilai *Hasta Brata* dalam RSP muncul melalui berbagai simbol dan metafora sebagai bagian dari budaya Jawa. Metafora ‘matahari’ paling banyak digunakan untuk menandai keteladanan atau kejelasan moral yang meredup dalam praktik kepemimpinan. ‘Bumi’ sering menjadi simbol tanggung jawab sosial dan keadilan, sedangkan ‘laut’ atau ‘samudra’ mewakili kejernihan batin, kesabaran, dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan. Elemen ‘api’ menunjukkan ketegasan, semangat, dan keberanian moral, sementara ‘angin’ melambangkan kemampuan pemimpin untuk menyebarkan nilai dan kebijaksanaan secara luas. Analisis tematik menunjukkan bahwa elemen-elemen ini sering tidak dijalankan dalam praktik kepemimpinan yang diulas oleh rubrik,

sehingga menjadi pusat refleksi moral yang muncul berulang kali dari masa ke masa.

Setiap simbol, metafora maupun *pasemon* dipilih sebagai medium untuk membentuk interpretasi nilai dan pemahaman kepemimpinan. Misalnya, pembahasan terkait ‘matahari’ yang meredup tidak selalu merujuk pada satu tokoh tertentu, tetapi sebagai refleksi dari melemahnya keteladanan dalam konteks sosial yang lebih luas. Hal ini menegaskan bahwa RSP membangun makna melalui pengulangan simbolik, sehingga pembaca dapat mengenali krisis nilai yang berulang dan mengaitkannya dengan praktik kepemimpinan di era berbeda.

Selain itu, rubrik menghadirkan dimensi aspiratif melalui penguatan nilai moral yang hilang. Dengan menegaskan *gap* antara nilai *Hasta Brata* dan praktik nyata, RSP mengajak pembaca untuk melihat kepemimpinan bukan hanya sebagai fenomena administratif. Rubrik ini sebagai wahana terhadap nilai dan prinsip etis diterapkan dalam praktik kepemimpinan dan kehidupan publik.

Konstruksi nilai yang demikian membuka ruang bagi rubrik untuk menampilkan harapan masyarakat terhadap pemimpin ideal, yang tercermin melalui artikel-artikel yang menekankan integritas, keteguhan moral, dan kapasitas pemimpin dalam membangun harmoni sosial. Meskipun kritik RSP tidak diarahkan langsung kepada figur tertentu, rubrik membangun pemahaman kolektif mengenai kualitas kepemimpinan yang diharapkan masyarakat, sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya nilai budaya dalam praktik sosial. Konsistensi dalam menghadirkan tema aspiratif ini sekaligus menjadi dasar bagi tematik rubrik

sepanjang periode 1996–2020, bahwa refleksi nilai moral dan aspirasi terhadap kepemimpinan ideal tetap menjadi fokus utama.

Secara keseluruhan, analisis lintas periode menunjukkan bahwa tematik RSP memperlihatkan kesinambungan refleksi dalam menyampaikan pesan moral maupun kritik sosial. Dari periode 1996–1998, rubrik memfokuskan ketidaksesuaian nilai selama masa Orde Baru. Pada periode 2000–2010, RSP memperluas refleksi terhadap krisis nilai dalam konteks transisi kepemimpinan dan reformasi, menunjukkan bagaimana *gap* antara nilai dan praktik berlanjut meskipun ada perubahan politik. Pada periode 2011–2020, RSP mengedepankan ketidaksesuaian nilai *Hasta Brata* dengan praktik kepemimpinan modern. Hal ini menunjukkan konsistensi rubrik dalam membangun pemahaman tentang kepemimpinan sebagai fenomena yang harus terus disikapi melalui nilai budaya dan moral.

Berpijak dari penjelasan tersebut, konstruksi RSP terhadap krisis nilai memperlihatkan cara rubrik menafsirkan praktik kepemimpinan dalam koridor nilai-nilai budaya dan aspirasi publik. Rubrik membentuk pemahaman bahwa kepemimpinan yang efektif bukan hanya soal kekuasaan atau hasil administratif. Lebih dari itu, RSP mengonstruksi bagaimana nilai moral dan budaya diterapkan dalam pengambilan keputusan, perlakuan terhadap masyarakat, dan konsistensi etis dalam setiap tindakan.

Menyikapi temuan penelitian ini, informan Wakil Pemimpin Redaksi ‘Suara Merdeka’ Triyanto Triwikromo menegaskan sebagai berikut:

“Kami mengadaptasi nilai-nilai luhur kebudayaan Jawa termasuk prinsip *Hasta Brata* dalam menyikapi situasi sosial-politik yang terjadi. Hasilnya,

tidak diungkapkan secara langsung dengan menunjuk tokoh tertentu atau peristiwa politik tertentu. Solusinya, kami kaitkan dengan konteks *Hasta Brata* sebagai simbolisasi diperkuat dengan metafora, kisah wayang, *pitutur*, *pasemon* dan semacam itu agar pembaca paham dan kecenderungannya pembaca paham apa yang tersirat di balik itu.” (Wawancara dengan Triyanto Triwikromo, 2023).

Dengan demikian, merujuk pada pernyataan informan Triyanto Triwikromo, filosofi kepemimpinan *Hasta Brata* menempati posisi sebagai rujukan utama RSP dalam membangun konsep kepemimpinan ideal ala Jawa. Rujukan nilai tersebut kemudian dipetakan secara konseptual untuk memperlihatkan keterkaitan antara filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*, harapan normatif terhadap pemimpin ideal, dan realitas praktik kepemimpinan yang berlangsung (Bratawijaya, 1997).

Namun demikian, hasil analisis tematik menunjukkan bahwa harapan normatif tersebut tidak berjalan seiring dengan praktik kepemimpinan kontemporer pada level pemerintahan. Sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo, praktik kepemimpinan yang dibahas dalam RSP cenderung tidak menampilkan refleksi nilai-nilai *Hasta Brata* secara konsisten. Ketidaksesuaian antara nilai ideal dan realitas kepemimpinan ini muncul berulang dalam berbagai konteks sosial-politik, sehingga membentuk tematik yang stabil sepanjang periode penelitian.

Ketidaksinkronan tersebut bukanlah sebagai kegagalan individu semata, melainkan sebagai persoalan nilai yang berkelanjutan dalam kehidupan publik. Dalam konstruksi RSP, krisis kepemimpinan hadir sebagai konsekuensi dari melemahnya penghayatan nilai-nilai budaya yang sebelumnya dijadikan pedoman moral. Dengan cara ini, rubrik tidak menyederhanakan kepemimpinan ke dalam

kategori benar atau salah, tetapi memahaminya sebagai proses sosial yang terus berhadapan dengan tantangan etis dan perubahan zaman.

Melalui konstruksi tersebut, RSP menegaskan adanya jarak (*gap*) antara idealitas kepemimpinan dan praktik nyata, sekaligus menghadirkan ruang refleksi bagi pembaca lintas generasi. Refleksi ini tidak disampaikan secara konfrontatif, melainkan melalui simbol, metafora, dan *pasemon* yang akrab dalam tradisi budaya Jawa. Dengan demikian, RSP berfungsi sebagai medium yang merawat kesadaran nilai, mengajak pembaca menimbang kembali makna kepemimpinan, serta menempatkan *Hasta Brata* sebagai rujukan moral yang tetap relevan dalam dinamika kepemimpinan Indonesia.

BAB IV

PRODUKSI RUBRIK ‘SANG PAMOMONG’

4.1 Produksi Rubrik ‘Sang Pamomong’ Berbasis Periodisasi

Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) pada surat kabar ‘Suara Merdeka’ periodisasi 1996–2020 meliputi empat periode yang diteliti yaitu: 1) periodisasi 1996-1998; 2) periodisasi 1999-februari 2000; 3) periodisasi maret 2000-2010; 4) periodisasi 2011-2020. Pengelompokan periodisasi ini sesuai kebijakan redaksi dan dinamika sosial-politik nasional.

Pembagian periodisasi bertujuan untuk memahami produksi RSP dalam mengonstruksi nilai-nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dari masa ke masa. Periodisasi tersebut digunakan untuk menelusuri bagaimana nilai-nilai *Hasta Brata* hadir dan berfungsi sebagai rujukan normatif dalam RSP pada setiap periode pembahasan. Periodisasi sebagai kerangka waktu analitis yang menyertai pembahasan produksi rubrik.

Untuk mengeksplorasi produksi RSP dalam empat periodisasi, penelitian ini menggunakan teori Pierre Bourdieu (1988, 1993) dengan tiga elemen kunci yakni habitus, modal, dan ranah.

4.1.1 Produksi RSP Periodisasi 1996-1998

a. Habitus Pengasuh Rubrik

Produksi Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) pada fase awal kemunculannya, yakni periode 1996–1998, tidak dapat dilepaskan dari peran sentral para pengasuh rubrik yang sekaligus berfungsi sebagai penulis utama. Pada periode ini, RSP

dibentuk dan dijalankan oleh aktor-aktor yang memiliki latar belakang sebagai sastrawan, kolumnis, serta penggiat budaya Jawa.

Latar kultural dan intelektual tersebut membentuk suatu habitus yang khas, yakni seperangkat disposisi yang terinternalisasi melalui pengalaman pendidikan humaniora, keterlibatan dalam dunia kesusastraan, serta praktik kebudayaan Jawa yang telah lama dijalani. Habitus inilah yang kemudian menjadi landasan utama dalam proses produksi RSP pada fase awal.

Hasil wawancara dengan informan Hendro Basuki selaku salah satu penggagas RSP, pengasuh RSP, dan Kordinator Liputan ‘Suara Merdeka’ (pada 1996) dan informan Triyanto Triwikromo selaku pengasuh RSP, keduanya berasal dari suku Jawa tepatnya Jawa Tengah. Hendro Basuki dan Triyanto memiliki latar belakang sastra.

Dalam kerangka Bourdieu (1993), habitus sebagai struktur sosial yang terinternalisasi, yang membimbing cara aktor mempersepsi realitas, menilai situasi, serta bertindak dalam suatu lapangan sosial tertentu. Habitus tidak bekerja secara mekanis, melainkan sebagai kecenderungan yang lentur dan kontekstual (Willig, 2012; Schultz, 2007). Artinya, tindakan dan pilihan individu dibentuk oleh pengalaman, nilai, dan struktur sosial yang melekat, namun tetap menyesuaikan diri dengan kondisi dan tekanan lingkungan yang berubah. Dalam praktiknya, habitus membimbing individu untuk bertindak secara refleksif sambil tetap mempertahankan konsistensi dengan identitas dan norma yang diyakini, sehingga menghasilkan perilaku yang alami namun sarat makna sosial dan kultural.

Dalam konteks RSP, habitus pengasuh rubrik membentuk disposisi etik yang kuat, yang memengaruhi cara mereka menafsirkan fenomena sosial-politik pada masa akhir Orde Baru. Fenomena kekuasaan bukan dimaknai sebagai persoalan politik praktis, melainkan sebagai problem etika kepemimpinan yang berkaitan dengan nilai, keteladanan, dan tanggung jawab moral.

Disposisi etik tersebut tercermin secara konsisten dalam sensitivitas tematik rubrik. Artikel-artikel RSP pada periode 1996–1998 menunjukkan perhatian yang intens terhadap isu krisis kepemimpinan, merosotnya keteladanan moral elite, serta jarak antara nilai-nilai luhur budaya Jawa dan praktik kekuasaan yang dijalankan. Nilai kepemimpinan *Hasta Brata* digunakan sebagai kerangka rujukan utama untuk menyikapi realitas sosial-politik (Bratawijaya, 1997). Melalui metafora alam seperti ‘matahari’, ‘bumi’, ‘air’, ‘api’, dan ‘samudra’, RSP menyajikan refleksi tentang pemimpin ideal yang seharusnya mampu memberi penerangan, keadilan, keteguhan, dan kejernihan nurani.

Pada saat yang sama, rubrik juga menghadirkan figur simbolik seperti *Ratu Adil* dan *Satriya Piningit* sebagai ekspresi harapan kultural masyarakat Jawa terhadap hadirnya pemimpin yang mampu mengemban amanah moral. Figur-figur tersebut tidak dimunculkan sebagai narasi politis eksplisit, melainkan sebagai simbol kultural yang berfungsi memperluas ruang perenungan pembaca. Dengan cara ini, RSP tidak hanya merepresentasikan kegelisahan sosial, tetapi juga memfasilitasi proses pemaknaan bersama mengenai kepemimpinan dan moralitas dalam konteks masyarakat Jawa.

Dalam konteks ini, habitus pengasuh rubrik membentuk gaya tutur jurnalistik yang khas. Kritik sosial dalam RSP tidak disampaikan melalui bahasa konfrontatif atau oposisi terbuka terhadap kekuasaan, melainkan melalui ajakan reflektif yang bersifat *ngemong*, *ngajari*, dan *ngelingake*.

Informan Gunawan Permadi selaku Pemimpin Redaksi ‘Suara Merdeka’ (2015-2023) menjelaskan visi redaksional dalam pemberitaan, termasuk dalam RSP dibingkai oleh kesadaran akan karakter masyarakat Jawa yang menghindari konfrontasi dan menjunjung harmoni. Penjelasan Gunawan ini memperlihatkan habitus kultural Jawa dalam pengambilan kebijakan redaksional.

Itu sebabnya, pilihan gaya dalam RSP menunjukkan kesadaran kultural yang kuat terhadap konteks sosial-politik Orde Baru, saat ruang ekspresi sangat terbatas. Dalam situasi tersebut, pengasuh rubrik berperan sebagai penyaring tunggal yang menjaga agar kritik tetap berada dalam batas aman secara politis, namun tetap mengandung kedalaman makna etis dan kultural.

Peran ini menempatkan pengasuh rubrik yakni Hendro Basuki (pada 1996 sebagai Kordinator Liputan ‘Suara Merdeka’ dan Kordinator pengasuh RSP) dibantu Triyanto Triwikromo (pada 1996 sebagai Reporter ‘Suara Merdeka’) sebagai aktor kunci dalam produksi awal RSP. Hendro dan Triyanto saat awal RSP tidak hanya berfungsi sebagai penulis, tetapi juga sebagai penjaga orientasi moral dan identitas rubrik.

Fokus utama tulisan-tulisan pada periode awal adalah mengingatkan para pemimpin agar meneladani prinsip-prinsip kepemimpinan berbasis nilai moral Jawa, khususnya yang terkandung dalam filosofi *Hasta Brata*. Simbolisasi keadilan

melalui elemen ‘bumi’, kejujuran melalui metafora ‘air’, serta keteguhan melalui metafora ‘api’, digunakan secara konsisten untuk menegaskan standar etis kepemimpinan yang diharapkan. Menurut informan Hendro Basuki, RSP mengingatkan orang Jawa agar tidak *lali Jawane* di segala aspek kehidupan dengan menerapkan nilai-nilai luhur dan etika yang didukung aspek spiritualitas sekalipun.

Orientasi normatif ini tidak muncul secara sporadis, melainkan dilembagakan sejak awal pendirian rubrik. Hal ini tampak jelas pada edisi perdana RSP yang terbit pada 21 November 1996 dalam format suplemen budaya. Edisi tersebut menampilkan wawancara khusus dengan Menteri Penerangan (saat itu), Harmoko, yang membahas kepemimpinan *Hasta Brata* sebagai rujukan kepemimpinan ideal berbasis budaya Jawa. Tulisan utama (*headline*) tersebut berjudul ‘Jangan Seperti Katak dalam Tempurung! disusun oleh Wakil Pemimpin Redaksi *Suara Merdeka*, Bambang Sadono, bersama Koordinator Liputan, Hendro Basuki. Keduanya merupakan penggagas RSP yang memiliki latar belakang sebagai sastrawan dan pengamat budaya, sehingga secara langsung menanamkan orientasi kultural dan etis ke dalam mekanisme rubrik sejak awal.

Berdasarkan wawancara dengan informan Hendro Basuki, Koordinator Liputan (saat itu) sekaligus pengasuh RSP, bahwa laporan utama edisi perdana RSP (21 November 1996) secara khusus mengulas prinsip kepemimpinan *Hasta Brata* sebagai pedoman etis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hendro menegaskan bahwa tujuan rubrik sejak awal bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kepemimpinan, tanggung jawab sosial, dan etika publik. Ia menambahkan bahwa

strategi penyajian yang menggabungkan narasi langsung dan interpretasi moral dirancang untuk menghadirkan diskusi tentang kepemimpinan yang relevan dengan konteks sosial-politik pada masa Orde Baru, sekaligus membangun identitas rubrik sebagai ruang kesadaran kolektif bagi pembaca.

Kombinasi latar kultural dan pengalaman profesional pengasuh RSP memberikan karakter khas pada produksi RSP pada fase awal, yang membedakannya dari rubrik jurnalistik konvensional. RSP tampil sebagai ruang refleksi budaya yang memadukan praktik jurnalistik dengan sensibilitas sastra dan etika Jawa.

Komposisi aktor dan latar kultural tersebut menjadi kunci untuk memahami praktik jurnalistik RSP pada periode perdana. Analisis terhadap delapan artikel yang diteliti pada fase ini menunjukkan bahwa seluruh tulisan disusun langsung oleh pengasuh rubrik, tanpa melibatkan penulis eksternal. Peran ganda sebagai kolumnis, sastrawan, dan penggiat budaya sehingga pengasuh rubrik mengintegrasikan pengalaman personal, pengetahuan budaya, dan kepekaan sosial ke dalam narasi jurnalistik yang dihasilkan.

Habitus yang terinternalisasi ini membimbing cara pengasuh memilih isu, membingkai narasi, serta menyampaikan refleksi etis mengenai kepemimpinan dan moralitas masyarakat. Pilihan isu tidak semata didasarkan pada aktualitas peristiwa, melainkan pada relevansi nilai yang ingin disampaikan. Narasi tidak diarahkan untuk menyampaikan fakta secara langsung, tetapi untuk membuka ruang tafsir dan perenungan.

Informan Hendro Basuki (2020) menjelaskan, RSP (saat itu) tampil sekali seminggu dan terbit setiap Kamis sebagai suplemen. Awal terbit empat halaman yang berisi hasil reportase menyikapi isu yang hangat dalam sepekan terakhir dan diulas dalam perspektif budaya Jawa. Reportase tersebut dilakukan oleh Triyanto Triwikromo yang kerap juga dibantu secara insidentil oleh beberapa wartawan ‘Suara Merdeka’ manakala menggarap beragam laporan kebudayaan. Dengan demikian, RSP pada periode awal lebih berfungsi sebagai wahana dialog moral daripada sebagai medium informasi politik. Selain *headline*, RSP pada fase awal juga diisi beragam tulisan lainnya yang paralel dengan budaya Jawa. Rubrik ini dilengkapi kolom Horoskop, kolom konsultasi spiritual Jawa dengan nama Konsultasi *Kawruh Jawa*.

Pengaruh habitus tersebut termanifestasi secara konkret dalam pilihan kerangka simbolik dan rujukan nilai yang digunakan. Filosofi *Hasta Brata* berfungsi sebagai “kompas moral” utama yang mengarahkan pembacaan realitas sosial. Simbol-simbol budaya Jawa seperti *memayu hayuning bawana*, *adigang*, *adigung*, *adiguna*, serta prinsip *menang tan ngasorake* digunakan untuk menegaskan pesan kepemimpinan ideal sekaligus menyampaikan kritik sosial secara halus. Penggunaan simbol-simbol ini dalam RSP bertujuan menjangkau pembaca pada tingkat kultural yang lebih dalam, tanpa harus menyatakan kritik secara eksplisit.

Dalam konteks jurnalistik, konsep habitus juga dipahami sebagai pola pikir, persepsi, dan disposisi yang terbentuk dari pengalaman profesional wartawan dalam dunia media (Schultz, 2007). Habitus membimbing cara jurnalis memaknai

peristiwa, menentukan kelayakan konten, serta menafsirkan nilai-nilai budaya masyarakat.

Pada RSP, habitus pengasuh rubrik tidak hanya dibentuk oleh pengalaman jurnalistik, tetapi juga oleh pengalaman kultural dan kesusastraan, sehingga menghasilkan praktik jurnalistik yang berkarakter reflektif dan simbolik. Termasuk dalam menyuarakan berbagai pesan moral maupun kritik sosial menyikapi kondisi dinamika bangsa yang berlangsung saat itu.

Hal ini seperti diungkapkan informan Wakil Pemimpin Redaksi ‘Suara Merdeka’ Triyanto Triwikromo yang pada 1996 sebagai penulis utama dan pengasuh RSP. Menurutnya, *pasemon* dan simbolisme Jawa digunakan untuk menyampaikan kritik politik secara elegan dan aman di tengah tekanan kekuasaan. Dengan demikian, kritik ini sebagai pijakan kritik sosial agar diterima pembaca tanpa menimbulkan kegaduhan atau resistensi terbuka. Dalam relasinya dengan kekuasaan yang dikritik, RSP memilih jalur koreksi moral yang bersifat implisit, menghindari konfrontasi langsung, namun tetap menjaga keberanian etis dalam menyuarakan kegelisahan sosial.

Dalam konteks inilah, produksi rubrik pada periode ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal, internalisasi habitus Jawa, serta penguasaan modal simbolik menjadi penentu utama. Untuk menempatkan peran habitus dalam relasi antara agen dan struktur media, analisis ini menggunakan kerangka lima level hierarki pengaruh isi media dari Shoemaker dan Reese (1996, 2014). Kerangka ini membantu menjelaskan bagaimana disposisi individu pengasuh rubrik berinteraksi dengan batasan struktural produksi konten.

Pada level individu dan rutinitas media, pengasuh rubrik memiliki keleluasaan dalam menentukan jadwal terbit, format tulisan, pemilihan isu, serta pemingkakan kritik melalui metafora budaya. Informan Hendro Basuki selaku Koordinator Pengasuh RSP menjelaskan, pada fase awal ia menerapkan rapat rutin mingguan untuk memberikan penugasan kepada Triyanto Triwikromo maupun secara insidental kepada wartawan ‘Suara Merdeka’ lainnya untuk menggarap liputan dengan beragam isu yang menonjol, menarik, dan hangat dalam sepekan terakhir yang diulas dengan perspektif budaya Jawa.

Pada level organisasi, praktik produksi RSP tetap berada dalam pengawasan redaksi ‘Suara Merdeka’, yang menjaga keselarasan rubrik dengan identitas media sebagai surat kabar lokal yang mengedepankan nilai-nilai kultural. Tekanan politik Orde Baru membentuk narasi simbolik pada level ekstra-media.

Pada level ideologi, RSP menegaskan nilai-nilai kearifan lokal Jawa dan filosofi *Hasta Brata* sebagai fondasi etis yang menjiwai keseluruhan praktik jurnalistiknya. Penegasan tersebut tidak hadir dalam bentuk pernyataan normatif yang eksplisit, melainkan bekerja secara laten melalui pola penyajian yang relatif konsisten. Rutinitas penulisan, pemilihan isu, serta penekanan pada aspek-aspek moral dan kultural tertentu menjadi mekanisme utama bagi rubrik ini dalam membentuk cara pandang khalayak terhadap peristiwa, aktor sosial, dan praktik kehidupan sehari-hari (Pawito, 2014). Dalam kerangka ini, rubrik jurnalistik tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mengarahkan proses konstruksi sosial secara berkelanjutan (Boughen, 2023). Proses ini menegaskan bahwa setiap

narasi media membentuk perspektif pembaca, sekaligus memengaruhi cara mereka memahami kehidupan sosial sehari-hari.

Proses kontruksi tersebut sebagai manifestasi dari implementasi ideologi media sebagai nilai yang diartikulasikan secara halus melalui narasi dan simbol budaya. Kondisi dimaksud selaras dengan kebijakan manajemen ‘Suara Merdeka’ yang dirintis oleh Hetami, di mana sejak awal media lokal ini mengadopsi filosofi manajemen berbasis budaya Jawa (Machmud, 2010).

Dengan demikian, interaksi antara habitus pengasuh dan struktur media dalam bingkai hierarki pengaruh isi media menunjukkan bahwa RSP mengadaptasi nilai-nilai etis dan kultural dalam situasi politik yang represif. Mobilisasi modal kultural diakui informan Triyanto Triwikromo (2010) berupa penguasaan literatur Jawa dan filosofi *Hasta Brata*, menjadi sarana utama dalam produksi makna dan pembentukan identitas rubrik. Modal sosial melalui jejaring komunitas budaya dan kolumnis, serta modal simbolik berupa legitimasi sebagai ruang refleksi publik (Krisdinanto, 2018), turut memperkuat posisi RSP dalam ranah jurnalistik budaya.

Temuan ini menegaskan bahwa produksi jurnalistik RSP pada periode 1996–1998 tidak semata-mata merupakan aktivitas penyampaian informasi, melainkan praktik distribusi simbol dan kontinuitas budaya. Sebagaimana dikemukakan Lindell et al. (2019) bahwa praktik jurnalistik berfungsi sebagai arena produksi makna yang berakar pada nilai-nilai sosial dan kultural masyarakat. RSP tampil sebagai medium yang menjembatani etika kepemimpinan Jawa dengan realitas sosial-politik zamannya, melalui praktik jurnalistik yang berakar pada habitus pengasuh rubrik.

b. Modal Simbolik dan Modal Kultural dalam Produksi RSP

Produksi RSP periodisasi 1996–1998 ditentukan oleh konfigurasi modal yang dimiliki para aktor pengelolanya. Dalam kerangka Bourdieu, praktik sosial termasuk praktik jurnalistik tidak hanya dibentuk oleh disposisi internal (*habitus*), tetapi juga oleh akumulasi dan mobilisasi berbagai bentuk modal yang dimiliki aktor dalam suatu ranah (Bourdieu, 1998; Schultz, 2007; Örnebring et al., 2018).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengasuh RSP berpijak pada modal simbolik dan modal kultural yang relatif kuat, yang berfungsi sebagai sumber legitimasi sekaligus sebagai sarana strategis dalam menyampaikan refleksi etis dan kritik sosial.

Modal simbolik pengasuh RSP terutama bersumber dari reputasi mereka sebagai sastrawan, kolumnis, dan pengamat budaya Jawa. Reputasi ini tidak sekadar menunjukkan kemampuan teknis menulis, tetapi juga mencerminkan pengakuan sosial atas integritas moral, kepekaan kultural, dan kedalaman refleksi yang mereka miliki (Munnik, 2018). Dalam ranah jurnalistik, modal simbolik semacam ini memberikan otoritas moral kepada aktor untuk berbicara tentang nilai, etika, dan kepemimpinan, tanpa harus mendasarkan argumennya pada posisi struktural formal semata (Schultz, 2007). Pengakuan simbolik tersebut membuat pengasuh RSP dipersepsi sebagai figur yang ‘layak didengar’ ketika membicarakan nilai-nilai kearifan lokal Jawa, seperti *ambeg adil paramarta*, *wicaksana*, dan *tepa selira*. Nilai-nilai tersebut tidak disajikan sebagai doktrin normatif yang menggurui (Dlamini, 2023). Nilai lokal dalam RSP sebagai hasil perenungan kultural yang lahir dari pengalaman panjang berinteraksi dengan dunia sastra dan budaya Jawa.

Dalam kerangka ini, nilai dipahami sebagai tolok ukur mengenai baik dan buruk dalam kehidupan sosial. Sistem nilai yang telah mengakar cenderung relatif menetap karena berfungsi sebagai orientasi hidup dan perilaku masyarakat (Djajasudarma dkk., 1997 dalam Sartini, 2009). Meski demikian, nilai tidak bersifat statis, melainkan dibentuk dan diwariskan melalui proses sosial-historis, praktik budaya, serta interaksi antargenerasi yang berlangsung secara berkelanjutan.

Otoritas moral pengasuh rubrik bekerja secara persuasif dan reflektif, sehingga pembaca dapat menerima pesan tanpa merasa sedang diarahkan atau dihakimi. Otoritas semacam ini tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan bertumpu pada modal simbolik yang dibangun melalui konsistensi sikap, gaya penulisan, dan kredibilitas kultural pengasuh rubrik.

Modal simbolik tersebut menjadi semakin efektif karena diperkuat oleh modal kultural yang dimiliki pengasuh rubrik. Hendro Basuki dan Triyanto, yang berasal dari latar budaya Jawa dan memiliki pengalaman panjang dalam dunia sastra Jawa, menguasai literatur budaya, tradisi pewayangan, serta filsafat Jawa. Modal kultural ini juga mencakup kepekaan estetis dan keterampilan stilistika yang terasah melalui praktik kesusastraan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam praktik jurnalistik RSP. Tulisan-tulisan yang dihasilkan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memiliki kualitas estetik-naratif, sehingga pesan etis dapat disampaikan secara lembut dalam format *soft news*.

Penguasaan modal kultural ini memfasilitasi penggunaan *pasemon* sebagai strategi komunikasi utama dalam RSP. *Pasemon* berfungsi sebagai medium simbolik sehingga kritik sosial disampaikan secara tidak langsung, namun melalui

metafora, perumpamaan, dan rujukan budaya. Strategi ini memiliki relevansi kontekstual yang kuat, mengingat periode 1996–1998 merupakan masa akhir Orde Baru, di mana ruang kritik terbuka terhadap kekuasaan masih sangat terbatas. Dalam situasi tersebut, *pasemon* menjadi jembatan antara keberanian moral dan kehati-hatian politik. Menurut informan Triyanto Triwikromo selaku Wakil Pemimpin Redaksi ‘Suara Merdeka’ dalam wawancara pada 2020 menjelaskan, pihaknya pada awal RSP mengadaptasi nilai-nilai budaya Jawa sebagai pedoman moral dan spiritual dalam proses menulis dan membingkai kritik sosial.

Melalui kombinasi modal simbolik dan modal kultural, pengasuh RSP menyampaikan refleksi mengenai kepemimpinan dan moralitas tanpa memicu konflik ataupun konfrontasi terbuka. Kritik sosial tidak diarahkan pada figur atau institusi tertentu secara eksplisit, melainkan pada praktik dan nilai yang dianggap menyimpang dari prinsip kepemimpinan ideal. Dengan cara ini, RSP mempertahankan posisinya sebagai ruang refleksi budaya yang relatif aman secara politis, sekaligus tetap bermakna secara sosial.

Berikut penjelasan informan Triyanto Triwikromo:

“Kritik terhadap penyimpangan sosial dan kekuasaan disampaikan lewat keindahan bahasa dan perenungan batin, bukan konfrontasi.” (Wawancara awal dengan Triyanto Triwikromo, 2020).

Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa aktor dalam ranah jurnalistik senantiasa beroperasi melalui akumulasi berbagai bentuk modal. Örnebring et al. (2018) menegaskan bahwa praktik jurnalistik tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi atau tekanan eksternal, tetapi juga oleh modal kultural, modal sosial, dan

modal simbolik yang dimiliki aktor media. Dalam konteks RSP, modal kultural berupa pengetahuan budaya dan literasi sastra berpadu dengan modal simbolik berupa reputasi dan legitimasi moral, sehingga membentuk basis yang kokoh bagi praktik jurnalistik yang berorientasi pada refleksi etis.

Selain modal simbolik dan kultural, modal sosial berperan penting dalam produksi RSP, meskipun tidak selalu tampak secara eksplisit dalam teks. Jejaring pengasuh rubrik dengan komunitas sastrawan, budayawan, dan tokoh-tokoh budaya Jawa memperluas jangkauan referensi serta memperkaya perspektif yang digunakan dalam tulisan. Modal sosial ini sebagai sarana pertukaran gagasan, rujukan nilai, dan sensitivitas kultural yang kemudian terartikulasikan dalam rubrik. Produksi RSP bukanlah sebagai kerja individual semata, melainkan sebagai hasil interaksi dalam jejaring kultural yang lebih luas.

Konfigurasi modal tersebut berfungsi sebagai fondasi penting bagi praktik jurnalistik RSP yang berorientasi pada keberlanjutan nilai budaya. Rubrik ini tidak sekadar merespons peristiwa aktual, tetapi secara konsisten membangun narasi tentang kepemimpinan, moralitas, dan tanggung jawab sosial dalam kerangka budaya Jawa. Praktik ini sesuai hasil penelitian Boughen (2023) menunjukkan bahwa modal kultural dan simbolik tidak hanya digunakan untuk memperoleh posisi dalam ranah jurnalistik, tetapi juga untuk menjaga kontinuitas nilai dan tradisi dalam ruang publik.

Dalam perspektif konstruktivis, praktik produksi RSP terkait konstruksi nilai-nilai kepemimpinan *Hasta Brata* sebagai proses interaksi antara pengasuh rubrik dan pembaca. Modal simbolik pengasuh rubrik bertujuan membangun relasi

kepercayaan, sementara modal kultural menyediakan bahasa simbolik yang dapat dipahami dan dimaknai bersama. Pembaca tidak diposisikan sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek yang diajak untuk merenungkan dan menafsirkan nilai-nilai yang disajikan. Ini artinya, makna kepemimpinan dan etika yang dihadirkan dalam RSP merupakan hasil konstruksi sosial yang terus dinegosiasikan.

Penggunaan *pasemon* dan simbol budaya juga berfungsi sebagai mekanisme kultural. Nilai-nilai Jawa yang diartikulasikan dalam rubrik tidak disajikan secara eksklusif untuk kalangan tertentu, melainkan dibingkai dalam bahasa yang relatif ‘cair’ dan komunikatif. Cara ini memudahkan RSP menjangkau pembaca lintas latar belakang sosial, sekaligus mempertahankan kedalaman kulturalnya. Dalam konteks ini, modal kultural tidak berfungsi sebagai alat dominasi simbolik, tetapi sebagai sarana mediasi makna.

Praktik ini memperlihatkan bagaimana modal simbolik dan kultural bekerja secara simultan dalam produksi jurnalistik. Modal simbolik memberikan legitimasi terkait nilai, sementara modal kultural menyediakan perangkat simbolik untuk menyampaikan pesan tersebut secara efektif (Dlamini, 2023). Kombinasi keduanya ini penting bagi RSP untuk menjalankan fungsi reflektifnya dalam ruang publik, tanpa harus terjebak dalam kisruh politik.

Konfigurasi modal ini memengaruhi posisi RSP dalam ranah jurnalistik budaya. Rubrik ini memperoleh legitimasi sebagai ruang refleksi yang kredibel dan berwibawa, meskipun tidak menempati posisi dominan dalam struktur organisasi media. Legitimasi tersebut tidak semata-mata bersumber dari kebijakan redaksi, tetapi dari pengakuan simbolik yang dibangun melalui konsistensi nilai, kualitas

tulisan, dan kepekaan kultural. Posisi RSP dalam ranah jurnalistik dibentuk oleh akumulasi modal yang bersifat non-material.

Temuan ini menegaskan bahwa produksi jurnalistik pada RSP merupakan praktik kultural yang melibatkan distribusi simbol, negosiasi makna, dan pengembangan nilai-nilai etis dalam ruang publik. Modal simbolik dan kultural menjadi sumber daya utama sehingga praktik tersebut berlangsung secara berkelanjutan, terutama dalam konteks politik yang membatasi ekspresi langsung.

Dalam kerangka analisis kualitatif, temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap praktik jurnalistik RSP menuntut perhatian pada pengalaman subjektif aktor, latar kultural, serta sumber daya simbolik yang dimiliki. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma konstruktivis yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi makna yang bersifat kontekstual dan dinamis (Hamad, 2004). RSP, sebagai produk interaksi antara aktor, nilai budaya, dan struktur sosial yang melingkupinya.

Dengan demikian, modal simbolik dan modal kultural tidak hanya berfungsi sebagai atribut personal pengasuh rubrik, tetapi sebagai elemen kunci dalam proses produksi jurnalistik melalui RSP. Kedua modal ini secara signifikan menjadikan RSP berperan sebagai wahana refleksi etika kepemimpinan berbasis budaya Jawa, sekaligus menjaga relevansinya dalam ruang publik. Temuan ini memperkuat argumen bahwa praktik jurnalistik budaya, seperti yang dijalankan RSP, merupakan bentuk kerja kultural yang sarat makna, sehingga nilai, simbol, dan pengalaman aktor berkelindan dalam proses konstruksi realitas sosial.

c. Ranah Jurnalistik dan Konteks Produksi

Produksi RSP pada periode awal kemunculannya berlangsung dalam lanskap jurnalistik yang berada di bawah pengawasan ketat pemerintahan Orde Baru. Menjelang akhir masa kekuasaan Presiden Soeharto, iklim pers nasional ditandai oleh meningkatnya kontrol negara terhadap media, baik melalui regulasi formal maupun mekanisme informal yang berdampak langsung pada praktik redaksional. Sejumlah penelitian mencatat bahwa pada fase ini media berada dalam kondisi rawan terhadap penyensoran, teguran administratif, hingga pembredelan, terutama apabila memuat kritik yang dianggap melampaui batas toleransi politik (Imron et al., 2016; Suwirta, 2018).

Situasi tersebut membentuk kerangka struktural yang secara langsung memengaruhi cara media memproduksi konten. Kritik sosial-politik yang bersifat lugas dan frontal semakin jarang dijumpai, digantikan oleh gaya penyampaian yang lebih normatif, reflektif, dan ‘berhati-hati’. Media tidak sepenuhnya berhenti membicarakan persoalan moral dan kepemimpinan, tetapi menata ulang cara pengungkapannya agar tetap selaras dengan batasan yang berlaku (Wijayanto, 2019). Dalam konteks inilah RSP menemukan posisinya sebagai rubrik budaya yang bergerak di wilayah refleksi etis, bukan laporan politik langsung.

Pengasuh RSP seperti dituturkan informan Triyanto Triwikromo (2020, 2023, 2024) menjelaskan saat awal rubrik ini hadir ke tengah pembacanya, pengasuh rubrik sangat menyadari kondisi sosial politik yang tidak kondusif dan berdampak buruk bagi kelangsungan bangsa. Namun untuk secara frontal melontarkan kritik terhadap penguasa, sangat beresiko karena berpotensi disensor

bahkan dibredel. Sebagai solusinya, pengasuh rubrik mengambil jalan tengah yaitu menyuarkan kegelisahan publik yang disalurkan dalam bingkai budaya Jawa.

Triyanto (2020) mengakui pihaknya secara sadar menempatkan rubrik ini sebagai ruang artikulasi kultural yang memanfaatkan simbol, metafora, serta gaya sastra Jawa untuk menyampaikan pesan moral. Strategi ini tidak muncul secara kebetulan, melainkan berangkat dari pengalaman historis para pengasuh rubrik yang telah lama bergelut dalam dunia jurnalistik dan kesusastraan pada masa Orde Baru. Pengalaman tersebut membentuk sensitivitas terhadap batas-batas yang harus dijaga, sekaligus kepekaan dalam memilih bentuk ekspresi yang tetap bermakna bagi pembaca.

Dalam praktiknya, lanjut Triyanto, RSP mengintegrasikan nilai-nilai kepemimpinan *Hasta Brata* sebagai rujukan etis utama. Meski juga ada ajaran leluhur dari Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan *Tut Wuri Handayani*.

Secara khusus menurut informan Triyanto, nilai-nilai filosofis *Hasta Brata* dihadirkan melalui simbolisasi delapan elemen alam dan narasi budaya yang akrab bagi masyarakat Jawa. Melalui cara ini, refleksi tentang kepemimpinan, tanggung jawab moral, dan keprihatinan sosial disampaikan tanpa harus merujuk pada peristiwa politik tertentu secara eksplisit. Rubrik ini menjadi arena alternatif yang menawarkan narasi etis di tengah kondisi struktural yang membatasi ekspresi langsung.

Pendekatan semacam ini sejalan dengan logika kerja ranah jurnalistik sebagaimana dijelaskan dalam perspektif Bourdieu (1993). Ranah jurnalistik sebagai ruang sosial yang memiliki aturan main, hierarki nilai, serta mekanisme

evaluasi tersendiri (Benson, 2004; Benson & Neveu, 2010). Wartawan, redaktur, dan institusi media beroperasi dalam batasan tersebut, sambil terus menyesuaikan praktiknya dengan dinamika sosial dan politik yang berkembang. Praktik jurnalistik, dalam pengertian ini, merupakan hasil interaksi antara struktur institusional media dan pengalaman historis aktor yang terinternalisasi dalam habitus mereka (Willig, 2012).

Dalam konteks RSP, struktur ranah jurnalistik Orde Baru mendorong pengasuh rubrik untuk mengoptimalkan sumber daya kultural yang mereka miliki. Pilihan untuk bergerak melalui jalur budaya bukan hanya persoalan preferensi estetis, tetapi juga bagian dari strategi profesional untuk menjaga keberlangsungan rubrik dalam situasi yang tidak kondusif bagi kritik terbuka. Rubrik budaya menyediakan ruang yang relatif lebih lentur, karena fokusnya pada nilai, tradisi, dan refleksi kehidupan sosial, bukan pada dinamika politik praktis.

Kondisi ini membentuk produksi konten RSP yang khas. Artikel-artikel yang terbit pada periode 1996–1998 memperlihatkan konsistensi dalam penggunaan bahasa simbolik dan rujukan budaya Jawa. Kritik terhadap krisis moral kepemimpinan tidak disampaikan melalui tudingan langsung, melainkan melalui penggambaran figur pemimpin ideal, perenungan atas *laku* etis, serta penegasan kembali nilai-nilai kearifan lokal. Dengan cara ini, RSP tetap relevan dengan situasi sosial yang dihadapi masyarakat, tanpa melanggar batasan yang ditetapkan oleh konteks politik saat itu. Hal ini sesuai penegasan informan Triyanto Triwikromo bahwa RSP menerapkan estetika, spiritualitas, dan etika budaya Jawa sebagai cara menuntun dan mengkritik masyarakat maupun elite secara halus dan bermakna.

Dari sudut pandang konstruktivis, praktik produksi RSP sebagai proses pembentukan konstruksi nilai kepemimpinan yang berlangsung secara kontekstual. Konstruksi kepemimpinan, moralitas, dan tanggung jawab sosial tidak hadir sebagai kebenaran tunggal yang baku, melainkan sebagai hasil perumusan bersama antara pengasuh rubrik, teks budaya, dan pengalaman sosial pembaca. Di sini, RSP berfungsi sebagai medium yang menghubungkan pengalaman keseharian masyarakat dengan nilai-nilai budaya Jawa yang telah lama hidup dalam tradisi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Yoedtadi & Salman (2023) bahwa nilai-nilai budaya yang dihayati sejak kecil mendorong praktik jurnalistik yang menjunjung toleransi dan keharmonisan sosial.

Selain itu, keputusan redaksional untuk mempertahankan RSP sebagai rubrik budaya mencerminkan orientasi ‘Suara Merdeka’ pada periode tersebut. Sebagai surat kabar lokal yang memiliki basis pembaca kuat di Jawa Tengah, ‘Suara Merdeka’ memposisikan diri sebagai media yang mengedepankan kedekatan kultural dengan masyarakatnya. RSP menjadi salah satu wujud konkret dari orientasi tersebut, sekaligus sarana untuk menjaga identitas media di tengah perubahan sosial dan tekanan politik.

Dalam praktik keseharian, pengasuh rubrik menurut Triyanto Triwikromo melalui habitusnya menjalankan peran sebagai penjaga konsistensi nilai dan gaya tutur RSP. Mereka menyeleksi isu, menentukan sudut pandang, serta merangkai narasi dengan mempertimbangkan situasi sosial yang sedang berlangsung. Proses ini tidak bersifat mekanis, tetapi melibatkan penilaian profesional yang dipengaruhi oleh pengalaman, kepekaan kultural, dan pemahaman terhadap iklim jurnalistik saat

itu. Produksi konten RSP merupakan hasil kerja reflektif yang terus-menerus menyesuaikan diri dengan konteks.

Temuan penelitian ini paralel dengan hasil penelitian Dlamini (2023) bahwa habitus jurnalis terbentuk melalui negosiasi antara idealisme publik dan struktur kekuasaan politik. Hal ini dibuktikan melalui tekanan struktural Orde Baru yang membentuk hubungan RSP dengan pembacanya. Rubrik ini tidak memposisikan diri sebagai corong kritik yang keras, melainkan sebagai ruang perenungan bersama. Pembaca diajak untuk menimbang kembali nilai-nilai kepemimpinan dan *laku* etis melalui kisah, metafora, dan simbol budaya. Komunikasi semacam ini menciptakan ikatan emosional dan kultural yang kuat antara rubrik dan pembacanya, karena pesan disampaikan melalui bahasa yang akrab dan bernuansa keseharian.

Dalam ranah jurnalistik yang penuh pembatasan, keberadaan RSP menunjukkan bahwa media tetap memiliki ruang untuk menjalankan fungsi reflektif dan edukatif. Fungsi ini tidak dijalankan melalui pelaporan peristiwa politik secara langsung, melainkan melalui penguatan nilai dan etika sosial. Dengan cara tersebut, RSP berkontribusi pada pembentukan kesadaran kultural masyarakat, sekaligus menjaga kesinambungan nilai-nilai Jawa dalam ruang publik.

Kerangka Bourdieu membantu menjelaskan bahwa praktik jurnalistik RSP bukan semata hasil kehendak individual pengasuh rubrik, tetapi bagian dari dinamika ranah yang lebih luas. Struktur institusional media, iklim politik nasional, serta tradisi jurnalistik yang berkembang pada masa Orde Baru bersama-sama membentuk kondisi produksi rubrik. Dalam kondisi tersebut, pengasuh RSP menata

strategi penulisan dan pemilihan tema agar tetap selaras dengan logika ranah jurnalistik yang berlaku.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa RSP pada periode 1996–1998 beroperasi sebagai ruang artikulasi nilai yang relatif stabil di tengah situasi sosial yang bergejolak. Dengan mengandalkan pendekatan budaya dan simbolik, rubrik ini menjaga keberlangsungannya sekaligus mempertahankan relevansi sosial. Produksi konten RSP tidak diarahkan untuk membangun oposisi politik, melainkan untuk merawat kesadaran etis dan kultural masyarakat melalui narasi yang bersumber dari tradisi Jawa.

Ranah jurnalistik dan konteks produksi pada periode awal RSP membentuk karakter rubrik sebagai media refleksi budaya yang berhati-hati, konsisten, dan berakar pada nilai lokal. Praktik jurnalistik yang dijalankan menunjukkan bagaimana aktor media menata ulang cara bertutur dan menyampaikan pesan di tengah keterbatasan struktural, tanpa kehilangan orientasi etis yang menjadi fondasi rubrik. Temuan ini menegaskan bahwa produksi jurnalistik dalam konteks Orde Baru tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga mencakup upaya merawat nilai dan makna dalam ruang publik melalui jalur budaya.

4.1.2 Produksi RSP Periodisasi 1999-2000

Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) tidak terbit pada periode 1999–2000. Ketidakhadiran ini dalam konteks dinamika produksi jurnalistik, bukanlah sekadar sebagai jeda administratif atau teknis penerbitan. Fase ini merefleksikan situasi transisional yang kompleks, ketika disposisi kultural para pengelola rubrik berhadapan dengan perubahan struktural yang berlangsung secara cepat dan

mendasar. Habitus pengelola RSP sebelumnya terbentuk melalui internalisasi nilai kepemimpinan moral, kearifan lokal budaya Jawa, serta orientasi reflektif terhadap fungsi pers sebagai penuntun etis masyarakat. Namun, dalam situasi krisis moneter dan perubahan lanskap sosial-politik pascareformasi, disposisi tersebut mengalami keterbatasan aktualisasi.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak akhir dekade 1990-an memberikan tekanan langsung terhadap industri pers, termasuk ‘Suara Merdeka’. Lonjakan biaya produksi, penurunan pendapatan iklan, serta tuntutan efisiensi operasional mendorong redaksi untuk melakukan penataan ulang prioritas dan mekanisme kerja. Dalam situasi ini, perhatian redaksional terfokus pada isu-isu yang dianggap lebih mendesak dan memiliki relevansi langsung dengan situasi publik, terutama pemberitaan politik, keamanan, dan peristiwa aktual. Pergeseran orientasi ini berdampak pada berkurangnya ruang bagi rubrik reflektif seperti RSP. Rubrik semacam RSP secara karakter membutuhkan kontinuitas, ketenangan redaksional, serta ruang editorial yang relatif longgar untuk mengolah gagasan secara mendalam dan simbolik.

Tidak hadirnya RSP periode 1999 hingga Februari 2000 diakui informan Triyanto Triwikromo sebagai kondisi yang tidak bisa terelakkan yang dialami oleh ‘Suara Merdeka’ seiring krisis moneter yang sangat berdampak terhadap operasional media lokal tersebut.

Dalam kerangka pemikiran Bourdieu, kondisi tersebut memperlihatkan perubahan konfigurasi ranah jurnalistik yang mengalami tekanan dan penataan ulang struktur kekuasaan. Modal simbolik yang dimiliki RSP, berupa legitimasi

moral, otoritas kultural, serta kedekatan simbolik dengan pembaca dan komunitas budaya Jawa. Hal ini belum memiliki bobot yang cukup untuk mempertahankan posisinya ketika modal ekonomi dan modal politik memperoleh penekanan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan redaksional. Perubahan ini tidak meniadakan nilai simbolik RSP, tetapi menempatkannya dalam posisi yang kurang strategis pada fase tertentu dari dinamika ranah.

Pada periode tersebut, ranah jurnalistik ‘Suara Merdeka’ bergerak dalam situasi yang menuntut respons cepat terhadap perubahan sosial dan politik. Dalam situasi demikian, rubrik reflektif yang berfungsi sebagai ruang perenungan etis cenderung dipandang sebagai tidak prioritas, meskipun secara kultural tetap memiliki makna. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan produksi jurnalistik budaya tidak hanya bertumpu pada komitmen nilai dan kapasitas kultural aktor, tetapi juga dipengaruhi oleh stabilitas struktur yang menopang proses produksi media.

Meskipun tidak diproduksi, ketiadaan RSP pada periode 1999–2000 justru memberikan pemahaman penting mengenai batas-batas praktik jurnalistik berbasis nilai dalam konteks krisis. Fase jeda ini memperlihatkan bahwa habitus kultural pengelola rubrik tidak selalu dapat terwujud secara optimal ketika kondisi struktural tidak mendukung. Ketidakhadiran tersebut bukan penanda melemahnya relevansi nilai yang diusung RSP, melainkan cerminan situasi ketika nilai-nilai tersebut belum memperoleh ruang aktualisasi yang memadai dalam dinamika redaksional yang berubah.

Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) periode 1999–2000 menjadi fase penting untuk memahami dinamika produksi secara utuh. Fase ini menegaskan bahwa praktik jurnalistik budaya berada dalam relasi yang dinamis antara disposisi kultural aktor, distribusi modal, dan struktur ranah jurnalistik. Dalam situasi krisis dan pergeseran prioritas redaksi, rubrik reflektif seperti RSP dapat tertahan sementara, meskipun secara ideologis dan kultural tetap memiliki daya hidup. Jeda ini justru memperkuat pemahaman bahwa keberlanjutan RSP pada periode-periode selanjutnya merupakan hasil dari kemampuan aktor dan institusi media dalam menegosiasikan kembali nilai, struktur, dan kondisi produksi yang terus berubah.

4.1.3 Produksi RSP Periodisasi 2000-2010

a. Habitus Penulis dan Pengasuh Rubrik

Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) periode 2000–2010 menandai fase penting dalam produksi, seiring dengan perubahan lanskap sosial, politik, dan jurnalistik pasca-Reformasi. Berakhirnya rezim Orde Baru membawa iklim kebebasan pers yang lebih terbuka, yang berdampak langsung pada cara media mengelola isi, gaya penulisan, serta ragam suara yang tampil di ruang publik. Dalam konteks ini, RSP tidak lagi sebagai ruang refleksi yang bergantung pada pengasuh internal, melainkan berkembang menjadi rubrik yang memfasilitasi keterlibatan penulis eksternal dengan latar belakang intelektual dan kultural yang beragam.

Berikut penjelasan informan Triyanto Triwikromo (2020):

“Redaksi ‘Suara Merdeka’ memberi ruang aman bagi ekspresi budaya dan kritik sosial penulis, memperlihatkan mekanisme kerja redaksional yang sadar budaya.” (Wawancara dengan Triyanto Triwikromo, 2020).

Perubahan tersebut tidak menghilangkan identitas kultural RSP, tetapi justru memperkaya bentuk artikulasinya. Pada periode ini, kritik sosial tetap disampaikan secara reflektif melalui metafora, kisah wayang, alegori, dan narasi simbolik berbasis tradisi Jawa. Di periode ini pula pengelolaan RSP sepenuhnya dipercayakan kepada Triyanto Triwikromo. Dalam wawancara pada Januari 2020, informan Hendro Basuki menjelaskan dirinya secara khusus mengkader Triyanto yang berlatar belakang kesusastraan untuk meneruskan RSP.

Namun, sudut pandang penulis menjadi lebih plural, seiring masuknya aktor baru ke dalam proses produksi rubrik. Variasi gaya tutur dan penafsiran nilai *Hasta Brata* menjadi ciri menonjol dalam artikel-artikel RSP pada fase ini.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari 18 artikel RSP yang ditelaah sepanjang periode 2000–2010, sebanyak 14 artikel atau sekitar 80 persen ditulis oleh penulis eksternal, yakni Sucipto Hadi Purnomo, seorang sastrawan yang juga berprofesi sebagai akademisi. Sisanya ditulis oleh pengasuh rubrik internal. Komposisi ini menandai perubahan signifikan dalam struktur produksi RSP dibandingkan periode sebelumnya, di mana pengasuh rubrik berperan dominan sebagai penulis tunggal.

Informan Triyanto Triwikromo maupun informan Hendro Basuki mengakui, masuknya penulis eksternal membawa habitus yang berbeda, meskipun masih beririsan kuat dengan tradisi kultural Jawa. Habitus penulis eksternal dibentuk oleh pengalaman akademik, tradisi intelektual, serta keterlibatan panjang dalam dunia sastra. Latar tersebut memengaruhi cara penulis memaknai persoalan sosial-politik pasca-Reformasi, dengan penekanan pada refleksi etis, pendidikan

moral, dan tanggung jawab sosial warga negara. Perspektif akademik memberi kedalaman argumentasi, sementara sensibilitas sastra menjaga nuansa estetik dan simbolik dalam penyampaian gagasan.

Namun kedua informan berpendapat, meski terbentuk habitus yang berbeda karena penulis eksternal dari latar belakang akademisi, tidak menghambat produksi RSP. Kehadiran penulis eksternal ini justru diakui mereka untuk memperkuat eksistensi rubrik ini di mata publik, khususnya masyarakat Jawa Tengah.

Dalam kerangka Bourdieu (1993), habitus dipahami sebagai disposisi yang terinternalisasi melalui pengalaman hidup dan praktik sosial yang berulang. Pada RSP periode 2000–2010, habitus penulis eksternal dan pengasuh rubrik tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling bersinergi dalam proses produksi konten. Habitus penulis eksternal menghadirkan cara pandang reflektif yang lebih sistematis, sementara habitus pengasuh rubrik menjaga kesinambungan nilai kultural dan orientasi moral rubrik.

Peran pengasuh rubrik pada periode ini mengalami pergeseran yang cukup penting. Pada fase awal pengasuh bertindak sebagai penulis utama sekaligus penjaga narasi, pada periode 2000–2010 mereka lebih menempati posisi sebagai kurator dan editor. Dalam peran ini, pengasuh rubrik menyeleksi naskah, menjaga konsistensi tema, serta memastikan bahwa setiap artikel tetap berpijak pada visi kultural RSP. Kurasi ini tidak bersifat membatasi kreativitas penulis, tetapi berfungsi sebagai penyeimbang antara keragaman perspektif dan keutuhan identitas rubrik.

Informan Triyanto Triwikromo menjelaskan, pada periode ini redaksi khususnya pengasuh RSP berkolaborasi dengan penulis eksternal untuk membahas isu-isu untuk disajikan dalam RSP di edisi berikutnya yang tentu wajib ‘bernilai’ dengan menyikapi kondisi yang berkembang dalam masyarakat sepekan terakhir. Isu tersebut harus sesuai koridor jurnalistik lalu dibahas dengan kerangka nilai-nilai budaya Jawa. Berhubung penulis eksternal memiliki latar belakang sastra dan budayawan serta akademisi, sehingga hal ini memudahkan dalam koordinasi oleh pengasuh rubrik terkait penentuan tema-tema apa saja yang menjadi perhatian serius untuk diangkat sebagai *headline* (tulisan utama).

Merujuk pada Dor (2003), *headline* dalam RSP sebagai ruang strategis redaksi dalam menata prioritas makna, menyampaikan nilai, serta membentuk arah pemahaman pembaca terhadap isu-isu sosial-politik yang berkembang. Artinya, prioritas makna melalui penonjolan isu-isu yang dianggap paling penting dan paling menarik dalam sepekan terakhir.

Lebih lanjut, komunikasi yang dilakukan saat itu menurut Triyanto, lazimnya pengasuh rubrik menghubungi langsung penulis eksternal melalui telepon atau pesan singkat melalui *BlackBerry messenger* (BBM).

Habitus pengasuh rubrik yang terbentuk sejak periode sebelumnya tetap menjadi rujukan etis dalam proses kurasi. Nilai-nilai kepemimpinan *Hasta Brata*, pandangan hidup Jawa, serta prinsip *ngemong*, *ngajari*, dan *ngelingake* terus dijaga sebagai fondasi moral rubrik (Bratawijaya, 1997). Atas dasar itulah, meskipun penulis eksternal membawa gaya dan sudut pandang yang beragam, keseluruhan narasi RSP tetap bergerak dalam satu tatanan kultural yang relatif konsisten.

Keragaman perspektif pada periode ini tercermin dalam cara artikel-artikel RSP menanggapi persoalan sosial pasca-Reformasi. Isu birokrasi, moral publik, pendidikan, dan kepemimpinan kontemporer dihadirkan sebagai bahan perenungan bersama, bukan sebagai objek penilaian benar atau salah. Penulis eksternal sering kali mengaitkan persoalan aktual dengan kisah-kisah simbolik kerajaan Jawa atau tokoh pewayangan, sehingga pengalaman masa kini disandingkan dengan kebijaksanaan tradisional. Pendekatan ini memberi jarak reflektif yang membantu pembaca menimbang persoalan secara lebih mendalam.

Menyikapi kepekaan penulis eksternal dalam mengisi *headline* untuk RSP, diakui informan Triyanto Triwikromo (2023) bahwa penulis sudah mengetahui arah tema, karena sudah memahami nilai budaya Jawa dan arah redaksi. Terlebih penulis eksternal merupakan akademisi sekaligus sastrawan dan budayawan.

Untuk melihat bagaimana disposisi penulis dan pengasuh bekerja dalam struktur produksi jurnalistik, analisis ini menggunakan kerangka lima level hierarki pengaruh isi media dari Shoemaker dan Reese (1996, 2014). Kerangka ini tidak digunakan untuk memetakan dominasi atau konflik, melainkan untuk memahami dan memetakan memahami pengalaman individu, rutinitas redaksional, kebijakan organisasi, konteks sosial yang lebih luas, serta orientasi nilai yang melandasi produksi konten.

Pada level individu, penulis baik internal maupun eksternal memiliki keleluasaan dalam memilih tema dan sudut pandang, selama tetap selaras dengan visi kultural RSP. Kebebasan ini tercermin dalam variasi gaya penulisan dan penekanan isu, namun tetap berada dalam koridor refleksi etis berbasis budaya

Jawa. Pengalaman akademik penulis eksternal memberi warna analitis yang lebih eksplisit, sementara latar sastra menjaga kehalusan bahasa dan kedalaman simbolik.

Pada level rutinitas media, redaksi menetapkan pedoman editorial yang mengatur panjang tulisan, format rubrik, serta jadwal penerbitan. Rutinitas ini berfungsi menjaga keteraturan produksi dan kualitas konten, sekaligus memastikan bahwa RSP tetap dikenali sebagai rubrik reflektif yang khas. Proses penyuntingan dilakukan dengan memperhatikan alur narasi, kejelasan simbol, dan kesesuaian nilai, tanpa menghilangkan ciri personal penulis.

Informan Triyanto Triwikromo (2023) menjelaskan RSP periodisasi 2000-2010 tidak lagi sebagai suplemen budaya dan tidak lagi terbit setiap Kamis, melainkan menjadi bagian dari edisi minggu dan tetap terbit seminggu sekali yakni pada Minggu, kecuali jika libur nasional. Berhubung untuk terbit Minggu, lanjut Triyanto lazimnya pengasuh rubrik sudah menghubungi penulis eksternal paling lambat pada Selasa dan naskah sudah harus dikirim melalui email paling lambat pada Kamis karena untuk *delay-out* pada Jumat untuk terbit Minggu.

Di sisi lain, level organisasi tercermin dalam dukungan ‘Suara Merdeka’ terhadap keberlanjutan RSP sebagai rubrik budaya. Sebagai surat kabar yang memiliki basis pembaca kuat di Jawa Tengah, ‘Suara Merdeka’ menempatkan RSP sebagai bagian dari identitas media yang dekat dengan nilai-nilai lokal. Dukungan ini memberi ruang bagi rubrik untuk terus berkembang, sekaligus menjaga konsistensi orientasi moral yang dibangun sejak awal.

Pada level ekstra-media, konteks pasca-Reformasi membawa perubahan signifikan dalam iklim kebebasan pers. Ruang ekspresi yang lebih terbuka memberi

peluang bagi penulis untuk mengangkat persoalan sosial secara lebih luas. Namun, kehati-hatian tetap menjadi bagian dari praktik jurnalistik RSP. Penulis memilih jalur reflektif dan simbolik untuk menyampaikan kegelisahan sosial, sehingga rubrik tetap tampil sebagai ruang perenungan, bukan arena polemik langsung.

Secara ideologis, filosofi *Hasta Brata* dan nilai kearifan lokal Jawa tetap menjadi fondasi utama rubrik. Ideologi tersebut bekerja secara laten melalui pola penyajian yang konsisten yaitu rutinitas penulisan, seleksi isu, dan penekanan moral-kultural yang membentuk cara pandang khalayak (Pawito, 2014), selaras dengan filosofi manajemen budaya Jawa ‘Suara Merdeka’. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai rujukan normatif yang memberi arah bagi penulis dan pengasuh dalam menyusun narasi (Sartini, 2009). Dengan konsistensi ini, RSP menjaga kesinambungan antara masa lalu dan masa kini, antara tradisi dan perubahan sosial.

Informan Hendro Basuki (2020) menegaskan bahwa RSP berperan memberi “nutrisi kebudayaan” dalam konteks masa kini. Pandangan ini selaras dengan visi dan misi ‘Suara Merdeka’ yang dirintis oleh Hetami, dengan menempatkan media tidak sekadar sebagai institusi informasi, tetapi juga sebagai ruang pemeliharaan dan aktualisasi nilai-nilai budaya lokal.

Dalam kerangka tersebut, produksi RSP pada periode 2000–2010 sebagai proses yang terbentuk melalui interaksi antara penulis, pengasuh rubrik, redaksi, dan pembaca. Makna kepemimpinan, moralitas, dan tanggung jawab sosial dibangun melalui dialog simbolik dalam teks dan ditafsirkan secara beragam oleh pembaca. Melalui mekanisme ini, rubrik mengajak khalayak merefleksikan

kembali nilai-nilai tradisi Jawa serta relevansinya dengan situasi sosial kontemporer.

Hal ini diperkuat oleh penjelasan informan Sri Syamsiah Lestari (2020) bahwa RSP menjadi arena reproduksi habitus kultural Jawa dalam jurnalisme modern, serta sarana kontrol sosial halus melalui bahasa *pasemon*. Nilai-nilai budaya Jawa di antaranya *ngemong*, *oyo dumeh*, *rukun*, *tepa selira*, dan budi pekerti luhur dijalankan sebagai prinsip kerja, gaya bahasa, dan arah kebijakan redaksi.

Interaksi tersebut tercermin dalam perubahan komposisi penulis pada periode ini. Perubahan komposisi penulis pada periode ini tidak menggeser RSP dari jalur refleksi budaya yang dibangun, tetapi memperkaya cara nilai-nilai tersebut diartikulasikan. Habitus penulis eksternal dan pengasuh rubrik berjumpa dalam ruang produksi yang cair, saling melengkapi antara kedalaman intelektual dan kepekaan kultural. Hasilnya adalah rubrik yang tetap konsisten secara nilai, namun lentur dalam bentuk dan gaya.

Secara keseluruhan, produksi RSP periodisasi 2000–2010 menunjukkan bahwa praktik jurnalistik budaya merupakan kerja kolektif yang bertumpu pada pengalaman aktor (pengasuh rubrik, penulis internal dan penulis eksternal), nilai, dan konteks sosial. Hal ini sesuai penelitian Maares & Hanusch (2022) dan Lindell et al., (2019) bahwa struktur dan praktik jurnalistik dibentuk oleh relasi antara modal ekonomi, modal kultural, dan habitus para pelaku media.

Rubrik ‘Sang Pamomong’ tampil sebagai ruang refleksi yang hidup, yang menampung keragaman suara tanpa kehilangan arah kulturalnya. Dalam situasi pasca-Reformasi yang penuh perubahan, rubrik ini menjaga perannya sebagai

penuntun moral yang bersahaja, menghubungkan kebijaksanaan tradisi Jawa dengan tantangan kehidupan masyarakat kontemporer. Kendati diungkapkan informan Sri Syamsiah Lestari (2020) bahwa RSP periode 2000-2010 tetap berisi pesan-pesan moral dan kritik sosial halus dengan menggunakan bahasa *pasemon*.

b. Modal Simbolik, Kultural, dan Ekonomi

Pada periodisasi 2000–2010, produksi RSP tidak hanya ditandai oleh perubahan komposisi penulis, tetapi juga oleh konfigurasi modal yang semakin berlapis dan saling melengkapi. Dalam konteks pasca-reformasi yang membuka ruang ekspresi lebih luas bagi pers, RSP mengembangkan strategi keberlanjutan melalui mobilisasi modal kultural, modal sosial, modal simbolik, dan modal ekonomi secara bersamaan. Keempat jenis modal ini tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja secara terpadu dalam membentuk praktik produksi rubrik sebagai ruang refleksi kultural dan etis.

Modal kultural menempati posisi sentral dalam praktik jurnalistik RSP pada periode ini. Modal ini terutama hadir dalam bentuk penguasaan literatur sastra Jawa, pengetahuan filosofis tentang *Hasta Brata*, serta kemampuan merangkai narasi reflektif yang menghubungkan nilai budaya dengan realitas sosial-politik kontemporer. Keterlibatan penulis eksternal berlatar belakang sastrawan dan akademisi memperkaya basis modal kultural rubrik. Pengalaman mereka dalam dunia sastra dan pendidikan tinggi membentuk cara pandang yang matang, berhati-hati, dan berlapis dalam menafsirkan persoalan publik.

Modal kultural tersebut tampak dalam pilihan diksi, penggunaan metafora wayang dan kisah kerajaan Jawa yang tidak sekadar dekoratif, serta kedalaman

refleksi etis yang tidak terjebak pada moralitas penghakiman (benar atau salah). Hal ini ditegaskan informan Hendro Basuki (2020) bahwa gagasan atau opini yang sifatnya refleksi kebudayaan yang dituangkan dalam RSP bukan untuk menghakimi siapa pun atau kondisi apa pun.

Sebaliknya, tandas informan Hendro Basuki (2020), artikel-artikel RSP pada periode ini memperlihatkan kecenderungan untuk mengajak pembaca merenung, bukan menghakimi, serta mendorong proses berpikir reflektif. Cara bertutur semacam ini mencerminkan internalisasi nilai-nilai budaya Jawa yang menempatkan kebijaksanaan, kesabaran, dan kehalusan rasa sebagai fondasi etika sosial. Hal ini sesuai penegasan informan Saroni Asikin (2020) bahwa kekuatan RSP pada perannya menjaga bahasa, identitas, dan falsafah Jawa di tengah arus kapitalisme media. Melalui simbolisasi Semar dan prinsip *Hasta Brata*, rubrik ini menjalankan fungsi sosial dan moral: menuntun, mengingatkan, serta mengkritik kekuasaan dengan cara yang santun, humoris, dan berakar pada etika budaya Jawa.

Dalam konteks ini, keberadaan pengasuh rubrik memainkan peran penting dalam menjaga arah pemanfaatan modal kultural tersebut. Sebagai kurator, pengasuh tidak hanya bertugas menyunting teks secara teknis, tetapi juga memastikan bahwa setiap artikel tetap sejalan dengan visi kultural RSP. Pengasuh rubrik menjadi penjaga kesinambungan nilai, terutama filosofi *Hasta Brata*, agar tidak tergerus oleh keberagaman gaya dan interpretasi yang dibawa oleh penulis eksternal. Karena itulah, modal kultural pengasuh rubrik yang terbentuk dari pengalaman jurnalistik panjang, kedekatan dengan tradisi budaya Jawa, dan

pemahaman mendalam atas karakter pembaca berfungsi sebagai ‘jangkar’ yang menjaga konsistensi identitas rubrik.

Selain modal kultural, modal sosial berperan signifikan dalam produksi RSP. Modal sosial terwujud dalam jejaring kepercayaan dan kerja sama antara pengasuh rubrik dan penulis eksternal. Relasi ini bukan bersifat transaksional semata, melainkan dibangun sebagai hubungan professional yang dibangun di atas saling pengertian terhadap nilai, etos kerja, dan tujuan rubrik. Informan Triyanto Triwikromo (2023) menjelaskan, kepercayaan yang dibangun memudahkan ruang gerak penulis mengekspresikan gagasan dengan relatif leluasa, sementara pengasuh rubrik memiliki keyakinan bahwa substansi tulisan tetap berada dalam koridor etika dan budaya yang dijaga bersama.

Jejaring sosial semacam ini turut memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Penulis eksternal membawa perspektif akademik dan kesastraan yang memperkaya wawasan rubrik, sementara pengasuh rubrik berkontribusi memberi pemahaman kontekstual tentang atmosfer redaksional dan karakter pembaca ‘Suara Merdeka’. Pertukaran ini berlangsung secara halus melalui proses penyuntingan, diskusi informal, maupun kontinuitas kerja sama lintas waktu. Modal sosial yang terpelihara dengan baik ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan rubrik di tengah perubahan iklim media.

Modal simbolik RSP pada periode 2000–2010 mengalami penguatan. Rubrik ini menempati posisi khusus sebagai ruang refleksi budaya dan etika dalam lanskap jurnalistik. Reputasi ini tidak dibangun secara instan, melainkan melalui konsistensi tema, gaya bertutur, dan orientasi nilai yang dijaga lintas periode.

Kepercayaan pembaca terhadap RSP sebagai rujukan reflektif menjadi bentuk pengakuan simbolik yang memperkuat legitimasi rubrik.

Keterlibatan penulis eksternal justru memperluas jangkauan modal simbolik ini. Kehadiran penulis eksternal dengan latar belakang akademik dan kesastraan memberi bobot tambahan pada rubrik, sekaligus mempertegas posisinya sebagai arena dialog budaya yang serius namun tetap ‘membumi’. Dalam konteks ini, modal simbolik tidak dimaknai sebagai dominasi atau klaim otoritas sepihak, melainkan sebagai hasil dari akumulasi kepercayaan publik yang tumbuh melalui praktik jurnalistik yang konsisten dan beretika.

Sementara itu, pengasuh rubrik memanfaatkan modal simbolik tersebut untuk menjaga standar kualitas dan arah pemaknaan rubrik. Informan Triyanto Triwikromo menjelaskan, setiap artikel yang dimuat tidak hanya dinilai dari kelayakan teknis, tetapi juga dari kesesuaian nilai dan kontribusinya terhadap refleksi kolektif pembaca. Dengan cara ini, modal simbolik berfungsi sebagai penguat identitas rubrik sekaligus sebagai rujukan normatif dalam proses produksi.

Aspek lain yang tidak terpisahkan dari dinamika produksi RSP adalah modal ekonomi. Meskipun RSP berorientasi pada refleksi budaya dan nilai luhur, praktik produksinya tetap berada dalam konteks media cetak sebagai entitas profesional. Pemberian honor kepada penulis eksternal menjadi salah satu bentuk konkret pengakuan terhadap kontribusi intelektual dan kreatif mereka. Honorarium ini diakui oleh informan Triyanto Triwikromo (2023) bukan semata insentif material, tetapi juga simbol penghargaan atas kerja intelektual yang dilakukan.

Dalam konteks ini, modal ekonomi berfungsi menopang keberlanjutan praktik jurnalistik tanpa menggeser orientasi nilai rubrik. Praktik pemberian honor menunjukkan bahwa kerja reflektif dan kultural memiliki nilai yang diakui secara profesional. Hal ini memperkuat relasi kerja yang sehat antara pengasuh rubrik dan penulis eksternal, sekaligus menjaga komitmen bersama terhadap kualitas isi.

Interaksi antara modal kultural, sosial, simbolik, dan ekonomi pada periode ini memperlihatkan konfigurasi yang relatif seimbang. Tidak satu jenis modal pun bekerja secara dominan, melainkan saling melengkapi dalam membentuk praktik produksi RSP. Modal kultural memberi kedalaman makna, modal sosial menjaga kelancaran kerja sama, modal simbolik memperkuat legitimasi publik, dan modal ekonomi menopang keberlanjutan profesional. Keseimbangan ini membantu RSP tetap konsisten sebagai rubrik reflektif di tengah iklim media yang semakin kompetitif dan terbuka.

Dalam kerangka teori Bourdieu (1993), interaksi antara habitus dan modal tersebut membentuk praktik yang relatif stabil namun tetap lentur menghadapi perubahan konteks. Praktik jurnalistik RSP pada periode 2000–2010 memperlihatkan bagaimana disposisi kultural agen, baik penulis maupun pengasuh rubrik berinteraksi dengan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan teks jurnalistik yang bermakna. Proses ini berlangsung secara simultan dan reflektif, bukan sebagai respons reaktif terhadap tekanan eksternal semata.

Di sisi lain, RSP di periode ini mulai tampil bilingual yakni bahasa Indonesia dan bahasa Jawa secara bergantian setiap minggu. Menurut informan Hendro Basuki (2020), RSP tampil dengan dua bahasa agar inklusif. Artinya, bagi

pembaca yang tidak paham bahasa Jawa dapat mencermati RSP edisi bahasa Indonesia. Sedangkan pembaca dari suku Jawa bertujuan untuk memperkuat orientasi nilai-nilai budaya Jawa di era modernisasi budaya, sehingga semakin banyak dibaca oleh khalayak luas.

Dikaitkan dengan hierarki pengaruh isi media Shoemaker dan Reese (1996, 2014), konfigurasi modal ini beroperasi lintas level. Pada level individu, modal kultural penulis membentuk cara mereka menafsirkan isu dan menyusun narasi. Pada level rutinitas, praktik penyuntingan dan kurasi menjadi ruang pertemuan antara modal kultural dan simbolik. Pada level organisasi, dukungan redaksi terhadap keberlanjutan RSP memperkuat modal simbolik rubrik. Sementara itu, pada level ekstra-media, iklim pasca-reformasi memberi ruang artikulasi nilai yang lebih beragam, tanpa menghilangkan kehati-hatian dalam penyampaian. Pada level ideologis, filosofi *Hasta Brata* tetap menjadi fondasi moral yang menyatukan keseluruhan praktik tersebut.

Dengan demikian, RSP periode 2000–2010 menunjukkan rubrik ini berkembang sebagai wahana konstruksi nilai kolektif yang relevan dengan konteks zamannya. Melalui mobilisasi dan interaksi berbagai jenis modal, RSP menjaga kesinambungan nilai lokal sambil merespons dinamika sosial-politik secara reflektif. Praktik ini menegaskan bahwa jurnalisme budaya tidak hanya bergantung pada kebebasan struktural, tetapi juga pada kedalaman disposisi kultural dan etos profesional para agennya.

Fenomena ini sekaligus memperlihatkan relevansi teori Bourdieu dan kerangka hierarki pengaruh isi media dalam memahami praktik jurnalistik budaya

secara kualitatif dan konstruktivis. RSP menjadi contoh bagaimana rubrik jurnalistik dapat berfungsi sebagai ruang dialog nilai yang hidup, sehingga makna dibangun bersama melalui interaksi agen, struktur, dan sumber daya simbolik yang dimiliki.

c. Ranah Jurnalistik dan Konteks Produksi

Periode pasca-reformasi menandai perubahan penting dalam ranah jurnalistik Indonesia. Berakhirnya kontrol ketat negara terhadap pers membuka ruang artikulasi yang lebih luas bagi media untuk mengemukakan pandangan, refleksi, dan evaluasi atas kehidupan sosial-politik. Namun, perubahan ini tidak serta-merta menghadirkan situasi yang sepenuhnya stabil. Ranah jurnalistik justru berada dalam fase transisi yang ditandai oleh percepatan perubahan sosial, penyesuaian kelembagaan media, serta upaya berkelanjutan untuk menempatkan kembali peran pers dalam kehidupan publik.

Dalam konteks tersebut, RSP tidak memposisikan diri sebagai saluran kritik langsung, melainkan sebagai ruang refleksi kultural yang berangkat dari nilai-nilai budaya Jawa. Kebebasan pers yang lebih terbuka dimanfaatkan RSP untuk mengulas kepemimpinan, etika publik, dan dinamika sosial melalui pendekatan simbolik. Rujukan pada filosofi *Hasta Brata* menjadi kerangka utama dalam menyusun refleksi tersebut, sehingga kritik moral disampaikan melalui kisah, metafora, dan alegori yang dekat dengan pengalaman kultural pembaca.

Berikut penjelasan informan Gunawan Budi Susanto (2020) selaku pengampu halaman RSP menggantikan tugas Saroni Asikin:

“Kritik sosial dalam rubrik (RSP) tidak dimaksudkan untuk menyerang, tetapi untuk menumbuhkan kesadaran moral, sebagaimana ajaran *Hasta*

Brata yaitu menyeimbangkan kekuasaan, spiritualitas, dan kebijaksanaan. nilai budaya Jawa bukanlah dogma, melainkan proses hidup yang terus ditafsir ulang yaitu melalui budaya sebagai kata kerja.”

Lebih lanjut, posisi RSP dalam ranah jurnalistik periode 2000–2010 tetap dibentuk melalui proses editorial yang sadar akan tanggung jawab kultural dan etis. Pengasuh rubrik memaknai kebebasan pers bukan sebagai ruang ekspresi tanpa batas, melainkan sebagai peluang untuk memperdalam refleksi sosial dengan tetap menjaga kehati-hatian dan keluhuran nilai. Dalam praktiknya, kebebasan tersebut diolah melalui seleksi tema, penyusunan narasi, dan penyuntingan yang memastikan bahwa setiap artikel berkontribusi pada dialog moral yang berkesinambungan.

Hanya saja berhubung RSP periodisasi 2000-2010 tampil satu halaman dengan berisi tiga tulisan yaitu *headline*, kolom *Pringgitan* dan tulisan lepas di bagian kaki halaman yakni *Blencong*, mekanisme pengelolaan RSP tidak seketat saat periode awal dengan rutin melakukan rapat mingguan untuk menentukan tema dan *guideline*. Informan Triyanto Triwikromo menjelaskan komunikasi dengan penulis eksternal berlangsung ‘cair’ sehingga tata kelola RSP khususnya untuk penempatan *headline* berjalan lancar. Adapun untuk kolom *Pringgitan* dan *Blencong* diisi oleh penulis internal yaitu Triyanto Triwikromo dan Saroni Asikin.

Ranah jurnalistik pasca-reformasi ditandai oleh meningkatnya keberagaman suara dan perspektif. Dalam situasi ini, RSP menempuh jalan moderat dengan tetap berpijak pada identitas kulturalnya. Rubrik ini tidak larut dalam euforia kebebasan yang cenderung menampilkan opini secara terbuka dan konfrontatif. Sebaliknya, RSP mempertahankan gaya bertutur yang reflektif, mengedepankan kebijaksanaan,

dan memberi ruang bagi pembaca untuk merenungkan persoalan sosial secara mandiri. Pilihan ini menunjukkan kesadaran bahwa praktik jurnalistik tidak hanya berurusan dengan penyampaian informasi, tetapi juga dengan pembentukan orientasi etis masyarakat.

Pada level praksis, peran kuratorial pengasuh rubrik menjadi faktor kunci dalam membentuk karakter RSP. Beragam perspektif penulis, baik internal maupun eksternal dipadukan melalui proses seleksi dan penyuntingan yang menjaga kesinambungan nilai. Pengasuh rubrik berfungsi sebagai penjaga arah pemaknaan, memastikan bahwa keberagaman gaya dan sudut pandang tetap berada dalam koridor filosofi *Hasta Brata* dan nilai luhur budaya Jawa. Melalui proses ini, RSP tidak sekadar menampilkan kumpulan tulisan individual, tetapi menghadirkan suara kolektif yang terjalin secara tematik dan etis.

Praktik kuratorial tersebut mencerminkan habitus profesional yang berkembang di dalam ruang redaksi. Habitus ini terbentuk dari pengalaman jurnalistik, pemahaman terhadap karakter pembaca, serta komitmen terhadap visi kultural media. Dalam konteks RSP, habitus pengasuh rubrik tampak dalam cara memilih isu yang relevan dengan kehidupan sosial, menyusun alur narasi yang tidak tergesa-gesa, serta menekankan dimensi reflektif dibandingkan sikap normatif yang menggurui. Dengan demikian, produksi konten RSP menjadi proses yang sarat pertimbangan kultural dan etis.

Ranah jurnalistik pada periode ini dipengaruhi oleh organisasi media yang menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial dan ekonomi. Media cetak menghadapi tuntutan profesionalisme yang semakin kompleks, termasuk

kebutuhan untuk mempertahankan pembaca di tengah kompetisi yang meningkat. Dalam situasi tersebut, RSP menunjukkan kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Rubrik ini tetap dipertahankan sebagai ruang refleksi budaya, meskipun media secara keseluruhan mengalami penyesuaian strategi dan orientasi.

Sementara itu, konteks produksi RSP pada periode 2000–2010 memperlihatkan bahwa kebebasan pers tidak selalu diwujudkan dalam bentuk ekspresi yang frontal. Sebaliknya, kebebasan tersebut dimaknai sebagai ruang untuk mengembangkan gaya jurnalistik yang lebih matang dan bernuansa. RSP memanfaatkan situasi ini untuk memperdalam berbagai isu tentang kepemimpinan dan etika publik melalui pendekatan kultural. Artikel-artikel yang terbit tidak hanya merespons peristiwa aktual, tetapi juga mengaitkannya dengan nilai-nilai yang bersifat lintas waktu.

Argumen ini sejalan dengan temuan Dlamini (2023) yang menunjukkan bahwa budaya *newsroom* merupakan hasil konstruksi sosial dari interaksi nilai, pengalaman profesional, dan orientasi kelembagaan yang membentuk habitus jurnalis.

Dalam ranah jurnalistik pasca-reformasi Indonesia, budaya redaksi berkembang sebagai hasil interaksi antara nilai profesional, pengalaman historis, dan orientasi kultural media. RSP menjadi contoh bagaimana rubrik jurnalistik mengolah kebebasan pers melalui internalisasi nilai budaya lokal, sehingga praktik jurnalistiknya tetap memiliki arah dan konsistensi.

Namun demikian, periode 2000–2010 ditandai oleh dinamika yang tidak selalu stabil. Wijayanto (2019) menunjukkan bahwa meskipun pers secara formal berada dalam situasi yang lebih terbuka, struktur ekonomi-politik yang terbentuk pada masa sebelumnya masih memengaruhi praktik media. Kondisi ini menciptakan situasi di mana jurnalis dan pengelola media harus menyeimbangkan idealisme profesional dengan tuntutan keberlanjutan organisasi. Dalam konteks ini, RSP menunjukkan strategi adaptif dengan tetap mempertahankan gaya reflektif dan simbolik sebagai ciri khasnya.

Alih-alih merespons situasi tersebut dengan perubahan drastis, RSP memilih jalur kontinuitas nilai. Rubrik ini menegaskan posisinya sebagai ruang refleksi yang konsisten, sekaligus relevan dengan perubahan sosial. Pilihan ini mencerminkan pemahaman bahwa peran jurnalistik budaya bukan hanya menyuarakan perubahan, tetapi menyediakan kerangka etis untuk memaknai perubahan tersebut. Dengan cara ini, RSP berkontribusi pada konstruksi makna kolektif tentang kepemimpinan dan kehidupan sosial di tengah situasi transisi.

Dalam kerangka konstruktivis, praktik ini menunjukkan bahwa makna jurnalistik dibangun melalui interaksi antara teks, penulis, pengasuh rubrik, dan pembaca. Produksi makna tidak dipahami sebagai proses satu arah, melainkan sebagai titik temu berbagai pengalaman dan orientasi nilai. RSP memfasilitasi proses tersebut dengan menyediakan narasi yang kaya simbol dan rujukan budaya, sehingga pembaca memiliki ruang untuk membangun pemaknaan secara mandiri.

Berpijak pada penjelasan tersebut, ranah jurnalistik dan konteks produksi RSP pada periode 2000–2010 memperlihatkan praktik jurnalistik yang kompleks.

Kebebasan pers dimaknai sebagai peluang untuk memperdalam refleksi budaya, bukan sekadar memperluas ekspresi opini. Melalui praktik kuratorial yang konsisten, internalisasi nilai budaya Jawa, dan adaptasi terhadap dinamika organisasi media, RSP meneguhkan dirinya sebagai ruang publik kultural yang berperan dalam membentuk orientasi etis masyarakat.

Praktik jurnalistik budaya tidak dapat dilepaskan dari konteks produksi yang melingkupinya. RSP menunjukkan bagaimana rubrik jurnalistik dapat bertahan dan relevan dengan memadukan kebebasan struktural, habitus profesional, dan nilai budaya lokal. Dalam perspektif ini, RSP menjadi contoh konkret bagaimana jurnalisme budaya bekerja sebagai proses konstruksi makna sosial yang hidup, reflektif, dan berakar pada pengalaman kultural masyarakatnya. Hal ini selaras dengan studi Barnard (2018) bahwa jurnalisme bukan sekedar profesi, tapi sebagai hasil konstruksi sosial yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, RSP pada periode ini berlangsung dalam suasana euforia kebebasan pers. Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan (Arnus, 2015). Sebelumnya Presiden B.J. Habibie menghapus SIUPP dan menerbitkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (Anom & Waluyo, 2011). Periode ini beririsan dengan masa transisi kepemimpinan nasional dari Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam membentuk dinamika relasi antara pers dan kekuasaan (Andani & Birsyada, 2024).

4.1.4 Produksi RSP Periodisasi 2011-2020

a. Habitus Aktor

Periodisasi 2011–2020 menandai fase lanjutan yang penting dalam produksi RSP. Periode ini berlangsung dalam konteks perubahan struktural media yang lebih kompleks, terutama akibat disrupsi digital dan krisis media cetak. Di tengah perubahan tersebut, RSP memperlihatkan konsistensi dalam orientasi nilai serta pola produksi yang berbasis refleksi kultural. Konsistensi ini tidak dapat dilepaskan dari peran aktor-aktor yang terlibat dalam produksi rubrik, khususnya penulis eksternal dan pengasuh rubrik, beserta habitus yang mereka bawa ke dalam praktik jurnalistik.

Periodisasi 2011-2020, RSP tetap tampil satu halaman yang menjadi bagian dari edisi minggu, berisi tiga tulisan yaitu *headline*, kolom *Pringgitan* dan tulisan lepas *Blencong*. RSP juga tetap tampil bilingual (bahasa Indonesia-Jawa) secara bergantian setiap pekan.

Seluruh artikel RSP yang dianalisis pada periode 2011–2020 ditulis oleh penulis eksternal. Fakta ini menunjukkan pergeseran penting dalam struktur produksi rubrik, sehingga pengasuh rubrik tidak lagi berperan sebagai penulis utama, melainkan sepenuhnya menempatkan diri sebagai kurator. Perubahan ini tidak mengurangi peran strategis pengasuh rubrik, justru menegaskan fungsinya sebagai penjaga kesinambungan nilai, arah pemaknaan, dan karakter kultural RSP. Dalam konteks ini, produksi rubrik menjadi hasil kerja kolektif yang dibangun melalui interaksi berkelanjutan antara pengasuh dan jejaring penulis eksternal.

Hal ini sejalan dengan penjelasan informan Triyanto Triwikromo (2023) bahwa memasuki periode sekitar 2015, *headline* dialokasikan untuk penulis eksternal yang tentu saja tetap harus memiliki kompetensi di bidang sastra Jawa ataupun pengetahuan tentang budaya Jawa untuk memudahkan dalam menulis di RSP.

Hasil penelusuran dari 22 artikel yang diteliti menunjukkan habitus para penulis eksternal pada periode ini memiliki karakteristik yang relatif homogen dalam hal orientasi nilai, meskipun beragam dalam latar pengalaman. Para penulis berasal dari lingkungan budaya Jawa dan memiliki latar belakang sebagai sastrawan, akademisi, maupun penggiat komunitas budaya. Pengalaman hidup, keterlibatan dalam praktik kebudayaan, serta kedekatan dengan tradisi literasi Jawa membentuk disposisi kultural yang khas. Disposisi ini tercermin dalam sensitivitas mereka terhadap persoalan etika sosial, kepemimpinan, dan kehidupan publik, yang kemudian diolah melalui simbol, metafora, dan narasi reflektif.

Nilai-nilai *ngemong*, *ngayomi*, dan *ngayemi* tetap menjadi inti filosofi *Hasta Brata* yang hadir sebagai rujukan etis utama dalam tulisan-tulisan RSP periode ini. Para penulis tidak mengemukakan nilai-nilai tersebut sebagai konsep normatif yang kaku, melainkan sebagai *laku* hidup yang terus diuji dalam konteks masyarakat modern. Pengalaman pribadi, pengamatan sosial, dan pengetahuan kultural dirangkai menjadi refleksi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari pembaca. Dengan cara ini, tulisan-tulisan RSP menghadirkan etika kepemimpinan Jawa sebagai panduan moral yang bersifat kontekstual dan hidup.

Habitus penulis eksternal ditandai oleh kecenderungan untuk memadukan kedalaman refleksi dengan kepekaan sosial. Krisis moral masyarakat modern, perubahan pola relasi sosial, serta tantangan kepemimpinan di era digital tidak disikapi secara reaktif. Sebaliknya, para penulis mengolahnya melalui renungan yang berangkat dari nilai budaya dan pengalaman kolektif. Disposisi semacam ini dapat dipahami secara lebih sistematis melalui kerangka teori habitus Pierre Bourdieu.

Dalam kerangka pemikiran Bourdieu, habitus berfungsi sebagai disposisi internal yang membimbing agen dalam menafsirkan realitas sosial dan memilih simbol-simbol budaya yang relevan (Bourdieu, 1993). Pada periode 2011–2020, habitus penulis RSP terlihat bekerja secara konsisten dalam praktik jurnalistik. Pilihan tema, sudut pandang, serta cara menyusun narasi tidak terlepas dari disposisi kultural yang telah mengendap melalui pengalaman panjang dalam dunia sastra, pendidikan, dan kebudayaan. Dengan demikian, praktik produksi rubrik menjadi ruang aktualisasi habitus yang relatif stabil, meskipun berada dalam konteks media yang terus berubah.

Aktualisasi habitus tersebut berlangsung dalam ranah jurnalistik yang juga mengalami pergeseran signifikan. Ranah jurnalistik pada periode ini mengalami pergeseran signifikan. Sebagaimana dikemukakan Benson (2004) dan Lindell et al. (2019), ranah jurnalistik merupakan ruang sosial yang diatur oleh seperangkat norma, kebijakan redaksional, dan orientasi nilai yang membimbing praktik media. Pada periode 2011–2020, ranah ini diwarnai oleh tekanan ekonomi akibat penurunan oplah media cetak, perubahan pola konsumsi media, serta meningkatnya

kompetisi dengan platform digital. Kondisi tersebut membentuk konteks produksi yang menuntut penyesuaian strategi tanpa mengorbankan identitas kultural rubrik. Situasi ini sejalan dengan penelitian Jaakkola (2015) bahwa terjadinya pergeseran jurnalisme budaya dari otonom dan berbasis nilai estetis menjadi heteronom akibat tekanan pasar.

Dalam situasi ini, pengasuh rubrik memainkan peran penting sebagai mediator antara nilai kultural dan realitas organisasi media. Sebagai kurator, pengasuh rubrik memastikan bahwa tulisan-tulisan yang dimuat tetap selaras dengan visi RSP sebagai ruang refleksi budaya. Proses seleksi dan penyuntingan dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian nilai, kedalaman refleksi, serta relevansi tema dengan kehidupan sosial kontemporer. Melalui praktik ini, pengasuh rubrik menjaga agar RSP tidak kehilangan orientasi etisnya di tengah perubahan lingkungan media. Hal ini sejalan dengan penjelasan informan Triyanto Triwikromo (2023) bahwa proses seleksi naskah tetap dilakukan oleh pengasuh RSP agar konten yang ditampilkan tetap memenuhi standar redaksi.

Hubungan antara pengasuh rubrik dan penulis eksternal pada periode ini berkembang sebagai relasi sosial yang dinamis dan berkelanjutan. Pengasuh tidak hanya berperan sebagai penyunting, tetapi juga sebagai mitra dialog kultural. Interaksi ini menciptakan ruang pertukaran gagasan dan pengalaman, yang memperkaya kualitas refleksi dalam rubrik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Munnik (2018) yang menunjukkan bahwa produksi makna dalam praktik jurnalistik melibatkan interaksi sosial yang berkesinambungan antara jurnalis dan berbagai aktor pendukungnya.

Relasi yang dibangun tersebut memperkuat kontinuitas nilai dalam RSP. Meskipun seluruh artikel ditulis oleh penulis eksternal, karakter rubrik tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa habitus pengasuh rubrik berfungsi sebagai penyangga nilai yang memastikan keselarasan budaya dan etika dalam setiap konten yang dihasilkan. Praktik ini menegaskan bahwa keberlanjutan rubrik tidak semata-mata bergantung pada individu penulis, tetapi pada kesepahaman nilai yang dibangun secara kolektif.

Dikaitkan era disrupsi digital, keberadaan RSP sebagai rubrik refleksi budaya menjadi semakin signifikan. Ketika arus informasi bergerak cepat, RSP menawarkan ruang jeda untuk merenung. Habitus para aktor yang terlibat dalam produksi rubrik mendorong praktik jurnalistik yang tidak terburu-buru, memberi tempat bagi kedalaman makna dan keluhuran nilai. Dengan cara ini, RSP mempertahankan relevansinya sebagai ruang konstruksi realitas sosial yang berakar pada budaya lokal.

Habitus aktor dalam produksi RSP periode 2011–2020 menunjukkan proses adaptasi yang bersifat reflektif dan berkesinambungan. Habitus penulis eksternal dan pengasuh rubrik bekerja secara sinergis dalam menjaga kontinuitas nilai etis dan kultural, sekaligus merespons perubahan konteks media. Praktik jurnalistik yang dihasilkan tidak hanya merepresentasikan pandangan individual, tetapi mencerminkan upaya kolektif untuk merawat kebijaksanaan budaya Jawa dalam kehidupan publik modern.

Produksi jurnalistik RSP pada periode 2011–2020 tetap merujuk pada konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* melalui interaksi habitus, nilai budaya,

dan konteks ranah jurnalistik. Dengan pendekatan kualitatif dan konstruktivis, RSP sebagai ruang bagi nilai-nilai kepemimpinan ala Jawa tersebut terus dirawat, ditafsirkan ulang, dan dihadirkan secara relevan bagi masyarakat yang mengalami perubahan sosial yang cepat. Nilai-nilai tersebut hadir sebagai hasil perenungan kultural yang tumbuh dari pengalaman panjang berinteraksi dengan dunia sastra dan kebudayaan Jawa. Dalam kerangka ini, nilai dipahami sebagai tolok ukur mengenai baik dan buruk dalam kehidupan sosial. Sistem nilai yang mengakar cenderung relatif menetap karena berfungsi sebagai orientasi hidup dan perilaku masyarakat (Djajasudarma dkk., 1997 dalam Sartini, 2009). Meski demikian, nilai tidak bersifat statis, melainkan dibentuk dan diwariskan melalui proses sosial-historis, praktik budaya, serta interaksi antargenerasi yang berlangsung secara berkelanjutan.

Temuan penelitian menunjukkan RSP sebagai ruang di mana nilai-nilai kepemimpinan Jawa yang terus dirawat, ditafsirkan ulang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Boughen (2023) bahwa jurnalis menegosiasikan identitas profesional serta nilai-nilai jurnalisme dalam konteks tertentu.

b. Modal Simbolik dan Kultural Aktor

Pada periodisasi 2011–2020, produksi RSP semakin menegaskan peran modal simbolik dan modal kultural sebagai penopang utama keberlanjutan rubrik. Perubahan struktural dalam industri media, terutama akibat krisis surat kabar dan disrupsi digital, membatasi ruang gerak media cetak secara ekonomi. Dalam situasi ini, RSP tidak lagi bergantung pada kekuatan material sebagai basis eksistensinya,

melainkan pada akumulasi modal non-material yang dibangun sejak periode sebelumnya.

Modal simbolik dalam RSP periode ini terutama melekat pada figur para penulis eksternal. Para penulis hadir dengan reputasi kultural sebagai sastrawan, budayawan, akademisi, dan intelektual publik yang telah dikenal dalam ruang kebudayaan Jawa. Reputasi tersebut membentuk kepercayaan pembaca terhadap isi tulisan, karena rekam jejak kultural dan intelektual yang dibawa oleh para penulis. Dengan latar belakang tersebut, setiap artikel yang dimuat di RSP memperoleh bobot moral yang kuat sebagai refleksi nilai, bukan sekadar opini personal.

Hal ini sesuai penjelasan informan Triyanto Triwikromo (2023). Menurutnya, pengasuh RSP menerima kontribusi dari masyarakat luas dalam hal ini penulis eksternal untuk mengisi RSP dengan latar belakang yang relevan dan berkompeten. Kontribusi penulis eksternal tersebut mendapat penghargaan dari manajemen melalui pemberian honorarium sebagai modal ekonomi.

Kepercayaan pembaca terhadap tulisan-tulisan RSP tidak terbentuk secara instan. Hal tersebut merupakan hasil dari konsistensi gaya bertutur, kedalaman refleksi, dan kesetiaan pada nilai budaya yang dijaga lintas waktu. Dalam konteks ini, modal simbolik bekerja sebagai pengikat antara rubrik dan pembacanya. RSP dipandang sebagai ruang refleksi yang layak dirujuk ketika pembaca ingin merenungkan persoalan kepemimpinan, etika sosial, dan perubahan zaman dari perspektif budaya Jawa. Kepercayaan tersebut memperkuat posisi RSP sebagai rubrik yang memiliki otoritas moral berbasis kebudayaan. Hal ini seperti

dikemukakan informan Kasiyati (2020), warga Semarang, Jawa Tengah, yang sejak 1970an berlangganan ‘Suara Merdeka’ dan rutin membaca RSP setiap pekan.

Modal simbolik tersebut ditopang secara substantif oleh modal kultural para penulis eksternal. Modal kultural para penulis eksternal menjadi fondasi utama yang memperkaya narasi dalam RSP periode ini. Modal ini hadir dalam bentuk penguasaan tradisi Jawa, pemahaman mendalam atas filosofi *Hasta Brata*, serta kemampuan mengolah simbol dan estetika sastra. Penulis tidak hanya mengutip nilai-nilai budaya sebagai referensi tekstual, tetapi menghidupkannya melalui kisah, metafora, dan renungan yang dekat dengan pengalaman sosial pembaca. Kedalaman refleksi spiritual juga menjadi ciri khas, terutama dalam cara penulis mengaitkan nilai kepemimpinan dengan *laku* hidup dan tanggung jawab moral.

Penguasaan modal kultural tersebut tercermin dalam pilihan bahasa yang halus, penggunaan simbol-simbol budaya yang kontekstual, serta cara penulis menyusun alur narasi yang tidak tergesa-gesa. Artikel-artikel RSP pada periode ini mengajak pembaca untuk sejenak merenung, dan menimbang kembali arah kehidupan sosial. Praktik ini menunjukkan bahwa modal kultural tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi, tetapi juga sebagai medium untuk membangun kedalaman makna dalam praktik jurnalistik budaya.

Pengasuh rubrik memiliki modal simbolik dan institusional yang berperan penting dalam menjaga arah pemaknaan RSP. Sebagai figur yang lekat dengan identitas rubrik, pengasuh membawa legitimasi institusional sebagai representasi nilai dan visi ‘Suara Merdeka’. Modal ini digunakan untuk mengarahkan kualitas tulisan melalui proses kuratorial yang cermat. Setiap artikel diseleksi dan disunting

dengan mempertimbangkan kesesuaian nilai, kedalaman refleksi, serta relevansi dengan konteks sosial kontemporer.

Informan Bambang Sadono (2024) selaku penggagas RSP dan Wakil Pemimpin Redaksi ‘Suara Merdeka’ (1989-1998) menjelaskan, RSP merupakan hasil perpaduan antara kebijakan budaya, nilai-nilai Jawa, dan idealisme jurnalistik. Rubrik ini merupakan wujud komitmen kultural ‘Suara Merdeka’ dalam menjaga jati diri masyarakat Jawa Tengah di tengah arus modernisasi. Simbol Semar dijadikan ikon utama RSP karena merepresentasikan pemimpin *pamomong*: tokoh yang menuntun dengan kearifan, melindungi tanpa pamrih, dan mengingatkan dengan kasih.

Sementara itu, peran pengasuh rubrik tidak berhenti pada aspek teknis penyuntingan. Pengasuh juga berfungsi sebagai penjaga kesinambungan nilai *Hasta Brata* agar tetap hadir secara kontekstual dalam situasi masyarakat yang berubah cepat. Nilai-nilai *ngemong*, *ngayomi*, dan *ngayemi* tidak disajikan sebagai konsep abstrak, melainkan diterjemahkan dalam narasi yang menyentuh pengalaman konkret kehidupan modern. Dengan cara ini, modal simbolik pengasuh rubrik memperkuat orientasi etis RSP tanpa menjadikannya kaku atau terlepas dari realitas sosial.

Interaksi antara modal simbolik penulis dan modal institusional pengasuh rubrik membentuk konfigurasi produksi yang khas. Penulis membawa otoritas kultural dan kedalaman refleksi, sementara pengasuh memastikan bahwa keseluruhan narasi tetap berada dalam koridor nilai rubrik. Kondisi tersebut diakui informan Triyanto Triwikromo maupun informan Saroni Asikin, sebagai hubungan

yang bersifat saling melengkapi dan berkelanjutan. Pertimbangan ini yang melandasi RSP mempertahankan karakter reflektifnya meskipun seluruh artikel ditulis oleh penulis eksternal.

Dalam konteks modal ekonomi pada periode ini berada dalam kondisi yang semakin terbatas. Krisis surat kabar dan perubahan pola konsumsi media berdampak langsung pada sumber daya material yang dimiliki rubrik (manajemen ‘Suara Merdeka’). Hal ini sesuai yang dikemukakan Herman & Chomsky (2008) bahwa media semakin mengalami krisis.

Informan Triyanto Triwikromo (2020) mengakui sejak awal 2019 pihak manajemen ‘Suara Merdeka’ menerapkan kebijakan berupa penghentian honorarium untuk para penulis eksternal, termasuk RSP.

Namun, keterbatasan tersebut diakui Triyanto Triwikromo, tidak serta-merta melemahkan RSP. Sebaliknya, kondisi ini mendorong pengasuh rubrik untuk semakin mengandalkan modal simbolik dan kultural sebagai sumber legitimasi dan keberlanjutan. Keberadaan RSP dipertahankan bukan karena nilai komersialnya semata, melainkan karena kontribusinya sebagai ruang refleksi budaya yang bernilai bagi pembaca.

Dalam konteks ini, praktik jurnalistik RSP menunjukkan bahwa keberlanjutan media tidak selalu ditentukan oleh kekuatan ekonomi. Informan Saroni Asikin, Gunawan Budi Susanto, Sri Syamsiah Lestari hingga Triyanto Triwikromo mengaku pihaknya harus *berjibaku* menjalin dan merangkul para penulis eksternal untuk mengisi *headline* RSP secara *pro-bono* alias gratis.

Triyanto mengaku bersyukur bahwa kepercayaan pembaca, reputasi kultural penulis, dan konsistensi nilai menjadi sumber daya utama yang menjaga relevansi rubrik. Modal simbolik berfungsi sebagai penopang utama ketika modal ekonomi menyusut, sementara modal kultural memastikan bahwa isi rubrik tetap memiliki kedalaman dan makna.

Dari perspektif konstruktivis, konfigurasi modal RSP periode 2011–2020 sebagai hasil dari proses sosial yang berlangsung secara berkelanjutan. Makna, nilai, dan legitimasi rubrik dibangun melalui interaksi antara penulis, pengasuh rubrik, dan pembaca. Praktik jurnalistik sebagai ruang dialog kultural, sehingga nilai-nilai budaya Jawa terus dirawat dan ditafsirkan ulang.

Dalam kerangka pemikiran Bourdieu, modal simbolik dan kultural yang dimobilisasi oleh para aktor RSP berfungsi sebagai sumber daya yang membimbing praktik jurnalistik dalam ranah media. Namun, dalam penelitian ini, fokusnya bukan pada dinamika dominasi, melainkan pada bagaimana modal tersebut berkontribusi pada kesinambungan nilai dan orientasi etis rubrik. Modal digunakan untuk menjaga kualitas refleksi, memperkuat kepercayaan pembaca, dan memastikan bahwa RSP tetap relevan di tengah perubahan lingkungan media.

Integrasi modal simbolik dan kultural dalam produksi RSP periode 2011–2020 menunjukkan bahwa rubrik ini bertahan dan berkembang melalui kekuatan nilai dan reputasi kultural. Keterbatasan ekonomi tidak menghilangkan peran RSP sebagai ruang refleksi, justru mempertegas pentingnya modal non-material dalam praktik jurnalistik budaya. Melalui kombinasi reputasi penulis, peran kuratorial pengasuh rubrik, dan kesetiaan pada nilai *Hasta Brata*, RSP terus hadir sebagai

wahana refleksi etis yang berakar pada budaya Jawa dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern.

Analisis atas produksi RSP periode 2011–2020 memperlihatkan dalam situasi media yang berubah cepat, keberlanjutan jurnalistik budaya tidak hanya bergantung pada sumber daya material, tetapi juga pada kemampuan aktor-aktornya dalam merawat dan mengartikulasikan nilai. RSP periode 2011–2020 menjadi contoh bagaimana modal simbolik dan kultural bekerja sebagai fondasi utama dalam konstruksi makna sosial yang hidup, reflektif, dan berkesinambungan.

c. Ranah Jurnalistik dan Konteks Produksi

Pada periode 2011–2020, RSP beroperasi dalam lanskap media yang mengalami perubahan struktural signifikan. Penurunan oplah surat kabar, menyusutnya pendapatan iklan, serta pergeseran pola konsumsi informasi ke platform digital menjadi kondisi yang tidak terpisahkan dari proses produksi rubrik. Situasi ini semakin kompleks ketika pandemi Covid-19 mulai merebak pada awal 2020, yang tidak hanya berdampak pada keberlangsungan ekonomi media cetak, tetapi juga pada ritme kerja redaksi dan orientasi produksi jurnalistik secara umum. Dalam konteks tersebut, RSP tidak sekadar bertahan sebagai rubrik tetap, tetapi terus memposisikan diri sebagai ruang artikulasi nilai budaya dan refleksi sosial yang konsisten.

Keberadaan RSP di tengah situasi media yang rapuh memperlihatkan bahwa produksi jurnalistik budaya tidak sepenuhnya bergantung pada kelimpahan sumber daya material. Rubrik ini tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai ruang produksi makna kultural dengan menempatkan nilai kepemimpinan etis berbasis

filosofi *Hasta Brata* sebagai poros utama narasi. Nilai-nilai seperti *ngemong*, *ngayomi*, dan *ngayemi* hadir secara berkelanjutan dalam artikel-artikel yang terbit, sebagai kerangka refleksi atas realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Konsistensi ini menunjukkan bahwa dalam situasi yang serba tidak menentu, orientasi nilai justru menjadi jangkar penting bagi keberlanjutan praktik jurnalistik budaya.

Pada saat yang sama, informan Triyanto Triwikromo (2020) menandakan, RSP tetap menjalankan fungsi kritik sosial melalui bahasa *pasemon* dan simbol-simbol budaya yang khas. Pilihan gaya ungkap ini bukan sekadar strategi estetis, tetapi merupakan bagian dari tradisi komunikasi budaya Jawa yang mengedepankan kehalusan, sindiran, dan perenungan. Melalui metafora, perumpamaan, serta rujukan pada kisah-kisah simbolik, RSP menyampaikan refleksi atas persoalan kepemimpinan, etika publik, dan krisis moral tanpa harus hadir dalam bentuk pernyataan yang frontal. Dengan cara ini, ditambahkan informan Saroni Asikin (2020), RSP tetap menjaga daya reflektifnya sekaligus mempertahankan kesinambungan dengan tradisi budaya yang menjadi fondasinya.

Interaksi antara tradisi dan modernitas menjadi ciri penting dalam praktik jurnalistik RSP pada periode ini. Di satu sisi, rubrik berpijak pada nilai-nilai budaya Jawa yang mengakar kuat; di sisi lain, RSP merespons dinamika sosial-politik kontemporer yang terus berubah. Praktik jurnalistik semacam ini menunjukkan bahwa RSP tidak hanya bereaksi terhadap kondisi struktural yang melingkupinya, tetapi secara aktif membangun makna sosial melalui proses seleksi isu, pilihan simbol, dan cara bertutur yang khas. Makna sosial yang dihasilkan tidak hadir sebagai cerminan langsung realitas, melainkan sebagai hasil konstruksi yang

dibentuk melalui interaksi antara pengalaman aktor, tradisi kultural, dan konteks institusional media.

Dalam konteks institusional media berbasis kerangka paradigma konstruktivis, perspektif Bourdieu terkait ranah merupakan ruang sosial yang sarat norma dan aturan (Benson, 2004; Lindell et al., 2019). Ranah ini menyediakan seperangkat aturan, norma, dan kebiasaan profesional yang membingkai bagaimana aktor media memproduksi dan memaknai realitas sosial. Pemahaman ini relevan untuk melihat posisi RSP sebagai praktik jurnalistik yang tumbuh di dalam struktur institusional media, sekaligus berakar pada konteks sosial-budaya pembacanya. Rubrik ini tidak berdiri di luar struktur, tetapi beroperasi di dalamnya dengan cara yang reflektif dan berkesinambungan.

Melalui RSP, wartawan, redaktur, dan penulis eksternal tidak hanya menyampaikan informasi atau opini, tetapi membangun pemaknaan bersama atas realitas sosial. Pemaknaan tersebut dijelaskan informan Triyanto Triwikromo (2020) disajikan melalui simbol, metafora, dan rujukan kultural yang akrab bagi khalayak pembaca Jawa. Proses ini menghadirkan ruang dialog kultural antara media dan masyarakat, sehingga nilai-nilai tradisional berfungsi sebagai sumber refleksi untuk menafsirkan persoalan kontemporer. Dengan demikian, konstruksi makna semacam ini kemudian diwujudkan secara konkret melalui praktik produksi rubrik yang mengikuti aturan profesional, norma redaksional, dan kebijakan institusional media.

Berpijak dari hal tersebut, pada level operasional, aturan profesional dan kebijakan redaksional berfungsi sebagai pedoman utama dalam produksi RSP.

Tentu saja ditandaskan informan Gunawan Permadi selaku Pemimpin Redaksi ‘Suara Merdeka’ (2015-2023), operasional RSP tetap menginduk pada kebijakan redaksi. Namun, pedoman tersebut tidak dijalankan secara mekanis. Sebagaimana dikemukakan Willig (2012), aturan dan norma media selalu dihayati dan ditafsirkan melalui disposisi para aktor yang terlibat dalam praktik jurnalistik.

Dalam konteks RSP, seperti diungkapkan informan Gunawan Budi Susanto (2020) bahwa para pengasuh rubrik berperan penting dalam menerjemahkan kebijakan redaksi ke dalam keputusan editorial yang konkret, mulai dari pemilihan tema, penentuan penulis, hingga penyuntingan gaya bahasa. Proses ini memperlihatkan bagaimana kebijakan institusional dan disposisi individual saling berkelindan dalam praktik sehari-hari.

Secara praktis, RSP menunjukkan bahwa orientasi kultural seperti fungsi edukatif dan pewarisan nilai, berjalan berdampingan dengan tuntutan keberlanjutan media sebagai institusi ekonomi (Benson, 2006). Meskipun rubrik ini tidak berorientasi pada profit, RSP tetap berada dalam struktur media yang harus beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Konteks ekonomi, politik, dan budaya yang melingkupi produksi rubrik membentuk nuansa pemaknaan yang memengaruhi cara isu dirumuskan dan disajikan. Oleh karena itu, artikel-artikel dalam RSP tidak hanya mencerminkan pandangan penulis, tetapi merupakan hasil konstruksi makna yang dibentuk secara sosial di dalam lingkungan media tertentu (Schultz, 2007).

Dalam konteks yang berbeda, salah satu unsur penting dalam nuansa tersebut adalah dinamika politik nasional pada periode 2011–2020. Periode ini

merupakan masa akhir pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono dan berlanjut pada periode pertama serta kedua pemerintahan Joko Widodo. Perubahan konfigurasi politik nasional ini membawa implikasi bagi iklim kebebasan pers dan praktik jurnalistik secara umum. Sejumlah kajian mencatat bahwa pada periode pemerintahan Jokowi, pers menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan fungsi kebebasan pers, termasuk tekanan hukum, intervensi politik, serta keterbatasan akses terhadap informasi publik (Restendy et al., 2025). Selain itu, Mubarok (2021) mengulas rezim yang ‘mengembangbiakkan’ para *buzzer* sebagai bagian dari strategi komunikasi politik sehingga memengaruhi ekosistem media maupun publik pada umumnya.

Kondisi struktural tersebut membentuk lingkungan produksi RSP dan menjadi konteks penting dalam menelaah dinamika antara agen, struktur, dan isi media. Dalam situasi di mana ruang kebebasan pers menghadapi berbagai pembatasan, dijelaskan informan Triyanto Triwikromo (2023) pilihan RSP untuk tetap mengandalkan bahasa *pasemon* dan simbol budaya menunjukkan komitmen pengasuh rubrik untuk menjaga ruang refleksi yang aman sekaligus bermakna. Praktik ini tidak berdiri sebagai sikap oposisi, melainkan sebagai cara kultural untuk merawat nilai-nilai etis dan kebijaksanaan dalam narasi publik. Berbagai kondisi tersebut dapat dipahami secara lebih sistematis melalui kerangka analisis pengaruh isi media.

Untuk memahami kompleksitas produksi RSP pada periode ini, kerangka lima level hierarki pengaruh isi media dari Shoemaker dan Reese (1996, 2014) memberikan perspektif yang komprehensif. Pada level rutinitas media, adaptasi

terlihat dalam pengaturan jadwal terbit, panjang tulisan, serta gaya bahasa yang disesuaikan dengan keterbatasan distribusi dan perubahan pola baca di era digital. Konsistensi rubrik dijaga melalui format yang relatif stabil, meskipun medium dan ritme produksi media cetak mengalami perubahan.

Pada level individu, kebebasan penulis dalam menafsirkan isu sosial-politik melalui metafora budaya Jawa tetap menjadi ciri khas RSP. Kebebasan ini tidak berlangsung tanpa batas, melainkan diarahkan melalui proses kurasi oleh pengasuh rubrik untuk menjaga kohesi nilai dan kesinambungan narasi. Di sini, pengalaman personal, latar belakang kultural, dan kepekaan sosial penulis berperan penting dalam membentuk isi artikel.

Pada level organisasi, kebijakan redaksi ‘Suara Merdeka’ menjaga identitas RSP sebagai rubrik budaya yang memiliki fungsi reflektif dan edukatif. Meskipun berada dalam institusi media yang menghadapi tekanan ekonomi, rubrik ini dipertahankan sebagai bagian dari komitmen redaksi terhadap pewarisan nilai budaya dan pelayanan publik. Keputusan ini menunjukkan bahwa orientasi kultural tetap memiliki tempat dalam struktur organisasi media.

Tekanan ekstra-media, seperti disrupsi digital dan perubahan perilaku pembaca, turut memengaruhi strategi distribusi dan eksistensi rubrik. Namun, alih-alih mengubah substansi nilai yang diusung, RSP menyesuaikan diri dengan cara mempertahankan gaya bertutur dan tema yang relevan dengan konteks zaman. Pada level ideologi, filosofi *Hasta Brata* berfungsi sebagai fondasi moral yang menopang keseluruhan praktik produksi rubrik. Fondasi ini diperkuat oleh modal kultural,

sosial, dan simbolik para aktor yang terlibat, sehingga RSP tetap memiliki legitimasi di mata pembacanya.

Tekanan pada level organisasi dan ekstra-media tidak hanya hadir sebagai latar abstrak, tetapi terwujud dalam keputusan-keputusan konkret di ruang redaksi, mulai dari pemilihan topik hingga keberlanjutan rubrik itu sendiri. Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa produksi RSP pada periode 2011–2020 merupakan hasil interaksi kompleks antara struktur media, disposisi aktor, dan konteks sosial-budaya yang melingkupinya. Dalam kerangka konstruktivis, praktik jurnalistik RSP sebagai proses berkelanjutan dalam merawat, merumuskan, dan menyampaikan makna sosial yang berakar pada nilai budaya Jawa, sekaligus relevan dengan tantangan zaman.

Kondisi struktural tersebut tercermin secara nyata dalam kebijakan redaksional yang menyentuh aspek produksi rubrik. Salah satu bentuk keputusan tersebut terjadi pada awal tahun 2019, ketika honorarium bagi penulis eksternal dihentikan seiring krisis keuangan yang dialami ‘Suara Merdeka’. Kondisi ini diakui oleh Wakil Pemimpin Redaksi ‘Suara Merdeka’, Triyanto Triwikromo (2024), serta Sekretaris Redaksi ‘Suara Merdeka’, Hendra Setiawan Kelana, yang menyatakan bahwa situasi internal media yang “tidak baik-baik saja” memaksa redaksi untuk sementara waktu tidak memberikan honor kepada penulis eksternal, termasuk kontributor RSP.

Ketiadaan honorarium tersebut tidak menjadi kendala serius bagi sejumlah penulis eksternal. Mereka tetap antusias mengirim naskah dengan berlandaskan pada kepuasan batin, penguatan jejaring kultural, serta semangat yang kerap

dimaknai sebagai bentuk “jihad jurnalistik” melalui kontribusi di RSP. Etos non-material ini berkelindan dengan orientasi nilai yang sejak awal diusung oleh rubrik, sehingga relasi antara penulis dan RSP tidak semata bersifat profesional, tetapi juga ideologis dan kultural.

Berikut penuturan Sendang Mulyana-penulis eksternal dalam RSP:

“Sejujurnya saya tidak masalah dengan tidak menerima honor, karena saya justru menganggap rubrik ini tempat saya membangun komunitas dan saya pun pernah menjadi wartawan Suara Merdeka, sehingga saya tetap berupaya menjalin kedekatan dengan para pengasuh rubrik ini (RSP-red). Saya tetap akan mengisi rubrik, karena penting untuk membangun jejaring, ada kepuasan batin dan bahkan bisa dikatakan sebagai Jihad Jurnalistik untuk memperjuangkan kebenaran dalam ranah budaya.” (Wawancara dengan Sendang Mulyana, 2020).

Dalam kerangka nilai tersebut, RSP pada periode ini tetap mengedepankan prinsip jurnanisme yang menghindari konfrontasi langsung, meskipun semakin intens melontarkan kritik sosial di tengah ketidakpastian bisnis media akibat disrupsi digital, situasi politik nasional yang kian kompleks, serta awal krisis pandemi Covid-19.

Informan Gunawan Permadi, Pemimpin Redaksi ‘Suara Merdeka’ periode 2015–2023, menjelaskan bahwa sejak awal ‘Suara Merdeka’ mengusung orientasi jurnanisme yang berakar pada nilai kearifan lokal Jawa, termasuk dalam pengelolaan RSP. Dalam kerangka ini, koran lokal tidak hanya dipahami sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai perekat komunitas Jawa Tengah yang berperan menjaga keselarasan sosial.

Kebijakan redaksional ‘Suara Merdeka’, lanjut Gunawan, diarahkan untuk menghadirkan pemberitaan yang menyejukkan dan berorientasi solusi, bukan

sensasi atau konflik terbuka. Prinsip ini mencerminkan nilai budaya Jawa seperti rukun dan musyawarah, dengan media diposisikan sebagai moderator konflik sosial. Di sisi lain, lokalitas menjadi identitas utama ‘Suara Merdeka’, dengan sekitar 80–90 persen kontennya bersumber dari isu lokal. Orientasi redaksional ini kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai rubrik tematik sebagai wadah artikulasi nilai dan identitas budaya tersebut.

Dalam kerangka inilah, RSP berperan penting sebagai ruang refleksi budaya dan moral masyarakat Jawa. Melalui rubrik ini, relasi manusia dengan Tuhan, sesama, alam, dan diri sendiri diartikulasikan secara reflektif termasuk di antaranya melalui nilai kepemimpinan *Hasta Brata*, sehingga RSP menjadi wahana pemaknaan etis yang konsisten dengan visi kultural Suara Merdeka.

Berikut penjelasan dari informan Gunawan Permadi selaku Pimpinan Redaksi ‘Suara Merdeka’:

“Orientasi kepemimpinan redaksi Suara Merdeka berpijak pada kultural Jawa- yakni kepemimpinan yang memadukan kebijaksanaan, harmoni, tanggung jawab sosial, kearifan lokal dan pendidikan moral masyarakat. Kebijakan ini juga dituangkan dalam bentuk publikasi, terutama melalui Rubrik sang Pamomong sebagai pedoman bagi masyarakat yang di dalamnya sarat muatan nilai-nilai luhur, termasuk prinsip *Hasta Brata*.” (Wawancara dengan Gunawan Permadi, 2024).

Pada intinya, lanjut Gunawan, praktik jurnalisme di ‘Suara Merdeka’ dijalankan sebagai wujud kearifan lokal yang menekankan harmoni sosial, tanggung jawab moral, dan pelestarian nilai budaya Jawa. Orientasi ini menjadi dasar pembentukan kebijakan redaksional secara profesional sekaligus penguatan identitas media di tengah tantangan modernitas digital. Sejalan dengan pandangan

Danzon-Chambaud & Cornia (2023), bahwa dalam menghadapi kemajuan teknologi, jurnalis dituntut tetap aktif menegosiasikan praktik profesionalnya agar nilai inti profesi tetap terjaga. Negosiasi nilai dan praktik inilah yang dalam jangka panjang, membentuk pola disposisi dan cara pandang kolektif dalam ruang redaksi.

Berpijak pada kerangka teoretis Bourdieu, budaya kultural Jawa yang hidup di ‘Suara Merdeka’ sebagai habitus yang memengaruhi logika produksi isi media. Melalui habitus tersebut, koran lokal ini menampilkan praktik jurnalisme yang berpihak pada harmoni sosial, kearifan lokal, serta pendidikan moral masyarakat. RSP bukan semata sebagai strategi editorial, melainkan sebagai orientasi kultural yang terinternalisasi dalam praktik jurnalistik sehari-hari. Habitus ini menjadi dasar keberlanjutan rubrik dalam menghadapi perubahan struktur media.

Dengan demikian, praktik produksi rubrik ini mengafirmasi pemikiran Bourdieu tentang relasi agen dan struktur, serta menegaskan relevansi hierarki pengaruh isi media dalam memahami distribusi simbol, legitimasi, dan konstruksi makna dalam produksi budaya di era digital. Temuan ini menempatkan RSP sebagai contoh empiris dari bagaimana jurnalisme beradaptasi tanpa kehilangan orientasi nilai dalam lanskap media yang berubah.

Sejalan dengan temuan tersebut, Barnard (2018) menunjukkan bahwa ranah jurnalistik kontemporer semakin bersifat hibrid dan lentur. Kendati demikian, jurnalis masih memiliki ruang otonomi dalam menegosiasikan praktiknya sambil beradaptasi dengan logika digital dan pola kerja dalam ekosistem jejaring sosial. Pandangan ini diperkuat oleh Boughen (2023) yang menekankan bahwa jurnalis

dituntut adaptif dan mampu bernegosiasi melalui identitas profesionalnya dengan bertumpu pada nilai inti jurnanisme itu sendiri.

4.1.5 Produksi Rubrik ‘Sang Pamomong’ Periodisasi 1996-2020

Produksi RSP sepanjang periode 1996–2020 menunjukkan pergeseran konfigurasi aktor, mekanisme produksi, dan sumber daya pendukung, namun tetap mempertahankan kontinuitas orientasi kultural dan etis. Perubahan ini berkembang seiring perubahan konteks sosial dan media itu sendiri.

Pada periode awal 1996–1998, produksi RSP berada dalam konfigurasi yang relatif tertutup dan terpusat. RSP pada fase ini berlangsung di era represif oleh Presiden Soeharto dan ketatnya pengawasan terhadap pers mulai penyensoran hingga pembredelan (Imron et al., 2016). Kondisi tersebut mendorong pengelola rubrik mengadopsi strategi artikulasi simbolik dan pasemon budaya sebagai medium kritik sosial, guna menjaga keberlanjutan rubrik sekaligus menghindari benturan langsung dengan kekuasaan.

Di fase ini, pengasuh rubrik merangkap sebagai penulis internal, sekaligus berfungsi sebagai pengarah utama isi dan orientasi nilai rubrik. Latar belakang pengasuh yang berasal dari budaya Jawa, dengan pengalaman sebagai sastrawan, budayawan, kolumnis, dan cerpenis, membentuk pola produksi yang sangat personal, reflektif, dan berbasis pengalaman kultural. Dalam fase ini, rubrik beroperasi sebagai ruang ekspresi kultural internal redaksi, di mana proses seleksi, penulisan, dan pemaknaan berlangsung dalam satu lingkaran aktor. Kondisi ini mencerminkan bentuk produksi jurnalistik budaya yang mengandalkan otoritas

personal, kedalaman tradisi, dan pengalaman menulis sebagai sumber legitimasi utama.

Seiring dengan perubahan konteks sosial dan keterbukaan pasca-Reformasi (Arnus, 2015; Anom & Waluyo, 2011; Andani & Birsyada, 2024) produksi RSP pada periode 2000–2010 mulai mengalami perluasan aktor yang signifikan. Keterlibatan penulis eksternal mulai menjadi bagian penting dalam produksi rubrik. Dari 18 artikel yang dianalisis, sekitar 80 persen merupakan karya penulis eksternal yang juga berasal dari latar budaya Jawa, dengan profil sebagai sastrawan dan akademisi, terutama dosen. Fakta ini menunjukkan bahwa perluasan aktor tidak menggeser orientasi nilai rubrik, melainkan memperluas spektrum refleksi melalui figur-figur yang memiliki kesesuaian disposisi kultural. Dalam periode ini, pengasuh rubrik tetap hadir sebagai penulis internal (sekitar 20 persen), sekaligus menjalankan peran sebagai editor dan kurator yang menjaga kesinambungan arah nilai dan gaya refleksi.

Pada fase ini, penulis eksternal memperoleh honorarium. Kehadiran dukungan ekonomi tersebut membentuk relasi profesional yang relatif stabil antara rubrik dan penulis luar. Namun, yang lebih menentukan bukan semata aspek materialnya, melainkan kesamaan orientasi kultural dan etik antara pengasuh dan penulis. Honor berfungsi sebagai pengakuan profesional, sementara kualitas refleksi tetap bertumpu pada latar literasi, pengalaman budaya, dan kepekaan sosial aktor-aktornya. Dengan demikian, RSP periode 2000–2010 menandai fase transisi dari produksi yang bersifat internal menuju produksi kolaboratif, tanpa kehilangan identitas kultural rubrik.

Periode 2011–2020, RSP di era akhir kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan memasuki periode kedua Presiden Joko Widodo yang secara empiris menghambat kebebasan pers (Restendy et al., 2025). Rubrik ini memperlihatkan perubahan yang lebih drastis dalam struktur produksi, terutama dari sisi aktor dan sumber daya ekonomi. Seluruh artikel *headline* yang dianalisis pada periode ini merupakan karya penulis eksternal, dengan latar yang semakin beragam: sastrawan, akademisi, budayawan, penggiat komunitas budaya, guru, hingga mahasiswa pascasarjana. Meskipun demikian, kesamaan latar budaya Jawa tetap menjadi ‘benang merah’ yang menyatukan praktik produksi rubrik. Pengasuh rubrik tidak lagi berperan sebagai penulis internal, tetapi semakin menegaskan fungsi kuratorial, memastikan bahwa keberagaman latar aktor tetap bergerak dalam satu kerangka nilai yang selaras.

Perubahan struktur aktor dan mekanisme produksi tersebut kemudian beririsan langsung dengan tekanan ekonomi media yang memuncak sejak 2019 (Croteau & Haynes, 2006). Krisis keuangan yang dialami ‘Suara Merdeka’ sebagai dampak dari krisis surat kabar dan disrupsi digital, menyebabkan implikasi serius terhadap dinamika produksi RSP. Hal ini sesuai penelitian Leurdijk et al., (2014), Franklin, (1988), Wahl-Jorgensen et al., (2016) terkait imbas bisnis media cetak di era disrupsi digital. Kondisi ini berimbas terhadap penulis eksternal yang tidak lagi menerima honor, sehingga keberlanjutan produksi rubrik sepenuhnya bertumpu pada loyalitas kultural dan komitmen personal para penulis. Fakta bahwa RSP tetap terbit dengan karakter reflektif yang konsisten menunjukkan bahwa praktik jurnalistik budaya ini tidak bertumpu pada insentif ekonomi. Rubrik ini bertahan

karena diperkuat oleh internalisasi nilai dan kedekatan sosial antara pengasuh rubrik dan jejaring penulisnya.

Dinamika lintas periode ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan RSP ditopang oleh tiga hal utama. Pertama, habitus kultural aktor yang terbentuk melalui pengalaman panjang, keterlibatan dalam tradisi Jawa, dan komitmen terhadap etika kepemimpinan *Hasta Brata*. Kedua, pergeseran mekanisme produksi dari terpusat ke kolaboratif, lalu ke jejaring eksternal berbasis kepercayaan dan kedekatan sosial. Ketiga, praktik redaksional RSP menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi dan ekosistem media, terutama dalam situasi keterbatasan sumber daya, tanpa meninggalkan orientasi nilai kultural dan etis yang menjadi dasar rubrik.

Dengan kata lain, produksi RSP 1996-2020 menunjukkan peran disposisi kultural aktor menjadi faktor utama yang menjaga keberlanjutan jurnalistik budaya, meskipun terjadi perubahan dalam mekanisme produksi RSP dan kondisi ekonomi media. RSP berfungsi sebagai praktik jurnalistik budaya yang berkelanjutan, dengan produksi makna yang dibentuk melalui keselarasan nilai, pengalaman, dan komitmen lintas generasi penulis.

Secara keseluruhan, keberlanjutan produksi RSP 1996-2020 dirangkum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Produksi RSP Periodisasi 1996-2020

No	Periode	Penulis & Habitus	Modal Dominan	Kondisi Sosial-Politik	Catatan Produksi
1	1996-1998	Internal; habitus Jawa kuat	Simbolik & sosial internal	Era otoriter akhir Orde Baru	Rubrik homogen, fokus keteladanan dan moral, kritik halus (<i>pasemon</i>)
2	1999-2000	Tidak Terbit	-----	-----	Imbas dari pasca krismon dan pasca-Reformasi
3	2000-2010	80% eksternal; habitus plural	Simbolik dan sosial lebih luas, ekonomi bervariasi	Reformasi, kebebasan pers, transisi kepemimpinan nasional	Rubrik reflektif dan kontemplatif, perspektif plural, pengawasan sosial tetap terjaga, honor hingga 2018, kuratorial kuat
4	2011-2020	100% eksternal; habitus adaptif	Simbolik dan sosial tertinggi	Krisis surat kabar, dinasti politik, pandemi Covid-19	Rubrik kompleks, kritik sosial halus tetap, kuratorial ketat

(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Tabel 4.1 menunjukkan produksi RSP yang responsif terhadap perubahan konteks sosial-politik dan komposisi penulis. Periode 1996–1998 ditandai dominasi penulis internal dengan habitus Jawa yang kuat dan refleksi simbolik yang halus. Periode jeda 1999–2000 merefleksikan dampak krisis pasca-Reformasi. Pada 2000–2010, keterlibatan penulis eksternal memperluas modal simbolik dan perspektif reflektif. Periode 2011–2020 menegaskan daya tahan kultural RSP melalui kurasi ketat, kritik sosial ‘lembut’, dan konsistensi nilai etis.

4.2 Habitus Aktor dalam Produksi RSP

Habitus jurnalistik yang membentuk produksi RSP tidak dapat dilepaskan dari dinamika redaksi ‘Suara Merdeka’ sebagai media lokal dengan akar budaya Jawa yang kuat. RSP dijelaskan informan Hendro Basuki (2020) merupakan ruang simbolik tempat para wartawan dan penulis eksternal menegosiasikan antara profesionalisme jurnanisme modern dengan nilai-nilai kejawaan yang mereka anut secara personal dan kultural.

Dalam kerangka Bourdieu (1993), ruang semacam ini sebagai *field* tempat para aktor jurnalistik berinteraksi dan membangun makna secara sosial, dengan membawa habitus serta modal yang mereka miliki. (Willig, 2012; Schultz, 2007). Melalui praktik dan relasi yang berlangsung di dalamnya, posisi, pengaruh, dan orientasi makna dalam jurnanisme tidak hadir secara alamiah, melainkan dikonstruksi secara dinamis dalam keseharian praktik jurnalistik (Barnard, 2018). Di sini, dinamika dalam ranah jurnalistik merefleksikan proses negosiasi makna yang berlangsung terus-menerus antara pengalaman aktor, nilai profesional, dan struktur institusional yang melingkupinya.

Lebih lanjut, bagi tokoh-tokoh seperti Triyanto Triwikromo dan Hendro Basuki, penulisan di RSP bukan semata aktivitas jurnalistik, melainkan juga bentuk *laku* spiritual dan kultural. Mereka menulis bukan untuk mengejar popularitas atau kepentingan ekonomi, melainkan sebagai cara untuk ‘*ngemong* masyarakat’ melalui konten kebudayaan. Seperti diungkap oleh Triyanto Triwikromo (wawancara, 2024), RSP baginya adalah “ruang sunyi di tengah kebisingan politik dan komersialisasi media.” Pernyataan ini memperlihatkan bahwa dalam kesadaran

wartawan, ada jarak terhadap arus utama industri media yang cenderung menonjolkan sensasi dan kepentingan pasar (Anderson, 2012). Habitus kultural mereka yang dibentuk oleh prinsip leluhur antara lain *eling lan waspada* mendorong lahirnya praktik penulisan yang reflektif, penuh *pasemon*, dan sarat *pitutur* moral.

Dalam praktiknya, wartawan dan redaksi ‘Suara Merdeka’ membangun sistem kerja yang unik di sekitar RSP. Tulisan-tulisan di rubrik ini melewati proses kurasi yang tidak hanya mempertimbangkan aktualitas, tetapi juga nilai moral dan kehalusan bahasa. Informan Triyanto Triwikromo (2024) salah satu pengasuh rubrik, menjelaskan bahwa setiap artikel harus ‘membawa pencerahan tanpa menggurui, dan menegur tanpa menyakiti.’ Prinsip ini mencerminkan logika budaya Jawa dalam berkomunikasi, yaitu mengedepankan *tata krama* dan harmoni sosial (Magnis-Suseno, 1993). Melalui prinsip inilah kritik terhadap pemerintah, elite politik, atau perilaku sosial masyarakat dikemas secara *alus*, namun tetap tajam secara makna.

Kelembutan itu bukan bentuk kepasrahan, tetapi strategi komunikasi yang cerdas. Dalam era pemerintahan Orde Baru yang represif, gaya bahasa simbolik menjadi satu-satunya cara agar kritik bisa lolos dari sensor dan ancaman *pembredelan*. Informan Hendro Basuki (2020) yang aktif menulis di masa 1990-an, mengakui bahwa “Rubrik Sang Pamomong adalah medan yang lembut” sebuah ruang aman untuk menyampaikan perlawanan moral melalui metafora budaya. Dengan kata lain, habitus *pamomong* melandasi jurnalisme RSP berfungsi sebagai

kritik secara halus tanpa mengundang konflik ataupun konfrontasi terbuka dengan pihak sasaran.

Dalam proses produksinya, wartawan RSP sering memadukan riset tekstual dengan refleksi budaya. Informan Triyanto Triwikromo (2024), salah satu pengasuh RSP menjelaskan bahwa ia kerap mengambil referensi dari teks klasik seperti *Serat Kalatidha* karya Ranggawarsita atau *Serat Wulangreh* karya Pakubuwono IV, untuk memotret persoalan sosial-politik kontemporer. Praktik ini memperlihatkan artikulasi makna antara nilai-nilai tradisi dan pengalaman sosial masa kini, sehingga teks budaya Jawa tidak berhenti sebagai peninggalan simbolik, tetapi hadir sebagai rujukan etis dalam konteks modern. Pendekatan ini mencerminkan habitus *pamomong* yang menjaga kesinambungan nilai sekaligus menyesuaikannya dengan dinamika zaman. Informan Triyanto mempertegas bahwa jurnalisme melalui RSP menjadi sarana *pamomong* masyarakat.

Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) menjembatani kearifan tradisional dan kehidupan sosial modern. Di sinilah, jurnalis RSP berperan sebagai *pamomong* bukan sekadar penyampai informasi, tetapi pembimbing moral dan kultural bagi masyarakat. Peran ini tampak dalam cara mereka menulis: memilih diksi yang halus, menggunakan metafora Jawa, dan menghindari provokasi. Dalam istilah Carey (2009), praktik semacam itu menunjukkan fungsi komunikasi sebagai ritual yakni upaya memperkuat rasa kebersamaan dan makna hidup bersama, bukan semata transmisi informasi.

Dari keseluruhan praktik itu, habitus jurnalistik dalam RSP terbentuk melalui tiga lapis nilai utama. Pertama, etos moral yang menempatkan tulisan

sebagai sarana pengasuhan spiritual masyarakat. Kedua, etos budaya yang menekankan kesantunan dan keseimbangan dalam menyampaikan kritik. Ketiga, etos sosial yang menegaskan tanggung jawab jurnalis sebagai bagian dari komunitas lokal yang harus dirawat dan diperkuat. Ketiga, etos ini berpadu menjadi identitas kultural ‘Suara Merdeka’ yang membedakannya dari media lain, dan sekaligus menjadi fondasi keberlanjutan RSP selama lebih dari dua dekade.

Habitus aktor dalam produksi RSP melahirkan *spirit pamomong*. *Spirit* ini tidak hanya berfungsi sebagai konsep moral dalam menulis, tetapi juga sebagai modal simbolik yang menopang eksistensi ‘Suara Merdeka’ di antara media lokal Jawa Tengah. Dalam kerangka teori Bourdieu (1993), modal simbolik merupakan modal yang diperoleh melalui legitimasi sosial, bukan materi. Dalam konteks RSP, modal itu hadir dalam bentuk kepercayaan publik terhadap nilai-nilai luhur yang diusung: kejujuran, kesantunan, kebijaksanaan, dan pengayoman. Nilai-nilai ini yang membedakan ‘Suara Merdeka’ dari media lain di ranah lokal maupun nasional.

Merujuk dari jejak historis RSP sejak awal kemunculannya pada 1996, menempatkan diri sebagai ruang bagi ekspresi kebijaksanaan Jawa di tengah dinamika sosial-politik. RSP berperan bukan hanya sebagai rubrik budaya, tetapi juga sebagai ‘kompas moral’ masyarakat Jawa Tengah. Seperti dikatakan informan Mujahirin Tohir (2020), tulisan-tulisan di RSP merupakan “interaksi kebudayaan antara penulis dengan pembaca,” yang mempertemukan kesadaran kultural wartawan Jawa dengan masyarakat pembaca yang memiliki basis budaya serupa.

Di titik inilah RSP berfungsi sebagai medium komunikasi komunal, tempat nilai-nilai kejawaan direfleksikan, dimaknai ulang, dan diwariskan lintas generasi.

Nilai *pamomong* yang secara etimologis berarti mengasuh, membimbing, dan mengayomi menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas redaksional di ‘Suara Merdeka’. *Spirit* ini mendorong lahirnya gaya jurnanisme yang reflektif dan beretika, jauh dari gaya sensasional atau provokatif. Dalam konteks lokal, RSP menjadi identitas simbolik ‘Suara Merdeka’ yang mempertegas posisinya sebagai koran Jawa Tengah. Identitas ini diperkuat oleh *tagline*-nya, ‘Perekat Komunitas Jawa Tengah’, yang tidak sekadar slogan pemasaran, tetapi mencerminkan misi kultural media tersebut. Dalam wawancara dengan informan Aris Mulyawan (AJI Semarang, 2024), menekankan bahwa RSP adalah “ciri khas atau ikon dari ‘Suara Merdeka’ yang harus dipertahankan karena memiliki nilai yang membedakan.”

Rubrik ini lanjut informan Aris Mulyawan (2024), bukan sekadar fitur editorial. Menurutnya, RSP sebagai elemen pembentuk identitas simbolik media yang menumbuhkan ikatan emosional dengan pembacanya, khususnya kalangan sepuh, akademisi, dan masyarakat yang memaknai budaya Jawa sebagai sumber kebijaksanaan hidup. Hal ini sesuai penjelasan informan Sri Syamsiah Lestari (2020) bahwa RSP memiliki fungsi ganda yaitu sebagai wahana ideologis untuk menanamkan nilai budaya Jawa, sekaligus mekanisme redaksional untuk mempertahankan identitas simbolik ‘Suara Merdeka’.

Dalam konteks ini, *spirit pamomong* bekerja sebagai mekanisme sosial pengikat komunitas pembaca. *Spirit* ini menumbuhkan rasa memiliki dan kedekatan kultural antara pembaca dan media. Informan Widodo Wikandana (2024)

menegaskan bahwa bagi pembaca perantau, membaca RSP “membuat mereka seolah kembali menjadi orang Jawa meskipun berada di luar lingkaran budaya Jawa.” Artinya, RSP berperan sebagai ruang imajiner tempat orang Jawa berjumpa kembali dengan akar budayanya melalui bahasa, nilai, dan simbol yang dikenalnya. Hal ini memperlihatkan bahwa fungsi *pamomong* tidak hanya bersifat moral, tetapi juga emosional dan berperan dalam pembentukan identitas kultural.

Berdasarkan perspektif modal simbolik, RSP menjadi aset immaterial yang sangat berharga. Rubrik ini memberi legitimasi moral bagi ‘Suara Merdeka’ sebagai media yang tidak sekadar mengejar profit, tetapi juga memiliki tanggung jawab kultural. Pandangan ini sejalan dengan McQuail (2010) yang menegaskan bahwa media lokal memiliki peran strategis dalam mempertahankan keragaman budaya dan memperkuat kohesi sosial di tingkat komunitas. Dengan menjaga RSP, ‘Suara Merdeka’ berupaya melestarikan memori kolektif dan identitas kebudayaan masyarakat Jawa Tengah.

Bahkan menurut informan Mujahirin Tohir (2020), RSP bukan hanya sebagai warisan budaya, melainkan sebagai modal simbolik yang dinamis sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ia menandakan *spirit pamomong* memperkuat posisi ‘Suara Merdeka’ sebagai media lokal yang menuntun masyarakat untuk menimbang makna kehidupan, kekuasaan, dan kemanusiaan melalui kerangka budaya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Haryono et al., (2025) bahwa media lokal lebih dari sekadar saluran distribusi informasi. Media lokal diklaim sebagai ruang kultural yang berperan dalam membangun makna,

menyampaikan nilai-nilai lokal secara kontekstual, serta merefleksikan pengalaman sosial masyarakatnya.

Berikut gambar 4.1 terkait habitus aktor dalam produksi RSP secara keseluruhan pada periodisasi 1996-2020:



Gambar 4.1: Habitus, Modal, dan Ranah dalam Produksi RSP 1996-2020
(Sumber: Olahan Peneliti, 2026)

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan kelangsungan RSP dikendalikan sepenuhnya oleh habitus kultural aktor dalam spektrum jurnalistik di ‘Suara Merdeka’ yang melibatkan penulis internal sekaligus pengasuh rubrik serta kolaborasi dengan para penulis eksternal dengan beragam latar belakang. Namun, kesamaannya yakni berasal dari kultural Jawa tepatnya Jawa Tengah. Artinya, habitus sebagai titik sentral. Namun habitus baru bisa bergerak jika para aktor memiliki modal ataupun akumulasi modal yang memadai. Dalam konteks RSP, modal yang berperan adalah modal simbolik, modal kultural, dan modal sosial. Selanjutnya habitus dan modal hanya bisa bekerja dalam ranah yang tepat sebagai wadahnya. Dikaitkan RSP, maka ranah jurnalistik di ‘Suara Merdeka’ sangat

berperan dan penting artinya dalam memfasilitasi maupun menunjang para aktor untuk berkarya melalui habitus dan akumulasi modal yang dimiliki.

BAB V

FUNGSI SOSIAL RUBRIK ‘SANG PAMOMONG’

5.1 Fungsi Sosial Rubrik ‘Sang Pamomong’

Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) pada surat kabar ‘Suara Merdeka’ sepanjang periodisasi 1996–2020 dianalisis dalam empat periode, yakni 1996–1998, 1999–Februari 2000, Maret 2000–2010, dan 2011–2020. Pembagian periode ini disusun berdasarkan kebijakan redaksi serta konteks sosial-politik nasional yang melatarbelakangi keberadaan rubrik pada masing-masing rentang waktu.

Periodisasi tersebut digunakan untuk menguraikan fungsi sosial RSP dalam lanskap jurnalistik ‘Suara Merdeka’ yang berorientasi pada tanggung jawab sosial pers dari Mc Quail (2010) yang mengutip Siebert et., al (1984). Pembahasan pada bab ini diarahkan pada posisi rubrik dalam kehidupan sosial untuk menjalankan fungsi sosialnya. Periodisasi berfungsi sebagai acuan waktu analitis dalam penjelasan fungsi sosial RSP secara keseluruhan.

5.1.1 Fungsi Sosial RSP Periodisasi 1996-1998

Analisis delapan artikel Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) periode 1996–1998 menunjukkan bahwa rubrik ini menjalankan tiga fungsi sosial pers secara terintegrasi: fungsi informatif, pengawasan sosial, dan ruang publik kultural, sesuai prinsip tanggung jawab sosial pers (Siebert, Peterson, & Schramm, 1984; McQuail, 2010).

Empat artikel yang menekankan pengawasan sosial menggunakan nilai budaya sebagai tolok ukur etis. Pada artikel berjudul ‘Martabat dalam Krisis Besar’

(6 November 1997), Rendra menegaskan bahwa manusia Jawa “menciptakan budaya kolusi, korupsi, tak terbuka, dan sok menjadi diktator,” sementara Darmanto Jatman menekankan pentingnya martabat melalui “kejujuran dan keikhlasan dalam mengabdikan diri ke masyarakat.” Pada artikel berjudul ‘Birokrasi Dibuat untuk Keselarasan’ (22 Januari 1998), Onghokham menyatakan aparat birokrasi “justru tak sepenuhnya berguna bagi negara,” sedangkan MT Arifin mengingatkan agar kepatuhan birokrat dijalankan “tanpa *reserve*,” menegaskan orientasi etis atas kontrol sosial. Pada artikel berjudul ‘Gaya Hidup Boros Akibatkan Elite Jawa Runtuh’ (12 Februari 1998) mengungkap elite yang sarat “ritualisme, simbolisme, dan mitologi,” sementara Djuliati Suroyo mencatat bahwa gaya hidup elite “menjadikan mereka *dililit* utang,” memperlihatkan refleksi moral lintas waktu. Dalam artikel berjudul ‘Idiom Kepemimpinan Jawa Runtuh Akibat Dimanipulasi’ (3 September 1998), Rama Sudi Yarmana menegaskan “idiom-idiom kepemimpinan Jawa sebenarnya tetap bagus,” dan Damardjati Supadjar mengingatkan agar ajaran Jawa “jangan sekali-kali dimanipulasi,” menunjukkan fokus RSP pada etika dan makna nilai.

Empat artikel lain berperan informatif sekaligus membuka ruang publik melalui wawancara dengan sejumlah narasumber. Dalam artikel berjudul ‘Jangan Seperti Katak dalam Tempurung!’ (21 November 1996), RSP menegaskan bahwa “prinsip-prinsip nilai dalam budaya Jawa ternyata universal sekali,” sedangkan artikel berjudul ‘Ketika Orang Jawa Menantikan *Ratu Adil*’ (15 Mei 1997) menampilkan observasi bahwa “kerinduan akan keadilan itu merupakan kerinduan yang kontekstual.” Artikel berjudul ‘Raja Tak Sekadar Berbekal *Pulung*’ (6

November 1997) memuat pandangan Soemarsaid Moertono bahwa raja adalah “eksponen mikrokosmos negara,” sementara Doyo Santoso menekankan “*pulung* hanyalah alat atau mitos.” Terakhir, dalam artikel berjudul ‘Sultan HB X Dianggap Ratu Adil’ (10 September 1998), suara *kawula alit* dikutip bahwa Sultan “*tansah paring ayem tentrem*,” dan akademisi menambahkan bahwa Sultan adalah “tokoh yang justru melayani rakyat.”

Secara keseluruhan, RSP menunjukkan praktik jurnalistik yang khas, memadukan pengawasan sosial melalui kritik terselubung ala *pasemon*, informasi bernilai dari narasumber kompeten, dan ruang publik kultural. Strategi ini selaras dengan prinsip tanggung jawab sosial pers, bahwa informasi disajikan edukatif, pengawasan sosial dijalankan secara etis, dan dialog publik dibangun untuk refleksi kolektif.

Pada periode 1996–1998, rubrik ini beroperasi di tengah era otoriter Soeharto yang menjelang akhir pemerintahannya menghadapi tekanan luar biasa: krisis moneter 1997–1998 memicu keruntuhan ekonomi, sementara krisis multidimensional meliputi sosial, politik, dan legitimasi kekuasaan menimbulkan ketidakstabilan nasional (Imron et al., 2016; Suwirta, 2018).

Dalam kondisi ini, RSP berperan sebagai ruang refleksi kultural yang tetap mempertahankan etika jurnalistik, meski kebebasan pers dibatasi. Rubrik ini menegaskan bahwa pengawasan sosial dapat dijalankan secara ‘halus’ atau lembut melalui simbol, metafora, dan nilai budaya, sementara informasi dan ruang publik tetap memfasilitasi pemikiran kritis.

Dengan demikian, RSP tidak hanya bertahan di tengah tekanan struktural dan politik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana media dapat membangun kesadaran moral kolektif yang adaptif. Rubrik ini secara tersirat mengkritisi pemerintahan Soeharto yang sarat KKN, manipulatif, dan otoriter, dengan strategi menyampaikan pesan melalui simbol dan nilai budaya Jawa. Rubrik ini juga menjaga keseimbangan fungsi pers yang etis, edukatif, dan kultural di masa-masa krisis yang akhirnya berujung pada lengsernya Soeharto melalui Reformasi Mei 1998.

5.1.2 Fungsi Sosial RSP Periodisasi 1999-2000

Periode 1999–2000 merupakan fase jeda bagi RSP sehingga rubrik ini tidak terbit sehingga tidak dapat dianalisis secara langsung melalui teks maupun simbolisme budaya. Ketiadaan ini secara metodologis membatasi observasi empiris, tetapi dari perspektif fungsi sosial media, absennya RSP menyimpan makna penting. Tidak terbitnya rubrik mencerminkan bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik dapat membatasi kemampuan media dalam menjalankan peran sebagai penjaga nilai etis dan kultural.

Krisis moneter 1997 berdampak luas pada industri pers: kenaikan harga bahan baku, turunnya pendapatan iklan, dan perubahan perilaku konsumsi media memaksa redaksi melakukan penyesuaian strategis untuk bertahan. Di sisi lain, dinamika pasca-Reformasi menciptakan lanskap politik dan sosial yang ‘cair’. Euforia kebebasan pers, pergantian kekuasaan, dan meningkatnya konflik publik mendorong media menekankan liputan aktual dan politis. Dalam konteks ini, rubrik reflektif seperti RSP, yang menekankan nilai moral dan kearifan lokal, berada pada

posisi kurang strategis dibandingkan liputan langsung dan responsif terhadap peristiwa harian.

Absennya RSP mencerminkan keterbatasan struktural media dalam mempertahankan ruang refleksi etis. Fungsi sosial RSP sebagai penyaji informasi bernilai, pengawas moral, dan pewaris budaya tidak hilang, tetapi implementasinya tertunda. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi sosial media tidak semata ditentukan oleh komitmen editorial, tetapi sangat dipengaruhi stabilitas sosial-ekonomi dan politik yang menaungi institusi pers. Tekanan eksternal memaksa media melakukan kompromi, dan praktik jurnalistik reflektif serta kultural sering menjadi korban pertama yang ditunda.

Meski demikian, kebutuhan publik akan ruang refleksi moral dan kultural tetap relevan, bahkan meningkat di masa krisis dan transisi. Ketiadaan RSP mengungkap ketegangan antara idealisme fungsi sosial media, menyajikan informasi, membuka ruang publik, dan menjalankan pengawasan etis dengan realitas struktural yang membatasinya. Rubrik ini menjadi contoh konkret bagaimana ruang etis dalam media dapat terpinggirkan ketika media menghadapi tekanan multidimensional.

Fase jeda ini juga berfungsi sebagai konteks historis penting untuk memahami keberlanjutan fungsi sosial RSP pada periode berikutnya. Ketika rubrik kembali terbit, keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari pengalaman absensi sebelumnya. Pengalaman kehilangan ini menekankan pentingnya ruang kultural dalam lanskap media yang berubah, sekaligus membentuk kesadaran publik dan redaksi tentang nilai refleksi moral dalam jurnalistik.

Secara lebih luas, fenomena ini menegaskan bahwa media merupakan institusi sosial yang senantiasa berinteraksi dengan struktur ekonomi dan politik. Media tidak sepenuhnya otonom dalam menentukan fungsi sosialnya, melainkan harus bernegosiasi dengan tekanan eksternal. Ketiadaan RSP pada periode 1999–2000 menjadi bukti nyata bahwa keberlanjutan fungsi sosial media sangat bergantung pada kondisi struktural yang memungkinkan atau membatasinya. Pemahaman ini memperkaya analisis fungsi sosial RSP secara keseluruhan, menegaskan bahwa rubrik bukan sekadar produk editorial, tetapi praktik sosial yang rentan terhadap dinamika lingkungan sekitarnya.

5.1.3 Fungsi Sosial RSP Periodisasi 2000-2010

Analisis 18 artikel RSP periode 2000–2010 menunjukkan rubrik tetap membangun refleksi humanis dan kesadaran moral-kultural. RSP berlangsung di era pasca-Reformasi dan euforia kebebasan pers (Arnus, 2015; Anom & Waluyo, 2011; Andani & Birsyada, 2024). Dari total 18 artikel, 13 menekankan fungsi pengawasan sosial yang etis dan reflektif, sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial pers (Siebert et al., 1984; dikutip McQuail, 2010). Rubrik selain menyampaikan informasi, juga membentuk ruang publik sehingga pembaca dapat memahami fenomena sosial dengan perspektif moral, budaya, dan etika.

Artikel berjudul ‘*Nglali Ya Nglali, Aja Ning Banget-Banget*’ (2 Desember 2001) mengartikulasikan praktik *nglali* dalam masyarakat Jawa, di mana psikolog Emmanuela Hadriami menegaskan, “secara umum, *nglali*... untuk menyelamatkan diri dari rasa malu atau menjaga gengsi dan harga diri,” namun dalam budaya Jawa terkait prinsip rukun dan hormat. Kisah Yudistira dalam *Drona Gugur* dihadirkan

untuk menumbuhkan pemahaman etis: “ungkapan *ngono ya ngono* merelatifkan segala tindakan yang pada awalnya dianggap tercela itu.”

Rubrik juga menampilkan refleksi moral terhadap kekuasaan. Artikel berjudul ‘*Ngedan, Edan-edanan* Pada Zaman *Edan*’ (25 Agustus 2002) menyatakan, “Jika perahu ‘Indonesia’ dinakhodai *wong edan ning kuasa*... tentu mengundang kecemasan teramat-amat-sangat,” dan menekankan motivasi moral penguasa: “pribadi orang Jawa... selalu dalam proses untuk mencapai keselarasan”. Dalam artikel berjudul ‘Bila *Jagad Gedhe* Melongsorkan Penguasa’ (16 Maret 2003), Djoko Soeryo menegaskan: “raja lalim akan jatuh karena ketidakadilannya... alam pasti akan melongsorkannya.” Artikel berjudul ‘*Sowan Asuh Muka Soroh Bandha*’ (2 Mei 2004) menyorot risiko praktik elite: “*kedok* untuk *asung muka* sekaligus *soroh bandha*, hingga menjadi ajang untuk menyemaikan benih-benih korupsi”.

Dalam perspektif kepemimpinan, RSP menekankan tanggung jawab moral penguasa. Artikel berjudul ‘Dalam Pusaran Takhta untuk *Brayat*’ (30 Mei 2004) mengulas Sultan HB IX: “demi kemaslahatan lebih banyak orang, dia ‘merendahkan diri’ sebagai orang kedua.” Artikel berjudul ‘Kehilangan Mimpi Ketiadaan Harapan’ (13 Juni 2004) menghadirkan suara rakyat sebagai cermin evaluasi sosial: “saya nyaris tak punya harapan lagi”. Kritik sosial juga diarahkan pada praktik birokrasi, misalnya artikel berjudul ‘*Mosok Wong* Jawa Tidak Bisa Korupsi?’ (19 Juni 2005): “Yang dari atas mengguyur *pengayoman*, sedangkan dari bawah *konjuk kabekten*” dan ‘Menepis Kemelaratan dengan *Tan Amukti Palapa*’ (3 Juli 2005): “Ke atas menyembah, ke bawah *menyepak*”.

Selain itu, RSP menekankan penjaga moral dan pewarisan budaya. Artikel berjudul '*Ratu Ngopeni Kawula Demi Kuasa yang Langgeng*' (31 Juli 2005) menyatakan: "Kini siasat untuk memperoleh suara *kawula* dianggap tidak cukup lagi dengan *sapa aruh*... uang pula yang tampil sebagai primadona", sementara artikel berjudul '*Mengeja Makna di Balik Sabda Brahmana Raja*' (29 April 2007) menegaskan, "rakyat bersama Sultan menghadap pada Yang Maha Kuasa untuk meminta keadilan". Artikel berjudul '*Jurus Pemangku Penjinak Lawan*' (18 Oktober 2009) dan artikel berjudul '*Mencari Baladewa di Panggung Kuasa*' (16 Juni 2010) menekankan nilai moral dan integritas penguasa, sedangkan artikel berjudul '*Kuasa yang (Dianggap) Sarwa Ora Pener*' (31 Oktober 2010) menekankan tanggung jawab sosial dan moral: "Monumen dan candi... tempat penguasa memprasastikan diri sebagai *panguwasa* yang juga menunaikan tugas *ngopeni kawula*."

Selain pengawasan sosial, lima artikel lain menegaskan fungsi informatif, pengawal moral, dan pewaris budaya, misalnya artikel berjudul '*Menang Tanpa Ngasorake, Kenapa Tidak?*' (12 Maret 2000) dan artikel berjudul '*Menang Sejati Tan Ngasorake*' (12 Juli 2009), membimbing pembaca membangun pemahaman etis melalui pengetahuan budaya, sejarah, dan sastra.

Lebih jauh, 18 artikel dalam periode ini menunjukkan RSP sebagai ruang publik, membimbing pembaca membangun pemahaman etis, reflektif, dan humanis terhadap fenomena sosial seraya mewariskan nilai budaya Jawa. Temuan ini menunjukkan bahwa RSP tidak sekadar mempertahankan 'ruh' jurnalistik periode

sebelumnya, tetapi mengembangkan perannya secara lebih matang dalam konteks sosial pasca-Reformasi.

Menariknya, dominasi fungsi pengawasan sosial pada periode ini menandai konsistensi RSP dalam menjalankan tanggung jawab sosial pers. Namun, berbeda dengan fase akhir Orde Baru yang cenderung defensif, pengawasan sosial dalam artikel-artikel RSP pasca-2000 tampil lebih ‘terbuka’. Kritik sosial tidak lagi semata melalui simbol atau *pasemon* yang terselubung, melainkan melalui refleksi etis yang lebih eksplisit terhadap krisis moral, maupun konteks kepemimpinan dalam kehidupan publik. Meski demikian, RSP tetap menjalankan fungsi pengawasan melalui pendekatan kultural dan normatif. Pengawasan sosial dijalankan bukan untuk memermalukan atau mendeligitimasi aktor sosial tertentu, melainkan untuk mengingatkan publik pada nilai-nilai etis yang dianggap mulai tergerus dalam dinamika sosial-politik pasca-Reformasi.

Secara keseluruhan, fungsi sosial RSP pada periode 2000–2010 menunjukkan konfigurasi jurnalistik yang semakin kompleks. RSP tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan sosial dan fungsi informatif secara terpisah, tetapi mengintegrasikannya dengan peran sebagai pengawal moral, pewaris budaya, dan representasi sosial masyarakat. Praktik ini menegaskan bahwa RSP beroperasi sebagai aktor sosial-kultural yang aktif membentuk ruang refleksi publik. Termasuk untuk merealisasikan prinsip tanggung jawab sosial pers dalam konteks budaya lokal dan dinamika demokrasi pasca-Reformasi.

Dalam periode ini ditandai transisi kepemimpinan nasional melalui tiga presiden: Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Susilo

Bambang Yudhoyono (SBY). Meskipun reformasi membuka jalan bagi sistem demokrasi yang lebih terbuka, krisis kepemimpinan tetap berlanjut. RSP menghadirkan refleksi kultural terhadap fenomena ini, mengulas inkonsistensi moral, praktik KKN yang masih berlangsung, dan tantangan legitimasi kepemimpinan, sambil tetap menekankan nilai-nilai budaya Jawa sebagai tolok ukur etis bagi pembaca. Rubrik ini menunjukkan bahwa perubahan politik formal tidak otomatis menyelesaikan krisis kepemimpinan. Atas dasar itu, pengawasan sosial yang reflektif tetap diperlukan sebagai penyeimbang dinamika kekuasaan.

5.1.4 Fungsi Sosial RSP Periodisasi 2011-2020

Analisis 22 artikel RSP periodisasi 2011-2020 menunjukkan fungsi sosial rubrik sebagai pengawas moral, pewaris budaya, dan penyaji informasi yang membangun kesadaran publik, selaras dengan prinsip tanggung jawab sosial pers (Siebert et al., 1984; McQuail, 2010). Fungsi pengawasan sosial tampil menyikapi praktik kekuasaan, penyalahgunaan politik, dan degradasi nilai budaya.

Kritik sosial tampak jelas dalam artikel berjudul ‘Saat Orang Jawa Kehilangan ‘Rai’’ (3 April 2011) yang mengungkap ketimpangan sosial akibat kekuasaan koruptif: “Padahal, semua itu dikomunikasikan ‘hanya’ demi kekuasaan yang besar dan prestise.” Artikel berjudul ‘Orientasi Politik Jawa Soeharto’ (29 Mei 2011) menegaskan manipulasi simbol budaya dalam politik: “Soeharto menghadirkan Jawa sebagai ‘selimut’, Jawa sebagai dekorasi dari politik eksploitatif dan represif.”

Kritik serupa muncul dalam artikel berjudul ‘Tradisi dan Kampanye Politikus’ (2 Maret 2014): “Tradisi tidak dimaknai sebagai barang mati, tetapi

jambangan yang siap diisi olahan kreativitas pegiat budaya,” serta dalam artikel berjudul ‘*Reshuffle dan Jagat Wayang*’ (7 Agustus 2016) yang menekankan figur teladan seperti Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti. Artikel 2018–2020, antara lain berjudul ‘*Rekayasa dalam Pertarungan Kekuasaan*’ (7 Oktober 2018) dan artikel berjudul ‘*Membangun Markas Batin Jawa*’ (16 Desember 2018), menekankan pentingnya kesadaran batin dalam demokrasi, menegaskan RSP sebagai ruang membangun nilai etis. Artikel 2019–2020 antara lain berjudul ‘*Kuasa, Bencana dan Budaya*’ (27 Januari 2019), ‘*Politik Umuk dan Kemaruk*’ (10 Februari 2019), serta ‘*Wabah versus Power Budaya*’ (5 April 2020) menegaskan hubungan antara praktik politik, etika, dan konsekuensi sosial-budaya, memperkuat fungsi korektif rubrik.

Sementara itu, fungsi informatif RSP ditampilkan dalam tujuh artikel yang menekankan pemahaman kepemimpinan berbasis budaya Jawa. Artikel berjudul ‘*Mengontrol Gung Binathara*’ (26 Juni 2011) memaparkan batas etis kekuasaan: *kabeh ana watese, kabeh ana takerane*, sedangkan ‘*Ayo Siapa Berani Memimpin?*’ (1 April 2012) menegaskan prinsip saling mengerti dan *satyawacana*. Artikel berjudul ‘*Tak Mau Lengser Sampai Hilang*’ (8 Juli 2012) menyorot siklus kekuasaan dan kaderisasi melalui referensi Majapahit, sementara artikel berjudul ‘*Mengalah dan Kemenangan Sejati*’ (9 Juni 2013) menegaskan kemenangan bukan tujuan utama: “kemenangan bukan segalanya.” Artikel berjudul ‘*Ratu Adil & Simbol Pemimpin*’ (22 Juni 2014) menjelaskan evolusi simbol *ratu adil* dalam konteks politik kontemporer, dan artikel dengan judul ‘*Yudistira & Kejujuran Kita*’ (10 April 2016) menghadirkan realitas politik sebagai “negara teater” yang menuntut kesadaran etis. Artikel berjudul ‘*Kuasa dan Pengendalian Kekuasaan*’ (27

Agustus 2017) mengikat semua narasi ini melalui ajaran *Hasta Brata* dan pepatah *sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti*, menegaskan bahwa kekuasaan harus tunduk pada *welas asih* dan kebenaran.

Dari 22 artikel dalam RSP di fase ini, mayoritas menonjolkan fungsi pengawasan sosial atau kritik sosial, menegaskan posisi rubrik sebagai *watchdog* yang etis dan reflektif. Dominasi ini menunjukkan RSP memposisikan dirinya sebagai medium dalam menyikapi dan memaknai realitas sosial kepemimpinan melalui nilai budaya Jawa dan etika kepemimpinan.

Temuan ini menegaskan RSP mempertahankan relevansi jurnalistiknya, meskipun berada di tengah krisis industri pers cetak, dominasi wacana instan, dan tekanan politik yang semakin variatif.

Lebih jauh, fungsi pengawasan sosial tetap menjadi pilar utama RSP, namun mengalami penyesuaian bentuk dan orientasi seiring konteks politik yang berubah. Pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kritik sosial mulai lebih terbuka, meski tetap dikemas secara halus melalui strategi *pasemon*: metafora hewan, metafora *Hasta Brata*, *wejangan*, *pitutur*, *paribasan*, kisah wayang, dan cerita kerajaan Jawa kuno. Kritik diarahkan pada praktik kepemimpinan, etika birokrasi, dan dinamika kehidupan publik, memanfaatkan euforia kebebasan pers pasca-Reformasi. Rubrik menegaskan peran pengawasan sosial sebagai ajakan kultural, bukan sebagai tekanan politik atau pemaksaan.

Memasuki periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, RSP menghadapi tantangan baru. Kebebasan pers mulai terhambat, muncul kecenderungan penguasa anti-kritik, polarisasi politik meningkat, dan krisis surat

kabar semakin membuncih (Restendy et al., 2025). Di tengah kondisi ini, RSP menjalankan fungsi pengawasan sosial melalui kritik ala *pasemon*, menyorot degradasi etika publik, runtuhnya keteladanan kepemimpinan, serta penyalahgunaan kekuasaan. Kritik yang disampaikan tetap bersifat reflektif, menggunakan simbol budaya sebagai medium untuk mengantisipasi risiko konfrontasi langsung, sekaligus menjaga integritas etis rubrik.

Tujuh artikel yang menampilkan fungsi informatif, pengawal moral, pewaris budaya, sekaligus ruang publik dan representasi sosial menunjukkan RSP memperluas jangkauan sosialnya. Wawancara dengan narasumber yang kompeten menghadirkan perspektif yang relevan terhadap isu sosial kontemporer, termasuk isu politik lokal, dinamika pemerintahan, dan pergeseran nilai budaya di tengah disrupsi media. Fungsi informatif ini tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi menjadi wahana yang mendorong pembaca untuk memahami persoalan sosial-politik melalui koridor budaya dan etika.

Atas dasar itu, nilai-nilai kearifan lokal Jawa khususnya *Hasta Brata* tetap sebagai rujukan etis yang hidup. Budaya digunakan sebagai instrumen interpretatif untuk memahami perubahan sosial-politik yang cepat, termasuk dampak pandemi COVID-19, praktik dinasti politik, dan polarisasi publik. Dengan cara ini, RSP menegaskan perannya sebagai pengawal moral, pewaris budaya, dan representasi sosial masyarakat.

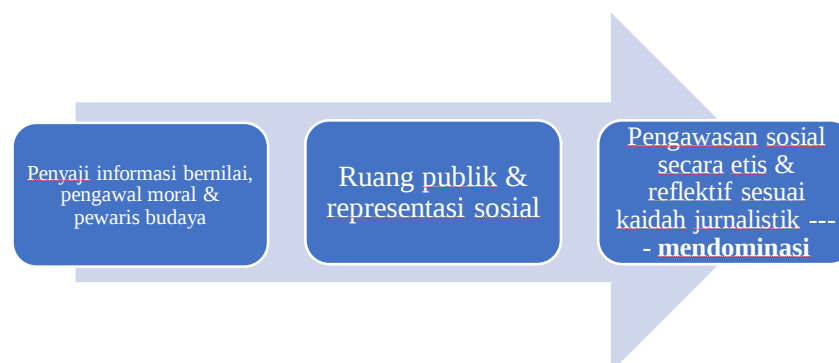
Secara keseluruhan, fungsi sosial RSP pada periode 2011–2020 menampilkan kemampuan adaptasi jurnalistik. Rubrik mempertahankan fungsi pengawasan sosial melalui kritik terbuka yang tetap halus ala *pasemon*, memperluas

fungsi informatif dan ruang publik, serta menegaskan perannya sebagai mediator nilai dan penyeimbang informasi. Praktik ini menunjukkan bahwa RSP tetap relevan sebagai aktor sosial-kultural yang menjalankan prinsip tanggung jawab sosial pers (Siebert, Peterson, & Schramm, 1984; McQuail, 2010). Bahkan rubrik ini mampu bertahan di tengah tekanan struktural, polarisasi politik, dan krisis media yang semakin membebani praktik jurnalistik modern.

5.1.5 Fungsi Sosial Rubrik ‘Sang Pamomong’ Periodisasi 1996-2020

Analisis terhadap 48 artikel RSP yang dikaji sepanjang periode 1996–2020 menunjukkan dinamika fungsi sosial jurnalistik yang diterapkan rubrik ini. Secara keseluruhan, sebanyak 32 artikel mengandung fungsi pengawasan sosial berbasis etika dan refleksi moral. Sedangkan 16 artikel lainnya menampilkan fungsi informatif yang sekaligus membentuk ruang publik, pengawal moral, pewaris budaya, dan representasi sosial.

Berikut gambar 5.1 menunjukkan implementasi fungsi sosial RSP periodisasi 1996-2020:



Gambar 5.1: Implementasi Fungsi Sosial RSP 1996-2020
(Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Berdasarkan gambar 5.1 memperlihatkan RSP bukan sekadar rubrik budaya yang pasif. Rubrik ini sebagai aktor jurnalistik dalam merespons dinamika sosial masyarakat, seraya menyesuaikan bentuk pengawasan sosialnya dengan konteks historis.

Terkait RSP yang didominasi fungsi pengawasan sosial diakui informan Gunawan Budi Susanto (2020) selaku penulis internal sekaligus pengampu halaman RSP. Menurutnya fungsi pengawasan sosial yang dimanifestasikan melalui kritik sosial sebagai penerapan hak kontrol sosial oleh pers terhadap penyimpangan yang terjadi dalam kekuasaan maupun dalam masyarakat.

Berikut penjelasan informan Gunawan Budi Susanto:

“Kami mengkritik melalui Rubrik Sang Pamomong karena kami tersentuh atas kondisi yang terjadi yang kami pandang tidak sepatutnya, sehingga kami tergerak untuk mengingatkan siapa pun agar tidak terjerumus semakin jauh. Namun kami mengingatkannya secara kultural dengan meneropong dari perspektif budaya Jawa.” (Wawancara dengan Gunawan Budi Susanto, 2020).

Dominasi fungsi pengawasan sosial mengindikasikan orientasi etis yang kuat dalam praktik jurnalistik RSP. Pengawasan ini tidak hadir sebagai kritik langsung yang konfrontatif, melainkan sebagai refleksi moral yang mengajak pembaca menilai realitas sosial melalui kerangka nilai. Kritik sosial ala *pasemon* menjadi salah satu strategi utama RSP untuk menjalankan fungsi pengawasan sosial.

Informan Triyanto Triwikromo (2020) penulis tetap dan pengasuh RSP yang juga Wakil Pemimpin Redaksi ‘Suara Merdeka’ menjelaskan, penggunaan *pasemon*, metafora, dan simbol budaya menjadi strategi khas untuk menghindari represi politik sekaligus menyampaikan kritik tajam terhadap kekuasaan. Ini

menunjukkan kecerdikan budaya Jawa dalam ‘berbicara’ melalui kehalusan dan bukan dilakukan secara frontal.

“Bisa saja dikatakan Rubrik Sang Pamomong mengandung ‘makna di balik makna’. Hal ini sah-sah saja. Toh, kami meneropong berbagai persoalan yang kami anggap tidak tepat atau katakanlah menyimpang dari norma dan aturan yang berlaku secara halus sesuai ciri khas budaya Jawa. Sehingga apa yang kami tuangkan dalam rubrik ini (RSP-red) tidak keluar dari koridor kultural Jawa.” (Wawancara dengan Triyanto Triwikromo, 2020).

Rubrik ‘Sang Pamomong’ pada periode 1996–1998, ketika pers berada di bawah pengawasan ketat Orde Baru, rubrik ini menyalurkan kritik melalui metafora hewan, metafora *Hasta Brata* yang disimbolkan dari delapan elemen alam, wejangan, *pitutur*, *paribasan*, kisah wayang, dan cerita kerajaan Jawa kuno. Strategi simbolik ini sebagai cara RSP menyampaikan refleksi etis dan penilaian moral terhadap praktik kepemimpinan, perilaku sosial, dan krisis nilai tanpa menimbulkan konflik terbuka dengan penguasa. Kritik tidak hadir sebagai tekanan eksternal, melainkan sebagai panggilan reflektif bagi pembaca, selaras dengan prinsip tanggung jawab sosial pers (Siebert, Peterson, & Schramm, 1984; McQuail, 2010). Strategi simbolik ini sebagai kritik sosial disampaikan secara halus, aman dari risiko penyensoran. Namun tentunya tetap mendidik pembaca untuk menimbang praktik kepemimpinan, etika publik, dan krisis nilai masyarakat.

Periode 1999–2000 menandai fase jeda dalam perjalanan RSP, saat rubrik tidak terbit dan praktik jurnalistiknya tidak dapat diamati langsung melalui teks maupun simbol. Ketiadaan ini menghadirkan makna sosial yang signifikan. Dari perspektif fungsi sosial media, absennya RSP menyingkap keterkaitan antara kondisi politik, ekonomi, dan sosial dengan kemampuan media menjaga nilai etis

dan kultural. Saat rubrik tidak hadir, publik kehilangan ruang refleksi yang biasanya menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan nilai budaya Jawa serta prinsip kepemimpinan *Hasta Brata*. Kondisi ini menegaskan bahwa keberlangsungan media bergantung bukan hanya pada konten atau format, tetapi juga pada stabilitas lingkungan sosial yang mendukung praktik jurnalistik. Dengan demikian, fase jeda RSP memperlihatkan bahwa fungsi sosial media bersifat dinamis, lahir dari interaksi antara media, masyarakat, dan konteks sejarah. Fase ini sekaligus menegaskan pentingnya kontinuitas nilai sebagai jangkar kultural di tengah ketidakpastian zaman.

Perihal RSP sempat vakum pasca-krismon, diakui informan Triyanto Triwikromo (2023) bahwa kondisi saat itu memang sangat tidak memungkinkan untuk RSP tetap terbit mengingat manajemen ‘Suara Merdeka’ mengalami kendala non-teknis yang bersumber pada kondisi perusahaan. Penghentian sementara RSP merupakan pukulan terberat bagi dirinya selaku pihak yang turut membidani kelahiran rubrik budaya ini. Hanya saja ia pun tidak berdaya atas keputusan manajemen dan berharap RSP bisa tetap terbit seperti biasanya.

Berikut penjelasan informan Triyanto Triwikromo selaku Wakil Pemimpin Redaksi ‘Suara Merdeka’ sekaligus pengasuh dan penulis tetap di RSP:

“Jujur saja rubrik ini (RSP) sarat dengan nilai-nilai filosofis sehingga memang sangat disayangkan tidak terbit meski tidak lama. Selain itu, rubrik ini merupakan identitas dari Suara Merdeka sebagai koran lokal yang peduli akan kelestarian nilai-nilai budaya.” (Wawancara dengan Triyanto Triwikromo, 2023).

Memasuki era pasca-Reformasi (2000–2010), kritik sosial RSP mulai lebih terbuka. Euforia kebebasan pers dan transisi kepemimpinan nasional dari Presiden

Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga SBY memberikan ruang bagi rubrik untuk menegaskan pengawasan sosial secara artikulatif. Kritik sosial tetap melalui *pasemon*, namun menyoroti krisis moral, serta kualitas kepemimpinan dalam kehidupan publik. Kritik yang disampaikan tetap halus, reflektif, dan normatif, menghindari konfrontasi langsung, serta memanfaatkan simbol budaya sebagai medium etis yang diterima publik.

Informan Gunawan Budi Susanto (2020), pengampu halaman RSP yang juga penulis internal rubrik ini menjelaskan, meski tidak ada kebijakan secara tertulis, mekanisme RSP tetap pada *pakemnya* yaitu ‘patuh dan taat’ pada koridor budaya Jawa. Artinya, konten RSP tidak boleh ke luar dari ‘rel’ sehingga apa pun isi konten artikel tetap menginduk secara kultural Jawa. Termasuk dalam menyuarkan kritik yang tajam sekalipun diarahkan secara halus (*pasemon*).

Pada periode 2011–2020, RSP menghadapi tantangan baru: disrupsi digital, krisis pers cetak, polarisasi politik, praktik dinasti politik, serta tekanan politik di era pemerintahan Presiden Jokowi, khususnya periode kedua, ketika kebebasan pers mulai kembali terhambat. Fungsi pengawasan sosial tetap menjadi pilar utama rubrik, namun lebih diarahkan pada degradasi etika publik, kaburnya keteladanan, dan melemahnya tanggung jawab moral di tengah perubahan sosial. Kritik sosial melalui *pasemon* tetap dijalankan secara halus. Hanya saja kritik tersebut lebih relevan terhadap isu kontemporer, seperti fragmentasi informasi, dominasi budaya populer, dan kegelisahan moral kolektif selama pandemi COVID-19.

Seluruh artikel *headline* yang diteliti dalam periode 2011–2020 merupakan karya penulis eksternal yang sudah paham akan *pakem* dalam penulisan RSP. Hal

ini sesuai penjelasan informan Saroni Asikin (2020) selaku Redaktur Pelaksana ‘Suara Merdeka’ yang juga penulis tetap RSP dan sebelumnya pengampu halaman RSP. Menurutnya penulisan dalam RSP tetap bersumbu pada nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa sebagai landasan etika jurnalistik.

Lebih jauh, 16 artikel yang menampilkan fungsi informatif, pengawal moral, pewaris budaya, dan ruang publik-representasi sosial memperkuat dimensi dialogis praktik jurnalistik RSP. Melalui wawancara dengan narasumber berkompeten, RSP tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pertimbangan etis dan refleksi bersama.

Informan Hendro Basuki (2020) selaku salah satu perintis RSP sekaligus pengasuh rubrik menjelaskan bahwa pada awal kehadiran rubrik maupun selanjutnya, *headline* merupakan hasil reportase oleh pengasuh rubrik (saat awal RSP, reportase mayoritas dikerjakan oleh Triyanto Triwikromo).

Berikut penjelasan informan Hendro Basuki:

“Saya kerap merancang isu-isu aktual untuk mengisi *headline* RSP hingga satu bulan ke depan. Pelaksanaannya dilakukan melalui reportase oleh tim dengan mewawancarai sejumlah pihak berkompeten menyikapi fenomena sosial yang terjadi saat itu. Namun ada juga isu-isu yang *genting* atau yang lebih aktual sehingga itulah yang kita garap untuk di edisi yang terdekat. Sehingga fungsi informatifnya tetap ada bahkan lebih dari itu karena kami menyajikan liputan secara *in-depth*.” (Wawancara dengan Hendro Basuki, 2020).

Fungsi informatif ini terintegrasi dengan peran rubrik sebagai pengawal moral, pewaris budaya, dan representasi sosial masyarakat. Dengan demikian, ruang publik yang dibentuk bersifat deliberatif dan berakar pada nilai-nilai kearifan lokal Jawa.

Hasil penelitian Tejedor et al., (2020) menegaskan pers bertugas menginformasikan konten dengan pendekatan informatif dan menghindari sensasionalisme dalam teks-sesuai teori tanggung jawab sosial pers. Informasi yang bernilai, sangat mutlak karena dibutuhkan publik. Hal ini sesuai penelitian Planer et al., (2022) bahwa publik berhak menerima informasi yang benar dan dapat dipercaya.

Dalam tradisi tanggung jawab sosial pers, RSP sebagai pendidik publik, pengawal nilai-nilai luhur, dan pewaris budaya. Penelitian Oso et al., (2024) menunjukkan etika jurnalistik menuntut jurnalis memahami, menghormati, dan menjaga keberagaman budaya. Fungsi ini menjadikan pers turut merawat, meneruskan, dan memediasi nilai budaya melalui praktik pemberitaan. Penelitian oleh Realgo (2023) menegaskan media berperan dalam pelestarian, reproduksi, dan transmisi antargenerasi warisan budaya. Media dituntut mampu menjaga keberlangsungan nilai, identitas, dan warisan budaya masyarakat.

Fungsi sosial RSP sepanjang 1996–2020 menunjukkan konfigurasi jurnalistik yang khas, adaptif, dan berkelanjutan. Pengawasan sosial melalui kritik ala *pasemon* menjadi ‘benang merah’ yang menghubungkan seluruh periode. Rubrik bergerak dari simbolik dan hati-hati pada akhir Orde Baru, menjadi lebih terbuka dan artikulatif pada era pasca-Reformasi, hingga menyesuaikan fokus pada ‘kegelisahan moral’ masyarakat di era digital dan tekanan politik modern. Kombinasi fungsi pengawasan sosial, fungsi informatif, pembentukan ruang publik, serta peran sebagai pengawal moral dan pewaris budaya menegaskan RSP sebagai praktik jurnalistik yang menjalankan tanggung jawab sosial pers secara

kontekstual. Rubrik tidak sekadar menyampaikan informasi dan membentuk orientasi etis publik. RSP menjaga kontinuitas nilai budaya, dan mempertahankan relevansi sosial-kultural di tengah perubahan sosial, politik, dan ekologi media yang terus berlangsung.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sosial terhadap kekuasaan tampil sebagai fungsi yang paling dominan dan diwujudkan melalui kritik sosial yang bersifat etis, reflektif, serta tidak konfrontatif. Kritik tersebut disampaikan melalui simbol, *pasemon*, dan narasi moral yang berakar pada kearifan lokal Jawa serta sejalan dengan kaidah jurnalistik. Di samping itu, RSP menjalankan fungsi informatif yang mencakup peran sebagai penjaga moral dan pewaris nilai budaya. Fungsi sebagai ruang publik dan representasi sosial hadir, meski dalam intensitas yang relatif terbatas. Keseluruhan temuan ini menegaskan posisi RSP sebagai praktik jurnalistik budaya yang menempatkan fungsi pengawasan sosial sebagai poros utama.

5.2 Fungsi Sosial RSP Sebagai Kesadaran Refleksi Kolektif Jurnalis

Sejak terbit perdana pada 21 November 1996, RSP memposisikan diri sebagai ruang refleksi dan pembelajaran budaya bagi masyarakat Jawa Tengah. Terlebih koran lokal ini mengklaim sebagai *korane wong Jawa Tengah*. Rubrik ini bukan sekadar saluran informasi, melainkan ruang simbolik budaya Jawa seraya mengadopsi nilai luhur dan merangkai orientasi moral dalam praksis kehidupan sehari-hari.

Informan Gunawan Permadi (2020) selaku Pemimpin Redaksi ‘Suara Merdeka’ (2015-2023) menjelaskan, RSP sebagai ruang refleksi budaya dan moral

masyarakat Jawa. Rubrik ini sarat mengandung refleksi yang beragam termasuk pada spektrum realitas sosial kepemimpinan kontemporer, yang di antaranya dengan merujuk pada nilai-nilai normatif *Hasta Brata*. Sejalan dengan hal tersebut, RSP menampilkan kearifan lokal budaya Jawa, antara lain nilai-nilai kepemimpinan seperti *ambeg adil paramarta, gung binathara, berbudi bawa leksana, tatatentreming praja*, hingga *laku utama*.

Secara terpisah, informan Triyanto Triwikromo (2020) selaku penulis tetap RSP, pengasuh RSP dan Wakil Pemimpin Redaksi ‘Suara Merdeka’ menjelaskan tulisan dalam RSP bukan sekadar produk jurnalistik, tetapi *laku batin* dan bentuk pengabdian terhadap budaya Jawa. Penulis memposisikan diri sebagai *pamomong* yang menuntun masyarakat menuju kesadaran moral.

Berikut penjelasan informan Triyanto Triwikromo:

“Nilai-nilai budaya seperti rukun, sabar, *aja dumeah, adigang, adigung, adiguna, welas asih, eling lan waspada* hingga *tepa selira* dijadikan pedoman etis penulisan. Kearifan lokal tidak hanya menjadi tema, tetapi juga *roh* yang menjiwai cara berpikir dan menulis.” (Wawancara dengan Triyanto Triwikromo, 2020).

Triyanto bersyukur ‘Suara Merdeka’ menyediakan ‘ruang aman dan bebas’ bagi dirinya maupun penulis lainnya untuk menulis refleksi budaya dan kritik sosial, meski tetap dalam koridor budaya Jawa dan sesuai visi misi media itu sendiri. Dengan demikian, kebijakan redaksi yang mendukung ekspresi kultural menunjukkan adanya kepekaan dan kepedulian redaksional yang sadar budaya. Dalam ruang semacam inilah, RSP tumbuh sebagai media refleksi budaya, moralitas, dan kepemimpinan Jawa.

Posisi wartawan dalam hal ini dipandang sebagai penuntun masyarakat, bukan sekadar pelapor fakta. Jurnalisme diartikulasikan sebagai tanggung jawab moral dan spiritual untuk membentuk kesadaran publik yang bijak.

Menurut Triyanto (2020), RSP merupakan praktik jurnalistik yang berpadu antara estetika, spiritualitas, dan kritik sosial. Kearifan lokal Jawa menjadi sumber nilai dan strategi ekspresi sehingga kritik terhadap kekuasaan disampaikan tanpa menimbulkan konflik. Bahasa *pasemon* berfungsi sebagai 'senjata halus' yang sarat makna moral, menjadikan tulisan-tulisan RSP bukan sekadar teks jurnalistik, tetapi juga *laku* budaya dan spiritual.

Secara pribadi, Triyanto memandang aktivitas menulis bukan sekadar kerja jurnalistik, tetapi sebagai jalan pengabdian dan spiritualitas. Hal ini sebagai bentuk *tapa brata* intelektual yang menuntun masyarakat menuju kesadaran moral dengan bahasa yang lembut, simbolik, dan penuh makna.

Lebih lanjut penjelasan informan Triyanto:

“Kekuatan pers bukan terletak pada keberaniannya berteriak, melainkan pada kemampuannya menuntun, menyadarkan, dan meneduhkan masyarakat dengan kebijaksanaan lokal yang lembut namun tegas secara moral. Melalui ‘Sang Pamomong’, menjadikan jurnalisme sebagai *laku* pamomong yakni seni menuntun ‘rasa’ dan jiwa manusia maupun bangsa dengan bahasa kebijaksanaan, kehalusan, dan kearifan Jawa.” (Wawancara dengan Triyanto Triwikromo, 2020).

Hal senada diungkapkan informan Sri Syamsiah Lestari (2020) selaku pengampu halaman edisi Minggu yang juga bertanggung jawab pada halaman RSP, menjelaskan RSP merupakan refleksi budaya berbasis kesadaran budaya dalam menyorot berbagai dinamika yang berkembang di masyarakat dan dikaji dalam perspektif budaya Jawa.

Berikut penjelasan informan Sri:

“Rubrik Sang Pamomong menghadirkan moralitas lokal dalam format jurnalistik yang komunikatif, normatif, dan reflektif berbasis kultural dan etis. Rubrik ini di antaranya merujuk pada nilai-nilai *Hasta Brata* sebagai landasan normatif kepemimpinan ideal ala Jawa yang sepatutnya dapat diterapkan dalam kepemimpinan kontemporer karena relevan dengan perkembangan zaman.” (Wawancara dengan Sri Syamsiah Lestari, 2020).

Sementara itu, Saroni Asikin (2020) selaku Redaktur Pelaksana ‘Suara Merdeka’ yang sebelumnya sebagai pengampu RSP menegaskan, artikel di RSP memang mayoritas ke arah kritik sosial. Tidak heran, rubrik ini kerap *menyentil* pemerintahan, tapi melalui perspektif budaya Jawa sebagai hasil reflektif atau perenungan dalam menyikapi kondisi yang terjadi di masyarakat.

Berikut penjelasan informan Saroni Asikin:

“Rubrik Sang Pamomong lahir karena redaksi memandang pentingnya ruang budaya Jawa di media lokal sebagai sumber pengetahuan sosial, selain pelestarian budaya. Rubrik ini (RSP-red) mempertegas ‘Suara Merdeka’ sebagai media yang mampu *mengemong* pembaca seraya menuntun dan mendidik masyarakat secara moral dan budaya.” (Wawancara awal dengan Saroni Asikin, 2020).

Sebelumnya, informan Hendro Basuki (2020) selaku salah satu penggagas RSP mengatakan, rubrik budaya ini lahir dari keinginan memberi *oase* bagi publik yang jenuh dengan berita politik dan konflik. Menurutnya, rubrik ini bernilai pendidikan dengan mengajak publik berpikir kritis, sehingga bukan sekadar membaca berita.

Berikut penjelasan informan Hendro Basuki (2020):

“Rubrik Sang Pamomong (RSP) memberi nutrisi kebudayaan dengan menghadirkan nilai-nilai budaya (Jawa) masa lalu dalam konteks masa kini.” (Wawancara dengan Hendro Basuki, 2020).

Berdasarkan penjelasan sejumlah informan, menunjukkan refleksi kolektif tersebut tumbuh dari kesadaran etis jurnalis dalam menjalankan tanggung jawab sosial pers. Kesadaran ini hadir ketika realitas kepemimpinan dinilai tidak selaras dengan nilai kepemimpinan ideal. Melalui RSP, sikap etis tersebut diwujudkan dalam kritik sosial yang reflektif dan berlandaskan nilai-nilai budaya Jawa, termasuk filosofi *Hasta Brata*.

Refleksi kolektif yang hadir dalam praktik jurnalistik RSP tidak lahir secara tiba-tiba sebagai sikap institusional. Refleksi tersebut berakar pada kesadaran etis para jurnalis sebagai individu yang terlibat langsung dengan realitas sosial yang melingkupinya. Kesadaran kultural ini tumbuh dari pengalaman sehari-hari jurnalis dalam mengamati krisis nilai, ketimpangan kekuasaan, dan situasi sosial-politik yang dirasakan semakin tidak kondusif. Dalam konteks inilah, praktik jurnalistik tidak semata dijalankan sebagai kerja profesional, tetapi juga sebagai respons atas panggilan ‘hati nurani’.

Ketika kesadaran individual tersebut berulang dan diartikulasikan secara bersama di kalangan jurnalis, maka kesadaran tersebut berkembang menjadi refleksi kolektif. Refleksi ini kemudian membentuk arah kritik sosial rubrik, yang

disampaikan secara simbolik, *pasemon*, dan kultural, alih-alih melalui bahasa konfrontatif.

Dikaitkan konteks penelitian ini, RSP sebagai ruang refleksi kolektif jurnalis dalam menyikapi realitas sosial kepemimpinan kontemporer. Dominasi tematik krisis kepemimpinan dalam RSP sepanjang periode 1996–2020 memperlihatkan, bahwa refleksi kolektif jurnalis/aktor tumbuh dari keprihatinan etis bersama terhadap praktik kepemimpinan yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai ideal. Dalam situasi tersebut, filosofi *Hasta Brata* berfungsi sebagai kerangka normatif yang membingkai cara jurnalis menilai, mengkritik, dan merefleksikan realitas kekuasaan.

Berpijak dari hal tersebut, refleksi kolektif dalam RSP tidak hadir sebagai reaksi spontan, melainkan sebagai praktik jurnalistik yang berakar pada nilai etis-kultural yang sama. Refleksi kolektif tersebut bersumber dari kesadaran etis yang dibangun dan dipraktikkan secara bersama dalam kerja jurnalistik. Jurnalis memaknai nilai-nilai kepemimpinan *Hasta Brata* untuk diadaptasi sebagai rujukan normatif, etis, dan kultural. Kesadaran ini tidak dimaknai sebagai kesadaran kolektif dalam pengertian sosiologis klasik, melainkan sebagai orientasi etik yang terinstitusionalisasi dalam praktik redaksional rubrik.

Kesadaran etis tersebut juga merepresentasikan panggilan tanggung jawab sosial pers dalam menyikapi kondisi kepemimpinan yang dinilai tidak selaras dengan nilai kepemimpinan ideal. Dalam perspektif teori tanggung jawab sosial pers, pers tidak hanya berfungsi menyajikan informasi, tetapi juga menjalankan peran pengawasan sosial dan penjaga nilai moral publik (McQuail, 2010). Melalui

RSP, panggilan etis tidak diekspresikan secara konfrontatif, melainkan diwujudkan dalam narasi reflektif yang memadukan kritik sosial dengan rujukan nilai budaya Jawa.

Dalam kerangka RSP inilah kesadaran refleksi kolektif diwujudkan melalui narasi yang kaya simbol, metafora, *pitutur* dengan nuansa *pasemon* (halus dan santun). Setiap tulisan menghadirkan makna yang mempertemukan pengalaman individual dengan pengalaman kolektif yang diwarisi dari generasi sebelumnya.

Di sisi lain, pengalaman kolektif ini mengalir dan diperkuat melalui praktik komunikasi simbolik sehingga nilai budaya dan moral disampaikan secara reflektif. Atas dasar itu, Carey (2009) menjelaskan komunikasi secara umum merupakan tindakan ritual. Sejalan dengan pemikiran Carey, RSP bekerja sebagai praktik simbolik yang menjaga ‘kedekatan batin’ antara teks, pembaca, dan nilai budaya. Setiap narasi menjadi semacam ‘ritual membaca’, sehingga pembaca mengalami proses internalisasi nilai melalui refleksi dan perenungan lebih khusus oleh pembaca yang memang berasal dari suku Jawa.

Koentjaraningrat (1984) menegaskan, masyarakat Jawa memahami dunia melalui tanda dan isyarat yang menyimpan keluhuran budi, sementara Herusatoto (1987) menunjukkan simbol budaya berfungsi sebagai pengikat moral yang halus namun kuat. Di sinilah, RSP mengoptimalkan mekanisme simbolik untuk menyampaikan pesan moral yang menyentuh lapisan batin pembaca dan menjadikan rubrik bukan sekadar teks. Rubrik ini juga mengasah pengalaman etis yang dapat dirasakan secara emosional dan reflektif, bahkan memperkuat identitas

budaya. Hal ini selaras dengan penelitian Andriyani (2015) bahwa koran lokal tidak hanya melestarikan, tetapi juga mengembangkan identitas budaya.

Sejalan dengan hal tersebut, Hall (1996) menambahkan dimensi dinamis dalam identitas budaya selalu berkelindan dengan *being* dan *becoming*. Artinya, identitas tidak berhenti pada apa yang diwariskan, melainkan terus bergerak mengikuti tantangan zaman. RSP menjadi ruang terhadap nilai identitas Jawa antara lain *rukun*, *wedi*, *isin*, *sungkan*, *tepa selira*, *sangkan paraning dumadi*, *nrimo ing pandum* dan *manunggaling kawula gusti* diolah kembali untuk menyikapi dinamika kehidupan termasuk pula dalam konteks sosial- politik yang senantiasa berubah. Rubrik selain menyajikan simbol atau cerita klasik, juga menyediakan panduan moral bagi pembaca untuk menavigasi tantangan modern tanpa kehilangan akar budaya.

Pengolahan nilai identitas budaya tersebut berkelindan dengan pembentukan sikap yakni cara seseorang memaknai dan menjalani kehidupan berdasarkan nilai moral dan budaya yang diinternalisasi, salah satunya melalui *wejangan*, nasihat atau *pitutur* (kata-kata bijak). Sumodiningrat & Wulandari (2014) serta Ahmad (2014) menegaskan bahwa *pitutur* Jawa berfungsi sebagai media pendidikan yang menginternalisasi norma sosial dan etika. Magnis-Suseno (2001) memandang etika Jawa sebagai sistem nilai yang memberi arah bagi harmoni sosial. Endraswara (2016, 2018) menekankan kearifan lokal sebagai basis refleksi moral yang menuntun orientasi hidup secara seimbang. Keseluruhan nilai ini bertaut dengan falsafah hidup Jawa yang menekankan keselarasan relasi dengan

Tuhan, sesama manusia, alam semesta, dan diri sendiri sebagai landasan kebahagiaan lahir dan batin yang bersifat spiritual (Muktiyo, 2011).

Atas dasar itu, RSP menghadirkan beragam narasi mulai informasi, membimbing pembaca melalui proses pembelajaran moral hingga menumbuhkan kesadaran etis. Dalam konteks ini, rubrik berfungsi sebagai sarana edukasi sosial-budaya, sehingga pembaca diajak memahami, merenungkan, dan menginternalisasi nilai yang relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan pendekatan ini, RSP memposisikan dirinya sebagai rubrik yang beroperasi dalam genre jurnalisme budaya yang tetap mengusung prinsip dan kaidah jurnalistik. Rubrik berfungsi membangun refleksi moral, internalisasi nilai, dan memperkuat pilar kohesi sosial. Peran RSP ini selaras dengan hasil penelitian Torres-Toukoumidis et al., (2024) bahwa media lokal membentuk jalinan kebersamaan masyarakat melalui penyajian konten, representasi budaya, dan narasi lokal yang menghubungkan pengalaman, identitas, serta aspirasi warga, sehingga memperkuat kohesi dan solidaritas komunitas.

5.3 Fungsi Sosial ‘Jurnalisme *Pamomong*’ sebagai Bentuk Konstruksi Nilai-Nilai Kultural dan Praktik Sosial Terkait Kepemimpinan

Dalam pandangan sejumlah informan, keberadaan RSP tidak sekadar dimaknai sebagai ruang pemberitaan budaya, tetapi juga sebagai *laku pamomong* sebuah praktik komunikasi berbasis etika sosial dan kearifan lokal budaya Jawa. Informan Aris Mulyawan (2024), informan Mujahirin Tohir (2020), dan informan Widodo Wikandana (2024), ketiganya mengatakan rubrik ini menjalankan fungsi jurnalistik yang berakar pada nilai-nilai luhur masyarakat Jawa, yakni ‘prinsip

mendidik tanpa menggurui’, ‘menuntun tanpa memaksa’, serta ‘memberi arah dengan cara halus dan bijak’.

Penjelasan informan tersebut mengindikasikan RSP secara empiris menerapkan ‘jurnalisme *pamomong*’. Jurnalisme genre ini sebagai sebuah bentuk praksis jurnalistik untuk menyampaikan informasi, membangun budi pekerti sosial melalui bahasa yang teduh, simbolik, dan sarat makna moral.

Lebih lanjut, para informan yang berasal dari latar belakang beragam mulai dari akademisi, budayawan, jurnalis, hingga pembaca setia menegaskan bahwa RSP hadir sebagai ruang refleksi kultural di tengah situasi sosial-politik yang sering kali ‘keras’ dan penuh intrik. Informan Mujahirin Tohir (2020) misalnya, mengatakan, kehadiran RSP sangat diperlukan sebagai ruang refleksi kultural di tengah masifnya praktik jurnalistik pada media arus utama yang lebih memprioritaskan isu-isu politik maupun yang didominasi logika bisnis.

Itu sebabnya lanjut Mujahirin Tohir (2020), RSP tidak sekadar menghadirkan konten budaya, melainkan menampilkan pesan-pesan moral yang mengandung nasihat kehidupan (*piwulang*), kritik sosial, serta ajakan untuk memperbaiki diri dan semacam itu yang intinya untuk membangun peradaban bangsa.

Dari perspektif jurnalis senior yakni informan Hendro Basuki (2020) selaku salah satu penggagas RSP menegaskan, rubrik budaya ini sebagai konsistensi redaksi untuk menggelorakan suara kebijaksanaan masyarakat Jawa melalui medium jurnalistik. Lebih dari itu, makna *pamomong* dalam Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) merujuk pada sosok yang ‘menuntun dengan kasih’, bukan

mendominasi dengan kuasa ataupun kekuasaan. Di sisi lain, informan pembaca seperti Soerjanto (2020) menilai rubrik ini “penting dan bermanfaat karena berisi falsafah Jawa yang menjadi pegangan hidup”, menegaskan fungsi etis dan edukatif dari tulisan-tulisan RSP.

Dengan demikian, ‘Jurnalisme *pamomong*’ yang diterapkan ‘Suara Merdeka’ dalam RSP berkelindan antara ‘idealisme moral dan realitas politik’, antara ‘tradisi lokal dan tantangan globalisasi’, antara ‘bahasa simbolik dan pesan sosial yang eksplisit’. Di sinilah perbedaan mendasar RSP dibandingkan rubrik lain dalam media massa arus utama.

Sebagai implementasi dari jurnalisme *pamomong*, informan Triyanto Triwikromo (2020) selaku Wakil Pemimpin Redaksi ‘Suara Merdeka’ yang juga pengasuh RSP menjelaskan, rubrik ini bertujuan membangun kesadaran reflektif yang lahir dari kepekaan budaya. Berbagai tulisan dalam RSP sering kali menggunakan metafora, *pasemon*, *pitutur*, dan kisah wayang untuk ‘mengingatnkan’ kekuasaan tanpa ‘menyerang secara langsung’. Dalam kerangka ini, kritik sosial dilakukan dengan bahasa budaya, cara khas Jawa yang mengedepankan kesantunan (*tata krama*), keteduhan, dan kehalusan tutur.

Beberapa informan seperti Aris Mulyawan (2024) menilai cara ini sebagai bentuk ‘jurnalisme cerdas dan elegan’ yang efektif di masa Orde Baru, ketika kebebasan pers sangat terbatas. Ia menegaskan bahwa “RSP berani mengkritik pemerintahan Soeharto tapi tetap aman karena dilakukan secara lembut”. Dengan demikian, kritik halus ini memperlihatkan bahwa ‘jurnalisme *pamomong*’ tidak hanya merupakan praktik etis, melainkan juga strategi komunikasi untuk bertahan

di tengah represi politik. Kritik dilakukan dalam bahasa *pasemon*, sebuah bentuk komunikasi khas Jawa yang ‘menyembunyikan’ pesan moral di balik kisah dan simbol. Cara ini sejalan dengan pandangan Bourdieu (1998) tentang habitus. Menurut sosiolog asal Prancis ini, produk media merupakan hasil dari interaksi antara konteks struktural eksternal dan habitus berupa disposisi kultural aktor. Hal ini tercermin dalam nilai, etika, dan keyakinan yang memandu praktik produksi media.

Habitus wartawan ‘Suara Merdeka’ yang berakar pada kultur Jawa membentuk logika produksi RSP sebagai ruang refleksi kultural yang menegosiasikan nilai, etika, dan pandangan hidup Jawa dalam relasinya dengan konteks kekuasaan.

Sementara itu, RSP juga berfungsi sebagai media pendidikan moral bagi masyarakat. Informan Mujahirin Tohir (2020) mengatakan tulisan-tulisan dalam RSP merupakan bentuk interaksi kebudayaan antara penulis dan pembaca yang memiliki latar nilai yang sama. Ia menegaskan, “tulisan-tulisan RSP penting karena mengandung *ideal culture* yang berisi ajaran moral, spiritualitas, dan budi pekerti.” *Ideal culture* yang dimaksud Mujahirin merupakan ajaran-ajaran luhur yang berperan menuntun manusia agar hidup selaras dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Nilai-nilai kearifan lokal antara lain *eling lan waspada*, *tepa slira*, *andhap asor*, dan *ngeli tanpa keli* merupakan inti dari moralitas Jawa yang sering diangkat dalam tulisan-tulisan RSP. Melalui teks-teks tersebut, RSP berperan sebagai medium transmisi nilai, menjembatani antara warisan budaya masa lalu, dan kebutuhan moral masyarakat modern.

Bagi pembaca yakni informan Kasiyati (2020) berpendapat RSP menjadi ruang yang menenangkan di tengah hiruk-pikuk berita politik dan ekonomi. Sedangkan informan Dhoni Zustiyanoro (2020) yang juga penulis tetap RSP, memandang rubrik ini sebagai “ruang perenungan batin yang membuat pembaca kembali menengok diri”. Hal ini memperlihatkan bahwa ‘jurnalisme *pamomong*’ tidak sekadar menyajikan informasi faktual, tetapi menghidupkan kembali fungsi media sebagai penjaga nurani publik. Jurnalisme model ini tidak mengejar sensasi. RSP dalam konteks ini memperluas fungsi pers sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 dari fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan pengawasan sosial menuju fungsi etika kultural.

Sejalan dengan fungsi etika tersebut, fungsi *pamomong* sebagai ‘motor’ RSP dalam mengartikulasikan praktik komunikasi komunal khas masyarakat Jawa. Artikel-artikel dalam RSP kerap menampilkan ajaran kepemimpinan *Hasta Brata* tentang watak bijaksana, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial yang secara implisit ditujukan kepada pemimpin publik. Dalam konteks ini, kritik terhadap pemimpin bukanlah bentuk perlawanan frontal, melainkan ajakan untuk introspeksi.

Berbagai kajian mengindikasikan bahwa praktik kepemimpinan masa kini cenderung mengalami degradasi nilai moral dan etika, yang tercermin dari rendahnya integritas, seringnya pelanggaran komitmen politik, serta menguatnya praktik korupsi yang menggerus kepercayaan publik (Setiawan & Taufik, 2022; Manara et al., 2020; Ilham, 2022). Lebih lanjut, Ronnie (2024) menggarisbawahi kemunculan tipe pemimpin yang bersifat otoriter, manipulatif, populis, dan ego-

sentris (*toxic leader*) yang berdampak buruk terhadap keberlanjutan pembangunan. Kondisi ini menegaskan pentingnya kehadiran ruang-ruang diskursif yang mampu menawarkan rujukan etis alternatif di luar narasi kepemimpinan pragmatis semata.

Dengan cara itulah, RSP memiliki peran ganda yaitu sebagai ruang kultural yang menjaga nilai-nilai *adiluhung*, dan sebagai ruang ideologi yang menanamkan etika kepemimpinan berbasis kebajikan melalui ‘Jurnalisme *pamomong*’. Hal ini sejalan dengan penjelasan informan Sri Syamsiah Lestari (2020) selaku pengampu desk edisi Minggu di surat kabar ‘Suara Merdeka’ yang juga menangani halaman RSP. Menurutnya, RSP sebagai wadah ideologis untuk menanamkan nilai budaya Jawa, sekaligus mekanisme redaksional ‘Suara Merdeka’ untuk mempertahankan identitas media lokal.

Dari perspektif teoritis, ‘jurnalisme *pamomong*’ merupakan bentuk praksis yang unik dalam kajian jurnalistik Indonesia. Jurnalisme ini memadukan logika jurnalistik modern dengan etos budaya lokal. Shoemaker dan Reese (2014) menjelaskan bahwa isi media ditentukan oleh struktur hierarki mulai dari individu wartawan, rutinitas redaksi, organisasi media, hingga ideologi dan sistem sosial. Dalam konteks ‘Suara Merdeka’, struktur tersebut dimediasi oleh nilai budaya Jawa yang hidup dalam habitus para wartawannya. Hasilnya adalah produk media yang tidak sepenuhnya tunduk pada logika pasar atau tekanan politik, melainkan kepedulian dan kesadaran untuk menjalankan misi kultural. Nilai *pamomong* menjadi modal simbolik (dalam istilah Bourdieu) yang memberi legitimasi moral pada ‘Suara Merdeka’ di mata masyarakat Jawa Tengah sebagai ‘korannya *wong Jawa*’.

Nilai *pamomong* dalam konteks penelitian ini diangkat sebagai etos budaya yang menjiwai praktik media, khususnya pada RSP. Etos ini menjadi penghubung antara teori tanggung jawab sosial pers (Siebert et al., 1984) yang menekankan peran moral media, teori konstruksi realitas sosial, dan perspektif Bourdieu (1988, 1993) yang menjelaskan praktik media sebagai hasil internalisasi nilai melalui habitus aktor yang terlibat.

Sementara itu, RSP di Harian ‘Suara Merdeka’ diposisikan melalui kerangka konstruktivis yang menempatkan media bukan sebagai cermin realitas sosial yang objektif dan netral, melainkan sebagai ruang konstruksi berbasis budaya. Dalam perspektif konstruktivis, realitas kepemimpinan sebagai hasil proses penafsiran yang dibentuk melalui praktik jurnalistik, pilihan narasi, serta sistem nilai yang diinternalisasi dan dioperasionalkan oleh aktor-aktor media. Kepemimpinan dalam RSP bukan sebagai fakta yang berdiri sendiri, melainkan sebagai realitas simbolik yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.

Habitus kultural berperan penting dalam membentuk cara aktor RSP memandang dan menafsirkan realitas kepemimpinan. Krisis kepemimpinan yang terjadi dalam konteks sosial-politik Indonesia pasca-reformasi bukanlah sebagai kegagalan struktural sistem politik atau administrasi pemerintahan. Sebaliknya, krisis tersebut dikonstruksi sebagai persoalan degradasi nilai dan etika sosial. Cara pandang ini mencerminkan skema persepsi dan apresiasi yang terinternalisasi dalam diri aktor media, sehingga memengaruhi pilihan tema, sudut pandang, serta bahasa yang digunakan dalam narasi RSP.

Dengan mengangkat nilai-nilai *Hasta Brata* yang disimbolisasikan melalui unsur-unsur alam, RSP membangun kerangka normatif yang memberikan acuan tentang bagaimana kepemimpinan seharusnya dijalankan dalam konteks sosial masyarakat Jawa. Selain habitus, RSP juga mengandalkan modal simbolik dalam menjalankan praktik jurnalistiknya. Modal simbolik ini berupa legitimasi budaya, otoritas moral, dan pengakuan sosial yang diperoleh melalui konsistensi RSP dalam mengusung nilai-nilai etika Jawa. Dengan mengadopsi simbol-simbol budaya seperti *Hasta Brata*, mitos *Ratu Adil*, dan figur *Satriya Piningit*, RSP membangun narasi kepemimpinan yang memiliki daya tarik kuat di kalangan pembaca. Modal simbolik tersebut memberi ruang RSP untuk menyampaikan kritik sosial secara halus dan reflektif tanpa kehilangan penerimaan sosial di tengah publiknya.

Konstruksi kepemimpinan dalam RSP sejalan dengan teori konstruksi realitas sosial yang banyak diaplikasikan dalam kajian media (Hamad, 2004). Dalam perspektif ini, media dipahami sebagai institusi sosial yang secara aktif membentuk realitas melalui proses seleksi isu, penekanan aspek tertentu, serta pemingkakan makna. Realitas kepemimpinan yang dihadirkan RSP merupakan hasil dari proses tersebut, sehingga aspek etika, moral, dan tanggung jawab sosial lebih ditonjolkan dibandingkan aspek prosedural.

Melalui praktik tersebut, RSP mengonstruksi kepemimpinan sebagai arena nilai yang sarat dengan konsekuensi moral. Kepemimpinan ideal digambarkan sebagai praktik kekuasaan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, keteladanan, dan kejujuran, sementara praktik kepemimpinan yang menyimpang dipresentasikan sebagai kegagalan etika. Krisis kepemimpinan sebagai kondisi

berulang yang mencerminkan lemahnya komitmen moral para pemimpin dalam menjalankan amanah rakyat.

Melalui konstruksi tersebut, RSP membentuk kesadaran reflektif pembaca mengenai normatif kepemimpinan. Representasi pemimpin yang digambarkan semakin menjauh dari rakyat, tidak peka terhadap aspirasi publik, dan menutup diri dari kritik berfungsi sebagai simbol atas penyimpangan nilai kekuasaan. Sebaliknya, figur-figur ideal, baik yang bersifat simbolik seperti *Ratu Adil* maupun yang bersifat empiris seperti Sultan Hamengku Buwono X, dikonstruksi sebagai rujukan moral yang menunjukkan bahwa kepemimpinan beretika tetap mungkin diwujudkan dalam praktik sosial tertentu.

Dalam kerangka konstruktivis inilah, kehadiran figur imajiner dan empiris tersebut tidak dimaknai sebagai penilaian normatif yang mutlak, melainkan sebagai bagian dari strategi simbolik RSP dalam membangun horizon makna kepemimpinan. Figur-figur tersebut berfungsi sebagai refleksi sosial yang membantu pembaca menyikapi realitas sosial kepemimpinan yang dihadapi dan nilai-nilai kepemimpinan yang diidealkan.

Di sisi lain, praktik jurnalistik RSP diposisikan melalui teori tanggung jawab sosial pers sebagaimana dirumuskan oleh Siebert dkk. dan dikembangkan lebih lanjut oleh McQuail (2010). Dalam perspektif ini, pers dipandang sebagai institusi sosial yang memiliki kewajiban untuk melayani kepentingan publik, menjaga nilai-nilai sosial, serta berkontribusi pada kualitas kehidupan demokratis. RSP menjalankan fungsi tersebut dengan menempatkan isu kepemimpinan sebagai

isu sentral dalam kerangka etika dan tanggung jawab moral, bukan semata-mata dalam kerangka konflik politik.

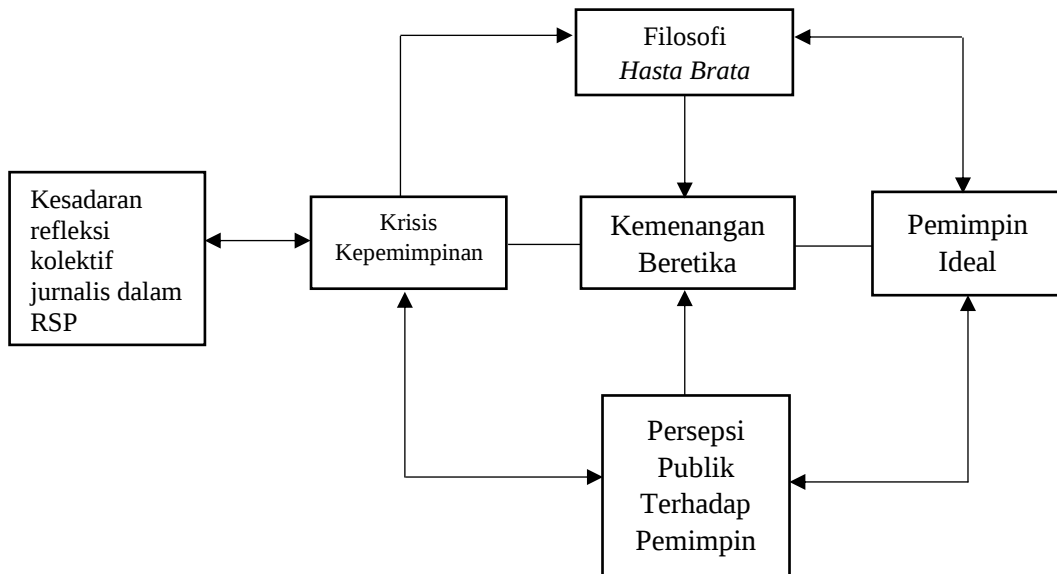
Kritik sosial yang disampaikan RSP meskipun bersifat implisit dan simbolik, mencerminkan orientasi tanggung jawab sosial pers. Media tidak hanya bertugas mengungkap penyimpangan, tetapi juga berperan dalam mengingatkan penguasa dan masyarakat mengenai nilai-nilai yang seharusnya menjadi dasar praktik kekuasaan. Dalam konteks ini, gaya penyampaian yang santun dan reflektif bukan merupakan kelemahan, melainkan strategi etis yang selaras dengan fungsi sosial pers.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Hendro Basuki (2020) bahwa RSP lahir dari jurnalistik reflektif yang berakar pada kearifan lokal Jawa. Sebagai penggagas rubrik ini, ia tidak sekadar membangun rubrik budaya, tetapi merancang dan menerapkan praktik jurnalisme yang *ngemong*, *ngajari*, dan *ngelingake* (menuntun, mendidik, dan mengingatkan) masyarakat dengan santun. Rubrik ini menjadi ruang inovatif untuk memodernkan nilai budaya Jawa tanpa kehilangan esensi moralitasnya.

Berikut petikan wawancara dengan Hendro Basuki:

“Kami membangun jurnalisme moral yang menyeimbangkan kritik, pendidikan, dan pencerahan publik. Rubrik budaya ini (RSP-red) menjadi cermin fleksibilitas budaya Jawa yang mampu beradaptasi terhadap modernitas sekaligus mempertahankan integritas etika dan identitas lokal.” (Wawancara dengan Hendro Basuki, 2020).

Bertolak dari penjelasan tersebut, penelitian ini menyajikan model konstruksi kepemimpinan dalam RSP seperti tercantum pada gambar 5.2.



Gambar 5.2: Model Konstruksi Kepemimpinan dalam RSP
(Sumber: Olahan Peneliti, 2026)

Berdasarkan gambar 5.2 menunjukkan model konstruksi kepemimpinan dalam RSP merupakan hasil interaksi antara habitus kultural aktor media, modal simbolik yang dimiliki, logika ranah jurnalistik, orientasi tanggung jawab sosial pers, serta praktik jurnalisme *pamomong* sebagai kerangka operasional produksi konstruksi nilai-nilai kepemimpinan menyikapi dinamika realitas sosial kepemimpinan kontemporer.

Realitas kepemimpinan tersebut tetap dipandang secara reflektif oleh aktor RSP. Kesadaran reflektif individual ini kemudian berkembang menjadi kesadaran reflektif kolektif dengan merujuk pada kerangka normatif dan etis yakni ajaran *Hasta Brata* dan sebagai implementasi teori tanggung jawab sosial pers, dalam hal ini fungsi pengawasan sosial yang dominan. Pemimpin-pemimpin yang menjalankan kekuasaan dalam sistem politik modern dikonstruksi sebagai sosok

yang semakin tidak terbuka “mata dan hatinya”, menjauh dari rakyat, abai terhadap aspirasi publik, serta menunjukkan sikap anti kritik seperti yang dituangkan dalam sejumlah artikel RSP. Kondisi ini memicu munculnya protes dari sebagian kelompok masyarakat, yang dalam narasi RSP sebagai konsekuensi dari kegagalan etika kepemimpinan. Wajar saja jika kemudian muncul beragam persepsi publik yang negatif terhadap pemimpin sehingga memicu terjadinya krisis kepemimpinan.

Di sisi lain, RSP juga mengonstruksi kemenangan beretika sesuai prinsip *Hasta Brata* yakni pemimpin yang teguh, jujur, bijaksana, dan adil yang hanya bisa lahir dari ‘rahim’ proses pemilihan yang jujur, *fair*, tanpa merendahkan ataupun memermalukan pihak lawan (*menang tan ngasorake*). Proses pemilihan yang jujur diharapkan melahirkan pemimpin yang amanah, bukannya pemimpin yang tidak beretika maupun yang rakus dan ‘haus’ akan kekuasaan.

Dalam kerangka inilah, RSP berperan sebagai ruang refleksi sosial dengan menyuarakan pesan moral dan kritik sosial yang bersifat mengingatkan. Kritik diarahkan agar para pemimpin kembali pada *khitah* kekuasaan, yakni menjalankan amanah rakyat dengan melayani secara tulus, tanpa pamrih dan tanpa diskriminasi. RSP menegaskan bahwa dalam tatanan etika Jawa, pemimpin sejatinya adalah *pamomong*, pengasuh dan pelindung rakyat sesuai prinsip kepemimpinan ideal *Hasta Brata*, bukan sosok yang membohongi rakyatnya.

Secara keseluruhan, berikut hasil penelitian konstruksi kepemimpinan *Hasta Brata* dalam RSP periode 1996-2020 seperti tercantum pada gambar 5.3:



Gambar 5.3: Implementasi Konstruksi Kepemimpinan *Hasta Brata* dalam RSP 1996-2020
(Sumber: Olahan Peneliti, 2026)

Berdasarkan gambar 5.3 menunjukkan piramida dari implementasi konstruksi kepemimpinan *Hasta Brata* dalam RSP 1996-2020. Diawali dari tingkatan/lapisan mendasar yaitu sebagai basis empiris yang kuat untuk memahami apa yang muncul di level konten/teks, termasuk dominasi tema krisis kepemimpinan, harapan terhadap pemimpin ideal, dan pewarisan nilai budaya Jawa (filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*). Lapisan pertama ini menjadi fondasi mendasar karena tanpa pemahaman konten, analisis produksi dan fungsi sosial tidak bisa dilakukan.

Selanjutnya, di lapisan menengah yaitu bagaimana rubrik diproduksi dalam institusi media ('Suara Merdeka'), melalui kerangka Bourdieu: habitus, modal, dan arena. Hal ini menunjukkan hubungan antara struktur institusi, praktik jurnalis, dan hasil rubrik, sehingga pembaca bisa memahami konstruksi nilai kepemimpinan bukan hanya di teks, tapi juga dalam konteks institusional.

Sebagai klimaksnya yakni di lapisan tertinggi menyorot peran rubrik dalam fungsi sosial pers mulai sebagai sebagai pengawas, pewaris budaya, dan penyedia

ruang publik untuk isu kepemimpinan. Di tahapan inilah menjelaskan dimensi operasional rubrik dalam masyarakat tanpa menilai efek atau dampaknya, melainkan mengungkap bagaimana rubrik menjalankan tanggung jawab sosialnya. Dengan demikian, bagian ini menghubungkan temuan tematik dan produksi institusi dengan konteks sosial yang lebih luas.

5.4 *Quo Vadis* RSP: Tantangan dan Peluang di Era Kontemporer

Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) selama kurun waktu 1996–2020 menunjukkan kontinuitas yang menegaskan fungsinya sebagai arena konstruksi makna kepemimpinan ideal dan refleksi sosial-budaya Jawa pada umumnya. Rubrik ini sebagai wahana tempat makna, nilai, dan norma dibentuk melalui interaksi antara habitus aktor, modal kultural dan simbolik, serta struktur media (Bourdieu, 1993).

Informan Triyanto Triwikromo (2020) menjelaskan, pengasuh rubrik dan penulis eksternal menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa termasuk filosofi *Hasta Brata* dan menjadikannya sebagai kerangka etis untuk menafsirkan isu-isu kontemporer. Termasuk dalam menyuarakan kritik sosial terhadap penguasa ataupun masyarakat sekalipun.

Berikut penjelasan informan Triyanto Triwikromo:

“Rubrik ini (RSP-red) bukan sekadar rubrik budaya, melainkan wujud praktik jurnalisme yang menyatukan spiritualitas, moralitas, dan kritik sosial khas Jawa sebagai sarana *momong* jiwa publik dengan kebijaksanaan. *Pasemon* dan simbol Jawa digunakan untuk mengkritik kekuasaan dengan cara lembut, cerdas, dan penuh makna. Kritik disampaikan tanpa konfrontasi langsung.” (Wawancara dengan Triyanto Triwikromo, 2020).

Praktik ini mempertegas fungsi RSP sebagai wahana pendidikan publik tanpa mengorbankan prinsip jurnalistik. Namun, tantangan yang dihadapi RSP semakin kompleks seiring disrupsi digital dan perubahan perilaku pembaca. Tekanan sirkulasi, dominasi konten daring, serta ekspektasi publik yang semakin beragam mendorong aktor jurnalistik menyesuaikan strategi produksi dan distribusi tanpa mengaburkan nilai moral.

Pada level rutinitas media, penyesuaian tampak pada fleksibilitas jadwal terbit dan adaptasi format *e-paper*, mengingat pada dekade 2020-an RSP tidak hadir di platform daring selain edisi *e-paper* berbayar. Pada level individu dan organisasi, praktik jurnalistik dimaknai melalui kreativitas simbolik, habitus penulis, serta dukungan modal kultural, sosial, dan simbolik dalam lanskap media digital.

Dalam ekosistem media lokal di Indonesia, lanskap tersebut ditandai oleh keterkaitan erat antara idealisme redaksional dan tuntutan ekonomi media di era digital. Media tidak hanya berfungsi sebagai ruang pemaknaan moral dan edukatif, tetapi juga beroperasi sebagai entitas ekonomi yang harus beradaptasi dengan logika pasar dan digitalisasi. Dalam pengertian ini, struktur ekonomi media membentuk konteks produksi jurnalistik, sebagaimana dijelaskan oleh Herman & Chomsky (2008). Sejalan dengan itu, Wahl-Jorgensen et al., (2016) serta Croteau & Hoynes (2006) menunjukkan bahwa faktor pasar, kepemilikan, dan kebijakan internal media turut membingkai ruang praktik jurnalistik, yang kemudian dimaknai dan dinegosiasikan oleh aktor-aktor media dalam kerja redaksional sehari-hari.

Pemahaman tersebut selaras dengan pandangan Olsen (2019), Harcup (2023), dan Salem (2025) yang melihat media modern beroperasi dalam pertautan antara logika budaya dan logika pasar (Bro, 2018; Makwambeni et al., 2023). Dalam praktiknya, kedua logika ini tidak selalu bersifat konfrontatif, melainkan membentuk penyesuaian agar media tetap dapat menjalankan fungsi sosialnya sekaligus menjaga keberlanjutan institusional.

Dalam konteks tersebut, negosiasi antara idealisme dan komersialisasi tidak hanya berlangsung pada tataran kebijakan media, tetapi juga menyentuh ranah nilai profesionalisme dan etika jurnalistik. Informan Aris Mulyawan (2024) menekankan pentingnya menjaga pagar api jurnalistik (*firewall*) antara redaksi dan kepentingan bisnis agar praktik jurnalistik tetap independen. Sejumlah studi menunjukkan bahwa lemahnya batas tersebut kerap berkaitan dengan persoalan manajerial dan tekanan ekonomi yang memengaruhi orientasi redaksional (Harcup, 2023; Salem, 2025; Krisdinanto, 2018).

Hal ini menunjukkan bahwa menjaga idealisme budaya tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan isi rubrik, tetapi juga dengan penguatan etos profesional yang menopang legitimasi moral media. Idealisme kultural, dalam pengertian ini, terwujud melalui praktik kerja jurnalistik yang konsisten, reflektif, dan berakar pada nilai-nilai yang diyakini bersama oleh para pelakunya.

Berpijak pada kerangka Pierre Bourdieu (1998), kondisi tersebut untuk menjaga derajat otonomi dalam ranah jurnalistik sebagai ruang produksi makna, meskipun berada dalam sistem ekonomi kapitalistik. Di Harian ‘Suara Merdeka’, otonomi tidak dimaknai sebagai struktur yang kaku, melainkan sebagai hasil

interaksi dan praktik yang terus dikonstruksi oleh wartawan dan penulis RSP. Pilihan sebagian penulis terutama penulis eksternal untuk terus berkontribusi tanpa imbalan finansial mencerminkan bagaimana nilai, motivasi, dan keyakinan budaya dibangun melalui pengalaman dan pemaknaan bersama. Dalam perspektif konstruktivis, praktik ini memperlihatkan bagaimana identitas profesional dan komitmen terhadap tradisi intelektual Jawa dipertahankan melalui proses interpretasi yang berkelanjutan.

Dikaitkan dengan level ekstra-media, praktik RSP dipengaruhi oleh perubahan tren pembaca termasuk generasi muda, serta regulasi media yang terus bergerak. Meski demikian, ideologi rubrik tetap berakar pada filosofi *Hasta Brata* dan kearifan lokal Jawa, yang berfungsi sebagai ‘kompas etis’ dalam membimbing keputusan editorial (Shoemaker & Reese, 1996, 2014; Bro, 2018; Makwambeni & Trust, 2023). Nilai-nilai tersebut menjadi rujukan dalam menyikapi tekanan eksternal tanpa menghilangkan identitas kultural rubrik.

Oleh karena itu, refleksi terhadap RSP menegaskan pentingnya kontinuitas habitus serta mobilisasi modal kultural, sosial, dan simbolik dalam menjaga konsistensi nilai. Interaksi antara agensi dan struktur, sebagaimana dijelaskan Bourdieu, menjadi pijakan RSP tetap relevan sebagai wahana pendidikan budaya, meskipun konteks sosial, politik, dan teknologi terus berubah. Konsep hierarki isi media membantu memahami bahwa setiap konten RSP diproduksi melalui interaksi multilevel: rutinitas media, aktor individual, organisasi, tekanan ekstra-media, dan ideologi- yang secara kolektif membentuk identitas rubrik dan legitimasi publiknya.

Melihat ke depan, RSP dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang dalam lanskap media kontemporer (Siregar et al., 2022). Pertama, digitalisasi membuka kemungkinan perluasan jangkauan budaya Jawa, namun juga menghadirkan risiko homogenisasi konten. Dalam konteks industri media yang semakin pragmatis, keberlanjutan RSP bergantung pada kemampuannya bertransformasi tanpa kehilangan pijakan nilai (Sandriester et al., 2025). Dilema utama tidak hanya berkisar pada idealisme dan komersialisasi (Rewira, 2024), tetapi juga pada bagaimana menjembatani tradisionalitas medium cetak dengan modernitas pola konsumsi digital (Islamiyah et al., 2025).

Kedua, generasi pembaca muda menuntut pola komunikasi yang lebih interaktif dan visual, sehingga mendorong kebutuhan akan inovasi format tanpa mengorbankan nilai etis jurnalistik. Berbagai kajian menunjukkan bahwa generasi muda mengalami pergeseran signifikan dalam pola konsumsi berita. Generasi Z tidak lagi sepenuhnya bergantung pada media arus utama, melainkan mengakses informasi melalui pola yang lebih cair, personal, dan sangat dipengaruhi oleh platform digital.

Casero-Ripollés (2012) mencatat peralihan konsumsi berita ke media sosial tidak serta-merta menurunkan minat kaum muda terhadap informasi publik. Sementara itu, Hartley (2018) menunjukkan bahwa modal kultural berperan penting dalam membentuk cara generasi milenial dan Gen Z menilai, menyaring, dan memaknai informasi. Dalam konteks keseharian, Vogler et al., (2023) menyorot peran sentral telepon seluler sebagai medium utama konsumsi berita remaja dalam

mengakses secara instan, tetapi sekaligus berisiko menimbulkan fragmentasi pemahaman.

Hanya saja, tidak sedikit generasi Z mengaku kebingungan dalam menghadapi arus informasi yang dikendalikan oleh logika algoritmik platform digital (Ehrlén et al., 2023). Oleh karena itu, Oliveira et al., (2024) menegaskan pentingnya literasi digital yang inklusif agar anak muda mampu bersikap lebih reflektif, kritis, dan sadar dalam menavigasi lanskap informasi yang semakin kompleks.

Menyikapi hal ini, sejumlah informan misalnya Widodo (2024) dan Aris (2024) menyarankan agar RSP dimigrasikan ke platform digital dengan strategi yang tepat, seperti menjadikannya *multiplatform content* yang ramah pembaca muda (Nurlaila et al., 2024; Fadillah et al., 2022). Ide ini sejalan dengan gagasan Jenkins (2006) tentang *convergence culture* yakni integrasi berbagai medium (cetak, *online*, media sosial) yang saling memperkuat dalam penyebaran nilai budaya. Dengan demikian, pelestarian budaya tidak harus berbenturan dengan modernitas, melainkan bisa saling mendukung melalui adaptasi bentuk dan wahana.

Di sisi lain, saran dari informan pembaca seperti Kasiyati (2020) dan Soerjanto (2020) yang berharap agar RSP tampil juga di platform *online* memperlihatkan adanya kebutuhan aktualisasi nilai budaya di ruang digital. Artinya, publik masih menghendaki jembatan antara warisan budaya dan cara baru dalam masyarakat modern.

Dari sudut pandang teori media, inilah bentuk transformasi nilai luhur ke dalam format dan ekosistem baru tanpa kehilangan substansi moralnya (Pereda et

al., 2025; Pata, 2024). Jenkins (2006) dalam gagasan *convergence culture* mempertegas pentingnya kolaborasi lintas platform agar pesan budaya dapat menyebar secara lebih luas dan partisipatif. Dalam konteks ini, RSP dapat berkembang menjadi konten multiplatform, misalnya versi audio *podcast Pitutur Pamomong*, infografis *pitutur Jawa* di media sosial, atau rubrik daring interaktif yang mengajak pembaca menulis refleksi mereka. Dengan strategi seperti ini, idealisme budaya menemukan bentuk baru yang adaptif terhadap zaman.

Hal ini sejalan dengan gagasan informan Dhoni Zustiyantoro, sastrawan, akademisi, dan penulis tetap di RSP. Baginya, RSP bukan sekedar rubik, melainkan ruang ingatan kolektif budaya Jawa yang sepatutnya diadaptasi ke media digital agar tetap relevan dan mampu menjangkau generasi muda.

Berikut petikan wawancara dengan Dhoni:

“Rubrik ‘Sang Pamomong’ berfungsi sebagai ruang kaderisasi budaya sekaligus arena kritik moral berbasis nilai Jawa. Melalui bahasa pasemon dan refleksi wayang, berupaya menghidupkan kembali fungsi pamomong-menuntun tanpa menggurui, mengingatkan tanpa menyerang. Jadi, pentingnya konsistensi nilai dan etika kepemimpinan (sabdo pandito ratu) sebagai pedoman publik, sekaligus mengingatkan bahwa krisis moral modern disebabkan oleh hilangnya pamomong dalam kehidupan sosial. Akan lebih bagus lagi manakala rubrik ini bisa menjembatani antara idealisme dan tujuan komersil media dan juga tampil di ranah online.” (Wawancara dengan Dhoni, 2020).

Hanya saja, sekitar tahun 2020, RSP tidak tayang di media *online* (suara merdeka.com) karena dianggap jadul, teks panjang, dan tidak sesuai algoritma pasar *online* dan selera Gen Z. Format RSP tayang utuh di *e-paper* berbayar, namun dengan jumlah pelanggan yang terbatas. Kondisi ini membuktikan produksi RSP berbasis jurnalisme budaya ini sangat dipengaruhi oleh tekanan ranah digital.

Pemimpin Redaksi Suara Merdeka.com- Agus Toto W (2024) menjelaskan, RSP memang tidak ditayangkan di *online* karena kontennya tidak sesuai dengan segmentasi audiens dan strategi pasar.

Berikut petikan wawancara dengan Agus Toto:

“Masa masa depan media bergantung pada sinergi antar-platform (cetak, online, media sosial) dan kemampuan media lokal bertransformasi menjadi aktor nasional tanpa kehilangan identitas nilai dan idealismenya. Jurnalisme digital adalah medan baru bagi pamomong modern- yang menuntun masyarakat melalui algoritma, tanpa kehilangan roh kulturalnya.” (Wawancara dengan Agus Toto W, 2024).

Paralel dengan Agus, Kepala Divisi Sosial Media Suara Merdeka, Yolanda (2024) mengakui RSP sama sekali tidak tampil di media sosial resmi dan *podcast* ‘Suara Merdeka’. Alasannya sangat klasik, RSP dianggap tidak sesuai logika algoritma yang sangat diandalkan untuk menghasilkan iklan dari *google adsense*. Selain itu Yolanda juga mengamini bahwa konten RSP dianggap ‘jadul’ alias ketinggalan zaman sehingga tidak menarik minat baca Gen Z.

“Jujur saja RSP tidak sesuai dengan selera pasar, sehingga kami tidak menayangkan di semua platform media sosial maupun *podcast* resmi Suara Merdeka. Bukannya kami tidak peduli untuk berpartisipasi dalam mengawal dan melestarikan budaya melalui rubrik ini (RSP-red), namun kami juga harus realitas dengan kondisi pasar. Karena bagaimana pun bisnis media ya bisnis yang berorientasi pada pasar untuk menghasilkan profit melalui komodifikasi sejumlah konten yang kami kelola.” (Wawancara dengan Yolanda, 2024).

Tantangan ketiga yang dihadapi RSP berkaitan kaderisasi pembaca. Sebagian besar pelanggan koran ‘Suara Merdeka’ berusia sepuh dan sebagian sudah wafat, namun tradisi membaca koran tidak berlanjut ke level anak, cucu dan seterusnya. Hal ini sebagai imbas dari pergeseran minat baca dan pola konsumsi

(*media habit* dan *media use*). Jika pun RSP tetap bertahan, kemungkinan besar yang setia membaca yakni dari jajaran redaksi ‘Suara Merdeka’ itu sendiri termasuk penulis internal selain penulis eksternal yang artikelnya terbit di RSP maupun yang memang menjadi ‘pembaca setia’.

Setiawan Hendra Kelana, informan yang juga Sekretaris Redaksi Harian ‘Suara Merdeka’ mengakui kondisi dilematis (kelangsungan pembaca RSP) pada titik tertentu bisa jadi secara riil akan tidak ada lagi yang membaca RSP.

“Jika memang (RSP) tetap dipertahankan, harus bisa diperkirakan bahwa rubrik ini memang tetap ada yang baca. Kan *eman-eman* banget sudah disediakan satu halaman full tapi gimana? Jika dialokasikan untuk iklan, kan sudah berapa itu pendapatan dari iklan? Tapi ternyata yang baca bukan pembaca secara riil, paling *banter* yang baca rubrik ini (RSP-red) dari pengasuh rubrik atau kerabat atau penulis internal, selain dari penulis eksternal yang tulisannya dimuat. Selebihnya, tidak ada yang baca. Dengan kondisi ini harus difikirkan ke depannya, terlebih bisnis media tidak terlepas dari *profit taking* untuk kelangsungan media ini sendiri.” (Wawancara dengan Setiawan Hendra Kelana, 2024).

Tantangan keempat RSP adalah kemampuan sumber daya manusia (SDM) di jajaran redaksi ‘Suara Merdeka’ dalam hal kompetensi di bidang sastra Jawa untuk secara rutin mengisi halaman RSP- sehingga tidak tergantung pada penulis eksternal. Sejak tahun 2020, pengasuh RSP sebagian pensiun sehingga SDM semakin berkurang. Kondisi ini diakui Pemimpin Redaksi, Triyanto Triwikromo (2023) bahwa SDM di ‘Suara Merdeka’ yang berkompetensi di bidang sastra Jawa memang sangat terbatas. Kendati sebenarnya seorang wartawan harus *all out* dalam menguasai bidang jurnalistik di mana pun ditempatkan bertugas.

“Betul, kami terbatas wartawan di bidang sastra Jawa. Tapi sebenarnya di era modern ini, wartawan tak lagi ada sekat-sekat melalui desk. Prinsipnya wartawan harus selalu ‘siap tempur’ termasuk untuk mengisi halaman sang

pamomong. Menyiasati keterbatasan ini, sekitar tahun 2015 ke atas, kami memang boleh dikatakan mengandalkan penulis eksternal untuk mengisi HL (tulisan utama-red), termasuk untuk versi bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.” (Wawancara dengan Triyanto Triwikromo, 2023).

Tantangan kelima merupakan tantangan paling krusial adalah keberlangsungan RSP sebagai bagian dari konten Harian ‘Suara Mereka’. Secara faktual, rubrik ini tidak berfungsi sebagai penghasil iklan maupun pendorong sirkulasi surat kabar. Pengamatan peneliti menunjukkan bahwa iklan hanya muncul secara terbatas pada masa awal penerbitan, seperti iklan otomotif berwarna pada Januari 1997 dan iklan bioskop hitam putih pada 1998. Sedangkan pada periode selanjutnya hingga kini, RSP hampir sepenuhnya bebas dari iklan.

Kondisi tersebut diakui oleh Senior Manager Sales Product (Sirkulasi) Suara Merdeka, M. Eko Fitrianto, yang menyatakan bahwa RSP tidak signifikan secara ekonomis. Dalam konteks krisis industri surat kabar, sekitar tahun 2017 muncul dorongan dari manajemen untuk mengevaluasi rubrik-rubrik berdasarkan kontribusi ekonominya, termasuk wacana pengurangan halaman atau penghapusan rubrik demi efisiensi biaya operasional.

Berikut penjelasan M. Eko Fitrianto:

“RSP memang bukan rubrik produktif sebagai sumber pendapatan iklan bagi suara merdeka. Rubrik ini juga tidak signifikan mendongkrak sirkulasi. Sehingga sekitar tahun 2017 ada desakan dari pihak manajemen agar RSP dievaluasi supaya kontennya bisa bernilai ekonomis. Manajemen dalam rapat redaksi membahas rubrik-rubrik mana saja yang positif (menghasilkan iklan) dan sebaliknya. Seiring krisis surat kabar, manajemen melakukan evaluasi terhadap redaksi melalui konten-konten yang dihasilkan dan memang harus dilakukan pengurangan halaman maupun penghapusan rubrik-rubrik tertentu dengan pertimbangan untuk efisiensi biaya operasional.” (Wawancara dengan M. Eko Fitrianto, 2024).

Namun, usulan penghapusan RSP mendapat penolakan tegas dari Wakil Pemimpin Redaksi Suara Merdeka, Triyanto Triwikromo. Baginya, RSP bukan sekadar rubrik, melainkan identitas kultural yang membedakan ‘Suara Merdeka’ dari media lokal lainnya. Ia menegaskan bahwa rubrik ini lahir dari perjuangan jurnalistik dan kegelisahan moral untuk merawat etika, nilai luhur, serta kearifan budaya Jawa di tengah arus globalisasi.

Berikut penegasan Triyanto Triwikromo:

“Saya yang paling menentang RSP dihapus. Silakan rubrik ini dievaluasi, tapi jangan sampai rubrik ini hilang sama sekali. Dalam dunia yang semakin menglobal, pertahanan bangsa melalui kearifan budaya sepatutnya menjadi atensi khusus bagi para pihak. Termasuk di kalangan institusi media yang sepatutnya sebagai garda terdepan dalam melestarikan budaya untuk diwariskan ke antar generasi. Serta sebagai pengawas sosial (*watchdog function*) berbasis kaidah jurnalistik dan semacam itu.” (Wawancara dengan Triyanto Triwikromo, 2023).

Pandangan serupa disampaikan oleh Bambang Sadono, penggagas RSP, yang menempatkan rubrik ini sebagai suplemen nonkomersial sekaligus sebagai ekspresi idealisme media dalam menjalankan tanggung jawab sosial-kulturalnya. Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal RSP diposisikan bukan semata sebagai produk jurnalistik, melainkan sebagai ruang praktik simbolik yang memuat nilai, refleksi, dan orientasi kultural tertentu.

Jika dicermati melalui perspektif McManus (1994) dalam Rianto (2015) mengenai kecenderungan jurnalisme modern yang semakin dipengaruhi oleh pertimbangan pasar (*market-driven journalism*), keberadaan RSP sebagai bagian dari proses penyesuaian redaksional dalam lanskap industri media yang terus berubah. Dalam konteks ini, logika ekonomi media dan idealisme redaksional tidak

diposisikan secara *head to head*, melainkan hadir berdampingan sebagai kerangka yang saling membingkai praktik produksi jurnalistik. Melalui cara ini, jurnalisme tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai *laku* kebudayaan yang berperan merawat memori budaya bersama (ingatan kolektif).

Dengan pemahaman tersebut, meskipun RSP menghadapi berbagai tantangan struktural, rubrik ini tetap memiliki peluang untuk terus hadir di ruang publik. Peluang tersebut terbuka sejauh RSP mampu mengelola dan menyesuaikan diri dengan dinamika yang melingkupinya, sehingga keberadaannya tetap relevan dan bermakna bagi pembaca, meskipun jumlah khalayak yang dijangkau cenderung terus menyusut.

Atas pertimbangan tersebut, salah satu peluang RSP adalah menggunakan strategi penggunaan nilai budaya sebagai bentuk *local branding* (Astari et al., 2025). Dengan mengklaim sebagai '*korane wong Jawa Tengah*', '*Suara Merdeka*' memanfaatkan RSP untuk memperkuat *positioning* di tengah kompetisi dengan '*Kompas*' Jawa Tengah, '*Jawa Pos*', dan '*Tribun*'. Dalam hal ini, idealisme budaya dijadikan diferensiasi pasar, sesuatu yang tidak dimiliki oleh media lain (Cayla & Arnould, 2008).

Tidak bisa dielakkan, idealisme yang bertransformasi secara riil harus tetap kreatif dan inovatif. Dalam wawancara dengan informan Widodo Wikandana (2024) muncul kesadaran bahwa nilai luhur tidak dapat langsung diinternalisasi, tetapi membutuhkan proses pengendapan makna. Oleh karena itu, RSP tidak hanya menyampaikan pesan moral, tetapi juga berperan sebagai penanda budaya yang kelak dapat dijumpai kembali oleh generasi muda ketika mereka '*bernostalgia*

dengan masa lalunya' (Manžuch, 2017). Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Deuze (2005) yang menunjukkan jurnalisme memiliki peran penting dalam menumbuhkan *sense of community* ataupun *spirit of community* yakni rasa keterikatan individu dengan komunitas serta identitas kulturalnya. Upaya tersebut merefleksikan bentuk nyata dari *adaptive journalism* (Sánchez et al., 2019).

Atas dasar itulah, 'Suara Merdeka' melalui RSP dapat terus menjadi model jurnalistik budaya yang adaptif, edukatif, dan humanis, sekaligus menjaga relevansi filosofis *Hasta Brata* dalam konteks media modern.

Mengutip hasil penelitian disertasi Olsen (2019), bahwa koran lokal sepatutnya mampu menciptakan nilai sosial, kultural dan demokratis bagi komunitasnya di tengah tekanan digitalisasi. Untuk itu, keberlanjutan media lokal selain tergantung pada ekonomi, juga pada hubungan sosial dan kepercayaan dengan masyarakat/pembaca. Menyikapi hal ini, koran lokal sejatinya mampu menciptakan 'nilai' yakni memperkuat identitas lokal, menjaga budaya, serta menjalankan fungsi pengawasan sosial, termasuk *watchdog journalism*.

Dengan demikian, produksi RSP selama periode 1996–2020 menunjukkan rubrik ini berfungsi sebagai arena konstruksi makna kepemimpinan dan refleksi sosial-budaya yang dinamis. Penelitian Barnard (2018) menyimpulkan, jurnalisme bukan sekedar profesi tetapi sebagai hasil konstruksi sosial yang terus berkembang. Dalam konteks ini, setiap produksi RSP mulai periodisasi 1996-1998, periode jeda (1999–2000), periodisasi 2000-2010, hingga periodisasi 2011-2020 memperlihatkan bagaimana praktik jurnalistik berbasis budaya dibentuk melalui interaksi antara habitus aktor, modal kultural, modal sosial, dan modal simbolik.

Habitus pengasuh RSP maupun penulis eksternal tidak hadir secara spontan, melainkan terbentuk melalui proses internalisasi budaya Jawa, pengalaman sastra, serta orientasi etis yang merujuk pada filosofi *Hasta Brata*.

Proses pembentukan habitus tersebut sejalan dengan temuan Yoedtadi dan Salman (2023) bahwa nilai budaya yang dihayati sejak kecil kehidupan berperan penting dalam membentuk cara pandang dan praktik jurnalis. Dalam konteks RSP, internalisasi nilai budaya tersebut mendorong praktik jurnalistik yang menekankan toleransi, keharmonisan sosial, serta refleksi etis dalam menyikapi realitas sosial. Habitus tersebut tidak hanya membentuk orientasi moral individu pengasuh dan penulis, tetapi juga mewujud dalam struktur kognitif yang mengarahkan proses pengambilan keputusan editorial dalam produksi rubrik.

Struktur kognitif aktor RSP beroperasi dalam jaringan pengaruh yang lebih luas sebagaimana dijelaskan dalam hierarki pengaruh isi media lima level Shoemaker dan Reese (1996, 2014). Sejalan dengan Bro (2018), Sudibyo (2009), serta Makwambeni dan Trust (2023), produksi RSP dipengaruhi lapisan struktural yang saling terkait: rutinitas media membentuk format narasi, level individu menentukan pilihan isu dan internalisasi nilai lokal, level organisasi mengatur kebijakan redaksi, level ekstra-media mencakup tekanan politik dan disrupsi digital, sementara pada level ideologi, nilai *Hasta Brata* berfungsi sebagai ‘kompas moral’ produksi konten.

Kerangka pengaruh yang berlapis tersebut diinternalisasi oleh para aktor dan bekerja sebagai struktur kognitif dalam rutinitas praktik jurnalistik. Pada tataran praktik, struktur kognitif ini berfungsi sebagai kerangka pemaknaan yang

membimbing pemilihan isu, pengembangan narasi, serta penggunaan simbol-simbol budaya sebagai sarana refleksi publik (Bourdieu, 1993; Bourdieu & Wacquant, 1992). Dengan demikian, konten RSP sebagai hasil konstruksi makna yang lahir dari rahim ‘interaksi berkelanjutan antara habitus, modal, dan konteks sosial yang melingkupinya’.

Dalam lintasan historisnya, temuan ini memperlihatkan RSP mempertahankan orientasi etis di tengah perubahan konteks sosial-politik dan media. Sejak pembatasan ekspresi di era Orde Baru, terbukanya ruang kritik pasca-reformasi, hingga tuntutan adaptasi di era disrupsi digital, RSP tetap berfungsi sebagai sarana konstruksi makna kolektif tentang kepemimpinan ideal dan refleksi sosial-politik. Dalam pengertian ini, RSP sebagai praktik jurnalisme budaya yang melibatkan distribusi simbol, legitimasi makna, serta pembentukan nilai moral di ruang publik.

Berdasarkan praktik tersebut, produksi RSP memperlihatkan interaksi antara habitus Jawa, modal simbolik, modal kultural, modal sosial, serta peran kurasi pengasuh rubrik dalam setiap fase produksi. Kritik sosial disampaikan secara halus dan kontekstual, seraya tetap menginternalisasi nilai *Hasta Brata*. Pada saat yang sama, dinamika honorarium, loyalitas penulis, serta tekanan pasar digital menjadi bagian dari struktur ranah jurnalistik kontemporer yang memengaruhi proses produksi, tanpa menghilangkan orientasi nilai yang diusung rubrik ini.

Secara keseluruhan, RSP bukan sekadar wahana publikasi artikel budaya, melainkan ruang praktik jurnalistik yang merefleksikan sinergi antara agen dan struktur. RSP menjadi contoh empiris bagaimana habitus, modal, dan struktur

media bekerja secara simultan dalam menghasilkan konten yang humanis, etis, dan reflektif. Temuan ini sekaligus memperlihatkan relevansi teori praktik Bourdieu serta kerangka hierarki pengaruh isi media dalam memahami dinamika produksi jurnalisme budaya di media lokal.

Dalam konteks tersebut, RSP sebagai *pamomong* yang membimbing masyarakat melalui narasi reflektif dan nilai budaya (Siregar et al., 2022). Keberlanjutan rubrik ini menunjukkan potensi media lokal sebagai ruang kontinuitas budaya dan refleksi sosial. Potensi tersebut tercermin dari kemampuan RSP beradaptasi terhadap perubahan zaman, tanpa harus dipahami semata-mata melalui dikotomi antara kepentingan pasar dan kepentingan publik.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan kajian pada konstruksi nilai kepemimpinan *Hasta Brata* dalam Rubrik ‘Sang Pamomong’ (RSP) di Harian ‘Suara Merdeka’ (1996-2020) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Hasil analisis tematik RSP periodisasi 1996–2020 dari 48 artikel menunjukkan enam kategori tema: krisis kepemimpinan, filosofi kepemimpinan *Hasta Brata*, harapan terhadap pemimpin ideal, kemenangan beretika, kaderisasi kepemimpinan, serta persepsi publik terhadap pemimpin. Dari keseluruhan tema tersebut, krisis kepemimpinan tampil paling dominan secara akumulatif dan hadir di seluruh periode. Dominasi ini menegaskan bahwa isu kepemimpinan sebagai isu sentral dan menjadi persoalan penting yang terus ‘dikawal’ dan dikonstruksi redaksi dalam merespons dinamika sosial-politik bangsa. Pada periode awal 1996–1998, pembahasan krisis kepemimpinan diikuti oleh tema yang menghadirkan rujukan nilai dan figur kepemimpinan Jawa, seperti pemimpin ideal, dan filosofi *Hasta Brata*. Periode 1999–Februari 2000 menempati posisi krusial meskipun RSP tidak terbit. Ketiadaan ini mencerminkan tekanan ekonomi media dan pergeseran orientasi jurnalistik pascareformasi yang menyempitkan ruang bagi rubrik reflektif-kultural. Memasuki periode 2000–2010, dominasi krisis kepemimpinan tetap

bertahan, disertai penguatan tema kemenangan beretika, pemimpin ideal, filosofi *Hasta Brata*, dan persepsi publik. Konstruksi ini menandai perhatian pada bagaimana kepemimpinan dijalankan dan dinilai secara sosial. Pada periode 2011–2020, tema krisis kepemimpinan semakin menguat secara kuantitatif, diiringi kemunculan tema kaderisasi kepemimpinan yang menandakan perhatian pada keberlanjutan dan regenerasi kepemimpinan. Secara keseluruhan, dominasi tematik krisis kepemimpinan, filosofi *Hasta Brata*, dan harapan terhadap pemimpin ideal membentuk fondasi refleksi RSP. Temuan ini menunjukkan adanya *gap* antara nilai luhur kepemimpinan Jawa dan praktik kepemimpinan nasional sejak era Soeharto hingga pemerintahan Joko Widodo.

- Produksi RSP sepanjang 1996–2020 menunjukkan perubahan konfigurasi aktor, mekanisme kerja, dan dukungan sumber daya, tanpa meninggalkan kesinambungan orientasi kultural dan etis. Pada fase awal 1996–1998, produksi RSP bersifat terpusat dan personal. Pengasuh rubrik berperan sebagai penulis internal sekaligus penentu arah nilai, dengan praktik jurnalistik budaya yang reflektif dan bertumpu pada pengalaman kultural serta kedalaman tradisi Jawa. RSP tidak terbit pada periode 1999–2000. Ketidakhadiran ini mencerminkan keterbatasan produksi jurnalistik berbasis nilai dalam situasi krisis moneter dan transisi pascareformasi. Tekanan ekonomi dan perubahan prioritas redaksional menyempitkan ruang bagi rubrik reflektif, sehingga habitus kultural pengelola menghadapi hambatan struktural yang kuat, sementara modal simbolik rubrik belum

cukup menopang keberlanjutannya. Memasuki periode 2000–2010, produksi RSP berkembang secara kolaboratif melalui keterlibatan penulis eksternal berlatar budaya Jawa. Pengasuh rubrik menjalankan fungsi kuratorial untuk menjaga kesinambungan nilai dan gaya refleksi. Pada periode 2011–2020, produksi RSP sepenuhnya ditopang oleh jejaring penulis eksternal. Sejak awal 2019, penghentian honor menggeser dasar keberlanjutan rubrik dari relasi profesional berbasis insentif ekonomi menuju loyalitas kultural dan komitmen etis. Kedekatan personal, kepercayaan, dan kesamaan orientasi nilai memperkuat modal sosial pengasuh rubrik dalam menjaga kesinambungan produksi. Relasi yang dibangun antara pengasuh rubrik, penulis internal–eksternal, dan khalayak membentuk ekosistem kultural yang saling menopang, sehingga RSP tetap terbit, terjaga orientasi nilainya, dan relevan dengan perkembangan zaman.

- Rubrik ‘Sang Pamomong (RSP)’ mengimplementasikan fungsi sosial pers melalui praktik jurnalisme budaya yang humanis dan berakar pada nilai lokal. Pertama, RSP berfungsi sebagai penyaji informasi bernilai yang disusun sesuai kaidah jurnalistik, sekaligus berperan sebagai pengawal moral dan pewaris nilai budaya Jawa. Setiap tulisan tidak berhenti pada penyampaian fakta, tetapi mendorong pembaca memahami persoalan sosial dan merawat nilai kepemimpinan *Hasta Brata* sebagai ‘jangkar etis’ dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, RSP berfungsi sebagai ruang publik kultural dan representasi sosial masyarakat, menghadirkan pengalaman, kegelisahan, dan refleksi kolektif melalui simbol, metafora, serta narasi

budaya yang dekat dengan keseharian pembaca. Ketiga, RSP menjalankan fungsi pengawasan sosial secara etis dan reflektif, menyampaikan kritik dan pesan moral melalui bahasa *pasemon*, kisah wayang, dan *pitutur* luhur, sehingga nilai etis dapat dihayati tanpa kesan menggurui. Melalui ‘jurnalisme *pamomong*’ yang konsisten ‘mengemong’ pembaca, RSP menegaskan praktik jurnalistik yang bertanggung jawab secara sosial, selaras dengan semangat ‘Suara Merdeka’ sebagai ‘Perekat Komunitas Jawa Tengah’. Keberlanjutan RSP bertumpu pada konsistensi dalam meneguhkan fungsi sosial pers berbasis kearifan lokal agar tetap relevan di tengah perubahan zaman.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Teoritis

- Perlu pengembangan kajian jurnalistik berbasis nilai-nilai lokal untuk memperkaya model jurnalisme budaya dalam menjalankan fungsi sosial pers terutama fungsi pengawasan sosial, di luar paradigma Barat.
- Konsep jurnalistik *pamomong* dapat menjadi kerangka teoretis dalam kajian komunikasi budaya khususnya dalam lingkup media lokal di Indonesia.
- Pendekatan konstruksi sosial dan skema budaya perlu digunakan secara lebih luas dalam studi media lokal karena mampu menjelaskan bagaimana media membentuk makna, nilai, dan orientasi sosial masyarakat melalui praktik simbolik yang berakar pada pengalaman kultural, sejarah lokal, serta dinamika kehidupan sehari-hari pembacanya.

6.2.2 Saran Praktis

- Redaksi media lokal dapat mengembangkan pendekatan jurnalistik yang memadukan profesionalisme dengan kearifan lokal.
- Jurnalis sebaiknya diberi pelatihan untuk memahami dan menarasikan nilai-nilai budaya lokal tanpa kehilangan daya kritisnya.
- Rubrik-rubrik bernuansa edukatif dan kultural seperti ‘Sang Pamomong’ perlu dikembangkan sebagai penyeimbang di tengah derasnya arus berita sensasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. W. (2014). *Ensiklopedia Kearifan Jawa*. Araska.
- Ahmed, S. K., Mohammed, R. A., Nashwan, A. J., Ibrahim, R. H., & Khdhir, R. M. (2025). Using thematic analysis in qualitative research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 6.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2025.100198>.
- Andani, A. A., & Birsyada, M. I. (2024). Perkembangan Pers Indonesia Sebagai Identitas Bangsa Pada 1945-1998. *JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES "ESTORIA"*, 4(2).
<https://journal.unindra.ac.id/index.php/estoria/article/view/2720>
- Anderson, C. (2012). Between creative and quantified audiences: Web metrics and changing patterns of newswork in local US newsrooms. *Journalism*, 12(5), 550–566. <https://doi.org/10.1177/1464884911402451>
- Andriyani, K. (2015). Budaya, Identitas dan Media Lokal. *Jurnal Komunikasi PROFETIK*, 8(2).
- Anom, E., & Waluyo, D. (2011). Model dan Sistem Mengontrol Media di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 2(1), 27–44.
<https://media.neliti.com/media/publications/233725-model-dan-sistem-mengontrol-media-di-ind-0cd9db7f.pdf>
- Arnus, S. H. (2015). Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia. *Jurnal Al-Munzir*, 8(1), 103–113.
- Astari, A. R., Shilfa, I., Aulia, O. A., Hanafiah, T., & Purwanto, E. (2025). Strategi Branding Budaya dalam Media Digital oleh Pemerintah Daerah. *Journal of Technology and System Information*, 2(3), 1–12.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47134/jtsi.v2i3.4334>
- Barnard, S. R. (2018). The Journalistic Field in a Time of Mediatization. In *Citizens at the Gates*. Springer International Publishing.
- Benson, R. (2006). News Media as a “Journalistic Field”: What Bourdieu Adds to New Institutionalism, and Vice Versa. *Political Communication*, 23(2), 187–202. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10584600600629802>
- Benson, R., & Neveu, E. (2010). *Bourdieu and the Journalistic Field*. Polity Press.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Terjemahan LP3ES*. LP3ES.
- Biernacka-Ligieza, I. (2013). Journalists in local newspaper – traditional press missionaries or digital media workers? *I Congreso Internacional De Comunicacion Y Sociedad Digital*.
- Boughen, R. (2023). *Sino-African journalism and journalistic fields: CGTN Africa's workers between worlds. Dissertation. University of Westminster, Inggris*. University of Westminster, Inggris.
- Bourdieu, P. (1993a). *The Field and Cultural Production: Essays on Art and*

- Literature*. Polity Press.
- Bourdieu, P. (1993b). *The Rules of Art*. Polity Press.
- Bourdieu, P. (1998). *On Television*. New Free Press.
- Bourdieu, P. (2010). *The Field of Cultural Production. Essay of Arts and Literature*. Diterjemahkan oleh Yudi Santosa. Kreasi Wacana.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology*. Polity Press.
- Bratawijaya, T. W. (1997). *Mengungkap dan Mengenal Budaya Jawa*. Pradnya Paramita.
- Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, 56.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y>
- Carey, J. W. (2009). *Communication as culture: Essays on media and society* (Rev. ed.). Routledge.
- Casero-Ripollés, A. (2012). Beyond Newspapers: News Consumption among Young People in the Digital Era. *Comunicar*, 1134–3478.
<https://doi.org/DOI: 10.3916/C39-2012-03-05>
- Cayla, J., & Arnould, E. J. (2008). A Cultural Approach to Branding in the Global Marketplace. *Journal of International Marketing*, 16(4), 86–112.
- Chika, U., & Ugochi, M. (2016). Language use and the media: preserving the African values. *Journal of Religion and Human Relations*, 8(1), 230–245.
- Christou, P. A. (2023). How to use thematic analysis in qualitative research. *Journal of Qualitative Research in Tourism, Advance Access*.
<https://doi.org/10.4337/jqrt.2023.0006>
- Croteau, D., & Hoynes, W. (2006). *The Business of Media. Corporate Media and the Public Interest*. Pine Forge Press.
- Danzon-Chambaud, S., & Cornia, A. (2023). Changing or Reinforcing the “Rules of the Game”: A Field Theory Perspective on the Impacts of Automated Journalism on Media Practitioners. *Journalism Practice*, 17(2), 174–188.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17512786.2021.1919179>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research. Penerjemah: Dariyatno, dkk* (cetakan ke). Pustaka Pelajar.
- Deuze, M. (2005). What is journalism? Professional identity and ideology of journalists reconsidered. *Journalism*, 6(4), 442–464.
<https://doi.org/10.1177/1464884905056815>
- Djuroto, T. (2022). *Manajemen Penerbitan Pers*. Remaja Rosdakarya.
- Dlamini, T. (2023a). *Newsroom Culture and Journalistic Practice at the South African Broadcasting Corporation (SABC): An Ethnographic study by A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy in Journalism and Me*. September.
<https://wiredspace.wits.ac.za/items/27054dc7-e7e4-427a-bee1-5a0ac5d34332>
- Dlamini, T. (2023b). *Newsroom Culture and Journalistic Practice at the South African Broadcasting Corporation (SABC): An Ethnographic study. Dissertation*.
- Dunne, S. (2017). *Policing the Press: The Institutionalisation of Independent Press Regulation in a Liberal/North Atlantic Media System. Dissertation*.

- Effendy, O. U. (1989). *Kamus Komunikasi*. Mandar Maju.
- Ehrlén, V., Talvitie-Lamberg, K., Salonen, M., Koivula, M., Villi, M., & Uskali, T. (2023). Confusing Content, Platforms, and Data: Young Adults and Trust in News Media. *Media and Communication*, 11(4), 320–331. <https://doi.org/https://doi.org/10.17645/mac.v11i4.7104>
- Endraswara. (2016). *Memayu Hayuning Bawana. Laku Menuju Keselamatan dan Kebahagiaan Hidup Orang Jawa*. Narasi.
- Endraswara, S. (2018). *Falsafah Hidup Jawa. Menggali Mutiara Kehidupan dari Intisari Filsafat Kejawaen*. Cakrawala.
- Fadillah, M., Nurbalqis, A., & Agustina, L. (2022). Pengaruh Konten Digital Terhadap Generasi Gen Z dalam Pemanfaatan Media Sosial dan Digital Native di Kota Tanjungpinang. *Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Pendidikan*, 4(2).
- Geertz, C. (1981). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Pustaka Jaya.
- Hall, S. (1996). *Cultural Identity and Diaspora*. Arnold.
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Granit.
- Hanusch, F. (2013). CULTURAL FORCES IN JOURNALISM. The impact of cultural values on Māori journalists' professional views. *Journalism Studies*, 16(2), 1–16. <https://doi.org/DOI:10.1080/1461670X.2013.859864>
- Harcup, T. (2023). The Struggle for News Value in the Digital Era. *Journalism and Media*. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/journalmedia4030058>
- Harker, R., Mahar, C., & Wilkes, C. (1990). *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik. Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu. Diterjemahkan oleh Pipit Maizier*. Jalasutra.
- Hartley, J. M. (2018). 'It's Something Posh People Do': Digital Distinction in Young People's Cross-Media News Engagement. *Media and Communication*, 6(2), 46–55. <https://doi.org/DOI: 10.17645/mac.v6i2.1322>
- Heikkilä, R., & Lauronen, T. (2018). The crisis of cultural journalism revisited: The space and place of culture in quality European newspapers from 1960 to 2010. *European Journal of Cultural Studies*, 21(6), 669–686. <https://doi.org/DOI: 10.1177/1367549416682970>
- Herman, E. S., & Chomsky, N. (2008). *Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media*.
- Herusatoto, B. (1987). *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. hanindita.
- Hidayat, D. R. (2012). *Komitmen Budaya Televisi Swasta Lokal Dalam Program Siaran: Studi Tentang Komitmen Budaya dan Komersialisasi Program Siaran Budaya Pada TV Swasta di Bandung*. Disertasi. Universitas Padjadjaran.
- Imron, Sariyatun, & Yuniato, T. (2016). Pembredelan Pers Pada Masa Pemerintahan Orde Baru dan Relevansinya Bagi Mata Kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir. *Candi*, 3(1), 143–159.
- Islamiyah, A. B., Ningsih, S. E., Rahmawati, A. D., Setiawan, A. F., & Purwanto, E. (2025). Media Tradisional vs Media Baru dalam Mempromosikan Budaya Berkelanjutan. *CONVERSE: Journal Communication Science*, 2(1), 1–13.

- Jaakkola, M. (2015). *The Contested Autonomy of Arts and Journalism The Contested Autonomy of Arts and Journalism Change and continuity in the dual professionalism*. <https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/97272/978-951-44-9849-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Jaakkola, M. (2015). *The Contested Autonomy of Arts and Journalism Change and Continuity in The Dual Professionalism of Cultural Journalism*. University of Tampere, Finlandia.
- Jenkins, H. (2006). *Convergenca Culture. Where Old & New Media Collide*.
- Kersten, A., & Janssen, S. (2017). Trends in Cultural Journalism The Development of Film Coverage in Cross-National Perspective. *Journalism Practice*, 11(7), 840–856. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/17512786.2016.1205955>
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Balai Pustaka.
- Krisdinanto, N. (2018). *Runtuh Dari Dalam. Serangan Komersialisasi terhadap Pagar Api Jurnalistik di Indonesia*. Disertasi. Universitas Airlangga.
- Kristensen, N. N., & Riegert, K. (2017). Why Cultural Journalism in the Nordic Countries? In *Cultural Journalism in the Nordic Countries*. Nordicom. <https://www.nordicom.gu.se/en/publications/cultural-journalism-nordic-countries>
- Lindell, J., Jakobsson, P., & Stiernstedt, F. (2019). The Field of Television Production: Genesis, Structure and Position- Takings. *Journal Poetics*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304422X19302700>
- Maares, P., & Hanusch, F. (2022). Interpretations of the journalistic field: A systematic analysis of how journalism scholarship appropriates Bourdieusian thought. *Journalism Studies*, 23(4), 736–754. <https://doi.org/DOI:10.1177/1464884920959552>
- Machmud, A. (2010). *Arus Generasi Pengemas Informasi*. Mascscm Graphy.
- Magnis-Suseno, F. (2001). *Etika Jawa. Sebuah Analisis Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Gramedia Pustaka Utama.
- Makwambeni, B., Matsilele, T., & Msimanga, M. J. (2023). Through the Lenses of the Sociology of News Production: An Assessment of Social Media Applications and Changing Newsroom Cultures in Lesotho. *Journal of Asian and African Studies*, 1–15. <https://doi.org/DOI:10.1177/00219096231179661>
- Manžuch, Z. (2017). Ethical Issues In Digitization Of Cultural Heritage. *Journal of Contemporary Archival Studies*, 4.
- Marlierre, P. (1998). The Rules of Journalistic Field. Pierre Bourdieu's Contribution to the Sociology of the Media. *European Journal of Communication*, 13(2), 219–234.
- Maryani, E., Karlinah, S., & Rahmawan, D. (2018). The Sustainability of Local Media Within the Domination of National Media Industry. *E3S Web of Conference*. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201873>
- McQuail, D. (2010). *Teori Komunikasi Massa*. Penerjemah: Putri Iva Izzati. (Edisi ^ B). Salemba Humanika.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muktiyo, W. (2011). *Dinamika Media Lokal Dalam Mengkonstruksi Realitas*

- Budaya Lokal Sebagai Sebuah Komoditas*. UNS Press.
- Mulyana, D. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, S. (1982). *Wayang. Asal-usul, Filsafat dan Masa Depan*. Inti Idayu Press.
- Munnik, M. B. (2018). A Field Theory Perspective on Journalist–Source Relations: A Study of ‘New Entrants’ and ‘Authorised Knowers’ among Scottish Muslims. *Journal Sociology*, 52(6), 1169–1184.
<https://doi.org/10.1177/0038038517696220>
- Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2023). A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22.
<https://doi.org/DOI: 10.1177/16094069231205789>.
- Nahak, F. M. (2018). Role of Media in Preserving of Culture: A comparative analysis of primetime news bulletins of two regional TV Channels. *Pramana Research Journal*, 8(7), 280–292.
- Nielsen, R. K. (2015). Introduction: The Uncertain Future of Local Journalism. In *Local Journalism: The Decline of Newspapers and The Rise of Digital Media*. IB Tauris.
- Nurlaila, C., Aini, Q., Setyawati, S., & Laksana, A. (2024). Dinamika Perilaku Gen Z Sebagai Generasi Internet. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(6).
- Oliveira, A. F., Carvalho, M. J. L. de, & Sousa, C. (2024). Young People’s Diversity and Digital Media: A Systematic Review (2010–2022). *Media and Communication*, 12. <https://doi.org/https://doi.org/10.17645/mac.8237>
- Olsen, R. K. (2019a). *The Value of Local News Unpacking Dynamics of Local Newspapers’ Value Creation for Audiences and Society. Dissertation*.
- Olsen, R. K. (2019b). *The value of local news Unpacking dynamics of local newspapers’ value creation for audiences and society. December*.
<https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2987952>
- Örnebring, H., Karlsson, M., Fast, K., & Lindell, J. (2018). The Space of Journalistic Work: A Theoretical Model. *Communication Theory*, 1–21.
<https://doi.org/doi:10.1093/ct/qty006>
- Oso, L., Adeniran, R., & Arowolo, O. (2024). Journalism ethics- the dilemma, social and contextual constraints. *Cogent Social Sciences*, 10(1).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2328388>
- Pata, K. (2024). Cultural Resilience Practices in the Digital Heritage Ecosystem. *KUI Conference Culture and Computer Science --From Humanism to Digital Humanities (KUI 2024)*.
- Pawito. (2014). Meneliti Ideologi Media: Catatan Singkat. *Jurnal Komunikasi PROFETIK*, 7(1). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/profetik/article/view/1111/1024>
- Pearson, H., Myall, M., Darlington, A.-S., & Gibson, F. (2025). The approach and application of analysing inductive and deductive datasets: a worked example using reflexive thematic analysis. *QUALITATIVE RESEARCH IN PSYCHOLOGY*, 22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14780887.2025.2499265>

- Pereda, J., Willcox, P., Candela, G., Sanchez, A., A, P., & Murrieta-Flores. (2025). Online cultural heritage as a social machine: a socio-technical approach to digital infrastructure and ecosystems. *International Journal of Digital Humanities*, 7, 39–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s42803-025-00097-6>
- Planer, R., Godulla, A., Seibert, D., & Pietsch, P. (2022). Journalistic Quality Criteria under the Magnifying Glass: A Content Analysis of the Winning Stories of World Press Photo Foundation's Digital Storytelling Contest. *Journalism and Media*, 3, 594–614. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/journalmedia3040040>.
- Realgo, B. R. (2023). Understanding the Practices of Cultural Heritage Reporters. *Southeast Asian Media Studies Journal*, 5(1).
- Rewira, A. E. (2024). Jurnalistik: Antara Jurnalisme dan Idealisme di Tengah Pusaran Dinamika Global. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 22(2).
- Rianto, P. (2015). Jurnalisme dalam Tatanan Neoliberal dan Krisis Demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2003). *Teori Sosiologi Modern edisi ke-6*. Diterjemahkan oleh Alimandan. Prenada Media.
- Roza, A. (2022). Title Page Data Journalism in Indonesia in the Time of Hoaxes Certificate of Original Authorship. <https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/167731/2/02whole.pdf>
- Saifuddin, A. F. (2016). Membaca Teori Pierre Bourdieu: Suatu Catatan Pengantar. In *Pierre Bourdieu. Menyingkap Kuasa Simbolik*. Jalasutra.
- Salem, M. A. M. (2025). *Commercial Pressures and Editorial Independence: Egyptian Journalists' Perception of Advirtiser Influence In Contemporary Media*. Universitat Autònoma de Barcelona,.
- Sánchez, J. L. M., Ruiz, M. J. U., & Casa, J. M. H. de la. (2019). Journalistic innovation and digital society: An adaptation of journalism studies. *Revista Latina de Comunicación Social*, 74, 1633–1654. <https://doi.org/DOI:10.4185/RLCS-2019-1402en>
- Sandriester, J., Harfst, J., Kern, C., & Zuanni, C. (2025). Digital Transformation in the Cultural Heritage Sector and Its Impacts on Sustainable Regional Development in Peripheral Regions. *Sustainability -MDPI*, 17. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su17156661>.
- Schudson, M. (2003). *The Sociology of News*. W. W. Norton & Company.
- Schultz, I. (2007). The Journalistic Gut Feeling Journalistic doxa, news habitus and orthodox news values. *Journalism Practice*, 1(2), 190–207. <https://doi.org/10.1080/17512780701275507>
- Selvarajah, C., & Meyer, D. (2017). Human capacity development in Indonesia: leadership and managerial ideology in Javanese organizations. *Asia Pacific Business Review*, 23(2), 264–289. <https://doi.org/doi.org/10.1080/13602381.2017.1299401>
- Sen, A. F. (2021). Watchdog Journalism During The Corona Virus Crisis in Turkey. *Advances in Applied Sociology*, 11, 500–512.
- Simons, M., & Dickson, G. (2017). *Availability of local news and information (2019 State of The Region Report-Australia)*.

- Siregar, R. K., Karlinah, S., Maryani, E., & Sjuchro, D. W. (2022). Dynamics of Local Media in Preserving Local Wisdom of Javanese Culture (Case Study: Rubrik Sang Pamomong in Suara Merdeka Newspaper). *Neuroquantology*, 20(15). <https://doi.org/10.14704/NQ.2022.20.15.NQ88160>
- Sormin, A. (2022). *Local Media Summit 2022: Jadi Ajang Curhat dan Solusi Pengelolaan Media Lokal di Indonesia*. Lampungpro.Co.
- Soysal, Z. (2025). An Epistemic Role for Opinion Journalism. *Political Philosophy*, 2(2). [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.16995/pp.23009](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.16995/pp.23009)
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Kuantitatif & R&D*. Alfabeta.
- Sumadiria, H. (2008). *Jurnalistik Indonesia*. Simbiosis Rekatama Media.
- Sumodiningrat, G., & Wulandari, A. (2014). *Pitutur Luhur Budaya Jawa*. NARASI.
- Suwirta, A. (2018). *Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru : Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung , 1966-1974*. 3(September), 113–136. <https://ejournal.upi.edu/index.php/mimbardik/article/view/13949>
- Suyono, J. (2023). Empirical study of Javanese leadership style in Surakarta, Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(4), 83–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/0202312262>
- Tejedor, S., Cervi, L., Tusa, F., Portales, M., & Zabolina, M. (2020). Information on the Covid-19 Pandemic in Daily Newspapers' Front Pages: Case Study of Spain and Italy. *International Journal of Environmental Research. Public Health*, 17. <https://doi.org/10.3390/ijerph17176330>
- Torres-Toukoumidis, A., Becerra, M. H., Marín-Gutiérrez, I., & Pallo-Chiguano, M. (2024). Exploratory Analysis of Local Media across the Post-Pandemic Era: Between Glocality and Closeness. *Journalism and Media*, 5, 552–565. <https://doi.org/doi.org/10.3390/journalmedia5020037>
- Vogler, D., Weston, M., Ryffel, Q., Rauchfleisch, A., Jürgens, P., Eisenegger, M., Schwaiger, L., & Christen, U. (2023). Mobile News Consumption and Its Relation to Young Adults' Knowledge About and Participation in Referendums. *Media and Communication*, 11(1), 6–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.17645/mac.v11i1.6029>
- Vos, T. P., Eichholz, M., & Karaliova, T. (2018). Audiences and Journalistic Capital. *Journalism Studies*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1477551>
- Wahl-Jorgensen, K., Williams, A., Sambrook, R., Harris, J., Garcia-Blanco, I., Dencik, L., Cushion, S., Carter, C., & Allan, S. (2016). The Future of Journalism Risks, threats and opportunities. *Digital Journalism*, 4(7), 809–815. <https://doi.org/dx.doi.org/10.1080/21670811.2016.1199469>
- Wijayanto. (2019). Bourdieu and Media Theory : Explaining Media “ s Changes and Continuities in The Post Authoritarian Countries. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 4(July), 274–300. https://www.researchgate.net/publication/334693669_Bourdieu_and_Media_Theory_Explaining_Media's_Changes_and_Continuities_in_The_Post_Authoritarian_Countries

- Willig, I. (2012). Newsroom ethnography in a field perspective. *Journal Journalism*, 1–16. <https://doi.org/DOI: 10.1177/1464884912442638>
- Yin, R. K. (2015). *Qualitative Research from Start to Finish* (2nd ed.). London Guilford Press.
- Yoedtadi, M. G., & Salman, D. (2023). Habitus Jurnalisme Keberagaman dan Kearifan Lokal Masyarakat Kupang. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(3). <https://www.journal.untar.ac.id/index.php/JSSH/article/download/28358/16893/84420>
- Yunus, S. (2010). *Jurnalistik Terapan*. Ghalia Indonesia.

DISERTASI:

1. Boughen, Robert (2023). *Sino-African Journalism and Journalistic Fields: CGTN Africa's Workers Between Worlds*. University of Westminster, Inggris.
2. Dlamini, Tula (2023). *Newsroom Culture and Journalistic Practice at The South African Broadcasting Corporation (SABC): An Enthnographic Study*. University of Witwatersrand, Johannesburg, Afrika Selatan.
3. Dune, Stephen. (2017). *Policing the Press: The Institutionalisation of Independent Press Regulation in a Liberal/North Atlantic Media System*. School of Communications Dublin City University, Irlandia.
4. Jaakolla, Maarit (2015). *The Contested Autonomy of Arts and Journalism Change and Continuity in The Dual Professionalism of Cultural Journalism*. University of Tampere, Finlandia.
5. Olsen, Ragnhild Kristine (2019). *The Value of Local News Unpacking Dynamics of Local Newspapers' Value Creation for Audiences and Society*. University of Oslo, Norwegia.
6. Roza, Adek (2022). *Data Journalism in Indonesia in the Time of Hoaxes*. University of Technology Sydney.

Website:

<https://kawruh basa.com/laku/>

LAMPIRAN

A. NAMA-NAMA INFORMAN PENELITIAN

No	Nama	Keterangan
1	Gunawan Permadi, M.Si	Pemimpin Redaksi (Pemred) Harian 'Suara Merdeka' (2015-2022)
2	Triyanto Triwikromo, M.Pd	Wakil Pemred Harian 'Suara Merdeka' (2015-2022) Pemred Harian 'Suara Merdeka' (2022-2024)
3	Dr. Sri Syamsiah Lestari	Pengampu Desk Edisi Minggu Harian 'Suara Merdeka'
4	Saroni Asikin, M.Si	Redaktur Pelaksana Harian 'Suara Merdeka'
5	Dr. Bambang Sadono	Penggagas Rubrik 'Sang Pamomong' Wakil Pemimpin Redaksi Harian 'Suara Merdeka'
6	Hendro Basuki, M.Si	Salah satu penggagas Rubrik 'Sang Pamomong' Pemred 'Suara Merdeka' (2015-2017)
7	Gunawan Budi Susanto	Pengampu Halaman Edisi Minggu Harian 'Suara Merdeka'
8	Kasiyati	Pelanggan Harian 'Suara Merdeka', tinggal di Semarang
9	H. Drs. Soerjanto	Pelanggan Harian 'Suara Merdeka', tinggal di Semarang
10	Prof. Dr. Mujahirin Tohir, MA	Guru Besar FIB Universitas Diponegoro
11	Dhoni Zustiyanoro, M.Si.	Penulis di kolom <i>headline</i> dalam RSP versi bahasa Jawa Dosen di FBS Unnes
12	Sendang Mulyana, M.Si.	Penulis di kolom headline dalam RSP versi bahasa Indonesia Dosen di FBS Unnes
13	Yolanda	Kepala Divisi Sosial Media 'Suara Merdeka' <i>Corporate</i>
14	Agus Toto Widyatmoko, M.Si.	Pemred 'Suara Merdeka'.com (2020-2024) Pemred Harian 'Suara Merdeka' (September 2024)
15	Setiawan Hendra Kelana, M.Si.	Sekretaris Redaksi Harian 'Suara Merdeka' (2021 hingga sekarang) Pemred Suara Merdeka.com (2010-2020)
16	Dr. Widodo Wikandana	Filolog, Akademisi, Penulis RSP
17	M. Eko Fitrianto, MM.	<i>Senior Manager Sales Product</i> (Sirkulasi)
18	Aris Mulyawan, M.Si.	Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (2021-2027) Cabang Semarang, Jawa Tengah

B. TRANSKRIP WAWANCARA

Informan 1.

Nama Lengkap	Gunawan Permadi
Jabatan	Pimpinan Redaksi Harian Suara Merdeka (2018-2023)
Hari & Tanggal	Senin, 27 Januari 2020
Tempat	Kantor Redaksi Suara Merdeka- Jln Kawi Raya No 20, Semarang pada 27 Januari 2020
Waktu	Pkl: 10.00-11.00

A: Informan- Gunawan Permadi (Pimpinan Redaksi Harian ‘Suara Merdeka’ periode 2015-2023).

B: Pewawancara Rachmi Kurnia Siregar (Mahasiswa Program Doktorat Ilmu Komunikasi-FIKOM Universitas Padjadjaran) sebagai peneliti

- Rachmi Kurnia Siregar = RKS
- Gunawan Permadi = GP

RKS	: Apa visi dan misi Suara Merdeka (SM)?
GP	: SM sejak awal bertujuan untuk melayani Jawa Tengah, tidak berekspansi ke luar provinsi Jateng. Jadi kami fokus di regional Jateng. Misi SM yakni sesuai <i>tagline</i> sekarang ini menjadi Perikat Komunitas Jateng. Tidak hanya sekedar informasi tapi juga sebagai moderator bagi masyarakat Jateng manakala ada konflik ataupun permasalahan apapun SM menempatkan diri di tengah-tengah. Bertujuan memoderatori atau mempertemukan semua kelompok masyarakat.
RKS	: <i>Tagline</i> sebagai Perikat Komunitas Jateng oleh Suara Merdeka maksudnya apa?
GP	: <i>Tagline</i> SM dua kali berubah yakni pertama Indenpenden, Objektif dan Tanpa Prasangka yang dirumuskan oleh pendiri SM yakni Heritami. Dalam perkembangan jaman, penerus SM yakni Budi Santoso melihat bahwa sekarang ini persoalannya bukan sekedar jurnalistik semata, tapi dalam perkembangan jurnalisme, masyarakat juga diajak untuk ikut terlibat, sehingga <i>tagline</i> berubah dan dirumuskanlah <i>tagline</i> kedua yaitu SM sebagai Perikat Komunitas Jateng.
RKS	: Bagaimana upaya mengimplementasikan <i>tagline</i> SM sebagai Perikat Komunitas Jateng?
GP	: Kami menyajikan berita tidak sekedar dari aspek jurnalisme, tapi juga dari aspek kepentingan masyarakat. Meskipun dalam beberapa hal mungkin dianggap ketinggalan dengan beberapa media lain. Tapi kebutuhan atau persoalan masyarakat kan harus diselesaikan, sehingga SM merealisasikan kebijakan dalam bentuk pemberitaan ya tentu pemberitaan yang harus mampu menyelesaikan masalah, bukan untuk mengompori atau memprovokasi dan lain-lain. Ini terwujud dalam pemilihan judul-judul di SM dengan judul berusaha fokus pada solusi. Mungkin dianggap kurang sensasional atau kurang bombastis bagi sementara kalangan, kami menyadari hal tersebut. Tapi ini sekali lagi sesuai <i>tagline</i> SM sebagai Perikat Komunitas Jateng. Setiap persoalan pasti kan tidak mengandung kebenaran mutlak, ada lain-lainnya. Nah inilah yang menjadi acuan untuk diangkat.
RKS	: Konkritnya bagaimana pemberitaan di Suara Merdeka sebagai implementasi <i>taglinenya</i> sebagai Perikat Komunitas Jateng?
GP	: Ya banyak. Misalnya saat Semarang sedang ribut tentang Banjir Kanal Timur, SM menggelar diskusi/FGD dan mempertemukan pihak pemerintah dengan berbagai unsur masyarakat dan kampus lalu membuat usulan-usulan kebijakan termasuk tentu melalui pemberitaan. Begitu juga dengan kasus Semen Gresik saat itu cukup ‘panas’ lalu SM menjadi moderatornya. Hampir seluruh persoalan kami berusaha untuk terlibat dalam masyarakat Jateng. <i>Ending</i> dari dua contoh tersebut yakni normalisasi bisa terlaksana. Apa yang kami lakukan ini sesungguhnya merupakan penerapan dari nilai-nilai kearifan lokal dan lebih mengakomodasi kultur Jateng. Jateng kan bukan kultur yang suka konfrontasi, tapi lebih mengedepankan unsur harmoni. Kami di Jateng lebih

	seperti itu, tidak terlalu senang berbenturan. Meskipun tidak ada masalah, tapi kan kami tidak. Hal-hal inilah yang kami adopsi seperti itu sekarang dalam pemberitaan. Kami berupaya menerapkan visi misi melalui kebijakan redaksi selalu mengarah pada harmonisasi.
RKS	: Berapa jumlah personil di redaksi SM?
GP	: Redaksi dan wartawan sekarang berjumlah 200-an. Pendidikan minimal sarjana (S1) dan sebelumnya wartawan digembleng pelatihan jurnalistik di LPDS, training di kampus, pelatihan internal dan kursus singkat.
RKS	: Bagaimana mekanisme operasional redaksi (rutinitas media)?
GP	: Sekarang ada grup <i>WhatsApp</i> (WA), jadi kami memanfaatkan fasilitas tersebut setiap saat ada diskusi, penugasan. Serta pengembangan berita oleh jajaran redaktur pelaksana (redpel) dan koordinator liputan (korlip) dengan teman-teman di desk, lalu dikompilasi sebagai agenda liputan oleh korlip untuk didistribusikan ke biro-biro (ada 6 biro dan biro Jakarta) dan kemudian ke reporter. Ini sama seperti halnya media lain.
RKS	: Bagaimana struktur organisasi di SM?
GP	: Bisa minta ke sekretariat redaksi. Beberapa sudah ada yang pensiun dan ada redaktur senior.
RKS	: Bagaimana <i>oplag</i> SM per hari?
GP	: Sekitar 60 ribu eksemplar per hari. Jumlah ini masih tinggi untuk media cetak/koran, meski memang terjadi penurunan.
RKS	: Bagaimana dengan penerapan media konvergensi di SM?
GP	: Masih jalan, yang pasti kami sedang mengembangkan bisnis digital. SM <i>online</i> (suaramerdeka.com) sebetulnya sudah lama, tapi memang harus banyak sentuhan. Kami fokus untuk perubahan ke depan. SM <i>online</i> sudah operasional sekitar 1996/1997 ya sudah lama sekali, mungkin karena kurang tergarap optimal. Kan karena dulu di cetak (SM) masih jaya. Namun ke depan saya rasa fokus untuk digital.
RKS	: Apakah berita-berita di SM <i>online</i> sama persis dengan yang di cetak?
GP	: Ada perbedaan. SM <i>online</i> digarap oleh redaksi tersendiri, walaupun ada juga konten cetak yang dionlinekan. Juga ada <i>e-paper</i> tapi tidak menjangkau sampai lama karena kebutuhan tempat sehingga hanya terbatas beberapa tahun. Jadi untuk puluhan tahun ke belakang harus cari di arsip.
RKS	: Bagaimana kebijaksanaan redaksional SM?
GP	: Kebijaksanaan redaksional SM mengacu pada visi dan misi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
RKS	: Bagaimana segmentasi pembaca SM?
GP	: Masih terbesar di segmen A-B (segmen menengah ke atas) dengan penghasilan Rp 5 juta ke atas per bulan, segmen C ada tapi cukup/tidak terlalu besar. Pelanggan potensial masih didominasi dari pemerintahan.
RKS	: Bagaimana segmentasi konten pemberitaan?
GP	: Kami membagi dalam 6 edisi, selain edisi nasional, juga ada masing-masing edisi regional yaitu wilayah Semarang Metro, Solo, Banyumas, Pantura, Muria. Masing-masing berbeda. Jadi lebih banyak mengakomodasi konten lokal. Contoh untuk edisi Pantura berarti wilayah Pantura yang mendapat porsi besar. Begitu juga dengan edisi Semarang Metro dan seterusnya.
RKS	: Bagaimana dengan komposisi konten lokal, nasional dan internasional di SM?
GP	: Di SM terbanyak konten lokal berkisar 80-90%. Jika dihitung dari jumlah wartawan, tentu mungkin sekitar 90% lebih untuk berita lokal. Untuk berita nasional, paling yang utama saja. Berita nasional untuk <i>headline</i> (HL) dan beberapa lainnya sekitar 15 berita. Jadi yang lainnya berita lokal. Karena setiap kota dan daerah ada semua di sini. Berita lokalitas diperkuat, bahkan hiperlokalitas sekalipun karena menyangkut <i>proximity</i> . Berita nasional kan sudah banyak yang menyajikan, kami hanya mengikuti saja.
RKS	: Apakah SM pernah melakukan survei ke pembaca terkait konten-konten lokal yang disajikan?

GP	: Sirkulasi SM melakukan kajian-kajian secara berkala termasuk ke pemerintah, masyarakat dan kalangan kampus termasuk Universitas Diponegoro. Paling sering kami meriset tentang rubrikasi/konten di SM. Dari hasil riset itulah diketahui yang banyak dicari atau dibaca yakni konten lokal. Masyarakat berlangganan SM untuk mendapatkan berita-berita lokal, karena berita-berita nasional sudah didapat pembaca dari media lain termasuk dari media online.
RKS	: Bagaimana dengan komposisi rubrikasi budaya di SM?
GP	: Konten budaya masuk dalam berita-berita di lingkup lokal. Setiap kota dan kabupaten kan ada berita lokalnya. Berita-berita budaya masuk di berita harian, termasuk event-event budaya.
RKS	: Bagaimana dengan konten Rubrik Sang Pamomong (RSP)? Apakah isinya memang mengandung nilai-nilai dan falsafah budaya Jawa?
GP	: Rubrik Sang Pamomong isinya bukan peristiwa budaya tapi lebih pada artikel dan tulisan-tulisan yang menyangkut kebudayaan Jawa baik yang an sich maupun yang diteropong dari berbagai sisi. Kebudayaan itu kan luas, bisa ajaran, tata cara hidup dan lain-lain. RSP rutin terbit setiap Minggu. Konten RSP dalam garis besar intinya melingkupi persoalan-persoalan etika budaya, falsafah dan Ke-Tuhanan dalam aspek budaya Jawa.
RKS	: Apakah owner setuju dengan RSP?
GP	: Iya tentu saja. Hasil survei terhadap RSP di SM, masyarakat masih membutuhkan tulisan-tulisan di RSP. (Untuk jelasnya bisa tanya ke Kapusdok terkait survei tersebut). Kami juga merencanakan survei rutin nanti berapa minggu sekali untuk mengetahui ketertarikan pembaca terhadap rubrikasi di SM.
RKS	: Apa tantangan yang dihadapi SM di era digital?
GP	: Pasti konsumsi media masyarakat yang makin mengarah ke digital, <i>youtube</i> dan visual. Sekarang ini orang lebih melihat ke <i>youtube</i> dan digital. Hal ini menjadi tantangan terbesar bagi SM dan juga media sosial (medsos).
RKS	: Bagaimana SM menyikapi tantangan tersebut?
GP	: Kami tentu harus memperkuat untuk sisi digital dan media sosial dan digarap serius, jika tidak maka fatal dan bakal dilindas media lain yang sudah kuat di bidang digital, terutama media sosial. Sekarang ini masyarakat mengonsumsi media melalui media sosial, sehingga cenderung tidak butuh lagi media cetak. Media cetak dibutuhkan untuk arsip dan hal-hal berkaitan dengan beberapa lembaga terutama pemerintahan masih harus diarsip, juga dengan lembaga pendidikan, di luar itu memang makin mengecil. Untuk di tingkat lokal, nampaknya media cetak masih belum ada laju penurunan yang tajam terutama masyarakat yang tergolong non-urban seperti di di daerah-daerah seperti di Pemalang, Brebes, Pekalongan, Jepara dan lainnya untuk kebutuhan cetak masih tinggi karena masyarakat juga masih mengonsumsi cetak. Tapi untuk masyarakat yang sudah urban sekali mungkin karena pengaruh gadget seperti di kota Semarang nah itu sudah terasa. Masyarakat membaca berita melalui <i>WhatsApp</i> atau <i>online</i> yang didistribusikan melalui media sosial.
RKS	: Bagaimana SM dalam memperkuat loyalitas pembaca?
GP	: SM harus makin banyak terlibat dalam aktivitas masyarakat. SM harus banyak menciptakan <i>crowd</i> sebanyak mungkin. Misalnya dengan membuat <i>event-event</i> , seperti <i>event</i> Lurah Hebat berupa kompetisi lurah di Semarang ini menyangkut jajaran kelurahan dan masyarakat. Setiap ulang tahun kota atau kabupaten, SM juga ikut terlibat. Pokoknya harus terjun dalam artian SM mampu mengakomodasi dinamika dan aktivitas masyarakat.
RKS	: Apa strategi SM dalam melestarikan budaya dan kearifan lokal kepada generasi muda?
GP	: SM untuk anak-anak ada aktivitas Wartawan Yuniior (Warior) sebagai rubrikasi khusus yang terbit setiap Minggu. Segmennya untuk murid Sekolah Dasar dan SMP dengan mengajarkan jurnalistik. Untuk siswa SMA ke atas yaitu membidik santri-santri di pondok pesantren setiap Ramadhan melalui Pesantren Jurnalistik. Juga melalui Suara Merdeka Institut (SMI) ke kampus-kampus, dan lembaga pendidikan.

Informan 2.

Nama Lengkap	Triyanto Triwikromo
Jabatan	Wakil Pimpinan Redaksi Harian ‘Suara Merdeka’ (2015-2023) Pengasuh dan Penulis tetap Rubrik ‘Sang Pamomong’
Hari & Tanggal	Senin, 27 Januari 2020 (Wawancara ke-1)
Tempat	Kantor redaksi Suara Merdeka di Jln Kawi Raya No 20, Semarang
Waktu	Pkl: 18.20-19.30

A: Informan- Triyanto Triwikromo (Wakil Pimpinan Redaksi Harian ‘Suara Merdeka’ (2015-2022) serta Pengasuh dan Penulis Tetap Rubrik ‘Sang Pamomong’.

B: Pewawancara Rachmi Kurnia Siregar (Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Komunikasi-FIKOM Universitas Padjadjaran) sebagai peneliti.

- Rachmi Kurnia Siregar = RKS
- Triyanto Triwikromo = TRT

RKS	: Bagaimana awal terbitnya Rubrik Sang Pamomong (RSP)? Apa tujuan dan siapa penggagasnya?
TRT	: Awalnya RSP dirintis oleh Hendro Basuki, saya dan Bambang Sardono. Tujuannya kami ingin SM memiliki sesuatu yang khas. Apa yang khas? Tentu saja yang menyangkut kebudayaan Jawa. Apa sajakah? Semula empat halaman dengan isinya terkait dengan kebudayaan dalam artian filsafat, praktis hari ini yang masih berlaku terkait budaya Jawa. Juga tentang kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Demak. Kami membahas bagaimana dahulu kerajaan Demak dari kajian Antropologi dan sejarah. Selain masa lalu, kami juga membahas tentang masa kini dalam konteks budaya Jawa. Jadi misalnya SM pernah mengadakan survei tentang sinden idola dan mendapat respon tinggi dari masyarakat. SM juga pernah mewawancarai tentang profil dalang terkait apa yang dilakukan dalam memperbaharui wayang. SM tidak hanya bersandar pada kebudayaan Solo dan Jogja, makanya kami juga menampilkan beberapa teks dengan menggunakan bahasa setempat. Jika Tegal maka menggunakan bahasa Tegal dan seterusnya. Pengasuh RSP saat itu juga menggali cerita-cerita yang bertolak dari berbagai lokasi khusus contoh dengan mengekspos Saridin Mohong yakni cerita daerah dari Pati, Tegal. Artinya semua kerajaan itu diwadahi tidak hanya yang Jawa <i>main stream</i> , ini dilakukan melalui hasil riset. Basis pelaku RSP adalah orang-orang yang berkecimpung di bidang sastra. Lalu saya menulis kolom khusus dalam RSP yakni <i>Pringgitan</i> yakni menelaah kekinian dengan kejawaan. Contoh saat Prabowo masuk ke lini pemerintahan, saya membuat tulisan berjudul <i>Ulo Monyorokot</i> . Dalam bahasa Jawa ada istilah <i>Ulo Moro Getuk</i> (ular yang mendatangi pukulan). Ini dimaknai jika ada ular yang mendatangi rumah orang artinya ular tersebut mau dipukul atau sebenarnya ingin mati. Dalam konteks saat ini saya mengangkat <i>Ulo Monyo Rokot</i> , ada apa Prabowo masuk ke ceruk pemerintahan Jokowi? Tapi saya tidak membahasnya langsung ke sosok Prabowo. Saya membahas topik Prabowo ini juga dengan latar belakang cerita Ramayana yakni tiba-tiba Rahwana <i>sowan</i> ke Rama untuk menjadi panglima. Itu semua sindiran-sindiran ala Jawa. Istilah di Jawa yakni <i>Pasemon</i> , di Indonesia yaitu <i>alusio</i> (bilang begini, tapi maksudnya begitu). Ini teorinya Sapardi Joko Darmono. <i>Pasemon</i> itu semu, tidak nyata tapi bisa menggebu benar.
RKS	: Siapa pengasuh perdana RSP?
TRT	: Pengasuh perdana RSP yakni Hendro Basuki sebagai penggagas RSP lalu saya. Tapi saat saya menjabat Wakil Pemimpin Redaksi SM, RSP kini dipegang oleh Gunawan Budi Susanto-yang akrab dipanggil Putu.
RKS	: Saat ini RSP ada berapa halaman dan terbit hari apa?
TRT	: Sejak sekitar tahun 2000, RSP terbit dengan rubrikasi terbaru yakni berupa satu halaman berisi tulisan <i>head line</i> (HL) oleh penulis luar dari SM yakni dosen dari

	Universitas Negeri Semarang (Unes), juga kolom <i>Pringgitan</i> dan kolom <i>Blencong</i> yang mengisahkan cerita wayang oleh Saroni Asikin. RSP terbit Minggu. RSP dahulu berupa suplemen yang terbit pada Kamis. Karena ada pengurangan halaman, maka RSP menjadi dua halaman dan terbit pada Minggu. Lalu berkurang lagi tinggal satu halaman. Pengurangan halaman ini akibat pengaruh signifikan di era digital. Saya berjibaku supaya RSP jangan sampai hilang sama sekali karena khawatir kekhasan SM sebagai koran melegenda di Jateng bakal hilang. Saya menulis tetap di kolom <i>Pringgitan</i> dengan menggunakan bahasa Indonesia, namun judul menggunakan bahasa Jawa.
RKS	: Apakah tema-tema di RSP dibahas dalam rapat ataupun dikoordinasikan dengan Pemimpin Redaksi?
TRT	: Pemilihan tema di RSP tidak dibahas dalam rapat khusus terlebih setelah rubrik ini hanya tinggal satu halaman dengan tiga tulisan setiap edisi. Namun biasanya kami sesama penulis RSP memiliki kesamaan tema yang diangkat sesuai dengan kondisi aktual dalam sepekan terakhir.
RKS	: Siapa yang menentukan tulisan utama untuk menjadi <i>headline</i> (HL)?
TRT	: Karena dengan alasan tertentu (penulis luar berhalangan mengisi HL), maka sebagai pemegang halaman saat ini pak Putu juga harus mengisi dengan tulisannya sendiri. Saat saya masih bertugas mengampu RSP, saya kerap memesan dalam penentuan tema-tema ke teman-teman penulis termasuk untuk tulisan HL dan kolom <i>Blencong</i> . Namun saat ini tidak lagi karena dengan berbagai pertimbangan. Selain itu masing-masing penulis RSP juga sudah memiliki tema-tema sendiri dan membidik situasi kekinian dengan style masing-masing.
RKS	: Mengapa isi tulisan dalam RSP kerap mengandung kritik-kritik sosial terutama terhadap pemerintah?
TRT	: Ya memang betul, <i>pasemon</i> memang begitu ada kritik. Pada hakekatnya orang Jawa mempunyai cara mengkritik secara halus. Kalau bisa dengan ucapan ya dengan ucapan dan yang paling bagus mengkritik dengan <i>pasemon</i> .
RKS	: Apakah kritik-kritik dalam RSP tidak kontraproduktif dengan <i>tagline</i> SM sebagai perekat komunitas Jateng?
TRT	: Kritik itu tidak harus dipahami sebagai yang tidak merekatkan. Kritik itu justru bagaimana memperbaiki diri. Perekat komunitas tidak berarti harus nunduk-nunduk terus (tidak harus menjilat atau Asal Bapak Senang/ABS). Kritik itu salah satu bagian dari upaya kami untuk merekatkan komunitas. Kami tidak mungkin mengkritik secara langsung karena tidak sesuai dengan budaya Jawa. Lagi-lagi kami menggunakan ala <i>pasemon</i> yakni sindiran-sindiran halus. Kami mencubit, tapi yang dicubit tidak terasa dicubit. Kira-kira begitu analoginya. Saya mengkritik berbagai hal yang saya anggap tidak tepat, termasuk dalam kondisi politik terkini. Begitu juga dengan perilaku korupsi, saya membuat tulisan <i>Mulang maling</i> (mengajari maling). Ketika geger siapa sih yang paling laknat? Saya buat tulisan tentang musyawarah para setan. Siapa setan yang paling setan? Muncullah manusia bukan setan. Karena di Jawa ada <i>demit ora ndulit</i> , <i>demit ora ndelit</i> . <i>Demit</i> tidak berani <i>ndelit</i> . Siapa yang berlaku seperti itu? Ya manusia. Jadi yang maha iblis itu manusia. Saya menggambarkan kerakusan manusia ya dengan cara halus dan sangat halus sesuai dengan konsep budaya Jawa.
RKS	: Sejauhmana tulisan-tulisan kritik dalam RSP diprotes dari pihak-pihak yang tersindir atau tersinggung dengan tulisan yang disajikan tersebut?
TRT	: Saya akhir-akhir ini sering mendapat pesan dari <i>WhatsApp</i> (WA) terkait tulisan saya yang dianggap mengkritik Jokowi, Prabowo dan lainnya. Bagi saya inilah cara saya sebagai orang Jawa dalam mengkritik. Ndak sampai saya diburu. Tapi bahwa ada yang merespon tulisan saya, iya. Jadi substansinya berarti krusial.
RKS	: Apakah <i>owner</i> setuju dengan cara-cara kritik dalam RSP?
TRT	: Ya, ndak apa-apa.
RKS	: Sejauhmana RSP menjadi strategi kebijakan SM dalam melestarikan budaya dan kearifan lokal Jawa?

TRT	: RSP membawa masa lalu ke masa kini karena ada teori-teori namanya rekonstektualisasi. Intinya semua nilai-nilai pada masa lalu sesungguhnya bisa dibawa untuk masa kini, tentu dengan cara-cara tertentu melalui noto, nitis, netas dan lainnya. Serta memperbaharui dan bahkan mungkin dengan cara dekonstruksi sedemikian rupa. Isi RSP antara lain mencakup bagaimana persoalan-persoalan terkait etika budaya Jawa, falsafah budaya Jawa dan aspek Ke-Tuhanan.
RKS	: Selain RSP, rubrik budaya lainnya di SM apa sajakah?
TRT	: Ada rubrik Serat di edisi Minggu yang juga berupa esai yang berkait dengan Jawa dan macem-macem. Jadi bisa kami susupkan juga dengan cerpen.
RKS	: Mengapa konten di RSP kini hanya tiga tulisan dalam satu halaman?
TRT	: Ya supaya longgar dan mudah dibaca meliputi tulisan utama, <i>Pringgitan</i> dan <i>Blencong</i> dalam konteks artikel terkini atau isu-isu terkini. Untuk liputan-liputan yang agak Pamomong sebenarnya ada di halaman lain. Karena RSP sebenarnya subversif ke mana-mana di wacana yang ada bau-baunya Jawa. Contoh tentang kirab budaya, Festival Lima Kuno dan lainnya yang kejawaannya ada.
RKS	: Mengapa sejak Januari 2020 halaman RSP dipindah ke halaman 2?
TRT	: Karena dengan pertimbangan cara membaca orang yakni senang dengan tema-tema sejenis (kebersamaan dengan rubrik-rubrik linier yang kekinian) di halaman 3 yakni Rubrik Bincang-Bincang berisi profil tokoh. Artinya RSP menjadi makin dipentingkan sehingga tidak lagi di halaman dalam.

Informan 3.

Nama Lengkap	Sri Syamsiah Lestari
Jabatan	Pengasuh Desk Edisi Minggu Harian 'Suara Merdeka'
Hari & Tanggal	Rabu, 29 Januari 2020
Tempat	Kantor redaksi Suara Merdeka di Jln Kawi Raya No 20, Semarang
Waktu	Pkl: 13.30-14.30

A: Informan- Sri Syamsiah Lestari (Pengasuh Desk Edisi Minggu Harian Suara Merdeka)

B: Pewawancara Rachmi Kurnia Siregar (Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Komunikasi-FIKOM Universitas Padjadjaran) sebagai peneliti.

- Rachmi Kurnia Siregar = RKS
- Sri Syamsiah Lestari = SSL

RKS	: Bagaimana awalnya dibuat Rubrik Sang Pamomong (RSP)? Apakah rubrik ini mencerminkan simbol tertentu?
SSL	: Rubrik Sang Pamomong <i>kan</i> dari namanya saja Pamomong yang dimaknai Suara Merdeka (SM) sebagai <i>pamomong</i> bagi warga Jawa Tengah (Jateng). Ini digambarkan dengan tokoh Semar dalam cerita pewayangan (punakawan) yang menjadi pamomong atau yang mengasuh/memberi arahan-arahan bijak dan seterusnya kepada masyarakat Jawa Tengah. Rubrik ini menjadi salah satu ciri SM. Isinya tentang budaya-budaya Jateng, termasuk istilah-istilahnya dengan menggunakan bahasa Jawa. Berisi 3 tulisan yakni tulisan utama, satu tulisan di kolom <i>Pringgitan</i> dan satu tulisan di kolom <i>Blencong</i> . <i>Blencong</i> itu dimaknai sebagai lampu cahaya.
RKS	: Konten RSP dalam format apa?
SSL	: Format RSP dalam bentuk artikel bukan <i>event-event</i> liputan budaya Jawa (peristiwa). Artikel tersebut mengandung filosofi dan nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa termasuk tentunya nilai dan norma-norma Jawa. Artinya artikel dikemas dalam kaca mata/sudut pandang budaya Jawa. Bisa dilihat dari konteks dunia pewayangan atau mungkin dari cerita-cerita Jawa yang didalamnya mengandung nilai-nilai Jawa.
RKS	: Bagaimana mekanisme produksi RSP?
SSL	: Keberadaan RSP ada di desk edisi Minggu. Saya baru tiga (3) minggu bertugas di desk Minggu, jadi masih meneruskan kebijakan sebelumnya. Ada rapat dua kali dalam seminggu yaitu rapat program pada Jumat malam untuk membahas artikel-artikel yang tidak butuh <i>update</i> berita yang tinggi. Misalnya rubrik mode, rubrik racik/makanan, rubrik jalan-jalan, <i>fesyen</i> , profil tokoh (Rubrik Bincang). Rapat pada Rabu malam itu yang perlu <i>update</i> berita, apa isu yang ramai dalam sepekan yang akan dibahas. Jadi ditempatkan di halaman depan menjadi <i>headline</i> (HL), ada viral dan lainnya, ada halaman fokus, dan lainnya. RSP antara membutuhkan <i>update</i> maupun yang tidak <i>update</i> . Karena kadang peristiwa yang penting dibahas juga dalam RSP. Jadi tema-tema disesuaikan. Jadi karena yang mengisi dari dalam sehingga sudah tahu arah-arahnya bagaimana. Wakil Pimpinan Redaksi (Wapimred) dan Redaktur Pelaksana (Redpel) sudah mengetahui tentang tema yang sedang ramai dalam sepekan, sehingga tema tersebut ditampilkan dalam tulisan untuk minggu ini yakni di kolom <i>Pringgitan</i> dan kolom <i>Blencong</i> . Sedangkan untuk tulisan utama (HL) diisi oleh penulis luar. Jadi menulis dalam konteks budaya itu tadi. Singkatnya penulis dari dalam yakni Wapimred yang menulis kolom <i>Pringgitan</i> dan Redpel yang menulis kolom <i>Blencong</i> (bergantian dengan penulis luar) dengan sendirinya sudah menentukan tema yang akan diangkat untuk pekan ini. Sedangkan untuk penulis luar, kita harus memesan tema-tema (meski tidak sering). Artikel-artikel dalam RSP ditulis melalui proses perenungan sehingga tidak membutuhkan <i>speed</i> tinggi.

RKS	: Bagaimana penentuan tema-tema di RSP?
SSL	: Penentuan tema-tema di RSP bisa dari penulis dalam (pengasuh Kolom <i>Pringgitan</i> oleh Wapimred dan pengasuh Kolom <i>Blencong</i> oleh Redpel dan penulis luar) serta dari penulis luar itu sendiri. Untuk penulis dalam (kolom <i>Pringgitan</i> dan kolom <i>Blencong</i> ada 4 orang, sehingga mereka sudah <i>tau</i> kira-kira apa yang akan ditulis karena sudah langgana menulis di SM. Kombinasi/kolaborasi antara penulis luar sehingga mereka sudah memiliki gambaran sendiri.
RKS	: Mengapa RSP menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia bergantian?
SSL	: Dahulu konsep awalnya dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi agak susah juga dalam menemukan penulis yang menguasai budaya Jawa yang bersedia menulis rutin di SM. Sehingga pada akhirnya harus selang-seling. Jadi kami kesulitan dalam mendapatkan penulis dari dalam yang menguasai bahasa Jawa halus kan terbatas. Meskipun orang Jawa, tapi kemampuan untuk menulis dalam konteks budaya Jawa secara benar agak susah (karena minim penguasaan budaya Jawanya). Di sisi lain, penggunaan bahasa Indonesia dalam RSP untuk membantu pembaca yang tidak mengerti bahasa Jawa. Sekedar kilas balik, sebelumnya di SM ada rubrik budaya Jawa yakni Rubrik Banyumasan ditulis dari luar (penulis) dengan menggunakan bahasa Banyumasan, tapi sekarang rubrik tersebut sudah tidak ada. Artinya masyarakat (non Jawa) lebih mudah untuk memahami artikel-artikel di RSP yang ditulis berbahasa Indonesia.
RKS	: Penggunaan bahasa Jawa di RSP apakah ditentukan kelas/golongannya?
SSL	: Lebih mengarah pada <i>kromo madyo</i> yaitu di tengah-tengah, jadi tidak halus banget dan sebaliknya. Jadi meskipun menggunakan bahasa Indonesia, nama rubrikasi, hal-hal dan istilah-istilah dalam artikel RSP menggunakan bahasa Jawa.

Informan 4.

Nama Lengkap	Saroni Asikin
Jabatan	Redaktur Pelaksana Harian Suara Merdeka Penulis tetap Kolom <i>Blencong</i> di halaman Rubrik Sang Pamomong. Dosen Jurnalistik dan Sastra Jawa di sejumlah universitas.
Hari & Tanggal	Kamis, 30 Januari 2020 (Wawancara ke-1)
Tempat	Kantor redaksi Suara Merdeka di Jln Kawi Raya No 20, Semarang.
Waktu	Pkl: 18.30-20.00

A: Informan- Saroni Asikin (Redaktur Pelaksana Harian Suara Merdeka) dan sebagai penulis tetap Kolom *Blencong* di halaman Rubrik ‘Sang Pamomong’).

B: Pewawancara Rachmi Kurnia Siregar (Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Komunikasi-FIKOM Universitas Padjadjaran) sebagai peneliti.

- Rachmi Kurnia Siregar = RKS
- Saroni Asikin = SA

RKS	: Bagaimana awal mulanya dibentuk Rubrik Sang Pamomong (RSP) sejak kapan dan siapa pencetusnya?
SA	: Sepengetahuan saya RSP dibuat sekitar tahun 1995. Saya sendiri masuk di Suara Merdeka (SM) pada 2002. Tapi saya tahu tahun tersebut (sekitar 1995) ada RSP berupa suplemen dan terbit setiap Minggu. Pencetus RSP yakni Hendro Basuki yang sebelumnya Koordinator Liputan, Wakil Pimpinan Redaksi dan dua kali sebagai Pimpinan Redaksi).
RKS	: Sejak kapan RSP terbit di Suara Merdeka?
SA	: Sejak saya bertugas di edisi Minggu (Kepala Desk Edisi Minggu sekitar 2011-2015) tapi tidak mengelola secara langsung. Tapi saya tahu konsep-konsepnya dan paham (RSP). Sebelumnya RSP dua halaman lalu karena pengurangan halaman, maka menjadi satu halaman hingga sekarang. Saya dan Wapimred sebagai kontributor tetap (saya di kolom <i>Blencong</i> dan Wapimred di kolom <i>Pringgitan</i>). Konsep RSP sudah jelas karena (semula) dibahas dalam rapat redaksi. Sekarang pola pengaturan RSP yakni dalam satu pekan menggunakan bahasa Jawa dan pekan depannya berbahasa Indonesia. RSP seingat saya sudah ada sekitar tahun 1996-an.
RKS	: Apa tujuan RSP menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia bergantian?
SA	: Tentu bertujuan memelihara eksistensi bahasa Jawa. Bahkan kini kami menggunakan bahasa Jawa yang bisa dipahami orang Jawa meski dengan beragam dialek. Pernah dalam suatu masa di mana RSP menampilkan bahasa Jawa dalam berbagai dialek. Jawa <i>kan</i> dialeknya banyak. Pembagian dialek di Jawa antara lain ada Jawa Mataram-ini yang paling banyak. Lalu dialek Jawa Kedu, dialek Semarang, dialek Pekalongan, dialek Tegal, dialek Banyumasan. Jika ditarik lagi di luar provinsi Jawa Tengah juga masih ada. Osing itu Jawa, Indramayu, Cirebonan, Serang. Jadi bahasa Jawa itu luas dengan dialek berbeda-beda, yang memang secara perbedaan menonjol yaitu yang agak ke berat yaitu dialek Jawa, dialek Tegal, dialek Banyumas, dialek Serang Banten itu yang beda lafal pengucapannya. Bedanya sangat tajam. Itu penting disebut karena bagaimana posisi SM ketika menciptakan RSP. Karena sering dikritik supaya jangan terlalu istana sentris yaitu Mataraman-Solo-Yogya. Apakah menggunakan dialek tersebut. Akhirnya kami ada kesepakatan agar semua dialek masuk. Jika tidak salah rubrik tersebut bernama <i>Braga Suta (Brogo Suto)</i> yang mengakomodasi seluruh dialek. Jadi penulis dari Banyumas maka akan menulis dengan bahasa Banyumasan. Ini sejalan dengan harian SM untuk terbitan lokal dengan komunitas yang berbeda.
RKS	: Bisa dijelaskan lebih rinci maksudnya?
SA	: Jadi untuk tiap eks karisidenan itu misalnya di Pantura maka hanya wilayah tersebut yang dicover beritanya dan dihandle sendiri. Ini sempat antara 2007-2010 di beberapa komunitas diterbitkan cerita bersambung dengan bahasa lokal (bahasa Jawa dengan

	dialek setempat). Saya sendiri menulis cerita bersambung dengan dialek Jawa Tegal (saya berasal dari Brebes). Ini artinya kami bagaimanapun harus menjaga eksistensi tersebut secara eksplisit dalam bentuk terbitan yang berbahasa lokal. Sekarang masih ada dan dijumpai di rubrik lokal yaitu Rubrik Suara Muria masih ada satu kolom dengan bahasa dialek Kudus edisi Kamis. Di Banyumas, masih ada dengan dialek Pantura di edisi Sabtu. Itulah untuk meyakinkan bahwa kami peduli.
RKS	: Bagaimana penggunaan bahasa Jawa di RSP?
SA	: Kami bertujuan untuk mewadahi semua dialek dalam bahasa Jawa. Wapimred (Triyanto Triwikromo/TT) menulis dalam bahasa Indonesia di kolom <i>Pringgitan</i>. Saya menulis di kolom <i>Blencong</i> dalam bahasa Jawa-dengan dialek Tegal-sampai beberapa terbitan. Kemudian ada respon dari yang non-Tegal yang tidak begitu paham. Saya menulis dengan idiom-idiom khas yang mungkin hanya dipahami orang Tegal di eks karisidenan itupun terbatas di Tegal, Brebes, Pemalang. Orang Banyumas tidak mungkin begitu paham. Akhirnya saya kembalikan ke yang bisa dipahami tentu dengan berbagai varian bahasa Jawa kekinian tapi tetap distandarkan kembali. Saya tidak menyebut bahasa Jawa Mataraman karena pasti ragamnya sudah campur baur, karena saya menolak politik bahasa. Sekian lama diterapkan keraton itu seolah-olah bahasa Jawa dialek Mataram. Mataram memang luas sampai Jawa Timur-Blitar. Mataraman mencakup Yogya, Solo sekarisidenan, Madiun, Magetan, Pacitan itu Jawa Mataraman sampai Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Kediri kecuali Malang berbeda karena sudah bahasa <i>arek</i>. RSP secara akademis bahasa Jawa dengan dialek Mataraman ya <i>monggo</i>, saya sendiri lebih menggunakan bahasa Jawa umum supaya lebih dipakai sebagian besar orang Jawa. Jadi saya kembalikan ke seperti itu hingga sekarang. Saya lebih sering menulis topik-topik atau teks-teks yang berasal dari <i>folklore</i>, wayang, <i>babad</i>, dan resepsi/kisah-kisah. Tentu saya bersama TT menulis agak lebih simbolis dalam bahasa Indonesia. Saya selalu ‘menabrakkan’ ke hal-hal yang sedang aktual secara garis besar.
RKS	: Mengapa artikel/tulisan di RSP kerap mengandung kritik khususnya ke pemerintah ?
SA	: Keniscayaan memang begitu (artikel di RSP) ke ‘menyentil’ ke tokoh ataupun pemerintahan. RSP kan kolom, jadi kolom itu sangat subjektif dan kadang tidak menyelesaikan persoalan. Bahkan bisa jadi kolom malah melemparkan sesuatu persoalan. Saya sering menulis untuk kolom dengan berbahasa Indonesia dan ‘menyentil’ banyak hal terutama dalam hal politik dikaitkan dengan konteks atau perspektif budaya Jawa atau referensi yang diambil dari Jawa. Belakangan saya membuat resepsi dari teks-teks Hindu yang diresepsi dalam teks-teks bahasa Jawa dengan variasi beragam. Itu jika memang tidak ada topik aktual yang menarik. Misalnya saat Nadiem-bos Gojek diangkat sebagai Mendikbud oleh Jokowi. Saya menulis tentang <i>Ekalaya</i>-dalam Mahabarata India itu dikisahkan pernah berguru ke pendeta Durna. Jika ditulis dalam konteks budaya Jawa lebih asyik dalam meresepsikannya. Karena Durna menolak, Ekalaya belajar memanah di hutan hanya ditemani patung Durna. Jadi bagaimana saya ingin mengatakan bahwa belajar itu bisa di mana saja, tapi tentu saja harus selalu di tangan sang guru. Ini dari kisah itu. Jadi aktualitasnya harus selalu ditabrakan/dicarikan referensi dari teks-teks yang berkaitan dengan budaya Jawa. Seperti itu menggunakan bahasa Jawa. Konsep <i>Pringgitan</i> memang paling tidak menyentil <i>lah</i> ya. Jadi tidak harus mengkritik secara tajam. Tapi sentilan, kadang sedikit <i>guyon</i>. Terus terang saya menulis dengan bahasa Jawa dengan kegagapan tertentu. Ini juga berasal dari tradisi bahasa Jawa dengan dialek yang tidak mengenal <i>dh</i>, <i>th</i> secara vonem (<i>wedho</i>, <i>wedo</i>). Meski saya tinggal di Semarang lebih dari 30 tahun, tapi tetap tidak bisa meninggalkan lidah saya dari dialek Tegal yang sama sekali tidak mengenal dialek <i>dh</i>, <i>th</i>. Tapi internet sekarang sedikit lebih banyak membantu. Intinya tulisan saya tersebut tidak menguransi esensi.

	Singkatnya, saya berusaha menginisiasi pembaca bahwa bahasa Jawa tidak sesulit bahasa-bahasa wayang, sehingga saya kerap mencampur adukkan gaya diksi pilihannya. Kadang ada yang bahasa Kedaton, kadang ada yang bahasa keseharian/ungkapan keseharian yang sudah menasional. Contohnya ‘ <i>mas bro</i> ’ kerap muncul dalam tulisan-tulisan saya. Itu yang di <i>Pringgitan</i> sesuai dengan ide konsep saya.
RKS	: Bagaimana awalnya ada penulis luar yang mengisi di RSP?
SA	: Saya bertemu dengan teman-teman dosen di Universitas Negeri Semarang (Unnes) yakni Sendang Mulyani dan Dhoni Zustiyantoro- untuk bekerja sama mengisi RSP (mereka bersedia). Kami melakukan pendekatan informal seiring karena kondisi keuangan SM yang kurang menggembirakan (sejak 2018 tidak ada lagi honor untuk penulis luar). Pendekatan informal penting setelah sebelumnya kami meyakinkan redaksi bahwa penulisnya bisa gratisan. Tapi untuk mengajak mahasiswa agar menulis di rubrik <i>Blencong</i> , tidak ada yang mau. Padahal niat awal untuk mengajak penulis-penulis luar. Ini karena mereka (mahasiswa) terbatas yang mampu menulis dalam budaya/bahasa Jawa. Jadi kami mencari orang yang mau ‘bersedekah’ ilmunya melalui tulisan.
RKS	: Bagaimana awalnya untuk seleksi penulis luar di RSP?
SA	: Sebelum 2018 ada seleksi naskah untuk dipublikasikan di RSP. Tapi setelah itu tidak ada lagi, mungkin karena selanjutnya sudah ditetapkan penulis (untuk efisiensi karena tidak ada honor untuk penulis luar).
RKS	: Bagaimana penentuan tema-tema di RSP khususnya untuk penulis luar?
SA	: SM mengembangkan kepercayaan luar biasa kepada para penulis-termasuk penulis luar dan dipercaya sejak pemilihan awal penulis luar. Saya juga pernah mengisi dan penulis tetap di rubrik bola ‘Kick off’. Artinya sejak awal memang (penulis) dipandang berkualitas sehingga dipilih. Karena dengan pertimbangan kami tidak mungkin setiap saat minta tulisan dari luar. Jadi sebagian penulis dari dalam redaksi yaitu saya dan pak Triyanto Triwikromo (TT).
RKS	: Bagaimana pembagian tugas untuk penulis di RSP?
SA	: Sejak 2018 hingga sekarang, format RSP untuk tulisan utama bahasa Indonesia oleh Sendang Mulyana dan bergantian setiap pekan dengan Dhoni Zustiyantoro dengan menggunakan bahasa Jawa. Kolom <i>Pringgitan</i> oleh TT dan saya. Kolom <i>Blencong</i> oleh saya dan bergantian dengan Danang-penulis luar. Jadi ada lima (5) penulis tetap di RSP.
RKS	: Bagaimana dengan Kolom <i>Blencong</i> di RSP?
SA	: <i>Blencong</i> (berasal dari bahasa Jawa artinya lampu minyak untuk penerangan dalam pagelaran wayang kulit) ini awalnya berbahasa Indonesia juga bahasa Jawa. Saya banyak memberi gagasan di <i>Blencong</i> , yaitu ceritanya menulis semacam cerpen. Konsep awal yaitu cerita yang berasal dari semua khasanah cerita Jawa atau Jawanya dihilangkan menjadi cerita rakyat yang dikenal masyarakat pada umumnya baik, berasal dari cerita pewayangan, <i>babad</i> , <i>folklore</i> , cerita lisan dan sebagainya. Tetapi tetap ditulis dengan secara <i>main stream</i> , jadi yang mengambil dalam bentuk <i>non-main stream</i> . Semangatnya ini saya sebenarnya menginisiasi cerita agar ada respon dari pembaca, supaya ada pembaca yang menulis. Jadi bukan saya saja yang menulis di <i>Blencong</i> . Saya hanya mengantar. Ini lho bentuknya. 1 kali, 2 kali dan seterusnya saya (<i>Blencong</i> sudah lama, tapi sempat hilang karena ada pengurangan halaman. Konsep khasanah cerita rakyat dari Jawa antara lain dari <i>babad</i> , <i>folklore</i> , panji, wayang menak dan lainnya. Tapi tidak ditulis dalam garis <i>main stream</i> (cerita-cerita yang sudah dikenal masyarakat) terutama plotnya. Bukan berarti tidak bisa mengangkat yang sudah ada tapi plotnya atau sudut pandangnya berbeda atau dalam karya sastra disebut resepsi dengan bentuk transformasinya yang beda.
RKS	: Setelah ada pengurangan halaman dan kini RSP tinggal satu halaman, bagaimana dengan peluang RSP selanjutnya?
SA	: RSP mungkin satu-satunya yang terus ada dan dipertahankan karena sudah melewati beberapa fase dan bisa bertahan hingga sekarang. Adapun pertimbangannya: 1) RSP

	sebagai lini itu <i>pamomong</i>. Rubrik sastra masih mungkin dihilangkan toh wakilnya banyak. Tapi RSP tidak, karena sebagai cikal bakal dan sebagai ciri khas Suara Merdeka. Kami (Suara Merdeka) <i>kan</i> dalam konsepnya selalu <i>pamomong</i> bagi masyarakat dan komunitas Jawa Tengah, jadi memang <i>ngemong</i>.
RKS	: Apakah <i>owner</i> setuju dengan tetap mempertahankan RSP?
SA	: Sesekali hal tersebut memang pernah ada pertanyaan tentang RSP apakah ‘seksi’ dan bernilai ekonomis. Apakah RSP masih ada pembacanya? Kami juga baru saja menghilangkan Rubrik Panggung. Tapi kami (penulis RSP) meyakinkan redaksi dan <i>owner</i> bahwa Sang Pamomong memang bukan tujuan ekonomis. Bahkan dalam sejarah RSP tidak pernah ada iklan atau katakanlah hanya sedikit kontribusi iklannya. Ini kaitannya dengan jati diri SM. Jika semuanya bermuatan ekonomi maka buat saja semuanya dalam bentuk iklan. Saya pikir <i>owner</i> tidak berfikir seekstrim itu. Pahami ada yang bisa dijual dan sebaliknya. Intinya RSP sebagai salah satu ciri khas SM. Saya berpendapat RSP tetap menjadi rubrik andalan bagi SM karena menyangkut jati diri orang Jawa. Saya pikir selagi Jawa masih ada, <i>nggak</i> mungkin seperti itu (RSP) lenyap. Toh tanpa harus berbahasa Jawa, bahkan untuk berita saja yang bersifat berita-warna lokalnya banyak seperti mengangkat tradisi Jawa dan lainnya. Format tulisan di RSP yakni berupa artikel. Ada dalam satu masa di mana bentuk tulisan di RSP berupa <i>indepth reporting news</i> dan diproyeksikan untuk mengisi seluruh halaman di edisi Minggu.
RKS	: Bagaimana upaya SM dalam melestarikan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal Jawa bagi generasi muda?
SA	: Ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Tapi kami <i>kan</i> sudah berkali-kali melakukan ikhtiar itu. Artinya pernah juga khas RSP dibuat dalam bahasa <i>gaul</i> dalam cara penulisannya. Saya berusaha mendekati anak muda dalam kolom <i>Pringgitan</i> antara lain dengan membuat judul kekinian. RSP tidak berkontribusi langsung ke kaum milenial dari arti interaktif. Tapi kami memberi kontribusi wacana. Jika tidak bisa menyentuh secara langsung, maka menyentuh kalangan orang tua yang memiliki anak-anak muda di antaranya melalui artikel-artikel di RSP dan lainnya. Namun RSP tetap berkontribusi dalam meyakinkan anak-anak muda (Jawa) bahwa dia Jawa-tetap ada meski tidak langsung.

Informan 5.

Nama Lengkap	Hendro Basuki
Jabatan	Penggagas Rubrik 'Sang Pamomong' Pimpinan Redaksi Harian Suara Merdeka
Hari & Tanggal	Kamis, 13 Februari 2020
Tempat	Semarang
Waktu	Pkl: 09.00-11.00

A: Informan- Hendro Basuki (Penggagas Rubrik Sang Pamomong dan Pimpinan Redaksi Harian Suara Merdeka)

B: Pewawancara Rachmi Kurnia Siregar (Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Komunikasi-FIKOM Universitas Padjadjaran) sebagai peneliti.

- Rachmi Kurnia Siregar = RKS
- Hendro Basuki = HB

RKS	: Kapan Rubrik Sang Pamomong (RSP) pertama kali terbit di Suara Merdeka (SM)? Siapa penggagasnya dan apa tujuannya?
HB	: Sekitar 1994-1995, saya yang menginisiasi RSP (saat itu sebagai Koordinator Liputan/Korlip di SM). Saya merenungkan bagaimana SM supaya bisa melayani pembaca tidak hanya berita-berita aktual. Koran itu bukan hanya untuk memenuhi hak-hak publik untuk tahu (berita-berita aktual yang mengikuti irama pemberitaan dunia, nasional, regional maupun lokal). Ini kan sudah merupakan rutinitas wartawan/media setiap hari ada dan selalu <i>up-date</i>. Terfikir oleh saya waktu itu untuk memberikan sesuatu yang berbeda, karena pada 1990 saya juga memberikan nutrisi yang berbeda pada SM (1989 dan 1990) dengan membuat rubrik sains dan teknologi, rubrik pertanian karena basic saya adalah Editor Ekonomi. Saya melihat ada pasar yang harus dilayani pada segmen tertentu dan pada 1995 saya membuat rubrik budaya yakni RSP. Kenapa <i>sih</i> penting budaya Jawa saat itu? Karena selain saya ingin bernostalgia dengan kebudayaan Jawa masa lalu, tapi saya juga mengkritisi kebudayaan Jawa, bahwa pada setiap kebudayaan itu tidak semuanya baik-baik saja tapi ada sesuatu yang harus dianalisa dan dikritisi. Saya mengambil contoh yang sederhana yaitu orang memaknai keris yang lebih banyak dipahami sebagai sesuatu yang <i>klenik</i> dan sebagai benda yang mengandung kesaktian. Ini anggapan sebagian orang tentang keris. Tapi saya tidak demikian. Saya ingin merubah paradigma keris dalam format kebudayaan yang lebih luas yaitu keris itu bukan hanya sebagai <i>tosan aji</i>/senjata tapi juga sebagai budaya dan produk teknologi-sebagai barang ekonomi dan sebagai benda sejarah. Sehingga saat kita melihat sebuah keris tidak lantas menganggap sebagai benda bertuah, tapi keris sebagai produk teknologi dengan pendekatan metalurgi, dengan ketrampilan tinggi dan menghasilkan karya seni yang bagus. Karya tersebut ini bukan hanya dilihat dari <i>tosan aji</i> tapi juga dilihat dari aspek ekonomi tinggi. Juga produk budaya lain seperti wayang kulit sebagai sebuah seni pertunjukkan yang menarik. Tetapi tokoh-tokoh di dalamnya adalah riil dalam kehidupan nyata. Maka keteladanan dalam wayang adalah baik dan buruk, benar dan salah. Saya mengambil contoh bahwa Kurowo sebagai tokoh dalam konteks besar digambarkan sebagai tokoh jahat. Di dalam RSP, saya ingin memaparkan bahwa rajanya Kurowo yaitu Duryodono itu juga memiliki sikap-sikap baik. Duryodono memang rajanya Kurowo atau rajanya penjahat. Tapi sisi baiknya adalah dia harus menghidupi 99 adik, sebagai anak laki-laki tertua dan harus menghidupi 99 adik yang tidak sempurna. Jadi kita tidak bisa melihat langsung bahwa Pandawa adalah benar dan Kurawa adalah selalu salah. Pasti ada sisi-sisi baik. Bagi kami di RSP adalah nilai-nilai kehidupan yang baik untuk diteladani. Kenapa Pandawa dikenal pintar-pintar? Sedangkan Kurawa tidak? <i>Kan</i> ini berkait berkah Gusti Allah, bahwa dari 100 di mana 99 tidak sempurna dengan segala kekurangan dan kelebihan tapi lebih banyak kekurangannya. Sementara Pandawa adalah baik dan berkualitas bagus. Bagi saya jika Durno mengajar 5 anak dengan berkualitas tinggi dan

	tidak butuh sentuhan yang terlalu <i>jelimet</i>. Tapi mengajar 100 Pandowo yang tidak sempurna maka butuh <i>effort</i> dan pengabdian tinggi. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa Kurowo adalah jelek karena memang berkahnya Tuhan begitu. Jadi saya ingin mengajarkan kepada publik bahwa nilai-nilai wayang itu tidaklah hitam putih. Bahwa Pandawa adalah putih dan Kurowo adalah hitam. Ada di antara hitam itu nilai-nilai yang bisa dipelajari. Maka ini peran guru, guru mengajari siswa pintar dan 5 menit selesai. Tapi keberhasilan sang guru adalah saat mampu merubah dari yang tidak memiliki pengetahuan/ketrampilan menjadi berpengetahuan dan berketrampilan aau setidaknya mencapai standar pengetahuan dan ketrampilan. Jika saya ditanya mengajar Kurowo itu mudah, justeru Togog gurunya para Kurowo itu karena dia dengan segala energi mengujinya bahwa berhasil atau tidak maka zamanlah yang akan menentukan. Saya ingin mengajari publik dalam spektrum pengetahuan yang lebih luas dan tidak sekedar berita-berita aktual, politik. Anggap saja ini sebagai oase bagi publik yang jenuh dengan aneka peristiwa dunia. Saya juga mengkritisi budaya Jawa dalam format yang lebih banyak (mengkritisi tidak mesti negatif, dalam arti menggunakan kaca mata yang jernih dengan daya nalar yang baik tanpa pretensi/prasangka negatif). Saya pernah membuat liputan tentang Raja I Mataram Islam yaitu Danang Sutowijoyo. Isunya raja tersebut menikah dengan ratu pantai selatan (Nyi Roro Kidul). Pandangan kritis saya dalam konteks ini apakah Danang Sutowijoyo melakukan hegemoni kekuasaan kepada rakyat atau ingin menunjukkan kesaktiannya bahwa dengan kekuatannya bisa menikah dengan bangsa jin. Artinya '<i>meden medeni</i>' atau menakut-nakuti rakyat bahwa ada raja yang sampai menikah dengan ratunya jin yang berarti sakti mandraguna. Apakah itu bentuk hegemoni kekuasaan kerajaan terhadap rakyat? Tetapi saya saat itu juga menghidupkan khasanah kebudayaan Jawa dalam format yang lebih modern. Misalnya pada saat itu saya membuat <i>event</i> berupa Ajang Sinden Idola (sekitar 96-98). Saya menanyai sejumlah ahli untuk memilih sinden yang paling bagus. Artinya saya mencoba memodernkan produk budaya Jawa, untuk eksis dengan budaya saat itu. Berangkat dari hal ini, ide saya ditiru oleh Universitas Negeri Semarang dengan membuat Festival Sinden Idola. Artinya saya mendisain RSP untuk memberi nutrisi bagi masyarakat Jawa dalam kebudayaan yang berkonteks masa kini. Jadi saya menggali nilai-nilai Islam tapi saya kontekstkan dengan kehidupan saat ini. Tujuan agar ada benang merah perjalanan kebudayaan dari masa ke masa berikut perubahan-perubahannya. Artinya proses kreatif, adaptif, inovatif dalam produk kebudayaan Jawa dicatat oleh sejarah. Sambutan publik saat itu antusias. Untuk mengurangi <i>gap</i> pengetahuan, maka disampaikan juga dalam bahasa Indonesia. Bagaimana tahu publik antusias? Dari respon publik ke SM. Melalui apa? Itu ada berbagai kolom dalam RSP. Di antaranya konsultasi budaya Jawa seperti <i>horoskop</i> Jawa-surat pembaca numpuk yang ingin konsultasi tentang <i>horoskop</i> Jawa dengan sasaran anak muda. RSP terbit perdana dengan 4 halaman isinya beragam mulai liputan khusus berupa topik utama yang ingin dianalisis, pustaka buku termasuk mengulas buku-buku kuno yang ditampilkan utuh secara bersambung, kolom <i>Pringgitan</i>, kolom <i>Blencong</i> dan lainnya.
RKS	: Simbolisasi RSP bersumber dari apa?
HB	: RSP simbolisasi dari Semar yang <i>ngejawantah</i> atau bermetamorfosis menjadi manusia yang bertuah sebagai guru. Guru adalah memberi panduan, bimbingan. <i>Sang Pamomong</i> artinya sang pembimbing. Pembimbing diterjemahkan dalam strategi konten adalah menampilkan semua artikel, analisis berita yang berkaitan dengan budaya Jawa dengan pendekatan nutrisi RSP adalah rubrik untuk budaya Jawa.
RKS	: Ide membuat RSP apakah disetujui owner?
HB	: Ya pasti itu (Budi Santoso (ayahnya Kukrit-CEO SM saat ini). Karena RSP menjadi rubrik unggulan/rubrik pembeda dengan koran lainnya. Bahkan iklan-iklan di SM saat itu juga menggunakan simbolisasi Semar.

RKS	: Nilai-nilai kearifan lokal (KL) dalam budaya Jawa manakah yang dibidik dalam RSP untuk ke audiens?
HB	: Nilai-nilai tentang etika, falsafah, Ke-Tuhanan, nilai-nilai sejarah, pengetahuan tapi lebih mengarah pada etika dan pengetahuan. Jadi jangan sampai orang Jawa itu <i>lali Jawane</i>. Lupa pada Jawanya itu misalnya orang Jawa harus sopan, memiliki tata krama, halus budinya, jujur, menghormati orangtua, tidak korupsi dan nilai-nilai luhur lainnya. Jadi otomatislah seperti itu. Karena nilai-nilai universal budaya Jawa sebenarnya <i>kan</i> sama dengan nilai-nilai budaya lain hanya saja mungkin karena di sini pengetahuan Jawa lebih berkembang (dibuktikan dalam sejarah dengan adanya Candi Borobudur pada abad VIII dan seterusnya). RSP juga mengandung norma-norma dan etika Jawa-inilah yang ingin kami capai yakni ingin mengingatkan kembali orang Jawa terhadap nilai-nilai etika, norma, <i>attitude</i> dan lainnya. Melalui RSP kami juga bertujuan untuk memperkuat identitas sebagai orang Jawa. Tentunya identitas yang adaptif terhadap apa yang di dalam filsafah Jawa yakni <i>nut zaman kalakone</i> (mengikuti perkembangan zaman). Orang Jawa itu <i>kan</i> sangat adaptif dan bisa hidup di mana pun. Artinya senjata orang Jawa yaitu harus menjunjung tinggi langit di mana pun dia berpijak. Makanya zaman dulu orang-orang Jawa adalah kaum perantau, tanpa menafikan suku lain orang Jawa adalah perantau. Di sisi lain RSP juga bertujuan memperkuat jati diri orang Jawa (karena saat itu dengan perkembangan zaman setiap etnis <i>kan</i> sedang gelisah, tata krama sudah tidak lagi menjadi bagian hidup dan seterusnya). Kami melalui RSP ingin membentuk kembali jati diri dengan berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang positif.
RKS	: Apakah ada nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa yang negatif?
HB	: Tentu saja ada, misalnya kesukaan <i>ngerumpi/menggunjing</i> (meski ada juga di semua suku), orang Jawa menyukai barang-barang yang bersifat magis misalnya keris yang bertuah bukan sebagai barang teknologi. Saat saya mengampu RSP, saya mengkaderisasi yakni ada Triyanto Triwikromo (penulis tetap kolom Pringgitan-RSP yang juga sebagai Wapimred SM). Bahwa belakangan RSP menjadi dua halaman dari sebelumnya empat halaman karena mulai kehilangan isu-isu yang menarik serta imbas dari pemadatan isi yang mengharuskan pengurangan halaman. Ini biasa saja terjadi di media (koran) karena bisnis media dinamis seiring realitas. Keterbasan RSP saat ini dari SDM wartawan (wartawan di SM ada sekitar 250 orang tapi yang meminati budaya Jawa sangat terbatas) dan sumber finansial.
RKS	: Sejak awal mendisain RSP sudah melibatkan penulis-penulis luar?
HB	: Iya betul. Penulis-penulis luar adalah para ahli, pakar budaya, antropolog, sosiolog yang paham budaya Jawa. Waktu itu ada honorinya untuk penulis luar. Saya yang menentukan tema-temannya dan menugaskan liputan ke Triyanto T.
RKS	: Bagaimana dengan penggunaan teknologi di SM termasuk untuk RSP?
HB	: Saat itu SM sudah menerapkan <i>computerized</i> dan pengiriman berita menggunakan <i>modem</i> .
RKS	: Awal RSP apakah ada rapat rutin?
HB	: Ya pasti. Saya buat rapat perencanaan dengan mengangkat isu-isu untuk beberapa minggu dan membuat <i>guideline</i>. Sehingga Triyanto T sebagai reporter tinggal menjalankan sesuai <i>outline</i> yang saya buat. <i>Headline</i> dengan tema-tema tertentu, begitu juga dengan <i>Pringgitan</i> dan <i>Blencong</i>. Saya yang menentukan foto-foto yang harus diambil, saat itu hanya ada satu repoter (Triyanto) tapi dibantu oleh wartawan daerah yang sudah dibantu dengan outline sehingga pertanyaan tidak boleh di luar <i>outline</i>. Saya juga sudah menentukan tema-tema untuk para penulis luar. Jadi semua saya yang mendisain dan honor saat itu (1995) sekitar Rp 250.000 per tulisan. Sejak awal RSP menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Tapi sejak awal 2000an pernah ada satu halaman dengan <i>full</i> bahasa Jawa (saya masih mengampu RSP), tujuannya melayani pembaca (orang-orang tua) yang ingin bernostalgia dengan budaya lama Jawa, karena <i>segmented</i> sekali itu pembacanya.
RKS	: Sejak awal siapa segmentasi pembaca RSP?

HB	: <i>All segmen</i> tapi karena <i>all segmen</i> maka konten harus variatif, untuk segmen muda hingga orangtua. Semua orang Jawa. Kalau pun orang non-Jawa membaca itu sebagai pengetahuan dan menambah wawasan. RSP berupaya memenuhi nutrisi pengetahuan Jawa yang saat itu sudah dilakukan oleh media lain seperti majalah Joyoboyo di Surabaya, Penyebar Semangat dan lainnya. Penyampaian dengan bahasa Jawa tapi tampilannya <i>jadul</i> sekali (tidak dimodernkan). Saya sadar akan kemasan, dengan latar belakang ekonomi maka menggunakan pendekatan ekonomi. Jika saya berlatar belakang budaya asli mungkin tidak seperti itu jadinya. Saya mendekatinya sebagai produk yang bisa dijual sehingga dikemas sedemikian rupa karena saya memahami ilmu <i>marketing</i>. Jadi dengan sentuhan lain, sehingga kemasan harus bagus, bahasanya juga bagus sehingga enak dibaca dan isu-isu terkini (mengaktualkan isu-isu dalam budaya Jawa lama) dan diharapkan memberi <i>way out</i>.
RKS	: Mengapa tulisan di RSP juga melontarkan berbagai kritik?
HB	: Sejak awal saya menggunakan pendekatan kritis. Jadi melihat sesuatu dengan kritisi, logis, rasional, etis dan santun. Mengkritiknya orang Jawa <i>kan</i> beda dengan orang Batak.
RKS	: Konten di RSP cenderung mengkritik pemerintah, apakah ini kebijakan sejak awal?
HB	: Saya tidak mengkritik pemerintah. Saya mengkritisi kebudayaan Jawa. Saya tidak menyampaikan berita terkini dalam bahasa Jawa. Jadi murni mengkritisi budaya Jawa. Meski sesekali saya mengkritisi budaya politik yang makin <i>carut marut</i> , tapi dengan menggunakan cara pandang Jawa. Jadi saat itu saya melihat hari ini dalam konteks masa lalu.
RKS	: Saat mengampu RSP apakah pernah ada survei ke pembaca?
HB	: Ada, survei secara keseluruhan yang mengkritisi tentang rubrik-rubrik di SM. RSP termasuk yang diminati. Saya yakin jika pengambilan isunya menarik pasti RSP masih diminati pembaca. Meski tidak sesederhana dalam mengelola RSP tergantung bagaimana pengasuhnya, wartawannya, tingkat pengetahuan/ketrampilan, cara pandang pengelola terhadap keberadaan media ini sangat menentukan. Kelemahan RSP saat ini pada aspek manajerial (perusahaan dan personil yang terlibat). RSP dengan menonjolkan isu-isu <i>inklusif/segmented</i> tentu menjadi peluang karena masih sangat menarik bagi pembaca. Peluang itu harus diciptakan. Terlebih orang Jawa terikat dengan budayanya. Kami mencoba mengeratkan melalui RSP. Istilahnya RSP sebagai alat untuk mempererat kultur Jawa dengan masyarakat sekarang. Jadi <i>ndak jadul-jadul banget</i> isinya. Selain untuk memperkuat identitas Jawa. Namun yang menjadi persoalan adalah transfer <i>knowledge</i> dan <i>skill</i> antara senior (pengelola) ke junior (wartawan dan penulis).
RKS	: Bagaimana supaya kaum remaja meminati RSP?
HB	: Sudah semestinya isu-isu yang berkaitan dengan mereka, bahasa pengantarnya yang biasa dipakai kaum muda dan adanya keterlibatan dari remaja itu sendiri. Saat saya mengampu RSP, saya memasukkan kolom <i>Horoskop Jawa</i> yang diasuh Hudoyo dan saat itu diminati para remaja.

Informan 6.

Nama Lengkap	Gunawan Budi Susanto (Putu)
Jabatan	Pengampu halaman Rubrik 'Sang Pamomong'-Harian 'Suara Merdeka'
Hari & Tanggal	Jumat, 14 Februari 2020
Tempat	Kantor redaksi Suara Merdeka di Jln Kawi Raya No 20, Semarang.
Waktu	Pkl: 11.00 – 12.00

A: Informan- Gunawan Budi Susanto (Pengampu halaman Rubrik Sang Pamomong-Harian Suara Merdeka).

B: Pewawancara Rachmi Kurnia Siregar (Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Komunikasi-FIKOM Universitas Padjadjaran) sebagai peneliti.

- Rachmi Kurnia Siregar = RKS
- Gunawan Budi Susanto = GBS

RKS	: Sejak kapan bergabung di Suara Merdeka (SM)?
GBS	: Sejak 1997 sebagai Redaktur Bahasa
RKS	: Bagaimana awal keterlibatan di Rubrik Sang Pamomong (RSP)?
GBS	: Saya menggantikan Bapak Saroni Asikin yang sebelumnya menggantikan Bapak Triyanto T. Saat saya mengampu RSP dengan satu halaman, pernah ½ halaman karena imbas dari pengurangan halaman dan kemudian kembali satu halaman. RSP edisi Minggu. Tidak ada rapat khusus untuk penentuan tema-tema di RSP.
RKS	: Bagaimana komposisi penulis di RSP?
GBS	: Penulis di RSP ada yang berasal dari redaksi dan sebagian dari luar.
RKS	: Siapa yang memilih penulis luar?
GBS	: Saya diberi keleluasaan untuk menawarkan kepada penulis luar apakah bersedia menulis untuk RSP. Menurut saya, RSP bertumpu pada kesetiaan penulis luar yang mau menulis secara rutin. Kesetiaan ini sudah sangat tinggi, terlebih setelah SM tidak lagi memberikan honor untuk para penulis luar karena kemampuan finansial terbatas. Kesulitan finansial ini merata di kalangan media, selain Suara Merdeka. Paling tidak setahun terakhir ini penulis luar tidak menerima honor. Jadi saya mencari penulis yang bersedia mengisi RSP tanpa honor.
RKS	: Siapa saja penulis luar RSP?
GBS	: Sendang Mulyana, Dhoni Zustiantoro dan Danang Cahyo Firmansyah
RKS	: Bagaimana penentuan tema-tema di RSP bagi para penulis?
GBS	: Kadang penulis tetap bertanya terkait isu atau tema apa yang harus diangkat? Saya memberi keleluasaan terhadap para penulis (tetap dan luar) karena mereka sudah 'jadi', sehingga bebas menentukan isu-isu apa saja yang akan ditulis dalam perspektif budaya Jawa. Serta memberi kemungkinan semacam budaya Jawa adalah bukan sesuatu yang final dalam arti pengertian sebagai kata kerja. Jadi berkemungkinan menawarkan cara pandang baru atau penyikapan baru terhadap segala sesuatu yang sifat kejawaan berkemungkinan memberikan penafsiran baru.
RKS	: Mengapa penulisan di RSP selang-seling menggunakan Bahasa Jawa dan bahasa Indonesia? Apa tujuannya?
GBS	: Kami berupaya mengakomodasi karena tidak semua orang paham bahasa Jawa, maka tidak adil yang tidak menguasai bahasa Jawa untuk tidak tahu. Kami bersepakat memahami segala sesuatu tentang kultur Jawa dan ini dijembatani melalui penggunaan bahasa Indonesia. Bagi pembaca yang berbahasa Jawa, tentu saja sebagai bagian untuk melestarikan agar bahasa Jawa tidak punah. Jika diperhatikan artikel di RSP, dialeknya tidak tunggal. Dhoni (penulis) cenderung ke dialek Solo Jogja, Danang cenderung ke dialeg Kedu-Temanggung. Saroni dialeg Tegal, Brebes, Pemalang dan sebagian bahasa Indonesia. Triyanto T menulis dengan bahasa Indonesia. Dengan demikian kami memberi keragaman dialek bahasa Jawa untuk memperlihatkan kekayaan sekaligus.
RKS	: Meski diberi keleluasaan, apakah arahan agar dikaitkan dengan isu-isu terkini?

GBS	: Tidak juga, pada dasarnya mereka paham ini media yang terbit periodik khususnya RSP edisi Minggu. Ya ada <i>cantolan</i> dengan menulis di media yaitu aktualitas. Jadi dengan sendirinya penulis tersebut sudah mengetahui bagaimana penulisan di media.
RKS	: Tanggapannya terhadap artikel-artikel di RSP terkesan ‘menyentil’ atau kritik?
GBS	: Itu pandangan siapa? Penulis Triyanto mengakui memang tulisannya sebagai kritik terhadap pemerintah, ya itu (kritik) <i>kan</i> sebagai fungsi dari media massa. Kritik itu hanya akan muncul justru sebagai wujud kepedulian ataupun kecintaan terhadap yang dikritik. Jika orang sudah tidak peduli buat apa ngomong dan menjadi <i>cuek</i> dan bahkan masa bodoh. Nah pilihan cara penyampaia kritik bisa <i>macem-macem</i> . Bisa melalui satir, sarkasme, ironi <i>kan</i> itu semua pilihan. Penulis mempunyai gaya di mana membutuhkn rasa nyaman atau <i>style</i> tersendiri. Jika media massa tidak menunjukkan daya mengkritisi ya buat apa juga? Saya kira RSP berpeluang untuk itu tanpa harus melakukan penistaan atau pembunuhan karakter. Sebagai pengampu halaman RSP, saya berpendapat kritik yang disampaikan melalui berbagai macam tadi (kritik, sarkasme dan ironi) belum sampai pada penistaan apalagi pembunuhan karakter. Ini yang paling penting, jadi masih sangat bisa disebut sebagai wujud kepedulian dan kecintaan.
RKS	: Apa hakekat dasar tujuan RSP?
GBS	: RSP bertujuan melestarikan nilai-nilai budaya Jawa yang bagus, ya tentu saja yang bagus dan yang layak dipromosikan dan masih dalam konteks keindonesiaan. Contohnya penghargaan terhadap keragaman, toleransi. Ini bukan lantas <i>sub kultur</i> lain tidak memiliki itu, Cuma ruang hidup SM di Jawa Tengah ya ruang bermainnya di situ. Maka kemudian kami mengangkat <i>sub kultur</i> Jawa dengan mempromosikan nilai-nilai yang baik ini yang patut dilakukan, yang seyogyanya dapat memperkuat kehidupan bersama dalam konteks keindonesiaan. Tidak tercatat sebagai <i>chauvinisme</i> (tidak mengagungkan budaya Jawa dan merendahkan budaya lain) bukan bagian dari kebanggaan. Hidup di Indonesia dengan sendirinya memberi ruang yang sama terhadap berbagai <i>sub kultur</i> untuk berkontestansi mempromosikan nilai-nilai baik pada <i>sub kultur</i> itu. Artinya dalam ruang kehidupan bersama jika sudah beranggapan budaya Jawa adalah yang terbaik dibanding <i>sub kultur</i> lain, saya kira itu tidak tepat. Sepanjang RSP masih bisa menjadi ruang untuk mempromosikan nilai-nilai baik tersebut tanpa menista <i>sub kultur</i> yang lain, maka inilah fungsi RSP. Selain nilai-nilai budaya Jawa, hal terpenting kami berupaya memperkuat cara pandang orang Jawa tentang persoalan etika, falsafah dan menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan (Ke-Tuhanan) dalam perspektif budaya Jawa.
RKS	: Bagaimana dengan pembagian tugas penulis untuk mengisi tulisan utama (<i>headline/HL</i>) di RSP?
GBS	: Ketika penulis luar berhalangan, maka saya sebagai pengampu RSP harus mengisinya. Biasa saja lah media, tidak mungkin kosong halaman tersebut. Jadi saya harus bertanggungjawab. Penulis luar lebih sering mengisi untuk <i>HL</i> , hanya sesekali saja saya yang mengisi <i>HL</i> nya.
RKS	: Apakah pernah ada respon pembaca ke SM terkait RSP?
GBS	: Ya dulu ada. Tapi makin ke sini, saya tidak mengerti. Karena sekarang respon diwujudkan melalui <i>email</i> ke redaksi. Saya tidak membacanya, lain halnya jika dulu ada melalui surat-surat ke redaksi.
RKS	: Sasaran pembaca RSP siapa?
GBS	: Menurut saya sasarannya pembaca dewasa, karena anak-anak jelas tidak. Jika diukur dari rentan usia, di usia 18 tahun ke atas. Ini tidak berbeda jauh dengan usia para penulisnys. Contoh Danang baru saja lulus S1 Sastra Jawa dari Unnes, Dhoni sebagai dosen muda di Unnes dahulu wartawan SM.
RKS	: Bagaimana muatan tulisan di RSP?
GBS	: Pada prinsipnya RSP mengandung budaya Jawa termasuk norma-norma, etika dan nilai-nilai kearifan lokal di dalamnya. Jika misalkan memberi contoh buruk bukan berarti itu yang harus dilakukan.

Informan 7.

Nama Lengkap	Kasiyati
Jabatan/Status	Ibu rumah tangga, pelanggan Harian Suara Merdeka sejak tahun 1970-an
Hari & Tanggal	Jumat, 14 Februari 2020
Tempat	Jalan Lamper Tengah 7 No 561 RT 01 RW 07 Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, 50248 (rumah <i>informan</i>)
Waktu	Pkl: 08.00-08.30

A: Informan- Ibu Kasiyati (Ibu rumah tangga yang juga pelanggan koran Suara Merdeka)

B: Pewawancara Rachmi Kurnia Siregar (Mahasiswa Program Doktorat Ilmu Komunikasi-FIKOM Universitas Padjadjaran) sebagai peneliti.

- Rachmi Kurnia Siregar = RKS
- Kasiyati = Kas

RKS	: Apakah Ibu sebagai pembaca koran Suara Merdeka?
Kas	: Iya
RKS	: Apakah Ibu juga berlangganan koran Suara Merdeka?
Kas	: Iya, saya dan suami memang berlangganan koran Suara Merdeka sejak tahun 1970-an.
RKS	: Apakah Ibu pernah membaca Rubrik Sang Pamomong (RSP) di Suara Merdeka?
Kas	: Saya sering baca tulisan di Rubrik Sang Pamomong
RKS	: Rubrik Sang Pamomong di Suara Merdeka terbit hari apa?
Kas	: Seingat saya sih Minggu jika tidak berubah-ubah harinya
RKS	: Bagaimana tanggapan Ibu terhadap tulisan-tulisan di Rubrik Sang Pamomong (RSP)?
Kas	: Menurut saya RSP isinya sebagai nasehat-nasehat zaman dahulu yakni budi pekerti, jadi <i>ngemong</i> . Kisah-kisah pewayangan. Tentu saja RSP penting, saat ini banyak anak-anak muda yang sudah tidak mengetahui cerita dan kisah-kisah pewayangan maupun tentang budaya Jawa. Mereka lebih senang dengan budaya-budaya barat termasuk budaya Korea, sehingga merasa asing dengan budayanya sendiri.
RKS	: Apakah tulisan-tulisan di RSP memiliki relevansi dengan kehidupan sekarang?
Kas	: RSP berisi budaya Jawa dan ditulis dengan kondisi saat ini. Saya kira RSP penting untuk bagaimana caranya dalam melestarikan budaya dan nilai-nilai budaya Jawa bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak dan remaja. Karena seperti kita ketahui bersama, sebagian anak-anak muda sudah tidak lagi mengetahui tata krama dan nilai-nilai budaya Jawa dan ini berpengaruh terhadap perilaku mereka. Saya dan para orangtua dulu sangat ketat diajarkan tentang budi pekerti budaya Jawa dan lainnya. Tapi sekarang kerap kali orangtua <i>dicuekin</i> oleh anak yang kini malah lebih akrab dan asyik dengan <i>gadget</i> , menonton Tv dan sebagainya. Nilai-nilai budaya lokal kini luntur oleh budaya barat yang terus mengintai masyarakat kita, terlebih bagi generasi muda.
RKS	: Pentingkah tulisan-tulisan dalam Rubrik Sang Pamomong bagi ibu sekeluarga dan untuk pembaca lainnya?
Kas	: Bagi saya isi artikel dalam Rubrik Sang Pamomong sangat penting artinya bagi masyarakat khususnya masyarakat Jawa agar tetap selalu ngeh akan nilai-nilai luhur budaya Jawa dan untuk dilestarikan ke anak cucu.
RKS	: Artikel dalam Rubrik Sang Pamomong kerap juga melontarkan kritik tajam ke pemerintah, pendapat Ibu bagaimana?
Kas	: Sejauh ini yang saya baca dari artikel-artikel di Rubrik Sang Pamomong memang ada <i>sih</i> kritik bahkan ada juga yang tergolong rada keras ya, tapi <i>ndak</i> apa-apa <i>sih</i> sepanjang memang benar <i>kan</i> yang dikritik itu supaya tidak makin <i>melenceng</i> jauh, <i>toh kan</i> tidak menyebarkan fitnah ke masyarakat. Jadi intinya yang <i>ndak</i> apa-apa juga <i>sih</i> kritik-kritik tersebut.
RKS	: Menurut Ibu apa kendala dalam mewariskan nilai-nilai adiluhung yang terdapat dalam Rubrik Sang Pamomong untuk diketahui anak cucu?

Kas	: Kendala utama bahwa anak-anak sekarang sudah <i>emoh</i> baca koran dan asyik baca berita-berita di online dari HP. Padahal dari HP kan tidak mungkin selengkap tampilan yang ada di koran.
RKS	: Apa saran Ibu untuk redaksi Suara Merdeka khususnya terkait adanya Rubrik Sang Pamomong di koran?
Kas	: Saya sarankan supaya redaksi Suara Merdeka juga menampilkan artikel-artikel di Rubrik Sang Pamomong supaya juga ada di <i>online</i> dan media sosial yang dikelola oleh tim Suara Merdeka, jadi jangan hanya di koran saja.
RKS	: Saran dan masukan Ibu untuk Suara Merdeka khususnya untuk Rubrik Sang Pamomong?
Kas	: Saya berharap Rubrik Sang Pamomong harus tetap ada, bagaimana pun caranya meski halaman banyak kepotong iklan atau berita-berita lainnya. Saya dan beberapa teman-teman yang sudah lansia senang membaca tulisan-tulisan di Rubrik Sang Pamomong-anggap saja sebagai nostalgia budaya bagi saya dan rekan-rekan.
RKS	: Sepengetahuan Ibu apakah koran lainnya juga menampilkan tulisan-tulisan yang ada di Rubrik Sang Pamomong di Suara Merdeka
Kas	: Saya tidak membaca koran lainnya, saya hanya rutin membaca koran Suara Merdeka hingga sekarang ini.

Informan 8.

Nama Lengkap	Drs. H. Soerjanto
Status	Pensiunan Kepala Sekolah SMA di Semarang, pelanggan Harian Suara Merdeka sejak tahun 1970-an
Hari & Tanggal	Jumat, 14 Februari 2020
Tempat	Jalan Ciremai Raya No 9 Rt 07 RW -2, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Semarang (rumah <i>informan</i>)
Waktu	Pkl: 09.10- 09.40

A: Informan- Drs H. Soerjanto (Pensiunan Kepala SMA di Semarang yang juga pelanggan Harian Suara Merdeka).

B: Pewawancara Rachmi Kurnia Siregar (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Komunikasi -FIKOM Universitas Padjadjaran) sebagai peneliti.

- Rachmi Kurnia Siregar = RKS
- Soerjanto = Soer

RKS	: Apakah Bapak sebagai pembaca koran Suara Merdeka?
Soer	: Iya
RKS	: Bagaimana Bapak mendapatkan koran Suara Merdeka?
Soer	: Saya berlangganan koran Suara Merdeka
RKS	: Sejak kapan Bapak berlangganan Suara Merdeka?
Soer	: Kalau saya tidak salah sekitar tahun 1970a-n
RKS	: Apakah Bapak pernah membaca Rubrik Sang Pamomong (RSP) di Suara Merdeka?
Soer	: Saya sering lho baca tulisan-tulisan di rubrik itu (Rubrik Sang Pamomong)
RKS	: Rubrik Sang Pamomong di Suara Merdeka terbit hari apa?
Soer	: Lebih sering terbit Minggu. Saya senang membaca artikel-artikel di RSP, ketepatan <i>kan</i> saya sudah pensiun jadi memang banyak waktu. Selain membaca di hari Minggu, juga di hari lainnya saya kerap membaca kembali beberapa tulisan/artikel tersebut.
RKS	: Bagaimana tanggapan Bapak terhadap tulisan di RSP?
Soer	: Menurut saya tulisan-tulisan dalam RSP mengandung budaya Jawa (nilai-nilai dan filosofi) dan sangat penting untuk terus menerus disampaikan ke masyarakat. Karena menggali dari nilai-nilai keluhuran (positif) di era zaman dahulu, dan diungkap lagi dengan saat ini sehingga ada relevansi tentunya. RSP penting dan bermanfaat karena itu tadi mengandung falsafah Jawa yang berisi nasehat-nasehat sehingga penting untuk diwariskan ke generasi muda. Tulisan-tulisan di RSP juga mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ada yang menceritakan tentang sejarah/kerajaan Jawa zaman dulu. Jadi saran saya SM supaya mempertahankan RSP, untuk mempertahankan budaya lokal/budaya Jawa di tengah gempuran budaya global dampak dari globalisasi.
RKS	: Pentingkah tulisan-tulisan dalam Rubrik Sang Pamomong bagi Bapak sekeluarga dan untuk pembaca lainnya?
Soer	: Penting sekali karena menjadi pegangan maupun pedoman hidup bagi masyarakat banyak, jadi tidak hanya penting untuk masyarakat Jawa. Karena nilai-nilai luhur budaya Jawa sifatnya universal kok.
RKS	: Artikel dalam Rubrik Sang Pamomong kerap juga melontarkan kritik tajam ke pemerintah, pendapat Bapak bagaimana?
Soer	: Bagi saya tidak apa-apa <i>sih</i> karena pasti tujuannya <i>kan</i> untuk kebaikan bersama, tidak ada unsur sentiment atau hal negatif lainnya.
RKS	: Menurut Bapak apa kendala dalam mewariskan nilai-nilai adiluhung yang terdapat dalam Rubrik Sang Pamomong untuk diketahui anak cucu?
Soer	: Bagi saya yang sangat krusial adalah koran sudah semakin ditinggalkan pembacanya terlebih bagi kaum muda
RKS	: Apa saran Bapak untuk redaksi Suara Merdeka khususnya terkait adanya Rubrik Sang Pamomong di koran?

Soer	: Saran saya supaya Rubrik Sang Pamomong harus tetap ada, tapi juga harus bisa tayang di <i>online</i> supaya jangkauannya luas <i>gitu lho</i> jangan hanya di koran saja, <i>kan</i> pembacanya makin sedikit.
RKS	: Sepengetahuan Bapak apakah koran lainnya juga menampilkan tulisan-tulisan yang ada di Rubrik Sang Pamomong di Suara Merdeka.
Soer	: Maaf <i>mbak</i> saya tidak tahu.....maaf <i>nggiiih</i> .

Informan 9.

Nama Lengkap	Prof. Dr. Mujahirin Tohir, MA
Jabatan	Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang
Hari & Tanggal	Rabu, 26 Februari 2020
Tempat	Kampus Undip Tembalang-Semarang
Waktu	09.00-11.00

A: Informan- Prof. Dr. Mujahirin Tohir, MA (Guru Besar FIB Undip, penulis di Harian Suara Merdeka dan pelanggan Suara Merdeka sejak tahun 1970-an).

B: Pewawancara Rachmi Kurnia Siregar (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Komunikasi-FIKOM Universitas Padjadjaran) sebagai peneliti.

- Rachmi Kurnia Siregar = RKS
- Mujahirin Tohir = MT

RKS	: Apakah budaya berperan dalam kehidupan manusia?
MT	: Kebudayaan jika dibaca sebagai cara hidup manusia, maka cara hidup berupa pengetahuan, kepercayaan, kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, budi pekerti dan lainnya, maka itulah yang menentukan coraknya. Hal tersebut tergantung dari parameter ajaran-ajaran itu yang tentu berbeda.
RKS	: Sejauhmana hakekat budaya dalam kehidupan masyarakat?
MT	: Budaya melahirkan pola-pola tindakan. Contoh tulisan di Rubrik Sang Pamomong (RSP) di Suara Merdeka (SM) merupakan interaksi kebudayaan antara penulis dengan pembaca. Jika SM dikagumi oleh masyarakat Jawa Tengah (Jateng), karena umumnya tulisan-tulisan di SM ditulis oleh orang Jawa yang memiliki kebudayaan yang relatif sama dengan pembacanya sehingga ada keakraban pemahaman.
RKS	: Apakah pernah membaca RSP di SM?
MT	: Saya sering membaca tulisan-tulisan di RSP, karena saya pun sebagai penulis di SM untuk <i>Rubrik Gayeng</i> edisi Minggu.
RKS	: Bagaimana peranan budaya lokal dalam membentengi diri dari budaya global?
MT	: Budaya global memang menghegemoni, tapi menghegemonikan dalam fasilitas yang dimiliki. Misalnya budaya global sebagai fasilitas instrumental bukan fasilitas substansial, yang bagi masyarakat lokal hanya sebagai pengetahuan yang kadang-kadang dilakukan sebagai komparasi meski oleh sebagian kecil orang dijadikan acuan. Tapi individu untuk memiliki dan mempertahankan budaya lokalnya, karena budaya lokal oleh budaya yang telah diajarkan dan disosialisasikan dalam waktu yang sangat panjang. Jadi orang Jawa tidak bisa lepas dari kejawaannya.
RKS	: Bagaimana cara melestarikan budaya budaya lokal termasuk budaya Jawa khususnya bagi kaum muda?
MT	: Di sinilah lalu muncul istilahnya <i>ideal culture</i> (IC) dan <i>factual culture</i> (FC). IC adalah kumpulan dari ajaran-ajaran yang dianggap baik sebagaimana yang terdapat dalam kebenaran konstitutif, kognitif, evaluatif dan lainnya. Tapi karena ajaran-ajaran itu hampir selalu mengacu pada moralitas, spiritualitas, pada saat yang sama dari diri manusia juga muncul kebutuhan <i>sense of sex</i> (nafsu) maka kebudayaan Jawa tadi dalam satu sisi berlaku sebagai IC tapi dalam praktek kesehariannya boleh jadi tidak menunjukkan pada konstruksi IC. Apa sebabnya? Karena banyak gangguan antara lain cara memahami tentang <i>prestise</i> sosial, kenikmatan sosial, kenikmatan material yang mulai bergeser oleh kebudayaan global. Contoh dalam kebudayaan Jawa ada ungkapan: 1) <i>Parengkung padang, marang wong kepetengan</i> (memberi pencerahan bagi orang yang kebingungan); 2) <i>Pareng tekan mareng wong kelenyen</i> (menasehati kepada orang yang mulai berfikir tidak benar) ; 3) <i>Pareng unjungan mareng wongkan kelenyen</i> (memberi minuman kepada orang haus/manusia harus peduli kepada sesama. Lalu dalam budaya global terjadi transaksional yaitu seseorang akan membantu yang lain jika ada timbal baliknya. Padahal sebelumnya sudah seharusnya kita membantu

	orang lain. Sehingga baik kebudayaan global, termasuk paradigma pendidikan formal mengganggu kebudayaan lokal. Dalam fakta empiriknya seringkali mengganggu karena <i>spirit</i> dari Pendidikan formal tidak ditujukan bagaimana memperbaiki manusia dalam konstruksi akal budi, tapi lebih prioritas pada pengembangan penalaran untuk mencapai kesejahteraan atau kesuksesan menurut kebudayaan-kebudayaan global. Tidak heran jika ada orang yang sarjana atau berilmu tinggi, tapi akhlakanya tidak sesuai dengan kebudayaan-kebudayaan lokal.
RKS	: Jadi apa solusinya dalam menyikapi kondisi buruk tersebut?
MT	: Di sinilah para penulis di RSP-SM biasanya menulis atas dasar keresahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga bertujuan mengembalikan jati diri budaya lokal. Di antara caranya dengan membuat ilustrasi-ilustrasi pewayangan. Jadi karakter-karakter tokoh wayang yang baik diungkapkan kembali dengan bahasa-bahasa sekarang.
RKS	: Apa nilai-nilai kearifan lokal (KL) dalam budaya Jawa?
MT	: Selain ada <i>ideal culture</i> (ajaran yang seharusnya dilakukan masyarakat misalnya berupa norma-norma) dan <i>factual culture</i> (tingkah laku yang terjadi/eksisting) selalu ada <i>gap</i>. Bicara budaya Jawa, harus dibedakan dengan budaya Jawa pedalaman dan budaya Jawa pesisiran. Memang konstruksi intinya masalah Jawa. Tapi Jawa pesisiran lebih banyak diwarnai lingkungan alam dan ajaran Islam. Pesisiran adalah alam terbuka dan mengurai karakter orang pesisiran lebih terbuka. Lalu ajaran Islam mengcounter pada kebudayaan Jawa yang coraknya <i>stratified</i> dan Hindunistik. Dalam bahasa Islam dikenal sebutan tidak ada kelebihan etnis Arab dibandingkan etnis di luar Arab, yang membedakan adalah ketaqwaannya. Jadi ajaran-ajaran inilah yang menarik orang Jawa yang sebelumnya Hindunistik-dalam kasta bawah lalu bangkit menjadi individu yang merdeka. Karena dalam ajaran agama itu memberikan kemerdekaan. Ini melahirkan perilaku atau karakter yang terbuka, <i>straight forward</i> (langsung pada pokok persoalan), cara tutur bersifat <i>equal</i> karena orientasi tentang manusia ideal bukannya untuk menjadi pejabat tapi menjadi orang beragama atau orang Islam yang baik dan yang kaya lalu terjun sebagai wirausaha. Secara umum tentu ada variasinya. Wirausaha salah satu hal adalah dalam dunia pasar dan ada konsep jual beli. Ada penjual dan pembeli. Hubungan antara keduanya setara. Bahasa yang digunakan <i>to the point</i>. Ini menjadi corak orang Jawa dengan budaya pesisiran. Orang Jawa pesisiran tidak terbiasa menggunakan bahasa Jawa halus, karena hidup dalam orientasi pasar. Ini berbeda dengan masyarakat Jawa pedalaman yang lingkungan kerajaan ada raja, keluarga raja, ada para pegawai kerajaan dan rakyat biasa. Maka struktur <i>stratified</i> sosial masih sangat nampak sekali. Sehingga bahasanya juga sangat nampak di antara bahasa Jawa <i>kromo inggil</i> berbeda Jawa <i>ngoko</i> dalam kehidupan masyarakat Jawa pedalaman. Bahasa Jawa <i>inggil</i> yaitu <i>mlipir</i> (pakai bahasa kiasan/metaforik dan lainnya). Sehingga jika orang Jawa bilang <i>inggih</i> maka tidak langsung berarti iya. Bagi orang di luar Jawa, hal ini memandang orang Jawa sebagai orang munafik. Karena bilangannya iya tapi tidak. Nah kata-kata orang munafik itu salah alamat. Kenapa? Karena orang Jawa tidak memiliki kebudayaan mengatakan tidak. Orang Jawa itu mempunyai kepribadian untuk menyakit diri sendiri agar jangan sampai menyakiti orang lain/luar. Artinya lebih baik melukai diri sendiri. Hal-hal tersebut inilah yang oleh para penulis RSP mengkonstruksi dari cerita-cerita wayang. Wayang bagi orang Jawa pedalaman lengkap ceritanya. Nilai-nilai kearifan lokal (KL) jika ingin dilihat secara mudah, maka lihatlah dalam peribahasa, ungkapan dan kata-kata Mutiara Jawa. Karena KL itu dipadatkan dalam narasi ungkapan, peribahasa, kata-kata Mutiara Jawa. Contoh ada ungkapan <i>ojo ngumpulin kebo lupa</i> (jangan mendekati kebo kotor) yang dimaknai jangan bergaul dengan orang-orang jahat. Ini sebagai bagian bentuk kearifan dan menjadi nasehat untuk anak remaja. Jadi jika mendekati orang jahat maka lebih banyak larut dalam kejahatan mereka. Tapi bagi orang-orang yang sudah matang, ia harus sebagai posisi <i>cah angon</i> yaitu orang yang merawat <i>kebo</i>. Ini sebagai metafora bagi orang-orang yang berilmu atau orang kuat tugasnya memperbaiki atau membimbing orang-orang jahat.

RKS	: Sejauhmana budaya Jawa memiliki relevansi dengan kondisi saat ini?
MT	: Tergantung dari individu-individu yang ada di dalamnya. Tapi biasanya manusia itu akan memiliki siklus. Saat ia sedang mencari kadang-kadang ketemu atau tidak yang dicarinya. Tapi semakin tua biasanya makin mengendap untuk mengikuti KL. Boleh jadi anak-anak orang Jawa kehilangan kejawaannya, tapi ketika ia sudah mulai merenungkan makai a akan bisa kembali lagi sebagai orang Jawa.
RKS	: Caranya bagaimana?
MT	: Melalui proses perenungan. Misalnya dengan pewayangan. Di Islam ada banyak kitab-kitab kuning yang berisi ajaran moral. Ajaran moral bersifat universal mirip dengan kebudayaan Jawa.
RKS	: Bagaimana pandangan Bapak terhadap upaya pemerintah dalam melestarikan budaya lokal termasuk budaya Jawa?
MT	: Jika bicara pemerintah itu bicara soal formalitas karena itu tugas pemerintah mengajak orang-orang arif yang berpengetahuan untuk menjadi ujung tombak bagi sebuah peradaban yang baik. Jadi tugas pemerintah memfasilitasi saja atas impian bersama bagaimana membangkitkan kembali KL, karena ia menjadi panduan bagi masyarakat. Siapa yang biasa melakukannya? Ya orang-orang yang dianggap ahli di bidangnya. Bukan lalu pemerintah yang mempertahankannya sendiri. Di antaranya akademisi (antropolog, sosiolog, psikolog), seniman, kyai dan lainnya. Karena seseorang tidak pernah memiliki keahlian yang bersifat paripurna.
RKS	: Bagaimana pandangan Bapak terhadap fungsi media massa yang diantaranya sebagai pewaris budaya?
MT	: Dalam satu sisi ada tulisan di SM khususnya RSP sebetulnya sangat penting untuk menjadi bagian dari acuan/renungan bagi pembaca. Masalahnya apakah SM atau RSP dibaca oleh banyak orang atau tidak? Jadi katakanlan orang membeli SM tapi <i>kan</i> tidak otomatis membaca RSP. Jadi itu bermanfaat. Tapi pertanyaannya yakni bagaimana memaksimalkan kemanfaatan itu sendiri yang masih harus didiskusikan ulang. Misalnya bagaiman jika pimpinan SM kerjasama dengan pemerintahan mulai dari level gubernur hingga lurah. Lalu di kecamatan hingga kelurahan disediakan koran dan ada sosialisasi atau anjuran untuk gemar membaca koran termasuk SM termasuk RSP. Ini kan lebih efektif untuk dibaca. Jadi selama ini kerja sama tersebut nampaknya belum, sehingga bisa saja penulis menuliskannya dengan baik tapi belum tentu dibaca orang.
RKS	: Sejauhmana tulisan RSP mengandung unsur budaya dan nilai-nilai kearifan lokal Jawa?
MT	: Tentu saja, penulis RSP adalah budayawan-budayawan yang ahli tentang budaya Jawa dan kuat dalam pemahaman budaya Jawa. Karena itu ditulis antara lain tentang renungan atau keresahan budaya Jawa di persimpangan jalan. Tugas penulis mengembalikan aspek budaya Jawa yang baik lewat bahasa-bahasa budaya. Bahasa-bahasa budaya kan bukan bahasa perintah tapi bahasa cerita, bahasa sindirian dan lainnya.
RKS	: Bagaimana maksud budaya Jawa di persimpangan jalan?
MT	: Maksudnya masyarakat Jawa hidup dan acuannya tidak <i>melulu</i> dari ajaran atau tradisi-tradisi Jawa, bahwa itu dipertanyakan hubungannya apakah sesuai dengan agama atau tidak. Ini misalnya. Sehingga boleh jadi dalam masyarakat yang merasa lebih dominan agamanya, dia lebih menilik ajaran dari kitab-kitab yang dipelajari yang boleh jadi apa yang diajari itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam kebudayaan Jawa. Selanjutnya terkait konsistensi. Apakah terhadap ajaran yang baik-baik itu orang-orang Jawa konsisten melaksanakan sesuai ajarannya itu (<i>ideal culture/IC</i> dan <i>factual culture/FC</i>). IC mengacu pada kerohanian, moralitas dan religiusitas. Sementara FC lebih mengacu pada kebutuhan-kebutuhan riil manusia itu sendiri. Jika kebutuhan-kebutuhan riil bersifat kebendaan, maka boleh jadi tidak sesuai dengan yang diajarkan dalam IC.

Informan 10.

Nama Lengkap	Dhoni Zustiyantoro
Pekerjaan	Dosen Sastra Jawa-Fakultas Budaya dan Seni (FBS) Universitas Negeri Semarang; Penulis Tetap Rubrik Sang Pamomong versi Bahasa Jawa; mantan Wartawan Harian Suara Merdeka
Hari & Tanggal	Kamis, 27 Februari 2020
Tempat	Progam Studi Sastra Jawa- Fakultas Budaya dan Seni (FBS) Universitas Negeri Semarang (Unnes)
Waktu	08.30-10.30

A: Informan- Dhoni Zustiyantoro (Dosen FIB Unnes, penulis tetap RSP versi Bahasa Indonesia dan mantan wartawan Harian Suara Merdeka).

B: Pewawancara Rachmi Kurnia Siregar (Mahasiswa Program Doktorat Ilmu Komunikasi- FIKOM Universitas Padjadjaran) sebagai peneliti.

- Rachmi Kurnia Siregar = RKS
- Dhoni Zustiyantoro = DZ

RKS	: Sejak kapan menulis di Rubrik Sang Pamomong (RSP) di Suara Merdeka (SM)? Syaratnya apa?
DZ	: Saya menulis di RSP sejak 2010, saat masih kuliah S1. Awalnya diajak oleh senior yang mengampu di SM yakni Sucipto Hadi Purnomo (dahulu wartawan SM). Pada 2010, Sucipto mendelegasikan ke saya dan sejak itu saya diputuskan menjadi salah satu kolomnis tetap RSP. Saat itu semua orang bisa mengirim tulisan untuk RSP maupun ke redaksi SM. Tulisan yang lolos seleksi akan dimuat dan mendapat honor. Saya senang sekali begitu pertama kali mendapat honor. Jadi rutin menulis setiap minggu dalam sebulan. Ini juga menjadi menjadi sarana belajar sehingga saya juga menulis di berbagai media. Tulisan saya di RSP menjadi <i>embrio</i> untuk terbit di media lainnya. Suatu kebanggaan bagi saya karena saya bisa membangun jejaring di media lain hingga sekarang. Syarat mengisi di RSP, penulis harus memahami dan mempunyai wawasan luas dalam hal kebudayaan Jawa karena konsepnya memang merefleksikan kondisi aktual terhadap kebudayaan Jawa..
RKS	: Apa motivasinya menulis untuk RSP?
DZ	: Saya sebagai mahasiswa motivasinya ya untuk mendapatkan uang saku, sehingga mendorong saya saat itu untuk terus belajar menulis. Selain untuk mengasah wawasan terkait kebudayaan Jawa untuk dituangkan dalam tulisan melalui proses perenungan sehingga dapat memperkaya pengalaman diri sekaligus merefleksi khasanah budaya Jawa dalam perspektif kekinian yang aktual, penting, menarik dan berguna untuk pembaca Suara Merdeka maupun masyarakat pada umumnya. Singkatnya mampu memberi ‘nutrisi’ bagi pembaca setia Suara Merdeka.
RKS	: Apa isi tulisan di RSP?
DZ	: Isinya merupakan refleksi kebudayaan, bagaimana cara penulis yang dianggap sedikit banyak paham akan kebudayaan Jawa-dalam hal ini merefleksikan kasus-kasus aktual dan faktual. Dalam kasus politik terkini apa yang sedang <i>in</i> ? Lalu mencoba merefleksikannya dalam konteks kebudayaan Jawa melalui cerita-cerita pewayangan, cerita lisan, cerita ketoprak, mitos, legenda, dan seterusnya. Kami percaya bahwa permasalahan itu <i>kan</i> sebelumnya dulu pernah terjadi. Masalah politik, masalah kekuasaan merupakan masalah-masalah berulang yang terjadi sebelumnya. Jika sudah pernah terjadi sebelumnya <i>kan</i> sudah ada cermin untuk kita menyelesaikannya. Hal-hal inilah yang kemudian menjadi sudut pandang kritik, maupun refleksi kami dalam menulis di RSP. Kira-kira begitu. Jadi kritik, masukan kepada bangsa, negara, masyarakat dan seterusnya.
RKS	: Isi tulisan utama di RSP terkait hal apa?

DZ	: Saya pribadi menggali kembali prinsip-prinsip atau kearifan lokal budaya Jawa yang kemudian direfleksikan dalam kasus-kasus yang aktual, bahwa nilai-nilai tersebut sekalipun zaman ini sudah modern, canggih di era globalisasi dan revolusi digital tetap ada relevansinya. Saya mencoba menariknya dari kasus-kasus aktual dan kemudian mencoba menawarkan konklusi atau solusi dari semua permasalahan ini supaya mari kita kembali pada nilai-nilai kearifan itu., tentunya tetap bermuara pada nilai-nilai adiluhung budaya Jawa. Atau justru kita saat ini sebenarnya sudah sangat mengabaikan nilai-nilai kearifan terhadap masalah-masalah aktual yang dihadapi ini. Saya justru mencurigai hal itu. Tentang bagaimana para politisi kita sangat gemar adu bicara di media dan seterusnya-memperlihatkan kecanggihan mereka dalam berbicara <i>seenak sendiri</i> . Lantas bagaimana budaya Jawa melihat orang/pemimpin itu harus konsisten (tidak boleh mencla-mencle) setiap kali berkata. <i>Sabda pandito ratu tan keno wola wali</i> . Karena perkataan pemimpin ibarat sabda yang harus konsisten. Maka setiap perkataan yang ke luar di media dalam berbagai format, semestinya sudah menjadi bahan refleksi/perenungan yang sudah dilakukan sebelumnya. Inilah yang saya pikir harus kita gali.
RKS	: Bagaimana menggali budaya Jawa melalui RSP?
DZ	: Saya memaknai budaya Jawa itu mungkin justru nilai universal, dalam konteks budaya Jawa itu sendiri secara makro. Artinya dalam kebudayaan Jawa selalu ada titik temu, bukannya mempertentangkan antara kebudayaan Jawa keraton yang eksklusif dengan masyarakat Jawa pesisir yang cenderung melawan keraton. Ini saya pikir hanya pada wilayah permukaan saja. Tetap ada benang merah bahwa kebudayaan Jawa akan menemukan rasa kebudayaannya itu sendiri yang sama. Apakah Jawa pesisir, Jawa Semarang dan lainnya. Jawa Semarang itu egaliter karena pesisir dan tempat di mana kebudayaan Arab, Jawa dan Tionghoa itu bersatu. Tapi selalu saja ada sisi-sisi temunya terlebih menyangkut nilai—nilai kearifan lokal.
RKS	: Mengapa tulisan-tulisan dalam RSP kerap mengandung kritik?
DZ	: Saya memaknai kritik bahwa penulis perlu memikat pembacanya melalui tulisan yang menarik mulai dari judul, alinea pertama dan seterusnya. Mungkin saja sesekali penulisnya memasukan kritik. Beberapa waktu lalu saya menulis tentang fenomena masyarakat dalam bermedia sosial-saat itu dikaitkan dengan kontestansi politik Pilpres. Debat kusir di medsos. Saya membuat tulisan berjudul ' <i>Golek Bener Katon Ke Pinter</i> ' artinya mencari pembenar, memperlihatkan kepintaran. Apakah hal tersebut mencerminkan budaya Jawa? Ternyata penelusuran saya tidak. Karena orang Jawa selalu mengedepankan untuk tidak sombong dengan <i>kepinterannya</i> . Begitu pula dengan budaya lainnya. Saya pikir hal-hal tersebut menjadi refleksi. Jika tidak disebut mungkin dalam kajian-kajian terkini sebagai satir, sarkas dan lainnya. Ya bisa jadi, sah-sah saja. Sebagai refleksi, sebagai kritik, masukan. Selalu ada sisi-sisi ketika kebudayaan itu merefleksikan hal-hal lampau yang menjadi pedoman di tengah masyarakat. Penafsiran. Karena kami tidak pernah 'menembak' langsung kesalahan ke pihak-pihak tertentu atau seseorang. Tapi kami berupaya menunjukkan jalan tengah dari berbagai permasalahan yang sedang aktual. Bahasa menjadi sarana bagi kami dalam menyampaikan hal tersebut. Ada satir, mungkin sarkas dan lainnya.
RKS	: Apakah hal tersebut (kritik) menjadi pegangan di SM agar tulisannya lolos dan dimuat?
DZ	: Semuanya kembali kepada penulisnya. Kolom <i>Pringgitan</i> misalnya oleh pak Triyanto Triwikromo (TT) yang kerap mengutip cerita-cerita wayang dan dimodifikasi. TT pernah menulis seorang pemimpin juga tergantung dari teman-teman di sekelilingnya dengan mencontohkan ksatria (cerita wayang) yang ada beberapa punakawan seperti Semar, Petruk, Gareng, Bagong. Tetapi bagaimana ceritanya ketika para punakawan selalu ngompor-ngompori pemimpin untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Jika direfleksikan dalam bahasa lugas dan tidak terbungkus dalam cerita wayang, semu (mengatakan sesuatu yang tidak langsung/ <i>pasemon</i>) maka mungkin akan sangat menonjol (kritik). Tapi ketika cerita itu merefleksikan bahwa seorang

	punakawan berpengaruh terhadap seorang pemimpin/ksatria yang akan menjadi terdepan memimpin masyarakat, bangsa, negara, itu juga akan sangat besar pengaruhnya dari beberapa punakawan di sekitarnya.
RKS	: Bagaimana penentuan tema-tema untuk di RSP apakah bebas atau ditentukan SM?
DZ	: Ada waktu penulis diminta untuk menulis bebas atau ada waktu pada minggu tertentu kami menulis hal-hal tertentu atau mengomentari kasus tertentu. Misalnya Redaktur Pelaksana (Redpel) mengirim pesan via <i>What's App</i> (WA) ke penulis untuk menulis <i>headline</i> (HL) di RSP. Ada waktu di mana tiga tulisan di RSP (Tulisan utama, <i>Pringgitan</i> dan <i>Blencong</i>) memiliki satu tema meski ditilik dari perspektif berbeda oleh ketiga penulis. Saya dari pendekatan aktual, TT dalam <i>Pringgitan</i> dari sisi refleksi cerita-cerita wayang yang sudah dimodifikasi. <i>Blencong</i> justru cerita wayang yang lebih murni. <i>Pun</i> ada kalanya penulis tidak diminta untuk menulis tema-tema tertentu. Biasanya diminta atau tidaknya pada Senin untuk minggu ini dan <i>deadline</i> Kamis pagi karena akan <i>delay-out</i> pada Jumat dan terbit pada Minggu.
RKS	: Seiring era revolusi digital, membuat bisnis media cetak terus terpuruk termasuk yang dialami Suara Merdeka. Apa harapannya terhadap SM khususnya untuk RSP?
DZ	: Selalu ada sisi media di mana kini dikenal jurnalisme viral, apapun harus viral, berita-berita bombastis. Tapi ada sisi-sisi ketika itu media harus mempertahankan idealismenya yang bisa ditunjukkan dengan konsistensi untuk merawat identitasnya juga. Ketika SM sudah mendeklarasikan diri sebagai <i>korane wong</i> Jawa Tengah (korannya orang Jateng) dengan <i>tagline</i> Perekat Komunitas Jateng, maka Jateng ini punya apa sih sebenarnya? Dengan berbagai macam kebudayaannya, maka tidak ada cara lain bagi SM untuk terus mempertahankan RSP.
RKS	: Apa sarannya untuk SM khususnya terkait RSP?
DZ	: Saya kira dalam realitas sekarang ini halaman terus berkurang, dengan mempertahankan satu halaman untuk RSP sudah sangat luar biasa. <i>Kan</i> bisa saja dengan sangat mudah bahwa halaman RSP untuk iklan misalnya. (Per Januari 2010, RSP di halaman 2). Jadi militansi SM sesuai <i>tagline</i> menjadi pertarungan yang harus dibuktikan sebagai korannya Jateng. Kekuatan RSP yakni berupaya mengangkat kembali nilai-nilai budaya Jawa di tengah era globalisasi di antaranya membangun dan memperkuat keselarasan, keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Mungkin bisa saja justru ada pihak-pihak yang ingin membuat gaduh. Dalam tinjauan-tinjauan <i>post modern</i> itu membentuk norma baru sejalan imperialisme budaya sebagai dampak era globalisasi. Untuk merefleksikan identitas supaya kita tidak kehilangan identitas, toh kita memiliki kekayaan budaya. Saya memaknainya sebagai pedoman. Ketika budaya itu bisa berfungsi di tengah masyarakat, maka tiada lain kebudayaan menjadi pedoman bagi masyarakat. Ketika masyarakat sudah memiliki pedoman dalam menyelesaikan masalah, ada norma-norma. Kami mencoba kembali untuk mengingatkannya. RSP menjadi sarana untuk terus menerus mengingatkan semacam itu. RSP sebagai pengingat dan menjadi sarana identitas diri masyarakat Jawa supaya tidak lupa pada akar budaya Jawa.
RKS	: Bagaimana RSP melestarikan budaya Jawa bagi kaum milenial?
DZ	: Ada banyak perspektif ketika kita bicara budaya dan kearifan lokal. Harus diakui ketika media sudah berjarak dengan kawula muda, beberapa survei mutakhir menyebutkan murid SD hingga mahasiswa sudah minim mengakses media main stream-terutama membaca koran. Untuk menysar anak muda, dalam tulisan saya menggunakan bahasa yang lebih sederhana atau ungkapan yang gaul dan cenderung menghindari ungkapan yang arkais (di Jawa ada beberapa tingkatan <i>tutur</i> yaitu <i>ngoko</i> , <i>kromo</i> dan <i>kromo inggil</i>). Saya memilih menggunakan bahasa <i>ngoko</i> yang tingkat <i>tuturnya</i> paling rendah (<i>ngoko</i>), dianggap paling kasar mungkin, tidak bisa untuk percakapan formal. Semangat saya yakni banyak menggunakan kata atau istilah dalam bahasa Indonesia. Jadi saya ingin menarik bahasa Jawa itu tidak sulit dan tidak kuno <i>banget</i> . Pilihan-pilihan kata yang cenderung lugas.

	Untuk menjawab perkembangan dan tuntutan zaman, migrasi dari konvensional ke media konvergensi, mutlak. SM harus memaksimalkan <i>webnya</i> secara profesional. SM yang terbit perdana pada 11 Februari 1950 menjadi saksi dari sejarah bangsa Indonesia. Menurut saya, RSP sebagai ikon bagi SM dan menjadi pembeda dengan media lain. Serta menjadi kekhasan dan keunggulan dari media lainnya. Media lain kini cenderung berorientasi pada bisnis, SM masih terus merawat hal tersebut (kearifan budaya lokal di antaranya melalui Sang Pamomong) yang berisi nilai-nilai kearifan yang selayaknya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk diwariskan turun menurun. Agar tulisan-tulisan dalam RSP maupun secara keseluruhan SM tetap dibaca anak-anak muda maka pengelola SM harus bisa mengimplementasikan satu tulisan di RSP ke dalam berbagai format (konvergensi). Misalnya tulisan di RSP juga ditayangkan di media sosial dengan dilengkapi grafis atau animasi gerak sederhana. Atau melalui <i>podcast</i> di <i>youtube</i> dan lainnya. Sudah sangat jarang anak muda yang mau membaca koran. Hal ini menjadi tantangan bagi pengelola media dalam mengalih wahanakan dari teks ke audio, dari teks ke grafis dan seterusnya.
RKS	: Kapan terakhir menerima honor sebagai penulis RSP?
DZ	: Sekitar satu tahun terakhir. Kendati demikian saya masih memiliki loyalitas tinggi terhadap SM dan berikrar untuk tetap menulis di RSP-SM. Alasannya SM sudah memfasilitasi saya pada kehidupan saya di titik ini. Dari SM, saya bisa bersilaturahmi dan berinteraksi dengan banyak orang, membuka jalan rezeki yang luas dan saya dapat membangun jejaring. Menjadi kebanggaan dan kepuasan batin bagi saya dengan menulis di SM khususnya di RSP. Menulis di RSP ibaratnya Jihad Jurnalistik untuk senantiasa menegaskan kebenaran sesuai norma-norma dan nilai luhur budaya.

Informan 11.

Nama Lengkap	Sendang Mulyana
Pekerjaan	Dosen Sastra Jawa-Fakultas Budaya dan Seni (FBS) FIB Universitas Negeri Semarang; Penulis Tetap Rubrik Sang Pamomong versi Bahasa Indonesia; mantan Wartawan Harian Suara Merdeka
Hari & Tanggal	Kamis, 27 Februari 2020
Tempat	Program Studi Sastra Jawa-FBS Unnes
Waktu	10.30-12.30

A: Informan- Sendang Mulyana (Dosen FIB Unnes, penulis tetap RSP versi Bahasa Indonesia dan mantan wartawan Harian Suara Merdeka).

B: Pewawancara Rachmi Kurnia Siregar (Mahasiswa Doktorat Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran) sebagai peneliti.

- Rachmi Kurnia Siregar = RKS
- Sendang Mulyana = SM

RKS	: Sejak kapan menulis di Rubrik Sang Pamomong (RSP) di Suara Merdeka (SM)?
SM	: Sejak awal RSP (bergantian dengan Sucipto Hadi Purnomo). Saya pada 1994 sebagai wartawan honor di SM. Saat itu ada 4 halaman. Kenapa tertarik menulis di RSP? Saya ingin menjalin silaturahmi budaya. Media bagi saya menjadi wahana untuk mengekspresikan pemikiran-pemikiran terutama berbasis budaya Jawa, dan mencermati banyak hal dari sudut pandang budaya Jawa. Format awal berupa artikel atau <i>essai</i> . Meski S1 saya bukan berasal dari Sastra Jawa, tapi <i>sense of culture</i> bahasa dan budaya Jawa saya dianggap memenuhi sehingga diminta untuk menulis di RSP. Dahulu awalnya terbuka sehingga siapa pun bisa menulis di SM termasuk di RSP. Tetap ada proses seleksi dan tulisan yang berkualitas untuk diterbitkan. Formatnya bahasa Indonesia rasa Jawa, karena bergantian bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Dahulu saya menulis dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, selanjutnya sejak 3 tahun terakhir saya menulis di tulisan utama RSP dalam bahasa Indonesia. Dhoni Zustiyanoro menulis di <i>headline (HL)</i> dalam bahasa Jawa.
RKS	: Mengapa tulisan di RSP bergantian menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa?
SM	: RSP memiliki semangat untuk melestarikan budaya Jawa, sehingga tulisan berbahasa Jawa tetap dihadirkan meski dalam dua minggu sekali, bergantian dengan bahasa Indonesia. Karena penikmatnya adalah nasional, jadi bukan hanya orang Jawa. Sehingga bagi yang non-Jawa dapat lebih memahami hal-hal tentang budaya Jawa yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Jika terus menerus ditulis dalam bahasa Jawa sulit untuk mencernanya (bagi non-Jaw). Judul dibuat eksotis untuk merangsang minat pembaca.
RKS	: Bagaimana penentuan tema-tema di RSP?
SM	: Terserah saya. Tapi dulu awalnya tidak. Jadi ada tema besar yang dibahas di RSP. Misalnya minggu depan akan membahas tentang banjir, jadi semua tulisan mengarah pada fenomena banjir. Tapi dalam perkembangannya terserah penuls, tapi yang pasti penulis harus memiliki <i>sense of journalistic</i> kaitannya dengan aktualitas tema-tema atau hal-hal yang sedang hangat/menarik dibicarakan publik. Contoh, saya tempo hari menulis tentang munculnya kerajaan-kerajaan di sejumlah daerah, yang sarat politis dan sekarang hilang. Kita sebagai negara yang luar biasa, dipertainkan dengan tiba-tiba munculnya kerajaan baru di sejumlah tempat, kemudian hilang.
RKS	: Tulisan-tulisan di RSP berisi tentang apa?
SM	: Secara umum RSP mengandung budaya Jawa mencakup falsafah hidup, nilai-nilai kearifan lokal, <i>wejangan</i> , nasehat dan lainnya yang diangkat dalam konteks kekinian. Saya berupaya menformulasikan nilai-nilai budaya Jawa itu sekomunikatif mungkin. Jadi dengan tema-tema yang aktual, saya coba membedah nilai-nilai budaya Jawa

	untuk saya jadikan sebagai cermin atau sebagai refleksi. Contoh saya bicara tentang Ratu Agung Binatono dalam pewayangan-terkait sikap ksatria seorang Krisna. Sebagai ksatria, Krisna dikisahkan harus siap menderita, sabar dan melakukan sesuatu sesuai <i>darmanya</i>. Saya mencoba untuk tidak <i>terkooptasi</i> kepentingan agama tertentu apalagi politik. Saya berusaha menulis secara universal. Meski saya mengambil dari nilai-nilai Jawa kuno yang dalam berbagai hal berbau Hindu, saya mencoba mengangkatnya supaya ke luar dari atmosfer itu, menjadi nilai-nilai Jawa dalam konteks kekinian dalam rasa Jawa.
RKS	: Apa saja nilai-nilai dalam kearifan lokal Jawa?
SM	: Tentu saja nilai-nilai tersebut ada juga nilai negatifnya antara lain malas, tidak tepat waktu, sering <i>ngerumpi</i> dan lainnya. Kendati nilai negatif ini tentu dimiliki pula di budaya lainnya. Adapun nilai besar orang Jawa (meski juga dimiliki budaya lain) adalah rukun, jujur, menghormati orang lain, rajin menolong orang lain, <i>wedi</i>-takut, <i>isin</i>-malu, <i>sungkan</i>, dan lainnya. Tidak pernah sebuah budaya itu lebih unggul dari budaya lain, harus kita sikapi seperti itu. Jangan sampai kita menganggap budaya Jawa itu lebih tinggi dari budaya lain, ini pandangan yang sangat sesat. Jawa itu sifatnya lebih mengarah kepada pengendalian diri, berusaha membuat nyaman dan enak hati sesama. Maka mungkin muncul <i>stigma</i> bahwa orang Jawa <i>ora</i> tegas dan lainnya, justeru karena bermula dari itu. Karena untuk mengatakan tidak, harus berfikir seribu kali, khawatir menyakiti orang lain, <i>sungkan</i>, takut dan sebagainya. Kendati dalam budaya lain juga mempunyai hal sama.
RKS	: Budaya Jawa mana yang disasar dalam RSP?
SM	: Saya pribadi mengarah budaya Jawa secara <i>lentur</i>, artinya konsep melestarikan itu berbeda dari sekedar mengelus-ngelus. Tidak menjadikan budaya sebagai jimat dan saya berfikir konsep budaya Jawa yang dikembangkan ya konsep budaya Jawa modern dalam istilah Jawa yaitu <i>nut lakoning zaman</i> (mengikuti arus perkembangan zaman). Bagaimana halnya dengan adanya budaya pesisir, Jawa keraton dan Jawa pedalaman? Ini merambah ke mana-mana. Jadi dalam hal ini kami tidak berbasis ke istana sentris tapi juga budaya pesisir atau yang berkembang di pinggiran. Jadi memungkinkan budaya Jawa secara keseluruhan. Saya sering menulis orang Jawa pesisir dengan egaliternya. Saya berbasis pintura (Rembang), kemudian mempelajari budaya keraton. Lalu muncul ada pemberontakan dan inilah saya formulasikan secara baru. Misalnya bagaimana saya memandang Panembahan Suropati sebagai figur sentral. Bagaimana proses pencitraan Panembahan Suropati dengan Ratu Kidul, saya memandangnya secara modern bahwa hal tersebut adalah taktik politik yang luar biasa bagaimana Panembahan Suropati bisa menaklukkan Ratu Kidul. Rakyat Jawa yang <i>notabene</i> masih terbelenggu di alam <i>mitos</i> yaitu Ratu Kidul saja bisa ditaklukkan Panembahan Suropati, lantas bagaimana dengan rakyat biasa? Nah ini kan semangat egaliter saya sebagai orang pantura agar tidak terbelenggu di alam <i>mitos</i>, tetapi tetap menghargai hal tersebut. Artinya saya mempersilahkan masyarakat untuk memilih kontra <i>mitos</i> atau sebaliknya. Ini sah-sah saja dalam konteks ini.
RKS	: Apakah pernah diajak rapat redaksi?
SM	: Awal-awalnya iya, terlebih saat itu saya aktif sebagai wartawan honorer di SM. Tapi sekarang tidak, meskipun untuk pengertian rapat secara langsung tidak, melainkan melalui telepon, SMS dan kini <i>WhatsApp</i> (WA).
RKS	: Kapan terakhir menerima honor sebagai penulis tetap RSP?
SM	: Pada 2019 saya masih terima honor tapi tidak jelas dalam arti apakah berdasarkan per tulisan atau apa? Saya diberi sekali dalam setahun. Tapi seiring SM mulai <i>kolaps</i> dan tidak sanggup membayar honor penulis. Tapi bagi saya hal tersebut tidak menjadi masalah. Karena saya memandang nilai perkawanan dengan teman-teman di SM khususnya penulis RSP. Nilai tanggung jawab akan tetap saya junjung tinggi, sehingga tetap akan mengirim tulisan ke RSP. Saya dan penulis lain (Dhoni) akan tetap loyal. Jadi ini urusan pribadi. Saya <i>sungkan</i> ke pengasuh RSP seperti Pak TT, Pak Putu dan

	lainnya, tapi ke institusi SM tentu saja tidaklah. <i>Lah wong</i> pasti <i>bos</i> SM <i>kan sugih</i> (kaya). Intinya saya akan tetap menjalin hubungan pertemanan dengan redaksi SM. Saya ingin bisa tetap melestarikan budaya Jawa, bahwa tulisan itu sebagai wahana. Tulisan adalah bahasa. Sebuah budaya akan bisa eksis manakala diverbalkan atau dibahasakan atau pun dinarasikan. Jika dikaitkan dalam ilmu komunikasi, narasi tentang budaya itu sama pentingnya dengan eksistensi budaya. Narasi tentang nilai-nilai budaya Jawa sama pentingnya dengan eksistensi nilai budaya itu. Karena jika nilai-nilai budaya itu tidak dinarasikan maka apa buktinya? Apalagi di era sekarang.
RKS	: Apa harapannya terhadap RSP?
SM	: Saya berharap RSP harus tetap ada dan bahkan dikembangkan, dalam arti dalam bahasa Jawa setiap Minggu dan juga ada dalam bahasa Indonesia. Karena tulisan-tulisan seperti RSP yang langsung bersentuhan ke pembaca, entah dibaca atau tidak. RSP sangat penting karena merupakan wahana efektif untuk menumbuhkembangkan formulasi nilai-nilai budaya Jawa.
RKS	: Bagaimana khususnya RSP untuk kaum milenial?
SM	: Upaya saya secara pribadi dengan gerakan literasi. Tapi secara redaksional mestinya ada juga model digital. Formulasi secara anak muda itu tentu harus ada media lainnya juga, harus divisualisasikan secara video. Ini penting sebagai upaya mentransfer nilai-nilai kearifan lokal ke kawula muda. Apalagi anak-anak muda sekarang jika ditanya ingin menjadi apa? <i>Youtuber</i>. Tapi tentu hal ini membutuhkan modal yang tidak sedikit dari pihak SM. Saya pribadi berpendapat RSP memiliki eksotisme budaya Jawa dan ini menjadi kekuatan RSP. Bagaimana suatu tulisan mengangkat fenomena kekinian dengan sudut pandang budaya Jawa dan ini menjadi keunikan tersendiri. <i>Kan</i> artikel harian pasti pendekatannya populer. Tapi <i>esai</i> Sang Pamomong <i>kan</i> dengan pendekatan budaya dan rasa Jawa, hal pasti orang atau pembaca tidak merasa tergurui. Beda dengan artikel ilmiah meskipun dalam kemasan populer. Kendati dengan terbatasnya kolom seiring pengurangan halaman, tentunya setiap tulisan makin dibatasi <i>spacenya</i>. Terlepas dari itu, RSP tetap berpeluang eksis karena hal ini menjadi upaya SM juga dalam melestarikan nilai-nilai kearifan dan budaya Jawa. SM <i>kan</i> menjadi <i>ikon</i> untuk koran di Jateng. Saya tidak yakin misalkan tulisan yang sama dimuat di media yang berbeda, gemanya bisa sebesar seperti di SM. Bagaimana pun Jawanya Jateng ya SM. Berbeda dengan Jawanya Jawa Timur ya Jawa Pos. Tetap beda. Bahkan termasuk Kedaulatan Rakyat (KR), karena KR <i>kan</i> keraton sentris. Semarang bisa menjadi muara bagi aneka ragam eksistensi Jateng (dari Solo, Jogja, Banyumasan) berbeda dari KR. Istilah <i>kerennya</i> secara politik kebudayaan menjadikan Semarang (SM) sebagai ibukota budaya Jateng dan bahkan tidak berlebihan jika dikatakan SM sebagai ibukota budaya Jawa. Karena bertumpu pada Jogja, sudah jelas akan mengarah pada keraton sentris, begitu pula Solo. Di Jatim terlalu banyak varian yang non Jawa seperti ada Madura dan lainnya. Di Jateng (Semarang) bisa menampung banyak antara lain Solo keraton, Jogja keraton, Banyumasan, Pantura. Pantura juga ada Pantura Timur dengan Pantura Tengah berbeda. Jadi Semarang bisa mengakomodasi hal tersebut karena sangat strategis. Dalam hal ini posisi SM sangat strategis, sehingga di antaranya mengembangkan sebagai pewaris budaya sesuai <i>tagline</i> dan nama besar (<i>brand</i>) SM. Semoga hal ini disadari oleh teman-teman di redaksi SM. Karena untuk <i>level</i> berita, <i>kan</i> sudah sama dengan koran lain, sehingga RSP selayaknya dijaga dan dipertahankan. RSP sebagai hasil perenungan dari penulis untuk merefleksikan konteks kekinian dari sudut pandang budaya Jawa. Jadi ini sebagai ciri khas dan keunikan SM dibanding koran lainnya. Di sisi lain redaksi SM harus bekerja sama dengan dunia akademik untuk memperkuat eksistensinya, termasuk untuk RSP. Karena tantangan RSP salah satunya dari regenerasi penulis, ini bukan hal mudah. Saya sebagai dosen, tiada hentinya mengajak

	para mahasiswa saya dan lainnya untuk menulis dengan <i>sense of culture</i>. Meski memang tidak mudah. Sekarang ini yang terjadi sesuai dengan budaya <i>instan</i> atau sepotong-potong. Untuk menghasilkan konstruksi tulisan dengan perspektif budaya Jawa tentu sulit, butuh waktu dan referensi harus kuat supaya tidak terjadi fenomena <i>copy paste</i>. Jadi harus disesuaikan dengan model dan format kekinian, serta adaptif. Budaya harus dibangun, dikembangkan dan dilestarikan. Ini tidak bisa dihindarkan supaya tetap ada relevansinya.
--	--

Informan 12.

Nama Lengkap	Yolanda
Jabatan	Kepala Divisi Sosial Media Suara Merdeka
Hari & Tanggal	Kamis, 2 Februari 2023
Tempat	Kantor Redaksi Suara Merdeka- Jln. Kawi Raya, Semarang
Waktu	07.00-08.00

A: Informan- Yolanda (Kepala Divisi Sosial Media Suara Merdeka).

B: Pewawancara Rachmi Kurnia Siregar (Mahasiswa Program Doktorat Ilmu Komunikasi- FIKOM Universitas Padjadjaran) sebagai peneliti.

- Rachmi Kurnia Siregar = RKS
- Yolanda = Y

RKS	: Sejak kapan bertugas mengelola media sosial suara merdeka?
Y	: Saya sejak 2 tahun (2021). Pada 2020, SM belum diperkuat media sosial. Saya diminta oleh pak Kukrit (Pimpinan Umum Harian Suara Merdeka 2010 hingga sekarang) untuk membantu <i>marketing communication</i> (Marcom), tapi pada saat itu sedang Pandemic covid-19 sehingga <i>event-event</i> tidak bisa berjalan. Sebagai solusinya, saya diminta untuk mengaktifkan media sosial Suara Merdeka pada saat itu sebatas untuk membantu publikasi kegiatan di sosial media. Jadi tidak secara bisnis, karena media sosial ini untuk <i>mensupport</i> cetak dan online. Saya melihat teman-teman di sosial media bisa <i>memonitized</i> secara bisnis. Maksudnya sejak itu saya garap secara serius sosial media Suara Merdeka. Pertama kali saya masuk saat itu hanya ada 1 akun tematik, sekarang ada sekitar 18 akun tematik dan hampir 100 akun sosial media kita. Karena secara kebutuhan, untuk keperluan <i>branding</i> , Suara Merdeka membutuhkan banyak akun. Jadi di sosial media Suara Merdeka, saya ciptakan sosial media secara <i>holding</i> , sosial media secara .com, ada sosial media secara tematik. Dahulu sosial media Suara Merdeka jadi nyampur di situ. Sekarang ada misalnya untuk Wanita sendiri [Wanita.SMN], ada tentang hewan sendiri [zoo.SMN], ada tentang teknologi [technology. SMN]. Contohnya untuk Wanita ada di Instagram, di <i>Tiktok</i> dan di <i>Youtube</i> . Jadi setiap <i>platformnya</i> ada. Jadi ada sekitar 18 akun tematik dan ini akan terus bertambah. Karena tema yang disukai <i>netizen</i> kan macam-macam. Sementara ini yang dihandle itu contohnya tentang anak, ini kan memang ada pasarnya. Itu kan saat di cetak ada semacam rubrik untuk anak, ada majalah [di tetangga sebelah ada versinya khusus seperti majalah Bobo dan majalah kaum muda yakni Hai]. Di sosial media juga sebenarnya sama. Nah dengan tersegmented audiens, maka memudahkan bagi kita untuk membuat pasar yang mana? Nah 2 tahun ini saya fokusnya ke arah sana. Jadi mulai dari yang pertama hanya 1 akun dan sekarang bertumbuh sekitar 20 akun tematik dan hampir ada 100 akun. Karena setiap akun ada turunan-turunannya. Sama sebenarnya dengan Suara Merdeka yang dulu ada baliho-baliho di berbagai tempat termasuk di Solo juga ada, juga di Semarang dan lain-lain. Sebenarnya sebagai salah satu bentuk untuk mengjangkau <i>audiens</i> kita yang seperti itu. Di era sekarang ini kebutuhannya terlebih untuk Suara Merdeka dengan nama besarnya maka perlu banyak akun. Namun tantangannya yaitu sumber daya manusia, teknis dan lainnya.
RKS	: Jadi sekarang Bapak menangani bidang apa?
Y	: Dahulu masih divisi <i>Marketing Communication</i> (Marcom) sekarang menjadi divisi tersendiri yakni divisi sosial media. Kenapa masuk bagian dari <i>Marcom</i> karena untuk menciptakan publikasi, <i>voice</i> , aksesoris dan lainnya setelah sebelumnya ada <i>Marcom</i> dan sosial media. Akhirnya divisi sosial media berdiri sendiri secara strategi akarnya sama. Redaksi baik itu cetak dan <i>online</i> yang memiliki pimpinan redaksi, di divisi sosial media juga ada pimpinannya yaitu saya sendiri dibantu tim. Saya dan tim bertugas mengelola konten-konten audio visual/ <i>multiplatform</i> . Sebenarnya ini menjadi suatu cara untuk mengatasi <i>disruption</i> yang terjadi. Semuanya kan terdisrupsi dengan kondisi seperti ini maka harus ada strateginya kita harus gencar. Itu sebabnya Suara Merdeka memiliki

	<i>newsroom</i> yang merupakan gabungan cetak, <i>online</i> dan sosial media. Dahulu Suara Merdeka belum terintegrasi seperti sekarang ini. Satu berita itu ketika ada <i>input</i> masuk, outputnya cetak, <i>online</i> dan sosial media. Outputnya jadinya berbeda. Karena memang pasarnya bertumbuh dan kita menyikapinya seperti itu sesuai dengan era <i>platform</i> berbasis digital.
RKS	: Saat Bapak masuk [Kadiv Sosmed SM] hanya ada 1 akun apa?
Y	: Akun Suara Merdeka
RKS	: Dari 20 akun tematik, mana akun yang paling favorit dan diminati audiens?
Y	: Akun yang paling banyak diminati yaitu akun muslim di tiktok. Siapa yang dulu bakal menyangka Suara Merdeka punya akun muslim? Ternyata kan pasarnya ada yaitu Muslim.SMN di Tiktok dan setiap hari kita <i>live</i> dan itu ada <i>murotalnya</i> (pkl:05.00-06.00). konten muslim tapi kontennya kekinian disesuaikan dengan minat audiensnya jadi <i>backsoundnya</i> juga yang kekinian. Ini salah satu yang <i>trafficnya</i> tertinggi, yang lainnya masih berproses untuk bertumbuh [akun Muslim.SMN per 2 Februari 2023 diikuti 42 ribu <i>netizen</i> dan disukai 986 ribu <i>netizen</i> . Tiap bulan jangkauannya. Ini salah satu konten yang favorit. Sekarang itu sosial media tergantung dari konten-kontennya, sehingga jika kontennya menarik maka akan mampu dimintai banyak orang.
RKS	: Selain akun muslim, akun lainnya apa lagi yang banyak diminati <i>netizen</i> ?
Y	: Ada <i>game</i> , <i>travelling</i> , kuliner <i>kan</i> bisa menjadi peluang bisnis.
RKS	: Kriteria apa untuk berita di Suara Merdeka cetak dan Suara Merdeka <i>online</i> untuk bisa ditayangkan di sosial media Suara Merdeka? Apakah berita tersebut idealnya yang menjadi <i>headline</i> ?
Y	: Tidak mesti yang berita <i>headline</i> di halaman 1 dibuat menjadi konten di sosial media, karena patokannya berdasarkan hasil <i>trending</i> di <i>google trend</i> atau <i>tools</i> lainnya atau belum tentu viral di sosial media atau diminati di pasar. Kami buat <i>content</i> untuk politik misalnya ada Menteri yang tidak diundang oleh Presiden Jokowi, bisa jadi segmentasi pembacanya berbeda. Di akun Suara Merdeka juga ada konten Kupas Politik (kulit). Berapa pengikutnya? Ini menjadi tantangannya dan berapa <i>trafficnya</i> juga pasti belum tinggi. Karena tantangan di <i>online</i> ketemu <i>keyword</i> , minat <i>audiens</i> kita, minat bisa dari <i>backsoundnya</i> , kontennya dan aspek lain.
RKS	: Akun sosial media yang dikelola oleh divisi sosial media mana yang banyak <i>trafficnya</i> ?
Y	: Untuk akun yang lama yaitu Facebook bisa 1 juta, Twitter 100 ribu.
RKS	: Apakah sudah pernah ada survei, <i>branding</i> Suara Merdeka di benak konsumen di level apa?
Y	: Kami belum pernah melakukan riset atau survei terhadap konsumen. Untuk target audiens kita untuk kalangan kaum muda di bawah usia 30 tahun. <i>Top of mind</i> nya kan belum masuk-ini menurut saya dan targetnya belum banyak.
RKS	: Bagaimana pencapaian tim sosial media Suara Merdeka dalam membantu Suara Merdeka cetak dan <i>online</i> ?
Y	: Salah satu yang kami lakukan adalah membantu penjualan sales selain <i>noise</i> dan <i>voices</i> tadi. Jadi klien pasang iklan di Suara Merdeka cetak, mendapat bonus di <i>online</i> dan sosial media.
RKS	: Divisi sosial media berada dalam naungan siapa?
Y	: Langsung ke CEO (Chief Executif Officer)
RKS	: Apakah artikel di Rubrik Sang Pamomong juga tayang di sosial media Suara Merdeka?
Y	: Kami berusaha sebenarnya untuk mengakomodasi (jujur saya bingung untuk menjawabnya). Kami membuat berita berdasarkan riset atau isu-isu <i>trending</i> . Dahulu <i>audiens</i> disugahi beragam berita berdasarkan pertimbangan redaksi (dari hasil rapat redaksi). Tapi sekarang kan jamannya sudah berubah. Kami menayangkan berita-berita berdasarkan yang sedang <i>nge-trend</i> di dunia maya (<i>google trends</i> , dan lainnya). Jadi jawabannya tidak. Kan pengennya secara idealism dapat ya (artikel dalam Rubrik Sang Pamomong/RSP bisa tayang di media sosial yang dikelola Divisi Sosial Media Suara Merdeka), tapi di sisi lain secara komersial, tidak dapat. Karena sekarang ini kami menampilkan apa-apa yang dianggap paling penting oleh <i>netizen</i> . Jadi jawaban saya

	sama dengan jawaban Pimred Suara Merdeka.com tentang tidak ditayangkannya artikel RSP). Mungkin suatu saat nanti harus saya yang buat setelah mengkaji Rubrik Sang Pamomong. Karena hal tersebut memang belum pernah saya buat. Tapi jika di konten kanal sekarang ini RSP ya tidak bisa. Berarti <i>dibuat</i> kolom sendiri khusus untuk mereka yang secara budaya tentang tema budaya lokal khususnya budaya Jawa. Hal ini harus menjadi akun tematik sendiri, tidak bisa dicampur. Contoh buat akun Sang Pamomong. Saya berharap secara khusus kelak kami dapat membuat <i>space</i> khusus untuk RSP, tapi secara <i>traffic</i> juga harus dapat. Kanal saya <i>traffic</i>nya dapat dulu deh. Nanti jika <i>traffic</i> nya sudah dapat, RSP harus menjadi bagian dari idealism yang juga harus diangkat dan menjadi pertimbangan khusus. Karena itu ada pasarnya (RSP) bukannya tidak ada pasarnya.
--	--

Informan 13.

Nama Lengkap	Agus Sutoto
Jabatan	Pimpinan Redaksi Suara Merdeka.com [periode 2020-2024]
Hari & Tanggal	Rabu, 1 Februari 2023
Tempat	Kantor Redaksi Suara Merdeka- Jln. Kawi Raya, Semarang
Waktu	Pkl: 13.00-14.00

A: Informan- Agus Sutoto (Pimpinan Redaksi Suara Merdeka.com).

B: Pewawancara Rachmi Kurnia Siregar (Mahasiswa Program Doktorat Ilmu Komunikasi- FIKOM Universitas Padjadjaran) sebagai peneliti.

- Rachmi Kurnia Siregar = RKS
- Agus Sutoto = AS

RKS	: Apakah artikel dalam Rubrik Sang Pamomong (RSP) ditayangkan di Suara Merdeka.com?
AS	: Ke depan memang tidak tertutup kemungkinan kami akan menurunkan berita-berita yang sifatnya lebih pada <i>kedalaman</i> , termasuk berita-berita yang tergolong <i>human interest</i> , budaya dan lainnya. Saat ini kami masih terbatas mengembangkan berita-berita yang sifatnya <i>hard news</i> . Apalagi karakter-karakter di artikel RSP <i>kan</i> tulisannya panjang-panjang. Sementara yang <i>hard news</i> di Suara Merdeka.com informasi atau beritanya <i>kan</i> masih pendek-pendek karena sekilas-sekilas yang sifatnya <i>running</i> . Sebagai khasnya berita <i>online</i> dengan jumlah paragraph sekitar 5-6 paragraf termasuk untuk yang <i>breaking news</i> . Bahkan 3 alinea bisa dinaikkan jika sifatnya <i>breaking news</i> dan mendesak. Tapi kalau itu (RSP) menjadi perhatian dari khalayak luas, maka kami bisa persingkat menjadi 20-30 alinea tergantung dari <i>value of news</i> nya.
RKS	: Di Suara Merdeka cetak edisi Minggu banyak rubrikasi selain Rubrik Sang Pamomong, juga ada Rubrik Bincang, Rubrik Serat dan lainnya. Apakah Rubrik Sang Pamomong, Rubrik Bincang, Rubrik Serat dan lain-lain juga tidak tayang di Suara Merdeka.com?
AS	: Sampai saat ini rubrikasi tersebut (Rubrik Sang Pamomong, Rubrik Serat, Rubrik Bincang dan lainnya) tidak tayang di <i>online</i> kami (Suara Merdeka.com)
RKS	: Apakah tidak ada arahan dari CEO Suara Merdeka untuk menayangkan RSP di Suara Merdeka <i>online</i> ?
AS	: Instruksinya untuk lebih aktif berkomunikasi dan bersinergi antara <i>online</i> dengan cetak. <i>Nah</i> itu <i>kan</i> kami yang menerjemahkannya. Memang kami masih banyak keterbatasan-keterbatasan di Suara Merdeka.com, termasuk bagaimana kami bisa mengakomodasi kanal-kala atau rubrik-rubrik yang dicetak untuk bisa dimasukkan ke cetak (koran Suara Merdeka).
RKS	: Di Suara Merdeka.com ada berapa <i>kanal</i> ?
AS	: Internasional, Jawa Tengah, Semarang Raya, Kesehatan, Olahraga, Bola, Khasanah dan lainnya. Termasuk juga sub kanal, misalnya di Semarang Raya ada sub kanal yang ada di kota-kota, juga ada Selebritas, Gaya hidup. Liputan budaya itu ada di hiburan.
RKS	: Suara Merdeka.com launching pada 14 September 1996 dan sekarang ini berapa <i>page view</i> nya?
AS	: Saya mulai bertugas sebagai Pimpinan Redaksi Suara Merdeka <i>online</i> pada tahun 2020. <i>Page views</i> per tahun pada 2022 mencapai 226.615.567 <i>views</i> dengan <i>bounce rate</i> di 52,61% (<i>netizen</i> yang mengklik di layar pertama lalu masuk ke kanal-kanal dan sub-sub kanal). Menurut kami hal ini sudah cukup bagus
RKS	: Suara Merdeka.com badan hukumnya apa?
AS	: Media Merdeka.com dan sudah terverifikasi administrasi dan faktual oleh Dewan Pers.
RKS	: Berapa jumlah wartawan Suara Merdeka.com?
AS	: Wartawan lapangan ada 2 (editor dan wartawan- lulusan Sarjana (S1). Wartawan non lapangan ada 19 orang yang bertugas di <i>office</i> (<i>stand by</i>).

RKS	: Segmentasi pemberitaan di Suara Merdeka.com apa?
AS	: Saya kira <i>all round</i> ya sesuai sifat <i>online</i> . Kemudian segmen pembaca kami terbentuk berdasarkan data yang miliki yakni pembaca dengan kelompok usia: 18-24 tahun (25-34 tahun. Gender berimbang antara perempuan dan laki-laki. Tepatnya untuk pembaca laki-laki dengan usia 18-24 tahun berkisar 49% dan pembaca perempuan di kelompok usia 25-34 tahun mencapai 51%.
RKS	: Suara Merdeka.com berbayarkah atau <i>free</i> ?
AS	: <i>Free</i>
RKS	: Bagaimana dengan komposisi domisili/geografis pembaca Suara Merdeka.com?
AS	: Setiap saat bisa diketahui, pembaca terbesar kami ada di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Yogyakarta ini untuk tingkat provinsi. Kami bisa memantau pembaca kami secara geografis dan demografis, tapi sifatnya fluktuatif setiap hari. (untuk Suara Merdeka e-paper dihandle oleh bagian Sirkulasi dengan kordinator Bpk Eko. Pembaca Suara Merdeka e-paper di manca negara antara lain terpantau di Malaysia, Amerika Serikat, Singapura, Afghanistan, Taiwan, Hongkong, dan Saudi Arabia).
RKS	: Pembaca di luar negeri tersebut lazimnya mengklik berita apa di Suara Merdeka.com?
AS	: Berita-berita politik, <i>life style</i> , hoby, makanan, keluarga, dan belanja.
RKS	: Pembaca tersebut apakah sudah sampai pada level membaca atau terbatas di klik saja berita tersebut tanpa membacanya?
AS	: Itu harus dicek lebih spesifik dan butuh waktu. Suara Merdeka kini ada di 3 lini yaitu cetak, <i>online</i> dan media sosial. Saat ini kami bersama tim di Suara Merdeka Network (SMN) untuk bersama-sama untuk bisa membagi pasar yang ada di 3 lini. Jika kami hanya fokus di cetak, pembaca digitalnya kami tentu akan menjadi abai atau sebaliknya. Yang digitalnya diperkuat lantas bagaimana yang di media sosial? Media sosial dan <i>online</i> saja, lantas bagaiman yang di cetak? Kan bisa ketinggalan, jadi memang harus diperkuat ke 3 lini ini. Sinergitas menjadi satu keharusan dan justru menjadi kekuatan Suara Merdeka agar Suara Merdeka menjadi kokoh sebagai penyebar informasi yang berkualitas bagi masyarakat melalui <i>multiplatform</i> (cetak, <i>online</i> dan sosial media).
RKS	: Untuk <i>podcast</i> masuknya di mana?
AS	: <i>Podcast</i> masuk di digital yaitu <i>Instagram</i> (Ig), <i>Youtube</i> termasuk saya sendiri sebagai <i>host</i> -nya dan pemberitaannya ada di Suara Merdeka.com.
RKS	: Bagaimana pengunjung untuk di <i>podcast</i> Suara Merdeka?
AS	: Ya cukup baguslah. Jika saya tidak salah sekitar 3 ribu <i>viewer</i> , saya kira cukup bagus itu. Saat <i>live</i> , termasuk tinggi bisa jadi kan dari tema dan sosok yang ditampilkan atau bintang tamunya.
RKS	: Tema apa yang favorit?
AS	: Saat masih pandemic, tema yang favorit salah satunya tentang Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja. Untuk <i>podcast</i> paling tidak melibatkan 3 orang yaitu <i>host</i> , <i>cameraman</i> , <i>lighting</i> dan <i>editing</i> . Tidak tiap hari, setidaknya seminggu sekali dengan isu-isu <i>trending topic</i> .
RKS	: Siapa <i>competitor</i> terberat Suara Merdeka.com?
AS	: Kami tidak melihat itu sebagai <i>competitor</i> karena kami melihat di <i>online</i> ini sebenarnya semuanya sama yaitu bisa bermain di lahan yang sama, tinggal bagaimana mengemas konten-konten ini supaya bisa lebih berkualitas dan bisa memenuhi selera dari pembaca kami. Jika kami bagus, tapi tidak disukai pembaca tentu tidak ada artinya dan tidak mendatangkan <i>traffic</i> . Tapi sebaliknya yang disukai oleh pasar, belum tentu bagus juga untuk kami. Artinya kami tidak asal untuk menaikkan berita, tapi melalui riset kecil-kecilan lah yang ada di sini dengan melihat alat-alat ukur yang ada yang kami pakai. Untuk menjaga kata-kata kunci yang saat ini sedang viral dan setelah itu kami kejar ke sana. Nah jika kami sudah ramah ke mesin pencari, mudah-mudahan ini bisa menaikkan <i>traffic</i> . Kami juga berupaya selalu menjadi atau menjalankan fungsi kontrol sosial dari berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Nah kontrol sosial itu akan menjadi 'ruh' dari Suara Merdeka Network (SMN) ini karena kami tentu tidak akan <i>fair</i> jika kami

	hanya mementingkan kepentingan ekonomi. Sehingga kepentingan kontrol sosial dari SMN tetap terjaga, sehingga berita-berita yang ditayangkan ada <i>value</i> -nya (memiliki nilai), banyak <i>news</i> nya ketimbang konten-konten yang sifatnya panjang lebar.
RKS	: Apakah pernah terjadi benturan antara cetak dengan <i>online</i> ? Katakanlah cetak dapat iklan satu halaman dari ‘plat merah’ (instansi pemerintah), tapi justru diserang oleh Suara Merdeka <i>online</i> ?
AS	: Justru kami saling <i>mensupport</i> , bagaimana kami bisa mendapat iklan yang lebih bagus dan lebih banyak lagi dalam naungan SMN.
RKS	: Jika iklan terbit di cetak, apakah juga akan tayang di Suara Merdeka <i>online</i> ?
AS	: Tidak ada keharusan, kecuali jika klien juga ingin pasang di online sesuai <i>rate</i> kami.

Informan 14.

Nama Lengkap	Setiawan Hendra Kelana
Jabatan	Kepala Sekretariat Harian Suara Merdeka
Hari & Tanggal	Kamis, 7 Maret 2024
Tempat	Wawancara via telepon
Waktu	Pkl: 08.10-08.30

A: Informan- Setiawan Hendra Kelana (Kepala Sekretariat Harian Suara Merdeka).

B: Pewawancara Rachmi Kurnia Siregar (Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Komunikasi-FIKOM Universitas Padjadjaran) sebagai peneliti.

- Rachmi Kurnia Siregar = RKS
- Setiawan Hendra Kelana = SHK

RKS	: Bagaimana tata kelola rubrikasi di Suara Merdeka (SM)?
SHK	: Rubrikasi di SM terbagi dua yaitu untuk edisi harian terbit pada Senin hingga Sabtu. Serta rubrikasi khusus di hari Minggu.
RKS	: Apakah ada pertimbangan tertentu untuk tata kelola rubrikasi khusus edisi Minggu di SM?
SHK	: Rubrikasi edisi Minggu disesuaikan dengan jumlah halaman yang tersedia, pada tahun 2020 SM terbit dengan 16 halaman, tentu rubrikasinya menyesuaikan dengan jumlah halaman. Di tahun selanjutnya jumlah halaman berkurang, sehingga dengan sendirinya ada pengurangan atau rubrik-rubrik yang dihapus, baik itu yang edisi harian maupun edisi minggu. Tentu saja ada pertimbangan khusus dari redaksi dan manajemen yang diputuskan dalam rapat Dewan Redaksi.
RKS	: Bagaimana dengan konten di rubrikasi edisi Minggu? Apakah jenis tulisannya sama dengan edisi harian?
SHK	: Redaksi menyajikan konten edisi Minggu dengan tulisan-tulisan yang sifatnya ringan-ringan saja (soft news). Kan pembaca sudah bosan dengan tulisan-tulisan yang sifatnya berat misalnya saja berita-berita politik yang disajikan pada Senin hingga Sabtu. Sehingga kami menyikapinya dengan menyajikan tulisan-tulisan ringan dan tidak perlu pemikiran berat. Di edisi Minggu kami antara lain rubrik masakan, traveling, sport, hobi, selain Rubrik Serat, Rubrik Sang Pamomong dan lainnya.
RKS	: Apakah untuk edisi Minggu ada penanggung jawab khususnya?
SHK	: Penanggung jawab edisi Minggu ada sesuai keputusan rapat redaksi. Khusus pada Rubrikasi sang Pamomong (RSP) selain ada penanggung jawab halaman, juga melibatkan internal redaksi selaku penulis maupun pengasuhnya yaitu Bapak Triyanto Triwikromo-selaku Pimpinan Redaksi Suara Merdeka cetak yang juga penulis tetap di Kolom Pringgitan. Juga ada Bapak Saroni-Redaktur Pelaksana Suara Merdeka cetak yang juga penulis tetap di Kolom Blencong. Keterlibatan dari internal redaksi ini bertujuan agar terpenuhinya konten-konten di RSP, selain kami mengundang para penulis luar untuk berpartisipasi mengisi RSP.
RKS	: Sejak tahun 2020 penulis luar yang mengisi di RSP tidak mendapat honor. Apakah kebijakan tersebut juga diterapkan untuk penulis luar yang mengirim tulisannya di Suara Merdeka untuk di berbagai rubrik?
SHK	: Memang betul manajemen sejak 2020 tidak memberi honor kepada penulis di RSP juga di rubrik lainnya mengingat kondisi keuangan perusahaan. Namun kami berharap kondisi Suara Merdeka pelan tapi pasti kembali membaik, sehingga kami bisa kembali menghonori para penulis luar sebagai bentuk apresiasi kami.

Informan 15.

Nama Lengkap	Dr. Bambang Sadono, SH, MH.
Jabatan	Wakil Pemimpin Redaksi Harian 'Suara Merdeka' (1989-1998) Salah satu penggagas Rubrik 'Sang Pamomong' di Suara Merdeka
Hari & Tanggal	Jumat (29 Maret 2024)
Tempat	Pertanyaan dan jawaban dikirim via email
Waktu	Pkl: 15.00

A: Informan- Bambang Sadono (Wakil Pemimpin Redaksi Harian Suara Merdeka 1989-1998).

B: Pewawancara Rachmi Kurnia Siregar (Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Komunikasi-FIKOM Universitas Padjadjaran) sebagai peneliti.

- Rachmi Kurnia Siregar = RKS
- Bambang Sadono = BS

RKS	: Ide Rubrikasi Sang Pamomong (RSP) apakah murni dari diri sendiri atau gagasan bersama tim redaksi yang dihasilkan dalam rapat?
BS	: Pada waktu itu masyarakat Jawa Tengah, setidaknya para tokoh dan akademisi menyarankan agar Suara Merdeka menerbitkan media berbahasa Jawa. Latar belakangnya, pemerintah daerah Jawa Tengah di bawah gubernur Ismail mempunyai strategi kebudayaan yang disebut Wawasan Identitas. Bahkan berhasil menyelenggarakan Kongres Bahasa Jawa Pertama yang dibuka oleh Presiden Soeharto. Di Yogya ada Pusat Studi Budaya Jawa. Media Bahasa Jawa hanya ada di Surabaya dan Yogyakarta. Setelah dipertimbangkan dari segi bisnis, disepakati dan diputuskan oleh Pemimpin Redaksi waktu itu Soewarno SH untuk menerbitkan suplemen saja. Suplemen Budaya Jawa, dengan dwi Bahasa, Indonesia dan Jawa. Saya yang sering berkomunikasi dengan para pengusul media tentang budaya Jawa itu, mengambil inisiatif, didukung oleh pemimpin redaksi.
RKS	: Apakah Rubrikasi Sang Pamomong mendapat persetujuan dari owner Suara Merdeka?
BS	: Pemilihan nama Sang Pamomong, sebelumnya saya mengusulkan nama "Sumbangsih" yang konon pernah juga dipakai nama penerbitan yang mirip sebagai lampiran Suara Merdeka, jauh sebelum nya. Nama Sang Pamomong dengan simbol Semar, akhirnya justru diambil sebagai simbol Suara Merdeka, berarti direstui oleh pemilik Suara Merdeka, dalam hal ini Ir. Budi Santoso. Bahkan kemudian dikembangkan sebagai materi promosi di televisi nasional. Waktu itu kebetulan Presiden Soeharto sedang menggemari pentas wayang dengan Semar sebagai simbol sang Pamomong Indonesia. Pak Harto mengidentifikasi diri sebagai Semar. Suara Merdeka juga mengidentifikasi sebagai Sang Pamomong Budaya Jawa, setidaknya di Jawa Tengah.
RKS	: Ada banyak tokoh pewayangan, kenapa yang dipilih Semar untuk Rubrik Sang Pamomong? Mengapa tidak memilih Arjuna, Kresna, Bima apa alasannya?
BS	: Simbol Pamomong hanya cocok dengan tokoh Semar, sebagai dewa yang terjun ke dunia nyata dan menjadi pengasuh para satria Pandhawa untuk memimpin masyarakat.
RKS	: Bagaimana menghubungkan sifat-sifat Semar dengan kerja jurnalistik?
BS	: Semar tokoh yang merakyat, menjadi saksi berbagai kejadian. Dan selalu ada di semua lakon dan episode. Semar dan panakawan yang lain selalu mengingatkan dna menunjukkan jalan kebenaran pada para kstaria yang didampingi. Itulah fungsi jurnalistik yang ideal.
RKS	: Apakah memang nilai-nilai Semar atau nilai-nilai Jawa itu menjadi pondasi dan filosofi bagi para pekerja di Suara Merdeka dalam mengejawantahkan karya-karya jurnalistiknya?

BS	: Secara common sense orang Jawa sangat menghayati filosofi wayang dan posisi Semar. Corporate culture untuk karyawan dan wartawan Suara secara tidak langsung akan terpengaruh oleh budaya Jawa pada umumnya.
RKS	: Apakah ini bisa diartikan Suara Merdeka sebagai bagian dari budaya Jawa atau hanya ambil bagian dari budaya Jawa?
BS	: Secara sadar Suara Merdeka menyadari hidup dan tumbuh di tengah kultur Jawa, setidaknya secara geografis di Jawa Tengah. Karena itu tag line nya perekat masyarakat Jawa Tengah.
RKS	: Ataukah nilai-nilai budaya Jawa diartikan Suara Merdeka sebagai bagian dari budaya Jawa dalam melestarikan budaya Jawa? Atau ini terkait dengan segmen saja? Segmen pasar kah?
BS	: Sang Pamomong, merupakan sumbangsih Suara Merdeka, justru karena sadar untuk menjadikan penerbitan tersendiri tidak layak secara bisnis. Sang Pamomong merupakan wujud idealisme Suara Merdeka untuk ikut merawat budaya dan Bahasa Jawa.
RKS	: Segmentasi pembaca Suara Merdeka sebenarnya siapa? Bagaimana pula dengan segmentasi konten Suara Merdeka fokusnya pada apa bidang saja?
BS	: Segmentasi pembaca Suara Merdeka bersifat geografis Jawa Tengah, dan melayani segmen secara menyeluruh, sebagai bacaan keluarga.
RKS	: Pada awalnya Rubrik sang Pamomong sempat diarahkan untuk mendapatkan iklan tapi ternyata tidak dapat. Namun mengapa Rubrik Sang Pamomong tetap dipertahankan meski tidak ada iklannya? Apakah ada pertimbangan khusus dari owner atau manajemen?
BS	: Sang Pamomong suplemen compliment, jadi iklan bukan tujuan utama.

Informan 16.

Nama Lengkap	Dr. Widodo Wikandana
Jabatan	Filolog- Dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes) Penulis di berbagai media, termasuk mengisi Rubrik ‘Sang Pamomong’ di Harian Suara Merdeka [2010-2019]
Hari & Tanggal	Sabtu, 30 Maret 2024
Tempat	Wawancara via zoom dan dilanjutkan pertanyaan via email
Waktu	Pkl: 06.30-06.55

A: Informan - Dr. Widodo Wikandana- Filolog Unnes.

B: Pewawancara Rachmi Kurnia Siregar (Mahasiswa Program Doktorat Ilmu Komunikasi- FIKOM Universitas Padjadjaran) sebagai peneliti.

- Rachmi Kurnia Siregar = RKS
- Widodo Wikandana = WW

RKS	: Menurut Bapak, budaya Jawa itu bagaimana?
WW	: Budaya jawa merupakan salah satu identitas kultural masyarakat Indonesia yang berasal dari suku Jawa.
RKS	: Secara umum orang Jawa itu sebenarnya bagaimana?
WW	: Orang Jawa adalah orang yang memiliki kultur budaya dan identitas kejawaan dalam laku hidupnya. Tidak hanya sekadar tinggal, menetap, dan berinteraksi tetapi juga dalam pola tata laku hidup menunjukkan sebagai orang Jawa.
RKS	: Orang Jawa Semarang itu bagaimana?
WW	: Orang jawa semarang (pesisir) lebih didominasi oleh sifat terbuka dan tidak berbelit belit sebagaimana jawa pedalaman yang sangat dipengaruhi oleh kultur feodal Jawa.
RKS	: Bagaimana tentang etika Jawa?
WW	: Etika Jawa merupakan seperangkat pranata sosial yang melekat pada sosok tertentu. Dari perangkat pranata tersebut terkrystalisasi menjadi tata laku dan watak seseorang dalam bersosial di masyarakat.
RKS	: Bagaimana tentang falsafah hidup orang Jawa?
WW	: Falsafah hidup Jawa merupakan pilihan symbol dan tata laku yang terinternalisasi menjadi kebiasaan dan pola hidup. Falsafah hidup Jawa secara umum bersumber dari cerita wayang jika berkaitan dengan tokoh dan idola hidup.
RKS	: Bagaimana tentang Ke-Tuhanan budaya atau orang Jawa?
WW	: Ketuhanan dalam konsep Jawa merupakan bagian penting dalam tata laku hidup. Tetapi selain hetuhanan ada yang lebih utama dalam hidup Jawa yakni wedi wiring (takut malu) pantang bagi orang jaw aitu jika direndahkan harga dirinya. Itu lebih tinggi dari pada konsep ketuhanan dalam tata laku hidup Jawa.
RKS	: Menurut Bapak apakah memang penting dan ada manfaatnya Rubrikasi Sang Pamomong oleh Redaksi Suara Merdeka?
WW	: Ada, manfaat rubrik tersebut ada dua hal. Sebagai identitas bagi orang jawa sekaligus salah satu bentuk menziarahi masa lampau untuk di aplikasikan dalam konteks Jawa kekinian. Kedua, bagi orang yang sudah berada di rantau dengan membaca rubrik tersebut menjadi serasa kembali menjadi Jawa dan menjadi orang jawa meskipun berada di luar sirkel kejawaan.
RKS	: Bapak sendiri sebagai orang Jawa bagaimana?
WW	: Tentu sebagai orang yang lahir dan besar di Jawa sedikit banyak dalam pola hidup selalu menggunakan Jawa dalam kontek kehidupan menjadi tolak ukur perilaku dan internalisasi sikap dalam menghadapi masalah atau menyelesaikan masalah.
RKS	: Bagaimana pendapat Bapak tentang anggapan bahwa sebagian generasi muda saat ini (generasi Z) semakin asing dengan budayanya sendiri?
WW	: Saya tidak sepenuhnya setuju tentang justifikasi tersebut. Karena budaya bersifat dinamis dalam perkembangannya, budaya akan selalu mengikuti waktu dan ruang

	dimana pemilik dan pemerhati budaya berada. Yang mengkhawatirkan akan keasingan budaya secara umum adalah generasi tua yang memiliki pola pikir berbeda dengan generasi Z.
RKS	: Menurut Bapak apa tantangan dan peluang Rubrikasi sang Pamomong di Suara Merdeka?
WW	: Tantangan rubrik ini yang sudah lebih dari 10 tahun bertahan terletak pada penulis dan kontinuitas media cetak yang semakin menurun kekuatannya dimasyarakat tergantikan oleh media social yang juga di kelola secara professional. Bagi pembaca rubrik tersebut tetap dibutuhkan untuk menjadi salah satu penjaga sang Jawa yang adiluhung dalam konteks kekinian.
RKS	: Menurut Bapak apakah ada koran lokal lainnya yang juga menyajikan rubrik budaya lokal seperti halnya Rubrik Sang Pamomong oleh Suara Merdeka?
WW	: Ada tetapi dengan format yang berbeda dan cita rasa berbeda misalnya Jawa Post yang memuat rubik berbahasa Jawa di akhir pekan khusus untuk yang terbit di Jawa tengah.
RKS	: Apakah teks-teks dalam Rubrik sang Pamomong [RSP] memang mengandung nilai-nilai budaya dan falsafah Jawa?
WW	: Dalam konten RSP konsep yang disajikan yaitu realitas sosial kekinian, ada persoalan-persoalan sosial budaya apa yang akan dimuat oleh RSP. Adapun RSP di SM disajikan bergantian dalam versi bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dalam setiap minggu. Saya sebelumnya aktif mengisi kolom di RSP hingga tahun 2019 dan setelah itu saya fokus menyelesaikan disertasi saya di Universitas Indonesia. Persepsi saya bahwa RSP menjawab persoalan-persoalan aktual yang didasarkan atas referensi masa lampau. Ketika ada persoalan pemilu, persoalan ribut kekuasaan atau ada kompetisi, dahulu ada feodalisme dan sekarang juga ada feodalisme di partai politik misalnya. Nah itu direfleksikannya adalah bisa jadi pada peristiwa masa lampau, bisa jadi teks-teks dari masa lampau. Misalnya saya mengambil karya dari pujangga Jawa untuk memotret kondisi sekarang. Contohnya Serat Kalatidha karya Ronggo Warsito yakni: <i>Amenangi zaman édan, éwuhaya ing pambudi, mélu édan nora tahan, yén tan milu anglakoni, boya kaduman mélik, kaliren wekasanipun, dilalah kersa Allah, begja-begjane kang lali, luwih begja kang éling lawan waspada</i>. Artinya: Berada pada zaman gila, serba salah dalam bertindak. Ikut-ikutan gila tidak akan tahan, tetapi kalau tidak mengikuti arus, tidak kebagian, (lalu) jatuh miskin pada akhirnya. Tetapi Allah Maha Adil. Sebahagia-bahagiaanya orang yang lalai, akan lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada. Referensi-referensi ini digabungkan dengan realita kekinian untuk memperkuat tulisan. Jadi referensinya dari teks-teks terkait. Hal itulah dikombinasikan antara realitas masa kini, referensi masa lalu terus mau diapakan? Formulasinya tidak jauh dari situ. Masa kini kita mau potret apa? Masa lalu yang menjadi referensi seperti apa? Konklusinya dengan referensi seperti ini, peristiwa seperti ini mau diapakan? Referensi inilah yang digunakan atau peristiwa semacam inilah yang bisa kita referensikan. Nah melalui Sang Pamomong [SP] berkontribusi pada masa sekarang atau masyarakat modern mencakup banyak aspek terkait Jawa antara lain ajaran Jawa, perilaku Jawa, simbol-simbol Jawa, dan budaya Jawa disisipkan di tulisan sekaligus untuk pembelajaran. Sekarang ini sedang rebut kekuasaan yang sedang ramai, maka saya akan menghubungkan peristiwa di Mahkamah Konstitusi dengan peristiwa masa lampau atau referensi apa yang kira-kita tepat untuk menggambarkan saat adu tanding semacam itu pada masa lampau? Kira-kita itu gambarnya. Saat saya masih aktif mengisi di RSP, saya dan teman-teman penulis bersama pengasuh rubrik [redaksi Suara Merdeka] memang sepakat untuk menyisipkan pitutur Jawa, petuah-petuah Jawa dari teks yang itu tidak mungkin terbaca oleh masyarakat secara umum manakala tidak diselipkan dalam tulisan di surat kabar. Teks itu sudah dianggap barang usang bahkan tidak dibaca karena tidak mampu membacanya.
RKS	: Sejak kapan menulis di RSP?

WW	: Sejak mahasiswa S2 sekitar tahun 2010 sudah rutin mengirim naskah tulisan ke Suara Merdeka untuk di Rubrik sang Pamomong baik versi bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Penulisnya saat itu yang aktif ada 4 orang. Jika ada yang berhalangan [mengisi RSP] maka diinfokan oleh redaksi. Biasanya rutin menulis seminggu sekali.
RKS	: Apakah ada hubungan atau kedekatan dengan pengasuh RSP?
WW	: Iya betul, saya ada kedekatan dengan redaksi Suara Merdeka khususnya pengasuh RSP yang sekaligus membimbing saya bersama penulis luar lainnya yang dianggap layak untuk nulis di Sang Pamomong [SP] dikompetisikan, siapa pun boleh nulis di SP dengan mengirim artikelnya sesuai standar yang sudah ditetapkan redaksi Suara Merdeka. Saya mengirim artikel via email ke redaksi.
RKS	: Sebagai Filolog, seberapa penting tulisan-tulisan di RSP terhadap pembaca terutama untuk gen Z?
WW	: Setidaknya RSP bisa menyisipkan ajaran-ajaran masa lampau yang jika tidak ada media itu, bisa saja sangat sulit entah ini berpengaruh atau tidak. Ini yang belum ada kajiannya, tapi setidaknya RSP terbaca oleh gen Z. ihwal ajaran Jawa, kultur Jawa, orang sekarang besok tidak mungkin langsung diaplikasikan, tapi kelak di kemudian hari. Kelak mereka memiliki masalah, mendapatkan anugerah atau ketika bergulat dengan kehidupan dan pernah membaca SP dan mengingat, pasti akan menggunakan itu sebagai salah satu referensi dalam konteks menziarahi masa lalu. Jadi tidak ada orang membaca media dan langsung diaplikasikannya besok, tapi butuh internalisasi, butuh kristalisasi, butuh pengendapan terkait apa yang ada di dalamnya.
RKS	: Sebagai Filolog, apa pendapatnya tentang RSP? Apakah memang harus tetap dipertahankan atau tidak? Secara ekonomis, RSP ini tidak ada iklannya.
WW	: Tidak selalu yang tidak beriklan maka tidak menghasilkan. Tetapi Suara Merdeka tanpa SP maka dia akan berdiri sama seperti media yang lain. Tetapi dengan adanya SP hingga sekarang sampai dipertahankan, meski dahulu Suara Merdeka sempat 30 halaman dan sekarang tinggal 12 hingga 16 halaman tapi RSP masih ada karena itu menjadi salah satu kunci SM di jagad khususnya di Jawa Tengah. SM sebagai media cetak tanpa SP maka SM sama dengan media lain dan akan mempercepat ‘kematian’ media itu sebagaimana media-media lain yang beralih ke online. SP sebagai salah satu yang merekatkan, untuk yang lain tentang berita, iklan dan lainnya, media lain pun ada dan memuatnya dan kondisinya pasti lebih buruk dibanding SM. Jadi SP sebagai diferensiasi SM dengan media lain di Jawa Tengah. SP salah satunya sebagai perekatnya sesuai tagline Perekat Komunitas Jawa Tengah.
RKS	: Apa sarannya untuk RSP bagi Suara Merdeka? Pembaca RSP sebagian besar adalah pembaca sepuh, purna bakti dan sebagian sudah wafat. Pembaca muda yakni gen Z tidak lagi membaca koran sehingga beralih ke online maupun medsos dan RSP tidak ada iklan.
WW	: Memang dilema di sisi ini. Ketika media lain sudah sepenuhnya ke online dengan beragam berita. Nah SM secara online ketinggalan, secara berita itu dionlinekan jauh ketinggalan secara cetak. SM memang eksis untuk identitas Jateng tapi secara online ini yang di luar kapasitas sebagai penulis, tetapi lebih kepada manajerial harus bermigrasi dengan tetap menjaga identitas ini. Bagaimana migrasinya? Gen Z tidak lepas dari kesederhanaan dan singkat. Gen Z membaca berita jika sudah lebih 5 menit maka tidak kuat, lebih dari itu akan ditinggalkan sehingga mencari formula berita dan tulisan yang mudah dibaca atau mudah dipahami. Gen Z tidak mau ribet dan bertele-tele sebagaimana budaya Jawa di masa lampau, mereka inginnya simple. Kita harus sudah berubah dengan kondisi sekarang, tidak bisa mempertahankan sesuatu yang dulu dianggap adiluhung, dulu dianggap bagus, yang paling ideal dll, sekarang bisa ditertawakan gen Z.
RKS	: Jadi RSP harus multiplatform?
WW	: Iya tidak bisa hanya satu platform yang digunakan untuk menjustifikasi ini yang benar, ini yang baik, ini yang perlu dipelajari dll. Tidak bisa memaksakan itu semua

	dalam konteks gen Z, media cetak karena apa pun kebutuhan itu pasti bermuara pada efektif dan efisien dalam konteks berita sekalipun, dalam konteks ajaran sekalipun. Salah satu kendala di SM yaitu migrasinya yang ke arah apa yang dibutuhkan gen Z yang belum tergarap secara maksimal.
RKS	: Saya sudah mewawancarai Pimred Suara Merdeka.com dan Kepala Divisi Sosial Media Suara Merdeka bahwa RSP tidak tayang diplatform tersebut karena tidak sesuai dengan segmen pasar. RSP terbit di cetak dan di e-paper yang berbayar. Tanggapan Bapak?
WW	: Ini memang dilema. Ketika di online-kan secara besar-besaran dengan modal yang tidak sedikit, tapi di sisi lain tergantung dari pola berfikirnya redaktur. Ketika e-paper dan cetak ini juga dilema, siapa yang baca koran sekarang? Berapa persen? Paling yang mentok berlangganan adalah institusi, pribadi sudah semakin menurun karena dengan handphone segalanya sudah terselesaikan. Hanya dengan Rp30 ribu-Rp50 ribu per bulan untuk paketan satu bulan sudah selesai semua, tidak hanya mendapatkan SM tapi bisa mendapatkan seluruh koran di seluruh Indonesia. Itu bagian dari efektif dan efisien keuangan keluarga tentu akan berhitung ke sana. Kecuali yang SM minded dulu wartawan SM, sekarang menjadi dosen atau pekerjaan lain yang lebih mapan, pasti akan berlangganan [ya urip-urip wis kancane lah] atau berusaha mensupport yang dahulu pernah menjadi rumahnya. Tapi jika gen Z atau yang belum kenal sama sekali dengan SM, disuruh langganan cetak SM atau e-paper itu menyalahi atau keluar dari koridor kebutuhan gen Z sendiri.

Informan 17.

Nama Lengkap	Aris Mulyawan
Jabatan	Wartawan, Ketua AJI cabang Semarang, Jawa Tengah
Hari & Tanggal	Sabtu, 30 Maret 2024
Tempat	Wawancara via telepon
Waktu	Pkl: 10.00- 11.00

A: Informan – Aris Mulyawan

B: Pewawancara Rachmi Kurnia Siregar (Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Komunikasi-FIKOM Universitas Padjadjaran) sebagai peneliti.

- Rachmi Kurnia Siregar = RKS
- Aris Mulyawan = AM

RKS	Bagaimana pendapat Bapak terkait kebijakan media lokal yang masih memiliki kepedulian dalam melestarikan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal?
AM	Ya kalau ada media itu bagus ya, tapi faktanya kan tidak banyak yang memiliki kepedulian itu. Sekarang dari sekian puluh media tadi kan hanya berapa sih kalau kita melihat? Kalau kita kaji ini ya, satu persatu medianya ya, kan tidak banyak yang konsisten mengangkat isu kearifan lokal ya, begitu. Seperti itu.
RKS	Menurut Bapak apakah konten budaya dan nilai-nilai kearifan lokal memang masih relevan kah sehingga masih diperlukan saat ini?
AM	Saya pikir ya sangat relevan ya, karena di era seperti ini banjir informasi yang luar biasa itu kan, kita melihat kearifan budaya ya, yang berbudaya itu yang seperti apa gitu. Apakah menebar hobi itu berbudaya atau tidak seperti itulah. Makanya kan, padahal kan di Jawa itu kan punya nilai-nilai kebudayaan yang istilahnya adiluhung. Sayangnya kan ini budaya itu mulai tergerus, mulai hilang. Dan tidak banyak media yang mau mengangkat secara continue yang terkait dengan kebudayaan lokal itu gitu. Tapi persoalannya apakah yang dimaksud dengan itu budaya itu kebudayaan atau hanya cerita atau bagaimana. Karena saya belum mengkaji secara mendalam, maksudnya belum tahu secara mendalam nih syaratnya yang gimana. Atau kalau ngomong Jawa itu.
RKS	Menurut Bapak bagaimana peran ideal media massa?
AM	Ya sebenarnya kalau peran media itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Itu kan fungsi media kan ada ya, ada fungsi hiburan, fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi kontrol, kan seperti itu kan. Mungkin kalau ngomong tentang budaya itu kan bisa masuk di fungsi pendidikannya gitu ya. Tapi persoalannya kan selain itu juga yang terjadi saat ini fungsi kontrol itu, itu sekarang itu kan sudah mulai melemah karena banyak media yang hanya mengejar klik untuk mendapatkan pendapatan (iklan) dari Google.
RKS	Apa tanggapan Bapak terkait konten budaya dan nilai-nilai kearifan lokal kan bagi sebagian kalangan ini kesannya dianggap tidak produktif karena dianggap tidak mampu mendorong iklan maupun sirkulasi. Sehingga konten tersebut di sebagian media masa dihapus dan diganti dengan konten lain yang ekonomis (yang dapat menghasilkan iklan maupun meningkatkan sirkulasi)?
AM	Ya kalau menurut saya bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga tidak ada pembacanya. Kan bisa jadi masyarakat sekarang kan nggak peduli dengan itu (konten budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal) akhirnya kan nggak ngaluh juga. Bisa jadi dua-duanya itu, bisa jadi dari faktor pembacanya, bisa jadi dari faktor ini ya. Tapi kalau di klik ya, misalnya soal konsultasi, yang kayak gitu-gitu, soal horoskop, itu kliknya. Itu kalau ngomong klik ya, kliknya itu sebenarnya banyak yang kayak gitu, tetapi itu kan kalau menurut saya itu kan pembohongan publik. Maksudnya kan meramal wah ini musrik dan nggak ilmiah. Ya itu kan modelnya kan ngarang kemudian dipublish dan itu media kan banyak yang kayak gitu juga. Itu repot juga, tapi itu kliknya banyak. Itu kan dianggap budaya juga itu. Misalnya jangan main di air, misalkan nanti rezekinya susah, misalkan kayak gitu. Itu kan ada juga kan.

	Itu apakah masuk dalam ini kearifan lokal apa tidak ya? Tapi itu di satu sisi kan tidak ilmiah, malah membodohi masyarakat juga. Tapi kliknya banyak di satu sisi.
RKS	Jadi terjadi dualisme ya?
AM	Iya, betul-betul.
RKS	Bagaimana tanggapan Bapak terkait eksistensi rubrik dalam hal ini, rubrik budaya di Suara Merdeka yakni rubrik sang Pamomong (RSP)?
AM	Ya kalau menurut saya, harus tetap dipertahankan. Karena sebagai ciri khas atau trademark atau ikon dari Suara Merdeka sesuai <i>tagline</i> Perikat Komunitas Jawa Tengah. Seperti sesuatu yang memiliki nilai gitu kan, harusnya kan dipertahankan. Kalau memiliki nilai, kalau materinya tidak ada ya repot juga kan, tergantung isi tulisannya juga apakah memang mengandung nilai atau tidak sesuai konsep nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa.
RKS	Walaupun secara hitung-hitungan, halaman RSP kan nggak ada iklan? Tanggapannya bagaimana?
AM	Kalau menurut saya nggak apa-apa. Halaman itu kan bisa juga dicari iklan. Itu kan tinggal kreativitas masing-masing bagian iklan saja. Hal terpenting isi tulisan di RSP harus berbobot tapi memang tergantung dari penulisnya. Ini penting supaya dapat menjaring iklan di halaman rubrik ini.
RKS	Sekitar tahun 2018 dengan kondisi finansial Suara Merdeka yang kurang bagus sehingga penulis luar tidak dapat honor termasuk yang menulis di headline dalam RSP. Tanggapan Bapak bagaimana?
AM	Nah ini jadi masalah, sehingga akhirnya menjadi semacam ‘sedekah ilmu’ dari penulis luar kepada Suara Merdeka. Dan harusnya ya jangan sukarela terus lah, harusnya juga dipikirkan itu. Yang ngasih tulisan-tulisan itu harusnya tetap diapresiasi seharusnya.
RKS	Maksudnya apresiasi dari Suara Merdeka supaya penulis luar tambah semangat lagi, supaya tulisannya juga makin berbobot kah?
AM	Betul sekali.
RKS	Media massa memiliki dua kaki yakni komersialisme dan idealisme. Namun dengan kondisi ekonomi global yang juga berdampak terhadap bisnis media, sehingga berdampak pada aspek idealisme yang minim oleh media. Tanggapan Bapak?
AM	Ya bisa jadi tidak untuk beberapa media. Jadi kan kalau kita melihat media itu kan ada beberapa media alternatif yang tetap mempertahankan idealismenya. Lagipula selain rendahnya aspek idealisme, bisnis media juga mengalami kerusakan dari dua sisi. Satu sisi hancur dari dalam, dan sisi yang lain media hancur akibat gempuran dari luar. Kalau dari dalamnya kuat mungkin gempuran dari luar ya ada dampaknya tapi nggak begitu terasa gitu kan. Ya berpengaruh tapi nggak begitu dahsyat. Tapi kalau gempuran dari dalam itu mengerikan sekali. Jadi hancur dari dalam misalnya akibat managerial skill yang rendah dari pengelola media atau pimpinan media. Bahkan menurut saya lebih banyak (media) runtuh dari dalamnya itu karena ya tidak mematuhi norma-norma (prinsip dan etika jurnalistik). Termasuk menerobos pagar api (fire wall) jurnalistik karena manajemennya tidak bagus. Nampaknya yang paling bikin parah itu ya manajemen yang tidak baik gitu. Kalau kita melihat Tempo misalkan, Tempo itu kan dulu sempat ketika kena krisis itu sempat turun tapi kan sekarang naik kan (sahamnya). Kalau dilihat di bursa saham di Tempo itu kan kelihatan sekali kenaikan yang luar biasa. Tapi itu semua tergantung dari good will pimpinan dan pengelola media. Nah inilah kemudian siapa yang bisa manajemen yang baik lah yang akan bertahan dan ternyata ya itu, contohnya Tempo.
RKS	Apa saran Bapak agar media tidak kehilangan jati dirinya? Dalam arti tetap mengedepankan aspek idealisme selain komersialisme?
AM	Ya, kan sebenarnya sudah diatur ya dari dinding api (bidang redaksi tidak diintervensi oleh bagian iklan). Kalau itu (dinding api) tidak diterobos, sebenarnya clear ya.

Informan 18.

Nama Lengkap	Muh. Eko Fitrianto
Jabatan	Manajer Sales & Promotion Harian 'Suara Merdeka'
Hari & Tanggal	Jumat, 29 Maret 2024
Tempat	Wawancara via telepon
Waktu	Pkl: 13.00-13.50

A: Informan – Muh. Eko Fitrianto

B: Pewawancara Rachmi Kurnia Siregar (Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Komunikasi-FIKOM Universitas Padjadjaran) sebagai peneliti.

- Rachmi Kurnia Siregar = RKS
- Muh. Eko Fitrianto = MEF

RKS	: Bagaimana pandangan Bapak tentang Rubrik Sang Pamomong (RSP)?
MEF	: Secara umum Suara Merdeka (SM) korannya Jawa Tengah (Jateng) yang identik korannya orang Jawa. Di Jateng kan orang Jawa dengan bahasa-bahasa lokal atau bahasa Jawa. Mungkin RSP sudah lama, memang RSP menjadi (seperti yang dikatakan Pak Triyanto-Pemred SM) bahwa menjadi identitas bagaimana bahasa Jawa terus nguri-uri (dilestarikan) atau dipertahankan, karena jarang sekali media-media khususnya di Jateng yang menggunakan bahasa Jawa. Mungkin ada seperti majalah Jayabaya dll. Tapi ini kaitannya dengan media koran yang notabene korannya orang Jateng, salah satu rubrikasinya yaitu RSP yang berbahasa Jawa selain bahasa Indonesia. Bahasa Jawa yang menjadi identitas masyarakat atau orang Jateng. SM mempunyai pembaca-pembaca yang loyal terhadap bahasa Jawa, tentunya mungkin tidak semua anak muda sekarang kan tidak mudah memahami bahasa Jawa. Dulu juga di sekolah susah sekali belajar bahasa Jawa. Tapi inilah menjadi sarana edukasi oleh SM kepada pembaca atau komunitas-komunitas. Komunitas pembaca memang banyak tapi tidak bisa mengidentifikasi siapa-siapa saja yang sangat gemar untuk membaca RSP.
RKS	: Apakah RSP perlu dipertahankan? Mengapa?
MEF	: Menurut saya perlu karena dengan dasar tadi, tetap harus identitas SM sebagai korannya Jateng. Mungkin bisa ditambah rubrikasi-rubrikasi yang lain tapi RSP harus dipertahankan. Memang orang yang gemar membaca, saya pikir oaling tidak berusia 50an tahun ke atas. Apalagi jika sekarang tidak nguri-uri (dipertahankan) lantas siapa lagi yang akan mempelajari buday-budaya Jawa? Tulisan-tulisan dalam RSP banyak mengangkat tentang budaya Jawa, kehidupan dan lain-lain yang memaknai bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Sebenarnya ada bahasa-bahasa lokal di Jateng. SM (sekitar tahun 2000-an ke bawah) pernah memiliki rubrikasi itu di saat di setiap wilayah karisidenan. Misalkan karisidenan: Semarang, Pekalongan meliputi Pekalongan, Kabupaten Batang, Tegal hingga Brebes, lalu ada karisidenan Banyumas meliputi Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara dll, karisidenan Solo terdiri dari Solo, Wonogiri, Kedu, Magelang dsb. Sebenarnya yang lokal-lokal itu SM punya rubrikasinya tapi itu dulu disaat koran SM masih menerapkan edisi komunitas. Saat itu setiap wilayah karisidenan terbit komunitas. Jadi ada koran secara Jateng dan ada koran secara wilayah. Kemudian di wilayah itu ada dialek yang berbeda-beda. Bahasa Banyumasan, bahasa Tegal, bahasa Solo, bahasa Muria Semarang berbeda tapi SM lebih ke dialek bahasa Jawa meski dialektanya beda. Tapi sekarang SM menjadi satu kesatuan, jadi produknya yang dibaca di Semarang sama dengan yang dibaca di Banyumas, Tegal, Solo, dll. Karena sifat kedaerahan itu sudah tidak ada makanya salah satu pertimbangannya adalah RSP harus tetap dipertahankan sehingga menyatukan kembali (salah satu dasar untuk menyatukan kembali budaya atau bahasa-bahasa lokal seperti itu).
RKS	: Bagaimana pengaruh RSP terhadap penjualan SM?
MEF	: Mungkin karena RSP terbit pada Minggu yang merupakan produk ringan dengan konten-konten yang sifatnya hiburan, kuliner, jalan-jalan, fashion, pendalaman khusus dll. Di sisi sirkulasi, saya berharap RSP tetap dipertahankan karena sebagai identitas SM

	dan sebagai pemersatu bahasa-bahasa lokal yang ada di Jateng. Bahasa tetap bahasa Jawa tapi dialeknya berbeda. Yang mengisi RSP dari budayawan, juga dari kalangan guru di Jateng yang punya pandangan yang berbeda. Selain itu RSP sebagai referensi bagaimana penulisan-penulisan terkait bahasa Jawa, sehingga harus tetap ada. Contohnya saya punya saudara sebagai dosen di PTN di Surakarta, dosen bahasa dan perlu referensi RSP untuk bahan perkuliahan dan akhirnya yang bersangkutan berlangganan, karena mungkin di media lain sudah tidak ada dan hanya ada di SM.
RKS	: Saat rapat dewan redaksi tempo hari apa pertimbangan Pak Eko sebagai salah satu pihak yang minta RSP dievaluasi?
MEF	: Sepertinya ya seperti itu. Beberapa waktu yang lalu kami sempat ingin mengadakan survei pembaca dalam arti secara umum bagaimana konten atau berita-berita di SM apakah sudah memenuhi kebutuhan pembaca maupun selera pembaca atau tidak? Makanya kenapa bahwa mungkin dari beberapa teman menganggap RSP sudah tidak kekinian atau ketinggalan zaman, karena bagaimana pun migrasi pembaca SM sudah berubah yang tadinya cetak lari ke online dsb. Nah tapi pendapat saya yang sudah saya jelaskan tadi.
RKS	: Teman-teman yang menghendaki supaya RSP dievaluasi dan diganti dengan rubrik lain apakah berasal dari desk ekonomi? Atau desk apakah? Atau jabatannya apa?
MEF	: Kemungkinan iya, karena saya tidak tahu persis. Mungkin bisa jadi begitu ya (pertimbangan ke aspek profit). Karena terus terang memang halaman SM hanya 16 halaman jadi keterbatasan halaman itu mungkin sangat berpengaruh, terus kemudian edisi Minggu 12 halaman dahulu 16 halaman. Nah mungkin keterbatasan halaman itu menjadi contoh juga, jadi pemikiran halaman-halaman. Dulu edisi Minggu saat 16 halaman rubriknya banyak, karena halaman berkurang apakah halaman Sang Pamomong (SP) mau dikoreksi atau tidak? Atau mengurangi halaman atau rubrikasi yang lain dari 16 halaman menjadi 12 halaman kan 4 halaman berkurang, sehingga halaman lain yang dihilangkan. Mungkin penggarap-penggarap halaman yang hilang itu mempertanyakan halaman RSP, tapi Pak Tri (Pemred SM cetak) sebagai pengasuh RSP tetap SP harus dipertahankan. Mungkin dasarnya sama dengan saya, mungkin loh ya. Karena di SM, redaksi adalah kokinya, tapi marketing yang jualan harus tahu pasarnya. Pasarnya ternyata tidak mau konten ini, ya harus dievaluasi. Oo ternyata pembaca/pembeli masih butuh rubrik atau konten ini ya dipenuhi. Ini yang dibuat, mungkin dari beberapa koki-koki itu bilang 'menu ini saja yang enak' ini versinya dia kan. Memang harus kolaboratif antar semua lini.
RKS	: Apakah pernah ada survei dari bagian sirkulasi untuk mengetahui rubrik-rubrik mana saja yang masih dibutuhkan pembaca atau sebaliknya?
MEF	: Memang ini menjadi pe-er bagian sirkulasi. Survei terakhir sekitar 10 tahun yang lalu. Kami berkeinginan untuk survei (sempat berdiskusi tentang survei ke pembaca tapi modelnya apa dan bagaimana?) apakah survei bersifat digital (melalui google form) atau lewat koran- ini masih digodok atau lewat lembaga survei eksternal yang membayar dengan biaya sekitar Rp25 juta hingga Rp35 juta. Sebenarnya jumlah itu tidak besar tapi memang perlu pertimbangan lagi. Survei tidak hanya cetak tapi juga ke digital (online dan medsos). Bagaimana pembaca sekarang terkait berita-berita online yang diinginkan seperti apa? Informasi apa yang ingin diperoleh melalui media sosial? CEO SM-Kukrit Wicaksono dalam rapat baru-baru ini mengatakan bahwa untuk industry media sekarang khususnya di cetak tidak lagi mengejar berita-berita updates karena akan tertinggal jauh dari online. Makanya media cetak akhirnya akan dibuat sebagai media referensi. Artinya sebagai media referensi dengan membuat berbagai rubrikasi-rubrikasi dengan tulisan indepth (mendalam). Misalkan di budaya, wisata dll dibuat secara mendalam sebagai referensi. Karena mengejar berita-berita update itu sudah ketinggalan banget. Salah satunya yaitu RSP sebagai produk referensi karena tidak bersinggungan langsung dengan news update/straight news. Jadi akan dibuat lebih banyak seperti itu. Ini disampaikan Pak Kukrit saat ultah ke-74 SM. Maksudnya ini memang di redaksi sudah mulai merubah konsep itu, jadi diperbanyak rubrikasi-rubrikasi

	yang sifatnya indepth yang nantinya dapat menjadi sumber referensi dari berbagai bidang.
RKS	: Pemred SM.com dan Manajer Sosial Media SM mengakui RSP tidak ditayangkan di online maupun di medsos karena RSP tidak memiliki nilai jual dan tidak sesuai dengan segmen pasar termasuk selera gen Z. Tanggapan Pak Eko?
MEF	: Betul itu, karena di online dan medsos kan berita-beritanya lebih pada update news yang sifatnya real time, sehingga jarang sekali menayangkan berita-berita indepth, ini menjadi ranahnya cetak. makanya yang disampaikan Pemred SM.com dan Manaje Sosial Media memang benar bahwa SP masuk ke ranahnya cetak karena ini sebagai referensi misalnya bagi dunia pendidikan, pembaca-pembaca komunitas yang lebih senang membaca bahasa Jawa dan menjadi ikon bagi masyarakat Jateng.
RKS	: Apakah RSP tidak mampu mendorong sirkulasi maupun iklan sehingga menjadi dievaluasi?
MEF	: Sebenarnya tidak terlalu berkorelasi banyak sih RSP dalam mendorong iklan ataupun sirkulasi, karena koran edisi Minggu memang koran yang sifatnya ringan. Jadi orang baca koran sambil duduk-duduk santai dan bisa membaca berita yang isinya mendalam atau lengkap. Kalau dikaitkan iklan, tidak berhubungan sih RSP itu, karena iklan di hari Minggu memang tidak banyak karena pemasang iklan lebih senang memasang iklan di luar hari Minggu (hari-hari aktif orang bekerja), tetapi memang tidak menutup kemungkinan RSP bisa dikerjasamakan, misalnya dengan lembaga-lembaga atau asosiasi-asosiasi yang peduli dengan budaya Jawa dan bahasa Jawa-mungkin bisa digarap seperti itu. Jadi rubrikasi ini ada karena didukung pihak ketiga selaku sponsor atau penyokong dana, ada peluang kolaborasi. Tapi memang kami belum menggarap itu secara penuh karena sekarang role bisnis di cetak memang tidak lagi pada idealisme penulisan atau pemberitaan atau idealisme prinsip jurnalistik tetapi sudah bergeser ke jurnalistik bisnis atau komersialisasi seiring industry dan bisnis media pada umumnya. Apalagi di sisi cetak jika tidak bergerak di situ maka berpengaruh terhadap pendapatan dan serasa berat ke operasional rutin perusahaan. Bagaimana sekarang pengiklan tidak secara penuh menggunakan media cetak sebagai promosi, mereka sudah banyak menggunakan ranah digital secara mandiri (online dan sosmed), bahkan mereka punya tim khusus sendiri. Misalkan di Jateng ada Mas Moko sebagai main dealernya otomotif tertentu, di Jakarta kan juga ada 'Auto 2000' dll. Kalau yang dulu selalu beriklan di SM sekarang sudah jarang, mereka punya tim sendiri, online, sosmed dengan followers sendiri dll dan digarap sendiri. Nah ini menjadi tugas Divisi Sosmed SM yang harus bisa menggandeng itu, bagaimana mencari followers yang banyak, bagaimana mengisi konten di situ, bagaimana untuk maintenance konten dsb sehingga harus biar aktif.
RKS	: Apa saran dan masukan Bapak untuk RSP?
MEF	: RSP harus tetap ada, bagaimana SM mempertahankan pembaca-pembaca atau pelanggan kami yang memang membaca RSP. Tidak berkorelasi secara langsung terhadap iklan ya (RSP). Halaman RSP berkurang dan mungkin pengampu halaman rubrik yang lain berpendapat mendingan RSP diganti dengan yang lain yang menghasilkan, misalkan dsb, RSP sebagai referensi harus dinguri-uri. Sebenarnya SP juga bisa dibuat menjadi konten kekinian asalkan ada kreativitas dan ide-ide untuk itu.
RKS	: Berapa tiras SM sekarang ini? Untuk edisi Minggu oplahnya berapa?
MEF	: Rata-rata tiap tahun tiras SM berkurang 2 hingga 5 persen. Per hari oplah SM sekitar 50 ribuan eksemplar. Khusus edisi Minggu oplahnya berkisar 75% dari oplah hari biasanya, karena pelanggan-pelanggan SM yang sifatnya kantoran termasuk instansi pemerintah (sebagai pelanggan terbesar SM-libur). Cuma ke depannya ini dimaintenance ekstra karena sekarang semua sudah berubah. Harus pakai strategi khusus, maksudnya seperti apa? Model-model penulisan beritanya bagaimana? Pembacanya harus bagaimana? Dll.
RKS	: Siapa sajakah kompetitor SM?
MEF	: Kompas edisi Jateng, Jawa Pos dan Tribun Jateng.

D. ARTIKEL RUBRIK ‘SANG PAMOMONG’ (RSP)

I. RSP Periodisasi 1996-1998

1.

Judul	‘Jangan Seperti Katak dalam Tempurung!’
Penulis	Bambang Sadono & Hendro Basuki
Edisi	Kamis (21 November 1996)
Haji harmoko, selain sebagai menteri penerangan, juga sebagai ketua umum DPP Golkar. Jika disimak sebagian besar pidatonya kental dengan ajaran-ajaran budaya jawa. Terjun ke bawah dengan berkeliling ke ratusan daerah adalah pengejawantahan dari ajaran-ajaran yang terkandung dalam hasta brata, sebuah konsep leadership yang adiluhung. Menpen hamoko menjelaskan berbagai hal yang menyangkut budaya jawa itu saat menerima wartawan suara merdeka bambang sadono dan hendro basuki di ruang kerjanya. Pak harmoko kami amati kegiatan bapak sering terjun ke desa-desa mendekati rakyat. Kesan kuat yang tertangkap, bapak seperti mempraktekkan beberapa ajaran dalam konsep hasta brata. Barangkali bisa dijelaskan latar belakangnya. Jika saudara bertanya tentang latar belakang tentu saja dasar pijaknya adalah budaya jawa. Bagi saya, budaya ini berpijak pada satu nilai yakni nilai adiluhung. Inilah yang memberi roh bagi pengembangan dari budaya jawa. Jika saya pelajari baik-baik dari referensi maupun pengamatan, maka sebenarnya prinsip-prinsip nilai dalam budaya jawa ternyata universal sekali. Karena keunikan inilah, sebenarnya akan dengan mudah jika dikembangkan akan semakin banyak orang yang mempelajari, mempraktekkan dan mengembangkan. Nilai-nilai yang ada itu karena sifatnya adiluhung dan sedemikian kental, lalu bagaimana mengembangkannya? Nah kalau memang persoalannya di tahap implementasi, maka ia harus menyatu dengan khalayak, jangan eksklusif dan jangan seperti 'katak dalam tempurung'. Berarti harus ada teladan? Benar. Coba kita perhatikan, hasta brata yang secara konsisten dan konsekuen dikembangkan di ABRI, ternyata juga dikembangkan di organisasi kemasyarakatan (ormas). Bahkan dalam keluarga dan bermasyarakat pun ternyata bermakna. Maka tidak mengherankan jika nilai-nilai ini diterima secara ikhlas oleh semua khalayak. Pertanda apa? Universal kan? Mau contoh? Ada ajaran yang mengatakan bahwa seorang pemimpin itu <i>aja kagetan, aja gumunan lan aja dumeh</i> (jangan mudah kaget, jangan mudah heran dan jangan sok kuasa). Ajaran ini kan adiluhung yang memberikan <i>statement</i> bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh mudah kaget, karena bisa membingungkan anak buahnya. Begitu juga jika pemimpin itu <i>gumunan</i>, maka ia akan sulit mengembangkan pemikiran yang proaktif. Sedangkan <i>aja dumeh</i> memberikan pelajaran pentingnya pemimpin tidak boleh semena-mena. Selain itu, ada ajaran lain dari <i>leadership</i> itu misalnya bahwa seorang pemimpin harus sabar, <i>sareh lan saleh</i>. Sering orang yang salah menafsirkan beberapa ajaran dari budaya jawa misalnya konsep <i>alon-alon waton kelaton</i>. Dalam pandangan pak harmoko, kira-kira apa sebabnya? Begini, untuk mengembangkan sebuah budaya diperlukan media, yaitu wujud perilaku yang kongkret. Dulu saat saya masih sekolah, pelajaran mengenai bahasa, sastra, kesenian jawa begitu intensif sekali. Ini jelas berbeda dengan keadaan sekarang dengan berbagai sebab. Jadi kita bisa hafal macam-macam <i>tembang</i>, menulis jawa dengan lancar dan sebagainya. Sekarang, media misalnya dalam bentuk pengajaran sudah sangat berkurang kuantitasnya. Belum lagi terjadinya penetrasi budaya asing yang begitu ketat. Makin lama, guru-guru yang memahami budaya ini tentu saja juga berkurang dalam arti kualitas maupun kuantitas. Nah jadi sebabnya banyak sekali. Juga mengenai salah penafsiran itu mungkin karena ketidaktahuan atau sekedar salah tafsir saja. Seharusnya jika kita mengutip <i>alon-alon waton kelaton</i>, ingat pula kalimat di depannya yang berbunyi <i>'timbang kebat kliwat luwih becik'</i>. Lalu? Ya, saya mendukung sekali kalau suara merdeka mencoba membuat suplemen budaya jawa meski mengemasnya dalam bahasa Indonesia. Ini sebuah upaya yang perlu didukung. <i>Leadership</i> ala jawa kan juga mengajarkan perlunya keteguhan hati, misalnya tercermin dalam salah satu aspek <i>hasta brata</i> yakni <i>'mehambeg mring wukir'</i> (kukuh dan kuat melindungi rakyat-red). Ya harus itu. Keteguhan ini juga aspek yang sangat penting. Dan dalam wayang hal ini ditunjukkan dengan sikap bima yang lalu memunculkan ajaran <i>'jrih wireng, sudireng lalis'</i> (daripada malu, lebih baik mati-red). Jangan lalu dibalik menjadi 'lebih baik malu daripada mati'. Ini celaka....he...he...he.. Ini perlu sekali dikembangkan seperti dicontohkan Pak Harto yang mampu mengubah Indonesia dari negara pengimpor beras terbesar menjadi negara dengan swasembada beras. Tanpa keteguhan tidak mungkin proses ini tercapai. Ini merupakan contoh yang sangat baik, perlu ditiru dan dikembangkan. Pak harto juga mengejawantahkan ajaran <i>hasta brata</i> itu dalam kepemimpinan Nonblok. Ini diakui hebat oleh banyak negara seperti yang dituturkan para pemimpin negara yang saya pernah jumpai. Vietnam, negara yang sedemikian parah akibat perang, para pemimpinnya juga mengaku banyak belajar dari Indonesia dalam pengembangan pangan. Yang menarik dari pak harto, walaupun mengembangkan budaya jawa pada tahapan praktek, tetapi pak harto tidak jawa sentris. Tetapi untuk mewujudkan itu kan melewati proses? Ya, mana yang tidak melewati proses. Hidup dan penghidupan itu sendiri kan proses. Kehidupan manusia, seperti juga pembangunan, semua butuh proses. Coba simak sebuah ajaran yang sering dikumandangkan para dalang dalam pertunjukan wayang, misalnya kalimat <i>'tata tentrem, karta raharja, gemah ripah loh jinawi'</i>. Maknanya adalah stabilitas dulu, baru kemudian pertumbuhan. Jadi, tanpa stabilitas kita tidak bisa membangun. Tidak bisa seperti sekarang ini. Jika pembangunan berjalan lancar, kemakmuran dan keadilan tercipta. Jadi, makna sangat dalam. <i>Oh</i> ya orang sering menyebut bahwa kata kunci dari budaya jawa adalah keseimbangan, seperti dikisahkan dalam wisanggeni dalam lakon wahyu jatiwisesa?	

Bukan hanya keseimbangan, tetapi perlu ditambahkan keserasian. Seimbang dan serasi. Konsep ini juga sudah dipraktikkan para wali ketika menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Kepiawaian para wali itu luar biasa, karena pendekatan budaya melalui media wayang misalnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan, kalau saudara ke makam Sunan Drajat di sana juga ada peninggalan seperangkat gamelan yang tentu pernah dipakai dalam syiar Islam.

Saya pernah bilang sama teman saya menteri penerangan Malaysia...."ini loh gamelan dipakai dalam mensyiarkan agama Islam. Konsep perkembangan itu juga tercermin dalam tindakan '*ngu Wongke Wong*'. Kalau sudah demikian, nanti akan tercapai apa yang disebut sebagai '*manunggaling kawula-gusti*', manunggalnya rakyat dengan pemimpinnya.

Kadangkala banyak yang tidak mampu memahami budaya Jawa itu, karena seringkali nilai-nilai itu biasanya diwujudkan dalam simbol-simbol. Tanggapan Pak Harmoko?

Saya pikir memang demikian. Kita memang dituntut berpikir dan menerjemahkan makna dari simbol-simbol itu. Misalnya, ki ageng Selo menangkap petir, ini apa maknanya. Anoman mengangkat dan memindahkan gunung, yang barangkali bisa diartikan sebagai bentuk atau perwujudan pembangunan. Dan, kalau saudara belajar wayang, sebenarnya dalam media itu juga sudah dikenal apa yang disebut rudal, yakni senjata pasopati. Nah karena masa sesudah itu lalu muncul penjajah-penjajah itu, ajaran-ajaran yang memang sudah mampu menembus zaman itu hanya menjadi sekedar ceritera. Seandainya ada sekelompok orang/ahli yang mampu menerjemahkan itu secara brilian dan kondisi situasinya memungkinkan, keadaan Indonesia mungkin jauh lebih maju.

Coba apa yang dianjurkan Presiden AS Bill Clinton pada rakyatnya beberapa waktu lalu, yakni adanya anjuran belajar ketika lampu mulai menyala. Di Jawa, kita sudah lama mengenal istilah *candikala* yang mengajarkan orang tidak boleh keluar rumah di saat maghrib tiba. Artinya apa ini? Belajarlah, dan renungkanlah tindakan selama satu hari ini, dan lain-lain.

Maksudnya Pak bagaimana?

Itu artinya, saya makin yakin terhadap jati diri kita sebagai bangsa dalam menghadapi globalisasi. Bahkan saya tekankan, budaya Jawa seperti itu penting untuk menghadapi abad 21, abad globalisasi. Ajaran itu semua merupakan *basic* menghadapi persaingan yang makin ketat. Saya dukung sepenuhnya keinginan 'suara merdeka' menerbitkan suplemen budaya Jawa. (08).

Sumber: Pusat Dokumentasi (Pusdok) 'Suara Merdeka'.

2.

Judul	'Ketika Orang Jawa Menantikan Ratu Adil'
Penulis	Triyanto Triwikromo & Hendro Basuki
Edisi	Kamis (15 Mei 1997)
Jika tidak terjadi sesuatu yang berada di luar perkiraan, demikian filsuf Betrand Russel memprediksikan, sebelum berakhirnya abad ke-20 bakal terjadi tiga kemungkinan kehidupan. Ketiga kemungkinan itu ialah pertama, kehidupan manusia akan berakhir, kedua, peradaban mundur ke zaman biadab, dan ketiga, dunia bersatu di bawah satu pemerintahan yang memegang monopoli atas seluruh peralatan perang. Tentu saja kemunculan prediksi itu bukannya tanpa alasan. Saat Russel menulis <i>The Future of Mankind</i>, kondisi dunia memang sedang mendekati kehancurannya akibat perang yang tidak kunjung berhenti. Futurolog Alvin Toffler dan Joha Naisbit pun tidak mau ketinggalan, Dengan analisisnya yang nyaris benar, mereka juga telah memberi tahu publik berbagai peristiwa kehidupan di masa mendatang. Malah, memperkuat ramalan Russel, mereka juga mengungkap tentang akan munculnya "dunia bersatu di bawah satu pemerintahan" dengan menelorkan gagasan <i>global village</i> atau desa global. Mengapa mereka meramalkan situasi dan kondisi di masa depan? Banyak alasannya. Salah satu yang terpenting adalah agar masa depan umat manusia terselamatkan dan kehancurannya. Sebab, setelah tahu yang bakal terjadi, mereka tidak akan tinggal diam, melainkan memberikan jalan keluarnya. Russel misalnya, setelah tahu kehidupan manusia akan berakhir akibat mesin perang, dia lantas menganjurkan, perlunya ketertiban hukum. "Jika harapan ini dapat terwujud, dunia akan menjadi jauh lebih baik daripada periode terdahulu mana pun dalam sejarah umat manusia," ungkapny. Ratu Adil Kebudayaan Jawa melahirkan juga berbagai ramalan kehidupan. Salah satu yang terpenting adalah tentang bakal munculnya ratu adil. Lepas dari bentuk analisis dan kebenaran ilmiahnya, publik sangat mempercayai tenomena itu dan kini masih menunggu-nunggu kedatangan ratu yang <i>ambeg adil paramarta</i>. "Bukan kesalahan manusia Jawa kalau di zaman modern ini pun mereka masih mendamba munculnya ratu adil. Selama ketidakadilan merajalela, kerinduan itu akan muncul dengan sendirinya," ungkap ahli Filsafat Timur Dr. Damardjati Supadjar. Malah, Dr. Sindhunata, sastrawan, menganggap keinginan manusia Jawa itu bukan sebagai sesuatu yang kuno. "Kerinduan akan keadilan itu merupakan kerinduan yang kontekstual. Ia akan muncul di segala zaman saat raja atau patron-patron kehidupan yang lain menebarkan bencana dan ketidakadilan kepada <i>wong cilik</i>," ujamnya. Komentar Sindhunata itu boleh jadi ada benarnya. Dalam sejarah perkembangannya, manusia memang senantiasa menginginkan rasa keadilan dan keamanan. Untuk itu, orang Islam akan menyebut-nyebut datangnya Imam Mahdi, sedang Nasrani misalnya menantikan Sang Mesias, saat mereka menginginkan adanya keadilan yang setotal-totalnya. Hal yang sama, dilakukan juga oleh kebanyakan orang Jawa. Mereka akan merindukan datangnya ratu adil, manakala kehidupannya berada pada titik kesengsaraan yang mencapai puncaknya. Karenanya, beralasan juga jika sekarang ini pun beredar isu bakal muncul ratu adil. "Malah berdasar perhitungan Dwa Dasa Aksara, saya yakin benar tahun 1997 ini merupakan tahun munculnya ratu adil, tambah prapsikolog Ki Hudyo Doyodipuro menjelaskan. Berlebihan mungkin tidak. Sebab jika Anda mempercayai prediksi Sabdo Palon, Ranggawarsita dan Sunan Kalijaga, memang tanda-tanda bakal munculnya ratu adil memang sudah berada di ambang mata "Saya tidak ingin menyebut zaman sekarang ini sebagai zaman ketidakadilan. Tetapi dengan melihat berbagai kerusuhan di sana-sini, banyaknya buruh-buruh yang bergolak, dan adanya gugatan kepada para punggawa negeri, akan memungkinkan munculnya ratu adil. Dengan kata lain, keadilan justru akan muncul di tengah ketidakadilan. Sebab apa? Sebab pada hemat saya, ratu adil itu sebuah situasi. Bukan figur," tutur sastrawan Dr Andrik Purwasito. Figur atau Situasi? Konon, menurut Ramalan Jayabaya Musabar, ratu adil akan muncul setelah pajak rakyat banyak sekali macamnya, yang benar dianggap salah, wanita hilang kehormatannya, dan situasi "rusak" lainnya. "Waktu itulah ada keadilan. Rakyat pajaknya dinar sebab saya diberi hidangan bunga seruni oleh Ki Ajar. Waktu itu pemerintahan rajanya baik sekali. Orangny tampan senyumnya manis sekali," ujar Jeng Sultan Ngali Samsujen seperti yang diterjemahkan penulis Andjar Any dalam Rahasia Ramalan Jayabaya Ranggawarsita & Sabdo Palon. Menyebut orangnya tampan senyumnya manis, jelas menunjuk sesosok figur. Itu sebabnya, wajar jika tokoh-tokoh semacam Soekarno, Ken Arok, dan Sultan Agung, dalam pemahaman orang Jawa pernah dianggap sebagai ratu adil. Malah karena terlalu percaya ratu adil merupakan manusia nyata, paranormal Sawito, pernah mengklaim dirinya sebagai ratu adil tanah Jawa, dan ingin menggantikan kedudukan Presiden Soeharto. Soekarno atau Muhammad Yamin sendiri, memaknai konsep ratu adil sebagai sebuah situasi. "Bung Karno membeberkan bahwa yang dimaksud akan datangnya Ratu Adil Herucokro bukanlah fisik Ratu Adil tetapi suatu kiasan," ujar Andjar Any. Sastrawan Jawa itu juga menjelaskan, Bung Karno mengidentikkan Ratu Adil Herucokro dengan kemerdekaan. Dengan alasan lain, Damardjati Supadjar dan Ki Hudoyo Doyodipuro pun menganggap konsep itu sebagai sebuah situasi. "Meski sebagai sebuah situasi atau sistem, harus ada sosoknya. Tentang siapa sosok yang bakal memberi keadilan, sebaiknya dicari dulu saja," tutur Damardjati Supadjar lagi. "Memang sebuah situasi. Tetapi, Kalau benar tahun ini merupakan tahun datangnya ratu adil, tentu orang Jawa akan beranggapan presiden yang memerintah sekaranglah yang bakal dianggap sebagai ratu adil," tambah Ki Hudoyo. Periodik Jika benar ratu adil hanyalah sebuah situasi, maka kedatangannya dapat diduga atau diramalkan. Misalnya saja dengan mempergunakan perhitungan Dwa Dasa Aksara, tahun 1997 jatuh pada angka 5. Angka lima ini, merupakan tahun Batara Iswara atau tahun berhasilnya tokoh itu mengalahkan Lembu Andhini yang senantiasa membuat onar. "Jadi tahun ini merupakan puncak kesengsaraan sekaligus merupakan tahun terbit nya keadilan. Setelah itu, baru 12 tahun lagi, ratu adil akan datang kembali, kata Ki Hudoyo. Tampak di sini, ratu adil akan datang secara periodik. Ini, sesuai dengan pepatah lama yang mengungkapkan sejarah akan senantiasa berulang.	

Lantas bagaimana jika ada raja atau ratu yang memerintah lebih dari 12 tahun? "Hampir tidak ada raja Jawa yang memerintah dalam kurun waktu sesingkat itu. Akibatnya, raja-raja Jawa sering diposisikan sebagai dewa atau wakil Tuhan. Akan adil? Belum tentu. Dalam sejarah kita, hanya Raja Airlangga yang mampu berbuat adil dengan membagi kerajaan untuk kedua putranya," ujar Andrik Purwasito.

Raja-raja Jawa yang lain, dalam pemahaman sejarahwan Drs Modjanto, MA maupun Dr Djulianti Suroyo sangat feodalistik dan arogan. Memang tidak semuanya begitu. Tetapi yang tertinggal hingga kini lebih banyak feodalistik dan kearogansiannya," tutur Djulianti.

Dapat dikatakan lebih eksplisit, agar tercipta situasi yang adil dibutuhkan pergantian raja jika raja tersebut telah memerintah selama 12 tahun. "Kita tidak perlu menunjuk figurnya. Yang penting, sesuai dengan perhitungan Dwa Daksa Aksara, setelah 12 tahun harus ada perubahan situasi," kata Hudoyo.

Bagaimana agar situasi itu berubah? Tegasnya, bagaimana agar sebuah sistem pemerintahan menjadi lebih adil? Jika mau percaya dengan konsep Max Weber, maka kerajaan atau pemerintahan harus memiliki hukum yang rasional dan formal, kota-kota yang otonom, kelas menengah kota yang merdeka dan stabilitas politik. Itu, yang barangkali bisa disebut "ratu adil" modern, sekalipun sangat bernuansa kapitalistik.

Persoalannya sekarang, ratu adil macam apa yang dibutuhkan? Ratu adil bernuansa Jawa yang teologis atau rata adil yang sekuler? "Untuk negara kita, agaknya yang diperlukan adalah ratu adil yang mengusung makna religiositas. Yakni sebuah situasi yang menumbulkan peningkatan religiositas bagi *kawula* dan *punggawa*-nya," tutur Damardjati Supadjar, menutup perbincangan. **

Sumber: Pusdok 'Suara Merdeka'.

3.

Judul	'Martabat dalam Krisis Besar'
Penulis	Triyanto Triwikromo & Hendro Basuki
Edisi	Kamis (6 November 1997)
Jangan terlalu bangga menjadi bagian dari komunitas jawa baru. Sebab, setidaknya menurut budayawan Rendra, mereka itu hanya mampu menciptakan budaya koruptif, mental merampok, ekspansif, dan logika satpam dalam mengatur negara. "Anda boleh bangga jika sempat hidup pada masa demak. Di kerajaan yang peduli dengan hak hukum rakyat, martabat manusia tidak bergantung kepada sabda raja, orang kuat, dan orang suci. Anda bermartabat jika di depan hukum, tak memiliki cacat cela apa pun," katanya di desa cipayung, jawa barat, belum lama ini. Tak hanya 'si burung merak' yang berpandangan seperti itu, ahli etika dari sekolah tinggi filsafat driyakarta jakarta Dr Madji sutrisno SJ pun berpendapat serupa. "Manusia jawa masa kini sesungguhnya sedang menghadapi krisis besar. Mereka diledek orang non-jawa sebagai komunitas yang menciptakab budaya kolusi, korupsi, tak terbuka, dan sok menjadi diktator." Puteri keraton mangkunegaran dan psikolog dari Unika sugijapranata, emanuela hadriami malah lebih 'sadis' lagi. "Kalau pun martabat itu masih ada, sekarang ini cenderung dapat dibeli dengan kekayaan. Itulah sebabnya, beberapa orang kaya jawa, mencoba mendapatkan gelar dari keraton agar dirinya dianggap bermartabat oleh kalangan tertentu," ujarnya. Lalu apakah martabat itu, sehingga menjadi sesuatu yang teramat penting di dalam kehidupan manusia jawa? "Martabat itu segala-galanya bagi manusia jawa. Seorang manusia jawa dianggap 'ada', jika dia mempunyai martabat. Maka jangan heran jika ada '<i>penggedhe</i>' yang korupsi atau kolusi besar-besaran hanya untuk meninggikan martabat anak, istri atau saudara," kata penyair darmanto jatman. Karena keberadaan martabat sangat berkait erat dengan 'posisi' individu di dalam masyarakat, maka menurut 'abdi dalem' keraton mangkunegaran kanjeng tumenggung raden mas murtidjono, martabat orang jawa sangat berkait dengan kekayaan, kepandaian, dan kekuasaan. "Tanpa ketiga hal itu atau salah satu di antaranya, orang akan dianggap tidak bermartabat sama sekali," tuturnya. Martabat Ideal Hal serupa diungkapkan oleh darmanto jatman. "Orang-orang disebut bermartabat jika memiliki pangkat (kekuasaan), <i>semat</i> (kekayaan), dan <i>kramat</i> (kepandaian). Tetapi, martabat ideal manusia jawa sesungguhnya tak hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebendaan saja. Konsep '<i>ajining dhiru ana ing kendhaling lathi</i>' menunjukkan adanya penolakan terhadap 'aji' yang hanya bersifat kebendaan. Harga atau 'aji', dengan demikian, bukanlah setumpukan bongkahan emas di gudang belaka. Namun juga berupa mutiara-mutiara yang meluncur dari perkataan, perbuatan dan aktivitas konkret. Atau dengan kata lain '<i>ajining raga ana ing busana</i>' boleh saja menjadi salah satu penentu martabat. Tetapi, dia bukanlah segala-galanya. Karena itu, beralasan sekali jika kemudian muncul konsep '<i>agama ageming aji</i>', bukan '<i>bandha ageming aji</i>' atau yang lain-lain. Martabat, dalam bentuk yang paling ideal akhirnya berupa apa yang dalam istilah mudji sutrisno disebut sebagai '<i>sunya raga</i>'. Sebuah kondisi yang memungkinkan pelakunya mengabdikan kepada kepentingan orang lain. "Itu pernah dicapai raja airangga yang berhasil mengukuhkan martabat dengan meninggalkan '<i>bandha</i>' dan '<i>kaprajan</i>.'" Usaha mengembalikan martabat ke wilayah batin pernah juga dilakukan para "reformis" jawa semacam raden mas panji sosrokartono atau ki ageng suryomentaram. Sosrokartono dengan mengatakan '<i>sugih tanpa bandha, menang tanpa ngasorake</i>', sesungguhnya telah menunjukkan betapa perlu memberi sentuhan batin pada kemartabatan. "Tanpa itu, manusia jawa akan njomplang," kata darmanto. Suryomentaram juga begitu. Martabat, baginya bukanlah kekuasaan dan kekayaan yang melimpah ruah. Tetapi, sesuatu (bersifat batin sekaligus raga) yang '<i>sakbutuhe, sakperlune, sakcukupe, sakpenake, sakmesthine, dan sakbenere</i>.' Dalam Krisis Sayang sekali, konsep ideal ini sulit diwujudkan. Bahkan keutuhan ragawi dan bathiniyah mengalami krisis. Martabat cenderung hanya dimaknai sebagai kekuasaan dan kekayaan saja. Itu diperparah lagi dengan masuknya pengarus kapitalisme yang mengganggu kebendaan di atas segala-galanya. Karena itu kata murtidjono, orang bisa kaya dulu baru memburu derajat atau kepandaian. Juga bisa pandai dulu, baru mendapatkan kekayaan atau kekuasaan. "Dulu jika orang tak memiliki kekayaan dan kekuasaan dapat disebut bermartabat jika dia pandai. Sekarang tidak lagi," tandasnya. Komentar itu menunjukkan adanya perlenyapan "kerohanian". Dia tidak dipandang sebagai variabel penentu martabat seseorang lagi. Orang makin malu menggunakan gelar akademik ketika pada kenyataannya dia hanya seorang sopir, seniman atau penganggur. Di luar yang telah disebut, sebenarnya di kalangan keraton sendiri telah muncul reformis-reformis yang ingin meletakkan martabat ke tempat yang bebas nilai atau bebas benda. Ranggawarista dengan mengungkapkan 'maklumat moral' yang menolak materialisme dengan konsep '<i>sakbegja-begjane kang lali isih begja kang eling lawan waspada</i>', sesungguhnya ingin juga ingin menyatakan martabat manusia jawa tak terlalu tergantung kepada kekayaan dan kekuasaan semata. Dalam pandangan rendra, bukan kekuatan ekonomi, politik dan militer yang menjadikan sebuah bangsa bermartabat. Tetapi justru disebabkan oleh ekspresi filsafat atas kebudayaannya. "Mataram boleh runtuh, tetapi karya ranggawarsita tetap dibaca. Karya itulah yang justru menunjukkan adanya martabat dalam diri manusia jawa. Bukan dari kekuasaan para raja yang cuma sesaat akibat keserakahannya sendiri," katanya. Komunitas keraton modern (rendra, murtidjono dan emmanuel) rupa-rupanya sejak lama juga sudah melakukan 'pemberontakan' terhadap konsep-konsep martabat yang pernah mereka terima dari lingkungan keraton. Mereka sudah melepas atribut-atribut kepriyayan dan memilih hidup bersama rakyat kebanyakan. "Kadang-kadang masih terusung ke masyarakat juga derajat yang pernah kami miliki. Tetapi saya yakin martabat saya sama sekali tak ditentukan lagi oleh derajat puteri keraton yang melekat dalam diri sejak saya lahir. Martabat saya lebih ditentukan oleh kecakapan akademik, dan hal-hal yang berada di luar pangkat, semat dan kramat yang saya peroleh secara otomatis dari keraton," kata emma.	

"Mereka harus memberikan kesaksian-kesaksian yang konkret. Jangan justru mengajari korupsi, kolusi dan sok berkuasa. Jawanisasi yang terjadi sekarang ini dipandang orang non-jawa sebagai jawanisasi yang tak bermoral. Jadi agar martabat orang jawa muncul kembali, mereka harus menjadi teladan bagi liyan atau orang lain," kata mudji.

Penyair darmanto jatman juga memberi kiat yang hampir sama. "Sudah bukan masanya lagi menganggap martabat itu bisa diburu dengan menumpuk kekayaan, kekuasaan dan kepandaian semata. Untuk itu, agar martabat orang jawa di mata orang lain 'katon' kembali, mereka mesti jujur dan ikhlas dalam mengabdikan diri ke masyarakat.

Aktualitas diri, dengan demikian jangan sampai menenggelamkan atau merampok hak asasi orang lain. Melainkan harus berupa pengabdian-pengabdian sosial yang tidak menenggelamkan diri. "Pendek kata orang jawa jangan seperti kuli atau gali, tetapi jangan pula sok merasa menjadi majikan," tandas rendra.

Lantas harus jadi apa? "Jadilah orang yang seperti raja airlangga mampu meninggalkan *bandha* dan *kaprajan* demi mencari jati diri sebagai manusia," kata mudji. Ternyata berat untuk hanya menjadi manusia yang bermartabat saja. ***

Sumber: Pusdok 'Suara Merdeka'.

4.

Judul	'Raja Tak Sekedar Berbekal <i>Pulung</i> '
Penulis	Triyanto Triwikromo & Hendro Basuki
Edisi	Kamis (6 November 1997)
Raja atau <i>gusti</i>, paling tidak dalam pranata sosial Jawa adalah pengatur (organisator) dari sebuah komunitas yang disebut sebagai <i>kawula</i>. Dalam lapisan utama masyarakat Jawa, raja berada di golongan <i>penggedhe</i> (penguasa) dan rakyat menempati golongan <i>wong cilik</i> (orang biasa). Karena begitu menyatunya hubungan antara <i>kawula-gusti</i>, menurut sejarawan Soemarsaid Moertono dalam 'Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau', orang Jawa melambangkan kesatuan itu sebagai <i>warungka</i> (sarung) dan <i>curiga</i> (mata keris). Meski begitu, tambah sejarawan tersebut, dalam konsep tentang organisme negara, raja atau ratulah yang menjadi eksponen mikrokosmos, negara. Karena itulah, seorang raja mesti memiliki kecakapan dan keunggulan. Dia juga digambarkan sebagai seseorang yang terus menerus mencari tuntutan ilahi, <i>wicaksana</i> dan paham "Delapan kebajikan negarawan" (<i>Astabhata</i>). Namun tanpa syarat-syarat lain, jika seorang raja berhasil mengamalkan "delapan kebajikan" yang meliputi punya harta, mau menekan kejahatan, ramah, penuh kasih sayang, berwawasan luas dan mendalam, dermawan, cerdas dan berani, maka dia akan disebut sebagai raja yang ideal. Itulah sebabnya dalam pandangan Ki Manteb Soedarsono, jika seseorang ingin mencalonkan diri menjadi raja di Jawa, dia harus paham dan mengamalkan <i>astabhata</i> dan lebih dari itu mesti melakukan <i>tri sarawung</i>. "Yakni mau berhubungan atau <i>sarawung</i> dengan Sang Khalik, sesama manusia dan lingkungan. Raja Rama Wijaya dan Wibisana sukses karena mengamalkan syarat-syarat itu. Sebaliknya kekuasaan Dasamuka dan Duryudana ambruk lantaran tak bersendi kepada '<i>pangeran</i>' yang memang ideal itu," katanya. "Pulung" Tak hanya itu. Untuk menjadi raja yang baik, lanjut Ki Manteb Soedarsono-dalang dari Doeplang itu, seseorang mesti <i>kamot</i> (tidak gampang marah), <i>momot</i> (adaptif) dan <i>hamemangkat</i> (objektif). "Kalau ada seorang raja yang suka membantai rakyatnya sendiri, tak mau bersekutu dengan rakyat, dan memihak salah satu golongan, maka dapat dipastikan dia bukan raja yang ideal. Kalau masih calon, dia juga bukan calon raja yang baik." Meneliti kasus Mataram, Drs G. Moedjanto MA dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta menunjukkan beberapa syarat untuk menjadi raja yang ideal. Menurut dia, seorang raja mesti memperlihatkan keunggulannya sebagai <i>trahing kusuma</i>, <i>rembesing madu</i>, <i>wijining atapa tedhaking andana warih</i>. Artinya raja yang baik mesti berasal dari keturunan tokoh luar biasa. Tak mungkin menjadi raja jika tidak melegitimasi diri berasal dari tokoh-tokoh yang dipuja rakyat pada masa-masa sebelumnya. Moerdjanto juga menunjukkan seorang raja atau calon raja mesti <i>agung</i> dan <i>binathara</i>, <i>baudhendha nyakrawati</i> (agung laksana dewa, pemegang hukum dan kekuasaan). Seorang raja yang baik juga harus berbudi <i>bawa laksana ambeg adil para marta</i>. Dia harus meluap budi luhur mulia dan bersifat adil terhadap semua yang hidup atau adil dan penuh kasih. "Itulah konsep ideal raja Jawa yang tak sepenuhnya bisa diwujudkan dalam kenyataan," tuturnya. Lantas di mana kedudukan '<i>pulung</i>' atau wangsit yang konon berupa cahaya kebiruan sebesar kelapa? Bukankah menurut versi Babad Tanah Djawi sebelum raja-raja Mataram bertahta, mereka senantiasa disusupi '<i>pulung</i>' terlebih dulu? Sebagai contoh, bukankah sebelum menjadi <i>panembahan senopati</i>, <i>sutawijaya</i> saat tertidur di sebuah batu disusupi cahaya kebiruan sebesar buah kelapa? "<i>Pulung</i> hanyalah alat atau mitos yang digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. Yang benar untuk menjadi raja di Jawa, seseorang mesti menaklukkan raja lama atau meneruskan kekuasaan leluhurnya," ujar Doyo Santoso BA dari Ungaran. Doyo Santoso-pengamat budaya Jawa lulusan FKIP Universitas Satya Wacana itu juga menunjukkan hampir semua raja Jawa menjadi pemimpin dengan kedua pola itu. Ken Arok misalnya mesti menaklukkan Tunggu Ametung. Dan pola yang lain, terjadi pada Hamengku Buwono X yang meneruskan kekuasaan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang kharismatik itu. Raja-Raja Ideal Banyak orang menyebut Panembahan Senapati dan Sultan Agung merupakan raja-raja ideal tanah Jawa. Sejarawan Dr HJ De Graaf misalnya, menganggap puncak kekuasaan Mataram terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung ketimbang raja-raja lainnya. Sultan Agung dianggap sukses lantaran bisa menaklukkan berbagai daerah, menciptakan berbagai kebudayaan baru, dan memegahkan istana. Meski begitu, tak setiap kepala menyetujui sejarawan asal Belanda itu. "Membaca sejarah Mataram masa tahta Sultan Agung serta merta menyeret imajinasi kita pada sorak-sorai bala tentara dan ratap tangis rakyat jelata," ungkap Moerdjanto yang menerbitkan buku 'Puncak Kekuasaan Mataram', grafitipers. Moerdjanto juga menganggap Sultan Agung sebagai negarawan yang sangat berbakat. Meski begitu, untuk menunjukkan raja Mataram yang <i>gung binathara</i>, dia sering menggunakan <i>panembahan senapati</i> sebagai contohnya. Benarkah senapati merupakan raja yang memenuhi ciri-ciri ideal raja Jawa? Ternyata tidak juga. "Dia justru merupakan raja yang suka <i>ngapusi</i> rakyat dengan berbagai kelicikannya. Penciptaan mitos ratu kidul, saya kita merupakan salah satu tipu daya raja ini terhadap rakyat dan penguasa kecil lain," kata penyair Rendra sambil menunjukkan betapa agungnya raden patah, raja yang berhasil menciptakan daulat hukum bagi rakyat dan <i>penggedhe</i> di demak itu. Jadi siapa raja yang ideal itu? Ternyata sangat relatif. Ada yang menyebut airangga. Ada yang memilih sultan agung. Ada juga yang memilih sri sultan HB IX. "Ia besar karena kerakyatannya," ungkap prof Dr Umar Kayam. Karena itulah jika para sejarawan pernah menyebut mataram hanya memiliki dua raja 'besar' yaitu sultan agung (abad ke-17) dan paku buwono I, pendiri dinasti kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat (abad ke-18), almarhum majalah tempo pernah sangat berharap menjadikan sri sultan HB IX sebagai raja besar ketiga. Harapan yang wajar. Sebab dalam buku Tahta untuk rakyat, raja yang satu ini memang oleh berbagai kalangan dianggap sebagai raja yang demokratis, patriot teladan, pemimpin yang tanggap terhadap perubahan dan nasionalis sejati. Begitulah, ternyata untuk menjadi raja di Jawa yang ideal begitu banyak variabel yang harus dipenuhi. Pendeknya, dalam	

logika jawa, dia tak sekedar hanya dengan '*pulung*' saja. Harus cakap, cerdas, kaya, dan peduli dengan *kawula* serta berpuluh-puluh syarat lainnya.

Apa yang terjadi jika ada raja atau calon raja yang tak memiliki multisyarat *kaprajan* atau doktrin keagungbinataran? Ternyata dia akan gagal menjadi raja atau jika seorang raja akan dikudeta orang lain. Amangkurat III, menurut moerdjanto, dilawan oleh pangeran puger lantaran dia melanggar prinsip-prinsip adil dan tidak berbudi *bawa laksana*. Dia juga diberontaki oleh Jayengprana dari surabaya dan Yudanegara (semarang) karena tidak *wicaksana* dan lebih memilih berkolusi dengan 'orang asing'.

Maka dapat disimpulkan, jika sebagai seorang raja yang dicurigai melindungi *warangka*, maka dia akan didukung *kawula*. Sebaliknya, jika semena-mena terhadap rakyat sebagaimana amangkurat III, dia akan ditolak dan diberontaki oleh *kawula* dan *penggedhe* lain yang tak menyukai perilakunya. Karena itulah sejarawan Soemarsaid Moertono mengingatkan untuk menjadi raja di Jawa tak hanya bersyarat kekuasaan belaka. Harus wicaksana, adil dan benar-benar '*memayu hayuning jagad*' pula. (Triyanto triwikromo/hendro basuki). ***

Sumber: PUSDOK 'Suara Merdeka'

5.

Judul	'Birokrasi Dibuat untuk Keselarasan'
Penulis	Triyanto Triwikromo & Hendro Basuki
Edisi	Kamis (22 Januari 1998)
Birokrasi dalam pengertian modern, adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah atau birokrat. Para birokrat itu bertindak birokratis karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan. Di Jawa pada masa lampau, paling tidak ketika para raja Mataram II menguasai segala hal dalam kehidupan "negara", sesungguhnya sudah ada berbagai birokrat yang berfungsi menjaga keselamatan kerajaan (<i>tumenggulung-redi</i>), pelayanan keagamaan (<i>redi pengulon</i>), pembangunan (<i>kalung</i>) dan lain-lainnya. Malah GP Rouffaer dalam Vorstendaruden, sebelum tahun 1831 ada beberapa pegawai di bawah wedarsa atau kliwon yang meliputi <i>panesetu</i>, <i>penafus (materi)</i>, <i>paneket</i>, <i>panalawe atau penglawe</i>, <i>paningunjung</i>, <i>pananjang dan panakikim</i> Semua perangkat itu, digunakan untuk njaga <i>tata tentreming praja</i> atau menjaga ketenteraman dan ketertiban negara. Tanpa berokrat-birokrat tersebut, negara tidak akan aman dan pada gilirannya bakal jauh dari keselarasan. "Hubungan pejabat dengan raja sifatnya tanpa syarat dan sepenuhnya patuh, sebab hanya raja yang dapat menganugerahkan <i>kamuksen</i>," ungkap sejarawan Soemarsaid Moertono melukiskan relasi birokrasi pada masa Mataram II. Dan bentuk kamuksen itu, tambah penulis Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau tersebut diwujudkan dalam bentuk <i>lungguh</i> atau <i>apamage</i>. "Akibat utama pemberian tanah dari raja kepada para penerima <i>lungguh</i> tersebut adalah sejenis kepatuhan yang tanpa reserve. Itulah sebabnya, dalam birokrasi yang sangat patrimonial itu, <i>para birokrat kerajaan sangat patuh terhadap para rajanya</i>." ujar sejarawan MT Arifin ketika memperperbincangkan kekuasaan raja-raja Jawa beberapa waktu yang lalu. Jalur kepatuhan itu tak hanya berhenti pada aparat. Oleh para penerima <i>lungguh</i> diteruskan kepada rakyat atau <i>cacah</i> yang dinaunginya. Karenanya, rakyat pun pada akhirnya <i>suju</i> kepada raja dan menerbitkan sesuatu yang dalam bahasa modern disebut sebagai <i>kepatuhan publik atau kepunuhan sipil</i>. Efektif Persoalannya sekarang dengan birokrasi yang tidak terlalu rumit itu, mengapa bisa terbit sebuah kepatuhan publik? Akibat para birokratnya <i>trennginas</i> dan terampil? Atau wibawa para rajakah yang menyebabkannya? Ada berbagai macam jawaban bisa dimunculkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Menurut pengamatan para administrasi Belanda, hampir tidak mungkin raja atau penguasa mengontrol sampai ke tingkat pedesaan. Karenanya, lantas dibuat sebuah lembaga yang mengurus berbagai sistem "pemerintahan desa". Dalam kasus kepenghuluhan, seperti yang diungkapkan Drs H Ibnu Qovim Isma'il MS dari LIPI misalnya, akhirnya para birokrat kolonial (yang mengatasi kekuasaan raja) membuat kantor voor Inlandische Zaken yang berfungsi mengontrol para penghulu yang sering melakukan penyelewengan keuangan dan administrasi. Konon, menurut GF Piper, salah seorang ahli Belanda yang mengawasi keefektifan birokrasi kolonial, setelah ada kantor tersebut para <i>penghulu</i> semakin tertib dan baik dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam kasus ini tampak sekali, agar dicapai sebuah kepatuhan publik (<i>kawula ala</i>) ternyata diperlukan birokrasi yang canggih. Kekuasaan raja (sebagai puncak birokrasi) atau pemerintah kolonial (sebagai penguasa baru dan puncak birokrat baru) tak berarti apa-apa tanpa didukung oleh lembaga birokrasi. Namun demikian "teori" itu mudah juga dibantah. Seperti yang ditunjukkan oleh sejarawan Onghokham dalam Tradisi dan Korupsi, Birokrasi ternyata justru tak sepenuhnya berguna bagi negara. Jika kerajaan atau VOC dapat dianggap sebagai negara, maka aparat yang mereka ciptakan justru merongrong kredibilitas negara. Para demang, bekel atau penjaga jalan tol bukan saja menggunakan birokrasi untuk mempersulit dan mengeksploitasi kehidupan rakyat, tetapi juga turut memperlancar jalannya perlawanan rakyat. Perang Diponegoro yang berlangsung begitu lama (1825-1830) telah membuktikan betapa tidak efektifnya birokrasi. Hanya karena kelicikan dan kewibawaan para jenderal Belanda sajalah yang pada akhirnya mampu menyelesaikan perang yang melelahkan itu. Yang menarik, VOC rupa-rupanya juga hancur akibat adanya birokrasi yang terlalu memberi wewenang yang besar kepada para birokratnya. Banyak di antara mereka yang korupsi dan menjual jabatannya kepada orang-orang Cina yang memperoleh jabatan itu dengan penawaran tertinggi. Lalu, akibat terjadi banyak penyelewengan kongsi dagang yang berperan sebagai negara itu bangkrut dan terbunuh oleh birokrasi yang diciptakannya sendiri. Birokrasi Lokal Lantas adakah birokrasi yang ideal di Jawa pada masa lampau? Jika kehidupan para tokoh wayang dapat diartikan sebagai perilaku birokrasi manusia Jawa, maka sesungguhnya birokrasi yang ideal itu sesungguhnya sudah ada. Setiap raja (Puntadewa atau Dharmaraja) misalnya, bukan hanya punya patih, tetapi juga mempunyai abdi yang berfungsi sebagai kontrol (punakawan). Pandawa memiliki penasihat semacam Abiyaksa (eyang mereka) dan kontrol perilaku seperti Semar. Sedang Kurawa mempunyai Sengkuni dan Togeng yang kecakapannya tak kalah dari para birokrat Pandawa. Kerajaan-kerajaan itu juga memiliki lembaga pendidikan (dipimpin oleh Desana yang sangat cerdas), lembaga keprajuritan (Arjuna atau Aswatama), dan lembaga keagamaan yang dikelola oleh para resi. Konon, pada pasca-Bharatayuda, raja Parikesit berhasil memfungsikan birokratnya untuk mencapai kondisi kerja yang tatatentrem lerta raharja, ijoyo-royo gemah ripah loh jinawi. Apakah kondisi yang ideal itu pernah dicapai oleh raja-raja Jawa? Konon sangat sulit. Kalau pun mungkin, dalam pandangan Dr. Andrik Purwosato dari UNS, hanya bisa dicapai oleh Airlangga. "Kondisi yang ideal itu hanya ada di dalam perwayangan. Sangat sulit raja-raja Jawa mencapai tahapan seperti yang terjadi di dalam perwayangan," ungkap sejarah Prof Dr Sartono Kartodirdjo. Meski begitu, banyak kalangan menduga kerajaan Demak telah hampir membuat birokrasi yang mampu memberi perlindungan dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Penyair Rendra misalnya, bahkan menganggap Demak sebagai kerajaan yang sudah menggunakan birokrasi modern jauh sebelum negara-negara di eropa menciptakan birokrasi yang memakmurkan warganya. Dalam pandangan penyair itu, Demak tak hanya cukup menciptakan	

birokrasi yang berhubungan dengan dunia politik. Lebih dari itu juga menciptakan "lembaga pengetahuan" yang mampu membuat kapal-kapal besar. Mereka juga menciptakan lembaga kontrl (dewan wali), lembaga pemerintahan (dipimpin Raden Patah), dan keperajuritan.

Kredibilitas Raja

Pendapat Rendra ini sejalan dengan "penelitian" sastrawan Pramudya Ananta Toer. Menurut dia Demak besar lantaran memperhatikan **kekuatan air dan tanah**. Dalam bahasa yang lebih gampang, kerajaan itu telah menciptakan birokrasi yang berhubungan dengan **kemaritiman dan keagrarian**. Itu tak terjadi lagi setelah kerajaan dipindah ke pedalaman yang tak lagi egaliter.

Benar begitukah? Katanya tidak. Sebab, pasca Raden Patah toh Demak hancur. Itu, membuktikan tak cukup hanya dengan **birokrasi yang canggih saja** sebuah kerajaan atau negara dapat melangsungkan kehidupannya. Dibutuhkan **raja yang berkredibilitas tinggi** semacam Raden Patah untuk **menjadi negara berada dalam tahapan aman dan tenteram**

Maka dapat disimpulkan, **tak selamanya birokrasi bisa menyangga kekuasaan**. Sebaliknya, belum tentu pula **raja yang berwibawa dapat menyelelarkan alam jika tidak menggunakan birokrasi yang canggih**. Dalam kasus kerajaan-kerajaan di Jawa, **kredibilitas raja dan birokrasi yang canggihlah yang sesungguhnya berperan melangsungkan kehidupan negara**. ***

Sumber: Pusdok 'Suara Merdeka'

6.

Judul	'Gaya Hidup Boros Akibatkan Elite Jawa Runtuh'
Penulis	Triyanto Triwikromo & Hendro Basuki
Edisi	Kamis (12 Februari 1998)
Sangat menarik mengamati perkembangan peradaban kaum elite di Jawa pada masa lampau. Paling tidak dengan menatap gaya hidup mereka, menurut sejarawan Prof Dr Sartono Kartodirdjo, Drs Sudewa dan Drs Suhardjo Hatmosuprobo dalam Perkembangan Peradaban Priyayi, orang akan memetik pelajaran tentang orientasi status, ritualisme, religio-magisme, simbolisme dan mitologi, serta solidaritas primordial yang pernah mereka lakukan. Bahkan, dengan memperbincangkan dimensi sosial, budaya, dan ekonomi mereka, sesungguhnya telah terlihat pula kecenderungan perilaku manusia Jawa. Sebab, dalam pandangan Prof Dr Simuh dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hampir semua orientasi kehidupan manusia Jawa memang ditujukan untuk menjadi priyayi atau kaum elite. Pendapat itu agaknya disepakati oleh banyak ahli: Clifford Geertz dalam The Religion of Java misalnya, perlu menyertakan kebudayaan dan peradaban kaum elite (dalam konteks ini para priyayi) sebagai salah satu pilar terpenting konstruksi kebudayaan Jawa. Menurut dia, sekalipun manusia Jawa terdiri dari golongan abangan, santri, dan priyayi, tetapi yang sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial adalah dari golongan priyayi atau kaum elitnya. Dengan kata lain, kepriyayan telah menjadi semacam "ideologi" yang tidak boleh disepelekan. Sangat aib, jika orang Jawa tidak berlaku sebagai priyayi atau selaku kaum elite. Maka, seorang Lantip yang berasal dari golongan rendah dalam novel Para Priyayi Umar Kayam, dapat dimaklumi jika menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya untuk menjadi priyayi. Sangat bisa dimaklumi, jika dia mesti ngenger dan suwita kepada keluarga bangsawan agar dapat memasuki komunitas yang elit itu. Bahwa kepriyayan juga menjadi orientasi pamungkas manusia Jawa, dapat juga dilihat dari kisah Damarwulan. Dia juga perlu menerobos, merebut, dan bertahan hidup di negarigung agar kedudukannya sebagai wong cilik berubah menjadi bangsawan. Malah dalam kisah Petruk Dadi Ratu Punakawan mengisahkan simbolisme wong cilik perlu menjadi ratu, hanya lantaran ingin merasakan nikmatnya menjadi kaum elite. Kaum Elite Meski begitu, bertolak dari pengertian-pengertian itu, Geertz menyimpulkan, priyayi adalah golongan elite pegawai negeri yang ujung akarnya terletak pada keraton Hindu-Jawa sebelum masa Kolonial. Mereka itu dalam pengamatan antropolog itu, adalah tokoh-tokoh yang memelihara dan mengembangkan etiket keraton yang sangat halus dan kesenian yang sangat kompleks. Akhirnya Geertz, berpendapat: Priayi adalah adalah kelompok sosial (asal warga tidak jadi persoalan) yang mempunyai tingkah laku dan mempunyai nilai-nilai hidup yang berbeda dari abangan dan santri. "Mereka itu santri tidak, abangan juga bukan. Cara hidup mereka merupakan perpaduan dari kedua arus perilaku itu." papar Dr. Abdullah Salim dari Universitas Sultan Agung. Malah, saudagar yang pada mulanya tak dilirik sebagai pilar kebudayaan, pada masa pemerintah kolonial menjadi lebih super ketimbang priayi. Lebih-lebih pedagang yang masih kerabat keraton memiliki berbagai fasilitas yang dimiliki oleh para priayi. Dalam konteks ini, kepriyayan dan keelitan ternyata dapat dibeli. Seorang etnik Cina di Betawi misalnya, bahkan dapat memperoleh gelar Raden Mas atau menjadi kapiten. "Itulah masa ketika kepriyayan tak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sakral," kata Abdullah Salim. Hal itu, patut disayangkan, karena dulu, paling tidak menurut budayawan H Karkono K Partokusumo dari Yogyakarta, para priayi menjadi teladan kehidupan. "Karena memberi teladan tentang keperwiraan, kejujuran dan kesatriaian, mereka sangat disegani oleh warga setempat. Malah lantaran ingin dekat dengan masyarakat, mereka membuat magersaten". Gaya Hidup Bagaimana gaya hidup kaum elite Jawa pada masa lalu? Untuk menjamin kelangsungan hidup kelompok dan mempertahankan status quo ternyata kaum elite Jawa memiliki berbagai gaya hidup yang berbeda dari wong cilik. Dalam pandangan Sartono, Sudewa, dan Suhardjo Harmosuprobo misalnya, rupa-rupanya mereka gemar melakukan refeudalisasi atau memberlakukan perilaku feodalisme para raja masa lalu ke dalam kehidupan modern. Mereka juga suka memodernisasi profesionalisme dengan "memaksa" pemerintah kolonial memasukkan profesi mereka pada masa lalu ke dalam birokrasi pemerintahan kolonial. Maka, tak mustahil jika pada masa pemerintahan kolonial ada "raja-raja kecil yang turut mengatur pemerintahan kaum elite yang semacam inilah yang menjadikan Lebak pada masa Multatuli mengalami masa-masa sulit. Ada kepentingan Bupati Lebak KRT Kartanatanegara yang berseberangan dengan Multatuli. Selain itu, dalam pandangan Dr Djulianti Suroyo dari Universitas Diponegoro, kaum elite juga punya kegemaran yang hingga kini masih tampak jejaknya, yakni berpoligami. "Pada mulanya memang untuk menambah daya mistiskomis keluarga. Namun pada perkembangan berikutnya, hanya untuk klangenan. Namun, tambah Abdullah, jumlah perempuan yang dijadikan istri kesekian berkurang ketika kebudayaan Islam masuk. Tentu saja, untuk membiayai "hobi" itu, menurut Djulianti Suroyo, kaum elit butuh dana yang tidak sedikit. "Apalagi ditambah dengan kegemaran lain semacam berjudi main ceki dan menenggak minuman keras menjadikan mereka dililit utang," tuturnya. Gaya hidup boros itulah yang akhirnya menjadikan mereka berhutang dengan saudagar Cina dan akhirnya kepada VOC (maskapai perdagangan Belanda) dan pemerintah kolonial. "Maka dapat disimpulkan, awal keruntuhan kaum elit sesungguhnya dimulai dari hutang dan permohonan bantuan kepada orang asing," tambah Djulianti. Dan hutang itu, agaknya mesti dibayar dengan menurunkan harkat priayi atau kaum elite. Mereka menjual dan menyewakan simbol-simbol kepriyayan berupa <i>langguh</i> kepada penjajah dan saudagar. Apakah kini kondisi itu menerpa elite Jawa modern juga? Hal itulah yang menjadikan priayi Jawa tak mampu lepas dari krisis ekonomi? Merekalah yang tahu jawabannya. ***	

7.

Judul	‘Idiom Kepemimpinan Jawa Runtuh Akibat Dimanipulasi’
Penulis	Triyanto Triwikromo
Edisi	Kamis (3 September 1998)
ADA gosip politik yang perlu diketahui oleh para peminat budaya Jawa. Gosip itu menjadi menarik, karena menyangkut tentang pemilihan presiden pada pemilu mendatang. Apa isinya? "Negeri ini akan segera memiliki pemimpin yang bakal bisa jadi juru selamat bangsa. Saya istilahkan pemimpin yang bakal muncul itu sebagai <i>ksatria piningit</i>," kata paranormal Permadi SH di Blitar. Kontan lontaran bernada politis itu disambut dengan gegap gempita oleh wartawan yang meliput ritual Haul Bung Karno. "Megawatikah yang Anda maksud?" tanya beberapa wartawan serentak. Tak langsung menjawab. Permadi mengerutkan dahi sejenak. "Saya tidak mau menjawab sekarang. Kalau saya jawab, namanya bukan <i>ksatria piningit</i>." Pria atau wanita, tanya pers lagi "Dia bisa banci, pria atau wanita. Yang jelas berasal dari keturunan orang Jawa," papar Permadi optimis. Merasa tak puas pada jawaban 'Penyambung Lidah Bung Karno' itu, Artawa, jurnalis dari sebuah surat kabar terbitan Jakarta <i>nyelethuk</i>, "Saya tak percaya dengan ramalan-ramalan Jawa lagi. Dulu katanya yang akan jadi presiden setelah Soeharto berakhir <i>Na</i> atau <i>No</i>. Ternyata yang jadi Pak Habibie. Jadi, kan konsep <i>Notonagoro</i> tak berlaku lagi. Bisa saja besok berubah jadi <i>Notobinobangsa</i>." Apa maksud Artawa? "<i>Notobinobangsa</i> itu ya Soekarno. Soeharto, Habibie, dan presiden-presiden lain," tuturnya sembari memancing kesediaan Permadi untuk tak merahasiakan <i>ksatria piningit</i> yang dia maksudkan. Sayang sekali paranormal yang senantiasa berpakaian hitam-hitam itu tetap tak bergeming. Bahkan, ketika ditanya, apakah presiden itu akan muncul dari kubu PDI. Dia tak mau terpancing. "Pokoknya tunggu saja tanggal mainnya. Yang jelas, dia akan menjadi pemimpin besar di kawasan Asia," kata Permadi sambil meninggalkan kerumunan. Hamengku Buwono Di Yogyakarta "pemilihan" presiden Indonesia masa depan direspon secara lain. "Yang bakal jadi pemimpin adalah sosok yang Hamengku Buwono," kata ahli filsafat timur, Dr Damardjati Supadjar. Siapa yang dia maksud "Adalah sosok yang bisa memikirkan bangsa ini tanpa memikirkan apa yang bakal dia dapat dari amanat rakyat yang disandangnya." Sri Sultan Hamengku Buwono X? Seperti Permadi, Damardjati pun bermain teka-teki. "Pokoknya yang mampu menjunjung dan meninggikan harkat dan martabat negeri ini. Saya tak akan menyebut nama. Pokoknya tahu sendirilah siapa orang Jawa masa kini yang paling demokratis," tambahnya. Boleh saja para pakar Jawa itu berteka-teki Namun, Karto Mulyono, seorang pengemudi becak yang sering mangkal di depan Kantor Pos Besar Yogyakarta punya jawaban yang tegas. "<i>Ngantos sopunika kulo dereng rumaos gadhah presiden. Pemimpin kawula alit punika inggih Ngarso Dalem</i>." Yang menarik, ketika ungkapan itu dikonfirmasi kepada Damardjati, pakar budaya Jawa itu bereaksi secara dingin. "Apa yang diungkapkan rakyat pasti benar. Tak ada yang bisa menghalang-halangi keinginan mereka," tuturnya. Karena itulah <i>kawula alit</i> Yogyakarta <i>ngotot</i> agar Sri Sultan Hamengku Buwono X tetap jadi gubernur dan untuk kemudian dipilih jadi presiden? "Rakyat Yogyakarta punya tradisi memilih Ratu Adil-nya sendiri. Jadi, penolakan terhadap keinginan rakyat hanya akan jadi masalah," tambah Damardjati. Komentar yang sama diungkapkan oleh Dr Djoko Suryo, sejarawan dari UGM "Saya tak mau mengomentari siapa yang layak jadi presiden masa depan. Yang jelas, saya akan mendukung pilihan rakyat banyak. Kalau memang mereka menginginkan sosok-sosok yang bakal menyejahterakan mereka, ya harus didukung, Ini kan era rakyat Jadi, kita harus memenuhi setiap keinginannya," katanya Apakah Djoko Suryo mendukung pencalonan Sri Sultan? "Pemilu saja masih jadi perbincangan sengit, kok sudah mau memilih presiden. Sudahlah mari kita memikirkan pemilu yang lebih demokratis dulu." Runtuh Di Jawa Tengah, ribut-ribut mengenai "pemilihan" presiden direspon secara pesimis. "Era ini bukan era orang Jawa. Lihat saja orang-orang nomor satu di negeri ini. Sudah tak didominasi oleh orang-orang Jawa lagi," kata Dr Rama Sudi Yarmana. Sudah tak sanggup menjadi pemimpinkah para petinggi Jawa? "Idiom-idiom kepemimpinan Jawa sebenarnya tetap bagus. Namun lantaran banyak petinggi Jawa melakukan manipulasi terhadapnya, kepercayaan bangsa ini pada pemimpin yang berasal dari Jawa mengurang," tandas Sudi. Benar begitukah. "Ya. Kalau tak segera direhabilitasi ajaran-ajaran Jawa akan punah. Setelah punah, kita akan kesulitan mencari pedoman ideal. Kesulitan mencari pedoman ideal akan sama saja dengan kesukaran memperoleh yang ideal. Maka jangan sekali-kali memanipulasi ajaran," kata Damardjati. Hal yang sama diungkapkan oleh parapsikolog Ki Hudooyo Doyodipuro. "Sekarang ini kita bukan saja tak memiliki kepercayaan diri. Bersamaan dengan itu kita telah kehilangan pedoman, pemimpin, agama, dan hal-hal yang luhur," tuturnya. Agak sukar mencari pedoman dan pemimpin Jawa yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Sebab, paling tidak menurut budayawan Rendra, pemimpin yang berasal dari Jawa cenderung masih mengembangkan budaya feodalisme. "Setiap jadi pemimpin, mereka menyangka diri telah menjelma sebagai raja-raja Mataram baru. Padahal, raja-raja itu tak selamanya menunjukkan jati dirinya sebagai pengayom bangsa." Hal yang sama juga diungkapkan pakar filsafat dari STF Driyarkara Jakarta Dr Mudji Sutrisno SJ. "Boleh saja orang-orang Jawa memimpin negeri ini. Yang penting dia demokratis." Persoalannya sekarang, masih adakah calon presiden dari Jawa yang bisa memenuhi kriteria politik modern yang cenderung mengagungkan konsep demokrasi? (Triyanto Triwikromo-08)	

Sumber: Pusdok 'Suara Merdeka'.

8.

Judul	'Sultan HB X Dianggap 'Ratu Adil'
Penulis	Triyanto Triwikromo
Edisi	Kamis (10 September 1998)
GONJANG-ganjing pemilihan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah reda. Dipastikan Sultan Hamengku Buwono X bakal menjadi calon tunggal dan berhak memimpin rakyat sampai 5 tahun mendatang. Mengapa masyarakat, terutama <i>kawula alit</i>, sangat menginginkan dia untuk menjadi gubernur sekaligus raja? Mungkin bisa saja Anda menduga karena masyarakat daerah itu masih ingin hidup dalam suasana kesultanan yang feodalistis. Mungkin juga ada perkiraan karena rakyat terjebak ke dalam kebesaran dan kejayaan Mataram. Bukan. Bukan karena itu, <i>kawula alit</i> Yogya ngotot memilih Sultan sebagai pimpinan formal dan informal mereka. Lantas disebabkan oleh apa raja yang suka mengenakan jas ini disukai rakyat. "Kula kinten ingkang badhe paring gesang ingkang mulya punika inggih Gusti Ngarso Dalem. Pramila, menawi wonten ingkang badhe ngalang-ngalangi Sultan anggenipun dados pimpinan, kula kalian rencang-rencang badhe pepe wonten alun-alun," kata Sutarno seorang pengemudi becak asal Gunung Kidul. "Ngarso Dalem punika ratu adil. Tansah paring ayem tentrem," kata Slamet, pedagang sayur, menggambarkan sosok junjungannya. Mungkin komentar-komentar itu terasa mengada-ada dan berkesan "tak terdidik." Namun, karena hampir semua tokoh yang diwawancarai berkata semacam itu, maka dapat dipastikan Sultan memang memiliki <i>power</i>, <i>kharisma</i> dan <i>aura politik</i> yang tak bisa dinisbikan oleh para birokrat negeri ini. Sebesar apakah pengaruh putra Sultan HB IX itu? "Saya tak bisa membayangkan apa yang terjadi jika pada saat semacam ini DIY tak dipimpin seorang yang benar-benar kuat secara budaya maupun politis," kata sejarawan dari Universitas Sanata Darma. Drs G Moedjanto MA. Sultan, menurut penulis buku-buku mengenai kekuasaan Jawa itu, adalah sosok yang selalu memberi rasa <i>ayem tentrem</i>, dan bukan sebaliknya. "Tanah-tanah keraton boleh dikerjakan rakyat kecil. Dia bukan sosok yang minta dilayani, tapi tokoh yang justru melayani rakyat." Demokratis Bisakah seorang raja (yang punya segalanya) menjadi abdi rakyat? "Jangan bayangkan Sultan sebagai seorang raja yang lalim. Dia sangat demokratis, melebihi pemimpin-pemimpin negeri ini. Jika para gubernur kawasan lain melakukan refeodalisasi, tokoh kita ini justru melakukan defeodalisasi. Memang kedengaran aneh. Tetapi begitulah kenyataannya," tambah Moedjanto. Tak hanya sejarawan yang bisa mengungkapkan 'kehebatan' sang raja. Seorang pakar logika semacam Prof Dr Koento Wibisono pun seperti 'tersihir' oleh pesona HB X saat mengomentari perilaku dia. "Harus diakui, Sultan adalah komunikator yang baik. Dari pejabat tinggi sampai rakyat kecil bisa disapa dengan bahasa dan jiwa yang sama. Mungkin dia mewarisi kharisma Sultan HB IX. Karenanya jangan heran jika pada saat ini, dia juga menjadi seorang reformis" tuturnya. Seorang reformis? "Ya. Dalam sepanjang sejarah kehidupannya, sultan tak memiliki 'lembaran hitam'. Malah, sekalipun menjadi salah satu pucuk pimpinan Golkar, dia tak segan-segan memberi ruang hidup bagi PDI. Ini kan sikap politik yang nyaris tak mungkin dilakukan oleh para birokrat lain." Hal senada juga diungkapkan oleh teaterawan Butet kertaredjasa. "Saya kira mencari pemimpin yang sedemokratis Sultan pada saat ini sangat sulit. Maka kalau kamimenginginkan dia menjadi pemimpin, janganlah dianggap sebagai pecinta feodalisme. Sultan sangat jauh dari paham yang senantiasa digunakan untuk menindas "kawula alit"; itu. Dia memang raja. Tetapi sikapnya sangat merakyat," katanya. Malah tandas Butet, kalau pun pemerintah keberatan memilih sultan sebagai gubernur, rakyat yogyakarta tetap akan menghormatinya. "Walau dalam kondisi dan situasi yang bagaimana pun, kami tak akan melupakan sejarah. Kami sudah hidup dalam suasana yang tenteram di bawah naungan raja yang demokratis. Jadi apa gunanya hidup dalam suasana republik, jika dipimpin oleh orang-orang yang lalim." Karena itulah mungkin Sutarno berani menyatakan, "Ngarso dalem punika ratu adil ingkang suged paring gumayu marang kawula alit. Sinten malih ingkang badhe paring kamulyan menawi sanes sultan?" "Kultus individukah ini?" Tidak. Kami sangat rasional dalam mengomentari kebaikan-kebaikan Sultan," kata Butet. Terkooptasi Begitulah, dukungan terhadap Sultan memang begitu tinggi. Namun bersamaan dengan itu, beberapa kalangan khawatir terhadap posisi raja yang harus masuk dalam jajaran birokrasi pemerintah itu. "Ya. Kami memang khawatir, jangan-jangan setelah masuk dalam birokrasi, sikap-sikapnya yang demokratis dan suka memberi kesejahteraan kepada rakyatnya terkooptasi," papar Butet. Meski begitu Butet yakin Sultan akan bisa mengatasi berbagai 'ancaman' yang bakal menggugurkan fungsinya sebagai pemimpin moral dan budaya. "Karena itulah, ngarso dalem tak terlalu obsesif untuk menjadi gubernur. Baginya menjadi pemimpin moral dan budaya sudah cukup. Dengan kata lain, dia 'ora patheken' kalau tak jadi gubernur. Moedjanto rupa-rupanya juga memiliki kekhawatiran yang sama. "Mungkin birokrasi tak akan tinggal diam. Dia tentu tak diperbolehkan memimpin rakyat yogya seenaknya sendiri. Meski begitu, saya yakin kharisma yang telah dia bangun selama ini tak akan tanggal hanya lantaran dia harus masuk ke dalam jajaran birokrasi," katanya. Untuk itu kata Koento Wibisono, tokoh yang dianggap paling peduli terhadap rakyat ini perlu melepaskan diri dari rezim orde baru. "Dan agaknya ngarso dalem akan melepaskan diri dari pengaruh itu. Dia tak ingin menjadi duduk di birokrasi selama-lamanya. Malah sepanjang yang saya ketahui, dia menginginkan dikoreksi oleh rakyat kapan pun. Dan mekanisme itu, rasa-rasanya juga akan dilakukan oleh DPRD Yogyakarta." Ditandaskan juga oleh mantan Rektor UNS itu, tak hanya DPR yang akan 'sayuk rukun' mengoreksi Sultan. Tetapi juga kalangan intelektual. "Jadi jangan khawatir akan muncul feodalisme baru di yogya," ucap Koento. Begitulah dongeng politik masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta ketika hendak memilih ratu adilnya sendiri. (Triyanto Triwikromo)	

II. RSP Periodisasi 1999-20200: Tidak Terbit

III. RSP Periodisasi 2000-2010: 18 artikel

1.

Judul	'Menang Tanpa Ngasorake, Kenapa Tidak?'
Penulis	Sucipto Hadi Purnomo
Edisi	Minggu (12 Maret 2000)
GUS Dur barangkali sedang menjalankan strategi menang tanpa ngasorake ketika sowan ke rumah Wiranto, Habibie, dan Soeharto. Dalam tradisi Jawa, strategi ini bukanlah taktik baru untuk mengalahkan musuh. Simak misalnya pertarungan Wirasaba dan Mahesa Jenar. Ketika ditantang Wirasaba untuk bertarung, Mahesa Jenar tak gentar. Namun karena suami si jelita Jenthik Manis yang telah terbakar api cemburu itu terus menantangnya, dia tak bisa mengelak. Pertarungan pun terjadi. Memang bekas senapati Demak itu menunjukkan kesaktiannya, tapi bukan untuk mengalahkan lawan. Sebaliknya, dengan menunjukkan kedahsyatan Aji Sasra Birawa, ia malahan berusaha menyadarkan Wirasaba. Dan, keinginan Mahesa Jenar benar-benar menjelma jadi kenyataan. Begitulah SH Mintardja menunjukkan bagaimana memformulasikan konsepsi "menang tanpa ngasorake" lewat karyanya yang telah menjadi klasik itu, Nagasasra dan Sabuk Inten. Pramoedya Ananta Toer lewat Dongeng Calon Arang (1999) juga menunjukkan hal yang sama secara substansial, meski dengan formula berbeda. Sekalipun telah berhasil menaklukkan Calon Arang, bahkan membunuhnya, Empu Baradah justru menghidupkan kembali wanita penyihir itu. "Mati adalah gampang, Calon Arang. Tetapi mati itu tidak berguna kalau tidak membawa kesucian. Baiklah kusucikan jiwamu dahulu," kata Empu Baradah. Sunan Kalijaga pun telah melakukan hal itu terhadap penguasa Majapahit, Prabu Barawijawa. Sebagaimana sering dipentaskan oleh berbagai kelompok ketoprak dalam lakon Brawijaya Paras, kala itu Brawijaya pada posisi terjepit akibat kuatnya tekanan penguasa baru tanah Jawa, Kesultanan Demak. Ia dianggap sebagai pusat keburaman masa lalu. Namun di Gunung Lawu, Sunan Kalijaga justru menemuinya, ngaras pada, sungkem kepadanya. Ia berusaha membantu orang kuat yang telah kehilangan mahkota itu membangun kepercayaan diri dan menerima perubahan dengan lega lila. Justru karena tindakan wali yang sering digambarkan selalu berbusana hitam-hitam itu. Brawijaya kepranan..... Begitulah, ungkapan yang dipopulerkan oleh RM Panji Sosrokartono itu telah menjadi bagian dari pesan moral berbagai derita masa lampau. Lebih dari itu, ia telah menjelma sebagai bagian dari paranata sosial untuk membangun urip tentrem raharja. Selengkapny sebenarnya "sugih tanpa bandha, nglurug tanpa bala, sekti tanpa aji, menang tanpa ngasorake". Sebuah ungkapan yang muatan artinya berkesan paradoksal. Namun dengan sistem formulaik yang berdasar pada ungkapan tersebut, orang lalu membuat idiom sebangun yang lebih bernada pelesetan ataupun mengalami distorsi. Pesan Kepemimpinan Ungkapan menang tanpa ngasorake, paling tidak menurut Prof Suwaji Bastomi, sebenarnya merupakan piwulang sekaligus piweling tentang kepemimpinan. "Kata-kata itu, jauh sebelum dipopulerkan oleh RM Panji Sosrokartono, telah menjadi pesan moral kepada para pangeran pati dan raja," kata penulis berbagai buku tentang wayang dan budaya Jawa ini. Lebih lanjut ia menjabarkan secara berurutan tentang kepemimpinan yang bermuara pada keterciptaan ambeg sinatriya dan ambeg pinandhita. Pertama, harus sepi ing pamrih rame ing gawe. Artinya, aktif mengurus berbagai persoalan untuk menggapai kemakmuran. "Namun itu harus dilambiri sugih tanpa bandha. Kaya tanpa harta, tapi kreatif dan gagasannya meru ah," katanya. Tak hanya sampai di situ. Sebab, menurut pendapatnya, salah satu tugas ksatria (Jawa) adalah berperang, ngelar jajahan. Namun dalam melakukan kewajiban itu hendaknya nglurug tanpa bala, tak perlu pasukan tapi justru bisa mrantasi. "Tanpa itu, sulit rasanya mewu judkan filosofi menang tanpa ngasorake." Guru Besar FBS Universitas Negeri Semarang ini pun lantas menunjukkan smed miring-nya dalam lakon Sesaji Raja Sunya. "Ketika telah berhasil mengalahkan Prabu Jarasandha, Kresna justru melepaskan raja yang telah menawan seribu raja itu. Tapi karena tindakan itu, Jarasanda dan raja-raja tersebut malahan mengakui keberadaan Kerajaan Amarta," tuturnya. Dalam pandangan budayawan Jawa Dr Sudi Yatmana, para panakawan dalam pewayangan dan para pujangga keraton sebenarnya telah banyak memformulasikan konsepsi tersebut. "Panakawan dengan guyonannya dan para pujang ga dengan karyanya telah mampu memasukkan pesan-pesan kepada para penguasa, bahkan menyadarkannya tanpa kesan menggurui ataupun mengalahkan," tutur penulis ratusan buku tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa ini. Sudi Yatmana tentu tak berlebihan. Sebab diantara 15 sifat utama Gajah Mada Saja, sebagaimana disebutkan Rakawi Prapanca dalam Negarukertagama adalah anayaken musuh atau bertindak memusnakan musuh. Gajah Mada senantiasa menjalankan politik kasih sayang terhadap teman negara, tetapi tak pernah gentar menewaskan musuh yang mengganggu dengan pendirian atau kelakuan yang salah. Kebesaran Majapahit memang ditegakkannya atas dasar perdamaian namun ia tak takut menumpahkan darah dalam membelanya (Wiwoho, 1998-20). Begitu pula yang tersirat dalam ajaran Astabrata. Sekalipun harus memiliki watak Dewa Candra, pemimpin harus bertabiat seperti Dewa Brawa, galak terhadap musuh, siapa pun yang diserang harus hancur lebur. Namun, menghadapi tawan dengan konsepsi menang tanpa ngasorake tentu lebih jauh lebih menawan. Mengapa tidak? (Sucipto Hadi Purnomo)	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

2.

Judul	'Saat Raja Jawa Mengatasi Geger Politik'
Penulis	Triyanto Triwikromo
Edisi	Minggu (9 Juli 2000)
GEGER politik bukanlah situasi baru bagi orang Jawa. Sejak Ken Arok bermusuhan dengan Tunggul Ametung sampai Sultan Agung bertikai dengan Wirasaba, geger dan geger politik senantiasa mewarnai kehidupan pemerintahan raja-raja Jawa. Sayang sekali para elite politik kurang belajar dari cara para raja Jawa itu mengatasi konflik. Sehingga, sejak Amangkurat sampai pemerintahan Gus Dur selalu saja ada darah tervecer dan nyawa-nyawa melayang untuk sesuatu yang hampa. Untuk sesuatu yang sia-sia. Misalnya saja bagaimana Sultan Agung menghukum panglima-panglima yang tak sepenuh hati merebut Batavia. HJ De Graaf, pengamat Mataram yang detail, mengungkapkan dengan cukup tak cara Sultan "menghukum" para panglima. Tulis De Graaf. "Panglima-Panglima yang tidak tewas dalam pengepungan pertama terhadap Batavia, kemudian dibunuh. Baru pada 1 Desember, Tumenggung Sura Agul-Agul menyuruh Adipati Mandurareja dan Kiai Upa Santa bersama pengikutnya kemudian membunuhnya 'melalui pengadilan, atas perintah raja Mataram, karena batavia tidak dikuasai ataupun diperjuangkan sampai mati'. Mungkin panglima-panglima inilah yang dipenggal kepalanya sedangkan yang rendahan di tusuk sampai mati dengan tombak atau keris." Apa yang menarik dari teks itu? Tentu bukan kisah pembunuhan yang memedihkan sukma itu. Yang jelas, jika benar yang menyuruh membunuh itu Sultan Agung, dia tampaknya sedang mengajari para panglima agar bersungguh-sungguh mengatasi krisis. Yang menarik, ternyata Sultan merasa tak menyuruh Tumenggung Agul-Agul. Karena itulah, lanjut De Graaf, "Tewasnya cucu-cucu patih yang termasyhur secara menyedihkan ini tentu menimbulkan keresahan di dalam dan mungkin di luar Istana. Kejadian semacam itu agaknya kini berulang. Ketidaktegasan Gus Dur menyikapi lawan politik menyebabkan kemunculan rumor "40 lawan " yang hendak dihabisi oleh rezim Gus Dur. Masih untung Gus Dur tidak meminta mereka dibunuh. Masih untung ketidakjelasan itu hanya memberikan ruang strategi politik yang lebih bebas kepada lawan-lawan Gus Dur. "Ya, mengapa kita tak belajar dari sejarah? Mengapa kita tak mendapatkan mutiara dari kebusukan yang dilakukan oleh Sultan Agung?" kata pengamat budaya Jawa dari Jakarta, Dr Mudji Sutrisono SJ. Mengatasi Masalah Pada saat itu, untunlah Sultan Agung segera mengatasi masalah dengan menindak tegas Tumenggung Sura Agul-Agul. "Saya tak menyuruh Anda membunuh Adipati Mandurareja dan Kiai Adipati Upa Santa. Saya hanya menginginkan Anda menindak para pengikutnya yang tak berjuang membela kerajaan dengan sepenuh hati," kata Sultan. Alhasil, Tumenggung Sura Agul-Agul harus menebus kekeliruan fatal itu. Bersama para bangsawan yang tak mampu mempersembahkan kemenangan bagi Mataram, dia dibunuh oleh Sultan. Ceceran darah Sura Agul-Agul, seperti ditafsirkan oleh Arwendo Atmowiloto, sesungguhnya memberikan isyarat: betapa kesalahan seorang panglima seharusnya ditanggung oleh para panglima itu. "Kita yang hidup pada masa kini tidak belajar dari peristiwa itu," kata penulis Senapati Pamungkas itu. Kita, yang hidup dalam hegemoni militer dan Gus Dur tampaknya belum mampu mengendalikan tentaranya: kasus Ambon belum rampung, peristiwa berdarah Aceh makin meruyak sukma tak memiliki keberanian untuk mengatasi masalah dengan lebih tegas. Mungkin tidak harus dengan berbagai teror pembunuhan. Mungkin, seperti yang diungkapkan penyair Darmanto Jatman, para elite militer harus berani mengaku salah. "Mengaku keliru menjalankan amanat dari presiden terdahulu." Yang terjadi kemudian, lagi-lagi mirip seperti yang terjadi pada zaman Sultan Agung: intrik, perang ide, ceceran darah yang tak berguna, teror yang melibatkan angkatan perang, dan kecaman-kecaman kepada "raja". Seperti Sultan Agung, Gus Dur kemudian juga dianggap tak mampu mengatasi persoalan. Itu terbukti dari kemerebakan aktivitas Laskar Jihad, pengeboman Kantor Kejaksaan Agung, dan keterpurukan kondisi ekonomi. Bahkan akhirnya bisa ditebak, ekspansi ide demokrasi Gus Dur akan menghadapi karang terjal, sebagaimana ekspansi politik Sultan Agung mentok di tengah jalan. Perbedaanannya, Sultan Agung segera mengubah strategi, sedangkan Gus Dur masih yakin dengan teori humanismenya. Pelajaran Tingkir Yang juga harus dipelajari Gus Dur dari babad adalah penaklukan Jaka Tingkir terhadap lawan yang digambarkan sebagai 40 buaya (kok jumlahnya lagi-lagi mirip dengan lawan politik Gus Dur ya?). Jaka Tingkir tak membunuh buaya-buaya itu, sehingga dia bisa menyeberang sungai yang berarus deras. Karena itulah para pujangga Jawa lantas membuat tembang: '<i>sigramilir sang gethek sinangga bajul/patang puluh cacahipun</i>.' Jaka Tingkir sebagaimana Yesus atau Dalai Lama, ternyata menggunakan jargon "lawanmu bukanlah lawanmu". Atau dia menggunakan adagium," sayangilah musuhmu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri." Bertolak dari hal ini, Tingkir atau Karebet (lihat pula cerpen Sendang Mulyana bertajuk Yang Tersisa dalam rubrik Seni) akhirnya bisa menjadi raja dengan bergelar Sultan Hadiwijaya. Ada kisah kedigdayaan yang tak menistakan kedigdayaan <i>the others</i> dalam babad itu. Ada semacam pelajaran yang berharga bahwa mencintai musuh secara proporsional akan membuat sang musuh mendukung setiap usaha yang dilakukan pihak yang sedang bertikai.	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

3.

Judul	'Diperlukan Bisma untuk <i>Wani Ngalah</i> '
Penulis	Sucipto Hadi Purnomo
Edisi	Minggu (13 Mei 2001)
KULTUR bangsa ini tak pernah mendidik untuk menerima kekalahan sebagai sesuatu hal yang wajar. "Terutama dalam kultur Jawa yang tercermin dalam dunia pewayangan, semua merasa sebagai figur Pandawa," ungkap sastrawan Ahmad Tohari (Suara Merdeka, 8/5/2001). Benarkah kita tak memiliki kultur ngalah? Tak benar orang Jawa dikatakan tak memiliki tradisi mengalah. Pengalaman selama 350 tahun dinjak-injak oleh penjajah, lebih dari cukup untuk membuktikan hal itu, kata dalang kondang Ki Manteb Sudharsono. Dalang asal Karangpandan, Karanganyar, yang banyak mengelaborasi persoalan aktual bangsa ini dalam pakelirannya itu, juga menunjukkan bukti, orang Jawa punya karakter yang tidak ngotot, baik dalam hal bisnis maupun perdebatan. Paling tidak bila dibandingkan dengan suku lain di luar Jawa. Senada dengan Ki Manteb, sejarahwan dari Universitas Diponegoro Semarang, Dr Djulianti Soerojo, juga menengarai ketidakngototan orang Jawa dalam berbagai forum adu pendapat dan bisnis. "Malahan mereka yang suka ngotot dalam pertemuan, sering mendapat cap kurang baik. Pendapat itu tentu saja bisa diparelelkan dengan konsep rukun dan hormat, sebagai dua kaidah yang paling menentukan pola pergaulan orang Jawa, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hildred Geertz dan Frans Magnis Suseno itu. Namun Djulianti juga ragu, ketidakngototan itu sebagai bagian dan kultur atau ketidakmampuan orang Jawa mempertahankan sesuatu. Sekalipun ada landasan tradisi dan kultur mengalah yang memadai, Ki Manteb melihat saat ini terjadi kelunturan budaya tersebut. "Tapi itu sebagai akibat dari ketidakmampuan menerima pengaruh buruk dari luar, sehingga timbullah gegar budaya," kata dalang yang banyak memberikan kontribusi kepada jagat pakeliran, terutama dalam hal sanggit dan saber itu. Masa penjajahan Belanda, dalam pandangan Djulianti, merupakan sebuah masa kekecualian dalam mempersoalkan tradisi ngalah. "Sebagaimana dalam Palianagari, Pakubuwono III dipaksa mengalah ketika terjadi pemberontakan Pangeran Mangkubumi, pamannya. Lalu kerajaan dibagi menjadi dua: Yogyakarta dan Surakarta. Pihak ketigalah yang membuat para penguasa Jawa ngalah," jelas doktor sejarah lulusan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu. Karena itu, Djulianti bersimpulan, bagi para pemimpin politik, ngalah sebagai ketulusan tidak pernah ada dalam kenyataan historis. "Justru orang Jawa itu penuh dendam. Kekalahan selalu menjadi titik awal untuk membangun dendam dan pembalasan. Tragedi di sekitar kisah Ken Arok contohnya." Padahal, dalam pandangan Ki Manteb, dendam merupakan musuh terberat untuk <i>wani ngalah</i>. "Tanpa memiliki rasa percaya diri dan jati diri, apalagi justru menyimpan dendam, mustahil bisa membangun jiwa <i>wani ngalah</i>." Mencontoh Bisma Namun dari kisah wayang, Ki Manteb menunjukkan, Bisma merupakan contoh paling ideal tentang bagaimana <i>ngalah</i> secara terhormat. "Karena tahu rahasia Jitapsara, skenario Baratayuda, Bisma pun tahu apa yang bakal terjadi pada dirinya, termasuk kalah jika menghadapi Srikandi. Namun kekalahan dari Srikandi, bukanlah apa-apa baginya. Sebab, dia sudah memiliki adeg-adeg. Dan jagat pewayangan mencatat Bisma sebagai sosok yang pantas dikagumi," ungkap Ki Manteb. Dengan berpegangan pada konsep tentang tiga wujud kebudayaan ala Koentjaraningrat, agaknya kita masih patut mengatakan, masih ada landasan kultural untuk mengembangkan sikap dan perilaku wani ngalah. Selain yang dicontohkan oleh Ki Manteb itu, memang tak sedikit ungkapan verbalistik Jawa yang menekankan arti penting <i>wani ngalah</i>. Bukankah orang Jawa punya ungkapan "<i>wani ngalah luhur wekasane</i>" sebagaimana yang dicangkok dari <i>Wulangreh</i>? Bukankah RM Sosrokartono juga terkenal dengan ajarannya yang berbunyi "<i>menang tanpa ngasorake</i>"? Di luar itu, masih ada ungkapan semacam "<i>ngalah ora teges kalah</i>". Dari ngelmu petung, orang Jawa juga telah diajari untuk wani ngalah, baik dengan menunda suatu pekerjaan atau mencari jalan lain ketika dihadapkan pada pertung semacam <i>geblag was tali wangke</i>. Barangkali itulah bagian dari pelajaran untuk mengalah demi kemenangan yang lebih besar. Memang, ungkapan-ungkapan semacam itu masih bisa disikapi secara kritis lagi, sebagaimana diungkapkan oleh Djulianti. "Saya justru mencurigai Wulangreh diangkat oleh pendidik kolonial untuk mengembangkapi sikap <i>nrima</i> dijajah, apalagi karya itu ditulis Paku Buwono ketika sudah lengser dari takhta kerajaan." Lepas dari kecurigaan tersebut, Ki Manteb tetap berpendapat, ungkapan semacam itu layak sebagai landasan untuk membangun sikap <i>wani ngalah</i>. "Justru sekarang diperlukan kemunculan Bisma yang lebih banyak. Dan itu mesti dimulai dari diri setiap anak bangsa." Di tengah kelangkaan mencari model wani ngalah, Djulianti juga memberikan contoh Bung Hatta dan Hamengku Buwono IX sebagai figur yang wani ngalah demi kepentingan yang lebih besar. "Ketimbang memunculkan konflik yang lebih besar, Sri Sultan dengan <i>lila legawa</i> mundur dari jabatan wakil presiden kala itu. Begitu pula Bung Hatta. Konstitusi juga ada pada masa awal republik, hanya karena ada kerelaan para pembuatnya untuk saling mengalah untuk tujuan yang lebih besar." Meskipun demikian, menurut pendapat Djulianti, kita perlu banyak belajar dari Jepang dan Amerika. "Di Jepang, pejabat yang merasa tidak bisa menjalankan tugas dengan baik akan mundur dengan ksatria, bahkan melakukan harakiri. Kebesaran Amerika sesungguhnya juga dibangun di atas konflik, namun kerelaan untuk mengalahlah yang membuat mereka bisa berkompromi." Dengan demikian, sebagaimana ditegaskan oleh Djulianti, sekarang setiap pihak harus berani mengalah serta menerima kekalahan sebagai kewajiban. "Semua harus dikembalikan pada tujuan yang lebih besar, dengan meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya." Dan, sekalipun harus banyak bersabar, Ki Manteb yakin, bakal tumbuh lagi sikap wani ngalah yang telah lama luntur. "Pasti akan ada Bisma. Sabar saja, meski sabar juga ada batasnya." (Sucipto Hadi Purnomo-tt)	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

4.

Judul	'Nglali Ya Nglali, Aja Ning Banget-Banget'
Penulis	Sucipto Hadi Purnomo
Edisi	Minggu (2 Desember 2001)
"MELIK nggendhong lali", Itulah tema yang diangkat pada peringatan ulang tahun majalah kebudayaan Basis kali ini. Tentu saja pilihan tema itu bukan sekadar sebagai sebuah afirmasi pencitraan terhadap para elite politik kita yang telah menjadi "wong lali", bahkan tak jarang nglali ketika terpojok, sebagai budaya baru yang mesti diterima dalam sebuah keniscayaan. Lebih dari itu, pilihan tema itu dapat dianggap sebagai tengara bahwa di antara kita, sesungguhnya telah banyak yang <i>lali</i>, bahkan <i>nglali</i> dan tak segan-segan untuk <i>ngapusi</i>. Lali itu manusiawi, tapi nglali itu penyakit. Begitu kurang lebih ungkapan yang sering terdengar di tengah-tengah masyarakat. Penyakit, dalam ungkapan itu, tentu saja maksudnya penyakit hati yang bertalian erat dengan aspek moralitas. Ketika nglali telah menjadi aktivitas, bukan sekadar tindakan, wajar pula jika muncul pendapat bahwa nglali merupakan bagian dari pola pergaulan masyarakat kita. "Secara umum, nglali sebenarnya merupakan konsep universal. Untuk menyelamatkan diri dari rasa malu atau menjaga gengsi dan harga diri, tak jarang nglali menjadi pilihan yang dianggap lebih tepat," kata psikolog dari Unika Soegijapranata, Dra. Emmanuela Hadriami M.Psi. Meski demikian, kata dia modus nglali diresepsi dan dipraktikkan agak berbeda di Jawa. "Bagi orang Jawa, yang <i>diugemi</i> bukan komitmen. <i>Janji dilabui nganti mati</i> tidaklah begitu dijunjung tinggi. Justru yang terpenting bagaimana di hadapan orang banyak tidak menanggung malu." Pernyataan itu agaknya berbanding lurus dengan pendapat Frans Magnis Suseno dan mendiang Dick Hartoko. Menurut keduanya, budaya malu (<i>shame culture</i>) amat dominan mewarnai pola pergaulan orang Jawa yang dikerangkai oleh prinsip rukun dan hormat Pisau Bermata Dua Meski telah jamak dipraktikkan, nglali sebagai mekanisme pertahanan diri telah menjelma sebagai pisau bermata dua bagi pelakunya. Sebab, pada tataran tertentu ia cukup efektif, namun pada level lain justru tak jarang kontraproduktif. "Sekali-dua kali mungkin bisa efektif, paling tidak untuk menghindari dari masalah secara frontal. Namun ketika hal itu dilakukan secara terus-menerus, buntutnya biasanya kurang baik," kata Emmanuela. Cara-cara seperti itu, lanjut dia, sah-sah saja ditempuh sepanjang untuk menjaga harmoni. "Di luar itu, apalagi yang hanya untuk kepentingan penyelamatan diri sendiri, biasanya justru akan menjadi cela sosial. Istilah lain yang dekat juga sekali dengan nglali adalah <i>ethok-ethok</i>. Bahkan dalam bukunya, Etika Jawa, Frans Magnis-Suseno melukiskan bahwa teknik <i>ethok-ethok</i> telah menjadi seni yang tinggi pada orang Jawa. "Kebiasaan berethok-ethok berarti kita tidak memberikan informasi tentang suatu keadaan yang sebenarnya." Dengan berethok-ethok, tulis Magnis-Suseno, kedua pihak lebih bebas mengembangkan pembicaraan ke segala arah. "Sedangkan suatu fakta kalau sudah dimasukkan ke dalam pembicaraan, merupakan sesuatu yang mutlak, yang dengan sendirinya menghilangkan kemungkinan untuk menghindari posisi tertentu demi kerukunan, Kemungkinan-kemungkinan tertentu untuk bertindak menjadi lebih sulit bila fakta-fakta tertentu diketahui Pendayagunaan strategi <i>ethok-ethok</i> dan <i>ngapusi</i> juga bukan hal baru. Dalam cerita pewayangan, misalnya, hal itu dapat dengan mudah didapatkan Bahkan, sosok yang sekaliber Yudistira, yang senantiasa digambarkan sebagai tokoh paling jujur, secara tak terelakkan mesti terjebak pula pada tindakan <i>ngapusi</i>. Dalam lakon Drona Gugur, karena tak mungkin menghadapkan Pandawa dengan Drona untuk bertempur. Kresna pun mengatur siasat untuk melumpuhkan resi tua itu. Dia tahu, Drona amat menyayangi anak satu-satunya, Aswatama. Karena itu, dia menyuruh Gareng dan Petruk berteriak menyatakan Aswatama mati, sekalipun yang mati sesungguhnya seekor gajah yang bernama Hestitam. Dan, ketika Drona menghampiri Yudistira, tokoh terjujur di jagat pewayangan itu, atas rekayasa Kresna pun berkatalah ia bahwa Hestitama mati. Pada tataran "legal-formal" Yudistira tidak <i>ngapusi</i>, tetapi ketika ia mengucapkan penggalan nama "Hesti demikian pelan sedangkan penggalan Tama amat tandas, betapa lagi-lagi di telinga gurunya yang renta itu yang tertangkap adalah "Aswatama mati". Yudistira agaknya telah menjalankan strategi ingat untuk lupa. Dalam pandangan Emmanuela Hadriami, tindakan Yudistira menunjukkan bahwa setiap orang sesungguhnya tidak bisa bebas dari tidak berbohong. Justru ungkapan "<i>ungkapan ngono ya ngono</i> merelatifkan segala tindakan yang pada awalnya dianggap tercela itu. Nglali ya nglali ning aja banget-banget, ngapusi ya ngapusi ning aja terus-terusan." Nglali dan ngapusi memang bukan sikap yang paling tepat dari sisi moralitas. Namun bukankah di Jawa juga dikenal kata <i>opus krama</i> (berbohong secara halus atau berbohong demi kebaikan). Bukankah <i>apus krama</i> dapat dijadikan sebagai legitimasi secara kultural bahwa tindakan-tindakan menyimpang" memiliki kelayakberhakannya dalam hubungan bermasyarakat. Tapi ingat, <i>sabegja-begjane wong lali, isih begja wong kang eling lan waspada</i>, meski menjadi <i>eling</i> itu tidak mudah. Orang justru mudah <i>lali dan nglali, bahkan ngapusi</i>. Jika sudah banyak orang lali dan nglali, tak ada cara lain untuk mengingatkan mereka, kecuali dengan mempercepat datangnya Kalabendu. Salah satu gejala Kalabendu adalah bencana alam. Orang Jawa percaya, suatu gejala alam berfungsi untuk mengingatkan agar orang eling. Tak mengherankan, banyak yang mengatakan berbagai tanah longsor dan banjir baru-baru ini sebagai pepeling yang seharusnya membuat orang menjadi eling. Apalagi kini bebendu itu tak hanya berupa bencana alam tetapi juga bencana sosial, bencana yang terjadi akibat perbenturan antar manusia. Betapa itu merupakan pepeling yang amat keras, bahwa kita mesti selalu <i>eling lan waspada</i>, bukan malah lali, nglali, lan ngapusi. Karena itulah, meskipun tak menampik pilihan <i>ngapusi</i> dalam situasi tertentu. Emma memandang sikap jujur semestinya jauh lebih diprioritaskan. Kalau jujur itu tidak masalah, kenapa tidak? Pada awalnya malu-malu sedikit, tidak apa-apa. Justru kejujuran akan membuat kita dihormati. Bukankah kejujuran itu melegakan? (Sucipto Hadi Purnomo).	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

5.

Judul	' <i>Ngedan, Edan-edanan Pada Zaman Edan</i> '
Penulis	Gunawan Budi Susanto
Edisi	Minggu (25 Agustus 2002)
SAK beja-bejano wong waras, isih luwih beja wong edan ning kuasa, Sungguh, kalimat ini menohok benar pokok permasalahan: pengelolaan kehidupan bernegara dan berbangsa yang amburadul, edan-edanan. Saat itu penguasa, menurut isilan Kluprut, memang micel, mbudheg, membutakan mata, menulikan telinga. Dan, kalimat itu adalah salah satu tulisan dalam kaus oblong "serial zaman edan". Kaus itu buatan kawan saya, eks wartawan Detik, pasca pembredelan Detik, Editor, dan Tempo, Juni 1994. September 1995 dia mengirimkan 40 helai kaus serial itu dan meminta saya menjualkan di Semarang. Saya agak waswas karena beberapa mahasiswa penjual kaus oblong itu di Solo dan Yogya ditangkap dan ditahan. Namun, alhamdulillah, kaus habis terjual dan saya selamat. Kalimat di kaus oblong itu jelas pelesetan dari secuplik karya Ranggawarsita (III) dalam Kalatidha. Kuplet yang lengkap: Amenangi zaman edan/ Euh aya ing pambudi/melu edan ora tahan/Yen tan melu anglakon/ Boya keduman melik/Kaliren wekasanipun/Ndilalah kersa Allah/Beja-bejaning kalng lali/Ouwih beja kang eling lawan waspada (Zaman edan telah datang/Akal budi telah hilang/Ikut edan tidak tahan/Jika tidak ikut edan/Tidak bakal sebagian/Akhirnya kelaparan/Namun karena kuasa Tuhan/Emujur-mujur orang yang lupa/Masih lebih mujur orang yang sadar dan waspada). Kaus oblong "serial zaman edan" jelas telah menjadi salah satu media perlawanan politik terhadap penguasa otoriter pada masa itu. Zaman Edan Kini, muncul berita kontroversial: Menteri Agama Said Aqil Husin Al-Munawar menunggu penggalan situs purbakala Prasasti Batutulis untuk mencari harta karun. Konon, harta itu cukup untuk melunasi utang negara kita. "Edan" desis Kluprut, seraya membanting koran. Siapa edan? Menteri Agama? "Saya tak bilang Menteri agama kita edan karena itu penghinaan. Saya prihatin: betapa mencemaskan kehidupan bernegara kita. Petinggi setingkat menteri pun memboyakkan undang-undang, dan mengobok-obok situs bersejarah atas dasar klenik. Itu terjadi justru saat ini, saat mereka bilang menjalankan amanat reformasi" ujar dia. Ya, ya, tentu saja mencemaskan mempertaruhkan nasib dua ratus juta jiwa manusia di negeri ini jika semata-mata bertumpu pada irasionalitas. Jika perahu "Indonesia" dinakhodai wong edan ning kuasa – sebagaimana dipersepsikan kawan saya dalam kaus "serial zaman edan"—tentu mengundang kecemasan teramat-amat-sangat. Inikah zaman edan yang digambarkan sang pujangga Ranggawarsita? Zaman ketika segala nilai kemanusiaan terjungkirbalikkan? Dan, Indonesia, rumah sakit jiwa raksasakah negeri pusaka, tanah air beta, ini: Bukankah pada masa "Orde baru", yang nyaris belum berubah sampai kini, negara telah kehilangan wibawa, penguasa kehilangan etika, masyarakat kehilangan pranata, dan alam terus melahirkan bencana? Dalam perspektif inilah Kalatidha memperoleh bukti pembener sebagai jangka, ramalan. Celaka memang, karena ramalan jelas tak disertai langkah pemecahan konkret spasial dan kondisional. Ranggawarsita cuma bilang, beja-bejaning kang lali, isih beja wong kang eling lawan waspada. Namun seberapa lama kita mampu terus-menerus eling, sasar dan waspada, justru ketika penguasa, ganti-berganti, senantiasa tak pernah eling lawan waspada? Berapa lama kita tahan tidak ikut-ikutan edan? Ngedan: Modus Perlawanan Pada zaman edan, kekuasaan seolah-olah lebih memancarkan daya pukau luar biasa. Hampir setiap orang ingin menjadi penguasa, dengan segala cara dengan segala daya. Bukankah dengan menjadi penguasa, Anda bisa dengan enteng menyatakan lupa di mana meletakkan cek Rp 40 miliar untuk membeli beras yang bakal dibagikan kepada rakyat yang kelaparan? Bukankah dengan secarik keterangan bahwa Anda sakit bisa membebaskan diri dari jeratan hukum? Apalagi kalau Anda sakit di luar negeri. Lebih mewah bukan? Ya, orang-orang "yang tidak sabar, tidak eling,, menggunakan kekuasaan untuk korupsi" (Kevin O Browne, 2001). Ngedan, nggendheng pernah diterapkan komunitas Samin. Mereka ngedan sebagai modus perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Jika suatu saat diperintah mengangkat kayu, misalnya, mereka mengangkat kayu itu tanpa membawanya ke mana pun. Jika diminta memindah ongkongan batu. Mereka cuma memindah sebutir batu. Jika diminta menerapkan cap jempol ke sebuah surat mereka bilang sudah ada yang mesti mereka cap. Yakin, istri mereka (Paulus Widiyanto, 1983). Sifat nggendheng ngedan, menurut pendapat Suripan Sadi Hutomo (1996), adalah sifat Prabu Puntakdewa dalam jagat pewayangan. Ngedan juga metode peniadaan diri (dari tatanan manusia "Waras"). Ngedan model ini, misalnya, pernah dilakukan seseorang yang sampai akhir hidu; kehilangan hak perdata sebagai warga negara sah negeri ini. Pakde Merto, begitulah namanya., pada 1965 adalah opas sebuah instansi pemerintah di Blora. Dia dituu pengikut komunis dan dipecat tanpa uang pensiun. Dia tak diperbolehkan mengikuti pemilihan ketua RT, RW, Kepada desa dan pemilihan umum. Kartu tanda penduduk (KTP). Anak-anaknya kesulitan menjai pegawai negeri. Masyarakat ngeri bergaul dengan dia sekeluarga. Ketika dia menawarkan keahlian manjak dan mereparasi mesin jahit untuk mencari nafkah, amat sangat jarang warga berani memanfaatkan jasanya. Setiap kali ditolak, seraya terus memanggul stigma politik yang dilekatkan "Orde Baru", dia merasa dibunuh berkali-kali. Namun, celaka, dia merasa tak mati-mati. Akhirnya Pakde Merto tak tahan. Dia pun ngedan. Dengan ngedan, dia meniadakan diri. Tetapi sebenarnya peniadaan diri itu bisa dimaknai pula sebagai perkawanan, perlawanan terhadap konsep kewarasan. Karena, sebagaimana dicatat Kevin O Browne (2001), "– pribadi orang Jawa paling tepat dilihat sebagai termovitasi oleh berbagai pertimbangan, oleh tujuan-tujuan personal dan sosial, selalu dalam proses untuk mencapai keselarasan. Hidup di tengah-tengah struktur sosial dan lingkungan yang keras terhadap perjuangan hidup dalam mencapai kohernsi ini, diri pribadi melakukan improvisasi, berhadapan dengan distres-distres sosial, menjumpai nilai-nilai ideal di masyarakat dalam usaha mencari makna diri." **	

Sumber: Dokumentasi Pribadi

6.

Judul	'Bila <i>Jagad Gedhe</i> Melongsorkan Penguasa'
Penulis	Sucipto Hadi Purnomo
Edisi	Minggu (16 Maret 2003)
Alam tak hanya melegitimasi kelayakberhakan seseorang menjadi penguasa. Lewat berbagai hukumnya, juga pertanda dan sasmita, alam tak pernah kompromi untuk mengukuhkan adagium "raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah". Dalam sejarah kerajaan Jawa, terlalu banyak contohnya. Agak mengejutkan memang, simpulan Benedict R O'G Anderson bahwa dalam kategori teori politik Jawa, moralitas pemerintahan secara khusus adalah sekunder (baik secara historis maupun analitis) dibandingkan dengan aspek Kuasa (power). Dalam sebuah risalahnya, dia juga mengungkap, kenyataan bahwa Hitler memiliki teja adalah paling penting dan menjadi pijakan awal untuk meng-analisis rezim. "Seorang dapat kehilangan teja-nya dengan membiarkan dirinya terlibat dalam tindakan-tindakan jahat, tetapi teja datang lebih dulu dan tidak diperoleh semata karena tindakan-tindakan baik," jelasnya dalam bagian catatan kaki pada buku Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-budaya Polirik di Indonesia (2000). Tak pelak, simpulan itu pun menuai kritik. Tak kurang sejarawan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Prof Dr Djoko Soeryo menengarai Anderson "agak salah" mengartikan <i>power</i> dalam konteks tradisi kekuasaan Jawa. Sebenarnya <i>power</i> raja itu menyeluruh. Ia menguasai segala dimensi. Namun semua itu ditentukan oleh dirinya. Personality, itulah yang menentukan kualitas <i>power</i>. Tak hanya dengan jalan pemerintahan, tetapi juga spiritual. Karena itu, dalam tradisi Jawa, raja harus mampu mengumpulkan kekuatan magis-religius untuk membangun karismanya," jelas peraih gelar <i>philosophiae doctor</i> di bidang sejarah dari Monash University Australia itu. Meski begitu, Ben Anderson tentu tak hendak menafikan keberadaan teja. juga simbol-simbol lain yang bersumber dari jagad gedhe, dalam tradisi kekuasaan Jawa, Simak saja tulisan dia berikutnya bahwa kemilau teja secara tradisional dihubungkan dengan kemenampakan air muka seorang penguasa. Soemarsaid Moertono mengutip kasus Amangkurat III (1703-1708) dari Babad Tanah Jawi: ketika menjelang diturunkan dari takhtanya, raja "kehilangan cahya (pancaran cahaya di wajah), kelihatan pucat seperti seorang Cina yang sakit perut". Lanjut Anderson, karena hanyalah pengejawantahan eksternal dari tenaga dalam kreatif dari alam semesta, teja tidak hanya tampak pada wajah penguasa tetapi juga pada kekuatan seksualnya. Anekdote berikut mengacu pada suksesi sesudah mangkatnya Amangkurat II untuk menunjukkan bahwa Pangeran Puger yang menggusur Amangkurat III dari takhta adalah sah adanya. "Diceritakan bahwa kemaluan (mending) raja berdiri tegak dan pada pucuknya terdapat cahaya yang memancar, hanya sebesar biji merica. Tapi tak seorang pun mengamatinya. Hanya Pangeran Puger yang melihatnya. Pangeran Puger dengan sigap menghirup sejumlah cahaya itu. Saat cahaya itu sudah dihirup seketika itu kemaluan baginda pun tak tegak lagi Adalah kehendak Allah bahwa Pangeran Puger harus menggantikan kedudukan di atas takhta." Mekanisme Alam Lantas, bagaimana alam menjalankan mekanismenya untuk menyeleksi kenaikan sang penguasa atau bahkan sebaliknya, meruntuhkan penguasa itu dari singgasananya? Prof Djoko Soeryo berpostulat, dalam perspektif tradisional, proses alami telah membuktikan bahwa raja lalim akan jatuh karena ketidakadilannya. "Itu terbukti dalam sejarah berbagai kerajaan di Indonesia. Pola interaksi hubungan penguasa dengan yang dikuasai pada masyarakat tradisi memang dibangun di atas solidaritas dan kekuatan sosial yang kuat, antara patron dan klien. Tapi bila hubungan itu tidak berjalan harmonis, segalanya bisa terjadi. Reaksi untuk mendambakan hubungan harmonis serta hukum alam dan kehidupan masyarakat yang tidak menghendaki kekerasan, akan memutus relasi itu." Kalau raja tidak menciptakan kedamaian dan keadilan, kata salah satu penyusun buku Jogja: <i>History and Culture Heritage</i> (2002) itu, alam pasti akan melongsorkannya. "Modus idiom 'raja adil raja disembah, raja lalim raja disembah telah menjadi modus sosial budaya yang amat jamak dalam tradisi sejarah kekuasaan di berbagai belahan dunia," katanya. Menurut dia, banyak yang bisa dirujuk sebagai bukti akan pernyataan itu." Amangkurat I, misalnya, harus menuai buah kelalimannya. Ketika memerintah, ia terlalu keras terhadap penguasa lokal dan ulama dengan tindakannya yang kurang manusiawi, seperti merebut istri orang lain dan menghukum Pangeran Kajoran yang tidak menyetujui sikapnya yang otoriter. Dia juga menghukum selir-selinya. Kekerasan dan keke-jamannya tidak hanya menimpa para penguasa di bawahnya tetapi juga pada kalangan istana. Buahnya, pemberontakan Trunajaya meletus dengan dukungan Kajoran. Amangkurat pun harus melarikan diri dan meninggal dalam pelarian di Tegal. Akhir hidup seorang raja yang amat tragis." Meski demikian, Ben Anderson memberikan pernyataan yang terdengar paradoks. "Kita harus mengingat bahwa dalam pemikiran Jawa tidak ada efek timbal balik antara surutnya kekuasaan dan kemunculan gejala yang tidak dikehendaki ini. Perilaku antisosial timbul dari surutnya 'Kuasa' pemimpin, tapi perilaku itu sendiri tidaklah menyurutkan lebih lanjut 'Kuasa' tersebut. Ini adalah gejala, bukan penyebab, kemunduran tersebut. Dengan demikian, seorang penguasa yang pernah membiarkan munculnya kekacauan sosial dan alamiah, tampaknya sulit untuk kembali kewibawaannya Orang Jawa cenderung untuk percaya bahwa kalaulah ia masih memiliki Kuasa maka kekacauan tersebut tak akan timbul. Kekacauan itu tidaklah berpangkal pada kondisi sosial atau ekonomi secara otonom, tetapi dari surutnya atau tercerai-berainya Kuasa' di dalam negara." Prof Djoko Soeryo dengan tandas mengatakan, karisma dan kewibawaan yang menjadi ikatan hubungan, dan Solidaritas dalam sebuah negara amatlah ditentukan oleh kapabilitas penguasa "Kapasitas itu diwujudkan dalam tindakannya terhadap kawula sebagai cermin substansi kekuatan diri. Kalau ternyata tindakannya amoral, akan musnahlah sakti-nya. Alam akan memberikan sasmita sebagai bagian dari hubungan jagad gedhe dan jagad cilik. Alam akan memberikan angin ribut, tumbangnya pohon besar, banjir, dan gerhana. Adapun secara sosial, pergolakan dan pemberontakan berlangsung serasa tak berkesudahan. Jika sudah begitu, tinggal menunggu waktu bagi keambrokannya. Pada sejarah Majapahit, Mataram, dan berbagai kerajaan lain, begitulah yang telah terjadi (Sucipto Hadi Purnomo-72).	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

7.

Judul	'Sowan Asuh Muka Soroh Bandha'
Penulis	Sucipto Hadi Purnomo
Edisi	Minggu (2 Mei 2004)
Kata sowan kembali naik daun di panggung politik. Tak hanya kukuh di wilayah center culture tapi juga eksis dan mendapat ajang beraktualisasi di ranah counter culture yang sekaligus sebagai area counter politics. Sowan pun lantas bisa merangkai dua ranah yang acap berhadapan secara diametral itu, keraton dan pesantren, guna bersemuka. Namun benarkah sowan sebagai strategi melobi masih efektif?. Bilamana ia demikian fungsional, mengalami defungsionalisasi, bahkan menjadi benih untuk menyemaikan budaya korupsi? Di dalam istilah sowan sesungguhnya terjinjing dua makna yang tak persis sama. Pertama, sowan yang dapat dipadankan dengan kata seba atau sewaka dalam bahasa Jawa, yang kemudian menurunkan bentukan pisowanan, paseban, dan pasewakan. Kedua, sowan sebagai salah satu representasi unggah-ungguh seseorang terhadap orang yang lebih tua atau dituakan, dekat dengan istilah ngabekti. Dalam medan makna yang pertama, sowan merupakan tengara ketundukan satu pihak sebagai subordinat terhadap penguasa. "Contohnya pada era Mataram ketika wilayahnya terbagi atas empat area pokok, yakni Kuthagara, Negarigung, Mancanegara, dan Pasisir. Para pejabat di Kuthagara adalah orang-orang yang memiliki apanage atau bengkok di wilayah Negarigung. Mereka harus selalu sowan pada hari-hari tertentu, sedangkan para bupati di Mancanegara hanya sowan saat Garebek Mulud, Pasa, ataupun saat raja punya hajat. Adapun raja-raja kecil hanya sowan pada acara-acara besar," terang Drs Wasino M.Hum, sejarawan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes). Meskipun frekuensi dan intensitas sowan berbeda antara narapraja satu dan nayakapraja lain, sowan tetap menjadi tengara utama akan ketundukan dan kesetiaan di bawah kuasa raja. "Jika ada bupati atau raja kecil tidak sowan, akan dikirimkan utusan atau telik sandi. Merekalah yang mencari sisik melik, mengapa penguasa lokal tak mau sowan. Jika ia tetap mbadal, akan dianggap melawan dan tak ada cara lain kecuali digempur," kata kandidat doktor sejarah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu. Dia pun lantas mencontohkan kasus pembangkangan Mangir. Semula, karena cikal bakal Kademangan Mangir berjasa besar dalam pendirian Mataram, wilayah itu dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Namun pergantian kekuasaan telah mengakibatkan kebijakan itu berubah. "Merasa diperlakukan tidak adil. Ki Ageng Mangir pun mangkir dari kewajibannya sowan sehingga ia dianggap mbalela." Sebagaimana pula disebutkan dalam berbagai cerita tutur, sowan juga menjadi salah satu siasat penguasa Mataram, Panembahan Senapati, terhadap Ki Ageng Mangir. Lewat jeratan putrinya, Pembayun, Panembahan menggunakan tipu muslihat dengan menghantamkan kepala menantunya itu pada sebuah batu gilas saat sang pembangkang itu sowan dan menyampaikan bektinya. Senada dengan Wasino, Prof Dr Suhartono W Pronoto menandakan, dalam relasi politik, siapa pun yang sowan selalu berada pada posisi yang lebih rendah daripada yang disowani. "Lewat sowan sesungguhnya tak hanya tanda tunduk yang tertunjukkan, tetapi juga aliansi antar kekuatan bisa dibangun," kata sejarawan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu. Penulis buku Serpihan Budaya Feodal (2001) itu juga mengatakan, di samping sowan ada pula silaturahmi. "Jika sowan lebih bersifat hierarkis, maka silaturahmi justru membangun relasi yang setingkat atau agak setingkat," katanya. Meski demikian, lanjut penulis buku Apanage dan Bekel (1991) itu, keberadaan sowan tak pernah tergeserkan ataupun terhapuskan oleh praktik silaturahmi. "Aktivitas sowan tetap terpelihara sejak masa Hindu sampai masa Islam. Bahkan tradisi di pesantren menunjukkan pengakuan atas fungsionalitas sowan sebagai bentuk penghormatan atas dasar senioritas," katanya. Sowan memang selalu mendapat tempat dari masa ke masa. Sekalipun demikian, menurut Wasino, ia pernah mengalami pelemahan fungsi, terutama pada masa kolonial. Sowan menjadi sarana yang tidak begitu efektif lagi untuk mengonsolidasikan kekuasaan, sebagaimana tercermin dalam kasus di Kasunanan dan Mangkunegaran. "Pada awalnya sowan menjadi kewajiban yang berfungsi efektif, namun pada era Mangkunegara VI dan Mangkunegara VII, sudah sarat muatan politis. Kalau hendak ke Kasunanan, Mangkunegara selalu ngampiri Residen, sehingga kian tampaklah bahwa dia hanya menjadi subordinat kolonial Belanda," kata Wasino. Wacana sowan memang tak bisa dilepaskan dari target-target tersembunyi di balik tindakan itu. Jika seseorang mempunyai maksud, tentu dia akan mewujudkan maksudnya itu. Dan, sowan merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan maksud, termasuk yang berkaitan dengan motif meraih kekuasaan. "Hati siapa yang takkan luruh jika didatangi, disowani, dan diposisikan di atas," kata Suhartono. Beranalog dari situ, kecenderungan para elite politik untuk sowan ke pesantren yang notabene secara historis merupakan counter culture sekaligus counter politics para raja pedalaman, agaknya tak begitu jauh dari modus semacam itu. Bukankah pesantren dengan kiai sebagai pucuk pimpinan juga telah menjadi "kerajaan lain" yang tak bisa dianggap enteng pengaruhnya, lebih-lebih secara spiritual. Bisa dibayangkan sinergi yang bakal terbangun jika dua kekuatan itu dipersatukan. Apalagi dalam tradisi pesantren, ngabekti murid terhadap guru merupakan satu hal yang tak bisa ditawar-tawar. Para santri mesti menegakkan prinsip <i>sami' na wa atho na</i> (mendengar dan mengikuti). Lantas, seberapa efektif sowan sebagai sebuah upaya politik? "Paling tidak bergantung pada dua hal. Pertama, profil yang disowan. Yang rasional, sekalipun disowani berkali-kali, tetap bergeming. Kedua, kepandaian yang nyowani. Namun sowan sambil membawa sesuatu sampai sekarang masih dipandang efektif, termasuk ketika seseorang hendak meraih kenaikan pangkat struktural," kata Wasino. Modus macam itu memang sangat rentan menjadikan sowan hanya sebagai kedok untuk asung muka sekaligus soroh bardha, hingga menjadi ajang untuk menyemaikan benih-benih korupsi. Sungguh tak berlebihan pula jika Hotman Siahaan pernah mengatakan, sowan dan membagi-bagi sesuatu merupakan salah satu perilaku yang turut menyuburkan tumbuhnya budaya korupsi di negeri ini.**	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

8.

Judul	'Dalam Pusaran Takhta untuk <i>Brayat</i> '
Penulis	Gunawan Budi Susanto
Edisi	Minggu (30 Mei 2004)
Baru kali ini kita bakal memilih secara langsung presiden dan wakil presiden. Merekalah yang bakal memimpin di puncak kekuasaan eksekutif. Dan, baru kali ini pula setiap kandidat presiden kesulitan mencari pasangan yang mau dan (dianggap) mampu menjadi wakil presiden. Itulah orang kedua dalam sistem presidensial di negeri ini. Banyak orang mau menjadi wakil presiden, baik cakap maupun tidak, baik mempunyai basis pendukung yang ril maupun tidak. Barangkali hampir sama banyak pula yang mau menjadi presiden, orang pertama. Ada yang ngotot mencalonkan diri, entah kelak terpilih atau tidak. Ada pula yang cukup sadar diri, sehingga melepaskan peluang (sekecil apa pun) sebagai calon presiden dan memilih menjadi calon wakil presiden (boleh jadi, dengan asumsi berpeluang lebih besar terpilih). Namun ada yang mula-mula hendak memajukan diri sebagai calon presiden (apa pun motifnya), kemudian mengurungkan niat. Dua di antara mereka adalah Nurcholish Madjid dan Sultan Hamengku Buwono X. Menyebut nama Hamengku Buwono, ingatan pun terpatir pada mendiang Sultan Hamengku Buwono IX. Itulah Raja Keraton Yogyakarta Hadiningrat, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan (kemudian sekaligus) wakil presiden pada masa pemerintahan Soeharto. Ada ungkapan yang nancap benar dalam benak, nancap benar dalam ingatan, setiap kali membaca atau mendengar nama mendiang Sultan Hamengku Buwono IX terucap. Takhta untuk rakyat! Ya, menjadi raja adalah amanat untuk menghidup-hidupi rakyat: mengayomi dan menyejahterakan. Tak bakal ada raja tanpa rakyat? Bukan sebaliknya. Maka sungguh mengherankan bahwa sang raja bersedia "merendahkan" harkat dan derajat kesangrajaannya dengan menerima permintaan Soeharto menjadi wakil presiden. Sang raja menjadi patih? Ya, itulah yang terjadi. Bukankah raja yang dihormati dan dicintai rakyatnya itu "napak tilas" langkah Harya Suman, yang kelak disebut Patih Sengkuni? Sebelum dan selama menjadi patih di Kerajaan Astina, Sengkuni raja di negerinya. Memang raja di negeri kecil. Dan, agaknya, karena itulah dia lebih menikmati menjadi patih di kerajaan yang jauh lebih besar dan kuat. Sebagai patih, dia menggenggam "kekuasaan riil" yang jauh lebih berdaya ketimbang seba-gai raja di negeri sendiri. Pamor atau ketenaran pun dia peroleh justru dalam kedudukan sebagai orang kedua. Sebaliknya, dari sisi pandang lain, bukankah kesediaan Harya Suman dan Sultan Hamengku Buwono IX menjadi orang kedua di Astina dan Indonesia "mengangkat" pamor Prabu Suyudana dan Soeharto menjadi lebih mengilat? Bukankah dengan demikian Suyudana dan Jenderal Besar Soeharto bisa menasbihkan diri sebagai raja diraja? Menguji Kebesaran Dalam perspektif itu, "kebesaran" sang raja atau presiden memang memperoleh pembenaran. Dalam kasus Soeharto, kesediaan Sultan Hamengku Buwono IX amat mencengangkan. Kita boleh saja yakin bahwa Raja Keraton Yogya itu bersedia menjadi wakil presiden karena prasangka baik bakal bisa mengemban amanat "takhta untuk rakyat" - bukan cuma rakyat Yogya, melainkan Nusantara. Karena itulah demi kemaslahatan lebih banyak orang, dan bukan terdorong motif menikmati "kekuasaan riil" sebagai penguasa negara Indonesia (yang jauh lebih besar ketimbang "secuplik daerah istimewa" Yogyakarta Hadiningrat), dia "merendahkan diri" sebagai orang kedua. Sungguh, kita boleh percaya, inilah motif yang sangat berbeda dari niat dan tekad Harya Suman. Barangkali amat-sangat tidak adil menjajarkan Sultan Hamengku Buwono IX sederet dengan Sengkuni dan Sumantri. Apalagi ketika kita tahu, Sultan Hamengku Buwono IX (dengan alasan yang sesungguhnya benar cuma dia yang tahu) tak bersedia untuk kali kedua mendampingi Soeharto sebagai wakil presiden. Mana ada orang di negeri ini emoh menduduki kursi nan empuk di pusat kekuasaan itu? Ada, dan bukan cuma Hamengku Buwono IX. Itulah Hatta, Dr Mohammad Hatta. Dia punya alasan sangat kuat meninggalkan pemerintahan. Marvin Rose (1991: 312) menyatakan, "Jika Soekarno memutuskan untuk menghancurkan demokrasi, ia yakin bahwa ia tidak memiliki jalan selain mengundurkan diri dari jabatannya. Sebagai warga negara biasa, ia bisa menyuarakan ketidaksetujuannya. dengan menjelaskan betapa kedaulatan rakyat terancam dan mengajukan saran-saran untuk mencegah kehancurannya." Dalam surat pengunduran diri yang dia simpan, Hatta menuliskan, "Setelah ikut serta dalam menjalankan tugas membangun bangsa dan masyarakat dari atas selama sebelas tahun, saya ingin menyumbangkan kekuatan saya dari bawah sebagai orang biasa, yang bebas dari kedudukan apapun" (Marvin Rose, 1991:312). Begitulah, sejak paro kedua 1950-an dwitunggal Soekarno-Hatta pun buyar, menjadi dwitunggal. Menguji Kebenaran "Power tends to corrupt and absolute power tends absolutely corrupt," ujar Lord Acton. Kecenderungan itu lah yang antara lain diperlihatkan Patih Sengkuni. Kelicikan dan keculasan sang patih menemu "lahan subur" karena "kemudahan" sang raja. Tak ayal, peran dominan sang patih pun amat mewarnai berbagai kebijakan sang raja. Apalagi kebijakan yang erat berkaitan dengan kemungkinan penterahan kekuasaan kepada Pandawa. Patih Sengkuni pun menjadi sosok rujukan atau contoh keberkuasaan patih. Dalam perspektif ini, tentu dengan konteks dan warna berbeda, bisalah kita sebut sosok rujukan lain seperti Patih Batikmadrim, atau Batara Narada. Uji kebenaran atas keberkuasaan mereka tentu bermain pada dataran simbolis, yang erat berkaitan dengan nilai-nilai moral. Itu berbeda dari uji kebenaran atas keberkuasaan orang kedua di ranah "dunia nyata", semisal sosok Mahapatih Gajahmada, Mohammad Hatta, atau Hamengku Buwono IX. Sejarahlah yang bakal membuktikan apa motif mereka bersedia atau tidak menjadi orang kedua, menjadi patih atau wakil presiden. Menjembantani kekuasaan, mengusung kepentingan pribadi? Itulah pula seyogianya menjadi pertanyaan bagi para calon sang apatih di negeri ini pada diri sendiri. Takhta untuk rakyat atau untuk <i>brayat</i>?	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

9.

Judul	'Kehilangan Mimpi Ketiadaan Harapan'
Penulis	Gunawan Budi Susanto
Edisi	Minggu (13 Juni 2004)
Siang bolong. Panas terik mata-hari menyengat ubun-ubun. Keringat berleleran di sekujur tubuh. Semua orang kegerahan. Semua orang disergap kegelisahan. Ah, betapa menyejukkan tiupan angin sepoi-sepoi. Angin yang bakal membuncang segala kepempatan, segala kepenatan. Angin yang membuat orang menguap, lalu sejenak terlelap dalam tidur yang membuai. Dan, bermimpi? Namun angin mati. Kegelisahan meruyak. Tak seorang pun mampu memejamkan mata. Tak seorang pun bisa menjemba lagi mimpi-mimpi. Orang-orang kehilangan kemampuan untuk sejenak tidur. Orang-orang kehilangan kesempatan bermimpi. Ya, ya, apa yang terjadi jika seluruh rakyat di negeri ini tak lagi bisa tidur lelap? Bukankah semua orang menjadi tak berkesempatan lagi bermimpi? Betapa mengerikan! Kehilangan mimpi, bukankah itu pertanda ketiadaan harapan? Apalagi makna kehidupan tanpa secul harapan pun tersisa? "Ah, omong kosong. Setiap orang pasti bisa dan pernah bermimpi," sergah Fatma (31). "Bahkan dalam jaga pun orang masih bisa dan sering bermimpi. Itulah harapan, itulah penggerak kehidupan. Ah, gadis lajang itu memang percaya bahwa setiap mimpi punya makna. Setiap mimpi, terutama mimpi "buruk", bagi dia adalah isyarat alam. Karena itulah pagi hari setiap kali sehabis bermimpi pada malam hari dia pun membuka primbon, Kitab Betal Jemur Adam Makna. Padahal, sebagai pengusaha bukankah semestinya dia lebih memercayai pertimbangan rasional? "Ya, saya memang mengambil keputusan berdasar pertimbangan rasional, dengan memperhitungkan variabel antara lain mikro dan makroekonomi. Namun dalam dunia bisnis juga berlaku hal-hal yang boleh jadi irasional. Sentimen pasar atau selera pasar, misalnya. Seseorang mengonsumsi sesuatu bisa saja bukan karena kebutuhan riil, melainkan lebih karena tuntutan gaya hidup, pemenuhan citra diri. Dan, itu tak sepenuhnya rasional," ujar Fatma. Karena itulah, kata dia, "isyarat alam" berupa mimpi layak pula dijadikan panduan, acuan. Cuma dia pernah blingsatan, merasa jijik pada diri sendiri. karena bermimpi (maaf) disetubuhi sang ayah kandung. Bangun tidur, tidak seperti biasa setiap kali sehabis bermimpi, dia justru segera mandi dan pergi. Tanpa pamit. Hari itu dia "ngumpet" di rumah kawan akrab nya. Namun akhirnya dia tak mampu menahan masygul, Dia pulang, menemui sang ibu dan menceritakan mimpi memalukan itu. "Tak perlu malu, Mimpimu itu justru pertanda bakal memperoleh rezeki tak terduga," kata sang ibu. "Dan, benar beberapa hari kemudian kakak saya mengirim mobil. Kendaraan itu memang sangat saya butuhkan untuk urusan bisnis," kata Fatma. Bagi orang Jawa, menurut pendapat Husein Djayadiningrat (Swantoro, 2000), ramalan atau mimpi memang menjadi acuan untuk menjelaskan atau memberikan pembenaran atas berbagai peristiwa luar biasa. Selain, tentu saja, untuk memberikan kesan mendalam. Karena itulah, ramalan tentang suatu peristiwa yang bakal terjadi justru mengemuka segera setelah peristiwa berlangsung. Prediksi Pascakejadian "Itu prediksi pascakejadian. Dan, memang begitulah kerangka berpikir ala Jawa. Semua hasil <i>otak-atik gathuk, otak-alik mathuk</i> (upaya mencari korelasi atau mencari-cari alasan)," kata Herudjati Purwoko MA PhD. Semua terjadi lebih dahulu. Entah saudara mati, kehilangan barang atau pekerjaan, entah mendapat musibah. Kemudian, kata dia, baru orang mencari isyarat, firasat, mimpi yang dialami dan kemudian monalsirkan sesuai dengan kejadian sesungguhnya. Dan, dalam perspektif ini, peristiwa riil menjadi pembenar, justifikasi, ketepatan tafsir mimpi. Itu taraf berpikir mitis. Segala sesuatu dicarikan tautannya dengan gejala alam, isyarat alam? "Namun jangan lupa, perubahan kerap dipicu oleh mimpi-mimpi. Atau, lebih tepat lagi dipicu impian manusia," kata Herudjati. Sekadar contoh, ujar dia, Julius Verne membangun impian tentang kapal selam melalui karya sastra. Dan, Leonardo da Vinci terinspirasi untuk membuat rancangan gambar sesuatu yang kelak disebut helikopter. Kedua orang itu membangun impian di tengah jaga, jauh melampaui zaman masing-masing. Imajinasi yang terbalut kecerdasan dan kepekaan membaca "keagungan alam", membuat mereka menjadi "pemimpi sejati". Orang-orang semacam merekalah yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan peradaban. "Ada orang menafsirkan bahwa na adalah Soekarno dan ta Suharto. Megawati juga ta. Jadi sekarang masih periode ta pertama dari nata. Adapun Habibie dan Abdurrahman Wahid adalah jeda, perhentian sejenak (<i>satriya jinumput sumela atur-gbs</i>). --- orang yang suka ikut campur bicara atau ingin terlihat berwibawa tanpa landasan yang kuat. Nah, kini, orang pun menebak-nebak siapa yang bakal jadi presiden. Jika masih periode ta berarti Megawati atau Wiranto. Jika masuk periode na kedua ada Susilo Bambang Yudhoyono. Atau, mungkin, malah Siswono. Karena, bisa saja Amien Rais terpilih sebagai presiden dan kemudian terjadi sesuatu sehingga digantikan Siswono," kata Herudjati. Maka, kini, ketika nyaris sulit membangun harapan yang bersandar pada kepercayaan atas kualitas moral para "calon pemimpin" itu, prediksi pascakejadian ala Jawa pun meruyak, beranak-pinak. Boleh jadi orang-orang pun, termasuk terutama calon presiden dan wakil presiden serta para pedompleng yang bakal nunut mulya, tengah membangun mimpi, membangun harapan. Namun, sayang, mimpi-mimpi mereka sangat mungkin bertolak belakang dengan mimpi sebagian besar rakyat negeri ini. Bukankah telah sekian lama rakyat jelata memimpikan negeri yang loh jinawi, <i>tata tentrem kerta raharja</i>? Negeri yang memberikan kesejahteraan, negeri yang mengedepankan keadilan? "Itu mimpi sebenar-benar mimpi. Toh terbukti selama ini para pemimpin tak pernah menepati janji mereka? Karena itulah saya tak pernah punya mimpi untuk negeri ini. Saya nyaris tak punya harapan lagi," kata Fatma. Betapa menyesakkan kehidupan ini bila tak lagi tersisa sedikit ruang untuk membangun mimpi-mimpi, memiara harapan, bagi anak negeri. "Ya apalagi yang bisa diharapkan dari para pemimpin di negeri ini? Bukankah impian soal kemakmuran, soal keadilan, selama ini justru merupakan nightmare, mimpi buruk?" ujar Herudjati.**	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

10.

Judul	'Ratu Kuwi Anane Mung Winates'
Penulis	Sucipto Hadi Purnomo
Edisi	Minggu (3 Oktober 2004)
Boleh jadi tak ada mimpi yang lebih dahsyat pada diri orang Jawa dalam konteks politik dan kepemimpinan ketimbang mimpi akan lahirnya <i>satriya piningit</i>. Boleh jadi pula tak ada harapan yang lebih besar daripada harapan akan hadirnya ratu adil. Namun sebagaimana mimpi dan harapan yang lain, mimpi akan satriya piningit serta harapan akan ratu adil itu sesungguhnya sudah demikian lama melekat dalam imaji Jawa. Bukan sesuatu yang sama sekali tak berbentuk dan verbal belaka, melainkan telah menjadi ingatan kolektif yang nyaris sebangun formulanya di setiap kepala. Karena itu, jangan sekali-kali menyepelekan soal neptu dan imam supingi yang dalam pewayangan mendapatkan tempat pengejawantahan antara lain dalam bentuk wanda. Lewat dua hal itu, tak jarang imaji Jawa tentang sosok pemimpin harapan rakyat, yang disebut-sebut sebagai <i>satriya piningit</i> ataupun ratu adil itu lebih sering dimuarakan. Penerimaan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono, yang dipastikan bakal menjadi presiden Indonesia, agaknya tak lepas pula dari persepsi yang terbingkai dalam konsepsi macam itu. Lantas imaji Jawa macam apa yang mempertautkan antara imaji Jawa dan Yudhoyono? Dalam majalah kebudayaan Basis, karikaturis GM Sudharta membuat karikatur wuku sembilan calon presiden. Sesuai dengan isu yang berembus kala itu, muncullah karikatur Gus Dur, Megawati, Akbar Tanjung, Amien Rais, Wiranto, Surya Paloh, Sultan Hamengku Buwono IX, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jusuf Kalla. Dua nama yang disebut terakhir, berdasarkan hitungan hasil pemilihan presiden putaran II, yang akan menjadi pasangan pemimpin negeri ini. "Karikatur itu hanya ingin mengundang kita membuka dan memperluas fantasi kita tentang tokoh-tokoh masyarakat yang sudah kita kenal, yang kebetulan sedang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi capres-capres untuk pemilihan langsung...." tulis pemimpin redaksi majalah itu, Sindhunata. Betul juga, di tangan karikaturis itu, Gus Dur hadir dengan tubuh mirip Semar, Suryo Paloh berbadan sentosa bak Bimasena, dan Yudhoyono diidentikkan dengan sosok Gajah Mada (rupa yang jamak diperkenalkan dalam buku-buku sejarah di sekolah). Atas dasar pawukon, Sindhunata pun lantas <i>mencandra</i> kesembilan tokoh itu, termasuk Yudhoyono. Apa katanya tentang purnawirawan itu? Bagai pelita menyala tanpa sumbu/ itulah dia, yang bisa mencipta tanpa taul dari mana nyala, daya, dan ciptanya. Memang, ia punya pikiran yang cerdas/ namun harta itu belum bisa menerangkan mengapa tiba-tiba ia bisa membuat apa yang tak terkira oleh orang banyak. Ini bisa membuat dia bersyukur namun tak jarang justru itulah sumber yang membuatnya celaka, ia menjadi angkuh tanpa disadarinya, la mesti bergulat senantiasa/untuk menghentikan keangkuhannya/ yang sering kali tak terasa. Kalau tidak, ia akan terseret oleh keangkuhan itu/ tanpa ia tahu lagi ke mana, baru di ujung jalan ia tahu, ia terkena tipuan Batari Durga....." Dia juga menuliskan petungan untuk tokoh yang lahir di Pacitan, 9 September 1949 itu yang ketemunya Wuku Bolo dengan neptu 14 dari kelahiran Jumat (6) Kliwon (8). Apakah itu sebuah vonis terhadap seorang tokoh? "Pengetahuan watak dan peruntungan lewat pawukon tak pernah berarti vonis tentang hidup seseorang. Pengetahuan itu hanyalah membantu hidup orang tersebut. Jika jelek, kejelekan itu adalah peringatan agar orang berhati-hati dan berupaya sedapat mungkin untuk menjauhi kejelekannya. Jika baik, hendaknya kebaikan itu tidak disombongkan, tapi dijadikan sebagai pijakan untuk hidup yang lebih baik," tulis dia. Memang itu bukan "vonis" namun stilisasi terhadap diri Yudhoyono dalam rupa Gajah Mada telah menyiratkan kemungkinan yang amat lebar bagi penerimaan tokoh itu dalam lambaran sejarah dan mitos. Betapa kehadiran tokoh sekuat Gajah Madu, yang dalam berbagai cerita tutur merupakan personifikasi satriya piningit yang mampu membuat Majapahit mengalami zaman keemasan, memang sangat diperlukan dalam keadaan seperti ini. Dengan rupa yang disebut-sebut ganteng dan halus tutur katanya, Yudhoyono tak pelak lagi mampu menjawab impian tentang sosok bambang-an sebagaimana dalam pentas ketoprak atau lelanang jagad dalam pertunjukan wayang. Dengan <i>wanda</i> dan <i>solah bawa</i> yang lebih dekat dan identik dengan para ksatria Pandawa ketimbang Kurawa, apalagi tokoh <i>sabrang</i>, dia juga memiliki modal yang bersifat "primordial-emosional" untuk diterima khalayak secara luas. Apalagi bagi priayi, bentuk lahiriah yang halus sering dianggap sebagai jaminan hatin yang halus pula, sedangkan lahir yang kasar tidak jarang dianggap sebagai pertanda batin yang kasar pula. Sekalipun eksistensi tokoh semacam Semar yang notabene menabrak logika itu juga diterima, buat orang Jawa sebenarnya pada tokoh terpilih, identitas langsung antara lahir dan batin tetap saja menuntun pilihan-pilihan yang lebih bersifat emosional. Bukankah terhadap benda dan binatang berharga lain, pencandraan atas kondisi fisik selalu mengemuka. Terhadap perkutut dan keris, misalnya, hal yang pertama dan utama dijadikan sebagai rujukan akan bobotnya adalah hal-hal yang identik dengan <i>imam supingi</i> yang melahirkan pencandraan tadi. Terhadap perkutut, hitungan tentang jumlah sisik di kaki, bulu, dan bentuk-bentuk bagian tubuh yang lain di samping suara kung tentunya selalu menjadi takaran utama. Dan lagi dalam konteks adon-adon, jago (bukan babon) yang selalu lebih diunggulkan. Itu pun lagi-lagi dengan ciri-ciri yang telah melekat dan serba sama dalam imaji setiap orang yang terlibat. Maka, ketika imaji Jawa tentang wanda yang bernilai positif, tentang neptu yang lebih banyak baiknya, dan tentang jago yang agak pideksa terjawab pada diri Yudhoyono, serasa <i>suwe mijet wohing ranti</i> untuk menanggung kemenangan. Jika memang demikian, di ambang perubahan ini, harapan baru sungguh pantas ditebarkan. Tapi jika Kalatidha dijadikan rujukan, segala pemenuhan imaji Jawa pada diri seorang pemimpin tak serta merta menjadi jaminan. Bukankah di dalam serat itu sang pujangga Ranggawarsita menulis: <i>Ranine ratu utama/ patike patih linuwih pra nayaka tyas rahurja/ panekare becik-becik/prandene tan dadi paliyasing kul-abendu/ malah sangkin andadra/ rubeda kang ngreribedil beda-beda hardane wong sanagara</i>. Namun semogalah "sang narendra" yang sebentar lagi naik takhta tak abai terhadap peringatan itu dan sadar bahwa <i>kawula iku ana tanpa wates, dene ratu kuwi anane mung winales</i>. **	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

11.

Judul	'Mosok Wong Jawa Tidak Bisa Korupsi?'
Penulis	Sucipto Hadi Purnomo
Edisi	Minggu (19 Juni 2005)
Kemampuan orang Jawa kembali diragukan untuk memberikan sumbangan secara bermakna dalam upaya mereparasi negeri ini dari aneka cela. Terutama, dalam soal korupsi. Bukan hanya tak ada landasan kultural yang menopang, melainkan berbagai ungkapan kearifan etnis ini dan warisan sejarah birokrasi justru hadir sebagai pilar penyangga yang turut membakakan sekaligus membiasakan perilaku korup. Adalah Parni Hadi, wartawan senior yang mempermaklumkan diri sebagai orang Jawa sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Soeharto, dan Soekarno yang mengemukakan tudingan itu, belum lama ini di majalah Gatra. Perilaku samadya dan tepa slira serta ungkapan "wani ngalah luhur wekasane" dan "ngono ya ngono ning aja ngono", dalam praktik, justru dianggapnya sebagai lambaran untuk menoleransi sikap korup. Menurut pendapat dia, yang menonjol dari perilaku orang Jawa adalah tidak mau menonjol, samadya (tengah-tengah, secukupnya). "Tapi, dalam hal korupsi bisa lain. Orang Jawa sangat mendambakan keselarasan hidup, karena itu sikapnya sangat toleran. Tidak suka kontlik dan suka mengalah. Itu kelihatannya, tapi dalam hatinya orang Jawa tetap saja berharap akan menang pada akhirnya. Perilaku atau sikap hidup itu merupakan cerminan dari ungkapan-ungkapan falsafati orang Jawa, seperti <i>tepa slira</i> (toleran) dan <i>wani ngalah luhur wekasane</i> (berani mengalah akan luhur atau menang pada akhirnya)" Dia juga mengaku selalu berusaha memercayai bahwa ungkapan-ungkapan itu diciptakan untuk mewujudkan sesuatu yang diyakini "<i>adiluhung</i>" atau luhur, bahkan transendental. "Tapi dalam praktiknya, yang terjadi adalah kebalikannya. Bisa jadi, itu akibat pemahaman dan pemaknaan yang keliru atau karena begitu agungnya ungkapan itu sehingga tidak terjangkau oleh manusia biasa." <i>Ngono ya ngono, ning aja ngono</i> bagi dia merupakan contoh ungkapan yang membingungkan. "Fleksibel memang, tapi sekali lagi, membingungkan! Coba, kalau ungkapan falsafati itu dipakai sebagai landasan untuk memberantas korupsi, kan repot!" Sikap <i>tepa slira</i>, ujar dia, juga dengan mudah dapat dituduh sebagai tidak mendukung gerakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). "Sebab, bagaimana seseorang yang melakukan korupsi akan memberantas korupsi di lingkungannya atau bawahannya? Kalaupun ia akan memberantas korupsi, kemungkinan alasannya ada dua. Pertama, ia sudah tobat, dan kedua, ia melakukan pembenaran diri atas tindakannya yang korup, tapi ingin menindak orang lain." Parni Hadi berpendapat, korupsi punya akar dalam kebiasaan memberikan sesuatu sebagai ungkapan terima kasih atas pertolongan atau tanda kesalahan dan kekalahan. "Saya belum pernah menemukan lakon wayang kulit yang sering dianggap merepresentasikan budaya Jawa secara lengkap berkisah tentang tindakan seorang raja terhadap koruptor." Emha dalam buku Surat untuk Kanjeng Nabi bahkan sampai pada simpulan bahwa pada dasarnya watak orang Jawa dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Antara lain, orang-orang yang tak berpendidikan tinggi tetapi mempunyai nyali dan tubuh yang kekar dan sehat cenderung untuk menjadi perampok biasa. Adapun yang berpendidikan dan mempunyai jabatan yang baik dalam pemerintahan cenderung menjadi koruptor dan menipu rakyat. Sejarah Birokrasi Untuk menggenapi wacana ini, agaknya perlu pula untuk menoleh sejarah birokrasi Jawa, terutama pada struktur dan kelakuannya. Pada masa kerajaan Jawa, khususnya Mataram, birokrasi merupakan alat penguasa pusat dan daerah untuk menjalankan kekuasaan Loyalitas hanya ditunjukkan dalam simbol pengakuan kekuasaan pusat, yaitu sowan dalam arti <i>ngabekti</i> dan <i>asok glondhong pangareng-areng</i>, guru bakal <i>guru dadi miwah sakathahing peni-peni raja peni</i> (Soemarsaid Moertono, 1974). Hubungan simbiosis tersebut, menurut pendapat Soehartono W Pranoto (2001), terjadi karena ada keuntungan sosial politik. Yang dari atas mengguyur pengayoman, sedangkan dari bawah konjuk kabekten. Dalam buku Bandit-bandit Pedesaan di Jawa (1995), dia juga mencatat bahwa kriminalitas rupanya muncul dalam situasi itu untuk mempertahankan status. Di satu sisi, kriminalitas berlangsung pada tingkat atas yang mempertahankan status sosial ekonomi untuk memenuhi gaya hidup, di sisi lain berlangsung pada golongan bawah yang mendapat tekanan penguasa yang berkolusi. Ketika zaman berubah yang berimplikasi pada pergeseran tata birokrasi, pola-pola seperti itu tidak lantas habis kikir. Berbagai pencanggihan justru terjadi, hingga dalam praktik menjadi kian kompleks Bersamaan dengan itu, perilaku nganthet atau nileb barang milik "umum" atau kepunyaan "negara" makin jamak saja dilakukan oleh orang kebanyakan. Jika di sebuah kantor pemerintah ada yang ngunthet beberapa lembar kertas atau nileb satu-dua kursi lipat akan dianggap wajar. Kalaupun sang atasan ngonangi tindakan itu, paling banter akan berkomentar, "<i>Ana sing kepengin. Ya wis ben..</i>" Di sekolah, terutama di kantin, perilaku ngunthet juga lazim dipraktikkan para siswa. Mereka, bahkan pemilik warung yang biasanya pak bon, tahu siapa saja yang biasa bilang makan bakwan dua dan bayarnya juga hanya dua, sekalipun yang masuk ke perut lima buah. Ada banyak istilah berbeda antara daerah satu dan daerah lain, bahkan sekolah satu dan sekolah lain, untuk menyebut perilaku itu. Ada yang menyebutnya <i>kaspa</i>, <i>ngunthit</i>, <i>nelep</i>, dan <i>ngenthit</i> tetapi intinya sama. Karena itu, tak perlu heran jika pada tahap berikutnya, dengan ukuran dan jangkauan yang boleh jadi lebih besar, mereka akan "<i>mangan tanpa eling</i>". Apalagi jika menghadapi situasi "<i>ora ana sing dipangan</i>", sementara "<i>kabutuhan weteng ora bisa disemayani</i>." Dalam bingkai kultur semacam itu, berlebihkanh jika dikatakan, "Mosok wong Jawa tak bisa korupsi?" Ketika jalan yang ditawarkan lewat <i>celeng nggonteng</i>, <i>babi ngepet</i>, <i>amek pesugihan</i>, dan <i>ningu thuyul</i> dianggap tak populer lagi, apalagi cara "halus" untuk "<i>ngepek darbeke liyan, darbeke negara</i>" kalau bukan lewat korupsi? Tentu saja "jalan kebenaran" bukan tidak ada. Jawa punya ungkapan "<i>sapa nandur ngundhuh</i>", juga "<i>tela gantung wohing kates</i>". Namun masihkah orang Jawa punya nyali untuk menempatkan ungkapan semacam itu guna mengafirmasi demi melawan tendensi lain yang senantiasa menggoda siapa pun untuk bertindak korup? **	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

12.

Judul	'Menepis Kemelaratan dengan <i>Tan Amukti Palapa</i> '
Penulis	Sucipto Hadi Purnomo
Edisi	Minggu (3 Juli 2005)
Dalam ajaran Asthabrata ditunjukkan bahwa seorang raja, gusti, atau pemimpin haruslah kaya sekaligus penderma kepada rakyatnya yang miskin. Dengan begitu, semakin kaya seorang pemimpin, kian berkuranglah kemiskinan rakyat. Tapi kenapa penumpukan kekayaan pemimpin acap berbanding terbalik dengan kesejahteraan rakyat? Kenapa kelaparan kian meruyak justru ketika dilaporkan pertambahan pundi-pundi kekayaan para pangreh praja? Dalam suasana masyarakat feodal, orientasi pada status agaknya sangat tinggi. Pada masyarakat yang menjinjing semangat itu, meski sudah terbalut oleh modernitas dan demokratisasi sebutlah neofeodal-orientasi macam itu belumlah bergeser secara berarti. Masih saja setiap perbuatan dikaitkan dengan status sosial untuk senantiasa tampil sebagai sosok yang mukti wibawa. Dengan <i>kamukten</i> dan <i>kawibawan</i>, para priyayi dan neopriyayi itu merasa telah ikut njaga praja. Maklumlah, mereka beranggapan bahwa wajah praja yang akan dianggep oleh orang lain adalah mereka, sedangkan orang-orang pidak pedarakan, kawula alit, hanyalah bokong yang bisa dengan mudah disembunyikan. "Ke dalam", orientasi macam itu tak lepas dari tujuan agar bawahan hormat, loyal, dan kalau perlu takut. <i>Kamukten</i> tidak hanya membuat pihak lain jadi tergiur untuk merubungnya, sebagaimana "ada gula ada semut", tapi juga membuat pihak yang tersubordinasi menjadi kian bergantung. Itulah sisi lain dari strategi untuk melanggengkan kuasa. Kamukten dan kawibawan sebagai tanda kebesaran kerap kali ditampilkan lewat perilaku dan gaya hidup yang serbawah, gemerlap, serta hal-hal atributif lain. Untuk menjalankan semua itu, biaya yang harus dikeluarkan tidak lah kecil. Selebrasi itu meniscayakan pelakunya <i>sugih bandha-bandhu</i>, mas picis raja brana. Padahal, semua itu dikomunikasikan "hanya" demi kekuasaan yang besar dan prestise. Ke bawah, perilaku dan gaya hidup macam itu tidak hanya mendapatkan ajang aktualisasi. tetapi juga menjadi pintu masuk bagi jaringan kolusi. Entah karena pundhutan atau pisung-sung, konon lazim dilakukan segahan kepada para penguasa yang sedang andon lelane, tour of duty, dengan apa yang disebut pada masa Raffles sebagai pakentul dan palette. Di luar segahan yang berupa perempuan-perempuan, sudah tentu ada biaya-biaya lain yang tidak sedikit yang harus ditanggung pemimpin daerah yang dikunjungi atau aparat rendahan. Dan, lagi-lagi wong ciliklah yang harus menanggung pembiayaan itu. Sungguh celaka memang, demi peningkatan prestise dan kekuasaan itu, penguatan ekonomi sebagai penopangnya kerap kali dicapai dengan cara ilegal. Akibatnya, secara horizontal, timbullah kolusi antarbirokrat, sedangkan pada arah vertikal berlangsung pengisapan melalui korupsi, penilapan harta rakyat, dan sebangsanya. Sebagaimana dicatat oleh sejarawan dari Universitas Gadjah Mada Prof Dr Suhartono, proses enfeodalisasi makin kentara selama para penguasa tradisional bergaya patriarch dan berlaku koruptif. "Fungsi-fungsi birokrat tradisional disalahgunakan, yang dengan kata lain menyalahi angger. Akibatnya, untuk daerah setingkat desa ia bisa keluar dari pranatan bekel, pranatan gunung, pranatan desa, dan lain-lain, yang semestinya protektif terhadap wong cilik, tapi kenyataannya malah eksploitatif dan menjadi handlanger pemerin tah kolonial yang diperkuat birokrat tradisional," katanya saat pengukuhan guru besar. Singkat kata, boro-boro <i>ing ngarsa sung Tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri andayani</i>. Yang terjadi malah <i>ing ngarsa asung muku, ing madya numpuk bandha</i>, dan <i>tut wuri unggrogoti</i>. Lagi-lagi siapa yang jadi pelengkap penderita kalau bukan wong cilik. Sembah-Sepak Lantas, adakah dampak ikutan dari kondisi macam itu? Kriminalitas rupanya muncul guna mempertahankan status dan mekanisme perlawanan. Di satu pihak, kriminalitas berlangsung pada tingkat atas yang mempertahankan status sosial-ekonomi untuk memenuhi gaya hidup. Sekadar catatan, korupsi dan kolusi menjadi cara yang paling jamak untuk menggapai semua itu dengan topangan gaya sembah-sepak: ke atas menyembah, ke bawah menyepak (gaya kodok berenang). Di pihak lain, pada tingkat akar rumput, berlangsung aneka kecu, kampak, dan modus perbanditan yang lain demi mereka mendapat tekanan penguasa yang kolusif. Karena itu, menurut Suhartono, reaksi petani di pedesaan yang berupa perbanditan sosial dapat dipakai sebagai barometer ketidakseimbangan distribusi dalam berbagai hal antara priyayi dan wong cilik. Maklumlah, pembangunan masyarakat telah menciptakan kesenjangan sosial-politik. Ketika para penguasa bisa mendapatkan apa saja yang ada pada <i>salumahing bumi sakurebing langit</i>, wong cilik tetap saja <i>entuke sethithik</i> atau bahkan sudah tidak mendapatkan, diisap lagi. Penguasa dan kekuasaan yang baru memang senantiasa menerbitkan harapan baru. Tapi di balik itu, menyembul pula kekhawatiran baru. Sebab, bukannya yang lebih sering terjadi, mereka berubah jadi <i>melik nggendhong lali</i>, toh kekuasaan selalu potensial sebagai ladang subur untuk bersemainya tindakan korup. <i>L'histoire se repete</i>, kata orang Prancis Sejarah berulang dalam pola yang serupa dan dalam waktu yang berbeda. Namun karena sejarah juga akan memancarkan pada kita untuk bertindak lebih arif berdasarkan pengalaman masa lampau, tanpa mengesamping keteladanan yang pernah diberikan Umar bin Abdul Azis, Mahatma Gandhi, dan Sidaharta dalam merespons kemelaratan rakyat, ada baiknya kita menengok masa kebesaran Majapahit. Ketika dinobatkan sebagai maha patih di negeri itu, Gajah Mada mengatakan tak akan menikmati buah palapa jika ia belum bisa menyatukan Nusantara. Itulah sumpah yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Palapa. Namun (akan) adakah pemimpin yang pada awal kekuasaannya berani bersumpah, tidak akan pernah menikmati <i>kamukten</i> (<i>tan arsa amukti wibawa</i>) tak suka <i>andon lelane</i>, menolak segala pisung-sung dan segahan, apalagi berupa <i>pakentul</i> dan <i>palette</i>, jika masih terdengar kabar tentang kelaparan dan kemelaratan dari negeri yang dipimpinnya? **	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

13.

Judul	' <i>Ratu Ngopeni Kawula Demi Kuasa yang Langgeng</i> '
Penulis	Sucipto Hadi Purnomo
Edisi	Minggu (31 Juli 2005)
Merasa tak cukup dengan karisma yang terpancarkan dari dirinya, sapa aruh, ilat, ulat, dan ulah, para penguasa cenderung memilih jalan cepat untuk merebut kembali takhtanya. Cara apa pun ditempuh demi menangguk simpati yang paling sesaat sekalipun dari para kawula. Itukah aktualisasi ratu ngopeni kawula demi memetik buah kawula ngopeni ratu, atukah sebetulnya politisasi kearifan dalam bungkus yang kelewat pragmatis dan tampak tak sophisticated lagi? Pada masa lampau, ketika daulat raja adalah daulat rakyat, konsepsi gusti ngopeni kawula menemukan medan aktualisasi secara luas dan sumblim. "Ratu tidak hanya ngopeni pangane kawula, tapi juga ngopeni bojone lewat pemberian upeti, ngopeni pangandikane, dan ngopeni ajar-ajarane. Ini bertalian erat dengan klaim ratu sebagai Jawata katon, Gusti katon. Karena itu, ia mesti berusaha untuk menampakkan wajah Gusti. Dialah yang amengku jagad, idu geni, sehingga demi menegakkan keagungbinataannya, mesti ngo peni sakabehe," kata budayawan asal Jawa Timur, Dr Ayu Sutarto MA. Dalam ungkapan Drs Sutadi, Ketua Pepadi Komda Jawa Tengah, "<i>Ratu yang mabu dan mrabawa adalah yang selalu mau dan mampu aweh pangan marang kang kaluwen, aweh sandhang marang kang kawudan, aweh teken marang kang kalunyon</i>. Dengan begitu, ia tak cuma <i>mbaudhendha</i>, tapi juga <i>anyakrawati</i>." Pangopenan itu, kata Sutarto, memang merentang demikian panjang dan luas, mulai dari soal ilmu pengetahuan hingga peradaban. Dari ganjaran sampai hukuman. Semua itu tersedia dan bersumber di kerajaan. Masjid untuk panembah, penjara untuk penghukuman, dan alun-alun untuk menjatuhkan hukuman sekaligus <i>tapa pepe</i> bagi kawula adalah instrumen yang disediakan ratu demi menegakkan dirinya sebagai sesembahan dan menerima segala kesetiaan serta <i>konjuk kabekten</i>. "Kawula ataupun nayakapraja yang bersalah perlu dihukum di alun-alun agar rakyat di seluruh negeri tahu bahwa prinsip reward dan punishment benar-benar ditegakkan," kata dosen Fakultas Sastra Universitas Negeri Jember itu. Tentu segala usaha itu bukannya tanpa tendensi secara politis. Sebab, <i>ngopeni kawula</i> berarti memperkukuh kekuasaan sebagai buah dari kesetiaan bawahan dan rakyat yang tak pernah luntur. "Dan, itu artinya suplai bagi keperkasaan sesuatu yang mutlak terpenuhi untuk menegakkan keagungbinataaraan. Apalagi setiap kekuasaan selalu ingin langgeng," kata folkloris ini. Kalaupun kemasannya tampak begitu sophisticated, menurut pendapat Sutarto, itu tak lepas dari perlunya raja senantiasa menjaga martabat, apalagi eksistensinya yang selalu dipertautkan dengan hal hal yang supranatural. Sebenamalah relasi pangopenan itu tak melulu bergerak secara linear dari atas ke bawah. Ketika raja butuh topangan kekuasaan, kawula pun memerlukan perlindungan di bidang keamanan. Tatkala raja memiliki perbawa dan mukti wibawa, para bawahan dan kawula pun berharap mendapatkan tetesannya. Karena itu, ratu yang berhasil ngopeni kawula akan pula berhak memetik hasil berupa terciptanya kawula ngopeni ratu. "Kawula sadar betul bahwa dekat dengan ratu berarti dekat dengan kekuasaan, rezeki, dan peningkatan status sosial. Bukankah hingga sekarang pun banyak orang yang masih dengan bangga memasang di ruang tamu foto dirinya yang berjabat tangan dengan presiden ataupun pejabat negara lainnya," kata penulis persoalan sosiokultural ini. Maklumlah jika tendensi semacam itu lantas memunculkan sikap asung muka, mencari muka di depan penguasa. "Akan selalu ada Sengkuni. Pasti itu." Kondisi itu akan kian marak ketika pola-pola namur laku tak lagi dipraktikkan oleh para penguasa. "Dulu untuk mengetahui keadaan kawulanya, raja meninggalkan singgasana, namur laku, menyamar sebagai papa sudra, njajah desa milang kort, andon lelana. Dengan menjadi kawula, berarti ia juga merasakan denyut nadi kehidupan kawula," kata Sutadi yang mantan Ketua Badan Pengawas Daerah Provinsi Jawa Tengah itu. Namun pola semacam itu, bersamaan dengan perubahan tata praja, mengalami pergeseran malah sudah hilang sama sekali "Kini tak ada ratu namur laku. Justru kehadiran mereka di tengah-tengah kawula senantiasa disubya-subya, diupacarakan dengan segenap keagungan penyambutan," katanya. Memang, ngopeni kawula demi menangguk simpati rakyat bisa dianggap sebagai hal yang niscaya untuk meraih dan mengekalkan kuasa. Namun siasatnya saja yang tak selalu tampil tunggal nada. "Kini siasat untuk memperoleh suara kawula dianggap tidak cukup lagi dengan sapa aruh. Bukan lagi dengan karisma, melainkan dengan uang. Memang ekspresinya bisa bermacam-macam, namun ketika uang telah menjelma sebagai tuhan masa kini, uang pula yang tampil sebagai primadona untuk merebut simpati kawula. Dianggapnya uang sebagai satu-satunya peranti untuk ngopeni kawula," kata Ayu Sutarto. Namun sebagaimana hukum sebab-akibat, jika kawula sudah merasa <i>dimuk tekake</i>, pastilah kawula juga akan <i>ngopeni ratu</i> dengan <i>njaga kawibawane</i>. Lantas, apa yang akan terjadi jika hubungan itu terganggu? "Konflik vertikal akan berlangsung yang berbuntut pada konflik horizontal. Jika bertambah rusak, semua akan sama-sama kehilangan. Ratu <i>kelangan kawibawane</i>, kawula <i>koncatan katentreman dan kamukten</i>," kata Sutarto. Kendati para kawula kini mudah mengalami "amnesia massal" terhadap ratunya jika sudah berhadapan dengan uang, mengusahakan kesejahteraan untuk kepentingan bersama dan menciptakan wong cilik bisa gumuyu tetap saja menjadi cara yang paling bermartabat untuk ngopeni kawula. Dalam ungkapan lain, ratu semestinya "<i>sumanggem angregem, tumandang tan mawang pepalang, amung marih padhang, kanthi amemayu hayuning bawana</i>". "Karena itu, beban raja kecil sesungguhnya jauh lebih berat daripada raja gung binathara yang nyaris tak tersentuh itu," tandas Sutarto. Akan tetapi, itu tidak lantas menafikan kenyataan bahwa yang dibutuhkan adalah kehadiran ratu yang <i>kumawula</i>, bukan malah kawula kumratu-ratu. Sebab jika yang disebut kedua yang terjadi, aneka pembangkangan dan nafsu untuk mranata-lah yang bakal menumpuk. **	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

14.

Judul	‘Mengeja Makna di Balik Sabda Brahmana Raja’
Penulis	Sucipto Hadi Purnomo
Edisi	Minggu (29 April 2007)
Wiyosan dalem ke-61 Sultan Hamengkubuwono no X, Sabtu Wage, 7 April lalu, menjadi momentum yang menyentak bagi para kawula Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Saat itulah Ngarsa Dalem menyatakan keinginan untuk tak bersedia lagi menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta setelah masa jabatannya berakhir pada 2008. Serta merta, oleh para kawula dasih, pernyataan itu kemudian ditempatkan dalam bingkai "setidak-tidaknya diasosiasikan dengan sabda brahmana raja yang memiliki sifat tan kena wola-wali, pindhwa we kresna kang tumetes ing dlancang sera (tak bisa berubah, laksana tinta yang menetes pada kertas putih). Namun, uger-uger itu tak lantas membuat semua orang yakin bahwa Sri Sultan benar-benar akan lereh dari dhampar gubernuran, berhenti dari kekuasaan konkret secara politis. Ada-ada saja pikiran nakal yang mengemuka, jangan-jangan itu cuma test case sang Raja untuk meretas jalan lain sekaligus menakar seberapa besar dukungan kawulanya. Maklumlah, nyaris sudah menjadi kelaziman para pemimpin di negeri ini untuk "dinamis" atas pernyataannya sendiri untuk tak menyebut esuk tempe sore dhele, sore dhele esuk tahu. Apa yang baru saja dikatakan, dengan enteng dibantahnya sendiri. Karena itu, wajar saja bila kemudian para kawula Ngayogyakarta minta digelar pisowanan ageng untuk mendengarkan sendiri sabda Sultan atas pernyataannya sebelumnya. Bukan Pertama Tentu masih segar dalam ingatan kita, bagaimana pada beberapa waktu lampau ribuan orang dari berbagai pelosok Yogyakarta berkumpul. Di pusat pemerintahan daerah istimewa itu, mereka mendesakkan penetapan langsung bukan pemilihan lewat DPRD-Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakilnya. Namun tak urung langkah itu pun mengundang prasangka lain. Ada yang tetap menganggap seakan-akan keraton-lah yang merekayasa. Terhadap rencana pasewakan itu, menarik kiranya memerhatikan pendapat Prof Dr Damardjati Supadjar, pakar filsafat Timur. Menurutny, para kawula itu bukan menghadap Sultan, melainkan rakyat bersama Sultan menghadap pada Yang Maha Kuasa untuk meminta keadilan. Sebab, kalau alif sudah tampak pada tugu (di ujung Jalan Malioboro), yang terjadi justru apa yang disebutnya soca bathara, mata ilahiah. Ini juga paralel dengan pernyataan Sri Sultan bahwa pengabdian itu adalah untuk memberi, bukan menerima. Benar, pisowanan ageng itu digelar Rabu (18/4) siang. Puluhan ribu warga dari Kabupaten Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta hadir di Pagelaran Keraton Kasultanan. Di acara yang juga dihadiri unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) DIY, bupati, wali kota, sentana, dan abdi dalem keraton itu, para kawula meminta Sri Sultan mempertimbangkan kembali pernyataannya. Para lurah dan kepala desa menyatakan masyarakat Yogyakarta masih ingin mempunyai gubernur seorang sultan. Kecintaan rakyat Yogyakarta atas sultannya, tidak mengering. Kurang lebih demikian yang disampaikan. Namun Sultan tetap bergeming. Malahan Ngarsa Dalem meminta warga Yogyakarta ikhlas jika dia tidak jadi gubernur lagi. "Dari Yogya, kita bangun Indonesia baru dengan peradaban baru, dan untuk itu dengan ikhlas, serta jujur saya ingin mengabdikan," katanya. Ingat Soeharto Namun agaknya Sri Sultan tidak lupa terhadap pernyataan ataupun kebulatan tekad macam itu. Mungkin Ngarsa Dalem masih ingat bagaimana beberapa saat sebelum keterjungkalan Jenderal Besar Soeharto dari tampuk kekuasaan, Pak Harto meminta kepada salah seorang kepercayaan untuk mendapatkan konfirmasi dari "rakyat" bahwa rakyat memang mendukungnya jadi presiden untuk kali kesekian. Orang yang sangat sangat dipercaya itu, pada hari lain, datang dan mengatakan kepada Pak Harto bahwa rakyat masih mendukung dengan sepenuh hati agar Bapak pembangunan itu kembali menduduki takhta kepresidenan. Lengkap dengan data yang dianggap akurat. Namun apa yang terjadi kemudian? Tak berselang lama, Soeharto harus lengser keprabon atas desakan "rakyatnya" sendiri. Tentu Sri Sultan tak ingin mengalami nasib sebagaimana ketragsisan Bapak Pembangunan itu. Karena itu, ketika dukungan tersebut dianggap masih demikian utuh dan kukuh, justru Ngarsa Dalem melihatnya lain. Itulah peringatan kepada banyak orang untuk tidak <i>ngemut legine gula</i>, apalagi jika sampai <i>melik nggendhong lali</i>. Tentu saja terhadap pendapat semacam itu, orang bisa mengatakannya sebagai spirit feodal yang masih demikian kental. Masuk juga dalam golongan ini mereka yang menganggap demokrasi bukan segala-galanya. Demokrasi bukan jaminan. Bukan demokrasi pun kalau ditangani oleh orang yang jelas kredibilitasnya, keadaan pasti akan menjadi lebih baik. Dan. Sultan dianggap tahu betul soal itu. Memang sulit dimungkiri bahwa selama ini, Sultan telah mampu menunjukkan diri sebagai sosok yang <i>berbudi bawa leksana, ambeg adil paramarta</i>. Namun di tengah pergulatan Yogyakarta masa kini yang menjadi titik temu antara tradisi Mataram dan Republik, menguarlah bias-bias paradoks, yakni tampilnya penguasa kerajaan yang bersifat absolut, tetapi memberikan ruang bagi demokratisasi. Meski dapat ditangkap poral pural kekecewaan di balik sabda brahmana raja, tetap saja dapat dilihat keinginan besar untuk tetap menjaga keagungan yang telah diwariskan oleh leluhur. "Saya sadar sebagai sultan tidak boleh melepas fondasi yang sudah dibangun leluhur saya, dan saya harus ikhlas mengabdikan kepada rakyat dan bangsa," titah Sultan di hadapan para kawula pada pisowanan ageng itu. Namun tak kalah menarik adalah pernyataan Ngarsa Dalem pada kesempatan itu bahwa "pemimpin itu hanya satu, bukan dua!".**	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

15.

Judul	‘Menang Sejati <i>Tan Ngasorake</i> ’
Penulis	Sucipto Hadi Purnomo
Edisi	Minggu (12 Juli 2009)
Menang sejati, sejatining menang. Itulah yang semestinya digandrungi oleh setiap petarung sejati. Dalam ungkapan RM Sosrokartono yang amat populer itu, <i>menang tanpa ngasorake</i>, menang tanpa mengalahkan, begitulah yang dianggap sebagai kemenangan yang paling sublime. Paradoks kesannya, jika tidak malah bisa dianggap musykil realitanya. Sebab, bagaimana mungkin seseorang bisa menang kalau tidak mengalahkan. Bukankah jika yang berada di satu ujung menang, yang berada di ujung lain pastilah yang kalah. Bila yang satunya memenangi, pastilah yang satunya, terkalahkan. Namun begitulah salah satu dari khazanah ungkapan Jawa yang kaya akan paradoks itu. Bukankah dalam ungkapan yang tergolong isbat, kita juga akan menemu ungkapan semacam "<i>goleka tapake kuntul nglayang</i>" (carilah bekas telapak bangau melayang) atau "<i>goleka galihe kangkung</i>" (carilah galih kangkung). Memang <i>menang tan ngasorake</i> bukanlah sebuah ungkapan yang "berdiri sendiri". Ia lazim dirangkaikan dengan ungkapan seperti "<i>nglurug tanpa bala</i>" (menyerbu tanpa pasukan), <i>sekti tanpa aji</i>" (sakti tanpa ajian), atau bahkan "<i>dhuwur tan ngungkuli</i> (tinggi tak melampau) dan "<i>kebat tan nglancangi</i>" (cepat tidak menyalap). Ada pula "<i>punjul ing apapak</i>" dan "<i>mrojol ing akerep</i>". Semua itu sering dianggap sebagai pertanda jalma limpad seprapat tamat, yakni <i>manusia pinunjul</i> atau <i>janma kinacek</i>. Lagi-lagi, deretan ungkapan itu penuh dengan aroma paradoksal. Namun justru di sana sebenarnya bersemayam spirit yang paling khas dalam pola pergaulan Jawa yang ditentukan oleh dua prinsip utama: <i>rukun</i> dan <i>kurmat</i>. Di mana letaknya? Sebagaimana sering disebut dalam etika Jawa, orang Jawa sebisa mungkin menghindari konflik fisik (termasuk adu mulut) secara terbuka, apalagi bersemuka, dengan orang lain. Kalaupun pandangan dengan orang lain berbeda, biasanya diungkapkan dengan cara yang halus, entah lewat <i>pasemon</i> yang lain. Sebab, sebagaimana termaktub dalam Wedhatama, <i>janma ingkang wus waspadeng semu, sinamun ing samudana, sesadon ingadu manis</i>. Pilihan moda ungkap semacam itu sama sekali bukan karena rasa takut. Bukan, melainkan sebagai pengejawantahan sikap yang mengutamakan kerukunan. Boleh saja pendapat atau sikap itu berbeda dari yang lain, atau boleh saja ada anggapan bahwa pendapat orang lain itu salah atau lemah, tetapi semua itu tidak perlu ditunjukkan secara <i>thokleh</i> sehingga membuat orang lain terpermalukan. Moda ungkap semacam itu bukannya tanpa prasyarat. Kemampuan untuk mengendalikan diri, kesanggupan untuk <i>meperhardaning nepsu</i> menaklukkan merupakan prasyarat utamanya. Tanpa itu, justru yang terekspresikan adalah hasrat untuk meraih keunggulan dengan jalan mengalahkan, tak peduli itu akan meng-asor-kan Dengan demikian, <i>menang tanpa ngasorake</i> sebagai sebuah imperatif halus untuk senantiasa rendah hati (bukan rendah diri!) dan tidak congkak. Dengan begitu pula, tidak akan terjebak pada sikap <i>adigang, adigung, adiguna, sapa sira, sapa ingsun</i>. Yakni tidak menyombongkan kekuatan, kekuasaan-kekayaan, maupun kepintaran dengan memandang sebelah mata mitra tarung. Nglenggana Kalah Sungguh tak mudah untuk menjalankan tata kelola atas kemenangan, apalagi kekalahan. Lebih-lebih jika harus menjadi pemenang sejati yang tidak lupa diri atau menjadi petarung yang bisa <i>nglenggana</i> atas kekalahannya dengan penuh kelapangan dada. Sebagaimana semua pertarungan, selalu ada yang keluar sebagai pemenang. Ada pula yang belum menang jika boleh disebut kalah. Siapa pun yang menang pasti senang, sebaliknya yang terkecundangi akan sebaliknya. Sekalipun demikian, ukuran atas kemenangan bagi setiap orang tidaklah selalu sama. Itu lantaran setiap orang memiliki persepsi yang tak sama terhadap kemenangan. Itu lantaran setiap orang bisa jadi pula berbeda dalam memaknai pertempuran yang dihadapi. Dalam pertarungan, menang dan kalah itu biasa. Kalau sudah mau bertarung, mesti pula siap menang. Jika siap menang, mesti juga siap kalah. Kalau belum berhasil dalam pertarungan itu, bukan berarti sudah hilang segala kesempatan. <i>Nglenggana</i> terhadap kekalahan adalah kemenangan tersendiri yang bukan tidak mungkin akan menjadi investasi besar untuk menggapai <i>menang tan ngasorake</i> kemenangan yang lebih besar dan bahkan agung. Di situlah optimisme mesti diletakkan dengan lambaran sikap ksatria. Kekalahan bukanlah akhir segalanya. Orang yang berpikir positif dan tak kenal putus asa akan mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Sebaliknya, orang yang berpikir negatif menjadikan kekalahan sebagai awal keterpurukan yang lebih dalam. Begitu pula kemenangan, bukanlah puncak dari segalanya. Kemenangan bukan tidak mungkin akan berubah menjadi kekalahan, setiadaknya bukan tergolong sebagai kemenangan sejati. Kemenangan bisa membuat seseorang lupa diri sehingga hanya memikirkan diri sendiri atau paling tidak hanya mengutamakan diri sendiri. Itu seperti dicontohkan oleh Arjuna selepas mengalahkan Niwatakawaca dan di depan <i>lawanging kanugrahan</i> dan harus menerima imbalan atas kemenangan yang teraih. Arjuna lupa bahwa kemenangan dan anugerah dewata sebagai buah atas kemenangannya itu bukan untuk dirinya sendiri, bukan pula hanya bagi keluarga inti Pandawa yang hanya terdiri atas lima orang itu. Arjuna lupa bahwa kemenangan dalam Bharatayuda bahkan lebih dari sekadar kemenangan seluruh keluarga besar Pandawa, tetapi kemenangan seluruh warga negeri yang telah menyumbangkan jiwa-raga-harta dan cinta mereka. Akhirnya, dengan <i>menang tanpa ngasorake</i>, yang menang tidak akan lupa diri dan tampak <i>jumawa</i>. Yang kalah juga tidak akan menjadi pihak yang "sudah jatuh tertimpa tangga pula". Dengan penerimaan macam begini, yang kalah tetap bisa menegakkan kepalanya tanpa harus diselimuti perasaan nista dan hina-dina. Itu, lagi-lagi, karena yang menang menempuh kemenangan dengan cara elegan, tanpa harus mempermalukan lawan yang dikalahkan. Semua mengatributi diri dengan sikap ksatria, bahkan <i>ksatria pinandhita</i>. (Sucipto Hadi Purnomo, dosen Budaya Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang).	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

16.

Judul	‘Jurus Pemangku Penjinak Lawan’
Penulis	Sucipto Hadi Purnomo
Edisi	Minggu (18 Oktober 2009)
Musuh jangan (tampak) dimusuhi. Mereka perlu direngkuh, perlu dipangku. Memusuhi hanya akan menguras banyak energi. Sebaliknya memangkunya justru akan membuat musuh tak berdaya: mati! Namun benarkah strategi ini selalu efektif untuk menjinakkan lawan? Dalam tata tulis aksara Jawa, dikenal aksara <i>nglegena</i>, yakni <i>dentawyanjana</i> yang terdiri atas dua puluh aksara tanpa <i>sandhangan</i>, tanpa pasangan. Sandhangan diperlukan untuk membuat aksara-aksara itu berbunyi tidak hanya dengan "a seperti ha, na, dan ca, tetapi juga agar bisa hu, hi, ce, dan seterusnya. Di samping itu, dikenal pula pasangan dan pangkon. Pasangan digunakan untuk menandai huruf mati atau sigeg di tengah-tengah kalimat, sedangkan pangkon untuk "mematikan" aksara <i>nglegena</i> dan hanya bisa digunakan pada akhir kalimat. Setiap aksara <i>nglegena</i> yang dipangku, akan menjadi aksara mati. Dan itulah "filosofi" tentang "mati jika dipangku" atau "yang dipangku pasti akan mati" dapat digali. Maklumlah, sebagai penanda radio literasi orang Jawa, aksara Jawa dengan segala tata aturan penulisan yang melingkupi, dianggap tidak sekadar sebagai sarana untuk menulis, tetapi lebih dari itu mengandung nilai-nilai filosofis tertentu. "Mati yen dipangku" kemudian dianggap sebagai salah satu bagian dari manajemen kepemimpinan Jawa. Implementasinya, jika saat memimpin ada yang dapat dianggap sebagai ancaman atau bahkan musuh, sebaiknya jangan dimusuhi. Rengkuhlah ia, bahkan kalau perlu, berikanlah kedudukan yang layak sehingga akan merasa kepotongan budi dan dengan begitu niscaya akan mendukung yang memimpin. Memang manusia sifatnya, barangsiapa diberikan kebaikan, secara nuraniah pastilah ia akan merasa perlu untuk membalas dengan kebaikan. Barangsiapa pula dipangku, pastilah ia akan merasa mendapatkan kenikmatan sehingga akan berusaha membalasnya dengan kebaikan juga. Strategi macam ini kiranya dapat dihubungkan dengan salah satu aforisme Jawa yang diperkenalkan oleh RM Sasrakartana, yakni <i>menang tanpa ngasorake</i> (menang tanpa mengalahkan). Ini adalah modus meraih kemenangan yang tergolong <i>sophisticated</i>, sebab kemenangan mesti diraih dengan cara yang lebih "canggih". Persoalannya, apakah <i>menang tanpa ngasorake</i> ataupun mematikan lawan dengan cara <i>mangku</i> sekadar retorika? Adakah fakta historis yang menunjukkan implementasinya? Amangkurat-Hamengku Buwana Raja-raja Mataram setelah Sultan Agung Anyrakusuma memiliki gelar Amangkurat. Amangkurat sebenarnya merupakan kata kerja, yakni amangku yang berarti memangku dan rat yang berarti jagat. Jadi, amangkurat berarti memangku jagat. Mudah diterka, seorang Amangkurat adalah seorang pemimpin yang memiliki obsesi untuk memangku jagat seisinya. Semuanya direngkuh, bukannya dimusuhi. Namun apakah benar begitu? Justru pada Amangkurat I dan Amangkurat II tercatat kebengisan demi kebengisan yang sama sekali jauh dari hasrat untuk mangku, apalagi mengkon. Terhadap Tumenggung Wiraguna, Pangeran Pekik, Putri Pandansari, dan Ki Dalem, yang dianggap sebagai klilip, Amangkurat I justru menjatuhkan hukuman mati. Tak pelak, tindakan itu justru memantik perlawanan baik secara sembunyi maupun terang-terangan di kalangan istana. Hal serupa juga dilakukan oleh Amangkurat II terhadap Raden Sukra. Gelar Amangkurat yang disandangnya justru sekadar untuk meneguhkan dirinya sebagai yang <i>gung binathara</i>, <i>mbau dhendha nyakrawati</i> (besar laksana kekuasaan dewa, pemelihara hukum dan penguasa dunia). Sepadan dengan Amangkurat, trah Mataram pasca Sultan Agung yang lainnya, terutama yang memerintah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, menggunakan gelar Hamengkubuwana. <i>Hamengku</i> artinya memangku, sedangkan <i>buwana</i> artinya dunia. Jadi Hamengkubuwono adalah sosok yang memangku dunia. Jika kerap kali tidak ada kesejajaran antara label yang disematkan dan tindakan yang dikembangkan, jika antara harapan atau cita-cita yang didengungkan dan kenyataan, yang disuguhkan, paling tidak bisa diduga betapa memang tidak gampang untuk mangku. Kesanggupan untuk mangku tidak hanya ditopang oleh kemampuan secara fisik, semisal karena memiliki kasekten jaya kawijayan guna kasantikan, tetapi juga lebih-lebih pada kemampuan batin. Kemampuan untuk menggulung nafsu mengalahkan sebab biasanya yang menang lebih suka melakukan <i>tumpes tapis tanpa tilas</i> merupakan prasyarat utama untuk bisa mangku. Persoalan berikutnya, keinginan untuk memangku tidak selalu berbanding lurus dengan efek yang diharapkan. Tak jarang keinginan untuk mangku justru berbalas dengan kepahitan. Sebab, tetap saja peribahasa "air susu dibalas air tuba" tetap saja berlaku. Pada masa akhir pemerintahan Majapahit, Brawijaya bukannya tidak menyadari ancaman yang bakal ditebarkan oleh para wali, terutama yang dipimpin oleh Sunan Bonang. Justru karena itulah ia merasa perlu untuk memangku mereka. Kepada mereka diberikanlah tempat untuk <i>medhepok</i>, bahkan untuk mendirikan kasunanan. Begitu pula Jayakatwang. Berhasil mengalahkan Kertanegara, dia pun memegang tampuk pemerintahan Kadiri. Namun di balik itu masih ada Wijaya yang notabene menantu Kertanegara. Jayakatwang menyadari, Wijaya adalah ancaman. Namun terhadap ancaman yang sewaktu-waktu bisa melancarkan aksi balasan, Jayakatwang justru memangkunya. Diberikanlah izin kepada Wijaya untuk <i>nglungguhi bumi tarik</i> dan babad alas di sana. Namun sebagaimana Sunan Bonang bagi Brawijaya, Wijaya tetap saja menjadi <i>satru mungging cangkakan</i> bagi Brawijaya. Tindakan mangku secara tak langsung malahan "membesarkan" musuh. Pada kasus ini, mangku tidak berujung pada kematian yang dipangku, tetapi justru menguatkannya. Mangku malahan memberikan kekuatan yang dipangku. Ketika sunat (khitan) masih dijalankan secara tradisional, biasanya yang disunat dipangku oleh seseorang yang dianggap memiliki kekuatan batin. Setidak-tidaknya mampu <i>mbombong ati</i> yang disunat sehingga tak gentar ketika pemotongan pucuk kelamin dilakukan. Mangku, dalam konteks ini, selain untuk menguatkan dan menghibur, juga dalam rangka untuk melenakan, yakni membuat lupa bahwa yang akan dihadapi itu adalah kesakitan. Sucipto Hadi Purnomo (Dosen Budaya Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang).**	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

17.

Judul	‘Mencari Baladewa di Panggung Kuasa’
Penulis	Sucipto Hadi Purnomo
Edisi	Minggu (16 Juni 2010)
JIKALAH benar <i>power is corrupt</i>, masihkah bisa diharapkan padanya keikhlasan dan kelurusan itu ada? Bukankah karena melekat predikat <i>wenang amisesa ing sanagan</i>, upaya untuk selalu <i>melik</i>, dan mengagak-menggok justru yang lebih sering mengemuka? Tatkala menggelar pasukan disinggil, Raja Ngayogyakarta senantiasa memandang lurus ke utara tungga sampai pada tugu yang berada di brik perempatan Jalan Malioboro Tak ada bangunan yang menjadi penghalang pandangan, karena jalan yang membelah jantung kuthagara itu benar-benar lurus selatan-utara. Secara simbolik, tentu tak mengada ada jika hal itu diartikan sebagai pengingat bagi yang sedang bertakhta untuk senantiasa berpandangan "lurus", bukan berbelok-kelok. Dengan begitu, titah yang disabdakan lurus pula. Raja, pada tataran ideal, haruslah <i>ambeg ber budi bawa laksana</i>. <i>Bawa laksana</i> artinya apa yang dikatakan, itulah yang dilaksanakan. Dengan begitu pula, kelurusan senantiasa dipegang pada tataran praksis. Namun benarkah hal-hal yang simbolik itu <i>mengejawantah</i> dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat? Benarkah dalam praksisnya, sungguh-sungguh terjemakan "takhta untuk rakyat", bukannya berbelok menjadi "takhta untuk brayat? Terhadap panggung politik dan kekuasaan yang begitu dekat dengan masa kini, atau bahkan menjadi bagan tak terpisahkan dari masa kini, tidak mudah untuk membuat penilaian. Karena itu, sulit juga untuk mengidentifikasi, apakah <i>ambeg</i> yang ditunjukkan itu tergolong lenceng dan <i>lila legawa</i> atau malah sebaliknya Sebab, apa yang terpampangkan tidak selalu berbanding lurus dengan realitas faktual yang substansial. Penuh Tipu Daya Dari jagat jagad kisah pewayangan, justru bisa digali dunia fiksional Jawa yang notabene merupakan salah satu cermin besar dunia Jawa, termasuk pola bekerjanya kekuasaan. Bagaimana para raja di dunia pewayangan memainkan kekuasaannya, di situlah penapisan akan keikhlasan dan keselurusan bisa dilakukan. Namun lagi-lagi kesulitan itu serta merta meghadang. Ikhlas dan lurus, <i>lila legawa</i> dan lenceng-lenceng dalam parasnya yang paripurna, rupa-rupanya tidak dengan mudah ditemukan pada deretan nama raja dalam jagat wayang (purwa). Betapa hampir semua tokoh, dalam berbagai cerita baik "pakem" maupun yang merupakan <i>sanggit</i> para dalang dan penulis lakon carangan, setiap yang kuwasa tak pernah lepas dari lika liku intrik, persekutuan, bahkan tipu daya terhadap (yang dianggap) lawan. Justru yang segera mengemuka adalah sosok macam Kresna Titisan Wisnu, raja Dwarawati, sekaligus botoh Pandawa sepanjang berkecamuk Baratayuda ini adalah sosok yang paling lihai untuk bermain-main sekaligus memain-mainkan yang lain. Tipe muslihat pun tak jarang ia skenarioan demi memuluskan keunggulan kubu yang ia "pegang". Terhadap Antareja yang dalang versi lain disebut Antasena dan Wisanggeni tak luput dan trik itu. Keduanya tidak memiliki dosa dalam konteks Bharatayuda, dalam bingkai perseteruan antara Kurawa dan Pandawa "Kesalahan" mereka justru karena mereka terlalu sakti dan boleh jadi tak tertandingi siapa pun. "Celakanya", justru pada titik itulah Kresna gundah. Pada kehebatan semacam yang dimiliki oleh Antareja dan Wisanggeni, superioritas Kresna sebagai pengatur strategi kemenangan Pandawa justru bisa terancam. Itulah sebabnya, dia merasa tak ada jalan lain untuk "mengamankan" kecuali dengan menyuruh kedua keponakannya "<i>ndilat</i> telapak kakinya" yang merupakan jalan kematian. Bukan pada Kresna, yang notabene memiliki kekuasaan, rasa <i>lila legawa</i> itu ada justru pada bocah-bocah lugu itu, keikhlasan tersebut menemukan bentuknya yang paling sempurna. Berkalang tanah, justru di telapak kesaktiannya sendiri, adalah sesuatu yang penuh troni, setidak tidaknya menerbitkan rasa pedih perih di hati. Antareja dan Wisanggem tidak kedurungan melik, lebih-lebih melik kuwasa. Karena itu, mereka <i>lila legawa</i> ketika kuwasa yang lain itu justru tak menghendaki kehadiran mereka. Kiranya bukan semata-mata keluguan yang mendorong mendilat tapak kaki sendiri, melainkan sekali lagi karena keikhlasan tadi. Keikhlasan ini malahan boleh dibilang melampaui keikhlasan Dewabrata ketika melepaskan begitu saja haknya atas takhta Astina. Sebab, apa yang dilakukan tak lepas dan darma bakti yang mesti ia tunjukkan kepada sang ayah, Sentanu yang menjadikan Dewi Durgandini sebagai istri. Barangkali saja, keikhlasan seperti yang ditunjukkan oleh Gendrayana bersama istrinya Patmawati, dengan meninggalkan Yawasina untuk adik tirinya Sudarsana, adalah sebuah penebusan atas kesalahannya yang demikian fatal. Kalau saja Gendravana tak mencelakai dan membuat sengsara Sudarsana, tak pernah dengan sukarela kuwasa itu hijrah ke sana. Keluguan Baladewa. Adapun dalam hal <i>ambeg lenceng-kenceng</i>, barangkali baladewa tiada duanya. Bukan hanya karena sebagai raja, ia hampir satu-satunya yang beristri seorang Erawati. Padahal peluang untuk itu, pastilah ada. Pemihakan Baladewa terhadap satu pihak atas pihak lain, sama sekali bukan dilandasi oleh kepentingan akan <i>melik kuwasa</i>, melainkan lebih lebih lantaran rasa keadilan. Namun sikap macam begini, oleh sosok semacam Kresna yang memang senantiasa berhitung akan untung rugi serta sebab akibat, dianggap bisa menjadi di klilip. Sikap seperti itu, lengkap dengan daya kekuatan yang menopang pastilah akan merepotkan jika tidak disisihkan. Itulah kenapa, sepanjang Bharatayuda berlangsung, Baladewa dengan segenap kepolosan, kejujuran, sekaligus keluguannya, menurut saja ketika 'dikarantina' Kresna di Grojogan Sewu. Padahal, itu hanya muslihat sang adik agar raja Mandura itu tak merusak 'skenario'. Menemukan Baladewa dalam sebuah panggung kekuasaan, ibarat mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Malahan bisa dikatakan, kalaupun ada, ia tidak akan pernah mendapatkan tempat, kecuali untuk segera disisihkan dan dikibuli. Begitu tak berdayanya keluguan dan kelencengan <i>galengan</i> itu ketika mesti berhadapan dengan rekayasa melingkar-lingkar bak ular, juga tampak pada kenaifan (kesengajaan) yudistira dalam persekutuan mengabarkan aswatama kepada drona. Padahal dalam konsep kekuasaan dan kepemimpinan jawa, sebagaimana yang terkristalisasi dalam <i>astabrata</i>, jelas sudah bahwa kepemimpinan itu juga bak matahari yang senantiasa tidak hanya panas dan terangnya tapi juga memancarkan lurus sinarnya.**	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

18.

Judul	'Kuasa yang (Dianggap) <i>Sarwa Ora Pener</i> '
Penulis	Sucipto Hadi Purnomo
Edisi	Minggu (31 Oktober 2010)
Pada masa lalu, penguasa selalu dianggap benar dan harus dibenarkan. Titahnya laksana sabda dewa, sehingga tidak ada kata lain bagi kawula, kecuali <i>mundhi dhawuh sang nata</i>. Namun ketika suara rakyatlah yang dianggap sebagai suara Tuhan, mereka yang dipilih secara langsung sebagai yang bertakhta pun harus berada di titik yang tidak selalu benar, bahkan <i>sarwa ora kepeneran</i>. Apakah ini berkait dengan <i>pawukon</i> atau <i>petung</i> yang menempatkan <i>sang nata</i> berada dalam naungan <i>mabrasapta bumi kapetak</i>? Ataukah lantaran penobatannya pada saat petung menunjukkan <i>lebu katiyub angin</i>? Mengait-ngaitkan tindakan riil serta persepsi yang kemudian muncul dengan garis nasib yang diisyaratkan oleh <i>petung ala maprasabta</i>, misalnya, bisa jadi akan segera dianggap sebagai upaya <i>otak-atik gathuk</i>. Ya diotak-atik agar <i>mathuk</i> dengan cara <i>digatuk-gatukkhe</i>. Toh seburuk apa pun "garis tangan", ia masih bisa <i>diwiradati</i>. Bukankah secara simbolik, tradisi Jawa juga telah menyediakan prosesi bernama <i>ruwatan</i> yang diyakini bisa menjadi ikhtiar untuk keluar dari <i>sengkala</i> yang membelit diri. Itu artinya, deskripsi-deskripsi lengkap dengan peringatan dan saran yang kerap kali dielaborasi dalam dunia perhoroskopian, bukanlah harga mati. Ia hanya memampangkan sebuah kemungkinan, sementara kemungkinan lainnya juga senantiasa tersedia asalkan orang mau berikhtiar. Berikhtiar, itulah kuncinya, sehingga "seburuk apa pun <i>wetonnya</i> dalam hubungannya dengan hal lain, sesungguhnya bukan <i>weton</i> yang buruk melainkan yang lebih penting adalah bagaimana memenuhi syarat untuk membangun sebuah relasi yang tidak akan menemukan nasib bumi, <i>kapetak</i> ataupun <i>lebu katiyub angin</i>. Kembali lagi pada persoalan penguasa yang senantiasa dipersepsikan negatif, dianggap selalu salah, bahkan tidak berkarya. Jika ini persoalannya, tentu bisa segera didekati secara reseptif tanpa menafikan pendekatan objektif. Dalam hal ini tentu kita bisa beranalog pada pendekatan pragmatik yang jamak ditempuh ketika dilakukan kajian terhadap karya sastra. Ringkasnya, pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang berkaitan dengan pembaca. Kajian yang memfokuskan pada pembaca disebut kajian reseptif. Dalam resepsi sastra, "pembaca" memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya sehingga dapat memberikan atau tanggapan terhadapnya. Meski demikian, ada lima perspektif yang mesti diingat dan dipahami yakni tekstual, pengalaman, psikologis, sosial, dan budaya. Pergeseran Secara tekstual, penguasa saat ini adalah pemimpin yang bergerak secara <i>bottom up</i>. Ia bukan titisan dari kahyangan, meski konsepsi tentang wahyu dan <i>pulung</i> tetap saja menjadi pemahaman di alam bawah sadar dalam diskursus ini. Begitu pula legitimasi-legitimasi lainnya yang bersifat pralogis dan geneologis. Tetap saja bahwa pemahaman tentang sosok penguasa yang bukan dari <i>pidak pedarakan</i>, melainkan <i>turasing awirya rembesing madu</i> tetap menjadi acuan dalam meraba-raba kualitas dirinya. Secara kasatmata, penguasa saat ini memenuhi "kebersyaratan" macam itu. Ia <i>sinengkuyung dening sakehing kawula</i>, bukan berasal dari <i>wong aceplik</i>, bahkan memiliki rekam jejak dalam <i>ngembat puseraning adil</i> dengan relatif tanpa cela. Sekalipun bisa beraroma subjektif, deskripsi tersebut kiranya masih berpusar pada tataran tekstual. Memang sebagai sebuah deskripsi, ia sangat tidak lengkap. Sebab belum ada, misalnya, bagaimana gambaran sepak terjangnya secara terukur secara lebih komprehensif. Namun perspektif lain secara pragmatik perlu segera diperhatikan adalah psikologis, sosial, dan budaya. Secara psikologis, kawula dan neopriyayi masa kini adalah massa yang cenderung nirdaya kritis di satu sisi, namun di sisi lain terlalu bernafsu untuk <i>mburu benere dhewe</i>. <i>Benere dhewe</i>, dalam alam demokrasi, kemudian mengalami semacam metamorfosa dan sinergi hingga menjadi <i>benere wong akeh</i>. Apa yang kemudian terjadi? Mereka yang mayoritas kemudian "menindas" yang minoritas, tidak hanya dalam tindakan, tetapi juga dalam membangun persepsi dan citra. Siapa pun yang tidak disukai kemudian dicitrakan sebagai yang buruk dan tercela. Gerakan ini tidak hanya bersifat horizontal, tetapi juga vertikal. Karena itu, upaya yang bisa digolongkan sebagai "pembunuhan karakter". <i>Benere wong akeh</i> kemudian bisa-bisa menafikan benar kang sejati, apalagi jika ia berasal dari minoritas. Dalam hal ini berlakulah kata-kata "jika seribu lalat tidak pernah salah, santaplah tinja, karena mereka mengerubunginya". Pergeseran psikologi massa semacam itu celakanya bergerak nyaris bersamaan dengan makin menipiskannya kepercayaan dengan orang lain yang berbarengan pula dengan sikap buruk sangka yang kian membuncah. Bahkan terhadap maksud baik sekalipun, selalu saja rasa curiga yang terkedepankan. Dalam kondisi seperti itu, berbekal <i>ratune ratu utama</i>, <i>panekare becik-becik</i> sekalipun, tidak akan pernah terjadi perbaikan secara signifikan. Yang terjadi justru sikap curiga-mencurigai bersamaan dengan makin meningkatnya persepsi negatif terhadap pihak lain, termasuk terhadap sosok yang semestinya <i>diestokake sabda dhawuhe</i>. Dan semua itu akan menjadi aral besar bagi gerak pembangunan peradaban dan kemajuan. Dari sejarah, meski keadaan telah jauh berubah, sebenarnya setiap penguasa bisa belajar. Belajar bagaimana menegakkan wibawa dan perbawanya. Monumen dan candi adalah tengara keagungbinataran raja, tempat penguasa memprasastikan diri sebagai panguwasa yang juga menunaikan tugas <i>ngopeni kawula</i>. Di sanalah kewibawaan penguasa disemiotikakan, tidak hanya pada era ketika ia bertakhta, tetapi juga ketika waktu terus berlalu dan menyejarah. Kini dalam serangkaian bencana, bisa disaksikan, apa penguasa sedang diam diri atau sigap bergerak. Apakah aparat <i>pangembating praja</i> sudah cerdik belajar dari alam sehingga upaya melindungi segenap warganya. Harus jernih, objektif, dan jujur menilainya. (Sucipto Hadi Purnomo, dosen Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang).**	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

IV. RSP Periodisasi Tahun 2011-2020: 22 artikel

1.

Judul	‘Saat Orang Jawa Kehilangan ‘Rai’
Penulis	Munawir Azis
Edisi	Minggu (3 April 2011)
Perubahan kondisi sosial warga Indonesia berdampak pada proses komunikasi, relasi, dan penghargaan terhadap yang lain. Tak terkecuali pada masyarakat Jawa, yang hidup saling bersinggungan dengan etnis lain di seluruh pelosok Nusantara. Wong Jawa sebenarnya memegang konsep dasar komunikasi dan pertemanan dengan orang lain. Namun, kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi dan pendidikan memengaruhi pembentukan pikiran, ide, dan cara memaknai kehidupan. Kondisi politik dan hukum pada skala yang universal berdampak pada proses manusia Jawa mengenali dirinya sendiri, menakar identitas pribadinya. Tak hanya itu. Dinamika sosial kehidupan di negeri ini menggiring manusia untuk bekerja dan berpikiran cepat, berbeda dari konsepsi lawas yang berlandaskan etika Jawa, "alon-alon asal kelakon". Sekarang ini, konsepsi itu dimaknai ulang dengan menarik dalam konteks kritis; alon-alon durung mesti kelakon. Artinya, pada konteks zaman sekarang ini, proses yang lambat hanya akan menghambat, dan jika demikian, maka silakan oncat (hengkang). Pada struktur kaum elite, konsep-konsep tentang kejawaan yang sopan-santun, ramah dan sadarma nglampahi, sudah mulai kehilangan akar. Sikap hidup warga Jawa-dan juga Indonesia pada umumnya mulai bergeser pada kehadiran "wajah garang, mbrangas, dan kemrungsung (tergesa-gesa), bahkan kemaruk (serakah). Wajah-wajah garang tampil pada "gerombolan" penganut ideologi salafi, namun beraksi dengan menggu-nakan parang dan pentungan untuk merusak serta menghakimi orang lain. Meski, dalam aksinya kelompok-kelompok ini menggunakan jubah agama, sebagai penutup identitas diri. Tentu, hal ini sangat bertentangan dengan konsep sikap hidup warga Jawa, yang berdasar pada etika dan penerimaan orang lain sebagai saudara. Selain itu, sebagian dari pemimpin-pemimpin yang berkuasa di ranah politik, sudah tidak punya malu (isin). Hal ini terlihat dari semakin suburnya praktek korupsi, jual-beli kekuasaan, penodaan hukum dan kasus perselingkuban antarnjabat. Bahkan di media online, sering diberitakan beberapa pejabat mengumbar syahwat, yang bertentangan dengan tugas sebagai wakil rakyat, ataupun pelayan kepentingan kawula alit. Dengan demikian, banyak pejabat negeri ini, ataupun pangreh praja yang kehilangan rasa santun, ora duwe isin. Dalam historiografi Jawa, konsepsi sopan-santun manusia Jawa ditentukan oleh sikap elite dan ulama. Kiai dalam konteks hubungan sosial masyarakat Jawa, menempati posisi penting untuk menyebarkan ajaran moral sebagai pondasi sopan santun. Dalam bahasa santri, akhlaqul karimah merupakan basis dasar untuk bersikap sopan. Malu Konsepsi "malu" dalam etika Jawa berpusat pada konteks tradisi keluarga, yang berisi pengajaran moral, tata krama dan harga diri. Namun, sekarang ini, proses pendidikan keluarga tidak banyak diperhatikan, seiring dengan kemengutatan lembaga pendidikan formal serta sikap hidup praktis orang tua, yang menyerahkan anak-anak pada pengajaran di televisi, panti asuhan, ataupun play group. Padahal, konsep tata krama wong Jawa, berdasar pada kekuatan tradisi pengajaran moral di keluarga. Pengajaran moral pada lingkup keluarga ini berfungsi sebagai fundamen dasar mencipta manusia berpikiran cemerlang, namun tetap memegang sikap hidup dan sopan santun. Tata krama hadir sebagai tradisi yang mengakar sekaligus merasuk dalam pola hidup. Christina S Handayani & Ardhan Novianto (2004; 69) mengungkapkan bahwa, belajar untuk ngerti isin (tahu malu) kemudian duwe isin (punya malu) adalah langkah pertama ke arah kepribadian Jawa yang matang. Isin dan sikap hormat merupakan suatu kesatuan. Orang Jawa merasa isin apabila ia tidak dapat menunjukkan sikap hormat yang tepat terhadap orang yang pantas dihormati. Tradisi kesopanan dan tata krama ini bersumber dari relasi antar anggota dalam keluarga. Hildred Geertz (1961; 147) menulis, "semua hubungan dalam masyarakat teratur secara hierarkis. Ketemturan hierarkis itu bernilai pada dirinya sendiri dan oleh kare-na itu orang wajib untuk mempertahankannya serta membawakan diri sesuai dengannya." Siklus tata krama ini saling bersinggungan dengan hierarki bahasa, dalam filosofi Jawa. Meskipun hal ini juga dipengaruhi oleh proses kolonialisme selama beradab-adab. Dalam catatan Frainz Magnis-Suseno (2001; 114), "Setiap orang dalam berbicara dan mem-bawakan diri selalu harus menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derait dan kedudukannya." Dengan demikian, konsepsi-konsepsi tata-krama yang menjadi dasar adab wong Jawa, neru-pakan kekayaan budaya yang bersumber dari pergulatan sejarah panjang. Samadya Konsepsi tata krama dan falsafah hidup wong Jawa, sekarang ditantang oleh kehidupan serba pragmatis dan bersumbu pendek. Artinya, sekarang ini sedikit sekali wong Jawa, atau pun warga Indonesia, yang berpikiran mendalam, sebelum bertindak. Bahkan, pola berserah diri (sumeleh) dalam konteks relasi manusia-alam dan Tuhan semakin tergeser ke ping-giran, berganti dengan pola hidup yang serba cepat, namun canggung dan tergesa. Ada ungkapan, pada manusia modern waktu seakan bergerak cepat, sementara pada masyarakat di pedesaan yang berpegang pada konsepsi moral dan etika Jawa-waktu seakan melambat. Yang pertama berimplikasi pada kepenatan, ketergesaan, kemrungsung, ngayo wara dan mengesampingkan norma serta tata krama. Sementara, yang kedua berdampak pada pola hidup santai, seadanya, namun tetap produktif. Pada konteks etos hidup, ada nilai berupa "urip mung samadya", dalam artian hidup secukupnya; yen ora ana ora usah dianak-anake (jika tidak ada, tidak usah diada-adakan). Dengan demikian, hal ini menjadi dasar kon-sep moral, tentang etika hidup dan konsepsi "nduwe isin" pada masyarakat Jawa. Mengenai konsepsi ini, Ahimsa Putra (2001; 304) mengungkapkan bahwa Semar adalah perwujudan nilai Jawa sak madya. Walaupun dewa, dia tak menampakkan kedewaannya.***	

2.

Judul	‘Orientasi Politik Jawa Soeharto’
Penulis	Bandung Mawardi
Edisi	Minggu (29 Mei 2011)
Kenangan silam, kenangan sosok dan kekuasaan. Soeharto lengser 21 Mei 1998. Sosok ini ikon Orde Baru, penguasa dengan orientasi politik Jawa. Lengser dari takhta seolah menandai konsep kekuasaan atau model politik Jawa tampak berantakan, mendapati ragu dan curiga. Lakon Orde Baru selama 32 tahun jadi riwayat panjang, durasi untuk aplikasi dan indoktrinasi politik dengan dominasi referensial Jawa. Soeharto (1921-2008) seorang Jawa, penganut gagasan-gagasan kekuasaan Jawa, mengacu sejarah pelik kekuasaan Mataram. Penguasa ini pun menelusuri jauh sumber-sumber Jawa, mereguk, dan mengamalkan sakti. Soeharto memang penguasa Jawa tapi menampilkan diri dalam ambiguitas. Sosok ini raja dengan nalar kekuasaan tradisional, penguasa absolut. Soeharto juga jadi manusia politik modern, lihai meracik elemen-elemen negara modern memakai jurus-jurus ampuh. Segala politik simbolik Jawa dan agenda menggerakkan Indonesia memusat di Soeharto, sosok dalam pengultusan dan pengudusan. Politik Indonesia, politik dari pusaran kekuasaan dan kebudayaan Jawa. Idealitas (kekuasaan) Jawa hampir tak terasakan karena Soeharto kurang mengamalkan ajaran Jawa: <i>berbudi bawa leksana, ambeg adil para marta dan anjaga tata tentreming praja</i>. Soeharto menghadirkan Jawa sebagai selimut, Jawa sebagai dekorasi dari politik ekspolitatif dan represif. Gagasan untuk realisasi sebagai penguasa adil dan menganut keluhuran budi sekadar kalimat klise. Misi keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat justru terabaikan, terselip di praktik-praktik kapitalistik para elite negara. Semua ini jadi dalil dari keruntuhan Orde Baru, kelengseran Soeharto. Model politik Jawa masih terwariskan kendati kadar menurun, diinterupsi oleh idiom dan praktik demokratisasi ala Barat. Kemunculan Soeharto dalam panggung politik identik dengan militer dan kejawaan. Sejarah gamblang mencatat taktik Soeharto merampungi rezim Sukarno memakai militer dan bahasa politik (manipulatif). Nilai dan simbol Jawa turut menentukan, memberi modal politik bagi Soeharto untuk menapaki jalan kekuasaan. Fachry Ali dalam Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern (1986) mengingatkan detik-detik permulaan Orde Baru dan biografi politik Soeharto. Ada pertemuan, intimitas, antara militer dan simbol kultural Jawa antara elite militer dan politik. Semua bergantung waktu dan situasi. Kultur politik Jawa kentara dijadikan kerangka besar untuk mengonstruksi kekuasaan Orde Baru. Lembaran sejarah itu memiliki tautan dengan titik akhir keruntuhan Orde Baru (1998). Paham kekuasaan Jawa jadi sebab dan akibat, kausalitas dalam analisis politik saat rembesan nilai-nilai Jawa ada di birokrasi, pendidikan, penulisan sejarah, simbolisasi negara, pakaian, bahasa, dan etika. Soeharto tampak sebagai penguasa otoriter tapi diejawantahkan lembut, intimidatif, persuasif, dan ilusif. Kenangan atas Soeharto dan Orde Baru mengental dalam rekah dan susut dalam paham kekuasaan Jawa. Warisan Warisan anutan atas kultur politik Jawa termaktub dalam buku Butir-butir Budaya Jawa (1987). Buku ini menghimpun <i>pituduh</i> dan <i>wewaler</i> Soeharto. Ada kalimat keramat di halaman muka: <i>Hanggayuh kasampur-naning hurip, berbudi bawa leksana, ngudi sajatining becik</i> (Mencapai kesempurnaan hidup, berjiwa besar, mengusahakan kebaikan sejati). Nilai-nilai keluhuran Jawa ini memang ideal, pusat orientasi kehidupan masyarakat Jawa dari zaman ke zaman. Kalimat, ajaran, tuturan tak selaras dengan realitas. Soeharto, penguasa Orde Baru, memang menampilkan diri dengan bingkai kultur politik Jawa kendati ada manipulasi dan deviasi. Simaklah ajaran luhur tentang negara, rakyat, dan penguasa: Negara bisa tentrem lamun murah sandhang kalawan pangan, marga para kawula padha seneng nyambut karya, lan ana panguwasa kang darbe sipat berbudi bawa leksana. Kalimat ini mengandung pengharapan, idealitas dalam kubangan realitas ironis saat rezim Orde Baru memiskinkan, menelantarkan, dan menepikan hak-hak rakyat. Kenangan silam dan rentetan kekuasaan di Indonesia adalah mozaik dari ekspresi politik Jawa. Soeharto itu ikon, pemberi pengaruh besar atas keberlangsungan model politik Jawa selama puluhan tahun. Tuduhan jawanisasi politik di Indonesia tak mementalkan ambisi dan obsesi Soeharto. Penguasa ampuh ini melenggang, menyenangkan nilai-nilai Jawa, mewartakan simbol Jawa. Soeharto adalah pembawa suluh, sosok menentukan untuk mengonstruksi Indonesia dengan rasa dan aroma Jawa. Usai kejatuhan Orde Baru, jejak dan warisan itu masih terasa kendati perlahan digantikan dengan definisi dan ekspresi berbeda. Politik itu pelik. Pembacaan politik mutakhir kadang mengingatkan tentang sejarah silam, konstruksi lawas dari pendaran gagasan kekuasaan Jawa. Pemusatan orientasi politik memakai referensi Jawa bergerak dari ranah spiritualitas dan aksi tubuh. Soeharto memahami kompetensi diri, modal membicarakan politik lembut tapi menguasai. Idiom-idiom politik Jawa jadi representasi menciptakan kepatuhan, ketakutan, dan ketertiban. Jawa merasakan kaku, eksploitatif, dan diskriminatif kala digunakan sebagai sandaran pragmatisme politik Orde Baru. Masa itu berlalu, sejarah politik melintasi pelan-pelan untuk publik merefeksikan ulang tentang kelanjutan orientasi politik Jawa usai Soeharto. Para presiden usai kejatuhan Orde Baru tampil sebagai manusia-manusia politik modern, mendefinisikan kekuasaan dengan mekanisme demokrasi. Panutan atas legitimasi kultural-etnis ditepikan untuk memunculkan gagasan Indonesia dalam bingkai mutakhir. Referensi Jawa pun masih ada, sisa dari kegenitan Orde Baru. Pembacaan ulang dan reaktualisasi orientasi politik Jawa seolah turun gairah, terpaut jauh dan ikhtiar Soeharto pada masa lalu. Kenangan Soeharto adalah kenangan tentang manusia Jawa, Indonesia dalam rasa dan aroma Jawa, kekuasaan bergelimang simbol, politik ironi, dan dominasi gagasan kultur politik Jawa. Soeharto ada dalam lembaran sejarah Indonesia, hadir sebagai ikon penguasa ampuh, dan pembawa suluh jawanisasi atas biografi politik Indonesia. Jawa di mata Soeharto adalah sumber dan modal merengkuh, mengolah, menggerakkan kekuasaan. Kemunculan dan keberakhiran lakon kekuasaan itu jadi babak kontroversial saat orientasi politik Jawa turut mendefinisikan Indonesia. - Bandung Mawardi, Pengelola Jagat Abjad Solo.**	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

3.

Judul	'Mengontrol <i>Gung Binathara</i> '
Penulis	Sucipto Hadi Purnomo
Edisi	Minggu (26 Juni 2011)
Dalam diri yang berjudul <i>agung binathara</i> dan <i>mbaudhendha anyakrawati</i> sekalipun, kontrol itu tetaplah ada. Tak selalu terlembagakan, namun ia terkadang bisa mewujud dalam <i>angger-angger</i>, bahkan lebih sering berupa "sekadar" <i>unen-unen</i> yang menjadi rujukan kolektif. Secara kelembagaan, pada masa lalu, para raja adalah institusi yang berkuasa tanpa kontrol. Kekuasaannya pun nyaris tanpa batas. Titahnya adalah perintah yang mesti diikuti oleh segenap <i>punggawa</i>, <i>mayaka</i>, dan <i>kawula</i>. Keberadaannya dilegitimasi oleh ungkapan yang menuntut sabda brahmana-raja <i>sepisan tan kena wola-wali</i> (sekali tidak boleh berubah lagi), juga <i>bawa laksana</i> (yang dikatakan dijalankan). Meskipun demikian, segala penggambaran dan legitimasi secara verbal itu tidak lantas membuat raja bisa bertindak seenaknya. Dalam doktrin ke-agungbinathara-an, bersemayam juga kewajiban moral untuk menyejahterakan rakyat, yakni tugas untuk <i>njaga tata tentreming kawula</i> (menjaga ketenteraman rakyat) yang ditopang oleh ketundukan para <i>sentana</i>, <i>mayaka</i>, dan <i>kawula</i> untuk bisa ngemban <i>dhawuh dalem</i>. Jumbuhing Kawula-Gusti Dalam konteks itu, prinsip <i>jumbuhing kawula-gusti</i> (bersatunya rakyat dan raja) menemukan ruang dan peneguhan untuk beraktualisasi. Tanpa iktikad dan perasaan untuk menunaikan prinsip itu, sulit rasanya terwujud yang atas <i>njaga tata tentreming kawula</i> sementara yang bawah <i>ngemban dhawuh dalem</i>. Boleh jadi yang terjadi malah <i>padha nggugu karepe dhewe</i> (mengikuti kehendak masing-masing), dan lenyaplah segala kontrol diri. Sekalipun pemegang tertinggi <i>bawat pusaraning adil praja</i>, dalam menjalankan kekuasaannya raja tetap harus berpegang pada <i>angger-ugering negari</i>. Itulah kenapa, pada saat memerintah, Pakubuwana VII menetapkan undang-undang yang berlaku sampai ke pelosok negeri, yang bernama <i>Angger-angger Nagari</i>. Dalam ajaran Samin pun dikenal tiga <i>angger-angger</i> yang mesti ditaati oleh segenap pengikutnya. Ketiganya adalah Angger-angger Pangucap (Hukum Bicara), Angger-angger Pertikel (Hukum Tindak Tanduk), dan Angger-angger Lakonana (Hukum Perihal yang Perlu Dijalankan). Dengan ketiga <i>angger-angger</i> itulah, para <i>sedulur sikep</i> -istilah lain untuk pengikut Samin Surontika- melakukan pengendalian secara personal dan sosial. Dari sanalah bisa ditemukan ajaran untuk <i>aja drengki</i>, <i>srei</i>, <i>tukar padu</i>, dan <i>dahpen kemeren</i>. Selain itu, mereka juga disuruh untuk mewujudkan perintah "<i>lakonana kanthi sabar trokal; sabare dieling-eling, trokale dilakoni</i>". Selama lebih dari seabad, ungkapan seperti itu terbukti sangat efektif sebagai peranti kontrol diri bagi segenap <i>sedulur sikep</i>. Itulah modal besar bagi mereka untuk membangun semacam negara batin yang tampak tak begitu bergeming menghadapi setiap arus deras perubahan zaman. Masih dalam hal ajaran sebagai instrumen kontrol, saat menyerahkan takhta kepada Barata, tak lupa Rama memberikan nasihat tentang <i>ambeg</i> seorang pemimpin. Nasihat itu terangkum dalam penggambaran watak delapan hal yang terkemal dengan sebutan <i>Asthabrata</i>. Nasihat itu, dalam perkembangan berikutnya, merupakan rujukan utama ketika orang membicarakan konsep kepemimpinan Jawa. Dalam konteks kekuasaan kerajaan yang cenderung absolut, memang selalu dibutuhkan instrumen dan pengingat untuk melakukan kontrol. Sebab, sekalipun ungkapan "Raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah" diamini, tetap saja situasi lepas kontrol rentan sekali terjadi. Sampai-sampai mendiang WS Rendra semasa hidupnya pernah berucap, "Tak ada raja adil, yang ada (dan semestinya terwujud) adalah ratu adil." Aja Ngono Sesungguhnya pada masa kerajaan, pada level raja ke bawah, kontrol itu selalu berlangsung secara berjenjang. Misalnya, patih sebagai warangka dalem, melakukan kontrol atas para tumenggung dan adipati. Sementara adipati mengontrol para tumenggungnya serta wedana, begitu seterusnya. Raja sendiri, setelah masuknya kolonial Belanda, tak lepas dari kontrol. Bahkan dalam catatan Azhar (2008) sebagai pengantar terbitnya <i>The History of Jawa</i> dalam edisi Indonesia, saat TS Raffle menjadi gubernur jenderal, Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono II dicopot dan diasingkan ke Pulau Pinang (1812). Peristiwa itu paling tidak menunjukkan, betapa raja yang pada mulanya <i>tan winates panguwasane</i> (tak terbatas kekuasaannya), harus tunduk pada pemerintahan kolonial. Lantas, bagaimana sesungguhnya kontrol itu berjalan secara personal ketika institusi yang semestinya ada tidak pernah ada atau kalaupun ada tidak bisa memainkan perannya secara efektif sebagai pengontrol? Sesungguhnya inti dari kontrol diri, dalam paham Jawa, mengalami kristalisasi dalam ungkapan sederhana <i>eling lan waspada</i>. <i>Eling</i> bukan sekadar ingat dalam ranah kognitif, melainkan lebih dalam arti kesadaran spiritual. <i>Eling</i> bahwa setiap tindak-tanduknya tak lepas dari upaya untuk berbakti kepada Sang Pencipta, ingat bahwa hidup sekadar menjalankan <i>darmaning ngaurip</i>. Karena itu, dalam berbuat tidak boleh melebihi yang semestinya ia lakukan. Persis ungkapan <i>ngono ya ngono ning aja ngono</i>. Ada relativisme dari ungkapan <i>ngono ya ngono ning aja ngono</i>. Di balik kemungkinan untuk boleh <i>ngono</i> (bertindak begitu), orang disuruh untuk <i>aja ngono</i> (jangan sebegininya). Namun intinya bukan keleluasaan, melainkan pada sikap <i>eling</i> untuk <i>aja ngono</i>, <i>aja kebangeten</i>. <i>Kabeh ana watese, kabeh ana takerane</i> (Semua ada batasnya, semua ada takarannya). Adapun waspada, secara spiritual tercermin lewat dalam ungkapan "<i>tan samar pamoring Suksma</i>...." sebagaimana termaktub dalam Serat Wedhatama. Selain itu, waspada merupakan sikap batin yang menunjukkan seseorang itu senantiasa cermat dan penuh perhitungan sebelum bertindak. Bahkan ketika bertindak, ia selalu awas <i>dimen ora tiwas</i>, <i>sing ati-ati dimen ora nema bilahi</i>, dan <i>ora grusa-grusu</i> supaya <i>ora kleru</i>. Selalu waspada dalam bergaul sehingga <i>aja cedhak kebo gapak</i>. Dengan demikian, ungkapan <i>alon-alon waton kelakon</i> kiranya pula merupakan bagian penting dari deretan ungkapan imperatif dalam konteks pengendalian diri. (Sucipto Hadi Purnomo, dosen Program Studi Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Unnes). **	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

4.

Judul	'Ayo Siapa Berani Memimpin?'
Penulis	Dhoni Zusiyanantoro
Edisi	Minggu (1 April 2012)
Jangan pernah melihat kepemimpinan hanya dari yang memimpin. Cobalah pula untuk menengok paras yang dipimpin. Bukankah antara yang paring pengayoman dan konjuk kabek-ten mesti membangun relasi "saling mengerti". Sugiharto dalam buku Kepemimpinan Jawa (2010) menyebut setidaknya ada tiga situasi yang akan dihadapi orang dalam menduduki jabatan, yakni pemimpin, pengikut, dan situasi Pemimpin terkait dengan personalitas, posisi, kepakaran. Pengikut berhubungan dengan kepercayaan, kepatuhan, dan pemikiran kritis, Situasi berkaitan dengan kerja, tekanan, dan lingkungan. Tiga elemen ini saling berinteraksi dalam hubungan saling membutuhkan dengan kapasitas masing-masing. Memahami proses kepemimpinan dengan baik memang dapat dilakukan hanya dengan melihat sosok pemimpinnya, tetapi juga pengikutnya. Bagaimana pemimpin dan pengikut saling memen garuhi, juga bagaimana situasi bisa memengaruhi Kemampuan dan tingkah laku keduanya. Pakar pedalangan Bambang Murtiyoso mengemukakan, pemimpin haruslah memiliki, kepekaan lebih dan mengerti skala prioritas. Mana perkara yang harus diselesaikan dahulu itulah yang harus diprioritaskan (hambeg paramarta). Selain itu pucuk pimpinan harus pula dapat mengelola segala sesuatu dengan baik supaya orang-orang dibawahnya tidak iren. Dalam konsep Jawa, Murtiyoso mengatakan sering dikenal istilah aweh payung marang wong kang kudan, aweh teken marang wong kalunyon, aweh boga marang wong kaluwen, aweh banyu marang wong kasatan. Telah jelas dalam unen-unen tersebut, sosok pemimpin haruslah memberikan sesuatu apapun yang tepat sasaran, "ujar penulis buku Pertumbuhan dan Perkembangan Seni Pertunjukan Wayang itu. Konsekuensi dari hal tersebut, dia melanjutkan, orang yang memimpin tak boleh mempunyai keber-pihakan, sekalipun kepada keluarga. Bila dalam perjalanannya mungkin ada kesalahan yang diper-buat, harus diberi peringatan sampai dengan hukuman, sesuai dengan tingkat kesalahan, kepada siapa pun. Termasuk memberikan penghargaan kepada yang berprestasi. Selain itu, pemerintah pun seyogianya mampu menjamin kesejahteraan warga. Sedapat mungkin warga diarahkan untuk pekerjaan yang sesuai dengan kondisi sumber daya alam dan manusia. Semua hal itu tidak mungkin tercapai jika punjering adil hanya mengandalkan Setumpuk laporan dari bawahan. Lebih sulit lagi memajukan negara, jika pucuk pimpinan masih mengedepankan materialistis, semua diukur dengan materi," kata pakar pake liran itu. Dalam dunia pewayangan, telah digambarkan pula bagaimana ayah dari para Kurawa Destarastra, menyesali dirinya yang dilahirkan buta. Karena dengan tidak dapat melihat, banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam memerintah negara sebesar Hastinapura. Ia selama ini hanya mengandalkan laporan-laporan yang sering tidak sesuai dengan kenyataan. Syahdan, negara kala itu pun karut marut. Mengingat Sedangkan dalam konteks mengingatkan pemimpin, Murtiyoso mengatakan, semenjak dahulu Jawa selalu mengedepankan musyawarah. Makin minimnya komunikasi antara ratu dan rakyat menandakan buruknya keadaan. "Bila tidak menemukan jalan keluar, dahulu rakyat melakukan laku pepe-berjemur di terik matahari- sebagai bentuk protes kepada ratu," jelasnya. Sistem pemerintahan yang kala itu feodal, membuat pemimpin sebagai sentral pengendalian wilayah. Pemangku kepentingan dapat menjamin dan bertanggung jawab penuh atas rakyatnya, Senada dengan Murtiyoso, nilai-nilai kepemimpinan juga disebutkan Mangkunegara IV dalam Serat Wedhatama. Raja yang memerintah Surakarta tahun 1853-1881 itu banyak menyampaikan nilai seperti andhap asor, bersikap kesatria, dan men-jalankan laku prihatin dalam tembang Sinom; Bonggan kang tan merlokena, mungguh ugering ngaump, uripe ing tri prakara, wirya hârtâ in winasis, kalamun kongsi sepi, saka wilangan katelu, telas telasing janma, aji godhong jati aking, temah papa papariman ngulandara. Tembang ini pada intinya mengajarkan, dalam kehidupan, orang harus memiliki martabat atau harga diri. Ia harus mampu meraih tiga perkara, yaitu kedudukan, kekayaan, dan kepandaian. Jika ia tidak mampu meraih hal itu, hilanglah martabat kemanusiaannya, lebih berharga daun jati kering. Dosen Jurusan Hukum Universitas Negeri Semarang Dr Indah Sri Utari mengemukakan, dalam konteks kepemimpinan, Ki Hadjar Dewantara telah banyak memberikan teladan. Bahkan hingga kini menjadi jargon pendidikan; ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Ing ngarsa sung tuladha menekankan peran seorang pemimpin sebagai tokoh yang harus bisa diteladani, sebagai nakhoda, ia harus membimbing dan memberi arah ke mana kapal hendak ia bawa. Ing madya mangun karsa, pemimpin harus bisa membangkitkan semangat orang yang ia pimpin. Membangkitkan gairah untuk mewujudkan kepentingan bersama. Seorang pemimpin adalah motivator, tak ubahnya matahari yang mampu memberikan energi kepada semua makhluk hidup di bumi. Akhirnya, seorang pemimpin harus mampu bersikap tut wuri handayani, menyediakan kesem-patan untuk berkembang bagi yang dipimpin. Seseorang memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin ketika dia mampu mengedepankan orang lain terlebih dahulu. Keberhasilan memimpin terkait juga dengan keberhasilannya membuat orang-orang yang dipimpinnya berhasil. "Secara hakiki seorang pemimpin adalah seorang yang memegang kendali untuk membuat orang lain mendapatkan kendali. Kewenangan yang dimiliki pada hakekatnya adalah kewenangan untuk memungkinkan orang lain memiliki kendali atas pekerjaan dan kehidupannya," kata Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unnes itu. Sampai batas tertentu, simbolisme itu perlu dan baik, asalkan tidak over dan berdasar pada realitas. Karena hal ini tidak akan melahirkan tindakan guna mencapai makna yang nyata dari simbol-simbol itu sendiri. Kita menaruh kekhawatiran besar, jika kemudian yang menjadi penting adalah ungkapan-ungkapan sebagai hegemoni pencitraan, terutama dari pemimpin yang menjadi panutan perilaku budaya masyarakat. Seiring laju zaman, apa yang terjadi pada masa-masa berikutnya adalah terbentuknya formula baru tentang konsep kepemimpinan. Namun, kita tetap mendambakan sosok kepemimpinan yang melekat pada diri seorang pemimpin, dengan kesempurnaan karakter seorang Satria Pinandhita, yang mungkin hanya dapat kita raih melalui mimpi-mimpi kita. -Dhoni Zusiyanantoro, alumnus Bahasa dan Sastra Jawa FBS Universitas Negeri Semarang.	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

5.

Judul	‘Tak Mau <i>Lengser</i> Sampai Hilang’
Penulis	Dhoni Zustiyanoro
Edisi	Minggu (8 Juli 2012)
Kaum muda tak mudah mendapat kepercayaan. Mereka sering diberi tahu agar aja nggege mangsa, tak bertindak tanpa mengingat ketepatan dan ketetapan waktu. Ketika belum meraih keberhasilan, mereka cenderung disalahkan. Bagaimana pengaderan bisa berlangsung bila yang senior tak mau bertukar kawruh, apalagi lengser? Memberi keteladanan tak dapat hanya ditunjukkan dengan pamer kewibawaan dan duduk manis di balik layar. Namun secara aktif memberikan masukan pada kaum muda supaya lebih baik dan mengatasi kekurangan. Terlebih mau lengser keprabon dan memberi kesempatan kaum muda memegang kendali. Kaum tua harus pula memegang teguh konsep ing ngarsa sung tuladha. Merekalah yang secara tak langsung bertanggung jawab atas kaderisasi. Mereka pun harus tetap menjaga keberlangsungan kualitas kerja. Dari khazanah cerita klasik Jawa, kehilangan kader telah dialami Majapahit. Sesudah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur melemah. Setelah Hayam Wuruk meninggal tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan takhta. Bukan perkara lain, penyebab kemunduran kerajaan termasukur itu karena ketiadaan kader yang mampu memegang kepemimpinan dalam keluarga kerajaan. Ketika itu ada periode kekosongan antara pemerin tahan Rajasawardhana (1451-1453) dan Purwa-wisasa (1456-1466). Jeda pemerintahan selama tiga tahun itu, konon, akibat krisis kepemimpinan. Sebelum peristiwa itu, perpecahan telah pula nam-pak. Setelah Gayatri yang memerintah Majapahit meninggal, Tribuwanatunggadewi turun takhta dan digantikan Hayam Wuruk. Masa itulah diyakini sebagai puncak kejayaan Majapahit. Dinyatakan dalam kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, wilayah Majapahit sangat luas. Wilayah itu telah meliputi seluruh republik ini sekarang. Setelah meninggal, dia digantikan Wikramawardhana yang merupakan keponakan sekaligus menantu Hayam Wuruk. Dia memberikan kekuasaan pada Bhre Wirabumi, anak Hayam Wuruk dengan seorang selir, di daerah timur, yang kemudian menjadi Majapahat Timur. Majapahit pun terbagi menjadi dua wilayah. barat dan timur. Semula hubungan kedua saudara itu berlangsung baik. Akan tetapi tak berapa lama, hubungan mereka memburuk. Keretakan itu diyakini akibat perebutan kekuasaan. Syahdan, terjadilah perang saudara yang disebut perang paregrek. Perang itu dimenangi Wikramawardhana, setelah Bhre Wirabumi terbunuh. Dalam karya sastra Jawa, peristiwa itu dijadikan dasar cerita Damarwulan-Minakjingga. Kisah perebutan kekuasaan oleh "anak-anak" itu tiada lain karena keminiman pemahaman tentang konsep kepemimpinan yang harus dipegang teguh. Pemahaman itu, lagi-lagi, karena kelemahan kaderisasi di lingkungan pemerintahan kala itu. Pihak berkuasa tidak mengader generasi di bawahnya. Mereka tidak pula menyiapkan anak-anak untuk melanjutkan tata pemerintahan setelah lengser. Memang ada kecenderungan kaum tua enggan tukar kawruh untuk kemajuan kaum muda. Kepada kaum muda sering pula dikatakan durung wancine, harus menunggu sampai waktu yang tepat. Kaum muda tak disiapkan menghadapi medan laga lebih besar. Walhasil, ketika menjabat dan masuk ranah politis pemerintahan, mereka malah berebut harta dan takhta, tanpa memikirkan keberlangsungan tata kelola yang berkualitas, kesejahteraan, dan pencitraan yang baik. Tak Mau Lengser Namun, siapa pula mau lengser keprabon? Meninggalkan posisi penting yang jelas-jelas dapat dinikmati hasilnya? Apalagi calon pengganti mereka belum siap. Kemampuan calon pengganti belum sebanding dengan pemegang posisi saat ini. Kasus seperti Airlangga, yang lengser keprabon untuk madeg kapandhitan tahun 1042, tidak terjadi dalam sejarah Mataram baru. Begitu pula ketika Fatahillah menyerahkan tampuk kepemimpinan Banten dan Cirebon kepada dua putranya, lalu men-jadi Sunan Gunungjati pertengahan abad ke-16. Belum ada preseden. Mereka turun takhta, tanpa pihak yang mengajari. Ketiadaan contoh atau setidaknya kelangkaan berupa kesediaan lengser keprabon dan leren dari penikmatan ketenaran itu tidak lepas dari kenyamanan dan kenikmatan yang dapat dicicip. Ada ungkapan dalam bahasa Jawa, "Krasa enak, diuntal sapiringe!" Jika sudah merasakan kenikmatan, piring pun dimakan." Kecenderungan semacam itu tak lepas dari anggapan bahwa kebahagiaan mesti diraih dengan mendapatkan posisi strategis. Dengan terus-menerus merengkuh itulah, kebahagiaan bakal teraih. Padahal, dengan sejenak leren dan mengader, penikmatan terhadap posisi itu menjadi makin berarti. Melalui hal itulah, keberadaan "senior" akan disadari dan memberikan sumbangan lebih berarti. Sebenarnya keterus-menerusan tidak mau lengser tak hanya melelahkan bagi yang melakoni, tetapi juga buat yang melihat. Pada tingkat tertentu ia menjelma kebosanan dan kemuakan. Karena itu, setiap orang semestinya menyadari dan menginsyafi untuk lengser sadurunge kesuwen, berhenti sebelum terlalu lama. Ya, jika tak ingin sinengkakake leren atau bahkan dilengserkan oleh orang-orang yang merasa muak akibat kesuwen. Jadi lengser keprabon akan memberikan kesempatan untuk menemukan hal-hal baru. Selain memperbaiki yang telah ada dan memperteguhnya jika dipandang perlu. Lengser berarti memberikan kesempatan kepada junior untuk menampilkan diri. Meski tidak langsung bermutu baik, melalui bimbingan dan daya juang tinggi, mereka akan memiliki kualitas itu dengan sendirinya. Lengser adalah kesempatan melihat kembali jalan yang sudah dilewati untuk kembali menata atau paling tidak membayangkannya. -Dhoni Zustiyanoro, alumnus Bahasa dan Sastra Jawa FBS Universitas Negeri Semarang.	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

6.

Judul	'Mengalah dan Kemenangan Sejati'
Penulis	Dhoni Zustiyanoro
Edisi	Minggu (9 Juni 2013)
Tak ada seorang pun ingin kalah. Di medan persaingan, menang menjadi tujuan. Berbagai upaya ditempuh untuk mewujudkan tujuan itu. Ketika segala cara sudah dihalalkan untuk meraih, ngalah bisa jadi cara untuk menang. Menang atau kalah perkara biasa. Pemenang acap dipersepsikan sebagai yang menguasai medan. Di sisi lain, kekalahan sering pula dikaitkan dengan nasib, kurang beruntung, apes. Namun yang berpikir positif dan tak kenal putus asa akan mampu mengubah kekalahan sebagai awal kemenangan sesungguhnya. Orang yang memaknai kekalahan sebagai keterpurukan tidak berpikir jauh ke depan dan takut melangkah. Seperti pertandingan, hasilnya adalah pemenang dan yang belum menang. Ada yang bergembira, ada yang bersedih. Meski kenyataannya, ukuran menang dan kalah setiap orang berbeda. Pemenang hanya seorang, dan yang kalah pun nglenggana. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Namun kemenangan bukan segalanya. Dalam kemenangan ada amanah yang harus dipegang teguh. Pada tataran ini, kemenangan bisa berubah menjadi kekalahan. Dalam konteks kepemimpinan, ketika pemenang telah duduk di singgasana ia harus mewujudkan apa yang dijanjikan. Sewaktu kampanye, misalnya, tentu iming-iming itu disebar. Menjadi pemenang pun ada etikanya. Memang mengalahkan musuh hal biasa. Namun menjadi pemenang bagi semua, pemenang yang rendah hati, pemenang yang amanah, niscaya akan membawa pada kemenangan berikutnya. Bukan hal mustahil, apalagi ngayawara, untuk dapat menjalankan konsep kemenangan yang elok itu. Menang tidak dapat hanya diukur dari gugurnya lawan atau pengakuan nyata pada juara, tetapi lebih dari itu: unggul adalah ketika mampu menempatkan saingan ke posisi lain, yang ia pun tidak tergesa-gesa memaknai kekalahan sebagai kegagalan. Sengkuni Sewajarnya setiap upaya dan tindakan meraih kemenangan dilakukan dengan cara-cara wajar. Jangan sampai niat baik tidak diimbangi cara yang baik pula, malah upaya menang ditempuh secara culas. Atas hasil itu, tentu kemenangan yang diraih bakal cacat, kemenangan yang bukan lagi amanat. Perihal ini, di Jagat pewayangan, hampir-hampir kita selalu melihat Sengkuni sebagai sosok yang tidak patut dijadikan anutan karena melakukan segala cara untuk meraih ambasi pribadi. Pada hari terakhir Bharatayuda, Bima kesulitan mengalahkan Sengkuni. Bima hampir kehabisan cara karena Sengkuni sangat sakti. Senjata yang ia miliki tak dapat melukai karena kulit Sengkuni sangat keras. Sebelum akhirnya Semar memberitahukan: kelemahan Sengkuni ada di dubur. Sengkuni memperoleh kesaktian itu karena berhasil mendapat minyak tala, pusaka tinggalan Pandu yang ditiptikan kepada Drestarasta untuk Pandawa. Minyak tala waktu itu menjadi rebutan anak-anak Drestarasta, para Kurawa. Akan tetapi sifat tamak membuat Sengkuni ingin memiliki minyak yang mampu memberi daya kesaktian." Ketika terjadi perebutan, Sengkuni sengaja menenggol cupa berisi minyak tala yang dipegang Drestarasta yang buta. Cupu terjatuh dan minyak sakti tertumpah, Sengkuni segera menggulingkan badan di atas tumpahan minyak. Walhasil, kulitnya menjadi kebal senjata apa pun. Tidak hanya itu, sifat licik Sengkuni juga tercermin ketika melengserkan patih negara Astina, Gandamana. Dengan jebakan berupa luweng, lubang di tengah jalan, Sengkuni menjegal Gandamana saat perang antara Astina dan Pringgadani. Perang itu pun hasil kelicikan Sengkuni yang berhasil mengadu kedua negara. Dalam lakon Dewa Ruci, Sengkuni juga berhasil membujuk Drona supaya menyingkirkan Bima dengan menyuruhnya mencari kayu gung susuhing angin, yang sebenarnya perlambang kawruh sejatine urip. Sekalipun semua cara Sengkuni membuahkan hasil, tidak pernah langgeng. Kebenaran tetaplah di atas segalanya. Untuk hasil itu, menang secara licik ternyata bukan kemenangan abadi. Sikap Jawa Dalam realitas lain, meski dalam medan persaingan amat ketat, orang Jawa acap bersikap rendah hati dan menjauhi sifat sombong. Terlebih ketika memiliki kekuatan, kekuasaan, kekayaan, atau bahkan kepandaian. Bahkan ketika berbeda pendapat dari orang lain, orang Jawa menghindari keinginan merendahkan atau menghina di hadapan umum. Dengan melakoni hal itulah, dapat dianggap sebagai sikap terpuji. Karena, bisa mencegah nafsu amarah pribadi kepada orang lain yang bersalah. Bagi orang yang menjadi "terdakwa karena telah berlaku kasar atau berseberangan itu, setelah mendapat isyarat atau pasemon, hendaknya menyadari "kesalahan". Kesadaran pribadi atas kesalahan yang dilakukan itulah yang sangat diharapkan dalam kritik yang dibungkus dalam isyarat. Meski mudah diucapkan, dalam praktik itu sulit dilakukan. Dalam teks klasik Jawa ada pula istilah sekti tanpa aji, sugih tanpa bandha. Hal itu bisa saja terjadi karena orang tersebut selalu berperilaku baik, jujur, dan bijaksana. Jika seseorang berperilaku semacam itu, orang lain akan segan. Tidak perlu menunjukkan kekuatan yang tidak perlu. Ia sudah "sakti" dengan sendirinya. Memaknai kekalahan memang bukan perkara gampang. Ngalah karena telah berlaku jujur adalah kemuliaan. Ngalah seungguhnya bakal menghasilkan kemenangan lebih gemilang di kemudian hari. (Dhoni Zustiyanoro, penghayat sastra dan budaya, mahasiswa Magister Ilmu Susastra Universitas Diponegoro Semarang). ***	

Sumber: Dokumentasi Pribadi

7.

Judul	‘Tradisi dan Kampanye Politikus’
Penulis	Sendang Mulyana
Edisi	Minggu (2 Maret 2014)
Iklan politik berjumpalitan di pepohonan dan media massa. Semua menjanjikan perubahan. Entah perubahan macam apa. Semoga para pengiklan sadar, alas perubahan kehidupan adalah perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan jadi keniscayaan sebab manusia sebagai subjek sekaligus objek kebudayaan senantiasa berubah, bergerak dinamis. Dinamika manusia dan masyarakat tak dapat dilepaskan dari kehidupan politik. Di wilayah yang masih menjadikan politik sebagai panglima komando segala permik kehidupan, kelangsungan hidup kebudayaan tak luput dari komandan yang mengomando. Sayang, sering dilupakan, tugas kebudayaan dengan segenap perubahan yang menyertai adalah mengatasi permasalahan hidup. Bukan sekedar instrumen politik atau kuda tunggangan meraih kekuasaan. Persilangan pandangan dalam menyikapi adat dan tradisi sebagai anak kebudayaan tidak bermuara pada kedamaian dan kesejahteraan, tetapi mendiskreditkan satu sama lain demi meraih kekuasaan. Satu sisi ada golongan merasa jadi pewaris sah negeri ini karena merasa istikamah menjaga kelanggengan adat dan tradisi dengan merujuk kebesaran masa silam. Di sisi lain ada golongan merasa lebih bisa membawa kemajuan dengan mengusung purifikasi nilai-nilai tertentu memandang pihak lain terbelenggu alam mitos sehingga tak bisa memecahkan persoalan kehidupan. Di antara kedua sisi itu ada golongan yang mengalir begitu saja, mau apa saja yang dibawa siapa saja. Identitas Pada era globalisasi, dunia laksana kampung global. Informasi dapat diakses dengan cepat tanpa sekat. Fenomena itu justru merangsang kerinduan akan hadir dan pentingnya jati diri, identitas diri. Penegakan identitas bangsa adalah pembangunan karakter bangsa, yang dalam proses tak lain pembangunan budaya bangsa. Artinya, kebudayaan bangsa perlu ditegaskan karena kita tak ingin menjadi bangsa tanpa identitas budaya. Identitas budaya bangsa Indonesia disokong oleh identitas budaya daerah Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan nasional sebagai paduan dari puncak-puncak budaya daerah. Definisi yang tidak jangkep, sebab antara puncak dan kelas bawah acap jadi justifikasi kepentingan politik. Namun bukan berarti perubahan kebudayaan yang ideal bisa lepas sama sekali dari sistem komando politik. Ini tantangan bagi politikus. Nirwan Dewanto mewanti-wanti, politik identitas bukan sekedar identitas yang dipolitisasi, bukan sekedar baju kebudayaan yang dikerudungkan pada isi atau tubuh politik. Politik identitas merupakan sehimpun teknik memadukan dan menyatakan berbagai perbedaan dan ke lainan. Itu sekaligus mengingatkan sistem komando politik dalam kebudayaan harus memperhatikan kompleksitas kekayaan nilai yang bersemayan dalam kebudayaan. Identifikasi puncak-puncak kebudayaan hanya menyakiti eksistensi wujud kebudayaan yang tak disebut puncak. Misalnya, menganggap derajat budaya wayang wong lebih tinggi ketimbang ketoprak, tari hedaya lebih hebat dari pada tayub, jelas bukan anggapan yang tepat. Yang perlu dikembangkan suburkan adalah kemunculan banyak kajian tentang wujud budaya sehingga banyaknya ekspresi budaya diikuti pula banyaknya kajian sampai akhirnya masyarakat yang memformulasikan apa yang baik, indah, pantas, dan berguna. Multikultural Upaya menegakkan identitas budaya bangsa berhadapan dengan kedahsyatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu membingkai duma menjadi kampung global. Keluhan yang sering meluap, generasi muda tercerabut dari akar budaya, perlu diatasi dengan kebijakan nyata oleh sistem politik sebagai pemegang tongkat komando, tanpa harus mendiktekan penilaian tertentu. Aneka wujud budaya dunia bersliweran bisa jadi sumber inspirasi bagi pengembangan budaya tradisi. Tanpa harus secara langsung mengidentifikasi wujud kebudayaan baik atau buruk, indah atau tidak indah, berguna atau sampah, pemimpin politik perlu menyediakan panggung yang bisa melegitimasi, memperkuat, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan. Panggung yang disediakan sistem politik ini menjadi manifestasi arena dialektika. Biasanya ini yang paling dianggap paling penting dan laku jual dalam setiap pemilihan politik adalah ekonomi. Meski berkait langsung dengan penggemblengan mentalitas, isu budaya jarang memperoleh perhatian signifikan. Karena itu, kita cermati calon pemimpin yang nanti menjanjikan politik kebudayaan yang sehat, yakni memiliki terobosan dalam penciptaan sarana dan kelembagaan demi perkembangsuburan kebudayaan, lebih-lebih yang bersangkut-paut dengan kehidupan tradisi. Tradisi tidak dimaknai sebagai barang mati, tetapi jambangan yang siap diisi olahan kreativitas pegiat budaya sesuai dengan latar belakang ideologi dan sosiokultural pegiat. Sistem politik dengan kekuasaan dan wewenang yang disandang dapat membentangkan jaringan seluas-luasnya. Adakah politikus yang berjanji memberikan jaminan seluas-luasnya bagi kebebasan berekspresi pegiat budaya. Padahal, kebebasan itu akan melahirkan tanggung jawab besar atas identitas kebudayaan bangsa. Keadiluhungan budaya Jawa, misalnya, justru dikenal karena kelenturan luar biasa dalam menerima pengaruh asing tanpa kehilangan identitas diri. Masyarakat pun tak perlu dipusingkan aneka ketegangan akibat perbedaan budaya, sehingga yang muncul bukan variasi ekspresi budaya, melainkan skeptisisme dan tindakan anarkistis. Dicari pemimpin politik berjiwa budaya! Sendang Mulyana, dosen Universitas Negeri Semarang.	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

8.

Judul	'Ratu Adil & Simbol Pemimpin'
Penulis	Munawir Azis
Edisi	Minggu (22 Juni 2014)
Historiografi Nusantara mengenal kisah tentang Ratu Adil sebagai simbol untuk menolok bangsa ini dari kegelapan menuju ke cahaya terang. Ratu Adil menandakan perlambang tokoh yang dapat membawa inspirasi, menghadirkan semangat, dan mampu menggerakkan rakyat untuk melawan kekejaman: penindasan, angkara murka, dan kolonialisme. Mistifikasi tentang Ratu Adil itulah yang terus berulang di tengah bangsa yang membutuhkan komando kepemimpinan. Pada masa kini, simbol-simbol tentang Ratu Adil teras dihadirkan sebagai upaya kampanye untuk menarik empati massa. Ratu Adil tidak lagi sebagai penanda sejarah. Dia justru hadir sebagai pesan politik yang membawa makna dan tafsir yang beragam. Ratu Adil bergerak dari sekadar ikon menjadi kata kunci kampanye untuk menghadirkan simbol baru dalam jagat politik negeri ini. Lalu, bagaimana kisah tentang Ratu Adil berdampak terhadap proses sejarah negeri ini? Mitos tentang Ratu Adil bermula dari ramalan seorang raja Mataram lama bernama Jayabaya. Raja itu bertakhta pada 1135-1159 di Bumi Nusantara. Ramalan Jayabaya menjadi teropong klasik untuk menunjukkan spiralisme orang-orang Nusantara dalam melihat sabda alam dan kehadiran sang pemimpin. Dalam sejarah Nusantara, simbol Ratu Adil tersemat pada diri Pangeran Diponegoro (1785-1855). Kisah tentang Perang Jawa (1825-1830) merupakan tragedi besar bagi orang-orang di Pulau Jawa, yang terekam dalam babad dan catatan kolonial serta menjadi kisah klasik. Kisah tentang Perang Jawa dan perlawanan Diponegoro itulah yang menandai kehangkitan simbol Ratu Adil di Pulau Jawa, yang kemudian menginspirasi perlawanan terhadap kekuatan kolonial, hampir di beberapa kawasan Nusantara. Simbol Ratu Adil Perang Jawa tercatat sebagai perang yang menelan korban sedemikian banyak. Korban berjatuh dari pihak Jawa. Tionghoa, dan Belanda. Sekitar 15.000 orang serdadu Belanda - 8.000 orang Belanda dan 7.000 orang pribumi tewas dalam peperangan itu. Adapun sekitar 200.000 orang Jawa dan Tionghoa menjadi korban keganasan perang tersebut. Pihak Belanda juga bangkrut, karena pengeluaran untuk perang sebanyak 25.000.000 gulden. Epik tentang perjuangan Diponegoro dikisahkan oleh Remy Sylado dalam novel Pangeran Diponegoro Menggagas Ratu Adil (2007). Tentu saja kekalahan Diponegoro dalam Perang Jawa tak lantas mematikan simbol tentang Ratu Adil. Prajurit dan pengikut Diponegoro yang menyebar ke seluruh Jawa kemudian mentransformasikan nilai-nilai Ratu Adil dalam gerakan sosial dan kultural mereka. Komunitas Samin di Blora juga menyimpan kisah Ratu Adil yang diwariskan dari sang tokoh: Samin Surosentika. Komunitas Samin merupakan bagian dari murid-murid dan prajurit Diponegoro yang lari ke hutan Blora, untuk menyiapkan gerakan petani melawan rezim kolonial Belanda. Haulnya, pada pengujung abad XIX dan awal abad XX, Sedulur Sikep Samin melawan Belanda dengan menolak membayar pajak (Aziz, 2012). Riset tentang Diponegoro dan simbol Ratu Adil dikerjakan secara tekun oleh Peter Carey. Dalam karyanya, <i>Waiting for the Ratu Adil: the Javanese Village Community on the Eve of the Java War (1825-30)</i>, Carey melacak pengaruh Diponegoro yang menggunakan simbol Ratu Adil untuk menggerakkan perlawanan terhadap Belanda. Itulah yang menjadi topan monal dan spiritual orang-orang Jawa melawan kolonial Riset lengkap tentang Perang Jawa, perlawanan Diponegoro, dan simbol Ratu Adil termaktub dalam karya Peter Carey (2007) bertajuk "The Power of Prophecy: Prince Dipanegara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855" Fajar Ratu Adil Dalam upaya menyongsong kemerdekaan, pada awal abad XX, HOS Tjokroaminoto juga dianggap sebagai simbol Ratu Adil. Dia menyalakan harapan rakyat yang tertindas oleh kebengisan kolonial, dengan menggerakkan organisasi Sarekat Islam (Koerver, 1985; Jan S Aritonang, 129) Transformasi Ratu Adil itu kemudian tersemat pada diri Soekarno, murid dan menantu HOS Tjokroaminoto. Soekarno kemudian menjadi penggerak semangat dan penyulut api harapan dari rakyat di negeri ini, di ujung kolonialisme Belanda dan teror Jepang. Soekarno merupakan pribadi unik karena menjadi penanda gerakan perlawanan pada abad XX. Sang Putra Fajar kemudian menggerakkan Sejarah Indonesia, dengan membuka gerbang kemerdekaan. Tentu saja gerak langkahnya juga bergandengan dengan sejarah Tan Malaka, Moh Hatta, Sjahrir, dan Wahid Hasyim. Sampai saat ini, simbol Ratu Adil masih sering digunakan di panggung politik. Para politikus berebut simbol untuk memengaruhi massa, menarik simpati publik, dan mengusung ide perubahan. Pada pertarungan politik menjelang pemilihan presiden tahun ini, simbol Ratu Adil hadir kembali menjadi bagian dari pertarungan antara Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Siapakah Ratu Adil akan berhasil memimpin negeri? Sejarah yang akan menjawab.-- Munawir Azis, peneliti dan penulis buku, alumnus Pascasarjana UGM.	

**

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

9.

Judul	‘Yudhistira & Kejujuran Kita’
Penulis	Purnawan Andra
Edisi	Minggu (10 April 2016)
Indonesia, dengan kondisi sosial politiknya saat ini, bagaikan "negara teater" dengan "drama" penuh intrik dalam situasi yang diciptakan dan dicitrakan. Para politikus bermain peran. Terkadang menjadi aktor watak pembela rakyat. Namun waktu berganti wajah sebagai antagonis. Semua tergantung pada lakon yang dimainkan. Apakah menyangkut nama baik pribadi, partai, atau koalisi mereka. Semua peiran berpamrih. Apalagi bila berkaitan dengan kasus yang menyebut diri dan guongan mereka. Politik menjadi panggung Sandiwara. Tak ada kejujuran dan keterusterangan mengani fakta sebenarnya. Saat ini sikap kejujuran atau keterusterangan rasanya telah menjadi langka, bahkan ajaib. Para politikus (dan koruptor) yang kerap hadir di layar televisi selalu bereterika, memberi keterangan berbelit-belit, berputar-putar, dan tak jelas mengakui sesuatu. Semua itu mereka lakukan dalam konteks pengingkaran untuk mencari jalan aman, sebagai alibi demi menyelamatkan harga diri dan nama baik dari aib yang menodai derajat sebagai pejabat. Atau untuk menghindari ancaman pemecatan sampai dengan hukuman penjara. Padahal, sebagai nilai universal, kemauan dan kemampuan mengatakan sesuatu secara jujur sebagai sikap yang sebenarnya telah terwariskan sejak lama dalam budaya kita. Orang Jawa menyebut dengan kata "blakasuta" atau "cablaka" atau "blaka". Sikap itu menunjukkan kesatuan hati dan ucapan. Sikap yang tidak hanya lugas, tetapi juga tegas. Antonimnya adalah tuturan berbunga-bunga, tetapi meragukan atau bahkan palsu. Sejak kecil, nilai-nilai kejujuran telah dia-jarkan dalam keluarga. Anak-anak dididik selalu jujur, tidak berbohong kepada setiap orang dalam berbagai macam hal. Di segala macam bentuk institusi dan kelompok masyarakat, kejujuran dan keterusterangan menjadi nilai dasar konstruksi pendidikan serta pembentukan identitas dan eksistensi diri. Kejujuran dan keterusterangan adalah sikap nilai untuk mengukur kualitas seseorang dalam konteks "kesadaran Jawa". Seperti Ki Padmasusatra atau Magnis-Suseno, Hardjowirogo (1983) mengidentifikasi ciri khas manusia Jawa antara lain dengan kecenderungan berbudi luhur, bersikap aja dume, corak watak rumangsa, kecenderungan tepa slira, dan mengidentifikasi diri pada wayang. Sosok Ideal Karena itulah orang Jawa mempunyai sosok ideal untuk mengidentifikasi kejujuran. Mereka berefleksi kepada tokoh Yudhistira. Dalam cerita pewayangan, sulung Pandawa itu selalu berkata jujur dan tidak pernah menipu orang lain. Karena itulah dalam tubuhnya mengalir darah putih (bukan berwarna merah) sebagai lambang kebersihan dan kesucian hati dan pikiran. Dalam episode Pandawa Seda, Yudhistira merepresentasikan kualitas nilai kemanusiaan karena laku kejujurannya sepanjang hidup. Ia menjadi orang terakhir yang dapat mencapai pintu surga. Kunti, sang ibu, dan keempat saudara lainnya telah lebih dahulu menerima karma hidup. Satu per satu mati di lereng menuju ke puncak Mahameru. Yudhistira adalah simbol kejujuran yang mewujud dalam laku kebersahajaan dan kesanggupan menghadapi takdir kehidupan dengan tanpa alasan. Sikapnya mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan ketulusan melakukan kewajibanlah yang membuat orang mencapai keselamatan (slamet), ketenteraman hati (tentrem), hidup harmonis (rukun), dan ingat atas kuasa Tuhan (eling). Namun kejujuran memerlukan teks dan konteks yang tepat untuk tersampaikan secara pas dan utuh. Niat dan orientasi positif itu kadang justru menjadi bumerang Jika berhadapan dengan tatanan atau situasi etis yang (justru) tidak sesuai. Orientasi dan dalil yang salah justru bisa menuntut konsekuensi yang fatal: jujur ajur (jujur malah hancur). Kejujuran menjadi relatif dalam konteks maksud dan makna. Dalam konteks kekinian, Yudhistira menjadi sindiran terhadap lakon zaman, Saat ini orang melupakan malu, menipu diri sendiri, dan mempermainkan fakta untuk melakukan berbagai macam bentuk pencurian (waktu, manipulasi angka dan data, sampai dengan kerja koruptif) sebagai strategi politis bagi orang mencapai kekayaan, kedudukan, dan kekuasaan. Yudhistira mengingatkan orang untuk meninjau ke dalam (hati nurani) guna mengetahui perihail benar salah atau baik buruk pelbagai tindakan dan konsekuensi. Itu menjadi dasar etis untuk menguji psikologi orang dalam memikirkan dan melakukan suatu tindakan. Kejujuran menjadi dasar kualitas hidup seorang manusia Jawa. ***	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

10.

Judul	'Reshuffle dan Jagat Wayang'
Penulis	Heri Priyatmoko
Edisi	Minggu (7 Agustus 2016)
Aja sok gampang janji wong manis, yenta amung lamis. Becik aluwung prasaja nimas, ora agawe cuwa. Itulah sepenggal lirik lagu "Aja Lamis" ciptaan datang kondang Ki Nartosabdo. Tembang itu bolehlah berkali-ulang didendangkan selepas pengumuman perombakan kabinet II 27 Juli 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Lagu itu melukiskan seseorang yang baru saja ditinggal pujaan hati yang melupakan janji Sedih menggelanyuti hati. Namun kali ini bukan perkara dikecewakan kekasih, melainkan diingkari oleh mantan juragan mebel itu. Seperti diucapkan kala kampanye, presiden yang mbrojol dan gede di Solo itu menyatakan hendak menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Maka, barisan aktivis meminta dia tak melibatkan tokoh yang tersangkut peristiwa kelam di negen ini dalam kabinet. Namun kenyataan berkata lain. Hampir pupus sepenuhnya harapan menyibak kebenaran dalam tragedi kemanusiaan di Indonesia. Sejak era kerajaan hingga republik, kawula alit menyulam asa agar pangembating praja (pemimpin) senantiasa ingat apa yang pernah diucapkan. Dalam pitutur luhur Jawa dikenal ajaran sabda pandhita ratu tan kena wola-wali. Pemimpin tak boleh mencla-mencle atau esuk tempe sore dhele. Jangan sampai cidra ing janji, kendati berat rintangan dan sandungan takkala merealisasikan. Bagi rakyat, tiada nilai lebih mulia pada pemimpin selain komitmen atas apa yang dilkrarkan. Kemarin, publik mencium aroma bagi-bagi kue kekuasaan. Setiap jasa atau peran penyokong calon pemimpin sewaktu pemilu, tak jarang dikonversi dengan kursi empuk. Kaum akar rumput hanya dapat niteni seberapa jauh tingkat dan mutu integritas pemimpin. Bila sejati, tentu ati, lathi, lan pakarti nyawiji. Selain Aja Lamial, lagu campursari Sri Wis Balil yang dipopulerkan Sonny Josz laris diunggah di media sosial. Lagu itu menggambarkan kembalinya Sri Mulyani menjadi menteri keuangan. Ada harapan, dia bisa memantapkan kerja kabinet bersama perempuan tangguh Susi Pudjiastuti yang menakhodai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ibarat Srikandi Di jagat pewayangan, mereka ibarat Srikandi. Masih segar dalam ingatan, kasus dugaan korupsi Bank Century yang memposisikan Sri Mulyani sebagai saksi kunci dan pemberangusan kejahatan dunia perikanan di perairan Indonesia oleh Susi yang doyan udud klepas-klepas. Jika berakal waras, kita sepatutnya mendukung derap patriotik Sri Mulyani dan Susi yang hendak menguak korupsi dan menegakkan kedaulatan maritim negeri ini. Langkah mereka seperti Srikandi kala menguber Mustakaweni yang mencuri pusaka utama Amarta, Jimat Kalimasada. Sebagai nayaka praja yang dipercaya menjaga kedaulatan negara, Srikandi menunaikan tugas sebaik mungkin. Putri Pancala dibimbing Arjuna berlatih memanah. Dilambari bakat hebat, keakuratan memanah pahlawan perempuan dalam epos Mahabharata itu mampu memutus sehelai rambut. Dengan kemahiran itu, Srikandi diminta memperkuat kabinet Amarta bagian pertahanan. Kisah gemilang Srikandi sering diceritakan sang dalang; sanggup mendeteksi kehadiran musuh yang menyamar menjadi putra Pandawa. Di depan kelir, dalang menuturkan Mustakaweni dari Manimantaka sukses masuk ke kedhaton Amarta selepas mengubah wujud menjadi Gatutkaca. Kesatria gadungan itu menghadap Drupadi yang disampiri tugas menjaga Jimat Kalimasada, Gatutkaca bilang diutus Puntadewa mengambil pusaka. Saat itu, keraton glondang (kosong) lantaran Pandawa ditemani Punakawan ke luar daerah mendirikan Candi Saptarengga. Drupadi kena tipu Gatutkaca palsu dan menyerahkan Kalimasada. Namun sewaktu berada di alun-alun, Gatutkaca tiruan dicegat Snkandi dan diminta mengembalikan pusaka. Alur kisah mudah ditebak, terjadilah peperangan hebat. Satu anak panah melesat mengenai ksatria palsu itu sehingga berubah ke wujud asli: Mustakaweni. Dibantu putra Arjuna, Priyambada, Srikandi sanggup mengalahkan Mustakaweni. Jimat Kalimasada pun dapat diamankan dan negeri tak jadi guncang. Cerita Mustakaweni memalsukan diri melukiskan elite politik yang berperilaku buruk, menyaru jadi orang baik, dan kapal asing berbendera merah putih yang mengeruk kekayaan alam. Dengan modal topeng alim dan bahasa santun kala kampanye, mereka mengelabui rakyat: hendak mengentaskan dari garis kemiskinan. Namun setelah terpilih, ternyata menggarong kekayaan negara lewat aneka proyek. Kita mendukung Susi Pudjiastuti dan Sri Mulyani sebagai Srikandi yang trengginas memanah elite politik yang busuk serta kapal pencuri ikan yang menghancurkan kedaulatan ekonomi nasional. Namun Susi dan Sri Mulyani tak mungkin bekerja sendiri. Mereka kudu didukung dan dibantu Priyambada-Priyambada alias aparat negara lain. Epos di jagat wayang yang digandrungi masyarakat Jawa acap menyediakan secercah harapan supaya kepala tetap tegak menyongsong masa depan.**	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

11.

Judul	'Mitos & Mazhab Kekuasaan Jawa'
Penulis	Ari Kristianawati
Edisi	Minggu (5 Maret 2017)
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono liburan bersama keluarga ke Tawangmangu, Karanganyar, usai pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta, Sabtu-Minggu (18-19/2). Selain menikmati kesegaran udara lereng Gunung Lawu, Susilo Bambang Yudhoyono menyempatkan diri berziarah ke Pertapaan Pringgondani di Gunung Lawu. Pertapaan Pringgondani sangat terkenal sebagai tempat bersemedi atau ritual masyarakat Jawa yang memercayai "anugerah", "mukjizat", berkah dari doa serta sesaji. Orang yang sedang berikhtiar mencari jabatan dan kemuliaan hidup melakukan laku ritual di Pertapaan Pringgondani dengan harapan mendapatkan pulung atau wangsit. Masyarakat Jawa sangat memercayai kekuatan metafisis yang mengatur takdir keinsanan dalam mengarungi kehidupan. Kekuatan metafisis dan supranatural itu yang menentukan merah-hitam garis tangan kehidupan manusia. Sebuah pandangan yang acap kali dikenal sebagai ketaklidan spiritualitas. Dalam urusan politik kekuasaan, konstruksi keyakinan rohaniah masyarakat Jawa sangat memercayai keberadaan kehendak gaib yang memiliki hak veto untuk menentukan siapa layak diberi pulung berkuasa. Sekeras apa pun daya upaya serta ambisi seseorang menggapai kursi kekuasaan, jika tidak ketiban sampur untuk mendapatkan pulung hanya akan gagal plus kecewa. Keyakinan spiritual tentang kehendak gaib, pulung, guratan takdir memang melekat erat dalam pandangan masyarakat Jawa konservatif tempo doeloe sampai kini. Itu tak bisa dipertentangkan dengan kaidah etis rasionalitas atau taklimat historis. Tidak mengherankan jika upaya mendapatkan dukungan dari kekuatan suprametafisis dilakukan dengan serangkaian tirakat, tapa brata, dengan tekun dan tak mudah menyerah. Amanah dan Takdir Franz Magnis Suseno dalam Kuasa Moral Jawa (1997) menyatakan, "Bahwa masyarakat Jawa memandang proses jatuh bangun suatu kekuasaan akan berjalan dalam ritme kegaiban tanpa ada campur tangan manusia sedikit pun. Kekuasaan bersifat sakral. Akibatnya, sakralisasi kekuasaan melahirkan pemerintahan yang sentralistik dan otoriter, seperti terlihat pada pemerintahan Soekarno dan Soeharto yang merupakan personifikasi penguasa Jawa dalam politik kontemporer." Pandangan tentang pulung atau wahyu keprabon boleh jadi mitos bagi manusia modern yang penuh pertimbangan logika berdasar analisis peristiwa kasat-mata (material). Namun bagi masyarakat Jawa, itu kebenaran yang sangat diyakini. Tak butuh pembuktian berdasar fenomena, data, angka, dan metode berpikir akal sehat. Kekuasaan bagi masyarakat Jawa adalah amanah dan takdir yang harus dijaga dengan sikap, pemikiran, dan tindakan yang selaras (sembada). Langgeng atau punah episode kekuasaan sangat bergantung pada kebijakan penguasa kepada kawula alit (rakyat). Serta kemampuan membangun relasi psikokultural dengan kekuatan suprametafisis yang melindungi. Beberapa ahli antropologi budaya serta sejarawan merumuskan pandangan kekuasaan Jawa ibarat mazhab kepemimpinan Jawa. Mazhab kepemimpinan Jawa dikenal sebagai Hastha Brata. Kepemimpinan Jawa harus memiliki delapan sifat alam yang jadi tolok ukur moralitas serta kearifan bagi siapa pun yang memikul amanah menjalankan roda kekuasaan agar bisa bertindak adil penuh kebijakan. Geneologi paham kepemimpinan Jawa merupakan ekspresi darni narasi mengenai wahyu Makutha Rama yang berisi ajaran Hastha Brata. Itulah wahyu kepemimpinan yang mengambil contoh sifat delapan dewa dan sifat delapan unsur alam yang punya beragam tafsir berkait dengan karakter manusia yang bersifat melengkapi dan konstruktif. Mazhab kepemimpinan Hastha Brata meniscayakan tanggung jawab bagi siapa pun yang berkuasa untuk menjadi teladan dalam bertindak bagi kemasiahatan masyarakat. Pemimpin dituntut bisa mengekspresikan serta mengaktualisasikan delapan sifat alam dalam serangkaian kebijakan plus kebajikan yang bermanfaat bagi imajinasi keadilan-kebenaran. Menjadi pemimpin bukan sekadar memuaskan hasrat sebagai manusia politis, seperti disinyalir filsuf Thomas Hobbes. Menjadi pemimpin juga bukan pula dipenuhi akal bulus dengan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan model Machiavelli. Menjadi pemimpin adalah meresapi keindahan, ketegasan, kesabaran yang menginspirasi bagi siapa pun yang dipimpin. Menjadi pemimpin dalam paham Jawa dilarang keras bersikap adigang, adigung, adiguna. Mazhab kepemimpinan Jawa sangat menentang model kekuasaan otoritarianistik yang semena-mena dan tak menghargai masyarakat sebagai pilar kenegaraan. Jika pemimpin gagal jadi teladan lewat kearifan serta kebijakannya, akan kehilangan wahyu keprabon. Sulit mendapatkan wahyu keprabon, pulung yang telah menghilang. Meski melakukan ikhtiar dengan laku ritual kejawaan di mana pun.-- Ari Kristianawati, guru sejarah SMAN 1 Sragen.**	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

12.

Judul	‘Kuasa dan Pengendalian Kekuasaan’
Penulis	Danang Firmansyah
Edisi	Minggu (27 Agustus 2017)
Peperangan dalam cerita Ramayana berawal dari penculikan Dewi Sinta oleh Rahwana di Alasa Dhandhaka. Rahwana, Raja Ngalengkdirja, melihat Dewi cantik jelita seorang diri di tengah hutan. Nafsu supiah, nafsu cintanya, menggemuruh dalam dada. Rahwana merasa berhak memiliki apa pun yang menurut pendapat dia menarik. Ya dia raja, dia penguasa, dan merasa berhak atas apa pun. Bukankah kekuasaan itu dari kata dasar "kuasa"? Saat Rahwana membawa terbang Dewi Sinta, Jatayu berusaha menolong sang Dewi. Makhluk itu menyerang sekuat tenaga. Namun nahas, dia mati oleh Rahwana. Rama, suami Sinta, akhirnya tahu ulah Raja Ngalengka. Rama marah; wujud dia masih mencintai dan rasa memiliki. Perang pun terjadi, medan perang banjir darah. Pedang, tombak, panah berlesingan di udara. Dan, rakyat jelata yang sendika dhawuh pada penguasa masing-masing menjadi tumbal pemenuhan nafsu sang angkara. Cerita Ramayana itu mengingatkan saya pada kediktatoran penguasa dari masa ke masa. Keberadaan penyair Widji Thukul, misalnya, sampai sekarang tak diketahui. Penculikan tak hanya menimpa sang penyair, tetapi juga 12 orang korban lain. Sampai kini keberadaan mereka belum diketahui pula. Bila kita tarik ke masa 1965, orang-orang PKI atau yang dicurigai PKI pun hilang begitu saja. Mereka, para korban penculikan itu, merupakan salah satu petunjuk: penguasa zaman itu tak mampu menahan kritik dan memersepsi kritik sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Penguasa mencari jalan apa pun untuk mempertahankan kekuasaan. Salah satu jalan adalah tumpes tapis sacindhil abange, menumpas habis lawan sampai ke anak cucu. Mereka membunuh, menculik, menghancurkan harkat dan martabat manusia. Hastha Brata Dalam budaya Jawa ada ajaran yang berlaku bagi seorang penguasa: Hastha Brata. Ajaran dalam Serat Aji Pamasa karya pujangga terakhir Keraton Surakarta, Raden Ngabehi Ranggawarsita, itu mengandung pedoman bagaimana penguasa mesti bertindak. Hastha Brata berisi delapan ajaran, yakni mahambeg lakuning samudra, kartika, dhahana, candra, surya, bumi, maruta, tirta. Ya, pemimpin mesti meniru sifat samudra, bintang, api, bulan, matahari; bumi, angin, dan air. Samudra menjadi muara sungai-sungai. Wajar bila sampah tertampung di samudra. Penguasa semestinya mempunyai ati kang nyamudra, berhati luas bak samudra. Sampah (baca: cacian, fitnah) wajar menimpa. Jika menghadapi fitnah, penguasa mampu tatag-teteg, kuat menghadapi, seharusnya ketika dikritik pun tak jadi soal. Namun kenyataan berbicara sebaliknya. Banyak penguasa tak kuasa menahan kritik. Alhasil, penguasa dengan kuasanya berlaku sewenang-wenang terhadap para pengkritik atau oposisi. Membunuh, menindas, menculik adalah jalan bagi penguasa yang tak kuasa menahan diri, penguasa yang tak kuasa mengendalikan kekuasaan. Rakyat acap tak kuasa membela hak yang terenggut oleh kekuasaan penguasa. Dalam khazanah Jawa ada peribahasa asu gedhe menang kerahe, orang besar (berpangkat) pasti menang dalam berperkara. Orang kecil, rakyat, pun tergilas. Cerita Ramayana, termasuk kasus penculikan di dalamnya, hanyalah fiksi. Namun dalam kenyataan hidup, penculikan benar-benar terjadi. Bukan fiksi, bukan karya sastra. Kasus itu menimpa orang-orang yang membela hak hidup mereka. Pada 30 Agustus, kita memperingati Hari Antipenghilangan Paksa Orang Internasional. Saya berharap peringatan itu bisa membuka mata dan menjembang telinga atas nasib para korban penghilangan. Itu tak sekadar kasus negara, tetapi lebih pada esensi kemanusiaan. Kita tak perlu menyikapi Hari Antipenghilangan Paksa Internasional dengan sikap takut atau makin takut mengkritik atau membela hak sebagai warga negara. Selama kritik itu berlandaskan kebenaran, kenapa takut? Toh pasukan Rama pun akhirnya memenangi pertarungan. Sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti, angkara murka akhirnya kalah oleh kebenaran. Semoga keadilan tak hanya ada dalam kisah Ramayana, tetapi benar-benar ada dalam kasunyatan, dalam kehidupan. Karena itu, berhati-hatilah menghadapi Rahwana lain di sekitar Anda.--- Danang Cahya Firmansah, pegiat Lingkar Studi Kebudayaan Indonesia. **	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

13.

Judul	‘Rekayasa dalam Pertarungan Kekuasaan’
Penulis	Sendang Mulyana
Edisi	Minggu (7 Oktober 2018)
Orang berburu kuasa ternyata tidak berbeda dari orang sakit. Betapa tidak? Kemana pun kaki melangkah, mereka minta tolong agar orang-orang sudi memilih. Pada saat yang sama muncul orang yang tampaknya ingin menolong, bersedia masuk dalam sistem, tetapi sebenarnya punya kepentingan tersendiri, dan acap kali akan membuat onar. Bidhung api rowang. Demi suara, pemburu kuasa membuka pintu lebar-lebar. Jarang ada berita seorang calon atau sebuah partai menolak dukungan. Siapa pun yang datang, bilang mau bersekutu, tak bakal ditolak. Tak heran, orang tersingkir dari satu partai bisa dengan gampang diterima partai lain. Mantan koruptor, maling, bergabung, silakan. Ideologi berseberangan, tak masalah. Alibi bisa dengan mudah diformulasikan. Kini, makin tereduksi pandangan bahwa kekuasaan adalah wahyu, turun dari langit atas kehendak Tuhan. Untuk memperoleh, orang perlu tapa brata, justru agar sakti perlu mengendalikan diri. Partai yang mengaku paling religius dan nasionalis pun sekarang menggunakan pola pemerolehan kekuasaan ala Barat modern yang bersumber kekuasaan hasil dari interaksi manusia dalam masyarakat. Masyarakat menjadi objek garapan yang dibungloni. Padahal, kalau mengaku paling religius tentu mengamalkan doktrin sejak dalam pemikiran, tidak ada kekuasaan, kecuali Tuhan berkehendak. Kalau mengaku paling nasionalis, tentu mengindahkan nilai kultural leluhur, kemandirian budaya bukan slogan semata. Boleh berebut massa, tetapi tetap menjaga karyenak tyasing sasama, menjaga suasana hati sesama. Kini, semua jadi bakul jamu. Prinsip bakul jamu: yang penting laku. Di sana bilang A, di sini bilang B. Mereka menjadi tumbak cucukan. Kata-kata menjadi barang dagangan, diolah, digoreng. Orang atau partai yang dibela akan selalu didewakan: wingka katon kencana. Sebaliknya, lawan politik akan selalu dikritik, diblejeti kejelekannya hingga kencana katon wingka. Dalam pandangan Jawa, kekuasaan (ratu) bersifat adikodrati dan transendental yang bersumber kekuasaan bukan semata-mata hasil dari hubungan antarmanusia dan kehebatan tim kemenangan, melainkan berasal dari Yang Maha Kuasa. Justru disadari sumber yang mendukung kekuasaan itu juga bersifat adi duniawi atau gaib dan spiritual. Wahyu, dalam konteks kultural Jawa, bukan firman kitab suci, melainkan pulung kekuasaan. Sesuatu yang sangat penting bagi seorang penguasa, karena melalui wahyu itulah penguasa mendapatkan legitimasi. Tanpa wahyu, kekuasaan terasa hambar, dianggap tidak berarti sama sekali. Tugas kekuasaan menciptakan keselarasan, keseimbangan, dan keharmonisan. Pada tingkat kekuasaan tertinggi, bahkan melingkupi antara dunia mikrokosmos dan makrokosmos, akan sempurna hanya jika penguasa memperoleh wahyu. Karena itu ratu (raja) dianggap pusat kekuatan spiritual bagi seluruh kerajaan, karena hanya rajalah yang dipercaya mampu menyedot kekuatan-kekuatan kosmis dari alam sekelilingnya. Namun, sekarang banyak pemimpin kemratu, berlagak laksana ratu, merasa paling saleh, wali, segala ucapannya akan terbukti, kata-katanya harus diindahkan para begundal, sabda pandhita ratu. Sayangnya, hanya lagak, pencitraan, sedangkan kesadaran menciptakan keselarasan, keseimbangan, dan keharmonisan hanya berhenti di lambe. Musim kampanye saat ini dipenuhi semangat pencitraan dan rekayasa lahiriah yang luar biasa dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Para pemburu kekuasaan abai pada wejangan leluhur bahwa tiang penopang kekuasaan terletak pada kekuatan-kekuatan tan kasat mata. Nunut Panggung Tiang penyangga kekuasaan sekarang tak lagi tan kasat mata, tetapi benar-benar tampak dan terletak di pundak tim sukses. Tim sukses terdiri atas orang-orang dari berbagai penjurur yang bersedia diajak bersekutu. Mereka serempak mengamalkan ungkapan: dalam jagat politik kekuasaan tak ada kawan dan lawan abadi. Yang terjadi, mereka berebut panggung. Setiap orang akan selalu berupaya keras ingin menonjol, berupaya dianggap pahlawan oleh bos besar. Perhatikan ekspresi renyah, lucu, tetapi mengharukan dari anggota tim sukses itu! Yakinlah, tak ada yang tanpa pamrih, meskipun mereka tak bosan meneriakkan kata ikhlas bersekutu dan mendorong. Setiap orang jelas memiliki motif pribadi yang tersembunyi. Artinya, suatu waktu seseorang mengerjakan sesuatu bukan karena harus bertindak begitu, melainkan karena kepentingan-kepentingan dan keinginan-keinginan pribadi terpenuhi dengan melakukannya. Kasus Ratna Sarumpaet menjadi tontonan menarik. Ia nunut panggung di tengah-tengah panggung besar Jokowi-Prabowo. Ia mengarang cerita sebagai korban aniaya. Lalu, banyak orang marah dan mengaitkan dengan rekayasa kuasa. Maka, di sela-sela gempa dan tsunami, terjadi pula banjir hujat dan banjir mohon maaf. Publik menilai apakah ada ekspresi penyesalan, rasa malu, dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kesalahan dan kebohongan itu telah mengakibatkan penderitaan banyak orang. Ingat, marah adalah penderitaan! Karebet pernah menyumpal kuping kerbau dengan tanah hingga kerbau itu mengamuk, membuat onar kehidupan Kesultanan Demak. Sultan mengadakan sayembara, siapa pun yang dapat menghentikan kerbau onar itu akan diguyur hadiah. Tak ada yang dapat menghentikan amukan kerbau itu, kecuali Karebet. Karebet naik kuasa. Rekayasa yang sempurna. Yang jelas, bila selama ini ada orang mengaku sebagai pejuang kesetaraan, keadilan, kemanusiaan, dan lain-lain sebutan yang gagah-gagah itu menjelma jadi kerbau yang bikin onar, siapa penyumpal tanah pekuburan di kupingnya? - Sendang Mulyana, dosen sastra dan budaya Universitas Negeri Semarang. **	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

14.

Judul	'Membangun Markas Batin Jawa'
Penulis	Sendang Mulyana
Edisi	Minggu (16 Desember 2018)
Calon presiden yang mendapat suara terbesar di Pulau Jawa berpeluang besar menjadi pemenang, sebab 58 persen pemilih berada di pulau seluas 126.700 km² ini. Markas-markas kemenangan dibangun bertebaran. Namun apakah mereka menjadikan nilai Jawa sebagai laku atau sekadar basis persepsi politik untuk mengeruk suara? Perilaku politik memang kadang paradoksal dan menjengkelkan. Di satu sisi, mereka berteriak betapa penting menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan modernitas. Di sisi lain, demi pengerukan suara, justru membangun basis persepsi politik konvensional. Akibatnya, Jawa keteplokan awu anget: kekuasaan dikendalikan dari Jawa, struktur kekuasaan didominasi orang Jawa, konsep demokrasi dan kekuasaan nasional didominasi konsep kekuasaan Jawa. Hal itu tidak lepas dari pengaruh kekuasaan Soeharto yang begitu lama. Pada masa kepemimpinan Orde Baru, orang-orang di luar etnik Jawa berusaha keras menyesuaikan diri dengan sesuatu yang dipahami sebagai tradisi dan budaya Jawa demi pendekatan kekuasaan. Padahal, distorsi pemahaman tentang budaya Jawa kerap kali terjadi, bahkan sampai kini. Budaya Jawa dipandang paling unggul dibandingkan dengan budaya lain. Distorsi pemahaman itu justru menumbuhkan kecemburuan antaretnik dan budaya. Kecemburuan bersekutu dengan sentimentalisme kesukuan, kesenjangan ekonomi, dan sosial sehingga bisa membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Padahal, pembangunan basis persepsi politik kekuasaan Jawa yang cenderung penuh dengan pencitraan dan bersifat fisik itu sama sekali tidak menguntungkan manifestasi kesejatan nilai-nilai budaya Jawa. Sebab, kenyataannya, dalam praktik kekuasaan pilar-pilar budaya Jawa, seperti wedi, isin, sungkan, rukun, urmat, eling lan waspada tidak diamalkan. Makna nilai-nilai budaya itu bila dikomunikasikan dengan baik tidak berbeda dari nilai-nilai universal kemanusiaan yang dijunjung tinggi seluruh umat manusia di seluruh dunia internasional. Dengan demikian, keadiluhungan budaya Jawa justru terletak pada keluwesan menerima pengaruh dari budaya lain, sekaligus menghormati eksistensi budaya lain tidak kalah tinggi nilainya. Katanya sekarang adalah era milenial. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menghapus sekat-sekat geografis. Jika demikian, kenapa mesti mengedepankan pembangunan persepsi politik kekuasaan yang bersifat fisik, gardu-gardu keangkuhan yang cenderung provokatif, ketimbang yang berbasis komunikasi makna antarbudaya? Markas Batin Pembangunan markas batin jauh lebih penting dilakukan ketimbang riuh mendirikan markas lahir. Situasi rukun harus diciptakan untuk menjaga keselarasan dan keharmonisan sosial yang berarti keadaan ideal dalam masyarakat tetap dipertahankan. Pendirian posko-posko kemenangan di basis lawan berpotensi memunculkan kekacauan dan kegalauan, butheg banyune ora kena iwake. Hujat-hujatan, srekal-srekalan, pongah-pongahan, bahkan saleh-salehan sekarang dipertontonkan oleh kekuatan politik kekuasaan. Padahal, budaya Jawa menghindari konflik secara terbuka atau terang-terangan. Dalam upaya menjaga keselarasan sosial, perlu bersikap menyesuaikan diri, sopan-santun, kerja-sama, menghormati pihak lain. Demi rukun dan mementingkan hubungan atau kelancaran interaksi, bersikap pura-pura hadap sesama dilakukan. Kepura-puraan sebagai cara yang baik untuk menghadapi keadaan tertentu yang menyusahkan, dan merupakan suatu seni yang tinggi dan positif; serta di luar keluarga inti, orang tidak akan memperlihatkan perasaan-perasaan negatif. Hal yang perlu diperhatikan tentu adalah signifikansi sebuah perkara yang perlu disikapi secara ethok-ethok atau pura-pura itu. Kelihaihan memilah dan memilih perkara yang perlu diethok-ethoki atau tidak bisa menghindari sikap lamis. Bila di dalam benak para petualang kekuasaan itu didirikan posko wedi, isin, sungkan, rukun, dan urmat, akan lahir kehalusan demokrasi. Kehalusan selalu diidentikkan dengan budaya Jawa. Penting membentuk pola tindak-tanduk yang wajar, yang perwujudannya berupa pengekangan emosi dan pembatasan antusiasme serta ambisi. Menyakiti dan menyinggung orang atau pihak lain dipandang sebagai tindakan kasar. Kekasaran itu justru bisa kontraproduktif. Maksud hati ingin memperoleh simpati, justru yang diperoleh malah antipati. Masyarakat pemilih lelah dan mual. Lalu, kepada siapa masyarakat berteduh ketika lingkungan riuh dengan gardu-gardu pongah bangunan persepsi politik kekuasaan? Padahal, di rumah para tokoh berpengaruh pun sudah didirikan bangunan politik kultus? Ah, mari kita tetap eling lan waspada sambil nembang Suluk Linglung Sunan Kalijaga berikut: Ana ingkang adadi ing peksi/amung mulih pencokan kewala, kayu kang becik warnane/arsa aneng nagasan-tun/ana tanjung ana waringin/temah ing pinggir pasar/engkuk mangkruk-mangkruk/angungkuli wong sapasar/pindha kamukten sepele kang pin-urih/kasasar ambelasar. Betapa merisakan fenomena saat ini. Para tokoh yang sedianya dijadikan panutan justru laksana burung yang hanya mencari tempat bertengger di pohon rimbun, berbuah lebat, dan berbatang kuat. Untuk kemudian menjalani hidup baru, melebihi posisi masyarakat umum. Mereka puas memperoleh kemuliaan semu, yang sejatinya sepele dan naif! (Sendang Mulyana, dosen sastra dan budaya Universitas Negeri Semarang).	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

15.

Judul	‘Kuasa, Bencana dan Budaya’
Penulis	Sendang Mulyana
Edisi	Minggu (27 Januari 2019)
Pemimpin sejati memiliki kekuatan batin tinggi. Kepemimpinannya membuat masyarakat dan alam selaras sebagai manifestasi kemampuan menjaga energi dalam kosmos. Bila acap cemas dan mencemaskan, ia pemimpin <i>gobal-gabul</i>. Pemimpin <i>gobal-gabul</i> itu untuk menyebut pemimpin yang suka merekayasa citra. Artinya, benar-benar mengandalkan wujud fisik sebagai penampakan dan pencitraan. Agar dikira gagah nan perkasa, naiklah kuda. Agar dikira merakyat, blusukanlah ke selokan, sawah, pasar memborong kerupuk lalu membagi-bagikan pada acara penuh sentimentalisme picisan. Agar bercitra religius, bersorbanlah ngalor-ngidul, intensif berangkulan dengan para pemuka agama. Berbeda dari pemimpin <i>gobal-gabul</i>, pemimpin sejati <i>kadunungan</i> realitas adikodrati. <i>Satriya pinilih, kadunungan</i> wahyu kepemimpinan. Dengan demikian, kita dapat melihat banyak realitas sakral berkumpul di sekitarnya, sebagai bentuk pengumpulan kekuasaan. Misalnya, kekuasaan keraton dikitari upacara adat, berbagai benda pusaka, dan tempat yang dianggap sakral. Masalahnya, pada zaman <i>now</i> nan milenial ini dari mana pemimpin seperti itu datang? Mungkinkah datang dari proses demokrasi? Padahal, para pemain politik, demokrasi saat ini orang-orang berduit, pemimpin organisasi kemasyarakatan, petualang asal beda, atau dinasti politik yang cenderung primordial dan feodalistik. Pada tingkat institusi, muncul juga pertanyaan: apakah pemimpin diangkat lantaran kelayakan dan kekuatan lahir-batin atau kenekatan menyogok atasan dan kebetulan tidak konangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Maka, terjadinya bencana banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain sering dikaitkan dengan ketiadaan kekuatan batin dari pemimpin yang belum mampu mengendalikan kekuatan makrokosmos (<i>jagad gedhe</i>) dan mikrokosmos (<i>jagad cilik</i>). Pada skala kecil kepemimpinan institusional, muncullah suasana sumpek, curiga-mencurigai, <i>njelehi, karut-marut</i>. Prinsip keselarasan semestinya ditegakkan oleh pemimpin sejati yang dapat menjaga diri dari dua bahaya, yakni nafsu dan egoisme. Syahwat besar berkuasa dan egoisitas <i>kumawasa</i> akan memperlemah kekuatan batin pemimpin untuk mengontrol sisi halus dirinya dan cenderung berbuat yang tak terkendali, mengobrak-abrikan hingga akhirnya merusak ketenteraman dan keselarasan. Rakyat hanya bisa bilang <i>sakarepmu</i> dan diam-diam menunggu kehancuranmu; alam yang akan menghukummu! Kebalikan Bisa juga terjadi sebaliknya, bencana melanda lantaran rakyat tidak menjunjung tinggi pemimpin, padahal sang pemimpin telah berkekuatan batin tinggi. Seperti dilukiskan dalam Serat Kalatidha karya Ranggawarsita: <i>Ratune ratu utama/Patihe patih linuwih/Pra nayaka tyas raharja/Panekare becik-becik/Paranedene tan dadi/Paliyasing Kala Bendu/Mandar mangkin andadra/Rubeda angrebudi/Beda-beda ardaning wong saknegara</i>. Sebenarnya rajanya termasuk raja yang baik. Patihnya juga cerdik, semua anak buah berhati baik, pemuka-pemuka masyarakat baik, tetapi segalanya itu tidak menciptakan kebaikan, lantaran daya zaman <i>Kalabendu</i>. Bahkan kerepotan-kerepotan menjadi-jadi. Lain orang lain pikiran dan maksud mereka. Kini zaman milenial, bukan zaman <i>Kalabendu</i>. Namun, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat memperoleh informasi cepat tanpa sekat. Tanpa saringan, masyarakat melahap segenap informasi itu, <i>nggebyah-uyah</i>. Akibatnya, justru banyak orang <i>rumangsa</i> bisa. Paling gampang menyalahkan, <i>maidu</i>, menghujat, gampang mencibir pemimpin. Ada legenda menggelitik berikut. Diceritakan, Sultan Agung, raja besar Mataram, mempunyai seekor gajah tunggangan, Kiai Dwipangga. Perawat gajah itu adalah Ki Sapa Wira. Setiap pagi Ki Sapa Wira memandikan si gajah di sungai tidak jauh dari Keraton Mataram. Suatu hari Ki Sapa Wira menderita sakit bisul di ketiak. Ia tidak bisa bertugas seperti biasa. Oleh karena itu, ia menyuruh adik iparnya, Kertiyuda, untuk sementara menggantikan dia bertugas. Ki Sapa Wira mewejang agar Kiai Dwipanggamanut, dia perlu memberi kelapa muda, membiarkan sejenak si gajah makan lebih dahulu sebelum memandikan. Jika gajah itu tidak mau berendam, tepuk kaki belakangnya dan tarik ekornya. Perlu menggosok badannya dengan daun kelapa untuk menghilangkan kotoran yang melekat. Kertiyuga segera menjalankan semua pesan Ki Sapa Wira. Setiba di sungai dia tepuklah kaki belakang dan dia tarik ekor gajah itu. Gajah itu pun akhirnya berendam. Kertiyuda segera membersihkan tubuh gajah dengan daun kelapa. Setelah badan gajah itu bersih, Kertiyuda lalu membawa gajah itu kembali ke kandang. Selesai memandikan Kiai Dwipangga, Kertiyuda lalu menemui Ki Sapa Wira untuk melaporkan tugasnya telah selesai. Keesokan hari Kertiyuda kembali datang dan menemui kakak iparnya. Ia telah bersiap kembali memandikan gajah Kiai Dwipangga. Cuaca ketika itu mendung. Kertiyuda lantas membawa gajah besar itu menuju ke sungai. Air sungai surut di tempat kemarin Kertiyuda memandikan Kiai Dwipangga. Kedalaman air sungai tidak cukup untuk menjadi tempat berendam Kiai Dwipangga. Sejenak berpikir, Kertiyuda akhirnya membawa Kyai Dwipangga ke arah hilir sungai. Ia mencari genangan air sungai yang cukup untuk berendam gajah itu. Sambil melakukan hal yang sama seperti kemarin, Kertiyuda menggerutu. Menurut dia, sungai itu tidak cukup besar untuk memandikan gajah, terlebih-lebih untuk memandikan gajah besar seperti Kiai Dwipangga. Dalam gerutuan ia menyalahkan Sultan Agung. "Dasar orang aneh!" "gerutunya Tiba-tiba datang banjir bandang menyapu segala yang ada di sungai itu, termasuk Kertiyuda dan gajah Kiai Dwipangga yang tidak sempat naik kedaratan. Sultan Agung sangat sedih. Untuk mengenang gajah dan wong yang hanyut di sungai itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Anda tentu boleh mencurigai dan mendebat (mumpung lagi riuh tentang debat-debut), jangan-jangan cerita itu dikonstruksi untuk menakut-nakuti rakyat yang suka <i>ngrasani</i> penguasa? Awas, jangan <i>ngrasani</i>, apalagi mengkritik penguasa. <i>Kuwalat!</i> Yang jelas, setiap datang bencana, rakyatlah yang menderita, bukan penguasa. Dan, dimensi budaya belum dioptimalkan menjadi strategi penanggulangan bencana itu. (28)- Sendang Mulyana, dosen sastra dan budaya Universitas Negeri Semarang.	

Sumber: Dokumentasi Pribadi

16.

Judul	‘Politik Umuk dan Kemaruk’
Penulis	Sendang Mulyana
Edisi	Minggu (10 Februari 2019)
Banyak pelaku politik tanggap menerima kekuasaan, lantas berperilaku membelakangi akal sehat dan menampilkan diri sebagai manusia kemaruk yang gila hormat. Itu kata Cornelis Lay pada pidato pengukuhan guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Ia menyindir kaum intelektual yang terjebak manis dan gurih hidup di lingkaran politik kekuasaan. Pada mulanya, istilah kemaruk disematkan pada seseorang yang sesudah sembuh dari sakit selalu ingin makan. Lantas, ditarik benang karakteristiknya, kemaruk dilekatkan pula pada seseorang yang bertingkah berlebih-lebihan lantaran tiba-tiba menjadi kaya. Selanjutnya, orang kemaruk selalu ingin mendapatkan banyak, rakus, mengisap, mengandalkan aji mumpung. Demi itu, kemaruk bersekutu sempurna dengan dume. Bukan hanya soal makan, kemaruk bisa hinggap di ranting-ranting politik kekuasaan. Ketika ngregem kekuasaan, seseorang bisa dihindangi sifat kemaruk, lalu menepikan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan, hingga akhirnya tergiur menempuh jalan pintas dengan menggadaikan kualitas kepemimpinan demi menancapkan kuku-kuku arogansi kekuasaan. Maka, pemimpin kemaruk senantiasa berupaya membuktikan kemampuan dalam membungkam mulut kritis, mengepras benih-benih idealisme. Pejabat atau penguasa yang kemaruk mengedepankan keakuan, lupa diri, enggan introspeksi. Kalau tidak dihormati marah, kalau mengunggah status dan tidak memperoleh respons signifikan dari anak buah, ia muring. Laku kuasanya menunjukkan aji mumpung dan dume. Nilai humanistik lepas dari dinding nuraninya. Bahkan dengan pongah menghina orang-orang yang ia anggap di bawahnya; pelecehan dibalut canda, sebab korban akan diam saja. Pemimpin kemaruk mungkin saja wasis bicara etika keselarasan, tetapi tidak dalam laku dan kebi-jakan. Logika demokrasi dia hancur-leburkan dengan dalih menjaga integritas. Kepemimpinan tenggang rasa dia kesampingkan, meskipun setiap saat membuncahkan kata-kata kepedulian. Maka, tingkahnya pun kecanduan selfi kepahlawanan. Siapa pun bisa terjangkiti penyakit kemaruk. Jangan-jangan fenomena politik kita saat ini pun dipenuhi kekemaran. Kemaruk berkuasa, lalu menyingkirkan orang-orang yang berpotensi mengganggu kekuasaannya. Kemaruk kaya lalu bolak-balik mencalonkan diri, enggan memberi kesempatan pada orang lain yang mestinya lebih layak. Kemaruk menjadi pemimpin partai politik, organisasi kemasyarakatan besar, mayoritas, lalu mendikte kekuasaan, hukum, dan mengeluarkan pernyataan yang meresahkan masyarakat lantaran merasa balane akeh. Penguasa media massa kemaruk dengan menjejakkan promosi diri, partai, dan keberpihakannya, abai terhadap praktik kode etik jurnalistik. Kemaruk minoritas pun bisa terjadi dengan senantiasa mengelola sentimentalisme picisan dan perasaan tertindas. Jika demikian, betapa kehidupan demokrasi kita masih sakit. Yang terpilih bukanlah orang yang layak, melainkan orang-orang kemaruk, yang dume dan lihai memainkan aji mumpung. Lupa Akar Kisah pewayangan Sumantri-Sukrasana dapat kita jadikan cermin bahwa orang kemaruk adalah orang yang tidak eling. Dikisahkan. Sukrasana bertemu kakaknya, Sumantri. Sang kakak menceritakan proses pengabdianya pada Prabu Arjuna Sasrabahu sehingga diangkat menjadi patih di Negara Maespati setelah berhasil mempersembahkan Dewi Citrawati pada sang raja. Namun, kemudian ia lupa diri, pongah. Raja titisan Wisnu itu sangat marah, sehingga Sumantri Suwanda bertekuk lutut. Sebagai hukuman atas kepongahannya itu, ia dipecat. Ia akan diampuni bila dapat memindah Taman Sriwedari dari Kahyangan Untarasagara ke Maespati. Sumantri tidak mampu. Sukrasana sanggup membantu, tetapi sebagai imbalan: Sumantri harus berjanji tidak akan lagi meninggalkannya. Sukrasana ingin selalu dapat bersama kakaknya, tak mau berpisah lagi. Sumantri menyanggapi. Dengan ilmunya, hanya dalam waktu semalam Sukrasana dapat memindah Taman Sriwedari ke Maespati. Berkat bantuan adiknya, Sumantri dapat meraih kembali jabatannya. Kepada rajanya, Sumantri tidak menyebut nama adiknya yang sebenarnya telah berjasa melaksanakan tugas itu. Tak masalah bagi Sukrasana. Dia amat bahagia karena dapat membebaskan sang kakak dari kesulitan. Ia membayangkan, sesudah pertolongan itu tentu Sumantri tidak akan pernah lagi meninggalkannya. Prabu Arjuna Sasrabahu diiringi Permaisuri Dewi Citrawati dan sekalian dayang istana berkunjung ke Taman Sriwedari. Sukrasana bersembunyi di balik rumpun bunga di taman itu. Ketika melihat kakaknya ikut rombongan itu, Sukrasana lupa: seharusnya ia tetap bersembunyi. Sumantri keluar dari persembunyian dengan segala kekumuhannya, manja, gembira menyambut sang kakak. Dewi Citrawati dan para dayang menjerit panik. Mereka takut dan jijik melihat tampilan Sukrasana. Menyaksikan keadaan itu, Sumantri bertindak cepat. Segera dia peluk sang adik dan menarik menyingkir ke dalam hutan. Di dalam hutan, Sumantri dengan kesal menyalahkan adiknya, mengapa keluar dari persembunyian sehingga membuat kacau keadaan. Sumantri membujuk Sukrasana agar pulang ke Pertapaan Argasekar. Namun Sukrasana menolak. Akhirnya Sumantri kehabisan akal. Ia mengambil anak panah pusaka dan mengarahkan ke dada adiknya. Sambil menakut-nakuti dengan panah, Sumantri meminta adiknya pergi. Namun Sukrasana tetap pada pendirian. Sambil menangis Sukrasana mengingatkan Sumantri akan janjinya. Karena jari yang berkeringat, panah yang terbidik ke dada Sukrasana lepas tanpa sengaja. Anak panah melesat dari busur, menembus dada Sukrasana. Tragis! Sukrasana tak bermental kemaruk. Ia mampu melenyapkan seluruh ego dan superegonya. Ia hanya ingin membawa kemaslahatan, mempercantik negeri, tak ingin dipuji atau merampas simpati. Sumantri atau Patih Suwanda, di balik pepujian guma, kaya, dan purun seperti dilukiskan dalam Tripama, sebenarnya belum mampu melepaskan diri dari segala pencitraan, yang tak lebih dari kostum untuk menutupi berbagai kelemahan dan kekhawatiran. Mengharukan memang bila kaum intelektual di dalam lingkaran kekuasaan menjadi kemaruk. Lebih mengharukan lagi, kaum intelektual yang belum ke bagian pun hanya bisa menunduk pada pemimpin kemaruk! -Sendang Mulyana, dosen sastra dan budaya Universitas Negeri Semarang.	

Sumber: Dokumentasi Pribadi

17.

Judul	'Gagal Memilih <i>Ugul-Ugul</i> '
Penulis	Sendang Mulyana
Edisi	Minggu (24 Maret 2019)
Salah satu upaya menutupi kekhawatiran dan ketakutan adalah berkerudung di balik kekuatan dan kekuasaan besar. 'Kekudhung walulang macan'. Namun segalanya menjadi runyam ketika kerudung itu tersingkap. Ungkapan (paribasan) 'kekudhung walulang macan' digunakan untuk menyebut seseorang, sekelompok orang atau organisasi yang berlindung di balik orang atau mungkin juga organisasi yang memiliki kekuasaan atau pengaruh besar. "Kekudhung" adalah bentuk reduplikasi (pengulangan) kata 'kudhung' yang berarti 'berkerudung' berlapis-lapis, berulang-ulang. Dalam kehidupan yang katanya sudah berdemokrasi, tetapi ternyata masih bermental primordial, ungkapan itu cocok dialamatkan pada orang yang memuja syahwat keinginan dengan memanfaatkan kekuasaan dan pengaruh besar orang lain. Korupsi, kolusi dan nepotisme lahir dari rahim ungkapan itu. Tataan bersifat normatif atau objektif bisa ditabrak dan menjadi rusak. Kasus seorang pemimpin partai yang tertangkap basah oleh KPK dapat dijadikan kaca benggala. Lantaran merasa terlindungi oleh kekuatan besar, kadang orang yang berkudung wawulang macan itu lupa diri. Ia merasa tak akan ada yang berani menyentuh. Hukum akan sulit menjerat dia. Ia merasa menjadi macan hebat, kuat, luar biasa, dahsyat, memesonakan. Ia ugul-ugulan kepada orang-orang yang dapat dikendalikan, diatur, dimainkan sedemikian rupa. Ia lupa wewanti 'yitna yawana, lena kena'. Macan betulan dan macan-macanan tentu berbeda. Di jagat fabel, macan adalah raja hutan, berkharisma dan berkepribadian kuat yang membuat rakyat hutan menjunjung tinggi, bahkan di alam imajinasi. Bayangkan meski keberadaan macan di hutan saat ini makin langka, bahkan malah banyak hutan sudah tak ada lagi macan, eksistensi macan tetap disebut-sebut sebagai macan hutan. Orang yang berkerudung 'walulang macan' pelan-pelan menahbiskan diri, mendaku jadi macan. Tingkah polahnya mengobrak-abrik tatanan, mengintervensi wilayah yang dianggap kekuasannya untuk menegakkan eksistensi. Jadilah macan-macanan. Di antara macan betulan, ada banyak macan-macanan. Ironisnya kebanyakan macan-macanan malah saling mengintai untuk saling menjatuhkan. Ketika sudah jatuh, sepi dalam jeruji besi, baru sadar: mungkin mereka merasa gagal memilih 'agul-agul'. Siapakah macan itu? Saat ini yang menjadi macan beraneka macam. Yang paling lazim dijadikan macan adalah jabatan. Meski banyak orang beretorika jabatan adalah amanah, dalam realitas politik jabatan identik dengan kekuasaan. Jabatan presiden, gubernur, bupati, lurah, petinggi partai politik dan lain-lain sering dicatut para penipu untuk melancarkan aksi. Mungkin tidak secara langsung dengan mengatakan mereka sebagai utusan, tetapi secara halus membuat citra; mencitrakan diri sebagai orang dekat presiden dan lain-lain. Tokoh-tokoh spiritual dan intelektual hebat juga bisa menjadi macan lantaran memiliki pengaruh besar ke masyarakat. Maka jangan heran para politikus 'sregep sowan' kepada mereka untuk mendukung suara. Dalih mereka macam-macam. Misalnya minta doa restu. Atau sekalian merayu mereka untuk bergabung dalam gerbong kekuasaan, tanpa 'tedheng aling-aling'. Organisasi kemasyarakatan besar juga bisa menjadi macan. Kita saksikan saat ini banyak orang menjadikan organisasi kemasyarakatan besar sebagai kerudung untuk berburu kekuasaan. Para pemburu kekuasaan memanfaatkan organisasi yang semula diniatkan untuk memberdayakan umat. Yang paling naif, misalnya mereka mengalami permasalahan hukum, bisa berlindung pada organisasi itu. Nasib Sial Semula berkerudung 'wawulang macan' barangkali dapat menakut-nakuti banyak orang. Akan tetapi, sangat berbahaya jika terpeleset atau bernasib sial. Dalam lakon Andum Waris, ketoprak serial Saridin produksi sri kencana yang sangat populer di pati dan sekitarnya, diceritakan saridin menuntut hak waris. Ki branjung yang penakut tapi rakus tak mau membagi kebun durian berdasarkan luas, tetapi memilih berdasarkan waktu. Bila durian jatuh siang hari menjadi hak ki branjung, bila rontok malam hari hak saridin. Saridin 'manut' saja atas keinginan dan keputusan ki branjung. Keberkahan selalu bersemayam dalam jiwa yang ikhlas. 'Nrima ing pandum'. Ternyata durian berjatuh pada malam hari. Berkah milik saridin. Ki branjung panas hati, iri dengki. Terdorong kedengkian itu, ia mengambil jalan pintas, berbuat nista dengan mendandani diri sebagai macan. Maksud hati agar saridin lari terbirit-birit, sehingga ia sangat leluasa mencuri durian. Saridin memang bukan pemberani, apalagi sok berani. Akan tetapi, sekurang-kurangnya ia bukan penakut. Ia mengintai dan berhasil menombak perwujudan yang ia sangka macan. Alangkah terkejut, setelah dia singkap, ternyata itu macan-macanan. Saridin telah membunuh sang kakak ipar. Masalah menjadi runyam lantaran berurusan dengan hukum. Tabiat orang yang berlagak sebagai macan atau berkerudung 'walulang macan' sebenarnya membahayakan diri sendiri. Sekali dua kali barangkali lancar jaya dalam aksi tipu-menipu. Namun 'wong begja ora kurang dolan, wong cilaka uga ora kurang dolan'. Keberuntungan bisa datang tak terduga, kesialan pun tak kurang marga. Yang di'agul-agul'kan tidak selamanya dapat diandalkan. Dalih 'dijomporongke liyan' ketika mengalami kesialan hanya akan ditertawakan banyak orang. Yang terbaik tentu 'eling lan waspada'. Namun bukan berarti waspada dalam polah tingkah menipu agar tak 'korangan', melainkan senantiasa ingat: Tuhan Maha Tahu, sehingga sadar akhirnya tak guna menipu. Mari kita senandungkan lirik lagu rhoma irama tentang di balik kerudung: tapi yang menyilaukan masa/sinar keimananmu yang selalu kau pancarkan/dalam setiap langkah. (Sendang mulyana, dosen sastra dan budaya Universitas Negeri Semarang).	

**

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

18.

Judul	'Memburu <i>Pulung</i> Kekuasaan'
Penulis	Sendang Mulyana
Edisi	Minggu (7 April 2019)
Ingar-bingar kampanye membuka mata kita, ternyata keluhuran budaya hanya ada di arena retorika. Perilaku kasar nan vulgar, menyakiti, dan menyinggung orang lain, membuncih tidak keruan demi meraih kekuasaan. Perilaku <i>ora njawani</i> itu mereduksi pandangan tentang dominasi budaya Jawa terhadap pembentukan budaya politik nasional. Padahal, budaya Jawa mengedepankan laku halus (alus) yang bertujuan membentuk pola tindak-tanduk yang wajar, menjejawantah dalam pengendalian emosi, antusiasme, dan ambisi. Malu (isin), segan (sungkan), dan hormat menjadi karakteristik manifestasinya. Kita saksikan betapa mereka yang sedang berkampanye itu tidak malu, bahkan pada diri sendiri. Dari hal paling sederhana, misalnya aneka rupa poster yang dimuda-mudakan, diwibawa-wibawakan, disangar-sangarkan, diganteng-gantungkan, dicantik-cantikkan, jargon-jargon gegendhen empyak kurang cagak, sampai dengan tidak mawas diri atas kapasitas yang dimiliki. Kita saksikan betapa mereka tidak sungkan membejejeti aib lawan, bahkan mengumbar warta dusta. Etika dan kewibawaan korps ditabrak. Santri yang politikus tak sungkan menyeret-nyeret sang kiai. Kepala negara dan kepala daerah, yang mestinya berlaku sebagai ratu, tak sungkan menggunakan kekuasaan untuk kemenangan pihak tertentu, abai terhadap penegakan keadilan dan pengayoman. Kita saksikan betapa sikap hormat telah dibuang ke tengah laut. Semangat membabi-buta mendiskreditkan lawan, bahkan sampai melecehkan dan mengumpat menjadi tontonan harian. Percuma ada penguatan karakter di ruang pembelajaran bila di lapangan kehidupan hal itu diporak-porandakan. Kita rindu pemimpin yang tenang nan berwibawa. Ketenangan sikap merupakan refleksi perilaku halus, diwujudkan dengan pengendalian diri yang bagus. Kewibawaan bisa tercapai dengan bersikap tenang di muka umum, yaitu dengan memusatkan kekuatan diri. Pribadi yang berwibawa adalah pribadi yang tenang, tidak banyak tingkah, tidak sibuk merangkai pencitraan. Wahyu Cakraningrat Namun, kekuasaan dan kekayaan memang menjadi magnet yang dapat menuntun kesetiaan dan ketaatan orang-orang. Keriuhan kampanye menjadi tontonan kontradiktif, yakni di satu sisi selalu berusaha berlaku halus, tidak terus terang, bilang jabatan hanyalah amanah, tak haus kekuasaan, sekadar menjalankan tugas, tetapi di sisi lain sering bertebal muka, rai gedhek, terhadap kritik. Maka, sejak masa kampanye, perburuan kekuasaan, telah subur watak ketergantungan yang kuat pada (calon) atasan serta ketaatan berlebihan pada kekuasaan, sebab status dipandang sebagai kewibawaan dijunjung begitu tinggi Dalam jagat pewawangan ada lakon Wahyu Cakraningrat. Tiga satria, yakni Lesmana Mandrakumara, Samba Wisnubrata, dan Abimanyu, berusaha memperoleh wahyu kekuasaan, yang disebut Wahyu Cakraningrat. Untuk mendapatkan wahyu itu tidak mudah karena mereka harus laku tapa brata yang berat di Hutan Krendayana. Wahyu Cakraningrat bergerak menguji Lesmana Mandrakumara dengan menjelma sebagai harimau. Namun, Lesmana Mandrakumara, anak raja yang biasanya dimanjakan fasilitas itu, terbitir-birit ketakutan. Wahyu Cakraningrat kemudian bergerak menguji Raden Samba dengan mengubah wujud menjadi seekor ular besar. Ia mengibas-ngibaskan ekor ke tubuh Samba. Samba tidak membuka mata sama sekali dan tetap tekun bertapa. Ular naga itu makin ganas membelit tubuh Raden Samba dan membantingnya ke sana-kemari. Samba tetap teguh. Tubuh naga musnah dan berubah menjadi cahaya, lalu masuk merasuk ke dalam tubuh Samba. Setyaki yang menyaksikan dari jauh segera datang membangunkan Samba. Setyaki memberikan selamat karena keponakannya itu telah mendapatkan Wahyu Cakraningrat. Samba bangga. Ia berkoar, ramalan ayahnya ternyata meleset. Prabu Kresna, ayah Samba, sebelumnya memang meramal Abimanyu yang akan memperoleh wahyu. Ternyata dia yang mampu menjadi wadah bersemayam Wahyu Cakraningrat. Setyaki menasihati keponakan nya agar jangan gegabah, apalagi memandang rendah sang ayah. Wahyu Widayat yang melihat Wahyu Cakraningrat telah bersemayam di dalam tubuh Samba berniat menguji apakah Samba adalah wadah yang tepat atau tidak. Maka, Wahyu Widayat pun mengubah wujud menjadi seorang gadis desa yang sangat cantik, berjalan mendekati Samba dan Setyaki. Samba tergoda, sedangkan Setyaki curiga. Setyaki lalu menawarkan diri untuk mengantar gadis itu pulang, tetapi Samba justru melarang sang paman ikut campur. Setyaki menasihati Samba agar berhati-hati karena setelah mendapatkan Wahyu Cakraningrat bukan berarti ujian telah berhenti. Samba justru marah-marah dan memaki Setyaki cerewet hendak mengganggu kesenangannya. Samba menganggap telah mendapat Wahyu Cakraningrat, maka wajar jika sekarang menjadi orang terpandang dan banyak perempuan ingin mendekati. Gadis itu merasa risi melihat sikap genit dan cluthak Samba. Ia melangkah pergi, tetapi Samba mengejar dan berniat memaksa. Gadis itu tiba-tiba berubah wujud menjadi makhluk mengerikan. Samba terkejut dan klenger. Saat itulah Wahyu Cakraningrat loncat, keluar dari tubuhnya. Wahyu Cakraningrat bergerak menguji Abimanyu dengan menjelma sebagai gajah liar. Gajah itu lalu mengulurkan belalai dan membelit tubuh Abimanyu, dan mengangkat tinggi-tinggi. Namun Abimanyu tetap tenang dalam semadi. Gajah liar itu berhenti dan mengembalikan Abimanyu ke tempat semula. Tubuh gajah musnah dan berubah menjadi cahaya, lalu masuk ke tubuh Abimanyu. Wahyu Widayat menguji hal yang sama seperti ketika menguji Samba. Akan tetapi Abimanyu tak gampang kena goda. Ia lulus dan wahyu kekuasaan nyaman bersemayam padanya. Kampanye dan pencitraan membabi-buta akan sia-sia tanpa penggemblengan diri. Dalam perspektif budaya, Wahyu Cakraningrat tidak kuat menempati tubuh dan jiwa yang ringkih, penakut. Pulung kekuasaan tak sudi mengikuti orang congkak dan cluthak. Ia akan bersemayam nyaman dalam jiwa yang istikamah menjunjung tinggi kebenaran, kehormatan, dan kemanusiaan. Namun, jangan-jangan pulung itu tidak jatuh dari langit, tetapi menyelip di dalam amlop? Bila itu terjadi, kekuasaan macam apa yang dapat diharapkan? -Sendang Mulyana, dosen sastra dan budaya Universitas Negeri Semarang. **	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

19.

Judul	'Metafora yang <i>Gegabah</i> dan <i>Sewiyah-Sewiyah</i> '
Penulis	Sendang Mulyana
Edisi	Minggu (25 Agustus 2019)
Sebagai titah yang kadunungan akal budi, manusia mengolah dan mengelola simbol dalam lingkup kebudayaan sehingga (semestinya) dapat menimbang baik-buruk, benar-salah, atas segala ucapan, kelakuan, dan tindakan. Bila kehilangan kepekaan dan kesadaran simbolik, manusia yang mendaku diri sebagai sampurnaning titah itu hanya akan pamer pongah. Karena itulah, wewanti aja dumeuh dan mulat sarira hangrasa wani senantiasa didengungkan dalam kehidupan masyarakat dan budaya Jawa. Aja dumeuh adalah peringatan kepada kita: jangan takabur dan sombong, jangan mementingkan diri sendiri. Mulat sarira hangrasa wani, mawas diri, intropeksi diri adalah sikap bijaksana untuk karyenak tyasing sasama, sekurang-kurangnya berusaha tidak menyakiti perasaan orang lain. Belum kering dari perbincangan soal cebong dan kampret dalam ingar-bingar pemilihan presiden yang lalu, kita tersentak oleh ungkapan metaforis yang menghina, melecehkan, saudara-setanah air: Papua. Meski yang melecehkan hanya segelintir orang yang mengalami tunabudi dan tunarasa, pengaruh media sosial telah memperunyam suasana kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Siapa pun tentu tak bakal terima bila eksistensinya dibandingkan dengan binatang, lebih-lebih bila perbandingan itu memandang rendah dan hina dengan menyebut orang lain sebagai coro, kera, monyet, babi, anjing, dan lain-lain. Pada zaman penjajahan, metafora monyet yang merendahkan itu sering digunakan kaum penjajah tertuju pada pribumi. Dalam berbagai hal, manusia memang ada kemiripan dengan binatang. Akan tetapi, seperti kata Aristoteles, manusia adalah hewan yang berakal sehat, yang mengeluarkan pendapat, yang berbicara berdasarkan akal-pikirannya. Manusia yang berpikir tidak akan gegabah dalam berucap. Ucapan yang gegabah dan sewiyah-wiyah atau semena-mena, meski mungkin diniatkan untuk bercanda, bisa berbuntut panjang. Buntut panjang itu berkaitan dengan manusia yang juga adalah hewan berpolitik (zoonpoliticon, political animal), hewan yang membangun masyarakat di atas famili-famili menjadi pengelompokan yang impersonal dari kampung dan negara. Manusia berpolitik karena mempunyai bahasa yang memungkinkan dapat berkomunikasi dengan yang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mengenal keberadaan hukum dan keadilan yang harus dijunjung tinggi. Hal itulah yang membedakan manusia dari binatang yang tidak pernah berusaha memikirkan cita-cita keadilan. Kita sebagai manusia mestinya malu atau sekurang-kurangnya tidak bangga disebut, seperti kata Thomas Hobbes, sebagai homo homini lupus. Manusia satu menjadi serigala bagi manusia yang lain. Sifat dan syahwat paling kuat dari manusia adalah nafsu mempertahankan diri. Supaya dapat mempertahankan diri perlu kekuasaan. Padahal, kekuasaan cenderung takut dan curiga. Takut terjungkal sehingga mencurigai siapa pun. Stigma dan Simbol Berbeda dari tikus, babi, monyet, anjing, coro, dan lain-lain binatang yang dianggap, dicap (stigma) rendah dan menjijikkan, ada beberapa hewan yang justru bernasib baik dan mulia dijadikan sebagaimana nama dan simbol kehebatan. Ayam jantan, jago, dijadikan metafora manusia yang diandalkan. Sultan Hasanudin, pahlawan nasional, mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur lantaran keberaniannya melawan penjajah. Raja besar Majapahit bernama Prabu Hayam Wuruk. Hayam wuruk berarti ayam yang terpelajar. Jangan bertanya kapan ayam sekolah. Ayam pun jangan keburu senang dulu, sebab semua bergantung pada nasib dan keberuntungan dari si manusia yang bikin metafora. Ada sebutan ayam sayur untuk menyebut manusia berkemampuan merata dan ayam kampus untuk menyebut mahasiswa yang nyambi jualan daging mentah tak habis-habis, segar, mahal. Lalu, ada nama Patih Gajah Mada. Apabila kita artikan, makna kata 'mada' dalam bahasa Jawa berarti mabuk. Jadi, apakah Gajah Mada adalah Gajah Mabuk? Mabuk yang dimaksudkan tentu bukan lantaran narkoba. Gajah Mada adalah kiasan, yang berarti seseorang yang berkekuatan besar, pemberani, tahan mental, tidak mudah menyerah dan menerabas segala rintangan. Ular juga bernasib unik. Meski berbisa dan mematikan, ular dijadikan simbol dalam jagat kesehatan. Asclepius, menurut mitologi Yunani adalah manusia setengah dewa, putra dewa penyembuhan Apollo dengan seorang ratu manusia bernama Coronis. Asclepius menguasai aspek penyembuhan dari seni pengobatan. Diceritakan ia mampu memulihkan kesehatan orang yang sakit. Bahkan dikisahkan ia juga dapat menghidupkan kembali orang yang telah mati. Asclepius kemudian mendirikan semacam kuil untuk pengobatan yang disebut Asclepions (Asclepleia). Orang-orang pun ke sana untuk berobat kepada Asclepius. Di kuil itu banyak sekali ular yang dipelihara sebagai penghormatan bagi dewa penyembuhan. Ular memiliki kemampuan berganti kulit (mlungsungi), yang dipandang sebagai simbol kelahiran kembali dan pembaruan. Selain itu, bisa ular selain dapat menjadi racun yang juga dianggap dapat menjadi obat yang mujarab. Dalam peribahasa Jawa dikatakan manusia tidak boleh adigang, adigung, adiguna. Adigang adalah sifat yang mengandalkan dan menyombongkan kekuatan badan dan fisik. Adigang diumpamakan seperti sifat kijang, yang bertindakan gesit, lincah, dan lari kencang tak tertandingi. Adigung adalah sifat yang meninggikan pangkat, jabatan, derajat, keluhuran, dan keturunan kebangsawanan. Adigung diumpamakan seperti gajah, yang besarnya tak tertandingi dan tidak pernah kalah dalam suatu aduan. Adiguna adalah sifat yang mengutamakan kepandaian dan akal. Adiguna diumpamakan ular, yang terlihat lemah tetapi membahayakan dan siap menyerang. Kita tak pernah tahu, apa reaksi binatang yang dijadikan objek metafora itu. Yang jelas, siapa pun kita, tentu tak mau dilecehkan. Jangan gegabah dan sewiyah-wiyah! (28) - Sendang Mulyana, dosen sastra dan budaya Universitas Negeri Semarang. **	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

20.

Judul	‘Memahami Jagat Banjir’
Penulis	Sendang Mulyana
Edisi	Minggu (5 Januari 2020)
Inilah masa ketika banjir melanda, hujan-menghujat pun datang bergelombang. Banjir menjadi panggung politik. Semua lupa betapa penting mengedepankan sikap hidup mulat sarira hangrasa wani, berani mawas diri. Pada masa kepemimpinan Orde Baru, ada ungkapan budaya yang terus-menerus dipopulerkan untuk kepentingan komando politik, yakni aja dume, aja kagetan, aja gumunan. Ungkapan itu sejatinya lebih bermakna untuk pengejawantahan keserasian tatanan kehidupan. Bila dikaitkan dengan kedatangan air bah pada permulaan tahun ini, wejangan itu menarik: aja dume punya uang (padahal banyak utang) lantas kemaruk membangun dengan membabati alam. Aja kaget bila banjir datang, sebab alam telah remuk. Aja gumun pada gebyar, sebab bisa ambyar dalam sekejap mata. Banjir kembali mengingatkan kita untuk eling, kita tidak hidup sendiri di dunia ini, tetapi dikelilingi komunitas, masyarakat, dan alam semesta. Manusia merupakan perwujudan kecil dari dunia, miniatur alam semesta. Jagad gumelar sesungguhnya ada di dalam diri manusia. Alam semesta mempunyai pusat-pusat energi, dalam tubuh manusia pun terdapat pusat-pusat energi. Unsur-unsur yang terdapat di dalam alam, ada dalam diri manusia. Zat yang terkandung dalam tubuh manusia berasal dari zat yang terdapat di alam. Karena itulah manusia disebut sebagai alam kecil, jagad cilik, bawana alit, mikrokosmos. Namun, lantaran segala hal yang tampak besar dan beraneka ragam itu dapat masuk dalam diri manusia, hakikatnya manusia lebih besar dari jagat raya. Karena itu, solusi mendasar yang utama dan pertama atas segala bencana berpulang pada keberanian mawas diri, bukan nggoleki salahing liyan, pemimpin, atau sistem. Tentu saja antara jagad cilik dan alam besar terdapat keterkaitan. Alam memengaruhi kehidupan manusia dan kehidupan manusia dengan segenap sepa-terjangnya juga berpengaruh besar terhadap kehidupan alam. Bila manusia bisa menjaga kelangsungan dan kelestarian hidup alam, alam pun memberikan kelestarian hidup bagi manusia. Sebaliknya, manusia juga bisa menjadi penyebab kerusakan, bahkan kemusnahan alam. Sudah kelewat sering didiskusikan, fenomena alam terjadi di luar keteraturan yang telah ditetapkan Kang Murbeng Dumadi. Hal itu disebabkan ulah makhluk yang memiliki budaya, baik budaya material maupun nonmaterial, yaitu manusia. Kebudayaan senantiasa berubah sesuai dengan dinamika berpikir dan aktivitas manusia. Namun, perlu diingat kebudayaan senantiasa berupaya menjadikan kehidupan lebih baik. Kehidupan yang lebih baik tentu kehidupan yang terus-menerus menjaga keselarasan. Perkembangan dunia politik kita telah melahirkan penguasa yang serba instan, ingin memperoleh hasil dengan cara di luar semangat kebudayaan sebagai panglima tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu dilakukan penguasa untuk memenuhi kebutuhan diri dan relasi-relasinya. Biaya politik mahal, yang terpilih bukan satriya pinilih dalam perspektif kultural, melainkan manusia berduit. Berkuasalah jargon uang memang bukan segalanya, melainkan segalanya dapat diperoleh dengan uang. Baru kemarin hiruk-pikuk bencana akibat pembakaran hutan, kini banjir, longsor mengadang. Adanya pemberian izin penebangan hutan yang tidak diikuti reboisasi dan konservasi, serta tak ada kontrol yang ketat. Maka, aja kaget dan gumun, artinya dapat diperkirakan akibat tindakan penguasa itu bencana silih berganti mengintai. Di sisi lain masyarakat yang cinta terhadap lingkungan dan disiplin terhadap peraturan, termasuk kaum intelektual, tidak dapat berbuat banyak, atau malah telah terkooptasi oleh kekuasaan. Perguruan tinggi, misalnya, apakah memiliki kekuasaan dan pengaruh yang kuat atas fenomena itu? Ada ketidakseimbangan antara apa yang dilakukan penguasa terhadap alam dan yang dilakukan intelektual dan masyarakat pencinta lingkungan. Dampak dari ketidakseimbangan itu adalah timbulnya bencana alam. Hukum, undang-undang, peraturan, entah tersampir di mana. Pendidikan Diri Tidak adil bila kita menimpakan kesalahan hanya pada penguasa. Kembali ke perbincangan awal, perlu kita menjadi diri yang bisa mulat sasira hangrasa wani. Diri ideal seperti itu terlahir dari pendidikan, panggulawenthahan, pembelajaran. Maka, betapa krusial pendidikan mentalitas, pendidikan yang menempa anak manusia untuk berani mawas diri, pendidikan yang tidak mendewakan link and match. Pendidikan yang membudayakan. Kebudayaan adalah masalah belajar. Proses edukasi pada jagad cilik untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan mudah tentang betapa penting kelestarian alam bagi keberlangsungan hidup bersama. Hal itu tentu jauh lebih signifikan ketimbang sekadar melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja dalam proses penghijauan hutan kembali, lebih-lebih hanya untuk kepentingan pencitraan. Atau, memperbanyak undang-undang yang ternyata melempem. Katanya tanpa pandang bulu, tetapi yang berbulu banyak dan indah ternyata dipandang. Pendidikan yang memahami eksistensi jagad cilik dan jagad gedhe merupakan upaya mendekatkan manusia kepada kenyataan untuk dapat berpikir tentang hidup dan menghargai kehidupan ini. Manusia paham akan diri dan makna hidupnya, yang tidak menyia-nyiakan hidup untuk berbuat destruktif. Manusia yang tidak membuat kesalahan dan menghancurkan lingkungan. Sebab, bila lingkungan hidup rusak, rusak pula kehidupan dalam dirinya sendiri. Pendidikan mawas diri adalah pendidikan yang mengamati kehidupan dengan teliti dan telaten (ulet), cermat menafsir dan mengurai tanda-tanda zaman, tanda-tanda alam, wewaler, pepali, simbol-simbol budaya, menjadi tatag, teteg, dan tangguh sehingga titis mempergunakan kecerdasan dan kecerdikan. Ranggawarsita mengajak kita tansah eling, dalam balutan tembang Asmaradana, Serat Witaradya: Yogya mituhua sami/ing warah pepemutingwang/aywa ana ngliwawake/mangkya padha marenana/anerak ila-ila/kang kalebu dadi petung/sangkaning papa sangsara. Memahami jagat banjir saat ini sebenarnya adalah mengejek kewaspadaan batin kita. Untuk mengetahui apa pun yang bakal terjadi, weruh sadurunge winarah, sejatinya bukan hal mewah bila kita mendidik diri menjadi pribadi yang mawas diri. Ugal-ugalan? Banjir wirang!***	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

21.

Judul	‘Wabah versus Power Budaya’
Penulis	Sendang Mulyana
Edisi	Minggu (5 April 2020)
Berhadapan dengan kekuatan wabah korona yang tan kasatmata perlu ekstraswapa. Selain secara ilmiah wujud virus itu nyata adanya, kita perlu berhadapan pula dengan banyak orang yang memiliki imajinasi masing-masing atas eksistensi virus itu. Padahal, kekuatan dan dampak imajinasi lebih besar ketimbang realitas. Kekhawatiran terjadi di mana-mana. Wabah global pada era global. Bahkan, para penyelenggara negara di seluruh dunia yang meneriakkan jangan khawatir kepada rakyat, sejatinya sedang mengekspresikan perasaan dan kekhawatirannya. Kekhawatiran yang bertumpuk-tumpuk saling-silang tak keruan. Khawatir ekonomi morat-marit, rencana besar untuk membangun mercusuar batal, keruntuhan kewibawaan, lawan politik cari panggung, konspirasi mengintai, disintegrasi dan sebagainya. Aneka rupa sikap rakyat menghadapi wabah tersebut. Sebagian takut mati, khawatir luar biasa, sampai-sampai curiga pada jenazah, hingga hilang rasa kemanusiaan, menolak suatu wilayah dijadikan tempat pemakaman. Celaknya, masalah itu tidak ditegesi oleh pemerintah, malah menurutinya kenaikan mereka dengan memindahkan makam atau bikin pemakaman khusus yang justru secara tersirat mendukung kenaikan. Bayangkan, bila di kemudian hari pemakaman khusus itu jadi mitos yang menakutkan! Di sisi lain, ada kepasrahan luar biasa, bahkan berkesan tak takut pada wabah, lantaran hidup-mati di tangan Gusti Allah. Kuncenana, gedhongana, wong mati mangsa wurunga. Mau ngumpet di mana pun, dikunci di gedung atau hotel mewah disertai ratusan pengawal dan puluhan selir, diobati dengan vaksin canggih sekalipun, diisolasi dengan cara apa pun, bila saat kematian itu tiba, tak akan batal. Tentu yang dimaksudkan bukan hidup yang fatalistik, pemaknaan sempit pasrah-sumarah, saderma nglakoni, melainkan kesadaran emosional dan spiritual yang tinggi dalam laku hidup berbudaya. Maka, kita dapati ekspresi budaya mereka tetap berusaha kebal dengan makan sayur lodeh tujuh rupa untuk menangkal wabah. Tujuh atau pitu dalam bahasa Jawa berarti pitulungan memohon bantuan. Sayuran tujuh rupa itu berupa kluwih, labu parang, kacang panjang, daun melinjo, terong, kulit buah melinjo, dan tempe. Dengan othakathuk gathuk pemaknaan, tak perlu mendiskreditkan mereka dengan hidup dalam belunggu alam mitos. Lebih baik bersama memuarakan maknanya betapa penting makan makanan bergizi untuk menjaga kekebalan tubuh. Masalahnya, dari mana makanan bergizi itu diperoleh, sedangkan hidup masih terjatuh kemiskinan? Itu yang penting diwujudkan, sehingga rakyat tidak meluahkan ungkapan lebih takut mati kaliren ketimbang takut korona. Ada pula ekspresi budaya caos dhahar. Ubarampnya adalah bubur ketan hitam dengan bumbu sekadar garam. Secara ilmiah mungkin dapat ditelusuri bahwa ketan hitam dapat menjaga daya tahan tubuh, membantu proses pembentukan sel dan jaringan mencegah anemia, dan sebagainya. Namun, lebih dari itu, intinya tentu laku sipiritual: bersedekah sebagai cara ampuh melawan wabah. Yang kaya bersedekahlah supaya yang lemah, miskin, menjadi kuat, beriman bagus sehingga kebal terhadap wabah. Jangan malah dikatakan si miskin penyebar penyakit! Ketan menjadi bahasa simbolik tansah rerakatan, memupuk kepedulian. Ireng, hitam, melambangkan keteguhan prinsip. Lambaran sedekah mestinya ikhlas, bukan riya atau pencitraan. Ikhlas menjadi puncak spiritual pengabdian pada Tuhan. Alih-alih menumpuk-numpuk persediaan, panic buying, fenomena saat ini justru menjadi ladang bagi kaum beriman dan hartawan menanam kebajikan. Kekuatan Putih Kini, kita butuh para pemimpin yang dapat menyikapi wabah dan kompleksitas permasalahan yang melingkupi. Perlu pemimpin-pemimpin berjaya kesatria, ahli, cerdik, dan bijaksana. Pemimpin-pemimpin yang wira, wegig, wiled, dan wicaksana. Kita tidak butuh pemimpin-pemimpin yang saling curiga, saling mengintai untuk menjatuhkan, sementara rakyat menekuri nasib masing-masing. Dalam Bharatayuda, ada panglima hebat penyebar maut. Salya, yang berdiri di pihak Kurawa. Begitu melihat Salya turun ke medan laga. Kresna waspada bahwa Salya adalah lawan yang berbahaya Pandawa diwewanti supaya jangan gegabah. Bima dengan sombong berkata, Salya sudah tua dan kesaktiannya berkurang, bisa dia kalahkan Kresna membuka tabir rahasia kepada Pandawa bahwa Salya memiliki Aji Candra Binawa yang sangat berbahaya dan tidak boleh dianggap remeh. Perang berkecamuk, Bima segera mengkasak tentara Kurawa. Pada mulanya, Salya kewalahan melawan kekuatan Bima, tetapi segera mateg aji memanggil Candra Birawa. Bima pun bertarung melawan Candra Birawa. Kesombongan Bima runtuh, sementara Candra Birawa tetap mengganas. Arjuna yang melihat kakaknya dalam bahaya, segera melepas panah. Sayang, panah Arjuna melukai Candra Birawa, dan setiap tetes darahnya menjadi Candra Birawa baru. Bima makin kewalahan melawan ratusan, ribuan, laksaan Candra Birawa, dan barisan pasukan Pandawa juga makin remuk. Melihat kejadian itu, Kresna segera mendatangi Arjuna dan mencegahnya memanah Candra Birawa. Kresna bergerak ke garis belakang untuk bertemu Yudistira. Kresna berkata, Yudistira harus maju ke medan perang untuk mengalahkan Salya demi kemenangan Pandawa, sebab hanya Yudistiralah yang bisa mengalahkan Salya sebagai titisan Betara Dharma. Yudistira yang dikusiri Nakula segera memasuki medan perang dan bertemu langsung dengan Salya. Yudistira segera memohon ampun kepada Salya atas kelancangannya berani melawan pepunden, orang yang semestinya dihormati dan dimuliakan. Salya menjawab, di medan perang tidak perlu merasa lancang karena itu merupakan tugas Yudistira sebagai raja untuk melindungi rakyat. Yudistira pun menjawab, seumur hidup tidak bisa melukai orang. Dia rela mengorbankan diri, asalkan Candra Birawa ditarik kembali ke dalam tubuh Prabu Salya. Sayang, Candra Birawa tidak bisa ditarik kembali sebelum tugasnya selesai, yaitu memusnahkan tentara Pandawa. Yudistira dengan berat hati mengambil busur dan panah. Namun Yudistira tidak berani mengarahkan panah kepada Salya. Panahnya kemudian dia arahkan ke bawah. Dengan ajaib, panah Yudistira yang menyentuh tanah langsung memantul dan mengenai Salya. Salya pun gugur. Yudistira adalah raja putih, raja mutmainah. Raja bercahaya putih adalah raja yang berwatak sabar, welas asih, tulus dan suci. Kita tak butuh raja amarah. yang bercahaya merah, berwatak serakah dan panasten. Kita tak sudi raja aluamah, yang berwarna hitam, rakus, dan pelupa. Kita emoh raja supiyah, yang bercahaya kuning, yang memuja kesenangan, sikapnya selalu berubah, tidak dapat menepati janji. Semoga wabah segera menyingkir ke dasar samudra.	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

22.

Judul	'Harta atau Nyawa, <i>Mukti</i> atau Mati'
Penulis	Sendang Mulyana
Edisi	Minggu (2 Agustus 2020)
Dalam hidup kita kadang menghadapi situasi dan kondisi tawar-menawar. Tak gampang membuat keputusan. Karena itulah, perlu sikap hidup <i>eling lan waspada</i>. Kehati-hatian, kecermatan, kewaspadaan menjadi penting, sebab hakikatnya adakah yang berani atau bisa menawar hidup? Dalam pementasan ketoprak, ada adegan perampok yang mengultimatum calon mangsa, sering mengungkapkan pernyataan stereotip: <i>bandha</i> apa nyawa (harta atau nyawa). Ia berikan pilihan dengan menggertak. Ia yakin benar dapat memenangi pertarungan. Ia lecehkan lawan sebagai orang tak berdaya. Bila ingin selamat, <i>eman</i> pada nyawanya, orang itu harus menyerahkan bawaan, harta. Sebaliknya, orang itu akan mati bila <i>ngrungkebi</i> hartanya. Yang berkecamuk dalam peristiwa adegan itu tentu bukan sekadar orang rela kehilangan harta. Ada persoalan harga diri, kehormatan, keikhlasan, keberanian melawan kejahatan, kepongahan, dan kesewenang-wenangan. Dan, perlu disadari apa pun pilihannya akan mengakibatkan konflik. Konflik adalah roh cerita. Kita tidak bisa dengan ringan berkata dunia memang sudah sewajarnya berisi cerita. Kecuali, bila seseorang telah berani menarik diri dari ingar-bingar kehidupan dan menahbiskan diri sebagai pengamat kehidupan. Wabah korona saat ini bisa dipandang sebagai tak ubahnya perampok yang mengultimatum mangsa. Eksistensinya yang secara awam dipandang <i>tan</i> kasat mata justru menyiratkan kekuatan yang nggegirisi. Bisa jadi ia sakti mandraguna. Membabat cepat dan tiba-tiba. Atau, bisa juga sebaliknya, seperti yang memandang wabah ini sebagai proyek konspirasi. Kesaktiannya tak seberapa, tetapi dibesarkan sedemikian rupa laksana <i>gertak sambal</i> si perampok. Bayangkan, dengan ekspresi kegarangan perampok bernama korona itu menggertak, nyawa atau ekonomi Urusannya tentu bukan sekadar memilih. Ada harga yang harus dibayar. Ada konsekuensi atas pilihan. Pemilih ekonomi akan bertanya secara retorik, untuk apa takut pada korona bila akhinya pelan-pelan disergap kematian lantaran <i>kaliren</i>? Sikap hidup <i>eling lan waspada</i> mendorong kita mengambil jalan tengah: menghindarkan diri dari sikap <i>kumawani</i> (<i>kuwanen</i>, sok berani), lebih-lebih <i>kumalungkung</i>, keyakinan berlebihan tanpa kapital memadai, air beriak tanda tak dalam. Kecuali, kita sudah sampai pada titik tertentu yang perlu bersikap <i>yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani</i>. Kita sering digoda pertanyaan teka-teki yang menggelitik: makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Jawaban yang mengemuka umumnya adalah makan untuk hidup, meskipun kadang muncul pula pemikiran dekonstruktif hidup untuk makan, sebab yang perlu makan bukan hanya jasmani, melainkan juga rohani. Bila jasmani dan rohani, fisik dan mental, raga dan jiwa cukup makan, hidup akan bahagia dan sejahtera. Dibolak-balik sebenarnya sama saja, yakni bermuara pada pencapaian tujuan hidup. Apakah pilihan <i>bandha</i>, ekonomi, makan, semata-mata untuk bertahan hidup atau ada target lain yang acap kali berbau hedonistik dan kapitalistik? Kita perlu introspeksi dengan meninjau kembali hakikat hidup untuk menggapai apa? Indikatornya saat ini kita sudah tergoda gaya hidup berwisata sebagai kebutuhan, mempersiapkan diri untuk menjaga eksistensi dan berkompetisi pascapandemi, dan sebagainya. Tidak salah. Akan tetapi, ketika harus menantang wabah, <i>menang durung karuwan</i>, apakah kita tidak lebih baik mengedepankan sikap hidup <i>wani ngalah luhur wekasane</i>? Kita tetap mencari celah menyiasati kondisi saat ini, dengan bahasa <i>keren</i> menaati protokol kesehatan dengan sikap hidup <i>samadya</i>, <i>sacukupe</i>, mengesampingkan dulu gaya hidup yang kurang perlu. Mimpi indah hidup mewah ketika wabah hanya patut dialami orang yang sakit parah! Maka, atas gertakan wabah yang menjelma perampok itu dengan tenang kita tetapkan pilihan pada nyawa. Semua menegakkan kedisiplinan. Jangan hanya rakyat yang diteriaki agar disiplin. Penyelenggara negara harus pula disiplin. Disiplin, dalam penggunaan anggaran, jangan korupsi agar dapat meyakinkan rakyat tak akan mati <i>kaliren</i>. Jangan takut akan kedatangan krisis, resesi, sebab bumi kita <i>gemah ripah loh jinawi</i>. Urip Mukti Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi begitu pesat saat ini melahirkan semangat hanya negara cepat yang jadi pemenang. Di satu sisi rakyat perlu disabarkan dalam ayunan <i>urip prasaja</i>, di sisi lain kepemimpinan progresif perlu hadir. Dengan landasan sikap hidup <i>eling lan waspada</i>, progresivitas kepemimpinan dapat dikawinkan dengan <i>wani ngalah luhur wekasane</i>. Jadi, tak harus dibenturkan, lebih-lebih untuk kepentingan politik praktis dan pendiskreditan. <i>Tatag, teteg, tangguh</i>, dan <i>tanggon</i> adalah baju kepemimpinan. Pemimpin boleh menangis, tetapi tangisan itu perlu dikelola dengan baik. Bukan untuk menjual sentimentalisme keteraniayaan, melainkan ekspresi kemanusiaan. Pemimpin <i>tatag</i> adalah pemimpin yang tegar menghadapi segala persoalan, tidak gampang dipengaruhi oleh hal-hal sentimental. Pemimpin <i>teteg</i> itu tega, bahkan mungkin misalnya harus bersinggungan dengan kepentingan diri dan keluarga. Ia lurus <i>lan leres</i>, <i>istikamah</i>, tidak gampang tergoda. Pemimpin tangguh adalah pemimpin yang kuat menghadapi segala macam tantangan dan rintangan, tak gampang menyerah dalam memburu kemenangan, bekerja keras dan cerdas dalam mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Pemimpin harus <i>tanggon</i>, yakni bersedia menjadi wadah terbaik dalam mengolah dan menyelesaikan persoalan. Tidak gampang melemparkan masalah pada orang lain, tidak ringan menyalahkan liyan. Kepemimpinan yang <i>teteg</i>, <i>tatag</i>, tangguh, dan <i>tanggon</i> akan berpengaruh besar terhadap pembangunan mentalitas bawahan dan rakyat. Heroisitas, keagungan, jangan dibangun dengan fondasi <i>dimesakke</i> atau mengandalkan pencitraan jadi korban, atau mengabarkan kepada khalayak sebagai terzalimi untuk alibi kerja yang tak tuntas. Mengherankan sebenarnya di tengah wabah kita akan menggelar pesta pilkada. Bukankah dana besar itu bisa untuk mengentaskan nasib rakyat yang dirundung wabah? Ya, prasangka baik kita tentu semoga terpilih pemimpin <i>tatag</i>, <i>teteg</i>, tangguh, dan <i>tanggon</i>. Namun, yang perlu diingat, dalam medan pertarungan politik kekuasaan, ada semboyan <i>mukti</i> atau mati. Sayang, <i>mukti</i> itu mengarah ke pemenang kekuasaan. Jangan sampai sindiran pedas Pramoedya Ananta Toer terjadi: kekuasaan memang nikmat. Dan, kenikmatan tak boleh dimiliki oleh orang kecil!****	

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

E. BIODATA PENULIS



CURRICULUM VITAE IDENTITAS DIRI

Nama	: Rachmi Kurnia Siregar
NIDN	: 0328016904
NIK/NIP	: 080133
Tempat dan Tanggal Lahir	: Jakarta, 28 Januari 1969
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Golongan/Pangkat	: III C/Lektor
Perguruan Tinggi	: Universitas Budi Luhur
Alamat Rumah	: Komplek Barata- Jl. Barata Tama I No 89 Karang Tengah, Ciledug, Tangerang
Telepon Selular	: 081288777675
Alamat Email	: rachmi.kurnia@budiluhur.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
2026	Doktor	Universitas Padjadjaran	Ilmu Komunikasi
2015	Magister	Universitas Budi Luhur	Marketing Communication
1993	Sarjana	Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta	Ilmu Komunikasi/Jurnalistik

PENGALAMAN PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENULISAN BUKU

Tahun	Judul Penelitian/Judul Pengabdian Masyarakat/Buku	Ketua/Anggota
2023	Critical Discourse Analysis on the Podcast "Putusan MK: Palu Hakim Patah Berkeping"	Anggota
2023	Wacana Kesetaraan Gender dalam Keluarga pada Film Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini : Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough (Discourse in Gender Equality in the Family in the Film 'Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini': Critical Discourse Analysis of Norman Fairclough)	Anggota
2023	Literasi Media Online pada Kalangan Remaja Untuk	Anggota

	Meningkatkan Pemahaman Etika Berkomunikasi di Media Sosial	
2022	KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU MEDIA SIBER LOKAL DI ERA DIGITAL: STUDI KASUS WOWBABEL.COM	Ketua/Tunggal
2022	Persoalan Kaderisasi Tengku Inong Sebagai Role Model dalam Tradisi Masyarakat-Gampong di Aceh dalam Buku Bunga Rampai Riset Komunikasi Edisi 5	Buku/Anggota
2022	Dosen Favorit dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur	
2019	Pengembangan Model Komunikasi Organisasi Tata Kelola Anggaran Untuk Meminimalisir Kasus Korupsi Dana Desa di Pemerintah Daerah	Ketua-Hibah Dikti Untuk Penelitian Dosen Pemula (PDP)
2018	PKM Jurnalisme Warga 'HOT' (Hiburan, Objektif & Terpercaya) Bagi Kelompok Karang Taruna di Jakarta Selatan, DKI Jakarta	Ketua-Hibah Dikti Untuk Program Kemitraan Masyarakat (PKM)
2018	<i>The Innovation Adoption of Budget Festival Management Communication Policy in Karanganyar Regency, Central Java</i>	Ketua
2018	Jurnalisme Warga "HOT" (Hiburan, Objektif Dan Terpercaya) Teori Dan Praktik	Buku/Ketua Penulis
2018	Dosen Terbaik Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur pada Semester Gasal 2018/2019	
2018	Teungku Inong sebagai Role Model dalam Pengembangan Masyarakat Gampong	Anggota
2017	KOMUNIKASI ORGANISASI TATA KELOLA ANGGARAN DAERAH (Studi Kasus Festival Anggaran III-2017 Pada Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah)	Ketua- Hibah Dikti untuk Penelitian Dosen Pemula

PENGALAMAN PEKERJAAN

Tahun	Perusahaan/Institusi	Jabatan
1994-2020	Harian Pos Kota	Reporter
2008-NOW	Universitas Budi Luhur	Dosen Tetap

PENGALAMAN ORGANISASI/SERTIFIKASI

Tahun	Organisasi/Sertifikasi	Jabatan
2022-2025	Persatuan Dosen Republik Indonesia	Anggota
2021	Ujian Kompetensi Public Relation Officer (PRO)	Sertifikat Kompetensi
2019	Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia	Anggota
2019	Asosiasi Dosen Indonesia	Anggota
2018	Panitia Pemilihan Dewan Kota Jakarta Selatan Tahun 2018	Anggota
2013	Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) oleh Persatuan Wartawan Indonesia	Sertifikat Kompetensi
1994-2020	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	Anggota